



BUPATI SITUBONDO **PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Pemerintahan Daerah dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590)
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D)
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahunan.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 3

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman dalam perumusan perencanaan program dan kegiatan prioritas tahun 2023.

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB VII : PENUTUP

(2) Uraian secara rincian RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai :

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 6

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, RKPD digunakan:

- a. Pemerintah Daerah sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara dengan DPRD;
- b. Perangkat Daerah dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 04 Juli 2022

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 04 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 50

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009



PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO

SITUBONDO BERJAYA

PAKEM

Pelayanan Aktif, Kreatif, Efektif, Efisien dan Memuaskan

pendopo argo situbondo

GRAHA AMUKTI PRAJA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Rancangan Akhir

**RKPD
2023**



BAB 2

Gambaran Umum Kondisi Daerah

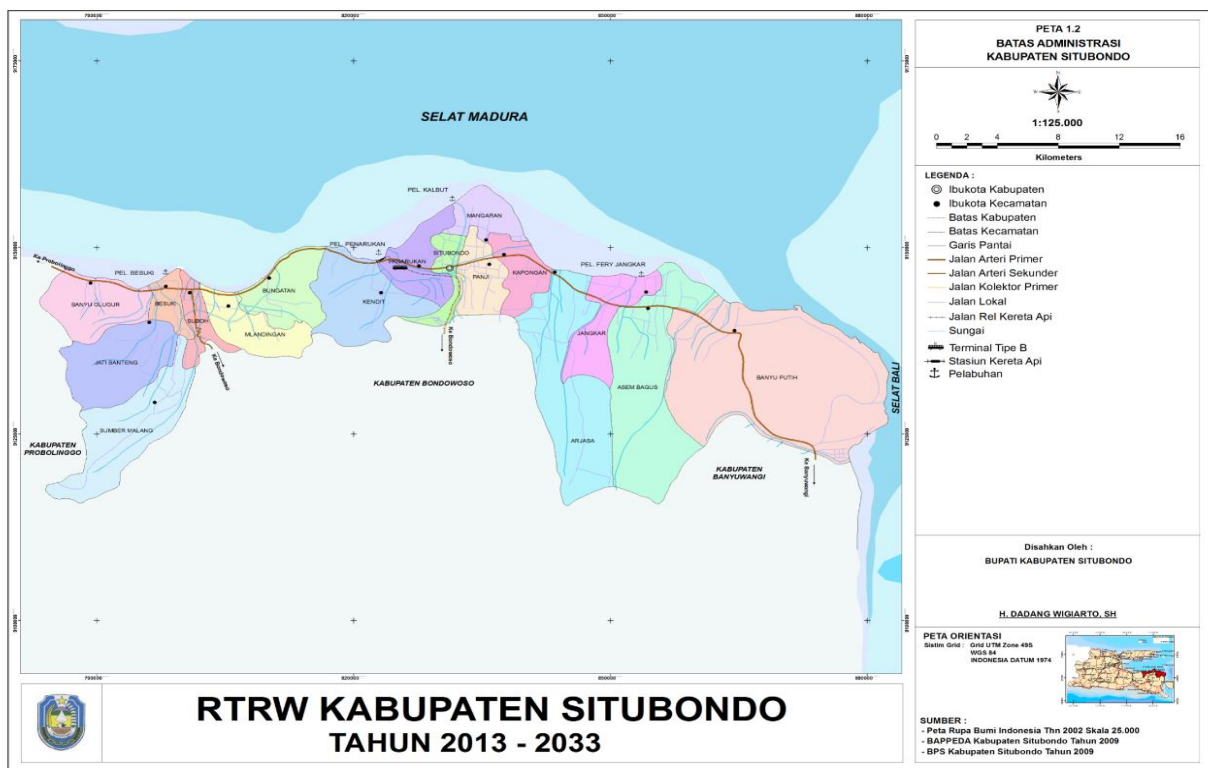
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Daerah Wisata Pantai Pasir Putih adalah sebutan yang cukup terkenal untuk Kabupaten Situbondo yang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang. Kabupaten Situbondo memiliki Luas 1.638,50 km² atau 163.850 Ha, bentuknya memanjang dari Barat ke Timur sepanjang Pantai Selat Madura ± 14z

0 Km dengan lebar rata-rata ± 11 Km. Kabupaten Situbondo terletak ujung Timur pulau Jawa bagian Utara dengan posisi di antara 7° 35' - 7° 44' Lintangselatan dan 113° 30' - 114° 42' Bujur Timur.



Gambar 2.1: Peta Kabupaten Situbondo

Sumber: Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

Luas wilayah menurut Kecamatan, terluas adalah Kecamatan Banyuputih 481,67 km² disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km. Batas-batas administrasi Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Selat Madura
- 2) Sebelah Timur : Selat Bali
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Probolinggo



Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 17 Kecamatan yang terdiri dari 132 Desa, 4 Kelurahan serta 683 Dusun. Luas wilayah menurut Kecamatan, terluas adalah Kecamatan Banyuputih 481,67 km² disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km². Pembagian administrasi dan luas Kabupaten Situbondo dapat terlihat pada Tabel yang tertera berikut:

Tabel 2.1: Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Situbondo

No	Kecamatan	Jumlah					Luas (Ha)
		Desa	Kelurahan	Dusun/ Lingkungan	RW	RT	
1	Sumbermalang	9	-	32	58	161	12.947
2	Jatibanteng	8	-	35	86	192	6.608
3	Banyuglugur	7	-	28	39	107	7.266
4	Besuki	10	-	45	113	303	2.641
5	Suboh	8	-	31	62	169	3.084
6	Mlandingan	7	-	34	50	129	3.961
7	Bungatan	7	-	39	58	140	6.607
8	Kendit	7	-	37	94	193	11.414
9	Panarukan	8	-	52	84	245	5.438
10	Situbondo	4	2	27	66	242	2.781
11	Panji	10	2	53	90	270	4.699
12	Mangaran	6	-	45	78	170	3.570
13	Kapongan	10	-	55	98	252	4.455
14	Arjasa	8	-	59	90	214	21.638
15	Jangkar	8	-	44	70	179	6.700
16	Asembagus	10	-	36	66	193	11.874
17	Banyuputih	5	-	30	56	175	48.167
Jumlah		132	4	682	1.265	3.343	163.850

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022, Kecamatan Dalam Angka 2022

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 17 kecamatan yang ada, terdapat dua kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Situbondo dengan 2 kelurahan dan Kecamatan Panji dengan 2 Kelurahan. Empat kecamatan lain dengan jumlah desa terbanyak antara lain Kecamatan Besuki terdiri dari 10 Desa, Kecamatan Panji terdiri dari 10 Desa, Kecamatan Kapongan terdiri dari 10 Desa, dan Kecamatan Asembagus terdiri dari 10 Desa. Terdapat perubahan berdasarkan data pembagian wilayah tahun 2022, jumlah RW mengalami peningkatan sedangkan jumlah RT mengalami penurunan, jumlah RW pada tahun 2022 sebanyak 1.265, jumlah RT 3.343 sedangkan pada tahun 2020 jumlah RW 1.259 dan jumlah RT 3.351. pada jumlah dusun juga mengalami perubahan dimana tahun 2022 terdapat 682 dusun sedangkan pada tahun 2020 menjadi 674 dusun.



2.1.1.2. Kondisi Topografi

Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian 0 – 1.250 m di atas permukaan air laut. Keadaan tanah menurut teksturnya, pada umumnya tergolong sedang 96,26 %, tergolong halus 2,75 % dan tergolong kasar 0,99 %. Drainase tanah tergolong tidak tergenang 99,42 %, kadang-kadang tergenang 0,05 % dan selalu tergenang 0,53 %. Jenis tanah daerah ini berjenis antara lain alluvial. Regosol, gleysol, renzine, grumosol, mediteran, latosol, serta andosol. Ditinjau dari pola penggunaan tanahnya, diketahui penggunaan tanah terbesar adalah untuk hutan yaitu seluas 73.407,5 Ha (44,80%), berikutnya adalah untuk sawah eksisting yaitu seluas 36.011,29 Ha (18,53%), diikuti dengan pertanian tanah kering seluas 27.962,13 Ha (17,07).

Secara umum Kabupaten Situbondo merupakan dataran rendah, dengan ketinggian 0-1.250 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan antara 0°-45°, dan memiliki tanah kering yang tererosi seluas 42.804 Ha (26,12%). Sebagian luas tanah di Kabupaten Situbondo mempunyai drainase yang baik yaitu seluas 1.629,03 Km² (99,42%) tidak pernah tergenang, sedang sisanya seluas 0,78 Km² (0,05%) kadang-kadang tergenang dan seluas 8,69 Km² (0,53%) selalu tergenang.

Ditinjau dari potensi dan kondisi wilayahnya, Kabupaten Situbondo dapat dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu: wilayah utara yang merupakan pantai dan laut yang sangat potensial untuk pengembangan komoditi perikanan, baik budi daya maupun penangkapan ikan; wilayah tengah yang bertopografi datar dan mempunyai potensi untuk pertanian; dan wilayah selatan yang bertopografi miring yang mempunyai potensi untuk tanaman perkebunan dan kehutanan.

2.1.1.3. Kondisi Geologi

Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian 0 – 1.250 m diatas permukaan air laut. Tekstur tanah pada umumnya tergolong sedang 96,26%, tergolong halus 2,75% dan kasar 0,99%. Drainase tanah tergolong tidak tergenang 99,42% kadang-kadang tergenang 0,05% dan selalu tergenang 0,53%. Jenis tanah daerah ini berjenis antara lain alluvial, regosol, gleysol, renzine, grumosol, mediteran, latosol serta andosol. Struktur Geologi Kabupaten Situbondo berada pada Aluvium luasnya 48.983 Ha, Vulkan Zaman Quarter Muda luasnya 19.787 Ha, Vulkan Zaman Quarter Tua luasnya 72.752 Ha, dan Leusita luasnya 22.328 Ha.

2.1.1.4. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Situbondo yang di lewati hulu sungai sampean berada sekitar 800 meter di atas permukaan air laut (mdpl), sedangkan muaranya di 3 mdpl. Dengan panjang sungai 72 kilometer dan DAS sampean seluas 1.347 kilometer persegi mencakup wilayah Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Daerah hulu berada di kompleks Gunung Argopuro dan kompleks Gunung Raung Kabupaten Situbondo. Adapun muaranya berada di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

2.1.1.5. **Klimatologi**

Kondisi iklim di Kabupaten Situbondo apabila ditinjau dari kondisi curah hujan, rata-rata per tahun 994 – 1.503 mm. Pada tahun 2021 di Kabupaten Situbondo curah hujan maksimum mencapai 13.828 mm yang terjadi di bulan Januari. Adapun Kondisi klimatologi per bulan secara rinci, sebagaimana tabel berikut:

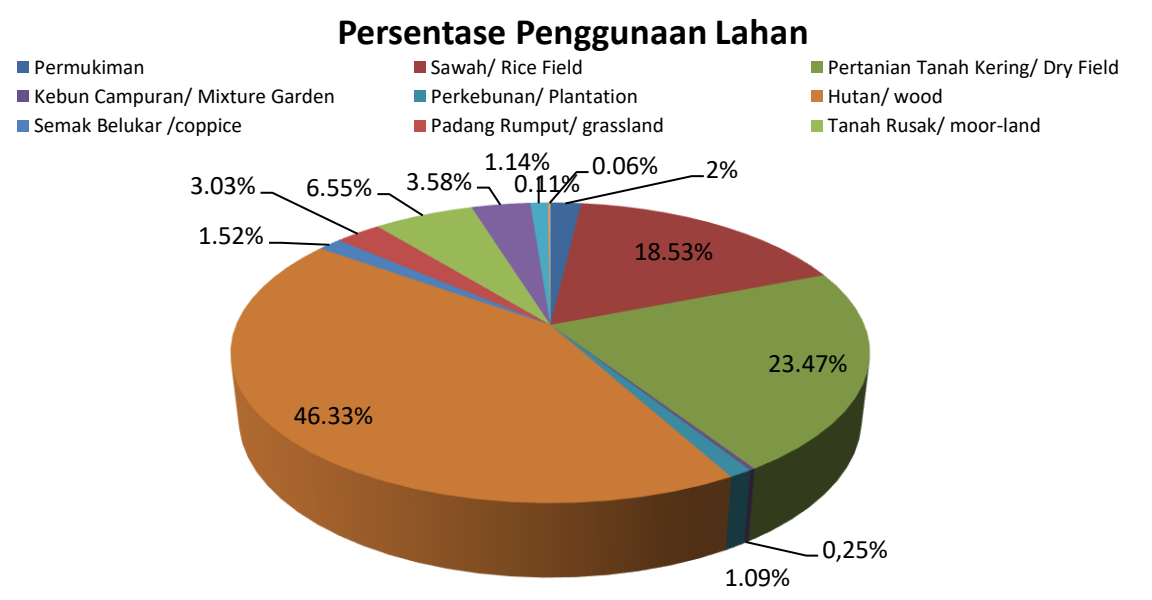
Tabel 2.2: Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, Rata - Rata Hujan dan Hujan Maksimum Bulanan, 2021

Bulan/ Month	Curah Hujan/ Rainfall	Hari Hujan/ Rainy Days	Rata-Rata Hujan/ Rain Average	Maksimum / Maximum
Januari / January	10568	557	341	112
Februari / February	9512	681	323	117
Maret / March	6221	457	119	98
April / April	5203	367	168	132
Mei / May	4637	218	146	154
Juni / June	112	17	4	34
Juli / July	373	42	12	31
Agustus / August	1451	51	47	71
September / September	90	21	3	14
Oktober / October	1157	119	37	80
November / November	4676	295	144	122
Desember / December	13828	782	423	172

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022, Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2022

2.1.1.6. **Penggunaan Lahan**

Luas wilayah Kabupaten Situbondo sekitar 163.850 ha. Sebagian besar wilayah Kabupaten Situbondo merupakan daerah kawasan hutan. Jika ditinjau dari pola penggunaan tanahnya penggunaan lahan terbesar adalah untuk hutan yaitu seluas 73.994,90 Ha (46,33%), terbesar kedua adalah untuk pertanian tanah kering yaitu seluas 37.480,59 Ha (23,47%), selanjutnya digunakan sebagai sawah seluas 34.062 Ha (18,53%). Kawasan terbangun (permukiman) memiliki luas keseluruhan mencapai 3.285,08 Ha atau sekitar 2% dari luas Kabupaten Situbondo. Hal ini menunjukkan bahwasanya Kabupaten Situbondo masih sangat berpotensi bagi pengembangan lahan yang tersedia untuk berbagai kegiatan investasi.



Gambar 2.2: Penggunaan Lahan Kabupaten Situbondo

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2022



2.1.1.7. **Potensi Pengembangan Wilayah**

2.1.1.7.1. **Potensi Pertanian**

Kawasan pertanian untuk tanaman pangan merupakan kawasan yang memberikan kontribusi terbesar ditinjau dari sektor pertanian. Tanaman pangan yang mendominasi seluruh Kabupaten Situbondo, antara lain padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, dan kedele. Pada dasarnya persebaran produksi tanaman pangan di Kabupaten Situbondo tersebar secara merata di seluruh wilayah. Berdasarkan analisa produktifitas tanaman pangan yang paling menonjol adalah produksi komoditas padi dimana mengalami kenaikan pada setiap tahun namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 5,98 ton per hektar sehingga secara trend pada lima tahun terakhir masih mengalami kenaikan. Sedangkan produktifitas komoditas jagung terus meningkat dari tahun 2016 sebesar 4,92 ton per hektar hingga 2019 tercatat sebesar 5,19 ton per hektar.

Tabel 2.3: Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2017-2021

KOMODITAS	TAHUN	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)
Padi	2017	313.826,00	5.10
	2018	334.647,00	5.68
	2019	305.041,00	5.74
	2020	159.928,19	7,04
	2021	157.384,58	5,98
Jagung	2017	248.467,00	5,00
	2018	255.920,00	5,15
	2019	264.118,18	5,19
	2020	277.520,00	n/a
	2021	241.091,00	n/a
Kacang Tanah	2017	636,00	1,25
	2018	424,00	1,10
	2019	369,00	1,30
	2020	258,00	n/a
	2021	585,00	1,32

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2019, 2021 dan 2022

Komoditi tanaman hortikultura khususnya buah-buah berdasarkan kelas kesesuaian lahan termasuk dalam kelas S1 dan bahkan S2 dengan faktor pembatas ketersediaan air khususnya curah hujan, jumlah curah hujan yang optimum. Terjadi kenaikan produksi pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 pada beberapa Komoditas Hortikultura di Kabupaten Situbondo baik komoditas cabai rawit, cabai besar, bawang merah dan Mangga. Selain itu dengan lahan pertanian hortikultura di Kabupaten Situbondo seluas 43.674 Ha.

Tabel 2.4: Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Tahun 2017 - 2021

KOMODITAS	TAHUN	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)
Cabai Rawit	2017	9.620,60	6,15
	2018	14.767,40	6,45
	2019	8.592,00	2,86
	2020	14.895,20	5,48
	2021	20.714,00	4,70



KOMODITAS	TAHUN	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)
Cabai Besar	2017	791,20	4,44
	2018	481,10	3,36
	2019	345,90	2,70
	2020	353,80	3,43
	2021	549,10	3,80
Bawang Merah	2017	3.153,90	7,83
	2018	2.425,10	7,95
	2019	2.160,10	7,77
	2020	3.587,30	8,28
	2021	5,411.80	8,48
Mangga	2017	16.530,60	n/a
	2018	15.851,50	n/a
	2019	23.512,00	6,80
	2020	27.682,00	n/a
	2021	30.942,40	n/a

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo

2.1.1.7.2. Potensi Perkebunan

Kawasan perkebunan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Situbondo adalah komoditi kelapa, kopi, tebu, tembakau, kapok, kapas, asam jawa, siwalan, cengkeh, jembu mete, pinang. Tanaman perkebunan pada dasarnya dapat dibedakan dalam tanaman semusim (*season plant*) dan tanaman tahunan (*annual plant*). Kawasan perkebunan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Situbondo seluas 1.780,26 hektar atau sekitar 1,09 % dari luas Kabupaten Situbondo. Komoditi perkebunan di Kabupaten Situbondo meliputi:

- a. Komoditi kelapa, pinang, tebu, kopi robusta, kopi arabika, dan cengkeh berada di Kecamatan: Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Panarukan, Situbondo, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih.
- b. Komoditi kapuk randu berada di Kecamatan: Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Situbondo, Panji, Jangkar, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih.
- c. Komoditi jambu mente berada di Kecamatan: Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Panarukan, Situbondo, Mangaran, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih.
- d. Komoditi tembakau berada di Kecamatan: Banyuglugur, Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Arjasa, Jangkar, Asembagus dan Banyuputih.

Tabel 2.5: Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2017-2021

KOMODITAS	TAHUN	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)
Tembakau	2017	3.379,31	1,14
	2018	9.028.35	n/a
	2019	9.552,85	1,03
	2020	9.629,35	n/a
	2021	9.033,00	1.25



KOMODITAS	TAHUN	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)
Kopi	2017	332,10	0,18
	2018	537,00	n/a
	2019	587,92	0,45
	2020	901,23	n/a
	2021	826,26	0,0326
Tebu	2017	865.113,57	91,58
	2018	867.463,88	94,24
	2019	872.629,16	94,80
	2020	616.594,82	n/a
	2021	697,00	9,3859

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Tahun 2022
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo, Tahun 2022

Peluang pembangunan sektor perkebunan di wilayah Pengelolaan Kabupaten Situbondo pada masa mendatang cukup cerah, seperti diketahui bahwa permintaan pasar merupakan fungsi dari tingkat pendapatan, jumlah penduduk, harga komoditi, selera, mutu dan citra produk pertanian yang dipasarkan.

2.1.1.7.3. Potensi Peternakan

Kebutuhan akan ternak di Kabupaten Situbondo sampai dengan saat ini masih dipasok dari Palau Madura melalui Pelabuhan Kalbut Mangum, sedangkan ayam bibit dipasok dari Surabaya dan dari kabupaten lainnya. Peternakan yang ada di Kabupaten Situbondo masih merupakan peternakan perorangan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, sehingga sampai saat ini belum ada kawasan yang dijadikan sebagai area pengelolaan peternakan.

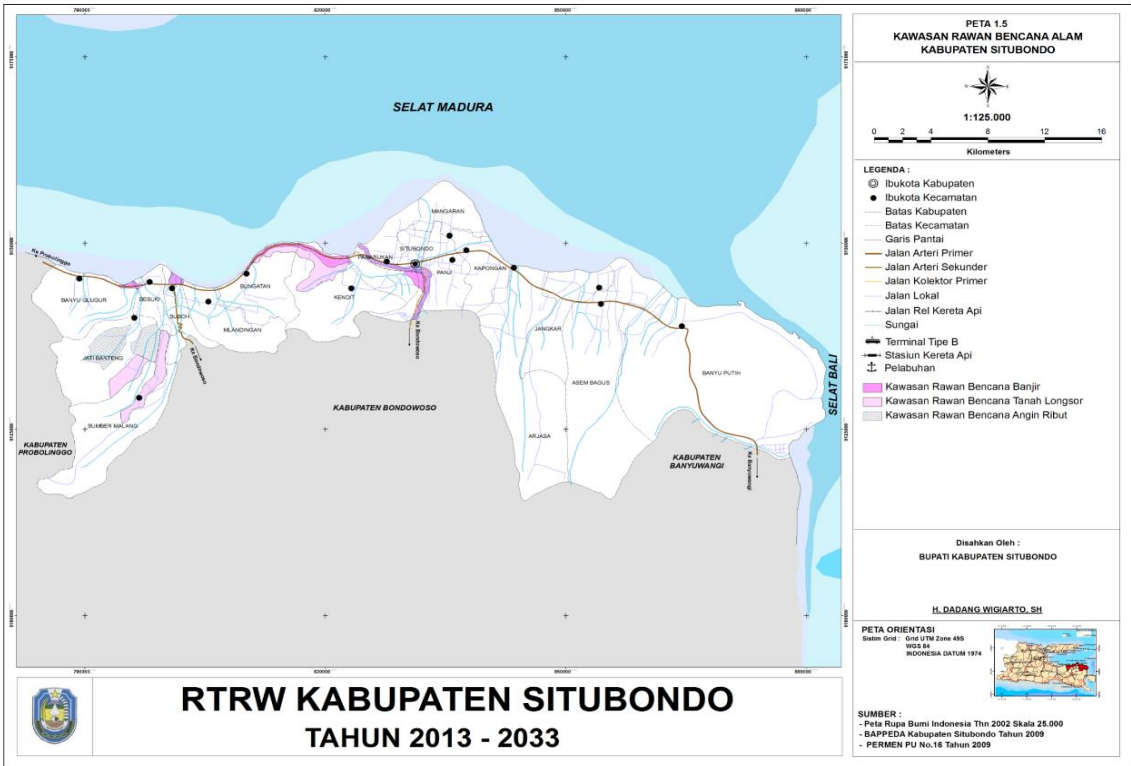
Tabel 2.6: Produksi Hasil Peternakan Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Populasi Ternak						
	Sapi Potong	(Ekor)	165.539	176.311	178.162	179.352	182.081
	Sapi Perah	(Ekor)	216	201	110	85	59
	Kerbau	(Ekor)	225	246	229	256	214
	Kuda	(Ekor)	163	140	159	162	200
	Kambing	(Ekor)	40.601	40.083	33.856	33.322	31.639
	Domba	(Ekor)	55.243	52.683	49.153	49.798	49.007
	Ayam Buras	(Ekor)	420.486	369.160	614.353	380.028	341.734
	Ayam Ras Pedaging	(Ekor)	25.110	25.500	34.375	55.200	68.411
	Ayam Ras Petelur	(Ekor)	617.742	1.132.706	1.126.457	1.674.911	1.264.642
	Itik	(Ekor)	54.222	60.109	46.492	42.060	41.472
	Entok	(Ekor)	19.229	18.791	15.224	15.145	16.570
2	Jumlah Produksi Ternak						
	Daging Sapi	(Ton)	1501	1.458	1942	1.922	2.195
	Daging Kambing/ Domba	(Ton)	85	81,50	48,21	25,84	30,18
	Daging Ayam	(Ton)	5679	5756	5671	5.742	7.428
	Telur	(Ton)	10.596	960	948	1.057	1.208
	Susu	(Liter)	279.936	426.817	270.545	194.878	144.671

Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Situbondo Tahun 2018 -2022

2.1.1.7.4. Wilayah Rawan Bencana

Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Situbondo dapat dipetakan sebagaimana yang tertuang dalam Peta Rawan Bencana berikut ini;



Gambar 2.3: Peta Rawan Bencana Kabupaten Situbondo

Sumber : Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

Bencana yang terjadi pada beberapa daerah di Kabupaten Situbondo dikarenakan perubahan iklim global yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Pada tahun 2020 terjadi beberapa bencana alam pada beberapa daerah di Kabupaten Situbondo sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2.7: Rekap Kejadian Bencana di Kabupaten Situbondo Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Kejadian		
		Banjir	Gempa Bumi	Tanah Longsor
1.	Sumbermalang	-		2
2.	Jatibanteng	-	-	2
3.	Banyuglugur	-	-	-
4.	Besuki	-	-	-
5.	Suboh	2	5	1
6.	Mlandingan	-	-	-
7.	Bungatan	-	-	-
8.	Kendit	-	-	-
9.	Panarukan	1	-	-
10	Situbondo	-	-	-
11	Mangaran	-	-	-
12	Panji	-	-	-
13	Kapongan	-	-	-
14	Arjasa	-	-	2
15	Jangkar	-	-	-
16	Asembagus	-	-	-
17	Banyuputih	-	-	-
Jumlah		3	5	7

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

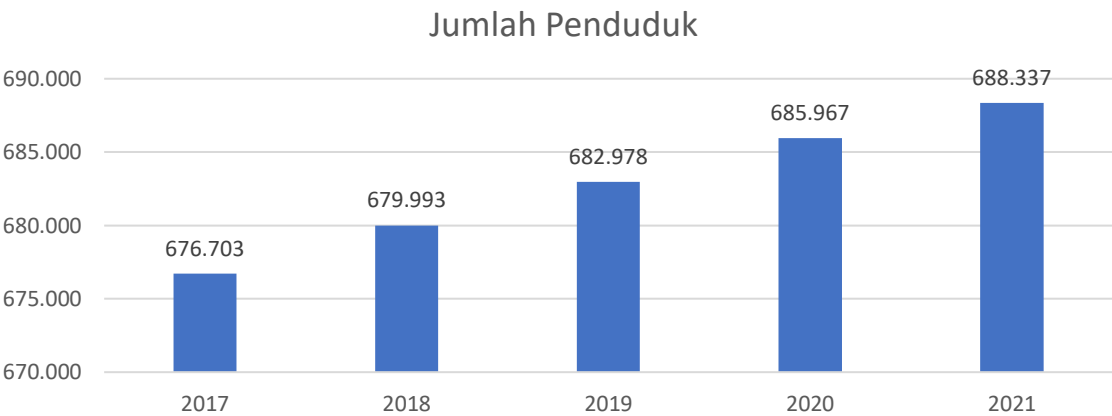


Jenis bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Situbondo tahun 2021 adalah gempa bumi sebanyak 5 kejadian, yang terjadi di kecamatan Suboh. Banjir yang terjadi di Kabupaten Situbondo sebanyak 3 kejadian. Sedangkan bencana tanah longsor pada tahun 2021 tercatat sebanyak 7 kejadian.

2.1.1.8. Aspek Demografi

2.1.1.8.1. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2021 sebanyak 688.337 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Situbondo pada tahun 2021 meningkat sebanyak 2.370 jiwa atau 0,35% dari tahun 2020 sebesar 685.967 jiwa. Pemerintah Kabupaten Situbondo berupaya untuk menjaga stabilitas pertumbuhan penduduk agar proses pemerataan pembangunan juga dapat diterima oleh masyarakat secara adil dan merata. Berikut merupakan Gambar jumlah penduduk Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir:



Gambar 2. 4 : Jumlah Penduduk Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2022

Secara terperinci komposisi penduduk Kabupaten Situbondo dilihat dari kelompok umur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin di Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

Tahun 2017			
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0–4	24 578	23.519	48.097
5–9	24 946	23.998	48.944
10–14	25.086	24.066	49.152
15–19	26.447	27.621	54.068
20–24	26.132	26.063	52.195
25–29	23.816	25.478	49.294
30–34	24.680	27.204	51.884
35–39	26.639	27.098	53.737
40–44	26.121	26.863	52.984
45–49	25.081	26.242	51.323
50–54	22.412	23.928	46.340
55–59	19.115	19.256	38.371
60–64	15.275	15.993	31.268
65+	19.783	29.263	49.046
Jumlah	330.111	346.592	676.703

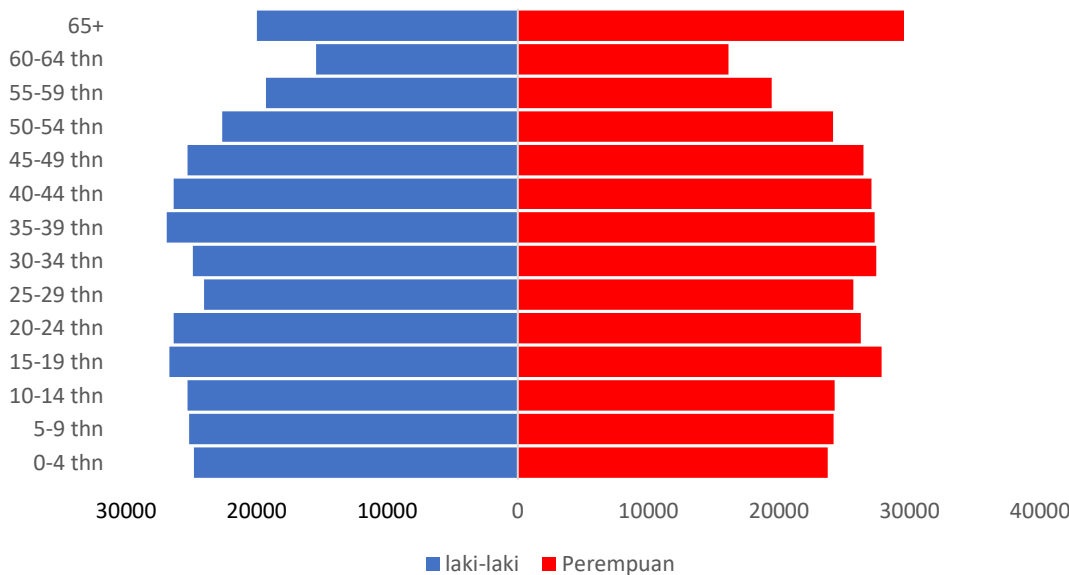


Tahun 2018			
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	24 694	23 628	48 322
5-9	25 064	24 107	49 171
10-14	25 206	24 178	49 384
15-19	26 573	27 749	54 322
20-24	26 252	26 183	52 435
25-29	23 926	25 595	49 521
30-34	24 795	27 331	52 126
35-39	26 766	27 224	53 990
40-44	26 247	26 994	53 241
45-49	25 205	26 374	51 579
50-54	22 527	24 050	46 577
55-59	19 215	19 357	38 572
60-64	15 358	16 077	31 435
65+	19.890	29.428	49.318
Jumlah	333.198	349.780	679.993
Tahun 2019			
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	24.800	23.726	48.526
5-9	25.171	24.206	49.377
10-14	25.314	24.281	49.595
15-19	26.686	27.864	54.550
20-24	26.361	26.290	52.651
25-29	24.029	25.698	49.727
30-34	24.901	27.443	52.344
35-39	26.881	27.339	54.220
40-44	26.363	27.110	53.473
45-49	25.321	26.489	51.810
50-54	22.632	24.160	46.792
55-59	19.309	19.449	38.758
60-64	15.435	16.155	31.590
65+	19.995	29.570	49.565
Jumlah	333.198	349.780	682.978
Tahun 2020			
0-4	21.490	20.722	42.212
5-9	22.195	21.477	43.672
10-14	23.997	22.490	46.487
15-19	25.746	24.652	50.398
20-24	25.722	24.797	50.519
25-29	25.279	25.947	51.226
30-34	25.420	26.305	51.725
35-39	24.602	26.660	51.262
40-44	26.278	27.633	53.911
45-49	24.790	25.593	50.383
50-54	23.517	23.948	47.465
55-59	20.257	21.277	41.534
60-64	17.058	18.528	35.586
65+	30.406	39.181	69.587
Jumlah	336.757	349.210	685.967
Tahun 2021			
0-4	21.259	20.490	41.749
5-9	21.940	21.263	43.203
10-14	23.811	22.357	46.168



15-19	25.453	24.330	49.783
20-24	25.404	24.464	49.868
25-29	25.105	25.682	50.787
30-34	25.299	26.110	51.409
35-39	24.508	26.490	50.998
40-44	26.244	27.521	53.765
45-49	24.975	25.763	50.738
50-54	23.756	24.189	47.945
55-59	20.662	21.767	42.429
60-64	17.501	19.105	36.606
65+	31.942	40.947	72.889
Jumlah	337.859	350.478	688.337

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2022



Gambar 2.5 : Piramida Penduduk Kabupaten Situbondo Tahun 2021

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2022

Dilihat dari jumlah penduduk diatas maka struktur umur penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2020 adalah terdiri dari usia remaja dan usia produktif yang dominan, sedangkan untuk usia tua masih relatif sedikit. Penduduk usia 0-14 tahun dan usia 50 tahun keatas cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok umur 15-49 tahun. Jumlah usia 0-14 Tahun sebanyak 147.498 jiwa sedangkan penduduk usia 50 tahun keatas sebanyak 166.705 jiwa. Jumlah kedua kelompok umur tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok umur 15-49 tahunnya itu sebanyak 368.775 jiwa. Hal ini bisa digunakan sebagai indikator bahwa usia harapan hidup penduduk Kabupaten Situbondo adalah pada usia produktif yaitu 15-49 tahun. Kondisi ini memiliki kelebihan dimana penduduk usia produktif memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan partisipasi pembangunan daerah sehingga menjadi salah satu tantangan pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang layak sehingga potensi usia produktif dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pembangunan Kabupaten Situbondo.



Berikut ini adalah data laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk kabupaten Situbondo tahun 2017 hingga 2021:

Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	Kepadatan Penduduk Per Km ²
2017	0,51	413
2018	0,49	415
2019	0,44	422
2020	0,40	419
2021	0.35	420

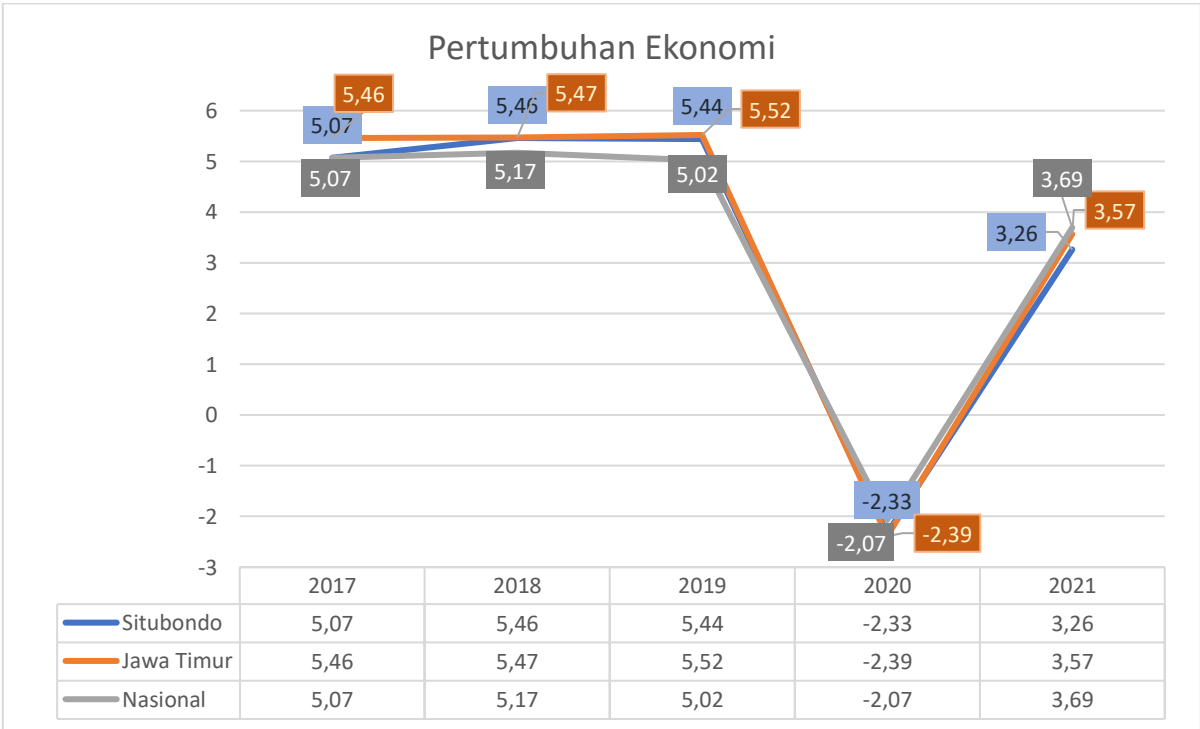
Sumber: BPS Kabupaten Situbondo 2017-2021

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Situbondo pada setiap tahunnya mengalami penurunan dan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2020 mencapai 0,40.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)



Gambar 2. 6: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Nasional

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2021

Kabupaten Situbondo di tahun 2021 mengalami kontraksi positif sebesar 3,26 setelah sebelumnya mengalami kontraksi negative sebagai imbas dari pandemic Covid-19. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo terus meningkat pada 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu 5,07 pada tahun 2017, 5,46 pada tahun 2018, 5,44 pada tahun 2019 namun mengalami kontraksi negatif yang signifikan di titik -2,33 pada tahun 2020. Laju pertumbuhan 17 sektor lapangan usaha pada tahun 2021 disampaikan pada tabel berikut.



Tabel 2. 10: Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,95	0,38	1,57	-2,09	1,69
Pertambangan dan Penggalian	6,16	3,83	2,12	-6,59	1,25
Industri Pengolahan	8,23	10,35	9,35	3,18	3,74
Pengadaan Listrik dan Gas	4,33	3,03	3,66	-0,37	2,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang	4,62	4,19	4,28	3,91	5,13
Konstruksi	6,46	5,71	5,65	-7,28	-0,61
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,79	7,88	7,08	-8,70	6,93
Transportasi dan Pergudangan	7,49	9,16	7,52	-7,94	6,84
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,02	8,37	7,42	-13,06	4,12
Informasi dan Komunikasi	7,04	7,37	7,47	7,86	6,31
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,60	6,68	3,45	-0,15	1,10
Real Estate	6,43	6,35	6,28	3,03	2,11
Jasa Perusahaan	6,74	7,97	6,46	-7,49	1,51
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,16	3,89	3,20	-1,84	-0,08
Jasa Pendidikan	4,39	6,56	6,98	1,92	1,28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,83	5,29	4,79	9,22	4,81
Jasa lainnya	5,15	6,71	7,84	-15,55	4,71
Laju PDRB	5,07	5,46	5,44	-2,33	3,26

Keterangan : *) Angka sementara , **) Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2022

Secara umum, kinerja perekonomian kabupaten Situbondo pada tahun 2021 berkontraksi positif 3,26 persen. Konstelasi pertumbuhan tertinggi terdapat pada 3 kategori usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada kategori Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh positif hingga sebesar 6,93 persen, disusul oleh pertumbuhan kategori Transportasi dan pergudangan sebesar 6,84. Kategori Informasi dan komunikasi tumbuh 6,31 persen. Sedangkan untuk kategori yang sangat terpukul ketika masa pandemi adalah kategori konstruksi berkontraksi minus 0,61 persen. Kategori terdampak parah lain adalah kategori jasa keuangan dan asuransi yang berkontraksi sebesar minus 1,10 persen. Untuk kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ketika pandemi pertumbuhannya rendah yaitu 1,69 persen.

Selanjutnya untuk sektor yang memiliki kontribusi terbesar pada perekonomian Situbondo masih sektor pertanian yaitu 31,55%. Sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan dengan besar kontribusi 19,53%, sektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi sebesar 15,79% sebagaimana pada tabel berikut.

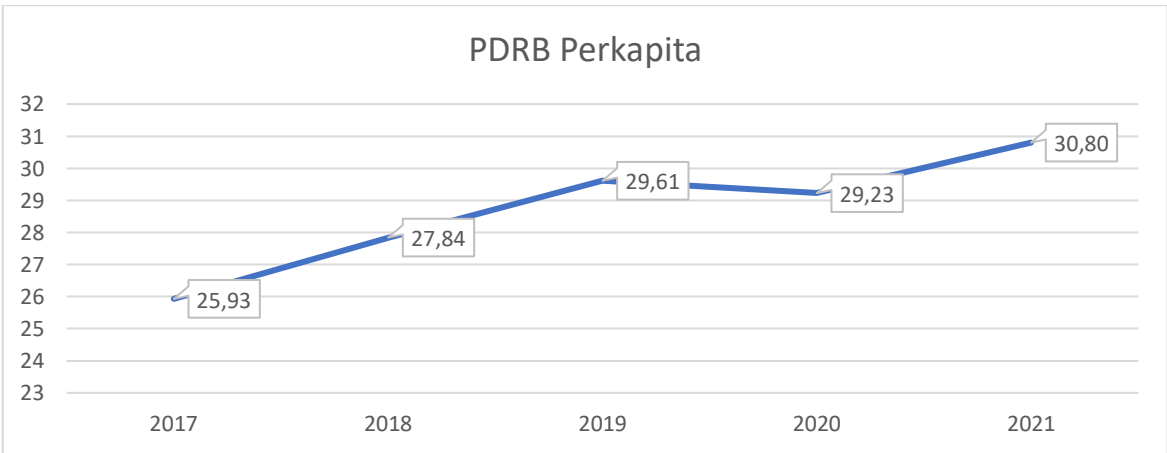


Tabel 2. 11: Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Situbondo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (%)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	34,31	32,70	31,60	31,87	31,55
2.	Pertambangan dan penggalian	1,91	1,93	1,88	1,82	1,81
3.	Industri pengolahan	16,64	17,39	18,06	19,16	19,53
4.	Pengadaan listrik dan gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
6.	Konstruksi	7,63	7,54	7,29	6,84	6,51
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	15,18	15,77	16,21	15,14	15,79
8.	Transportasi dan pergudangan	2,56	2,65	2,72	2,52	2,52
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,90	1,95	2,00	1,76	1,78
10.	Informasi dan komunikasi	4,80	4,78	4,85	5,29	5,34
11.	Jasa keuangan dan asuransi	3,17	3,24	3,16	3,18	3,12
12.	Real estate	1,45	1,49	1,51	1,60	1,55
13.	Jasa perusahaan	0,42	0,44	0,45	0,43	0,42
14.	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib	3,21	3,28	3,34	3,45	3,25
15.	Jasa pendidikan	3,80	3,80	3,86	4,04	3,89
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,82	0,81	0,81	0,90	0,90
17.	Jasa lainnya	2,01	2,05	2,09	1,81	1,84
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : *) Angka sementara , **) Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2022

Dari tabel diatas kontribusi kategori pertanian terlihat sedikit mengalami penurunan di tahun 2021 dibanding tahun 2020. Melihat rekam jejak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo yang kontribusinya disumbang oleh kategori pertanian, selain laju pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB, salah satu indikator kesejahteraan daerah adalah PDRB perkapita yaitu gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita Kabupaten Situbondo tahun 2021 sebesar Rp 30,80 jt/th, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp 29,23jt/th sebagaimana grafik dibawah ini.

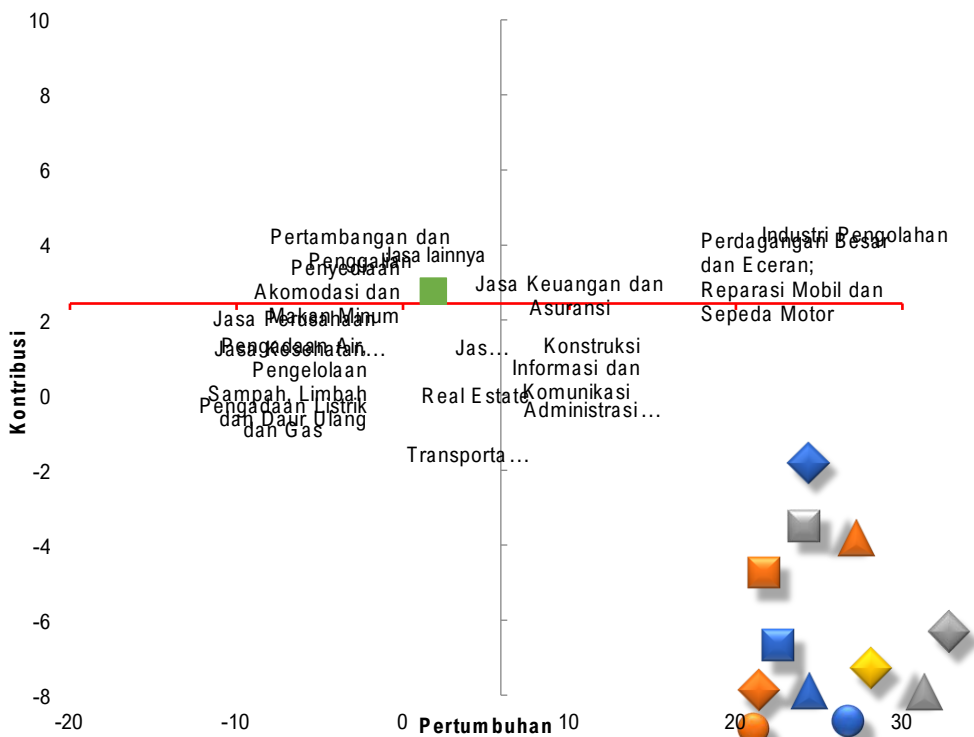


Gambar 2. 7: PDRB Perkapita Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021(juta rupiah)

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2022, data diolah



Berdasarkan tingkat pertumbuhan dan kontribusi yang dimiliki oleh masing-masing lapangan usaha/ sektor perekonomian (PDRB) di Kabupaten Situbondo, maka untuk mengetahui lapangan usaha/ sektor perekonomian yang memiliki pertumbuhan dan/ atau kontribusi yang tinggi (diatas rata-rata) dalam struktur perekonomian Kabupaten Situbondo dapat dilakukan dengan membandingkan kedua kriteria tersebut. Gambar di bawah ini menunjukkan pengelompokan sektor ekonomi/lapangan usaha yang didasarkan atas rata-rata tingkat pertumbuhan dan kontribusi dalam struktur PDRB Kabupaten Situbondo pada tahun 2019.



Gambar 2. 8: Pengelompokan Sektor Ekonomi/ Lapangan Usaha di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Pertumbuhan dan Kontribusi Tahun 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2022 (diolah)

Berdasarkan pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa posisi lapangan usaha/ sektor ekonomi di Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 terkait dengan pertumbuhan dan kontribusi dalam struktur perekonomian dapat dikelompokkan kedalam 4 kategori, yaitu memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang tinggi (Kuadran I), memiliki pertumbuhan tinggi dan kontribusi rendah (Kuadran II), memiliki pertumbuhan rendah dan kontribusi tinggi (Kuadran III), dan memiliki pertumbuhan rendah dan kontribusi rendah (Kuadran IV).

- a. Beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi dan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Kabupaten Situbondo, yaitu: sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.
- b. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun memiliki kontribusi yang rendah meliputi: Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Real Estat, dan Sektor Jasa Perusahaan.



- c. Sektor yang memiliki pertumbuhan rendah, namun memiliki kontribusi yang tinggi adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Sektor Kontruksi.
- d. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan rendah dan memiliki kontribusi yang rendah meliputi: Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, dan Sektor lainnya.

Diantara sektor ekonomi/ lapangan usaha yang terdapat di Kabupaten Situbondo berdasarkan hasil perhitungan analisis LQ (*Location Quotient*) terdapat 8 sektor ekonomi yang merupakan sektor basis atau *leading sektor*. Nilai LQ dapat dikatakan sebagai petunjuk untuk dijadikan dasar untuk menentukan sektor yang potensial untuk dikembangkan, karena sektor tersebut tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di dalam daerah, akan tetapi dapat juga memenuhi di daerah lain atau surplus. Sektor basis (unggulan) adalah kegiatan ekonomi yang melayani pasar domestik maupun pasar luar daerah. Sektor basis dapat menghasilkan produk dan jasa yang nantinya mendatangkan keuntungan. Hal ini menyebabkan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan untuk mengekspor produk yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain. Sektor tersebut memiliki aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri maupun daerah lain yang dapat dijadikan sektor unggulan. Sedangkan sektor non basis (sektor non unggulan) merupakan kegiatan ekonomi yang hanya mampu melayani pasar daerahnya sendiri. Penentuan sektor basis dan non basis didasarkan pada besar kecilnya nilai LQ, dimana sektor basis memiliki nilai LQ diatas 1 ($LQ > 1$), sedangkan untuk non basis berada dibawah 1 ($LQ < 1$). Adapun 8 sektor ekonomi/ lapangan usaha yang termasuk dalam sektor basis adalah: Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor Jasa Pendidikan, SektorJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Sektor Jasa lainnya. Untuk mengetahui nilai LQ dan status dari masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Situbondo secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12: Hasil Perhitungan Indeks LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi Kabupaten Situbondo Tahun 2017 – 2021

No	Sektor PDRB	LQ					Total	LQ	Keterangan
		2017	2018	2019	2020	2021			
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,72	2,78	2,79	2,54	2,55	13,38	2,68	Unggulan
2	Pertambangan&Penggalian	0,36	0,36	0,37	0,33	0,35	1,78	0,36	Bukan unggulan



No	Sektor PDRB	LQ					Total	LQ	Keterangan
		2017	2018	2019	2020	2021			
3	IndustriPengolahan	0,58	0,59	0,61	0,60	0,60	2,98	0,60	Bukan unggulan
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	2,43	2,39	2,30	2,18	9,51	1,90	Unggulan
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan DaurUlang	1,33	1,28	1,30	1,23	1,23	6,37	1,27	Unggulan
6	Konstruksi	0,82	0,81	0,81	0,73	0,71	3,89	0,78	Bukan unggulan
7	PerdaganganBesar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,89	0,90	0,91	0,83	0,82	4,34	0,87	Bukan unggulan
8	Transportasi dan Pergudangan	0,87	0,89	0,92	0,89	0,93	4,50	0,90	Bukan unggulan
9	PenyediaanAkomodasi dan MakanMinum	0,34	0,34	0,34	0,30	0,31	1,63	0,33	Bukan unggulan
10	Informasi dan Komunikasi	1,10	1,11	1,11	10,25	10,21	23,79	4,76	Unggulan
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,22	1,24	1,24	1,16	1,15	6,00	1,20	Unggulan
12	Real Estate	0,99	0,99	0,99	0,92	0,92	4,82	0,96	Bukan unggulan
13	Jasa Perusahaan	0,56	0,56	0,55	0,52	0,52	2,72	0,54	Bukan unggulan
14	AdministrasiPemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,51	1,51	1,50	1,39	1,39	7,29	1,46	Unggulan
15	Jasa Pendidikan	1,55	1,56	1,56	1,44	1,44	7,55	1,51	Unggulan
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,36	1,33	1,29	1,22	1,22	6,42	1,28	Unggulan
17	Jasa lainnya	1,54	1,53	1,56	1,44	1,42	7,48	1,50	Unggulan

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2022(diolah)

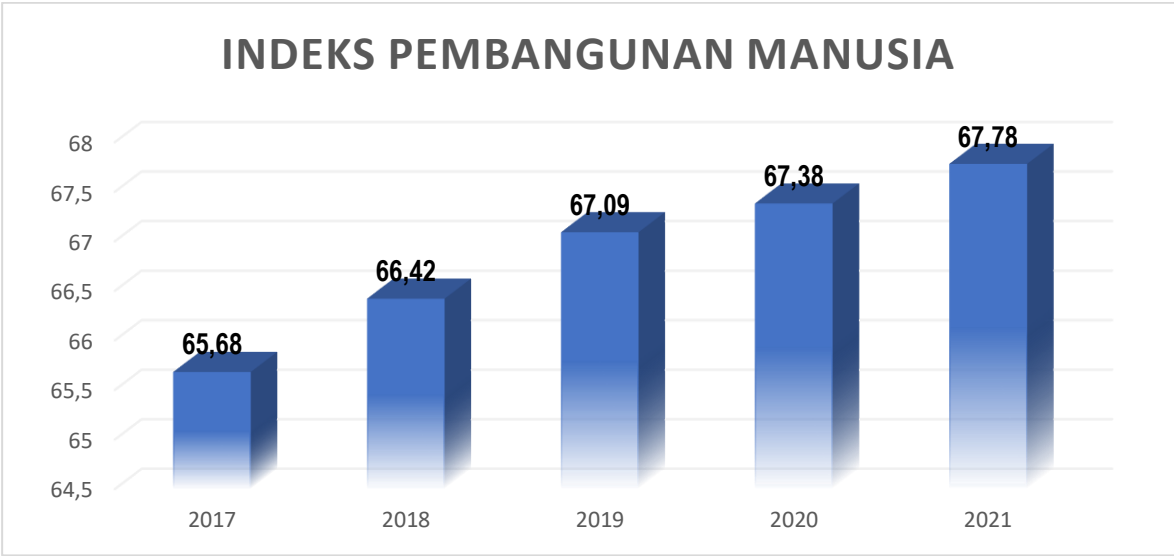
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada nilai LQ diatas 1 ($LQ > 1$) atau disebut sebagai sektor basis dengan nilai tertinggi adalah pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai LQ sebesar 2,68 sehingga pada hasil dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di dalam daerah, akan tetapi dapat juga memenuhi di daerah lain atau surplus.

2.1.2.1.2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Selain itu pula IPM untuk mengukur pengaruh dari kebijakan pembangunan terhadap kualitas hidup. Kemanfaatan IPM sebagai indikator adalah a) Indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); dan b) IPM dapat menentukan peringkat atau



level pembangunan suatu wilayah. Kondisi IPM Kabupaten Situbondo terus mengalami pertumbuhan dan memiliki trend positif artinya dampak pembangunan daerah mampu memberikan dampak pada perbaikan kualitas hidup masyarakat. Pada tahun 2019 IPM Kabupaten Situbondo sebesar 67,09 dan di tahun 2020 meningkat menjadi 67,38 atau meningkat sebesar 0,29 dengan peningkatan tertinggi pada dimensi Pendidikan. Capaian IPM Kabupaten Situbondo tahun 2020 menempatkan upaya pembangunan manusia dalam kategori sedang (*middle human development*).

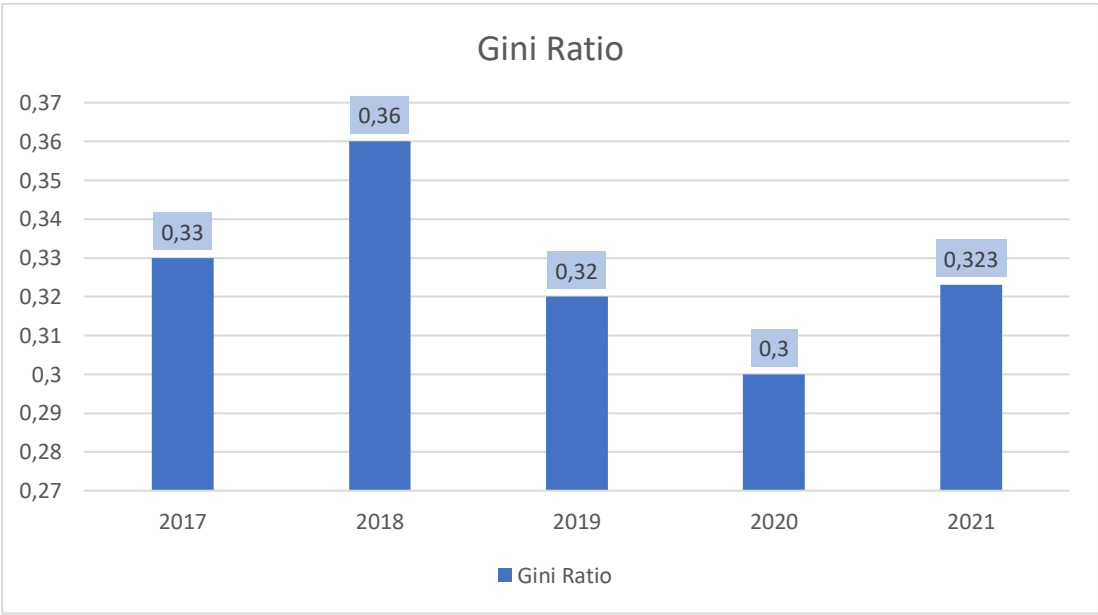


Gambar 2. 9: Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017-2021

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2022 (diolah)

2.1.2.1.3. Indeks Gini Rasio

Gini rasio adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan pada suatu daerah. Ketimpangan yang tinggi mengindikasikan adanya distribusi ekonomi yang tidak merata.



Gambar 2. 10 : Gini Ratio Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

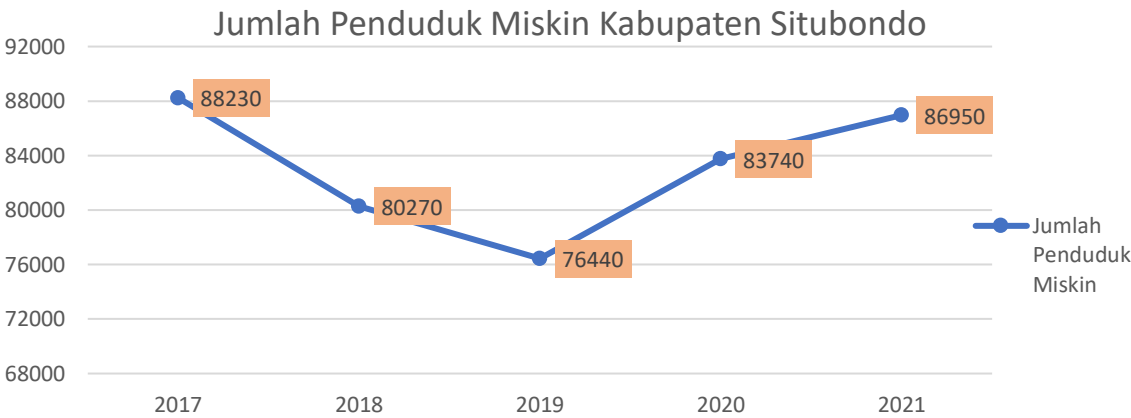
Sumber : BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2022



Aspek kesejahteraan dalam perekonomian daerah juga diukur berdasarkan kondisi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Indikator ketimpangan pendapatan diukur berdasarkan indeks gini rasio. Berdasarkan data tren gini rasio periode tahun 2016-2020 terlihat bahwasannya kecenderungan nilai gini rasio Kabupaten Situbondo sudah mengalami penurunan tiap tahunnya, kecuali di tahun 2018 yang mengalami kenaikan kesenjangan sebesar 0,36, artinya ada kemungkinan bahwa ketimpangan mengalami kontraksi naik lalu turun di tahun 2019 menjadi 0,32, dan kembali turun Pada tahun 2020 sebesar 0,30. Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Situbondo selama beberapa tahun masih dalam kategori rendah karena nilainya dibawah 0,4 itu artinya terjadi inklusifitas pembangunan ekonomi.

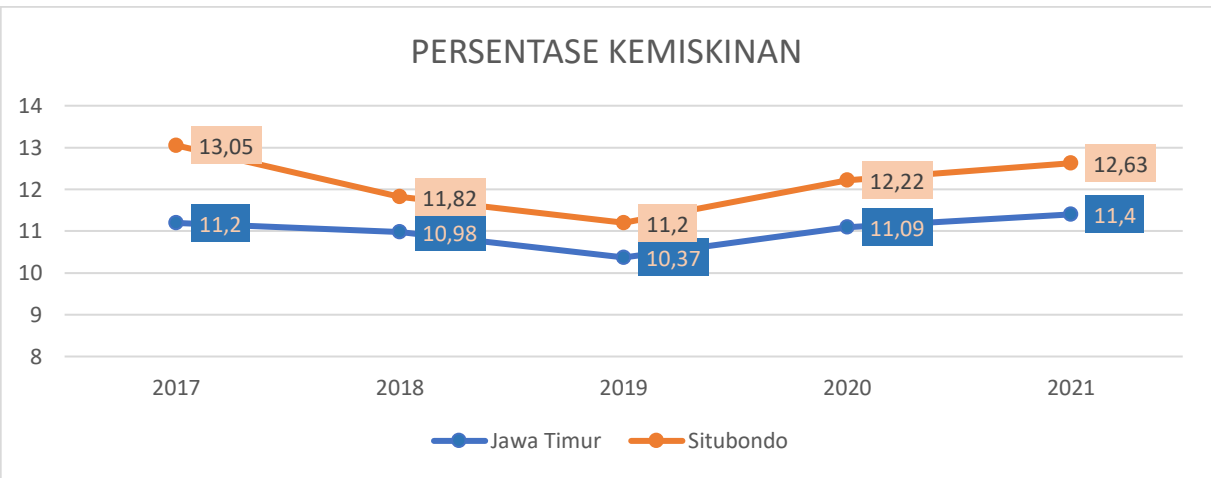
2.1.2.1.4. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif.



Gambar 2. 11: Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2022



Gambar 2. 12: Prosentase Kemiskinan Situbondo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2022



Pada tahun 2021 prosentase kemiskinan di Kabupaten Situbondo sebesar 12,63%. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yaitu 12,22%. Dengan persentase sebesar 12,63% jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo sebanyak 86.950 jiwa yang artinya terdapat 10.981 jiwa yang belum terentaskan dari kemiskinan dibandingkan pada tahun 2020 sebanyak 83.740 penduduk miskin. Kenaikan prosentase penduduk miskin pada tahun 2021 merupakan dampak pandemi Covid 19 di tengah segala upaya dan strategi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan.

Adapun beberapa upaya strategi pengentasan kemiskinan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Situbondo selama pandemi Covid 19 diantaranya pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) dari dana Pusat, Provinsi, Kabupaten serta Desa/Kelurahan sebanyak 301.666 jiwa melalui OPD terkait (Dinas Sosial, BPBD, DPMD, Dinas Pariwisata, Desa/Kelurahan) serta beberapa program inovatif lainnya untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Situbondo.

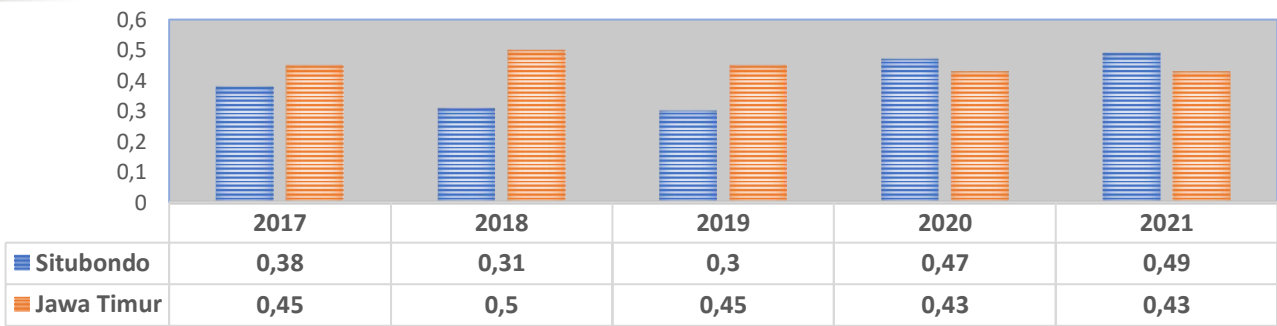
2.1.2.1.5. Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan sebuah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran dari masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.



Gambar 2. 13: Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS Provinsi Jawa Timur 2022

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa kedalaman kemiskinan di Kabupaten Situbondo cenderung menurun dari tahun 2017-2021, dimana tercatat sebesar 1,91 di tahun 2020 dan meningkat signifikan di tahun 2021 menjadi 2,08. Sedangkan Provinsi Jawa Timur kedalaman kemiskinannya cenderung fluktuatif di tahun 2017-2021. Tahun 2020 tercatat sebesar 1,82 kemudian tahun 2021 meningkat menjadi 1,84. Peningkatan Kedalaman kemiskinan mengindikasikan hal yang negatif karena hal tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran dari masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin tinggi.



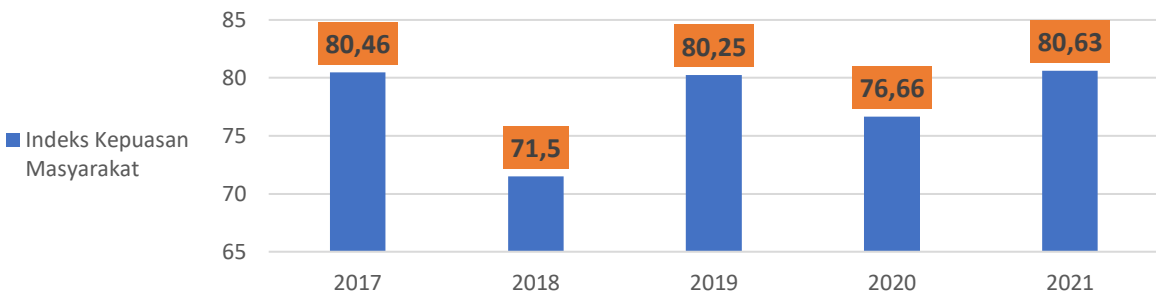
Gambar 2. 14: Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS Provinsi Jawa Timur 2022

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa untuk keparahan kemiskinan Kabupaten Situbondo menurun dari tahun 2017-2021, namun meningkat signifikan di tahun 2020. Tahun 2020 tercatat keparahan kemiskinan sebesar 0,47, kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 0,49. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan terjadi di tahun 2017 (0,45) menuju 2018 (0,50) sebesar 0,05. Peningkatan Keparahan kemiskinan mengindikasikan hal yang negatif karena hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin semakin tinggi. Dengan peningkatan nilai indeks P2 Kabupaten Situbondo Tahun 2021 menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk masyarakat miskin.

2.1.2.1.6. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya



Gambar 2. 15: Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2020

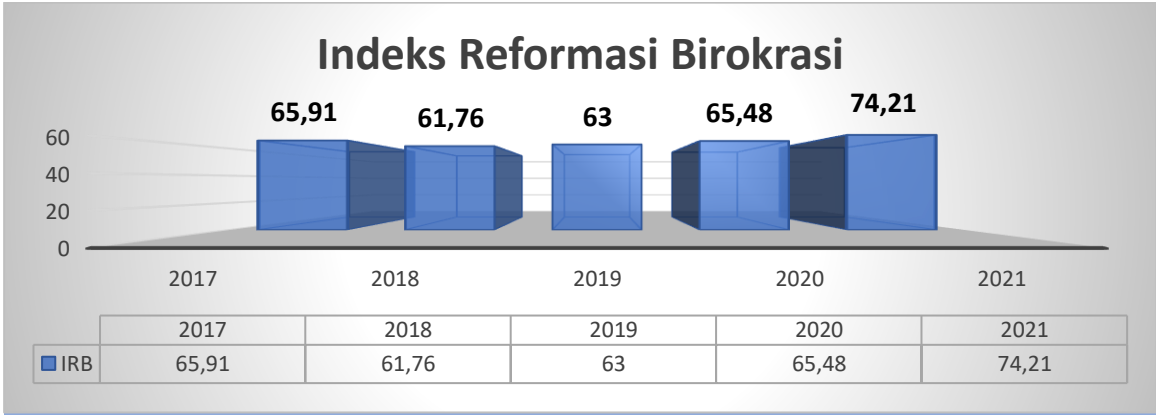
Dari gambar di atas dapat kita ketahui bersama bahwa Indeks Kepuasan masyarakat mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Tercatat 75,25 sebagai nilai IKM dari beberapa Perangkat Daerah di tahun 2016, lalu meningkat di tahun 2017 menjadi 80,46. Pada tahun 2018 nilai IKM mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu 71,5 namun hal ini memacu semangat birokrasi dalam meningkatkan pelayanannya sehingga nilai IKM menjadi 80,25 di tahun 2019 namun harus turun di tahun 2020 menjadi 76,66.



2.1.2.1.7. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.



Gambar 2. 16: Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

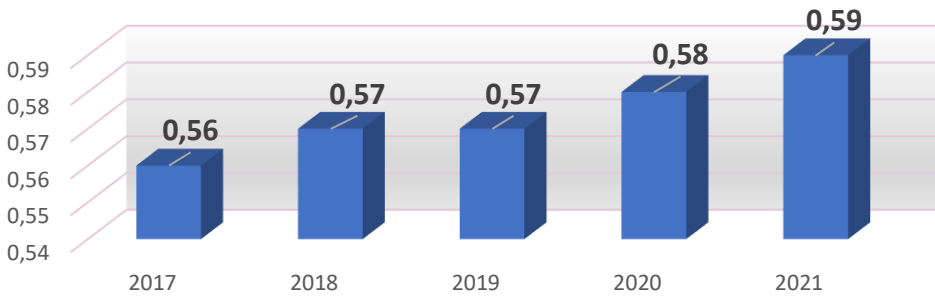
Sumber: BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2020

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Situbondo tahun 2017-2020 mengalami fluktuatif, dimana mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 61,76 dibanding tahun 2017 yang sebesar 65,91, namun meningkat di tahun 2019 menjadi 63 dan meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 65,48 dan Kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 74,21.

2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan indikator yang mencerminkan hasil pembangunan bidang pendidikan yang di bentuk oleh Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah.



Gambar 2. 17: Indeks Pendidikan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

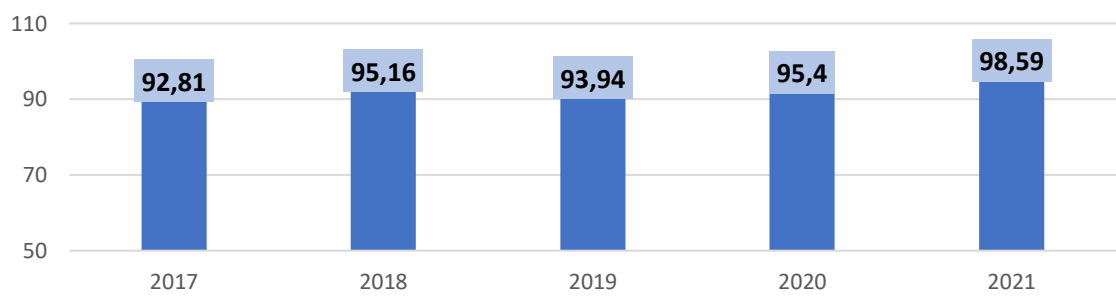
Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2022



Dari gambar di atas dapat kita ketahui bahwa Indeks Pendidikan Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 Indeks Pendidikan Kabupaten Situbondo ada pada posisi 0,55, dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 0,56, meningkat menjadi 0,57 di tahun 2018 dan 2019, dan meningkat lagi menjadi 0,58 dan 0,59 berturut turut di tahun 2020 dan 2021. Indeks Pendidikan dikatakan tinggi jika mencapai 0,95-1. Kategori medium berada di atas 0,80, sedangkan kategori rendah di bawah 0,80. Dari Kategori Indeks Pendidikan tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan bidang pendidikan masih berada di kategori rendah yang harus di tingkatkan lebih baik lagi.

2.1.2.2.1.1. Angka Melek Huruf

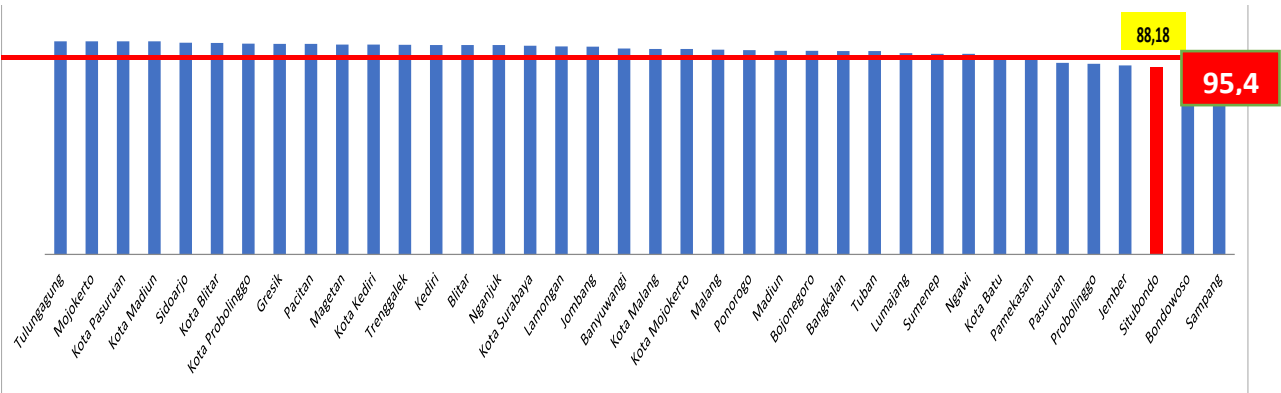
Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Berikut merupakan Gambar Angka Melek Huruf di Kabupaten Situbondo tahun 2017-2021:



Gambar 2. 18 : Angka Melek Huruf Usia 15 s.d. 59 Tahun Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Tahun 2022

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Kabupaten Situbondo memiliki angka melek huruf yang fluktuatif selama 5 tahun terahir. Pada tahun 2017, angka melek huruf Kabupaten Situbondo berada di angka 92,81. Angka tersebut meningkat pada tahun 2018 menjadi 95,16 lalu menurun kembali di tahun 2019 menjadi 93,94. Pada tahun 2020 dan 2021, angka melek huruf meningkat kembali menjadi 95,4 dan 98,59.



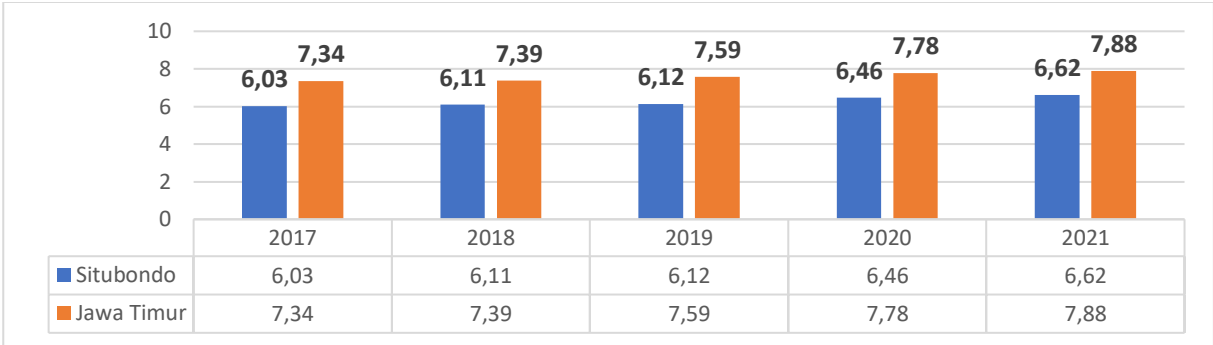
Gambar 2. 19: Angka Melek Huruf Usia 15 s.d. 55 Tahun Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota, BPS 2019. (diolah)



2.1.2.2.1.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Sebagai salah satu Indikator yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pendidikan, rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.



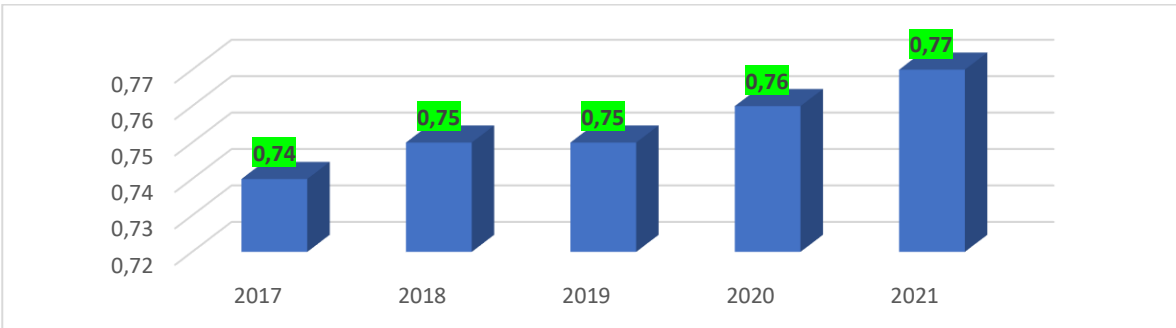
Gambar 2. 20: Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2022

Angka Rata-Rata Lama Sekolah siswa (Mean Years of Schooling-MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Situbondo dari tahun 2017 sampai dengan 2021 juga menggambarkan tren yang positif, namun masih tergolong rendah. Pada tahun 2017 nilai Angka Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Situbondo sebesar 6,03, pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 6,11 dan pada tahun 2019 nilai MYS berada pada angka 6,12, sedangkan pada tahun 2020 angka rata rata lama sekolah berada pada angka 6,46 dan 6,62 pada tahun 2021. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Situbondo masih berada di bawah angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir.

2.1.2.2.2. Kesehatan

Indeks Kesehatan adalah indikator yang digunakan untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat. Indeks kesehatan didapatkan dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar BPS, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks adalah 85 tahun dan terendah sebagai batas bawah adalah 20 tahun. Indeks kesehatan tidak bisa lepas dari nilai angka harapan hidup yang pada tahun 2021 terealisasi sebesar 69,24 .

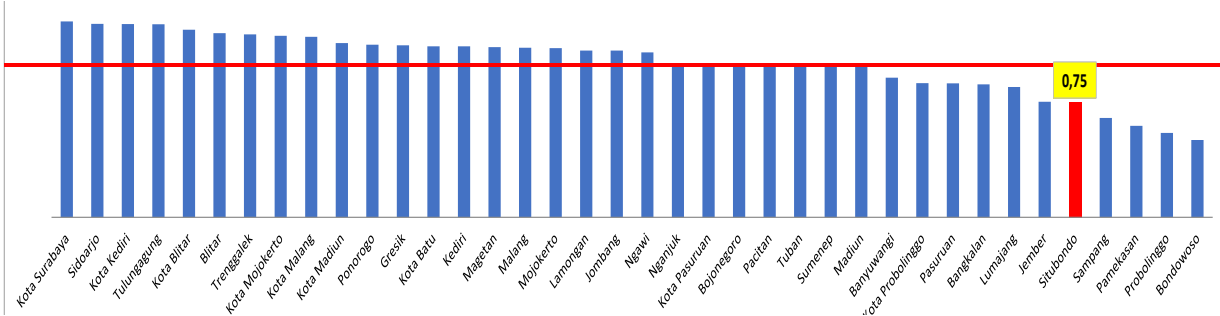


Gambar 2. 21: Indeks Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2022



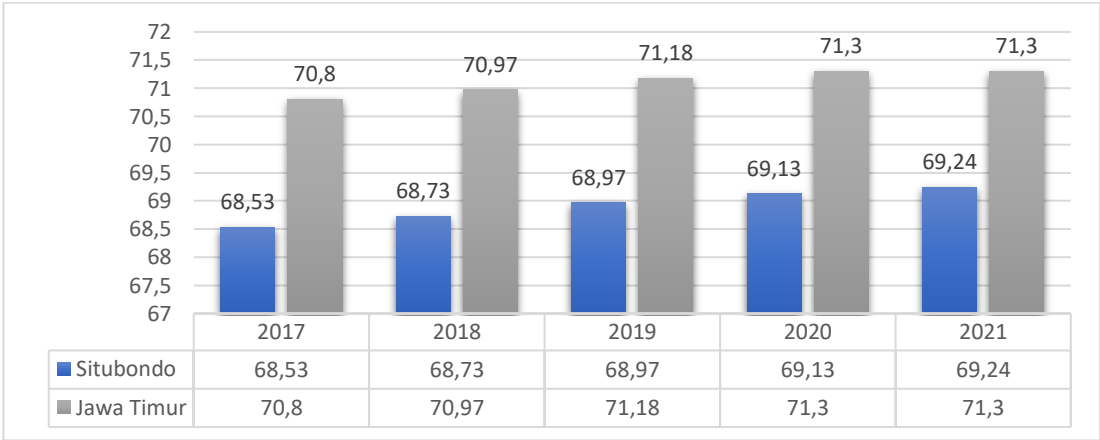
Apabila dilihat dari Indeks Kesehatan tahun 2019 dan dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Jawa Timur, Kabupaten Situbondo berada pada posisi 34 dari 38 kabupaten/kota, dengan indeks kesehatan sebesar 0,75. Pada tahun 2020, angka harapan hidup di kabupaten situbondo kembali mengalami kenaikan menjadi 0,76.



Gambar 2. 22: Indeks Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020
Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, BPS Jawa Timur dan BPS Republik Indonesia

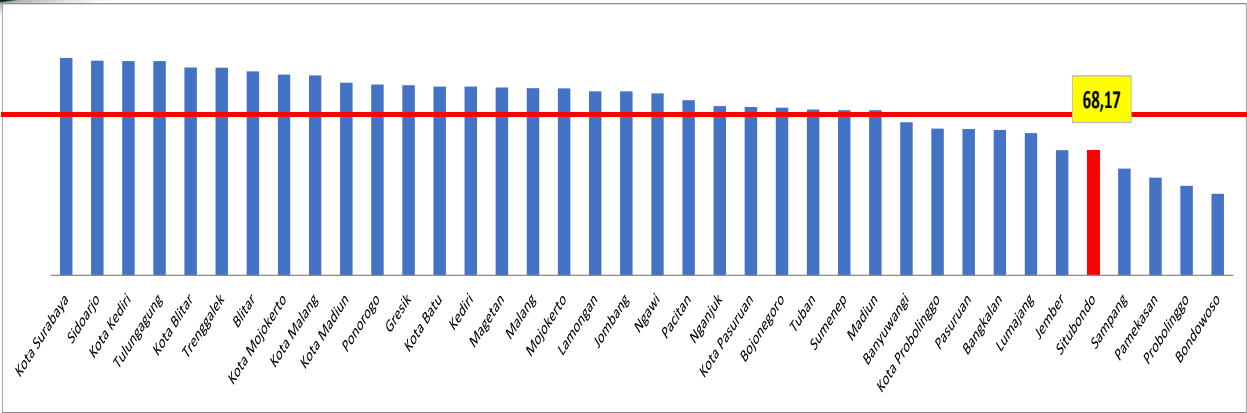
2.1.2.2.2.1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia dari dimensi kesehatan dan salah satu indikator dalam menentukan Indeks Kesehatan. Berikut Gambar AHH Kabupaten Situbondo dibandingkan dengan AHH Jawa Timur, dan AHH Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur:



Gambar 2. 23: Angka Harapan Hidup Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS Jawa Timur Tahun 2022

Angka harapan hidup (AHH) juga dapat mencerminkan hasil dari upaya pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Angka harapan hidup yang dimaksud adalah usia maksimal rata-rata yang dicapai oleh penduduk Kabupaten Situbondo. Angka harapan hidup di Kabupaten Situbondo pada tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 nilai AHH masing-masing sebesar 68,53. Pada tahun 2018 hingga 2019 secara berturut-turut sebesar 68,73 dan 68,97, sedangkan pada tahun 2020 meningkat kembali di angka 69,13 dan 69,24 di tahun 2021.

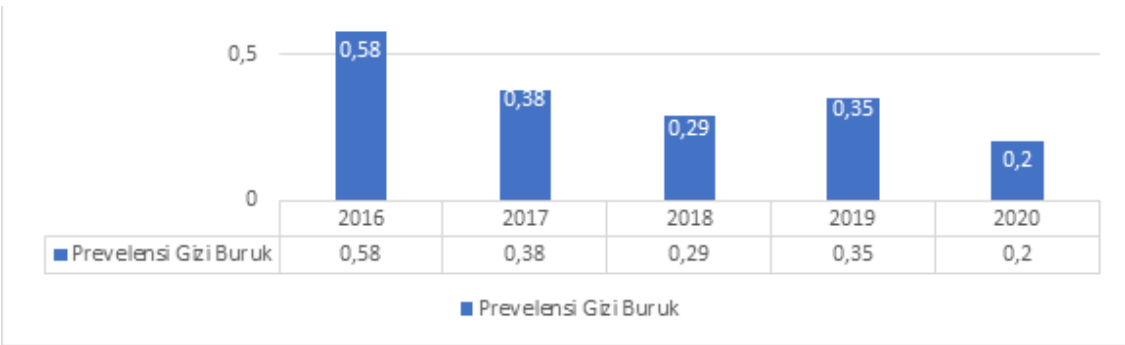


Gambar 2. 24: Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020
Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, BPS Jawa Timur dan BPS Republik Indonesia

Dari gambar di atas tampak, bahwa AHH Kabupaten Situbondo masih berada di peringkat 34 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan, bahwa meskipun sejak tahun 2016 rata-rata AHH Kabupaten Situbondo tiap tahun meningkat 0,29%, namun AHH Kabupaten Situbondo masih berada di bawah AHH Provinsi Jawa Timur selama 4 tahun terakhir, dan memerlukan perhatian khusus dengan program prioritas pembangunan yang dapat secara signifikan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat.

2.1.2.2.2. **Prevalensi Balita Gizi Buruk**

Prevalensi gizi buruk adalah jumlah balita yang mengalami gizi buruk dibandingkan dengan seluruh balita / total balita. Prevalensi gizi buruk Kabupaten Situbondo menurun secara signifikan dari tahun 2016-2020, meskipun pada tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,02% dari tahun 2018, namun di tahun 2020 menurun kembali menjadi 0,2 sebagaimana tampak pada grafik berikut di bawah. Hal ini menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan telah berhasil.



Gambar 2. 25: Tren Gizi Buruk di Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2020
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2020

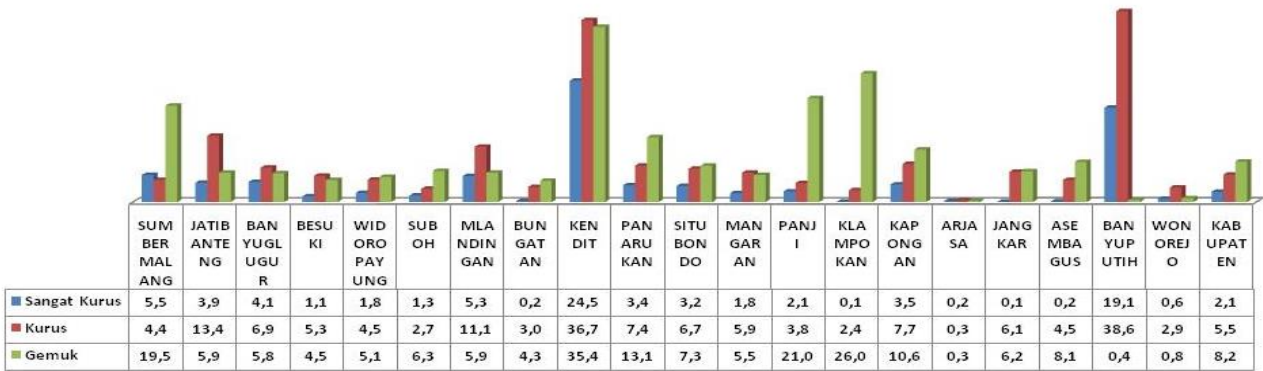
Dalam laporan LB3Gizi Puskesmas jumlah penderita gizi buruk tercatat dan dilaporkan setiap bulan, tidak hanya berhenti sampai pelaporan, balita gizi buruk yang telah dilaporkan diinvestigasi dan harus mendapat penanganan sesuai dengan standar TLAGB (Tata Laksana Gizi Buruk).



Persentase gizi buruk berdasarkan data laporan pada tahun 2020 adalah 0,20%, meliputi 115 balita yang menderita gizi buruk di seluruh Kabupaten Situbondo yang tersebar di 20 Puskesmas. Faktor penyebab gizi buruk antara lain karena BBLR (21,6%), Sakit (9,9%), Kemiskinan (134,5%), serta kurangnya pengetahuan orang tua sebesar (50,4%) dan lain-lain sebesar (4,5%), yang dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

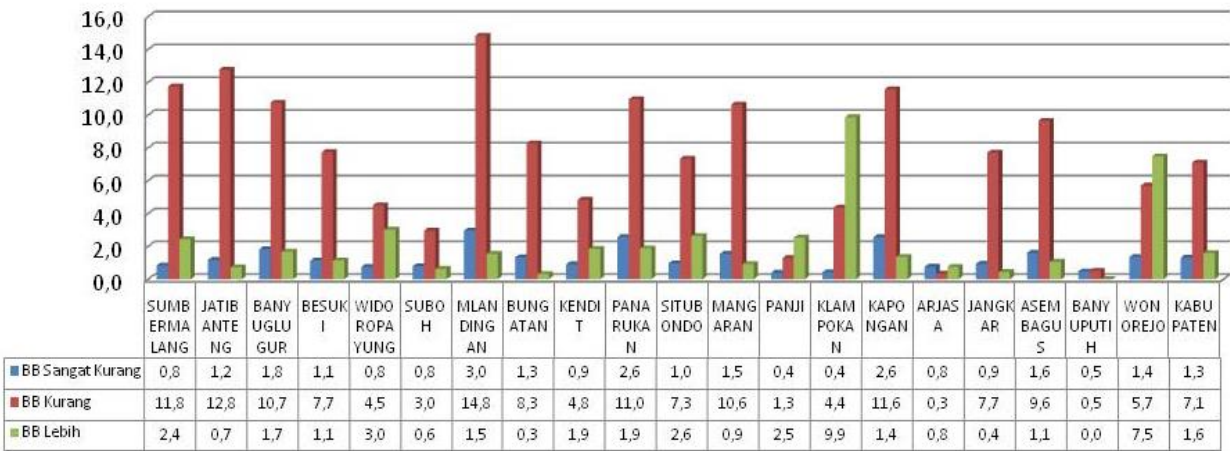
- 1) **Pengetahuan** : peningkatan pengetahuan menjadi tujuan utama dalam mengatasi gizi buruk, dan dilakukan dengan cara penyuluhan, penyelenggaraan TPG (Taman Pemulihan Gizi) dan konseling di Rumah Pemulihan Gizi (RPG).
- 2) **Kemiskinan** : untuk penderita gizi buruk seluruh biaya pengobatan telah digratiskan oleh pemerintah, termasuk pemberian obat, pemeriksaan, dan terapi di RPG.
- 3) **Sakit** : sebagian besar penderita gizi buruk memiliki penyakit penyerta yang dapat mengakibatkan gizi buruk maupun memperburuk keadaan. Terdapat balita yang menderita gizi buruk memiliki penyakit penyerta diantaranya: PJB (penyakit jantung bawaan), TBC (*mycobacteriumtuberculosis*), *CerebralPalsy*, HIV, dll.
- 4) **BBLR** : penyebabnya dari ibu hamil anemia dan ibu hamil KEK.

2.1.2.2.3. Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk+ Gizi Kurang)



Gambar 2. 26: Prevalensi Gizi Kurang di Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

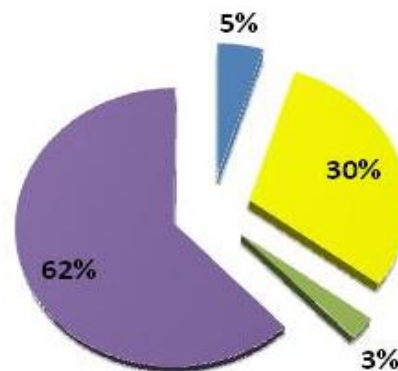


Gambar 2. 27: Status Gizi Berdasarkan BB/U di Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

HASIL PENANGANAN KASUS GIZI BURUK DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019

■ DO ■ SEMBUH ■ MENINGGAL ■ BELUM SEMBUH



Gambar 2. 28 : Hasil Penanganan Gizi Buruk di Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

Dari 115 kasus gizi buruk telah tertangani 100% sesuai dengan TLAGB (Tata Laksana Gizi Buruk), yaitu dengan pemberian PMT, rujukan ke faskes yang lebih tinggi, perawatan di TFC, kontrol dan terapi serta edukasi di RPG, belajar pembuatan makanan yang bergizi di TPG didapatkan hasil 30% sembuh, 62% belum sembuh, 5% *dropout* (pindah wilayah), dan 3% meninggal.

Hal-hal yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Situbondo untuk menekan kejadian kasus gizi buruk adalah optimalisasi TPG, TFC, RPG pemberian makanan tambahan, suplementasi, peningkatan surveilans, pemantapan kinerja petugas dalam penatalaksanaan gizi buruk (respon cepat).

- 1) **TFC (Theurapeutic Feeding Center)** sebagai tempat perawatan dan pengobatan anak gizi buruk secara intensif di ruangan khusus dan ibu /keluarga ikut aktif terlibat.
- 2) **TPG (Taman Pemulihan Gizi)** yang bertujuan mendekatkan pelayanan gizi untuk mencegah gizi buruk dan intervensi BGM, 2T dan Gizi kurang dengan pemecahan masalah yang sudah ada di masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
- 3) **Sarasehan kelompok pendukung ASI** yang mendukung ibu untuk percaya diri memberikan ASI dan menjaga kelangsungan menyusui dan menurunkan prevalensi balita pendek
- 4) **Pelayanan gizi terintegrasi di RPG (Rumah Pemulihan Gizi)** dengan semboyan Situbondo Anti Stunting, yakni pemberian Fe dan Asam Folat untuk mencegah anemia, Penguatan ASI Eksklusif, pemberdayaan KADARZI (Keluarga Sadar Gizi) dan penanggulangan KEP, GAKY dan KVA.



2.1.2.2.2.4. **Prevalensi Balita Stunting**

Stunting atau kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 2-3 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.

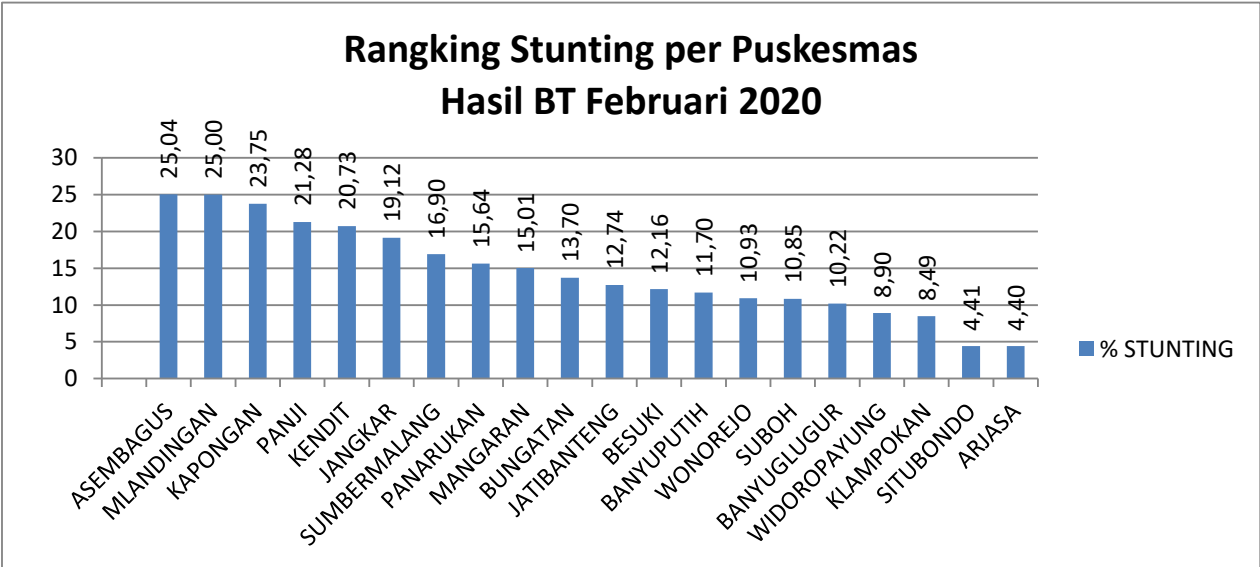
Dari 20 puskesmas, setelah dilakukan penimbangan balita didapatkan bahwa jumlah balita pendek atau stunting yang tertinggi di Puskesmas Asembagus dengan jumlah 193 balita stunting dari 267 balita yang diperiksa. Sedangkan jumlah balita pendek atau stunting yang terendah di Puskesmas Arjasa dengan jumlah 96 balita stunting dari 2181 balita yang diperiksa.

Tabel 2.13 : Jumlah Balita Stunting Per Kecamatan di Kabupaten Situbondo

Peringkat	Kecamatan	Desa	Jumlah Stunting	Prevalensi Stunting
1	Suboh	Buduan	135	26,73
2	Panarukan	Alasmalang	102	35,54
3	Besuki	Bloro	79	29,15
4	Jatibanteng	Kembangsari	76	62,81
5	Kapongan	Gebangan	76	34,23
6	Kapongan	Landangan	72	40,91
7	Panarukan	Peleyan	72	31,72
8	Kapongan	Seletreng	69	26,04
9	Jatibanteng	Semambung	68	31,19
10	Panarukan	Duwet	65	29,28
17	Bungatan	Sumber Tengah	50	26,18
18	Mlandingan	Mlandingan Kulon	48	28,40
19	Suboh	Gunung Putri	46	25,41
20	Banyuglugur	Lubawang	37	40,66
21	Kendit	Rajekwesi	37	29,60
22	Sumbermalang	Alastengah	36	35,29
23	Kapongan	Kapongan	34	26,77
24	Jatibanteng	Sumberanyar	32	38,10
25	Jatibanteng	Pategalan	32	34,41
11	Panarukan	Sumberkolak	171	17,65
12	Panarukan	Kilensari	146	22,02
13	Jangkar	Sopet	76	17,84
14	Besuki	Demung	74	23,20
15	Mangaran	Tanjung Kamal	73	18,81
16	Asembagus	Bantal	65	23,30
26	Mangaran	Tanjung Glugur	58	22,66
27	Asembagus	Trigonco	54	16,56
28	Asembagus	Mojosari	53	23,98

Peringkat	Kecamatan	Desa	Jumlah Stunting	Prevalensi Stunting
29	Kendit	Klatakan	52	17,39
30	Panarukan	Paowan	51	20,08
31	Asembagus	Wringinanom	51	16,67
32	Panji	Panji Kidul	49	21,03
33	Asembagus	Kertosari	49	16,44
34	Jangkar	Jangkar	48	17,71
35	Mangaran	Semiring	46	19,25
36	Jangkar	Palangan	44	19,30
37	Kendit	Tambak Ukir	43	19,63
38	Kendit	Bugeman	42	23,33
39	Banyuputih	Banyuputih	42	19,18
40	Jangkar	Agel	39	19,31
41	Sumbermalang	Kalirejo	37	16,67
42	Mlandingan	Sumber Pinang	36	19,67
43	Kapongan	Kesambirampak	34	22,22
44	Asembagus	Kedunglo	32	20,92
45	Sumbermalang	Plalangan	32	18,18
46	Panji	Klampokan	31	15,20

Sumber : Data diolah, BAPPEDA Kabupaten Situbondo



Gambar 2. 29: Rangking Stunting per Puskesmas Hasil BT Februari 2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2021

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

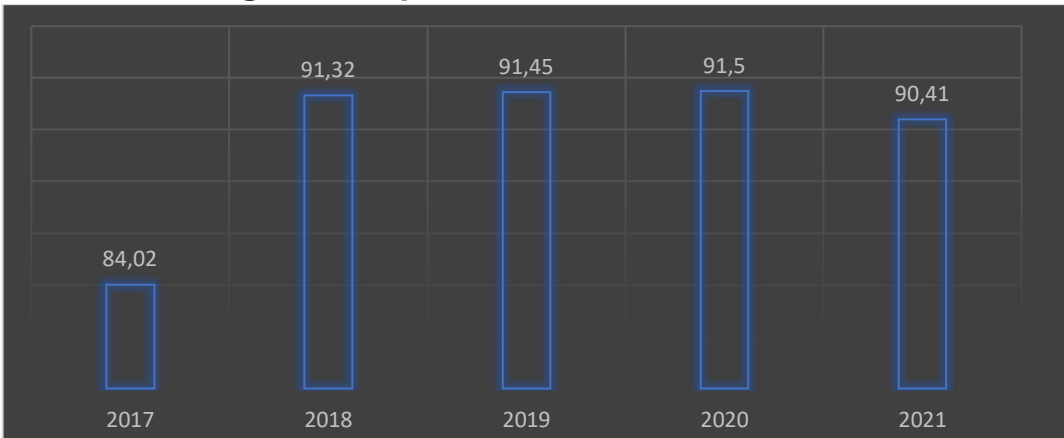
2.1.3.1. Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1. Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang diprioritaskan dalam pembangunan daerah. Urusan pendidikan menjadi prioritas pertama dalam strategi pembangunan daerah.

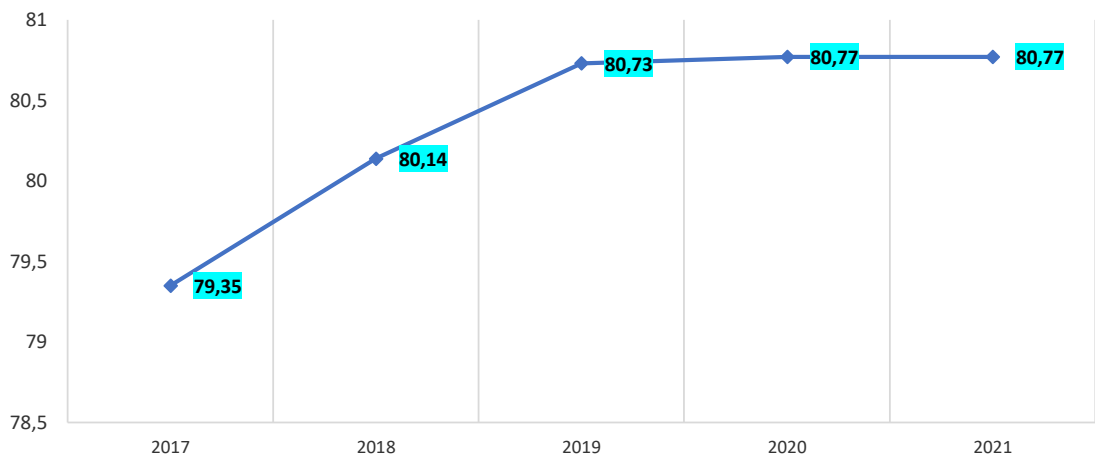


2.1.3.1.1.1. Angka Partisipasi Murni



Gambar 2. 30: Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo 2022

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah seluruh murid sekolah untuk jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah seluruh anak usia sekolah untuk jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APM berarti menandakan banyak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. APM Kabupaten Situbondo pada jenjang SD/MI dalam 5 tahun terakhir ini mempunyai trend yang fluktuatif. Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 84,02%, angka tersebut meningkat pada tahun 2018 menjadi 91,32%, dengan jumlah peserta didik SDN Negeri/Swasta, MI Negeri/Swasta dan Paket A usia 7-12 tahun sebanyak 51.191, dan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 56.059. APM Pendidikan di Kabupaten Situbondo meningkat kembali menjadi 91,45% di tahun 2019 dengan jumlah siswa SDN Negeri/Swasta, MI Negeri/Swasra dan Paket A usia 7-12 tahun sebanyak 61.117, sedangkan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 66.809. Pada tahun 2020 APM SD/MI naik menjadi 91,5% namun menurun pada tahun 2021 menjadi 90,41. APM Kabupaten Situbondo pada jenjang SD/MI masih jauh dari angka ideal 100%, perlu perhatian serius guna meningkatkan Angka Partisipasi Murni pada jenjang SD/MI.



Gambar 2. 31: Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo 2022



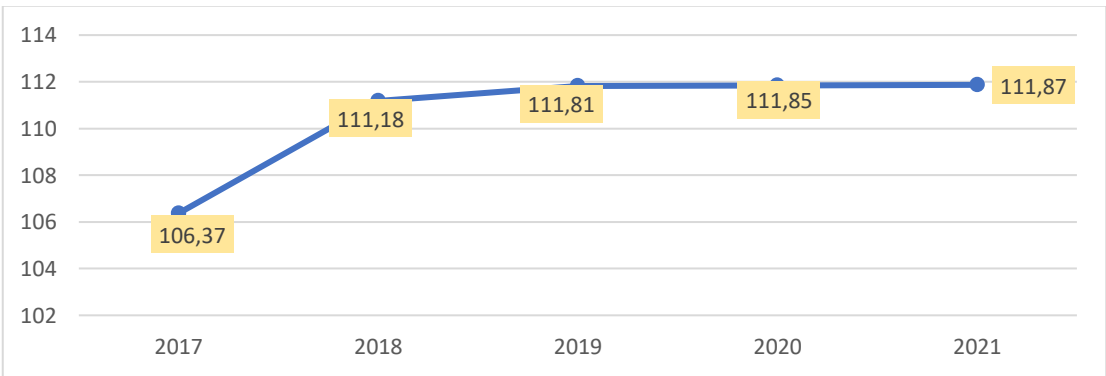
Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMP/MTs juga menunjukkan trend yang fluktuatif. Terjadi penurunan drastic dari tahun 2016 ketahun 2017 menjadi 79,35%. Angka tersebut berhasil mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 0,79% menjadi 80,14% dengan jumlah siswa SMP Negeri/Swasta, MTS Negeri/Swasta dan Paket B usia 13-15 tahun sebanyak 24.125, dan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 30.014. APM SMP/MTs Kabupaten Situbondo meningkat kembali di tahun 2019 sebesar 0,59% menjadi 80,73% dengan jumlah siswa SMP Negeri/Swasta, MTS Negeri/Swasta dan Paket B usia 13-15 tahun sebanyak 24.855, sedangkan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 30.785. Sedangkan pada tahun 2020 Angka Partisipasi Murni sebesar 80,77% dan 80,86% pada tahun 2021. Angka Partisipasi Murni pada jenjang SMP/MTs Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terahir masih belum mampu menyentuh angka 90%.

Angka Partisipasi Murni Perempuan SMP/MTS tahun 2019 atau APM Perempuan SMP/MTS sebesar 81,79%, dengan jumlah siswa perempuan SMP Negeri/Swasta dan MTS Negeri/Swasta usia 13-15 tahun sebanyak 12.253, sementara jumlah penduduk perempuan usia 7-12 tahun sebanyak 14.981. Sedangkan Angka Partisipasi Murni Laki-Laki SMP/MTS tahun 2019 atau APM Laki-laki SMP/MTS sebesar 79,73%, dengan jumlah siswa laki-laki SD Negeri/Swasta dan MI Negeri/Swasta usia 13-15 tahun sebanyak 12.602, dari jumlah penduduk laki-laki usia 13-15 tahun sebanyak 15.805.

Seperti halnya APM SD/MI,dari APM Perempuan dan APM Laki-laki SMP/MTS tahun 2019 tersebut diatas, didapatkan perbandingan bahwa partisipasi keterlibatan siswa perempuan dalam pendidikan tingkat SD/MI lebih tinggi daripada keterlibatan siswa laki-laki.

2.1.3.1.1.2. **Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah seluruh murid sekolah untuk jenjang Pendidikan tertentu dengan jumlah seluruh anak usia sekolah untuk jenjang Pendidikan tersebut. Berikut akan dijabarkan nilai Angka Partisipasi Kasar untuk Jenjang Pendidikan PAUD sampai SMP/MTs.

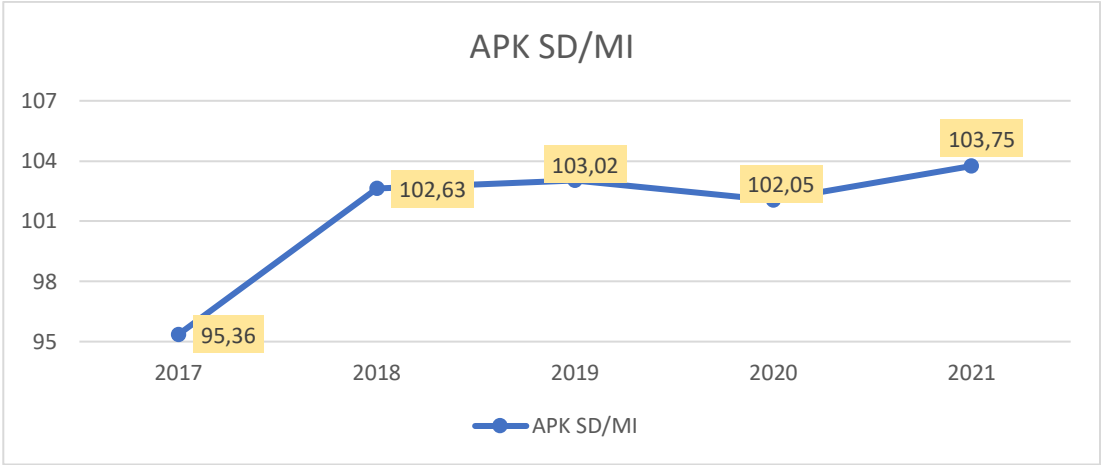


Gambar 2. 32: **Angka Partisipasi Kasar PAUD Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo 2022



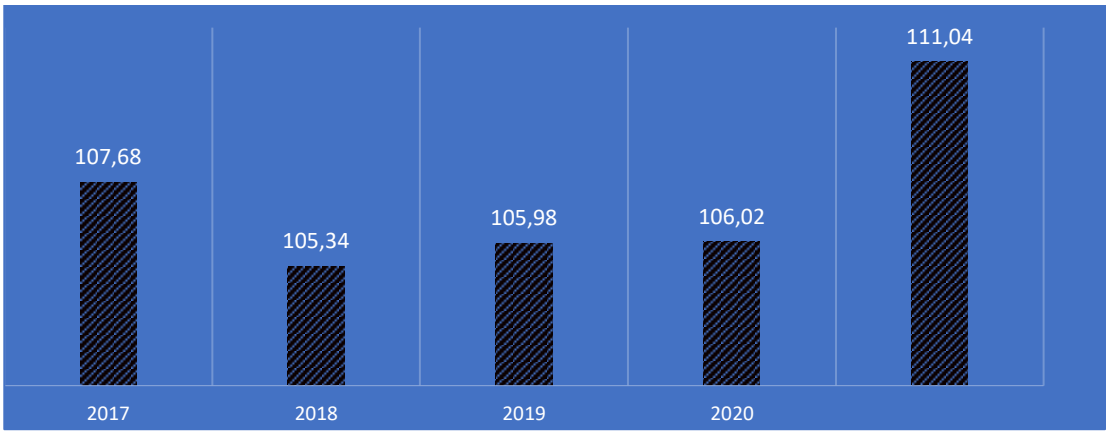
APK PAUD tahun 2017 sebesar 106,37 lalu meningkat di tahun 2018 sebesar 111,18% dengan jumlah siswa PAUD Negeri/Swasta sebanyak 27.623, sedangkan jumlah penduduk usia 4-6 tahun sebanyak 24.845. Dari angka tersebut di atas tampak bahwa APK PAUD Tahun 2019 naik 0,63 persen dari tahun 2018. Angka Partisipasi Kasar PAUD atau APK PAUD Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 sebesar 111,81%, dengan jumlah siswa PAUD Negeri/Swasta sebanyak 21.874, sementara jumlah penduduk usia 4-6 tahun sebanyak 19.563. APK PAUD pada Tahun 2020 sebesar 111,85 dan pada tahun 111,87.



Gambar 2. 33: Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo 2021

Berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Situbondo secara umum mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Pada jenjang pendidikan SD/MI Tahun 2017 APK SD/MI mengalami penurunan menjadi 95,36% lalu angka tersebut naik menjadi 102.63% pada tahun 2018 dengan siswa SD/MI sebanyak 57.536, dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 56.059. Angka Partisipasi Kasar SD/MI mencapai 103,02% pada tahun 2019 dengan jumlah siswa SD Negeri/Swasta, MI Negeri/Swasta dan Paket A sebanyak 68.825, sementara jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 66.809, sedangkan pada tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar SD/MI turun mencapai 102,05% dan Kembali meningkat di tahun 2021 sebesar 103,75% .



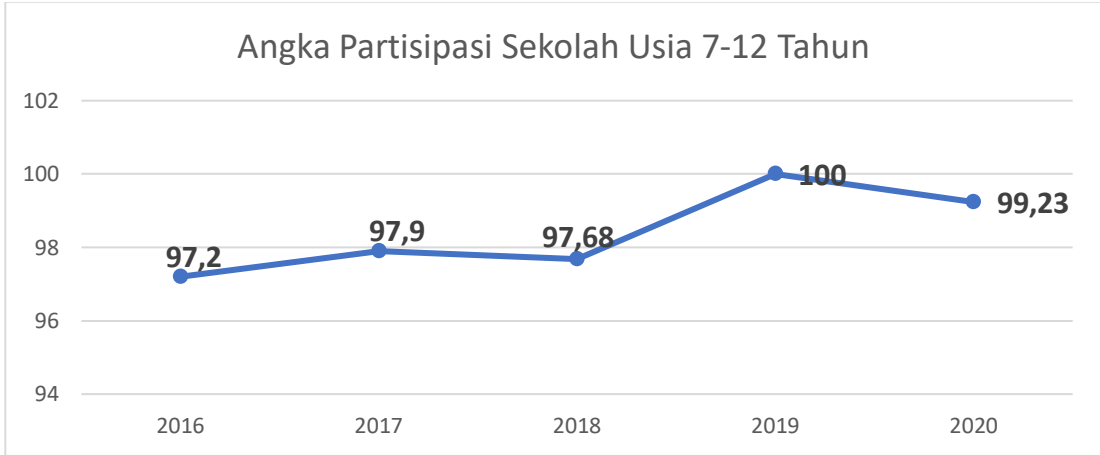
Gambar 2. 34 : Angka Partisipasi Kasar SMP / MTs Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo 2022



Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan SMP/MTs Kabupaten Situbondo juga mengalami trend yang fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 APK SMP sebesar 107,68 dan menurun di tahun 2018 menjadi 105,34 dengan jumlah siswa SMP/MTS sebanyak 31.712 dari jumlah penduduk usia 12-15 tahun sejumlah 30.104. Pada tahun 2019 dan 2020 APK untuk jenjang SMP/MTs Kabupaten Situbondo meningkat Kembali menjadi 105,98 dengan jumlah siswa SMP Negeri/Swasta, MTS Negeri/Swasta dan Paket B sebanyak 32.626 , sementara jumlah penduduk usia 3-15 tahun sebanyak 30.785 dan 106,02 di tahun 2020 dan pada tahun 2021 menjadi 111,04.

2.1.3.1.1.3. Angka Partisipasi Sekolah



Gambar 2. 35: Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang Pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang Pendidikan tersebut. Untuk usia 7-13 tahun, APS Kabupaten Situbondo mengalami tren yang fluktuatif selama 3 tahun terakhir ini. Pada tahun 2016, APS Kabupaten Situbondo usia 7-12 tahun berada pada angka 97,2, namun pada tahun 2017 angka tersebut mengalami penurunan menjadi 97,09% dan Kembali meningkat pada tahun tahun 2018 menjadi 97,68, sedangkan Angka pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 100, sedang pada tahun 2020 menurun di angka 99,23.



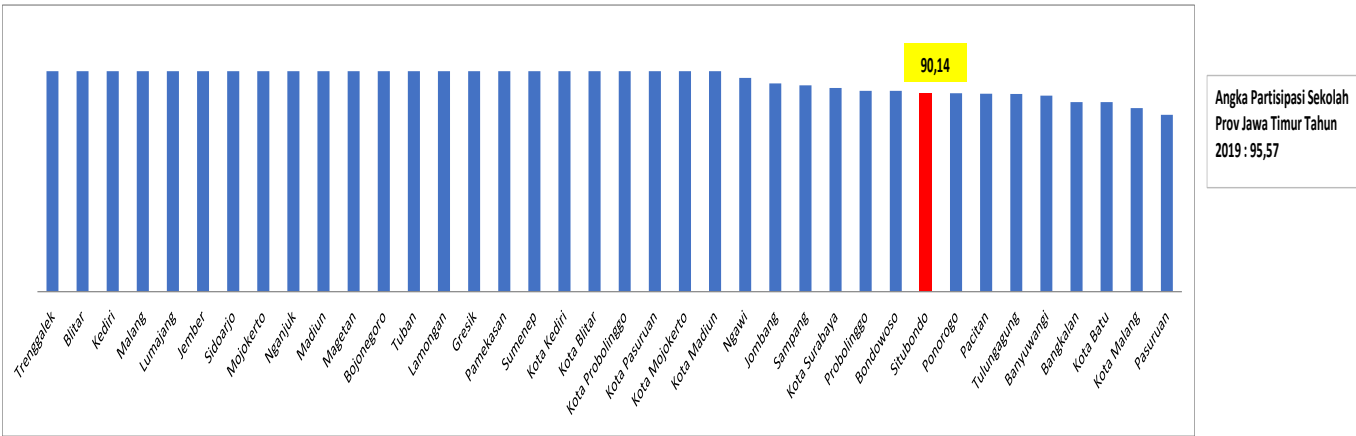
Gambar 2. 36: Angka Partisipasi Sekolah usia 12-15 Tahun Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2020



APS untuk usia 12-15 tahun Kabupaten Situbondo dalam 3 tahun terakhir ini juga mengalami tren yang fluktuatif. Dimana angka terbesar berada pada tahun 2016 yaitu 95,91% dan angka terendah berada pada tahun 2017 dengan 95,579%. Pada tahun 2016, APS Kabupaten Situbondo untuk usia 12-15 tahun berada pada angka 95,91%, turun menjadi 95,79% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 95,86% pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 menurun menjadi 90,14%. Dalam tiga tahun terakhir, APS untuk usia 12-15 tahun Kabupaten Situbondo juga masih jauh dari angka ideal 100%.

Sementara apabila dibandingkan dengan APS untuk usia 12-15 tahun pada seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, Kabupaten Situbondo berada di posisi 30, dan posisi paling terakhir adalah Kabupaten Pasuruan dengan angka APS 80,19%.



Gambar 2. 37: Angka Partisipasi Sekolah usia 12-15 Tahun Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2020

2.1.3.1.1.4. Angka Kelulusan

Angka kelulusan sekolah adalah angka persentase siswa yang telah berhasil lulus pada setiap jenjang pendidikan. Berikut akan ditampilkan Angka kelulusan sekolah dari jenjang SD/MI sampai SMP/MTS.



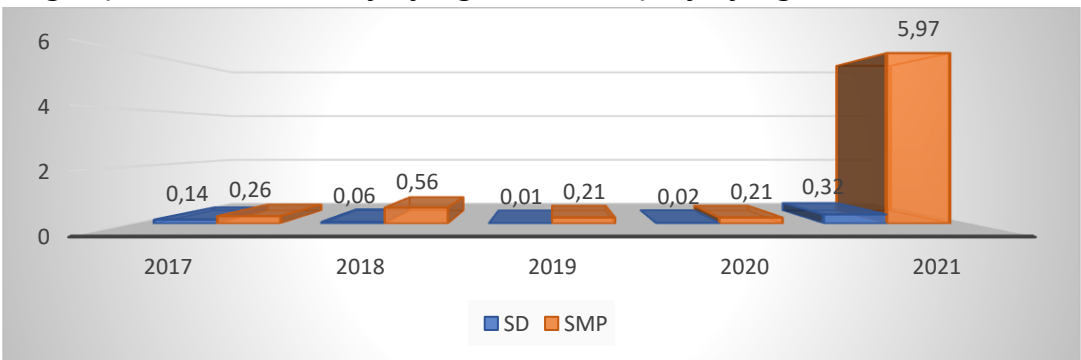
Gambar 2. 38: Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo 2021

Pada jenjang pendidikan SD/MI presentase kelulusan siswa Kabupaten Situbondo dari tahun 2016-2019 tercatat sebesar 100%. Ini menandakan bahwa setiap siswa SD/MI berhasil lulus 100% tiap tahunnya. Angka kelulusan SD/MI Tahun 2019 sebesar 100%,sebanyak 9718 siswa dari peserta ujian sebanyak 9718. Begitu juga di tahun 2018, angka kelulusan SD/MI sebesar 100%, dengan lulusnya seluruh 8.169 siswa peserta ujian akhir Sekolah Berstandar Nasional. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2016 angka kelulusan sebesar 99,94% dan mulai tahun 2017-2020 angka kelulusan untuk jenjang SMP/MTs berhasil memperoleh angka yang sempurna yaitu 100%. Angka kelulusan SMP/MTs sebesar 100%, sebanyak 10512 siswa dari peserta ujian sebanyak 10512. Di tahun 2018 angka kelulusan SMP/MTs juga mencapai 100%, dengan lulusnya seluruh 6.505 siswa peserta ujian akhir Sekolah Berstandar Nasional.

2.1.3.1.1.5. **Angka Putus Sekolah**

Angka Putus Sekolah adalah angka (jumlah siswa) putus sekolah per 100 siswa pada setiap jenjang pendidikan. Berikut akan kami sampaikan Angka putus sekolah dari jenjang SD/MI sampai jenjang SMP/MTs.



Gambar 2. 39: Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo 2022

Pada jenjang pendidikan SD/MI angka putus sekolah tahun 2017 0,14 siswa SD/MI yang putus sekolah, angka putus sekolah jenjang SD/MI berhasil menurun di tahun 2019 menjadi 0,01. Namun, pada tahun 2020 angka mengalami kenaikan menjadi 0,02% dan mengalami kenaikan yang sangat tinggi sampai pada angka 5,97% pada tahun 2021. Sedangkan, untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, angka putus sekolah pada tahun 2016 sebesar 0,27%, angka tersebut turun pada tahun 2017 menjadi sebesar 0,26%. Untuk tahun 2018, APS SMP/MTS sebesar 0,56% dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 0, 21% pada tahun 2019. Termasuk pada tahun 2020 masih sama yaitu sebesar 0,21%.

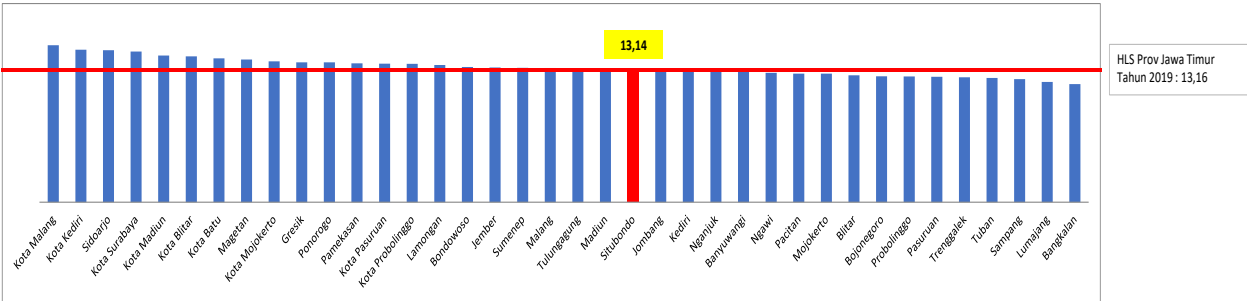
Angka Putus Sekolah SD/MI atau APS SD/MI Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 sebesar 0,01%, dengan jumlah siswa yang putus sekolah SD Negeri/Swasta, MI Negeri/Swasta dan Paket A sebanyak 4 siswa putus sekolah, dari jumlah siswa SD/MI sebanyak 68.825. Sedangkan untuk tahun

2018, APS SD/MI sebesar 0,06%. Semakin kecil angka APS, maka semakin kecil presentase angka putus sekolah. Angka Putus Sekolah SMP/MTS atau APS SMP/MTS Kabupaten Situbondo tahun 2019 sebesar 0.21%, dengan jumlah siswa yang putus sekolah SMP/MTS Negeri/Swasta, MI Negeri/Swasta dan Paket B sebanyak 67 siswa putus sekolah, dari jumlah siswa SMP/MTS sebanyak 32.626. Untuk tahun 2018, APS SMP/MTS sebesar 0,56%.

2.1.3.1.1.6. **Angka Harapan Lama Sekolah**

Angka harapan lama sekolah menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Situbondo yaitu 13,14. Angka ini menjadi peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan lamanya peluang penduduk yang bersekolah sampai saat ini yaitu sampai usia 13 tahun. Dan angka tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meski kenaikannya tidak terlalu signifikan. Dibandingkan dengan capaian harapan lama sekolah Provinsi Jawa Timur yaitu 13,16 menunjukkan capaian kinerja Pemerintah sudah berada di jalurnya sehingga angka capaiannya hampir sama dengan capaian Provinsi Jawa Timur.



Gambar 2. 40: Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

2.1.3.1.1.7. **Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah**

Tabel 2.14: Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Situbondo Tahun 2020

SEKOLAH					
TK		SD		SMP	
Negeri/Swasta	RA	Negeri/Swasta	MI	Negeri/Swasta	MTS
272	135	444	93	91	99
407		537		190	
PENDUDUK USIA SEKOLAH					
4-6 TAHUN		7-12 TAHUN		13-15 TAHUN	
19563		66809		30786	

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo, 2021



Dari tabel tersebut tampak bahwa ketersediaan sekolah TK (PAUD, KB, PPT, TPA) negeri/swasta dan RA sebanyak 407 sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah 4-6 tahun sebanyak 19.563. maka rata-rata tiap sekolah TK Negeri/Swasta dan RA memiliki jumlah murid sebanyak 48 orang.

Sementara jumlah ketersediaan SD Negeri/Swasta dan MI sebanyak 537 sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun sebanyak 66.809, maka rata-rata tiap sekolah SD Negeri/Swasta dan MI memiliki jumlah murid sebanyak 124 orang. Sedangkan untuk SMP, jumlah ketersediaan SMP Negeri/Swasta dan MTS sebanyak 190 sekolah, dan jumlah penduduk usia sekolah 13-15 tahun sebanyak 30.786 orang, maka rata-rata tiap sekolah SMP Negeri/Swasta dan MTS memiliki jumlah murid sebanyak 162 orang.

Kondisi dan ketersediaan ruang kelas saat ini dapat dikatakan mencukupi, meskipun upaya pembangunan yang berkelanjutan tetap harus dilaksanakan. Pada jenjang SD, saat ini terdapat 2.871 ruang kelas, dimana 904 ruang kelas kondisinya baik, 1.974 ruang kelas kondisinya rusak ringan dan tidak ada ruang kelas yang mengalami rusak berat. Sementara di jenjang SMP ada 228 ruang kelas dengan kondisi baik dan 654 ruang kelas rusak ringan dengan jumlah ruang kelas yang ada sebanyak 874.

Tabel 2. **15:** Sebaran kondisi ruang kelas pada jenjangSD dan SMP di
Kabupaten Situbondo

No	Kecamatan	SD			SMP		
		Baik	Ringan	Jumlah	Baik	Ringan	Jumlah
1	Arjasa	50	165	215	12	31	43
2	Asembagus	53	163	216	0	57	57
3	Banyuglugur	11	70	81	7	36	43
4	Banyuputih	103	92	195	25	185	207
5	Besuki	73	184	257	20	31	51
6	Bungatan	32	77	109	12	12	24
7	Jangkar	45	102	147	0	39	39
8	Jatibanteng	53	87	140	0	9	9
9	Kapongan	24	128	152	0	26	26
10	Kendit	48	101	146	0	15	15
11	Mangaran	41	75	116	23	16	39
12	Mlandingan	21	80	101	13	9	22
13	Panarukan	55	167	222	12	40	52
14	Panji	119	157	272	44	37	81
15	Situbondo	145	103	248	39	81	115
16	Suboh	19	105	124	9	24	33
17	Sumbermalang	12	118	130	12	6	18
	Jumlah	904	1974	2871	228	654	874

Sumber : Dapodik Kab. Situbondo Th. 2020



2.1.3.1.1.8. Rasio Ketersediaan Guru dibanding Murid

Tabel 2.16: Jumlah Guru dan Jumlah Murid di Kabupaten Situbondo Tahun 2020

GURU					
TK		SD		SMP	
Negeri/Swasta	RA	Negeri/Swasta	MI	Negeri/Swasta	MTS
949	418	5267	976	1504	1256
1367		6243		2760	
MURID					
TK		SD		SMP	
Negeri/Swasta	RA	Negeri/Swasta	MI	Negeri/Swasta	MTS
11106	5642	48275	8578	21265	11082
16748		56853		32347	

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo, 2021

Dari tabel tersebut tampak bahwa, jumlah guru TK Negeri/Swasta dan RA sebanyak 1367 guru, sedangkan jumlah murid TK Negeri/Swasta dan RA sebanyak 16748 murid, sehingga rata-rata tiap guru menangani 12-13 murid. Untuk angka beban guru SD dan MI, dari jumlah guru SD Negeri/Swasta dan MI sebanyak 6243 guru, dan jumlah murid SD Negeri/Swasta dan MI sebanyak 56853 murid, didapatkan rata-rata tiap guru menangani 9-10 murid. Sementara untuk jumlah guru SMP/MTS dan MI sebanyak 2760 guru, sedangkan jumlah murid SMP Negeri/Swasta dan MI sebanyak 56853 murid, didapatkan rata-rata tiap guru menangani 11-12 murid.

Dari faktor kualifikasi tenaga pendidik, jenjang pendidikan tenaga pendidik di Kabupaten Situbondo mayoritas adalah Strata 1 Kependidikan, hanya sebagian kecil yang jurusannya non kependidikan. Pada jenjang SD, jumlah guru lulusan Strata 1 Kependidikan sebanyak 4.328 orang dan lulusan Strata 1 Non Kependidikan sebanyak 159 orang. Sedangkan di jenjang SMP, jumlah tenaga pendidik dengan kualifikasi Strata 1 Kependidikan sebanyak 1.207 orang dan 188 orang dengan kualifikasi Non Kependidikan. Adapun sebaran tenaga pendidik tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 17: Jumlah Guru Menurut Kualifikasi Pendidikan pada Jenjang SD dan SMP

No	Kecamatan	SD		SMP	
		S1 Kependidikan	S1 Non Kependidikan	S1 Kependidikan	S1 Non Kependidikan
1	Arjasa	265	3	71	4
2	Asembagus	269	11	97	9
3	Banyuglugur	135	2	71	2
4	Banyuputih	259	6	138	115
5	Besuki	363	11	78	12
6	Bungatan	175	6	36	5
7	Jangkar	204	5	36	2
8	Jatibanteng	189	5	15	0
9	Kapongan	308	12	37	2
10	Kendit	302	14	49	1
11	Mangaran	180	10	56	5

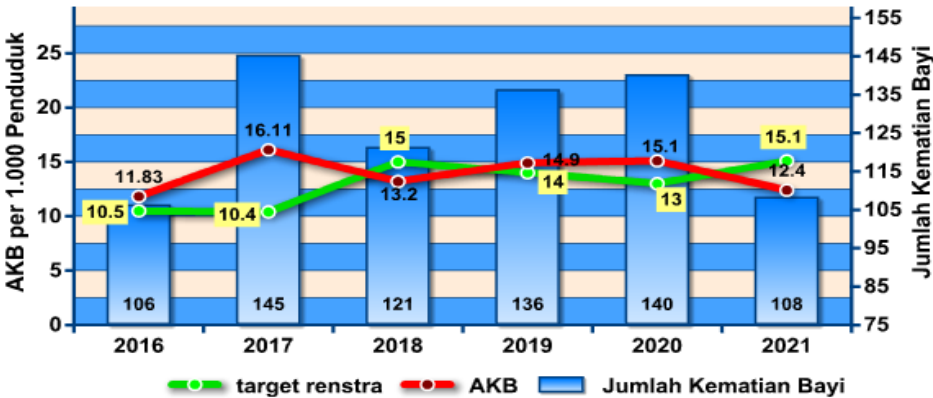
No	Kecamatan	SD		SMP	
		S1 Kependidikan	S1 Non Kependidikan	S1 Kependidikan	S1 Non Kependidikan
12	Mlandingan	224	7	24	9
13	Panarukan	360	16	76	4
14	Panji	396	14	125	4
15	Situbondo	325	24	214	10
16	Suboh	173	12	54	3
17	Sumbermalang	201	1	30	1
	Jumlah	4.328	159	1.207	188

Sumber : Dapodik Kab. Situbondo Th. 2020

2.1.3.1.2. Kesehatan

2.1.3.1.2.1. Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat bayi lahir sampai satu hari sebelum ulang tahun pertama. Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok usia yang paling rentan terkena dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi. Indikator AKB terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial-ekonomi, lingkungan tempat tinggal dan kesehatannya.



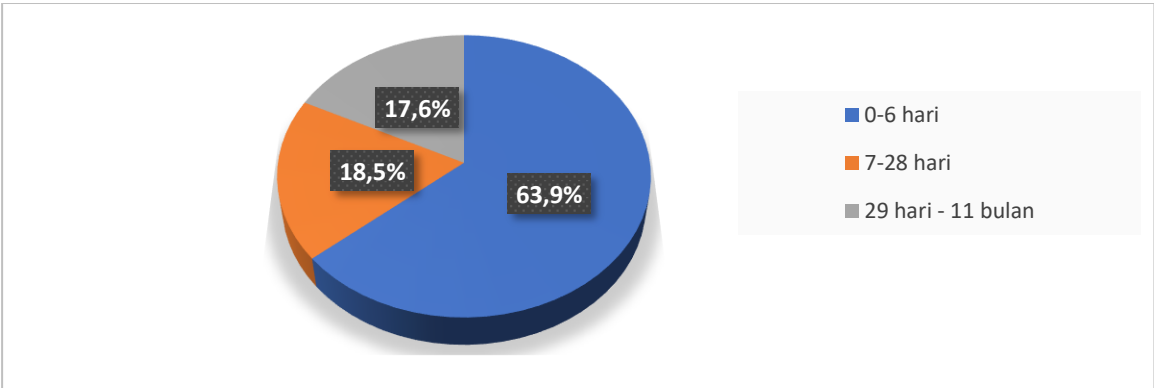
Gambar 2. 41: Angka Kematian Bayi Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2022

Berdasarkan Gambar 2.42 di atas diketahui bahwa AKB Kabupaten Situbondo tahun 2021 mengalami Penurunan 2.7 point dibandingkan tahun 2020, yakni dari 15,1 /1000 KH pada tahun 2020 (140 kematian bayi) menjadi 12,4/1000 KH pada tahun 2021 (108 kematian bayi).

Dukungan dan partisipasi bidan dalam melakukan penapisan dan deteksi resiko tinggi sangat diperlukan sehingga ibu hamil dengan resiko tinggi/komplikasi yang berpotensi melahirkan bayi dengan komplikasi mendapat penanganan kesehatan di fasilitas yang memadai sehingga kematian bayi dapat diminimalkan. Selain itu, adanya program pelatihan-pelatihan yang menunjang upaya penurunan kematian bayi seperti pelatihan manajemen Asfiksia, pelatihan standarisasi BBLR, Pelatihan Kelas ibu balita dan peningkatan SDM ibu hamil juga turut mendukung penekanan AKB.

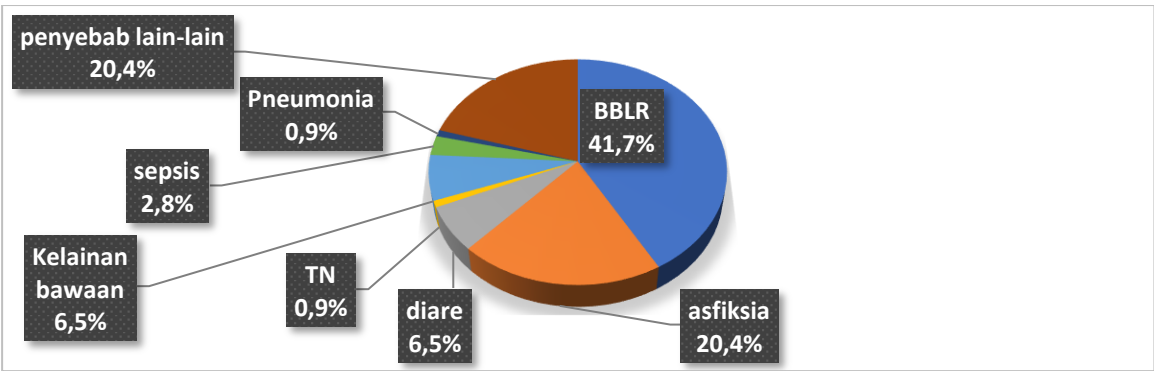
Berdasarkan kelompok usianya kematian bayi di Kabupaten Situbondo dapat dilihat berdasarkan usia: usia 0-6 hari sebanyak 69 kasus (63,9%), usia 7-28 hari sebanyak 20 kasus (18,5 %) serta usia 29 hari - 11 bln sebanyak 19 kasus (17,6 %). Dengan demikian total kematian bayi Kabupaten Situbondo Tahun 2021 sebanyak 108 kasus dari 8.704 kelahiran hidup.



Gambar 2. 42: Usia Kematian Bayi di Kabupaten Situbondo Tahun 2021

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Tahun 2021

Adapun penyebab Kematian Bayi dengan penyebab BBLR 45 kasus (41,7 %), asfiksia 22 kasus (20,4%), diare 7 kasus (6,6%), TN 1 kasus (0,9%), Kelainan bawaan 7 kasus (6,5%), sepsis 3 kasus (2,8 %), Pneumonia 1 kasus (0,9%) serta penyebab lain-lain 22 kasus (20,4%). Penyebab kematian bayi di Kabupaten Situbondo tahun 2021 terlihat pada Gambar di bawah ini.

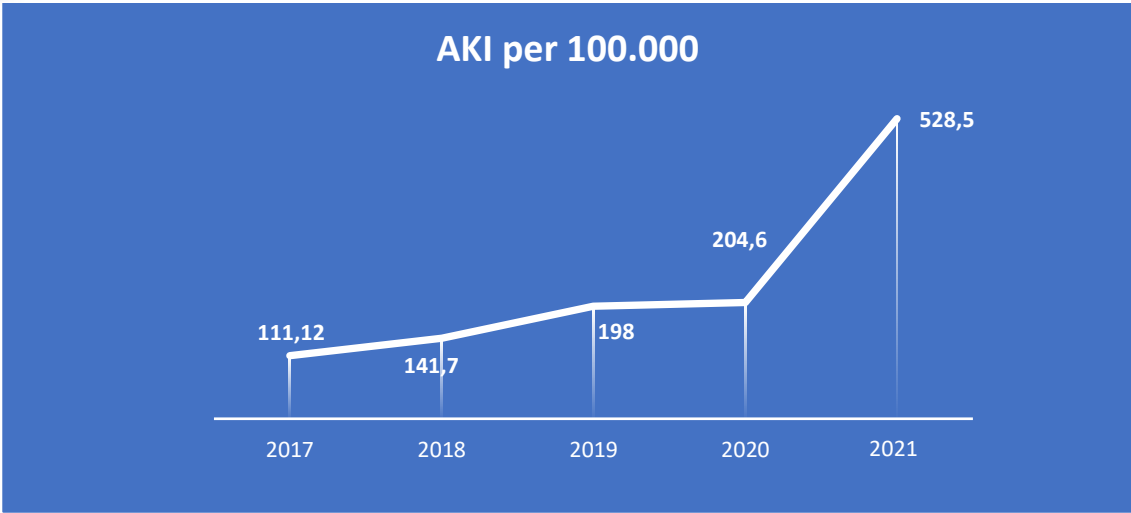


Gambar 2. 43: Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Situbondo Tahun 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Tahun 2021

2.1.3.1.2.2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator dampak Kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), di samping Angka Kematian Bayi (AKB). AKI dan AKB merupakan indikator keberhasilan pembangunan daerah dan juga digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak termin asi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lainnya seperti kecelakaan, Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung per 100.000 kelahiran hidup (kh).

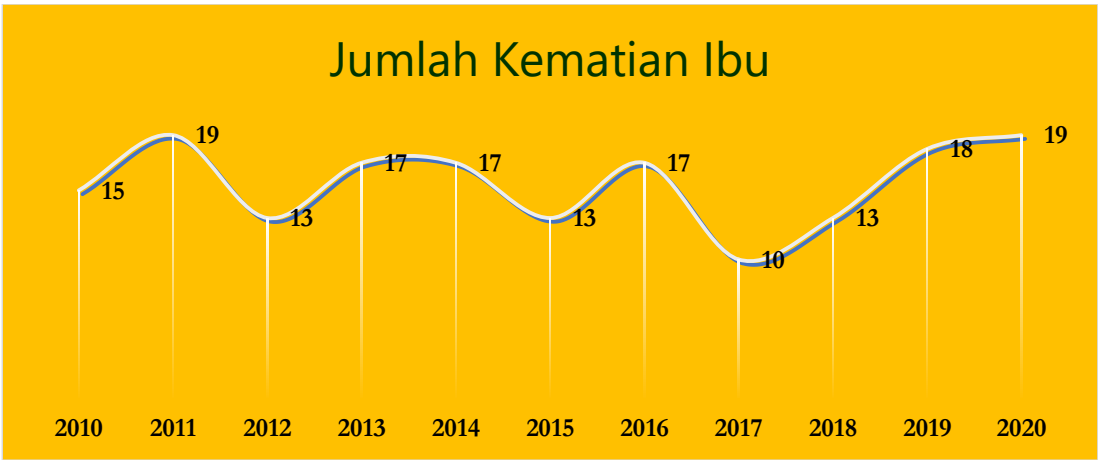


Gambar 2. 44: Angka Kematian Ibu Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2021

AKI di Kabupaten Situbondo selalu mengalami peningkatan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir dan tergolong tinggi. Pada tahun 2017 AKI Kabupaten Situbondo berada pada angka 111,12. Setelah itu AKI Kabupaten Situbondo terus mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga tahun 2020 dan menurun di tahun 2021. Berdasarkan Laporan Kematian Ibu dari Puskesmas se Kabupaten Situbondo tahun 2020 jumlah kematian ibu adalah 19 kasus dengan masa kematian ibu 11 orang (57,9%) pada masa hamil, 8 orang (42,1%) pada masa Nifas. Dengan kelahiran hidup pada tahun 2020 sebesar 9286 Kelahiran Hidup, maka AKI kabupaten Situbondo tahun 2020 adalah 204,6/ 100.000 KH (19 orang dari 9286 Kelahiran Hidup). Dengan target yang ditetapkan 105 (per 100.000 kelahiran hidup), berakibat capaian kinerja tidak tercapai.

Penurunan Angka Kematian Ibu sangat ditentukan oleh kesehatan serta kesiapan fisik ibu hamil, Usia ibu hamil, kualitas pelayanan Ibu Hamil (Bumil K4), Penanganan komplikasi kebidanan, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten, dan Kualitas pelayanan Ibu Nifas.



Gambar 2. 45: Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Situbondo Tahun 2010-2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2020



Penyebab Kematian Ibu pada tahun 2020 adalah Pre Eklamsi/ Keracunan kehamilan 5 orang (26,3%), penyakit jantung 4 orang (21,1%), Covid-19 ada 3 orang (15,8%), perdarahan 2 orang (10,5%), TB 2 orang (10,5%), Stroke 1 orang (5,3%) dan lain-lain 2 orang (10,5%) .

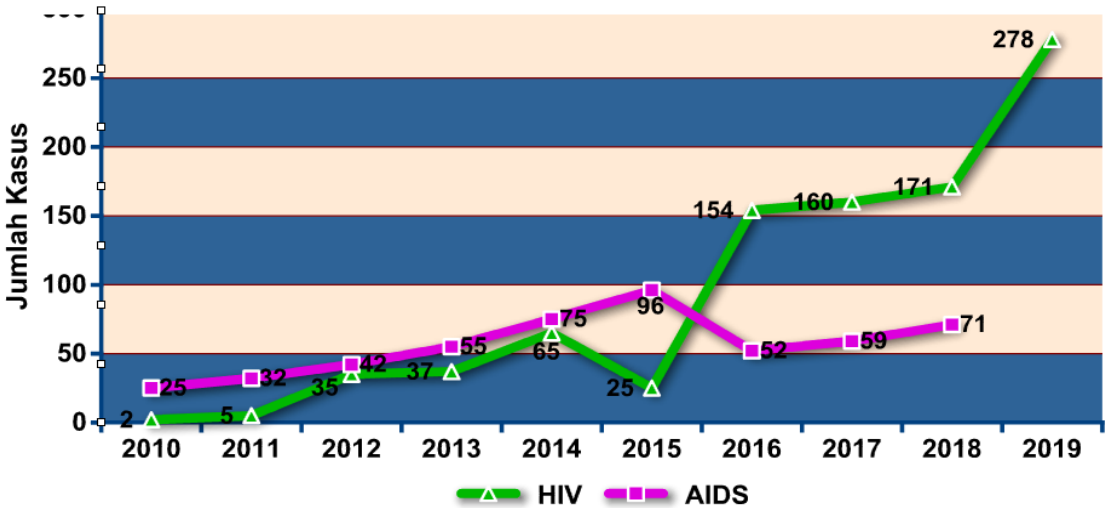
Kematian ibu berdasarkan tempat di Kabupaten Situbondo tahun 2019 mayoritas terjadi di rumah Sakit, yakni sebesar 83,3% (15 kematian) sedangkan 5,6 % (1 kematian) dikarenakan mengalami keterlambatan dalam sistem rujukan, 11,1 % (2 kematian) meninggal di rumah. dan komposisi kematian ibu terbanyak berdasarkan kelompok usia adalah pada usia produktif secara seksual (20-35 tahun), yakni sebesar 77,8% (14 orang). Rentang usia ini seharusnya menjadi usia yang paling aman untuk reproduksi dan Usia lebih >36 tahun sebesar 4 Kematian (22,2%) .

2.1.3.1.2.3. Penyakit Menular

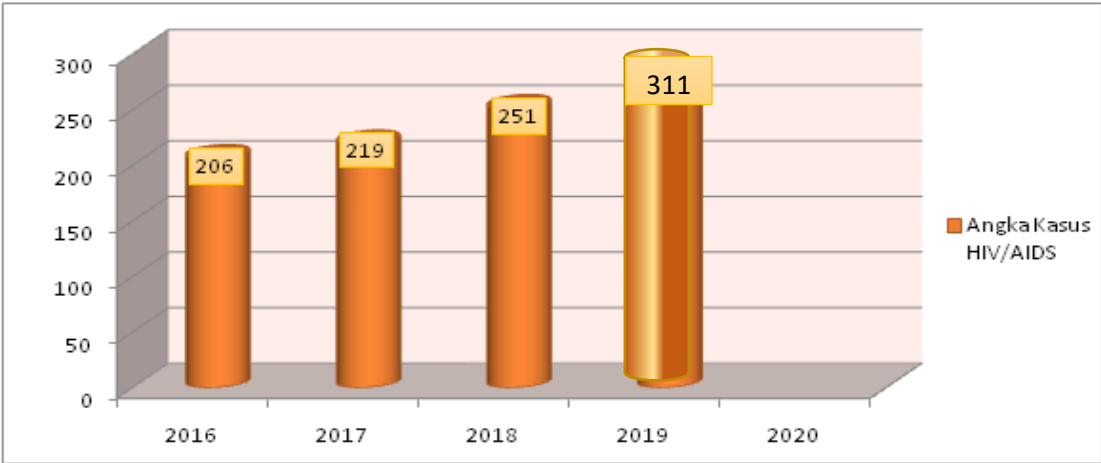
Beberapa penyakit menular langsung yang perlu mendapat perhatian, yakni TB Paru, Kusta, HIV/AIDS, Pneumonia dan Diare.

HIV/AIDS

Kasus HIV dan AIDS diperoleh dari laporan klinik *Voluntary Counseling and Testing* (VCT) di Rumah Sakit Abdoer Rahem serta klinik PITC (Provider Initiative Testing and Conseling). Di kabupaten Situbondo pada tahun tahun 2019 tercatat 287 kasus baru HIV dan 31 kasus baru AIDS. Angka ini kembali meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selama 8 tahun terakhir kasus HIV/AIDS di Kabupaten Situbondo cenderung terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Padahal angka-angka tersebut sesungguhnya jauh lebih kecil dibandingkan angka yang sebenarnya terjadi (fenomena gunung es). Gambar berikut menunjukkan peningkatan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Situbondo selama lima tahun terakhir.



Gambar 2. 46: Trend Kasus Baru HIV/AIDS di Kabupaten Situbondo Tahun 2010-2019
Sumber : Klinik VCT (*Voluntary Conseling Therapy*) Kabupaten Situbondo, 2020

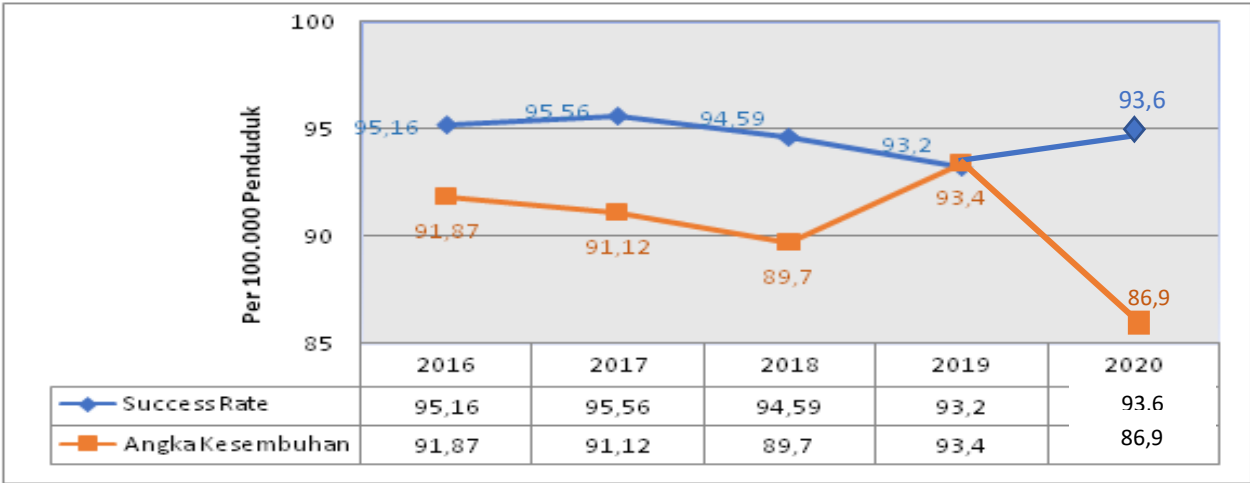


Gambar 2. 47: Angka Kasus HIV-AIDs Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo 2018 dan BPS Jawa Timur 2020

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Akibat penurunan daya tahan tubuh tersebut, penderita HIV mudah diserang berbagai macam penyakit infeksi (infeksi oportunistik). Infeksi inilah yang mengawali terjadinya penyakit AIDS pada seseorang. Penemuan kasus kumulatif HIV-AIDS di Kabupaten Situbondo dari tahun 2016-2019 adalah 954 kasus. Penemuan HIV-AIDS pada tahun 2016 adalah 206 kasus, lalu meningkat di tahun 2017 menjadi 219 kasus, tahun 2018 menjadi 251 kasus, dan pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 278 kasus. Pada Tahun 2020 angka kasus HIV-AIDS kembali meningkat menjadi 311 kasus, yang terdiri dari 246 kasus HIV dan 65 kasus AIDS.

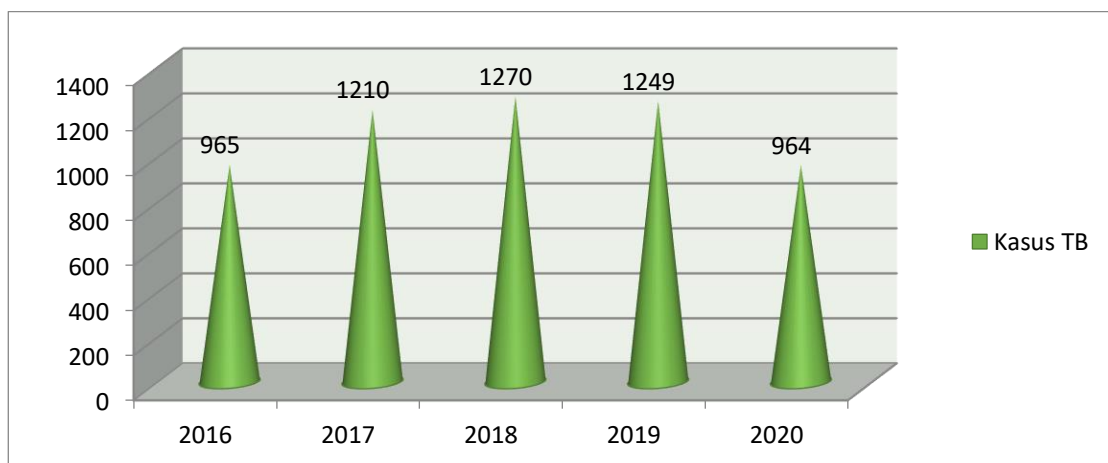
TB (Tuberculosis)

Trend Angka Kesembuhan dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru Kabupaten Situbondo Tahun 2016 s.d 2020 disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 2. 48: Trend Angka Kesembuhan dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru Kabupaten Situbondo Tahun 2016 s.d 2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2020

Angka kesembuhan penderita TB BTA Positif tahun 2019 merupakan data penderita yang diobati pada tahun 2018 yang telah menyelesaikan seluruh pengobatan di tahun 2019 dan dinyatakan sembuh oleh petugas. Dari sisi kesembuhan penderita yang diobati, angka yang didapatkan tahun 2019 adalah 93,4%. Capaian ini meningkat yakni sebesar 3.7 poin dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2020, angka kasus TB mengalami penurunan menjadi sebesar 1.216 kasus, sedangkan angka kesembuhan mengalami penurunan menjadi sebesar 86,9% namun disisi lain prosentase success rate mengalami kenaikan menjadi 93,6%. Walaupun selama tiga tahun terakhir angka kesembuhan TB Paru Kabupaten Situbondo mengalami penurunan, namun masih dikatakan berhasil karena telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni 85% untuk angka kesembuhan. Demikian juga halnya dengan angka keberhasilan pengobatan bisa dikatakan berhasil karena sudah di atas target *success rate* >95%.



Gambar 2. 49: Angka Kasus Penyakit TB Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo 2018 dan BPS Jawa Timur 2021

Temuan penyakit TB pada Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini masih terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2016 angka temuan kasus TB Kabupaten Situbondo mencapai 965 temuan, lalu angka tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2018 mencapai 1270 temuan sekaligus menjadikan tahun 2018 sebagai tahun dengan angka temuan penyakit TB tertinggi Kabupaten Situbondo dalam 4 tahun terakhir. Pada tahun 2019, angka temuan penyakit TB masyarakat Kabupaten Situbondo mengalami penurunan menjadi 1227 temuan. sebagaimana terlihat dalam grafik berikut. Pada masa pandemi di tahun 2020 ini, penemuan baik suspek maupun penderita TBC tidak mencapai target. Semua dipengaruhi adanya pandemi dimana masyarakat merasa ketakutan untuk memeriksakan diri dan begitu juga dengan pasien kontak penderita yang sedang pengobatan banyak yang menolak untuk diperiksa



Pneumonia Balita

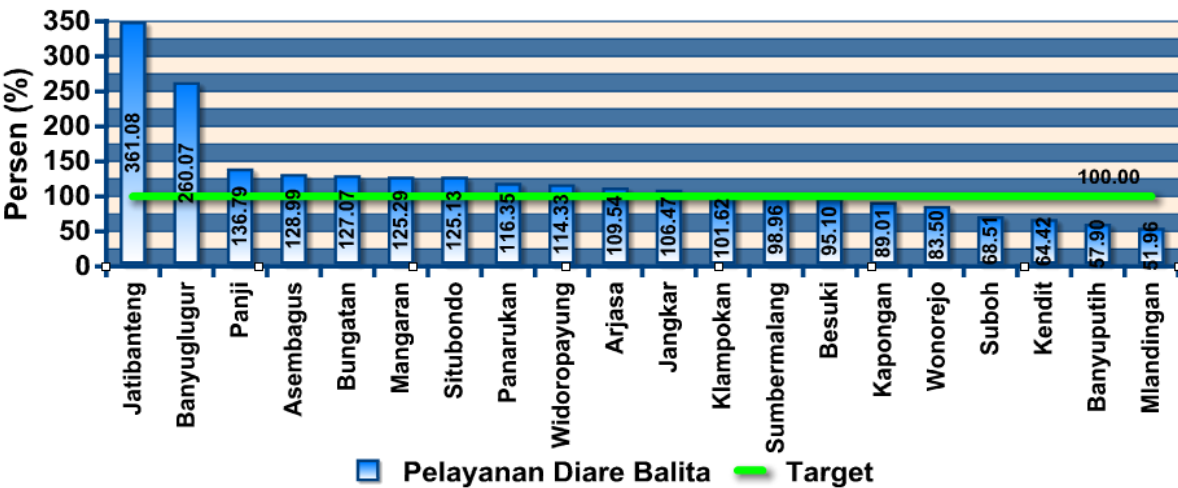
Upaya dalam rangka pemberantasan penyakit infeksi saluran pernafasan akut, dalam hal ini Pneumonia lebih difokuskan pada balita karena Pneumonia masih menjadi penyebab utama kematian balita. Program ini diutamakan pada upaya penemuan dini dan tatalaksana kasus yang cepat dan tepat terhadap penderita Pneumonia yang ditemukan. Selain itu, kecepatan keluarga dalam membawa penderita ke pelayanan kesehatan serta keterampilan petugas dalam menegakkan diagnosa merupakan kunci keberhasilan penanganan penyakit Pneumonia.

Jumlah penderita Pneumonia balita yang ditangani di Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 sebanyak 2606 kasus. Target PKP Penemuan Penderita Pneumonia Balita tahun 2019 adalah sebesar 80%, sehingga dapat dikatakan program Pneumonia berhasil memenuhi target.

Diare

Diare adalah pembunuh balita nomor dua setelah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Sementara UNICEF (Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan anak) memperkirakan bahwa, setiap 30 detik ada satu anak yang meninggal dunia karena Diare. Di Indonesia, setiap tahun 100.000 balita meninggal karena diare.

Jumlah penderita diare semua umur yang ditangani di sarana kesehatan Kabupaten Situbondo tahun 2018 sebesar 17.860 kasus dari 18.360 perkiraan kasus diare atau sebesar 97,3%. Sedangkan Jumlah penderita Diare Balita yang di tangani di sarana kesehatan Kabupaten Situbondo tahun 2018 sebesar 6.337 kasus dari 7.491 perkiraan kasus diare balita atau sebesar 84,6% dan di tahun 2019 sebesar 6826 kasus dari 5.898 perkiraan kasus diare atau sebesar 115,7 %. Berikut disajikan pelayanan Diare semua umur dan pada Balita di Kabupaten Situbondo tahun 2019 seperti gambar tersebut di bawah ini :



Gambar 2. 50: Cakupan Penemuan dan Penanganan Diare Balita Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2020



Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit DBD disebabkan oleh virus Dengue yang penularannya melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes Albopictus* yang hidup digenangan air bersih di sekitar rumah. *Insidens Rate* DBD Kabupaten Situbondo tahun 2019 sebesar 65.6 per 100.000 penduduk dengan jumlah kasus sebanyak 448 kasus. Angka ini masih di bawah angka toleransi, yakni 52 per 100.000 penduduk atau 5,2 per 10.000 penduduk. Kecamatan dengan insidens DBD tertinggi tahun 2019 terjadi di Puskesmas Mlandingan yang mencapai angka 46 Kasus dan yang terendah di Puskesmas Widoropayung Tanpa ada kasus.

Kusta

Sampai saat ini penyakit Kusta masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Situbondo karena Situbondo masih termasuk daerah endemis kusta. Pada tahun 2019 di Kabupaten Situbondo terdapat 102 kasus kusta baru yang terdiri dari 12 kasus kusta PB (Pausi Basiler/kusta kering) dan 90 kasus kusta MB (Multi Basiler/kusta basah). Dengan demikian, angka penemuan kasus kusta baru 91 (NCDR/New Case Detection Rate) tahun 2019 adalah sebesar 14,93 per 100.000. Dari 102 kasus baru di Kabupaten Situbondo tahun 2019, 7 orang diantaranya adalah penderita anak-anak (6,9%) dan 10 orang adalah penderita difabel tingkat 2 (9,8%). Angka tersebut melebihi target nasional difabel tingkat 2 yakni < 5% dan toleransi kusta pada anak yakni < 5% . Proporsi difabel tingkat 2 yang tinggi menunjukkan adanya keterlambatan penemuan penderita baru yang disebabkan karena petugas kesehatan atau masyarakat kurang tanggap pada gejala-gejala dini dari penyakit kusta. Angka kesakitan atau prevalensi penderita kusta di Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 adalah sebesar 1,58 per 10.000 penduduk

Terdapat 8 Puskesmas yang termasuk daerah endemis berat (prevalensi ≥ 2), yakni Puskesmas Mangaran, Panarukan, Panji, Situbondo, Kendit, Bungatan, Jatibanteng dan Mlandingan. Puskesmas yang tergolong daerah endemis sedang (Prevalensi $1 - < 2$) ada 5 Puskesmas, yakni Puskesmas Widoropayung, Besuki, Kapongan, Banyuglugur dan Banyuputih. Sedangkan sisanya 7 Puskesmas termasuk endemis ringan, yakni Puskesmas Asembagus, Jangkar, Sumbermalang, Wonorejo, Arjasa, Suboh, dan Klampokan.

2.1.3.1.2.4. Akreditasi Puskesmas

Terdapat 4 bab sebagai instrument penilaian akreditasi yang terdiri dari administrasi manajemen, upaya Kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya Kesehatan perorangan (UKP) :



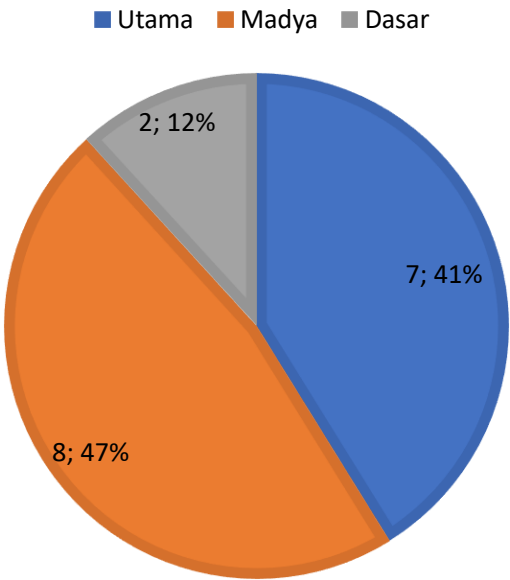
- 1) Administrasi Manajemen meliputi system penyelenggaraan Puskesmas, sarana prasarana, lokasi yang sesuai standar, ketenagaan, dan pemeliharaan sarana prasarana
- 2) UKM meliputi system penyelenggaraan upaya Kesehatan masyarakat, komunikasi koordinasi dengan lintas sektor maupun linta program, pelaksanaan dan evaluasi program di masyarakat
- 3) UKP meliputi layanan klinis sesuai standar, obat, laboratorium, peralatan klinis, alat Kesehatan sesuai standar, proses peningkatan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga klinis
- 4) Mutu merupakan mutu puskesmas secara keseluruhan yaitu perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan pelayanan puskesmas baik di masyarakat maupun klinis perorangan secara berkesinambungan.

Tabel 2.18 : Klasifikasi Kelulusan Akreditasi

Paripurna	Apabila semua standar dipenuhi lebih dari 80%
Utama	Apabila system pengelolaan puskesmas, ukm dan UKP dijalankan lebih dari 80% dan mutu dijalankan lebih dari 60%
Madya	Apabila system pengelolaan puskesmas, ukm dan ukp dijalankan lebih dari 75% dan mutu dijalankan lebih dari 40%
Dasar	Apabila system pengelolaan puskesmas, ukm dan ukp dijalankan lebih dari 75% dan mutu dijalankan lebih dari 20%
Tidak Terakreditasi	Apabila system pengelolaan puskesmas, ukm dan ukp dijalankan kurang dari 75% dan mutu dijalankan kurang dari 20%

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2020

Sebanyak 17 Puskesmas yang ada di Kabupaten Situbondo, 7 Puskesmas telah terakreditasi Utama, 8 Puskesmas terakreditasi Madya, dan 2 Puskesmas terakreditasi Dasar.



Gambar 2. 51: Akreditasi Puskesmas Kabupaten Situbondo 2020

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2020



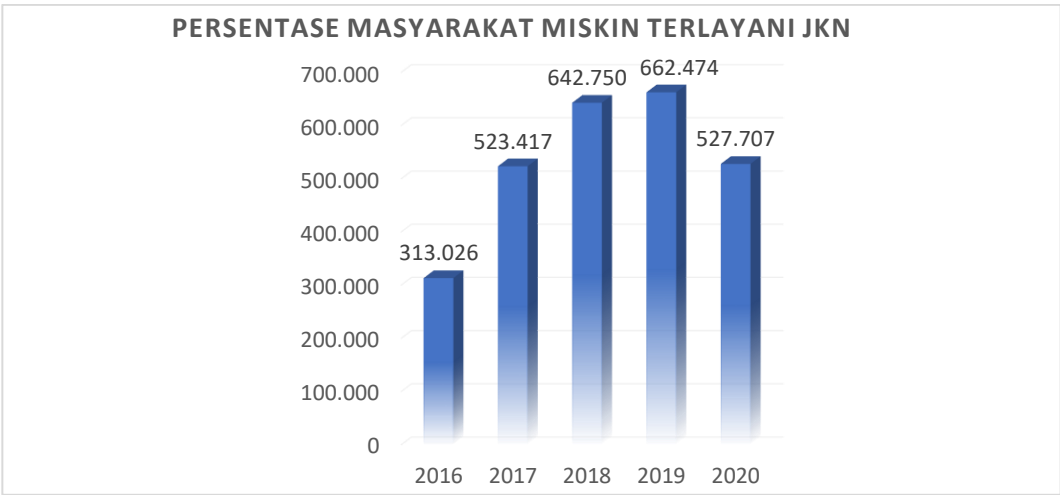
Puskesmas yang memiliki status “Utama” meliputi : puskesmas Banyuglulur, puskesmas Besuki, puskesmas Mlandingan, puskesmas Situbondo, puskesmas Arjasa, puskesmas Asembagus, dan puskesmas Jangkar. Puskesmas yang memiliki status “Madya” antara lain :puskesmas Jatibanteng, puskesmas Sumbermalang, puskesmas Bungatan, puskesmas Kendit, puskesmas Panarukan, puskesmas Panji, puskesmas Mangaran, dan puskesmas Kapongan. Sedangkan puskesmas yang masih memiliki status “Dasar” yaitu puskesmas Banyuputih dan puskesmas Suboh.

Pada Tahun 2020 tidak ada realisasi puskesmas yang reakreditasi sebagaimana surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/455/2020 Tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan pada masa Pademi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk penundaan survey Akreditasi. Dari 7 puskesmas resertifikasi dan 3 puskesmas survey akreditasi tidak bisa dilakukan karena kondisi pandemi Covid-19, sehingga tahun 2020 tidak dilaksanakan penilaian

Dari target 20 Puskesmas yang terstandarisasi baru 18 Puskesmas dan 2 Puskesmas yang belum adalah Puskesmas Suboh dalam proses rehap total gedung rawat inap sehingga belum diinventarisasi dan Puskesmas Widoropayung adalah Puskesmas baru yang dalam proses pemenuhan sarana prasarana.

2.1.3.1.2.5. **Persentase Penduduk Miskin yang Terlayani JKN**

Seluruh penduduk miskin yang mengajukan dan menerima pelayanan kesehatan melalui JKN semakin meningkat disetiap tahunnya. Pada tahun 2016 sebesar 313.026 jiwa, tahun 2017 sebesar 523.417 jiwa, tahun 2018 sebesar 642.750 jiwa dan pada tahun 2019 662.474 jiwa. Hanya saja pada tahun 2020 penduduk miskin yang mengajukan dan menerima pelayanan kesehatan melalui JKN menurun sebesar 527.707 jiwa dikarenakan terjadinya Pademi Covid-19 masyarakat enggan untuk mengakses Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas.



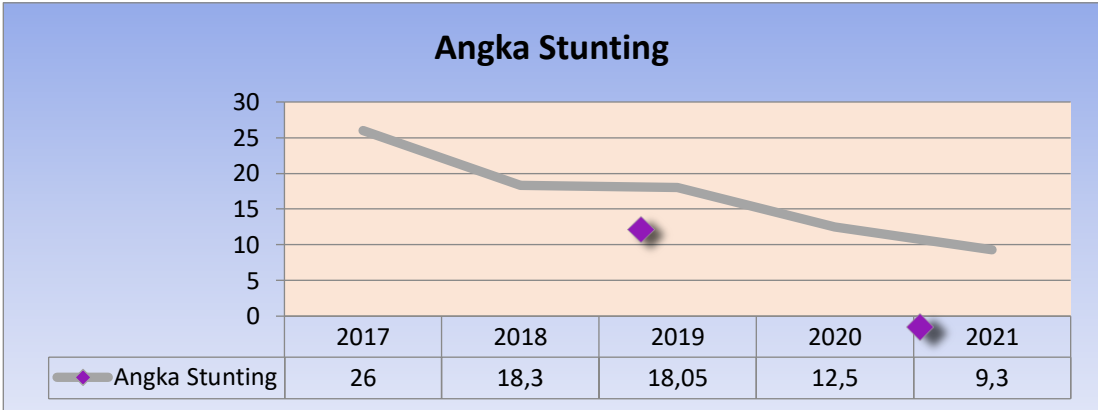
Gambar 2. 52: **Persentase Masyarakat Miskin terlayani JKN Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo 2021



2.1.3.1.2.6. **Angka Stunting**

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia.



Gambar 2. 53: Angka Stunting Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2022

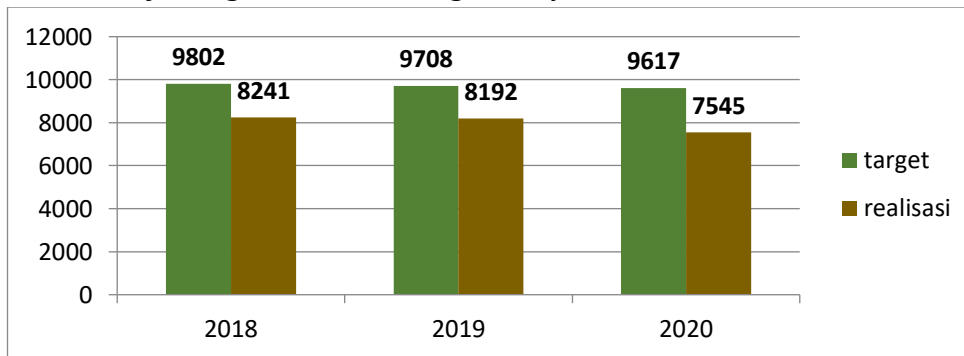
Berdasarkan data di atas, angka stunting di Kabupaten Situbondo selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2016 angka stunting mencapai 23% dan meningkat menjadi 26% di tahun 2017. Pada tahun 2018 sampai 2020 angka tersebut berhasil turun menjadi 18,3 sampai 12,50%. Meskipun demikian, angka stunting di Kabupaten Situbondo masih terbilang cukup tinggi.

2.1.3.1.2.7. **Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**

Setiap ibu hamil berhak mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Pada tahun 2019, prosentase pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 84,4% , dengan terlayannya 8192 ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 dari 9.708 sasaran ibu hamil. Sedangkan sebelumnya pada tahun 2018, prosentase pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 84,07%, dengan terlayannya 8.241 ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 dari 9.802 sasaran ibu hamil. Capaian kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 ini masih

belum mencapai target sebagaimana yang ditentukan oleh Standar Pelayanan Minimal dari pemerintah pusat yaitu sebesar 100%. Hal ini dikarenakan masih banyak permasalahan di lapangan yang memerlukan tindak lanjut segera untuk mengatasinya.



Gambar 2. 54: Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2020

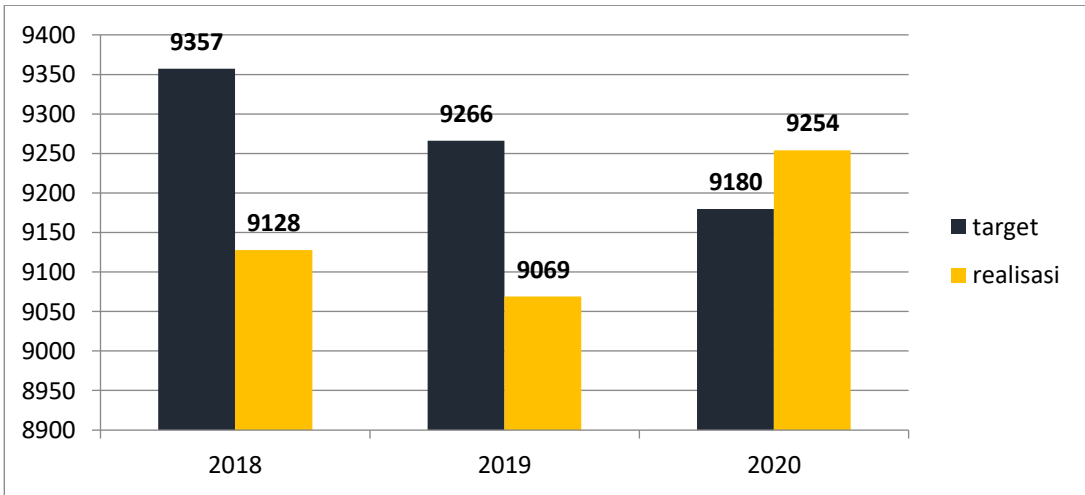
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2021

2.1.3.1.2.8. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Setiap ibu bersalin berhak mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR), baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari: (1) Dokter dan bidan, atau (2) 2 orang bidan, atau (3) Bidan dan perawat. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Polindes, Poskesdes, Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta.

Pada tahun 2019, prosentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 97,9%, dengan telah dilayaninya ibu bersalin sesuai standar di pelayanan faskes sebanyak 9.069 orang dari 9.266 orang. Sementara pada tahun 2018 prosentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 97,55%, dengan telah dilayaninya ibu bersalin sesuai standar sebanyak 9.128 orang dari 9.357 orang. Capaian kinerja 2018 dan 2019 ini mengalami kenaikan, meskipun masih belum mencapai target nasional Standar Pelayanan Minimal sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi adalah Kurangnya informasi masyarakat tentang persalinan yang aman hal ini terlihat dari masih adanya persalinan dukun

- 1) Ibu bersalin mendapatkan pelayanan bukan oleh nakes dan atau tidak difasyankes (16 persalinan nakes tidak di fasyankes dan 11 persalinan dukun tahun 2019)
- 2) Ibu bersalin mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja kabupaten dan belum ada koordinasi antar kabupaten
- 3) Kurangnya informasi masyarakat tentang persyaratan kelengkapan administrasi pelayanan persalinan melalui jampersal

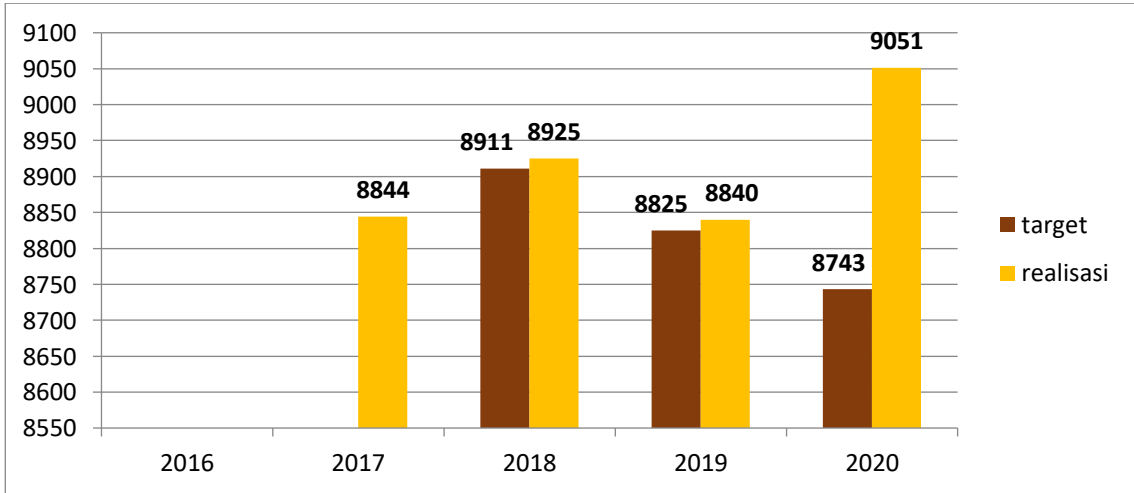


Gambar 2. 55: Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2021

2.1.3.1.2.9. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Setiap Bayi Baru Lahir berhak mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar, yakni pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan: a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.

Prosentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang dilayani sesuai standar pada tahun 2019 sebesar 100,2%, dari target sasaran sebesar 8825, terealisasi sebanyak 8840. Sementara pada tahun 2018 prosentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir mencapai 100,16%, dengan memberikan pelayanan terhadap bayi baru lahir sesuai standar sebanyak 8925, dari target sasaran 8911. Capaian kinerja tahun 2018 dan 2019 ini telah mencapai target nasional Standar Pelayanan Minimal sebesar 100%.



Gambar 2. 56: Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2021



2.1.3.1.2.10. Pelayanan Kesehatan Balita

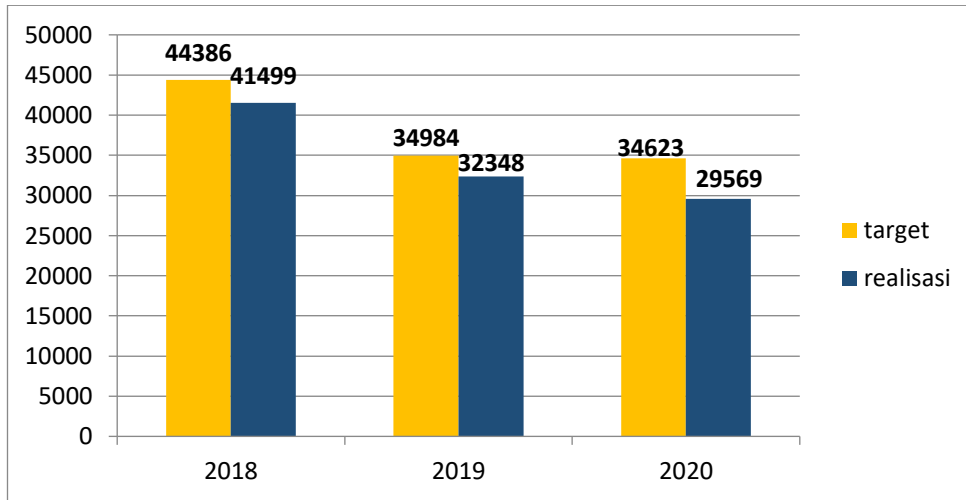
Setiap balita berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan balita dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta dan UKBM. Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :

- 1) Pelayanan kesehatan balita sehat, meliputi:
 - a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan,
 - b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan,
 - c) Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan,
 - d) Pemantauan perkembangan balita.
 - e) Pemberian kapsul vitamin A.
 - f) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
 - g) Pemberian imunisasi lanjutan.
 - h) Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.
 - i) Edukasi dan informasi.
- 2) Pelayanan kesehatan balita sakit.

Sedangkan pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

Prosentase Pelayanan kesehatan balita pada tahun 2019 sebesar 92,5%, dengan pemberian pelayanan kesehatan pada balita sebanyak 32348, dari target sasaran sebanyak 34984. Sedangkan pada tahun 2018, prosentase pelayanan kesehatan balita sebesar 93,50% dengan pemberian pelayanan kesehatan pada balita sebanyak 41499 dari target sasaran sebanyak 44386. Capaian kinerja tahun 2019 turun sebesar 1 poin, dan masih belum mencapai target nasional Standar Pelayanan Minimal sebesar 100%. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

- a) Kurangnya informasi mengenai pelayanan Balita
- b) Akses ke fasyankes sulit karena masih terdapat daerah - daerah terpencil yang sulit di jangkau oleh petugas dan masyarakat.
- c) Pelayanan yang tidak dilaporkan dari fasyankes swasta dan RS ke Puskesmas terutama masyarakat minoritas yang lebih percaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan balita di dokter spesialis luar kabupaten



Gambar 2. 57: Pelayanan Kesehatan Bayi Balita Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo 2021

2.1.3.1.2.11. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi Skrining kesehatan dan Tindak lanjut hasil skrining kesehatan yang dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.

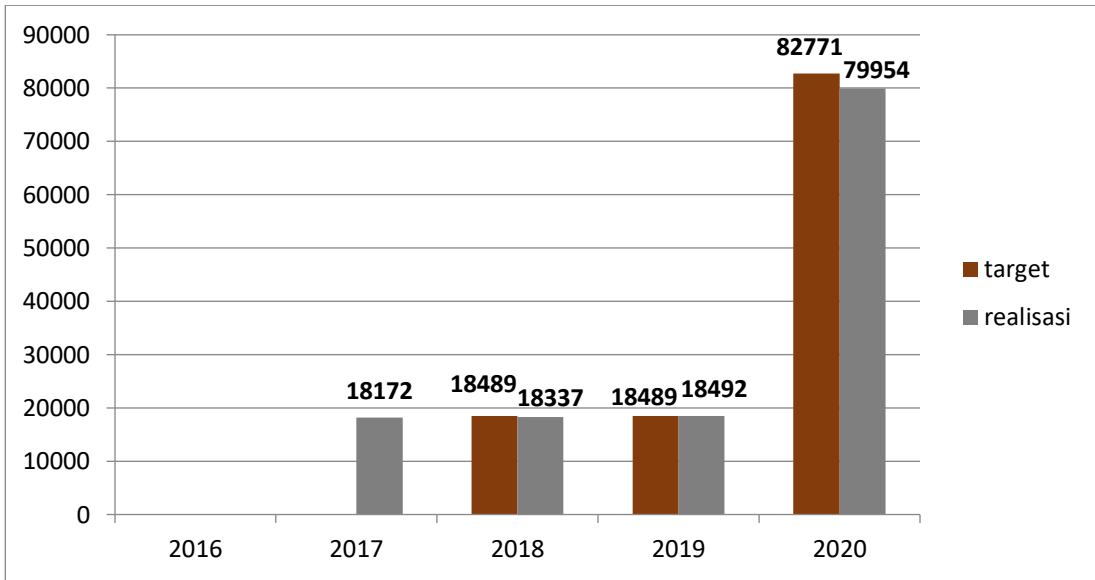
Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:

- 1) Penilaian status gizi.
- 2) Penilaian tanda vital.
- 3) Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
- 4) Penilaian ketajaman indera.

Sedangkan Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi:

- 1) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan
- 2) Melakukan rujukan jika diperlukan
- 3) Memberikan penyuluhan kesehatan.

Prosentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tahun 2019 sebesar 100%, dengan terlayannya 18492 anak usia 7-12 tahun, dan 13-15 tahun, dari total 18489 anak. Untuk tahun 2018 prosentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar 99,18% dengan pemberian pelayanan pada 18337 anak dari total 18.489 anak. Kinerja tahun 2019 telah mencapai target nasional Standar Pelayanan Minimal 100%.



Gambar 2. 58: Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020

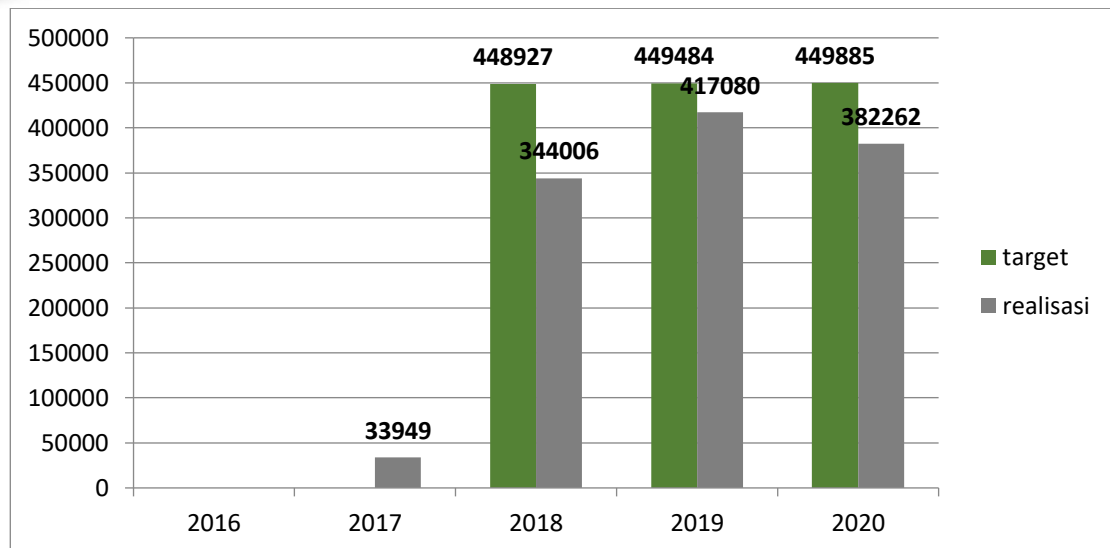
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo 2021

2.1.3.1.2.12. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun (usia produktif) berhak mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi : Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana dan Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM. Sedangkan Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:

- a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.
- b) Pengukuran tekanan darah.
- c) Pemeriksaan gula darah.
- d) Anamnesa perilaku berisiko.

Prosentase pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun 2019 sebesar 92,8%, dengan terlayannya usia produktif penduduk usia 15-59 tahun sebanyak 417.080 dari target sasaran sebanyak 449.484. sedangkan paa tahun 2018, prosentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar 76,63%, dengan terlayannya usia produktif usia 15-59 tahun sebanyak 344.006 dari target sasaran sebesar 448.927. Dari capaian tahun 2018 dan 2019 tersebut dapat terlihat bahwa terdapat kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2018 yaitu sebesar 16,17 poin. Meskipun mengalami peningkatan, masih belum mencapai target nasional Standar Pelayanan Minimal sebesar 100%.



Gambar 2. 59: Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo 2021

2.1.3.1.2.13. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas berhak mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi :

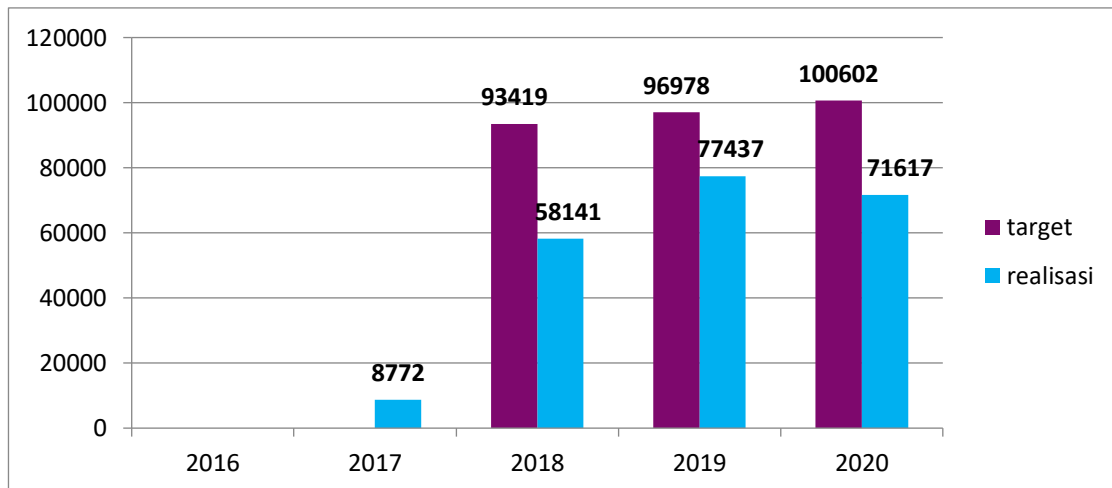
- 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah. Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:

- a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
- b) Pengukuran tekanan darah
- c) Pemeriksaan gula darah
- d) Pemeriksaan gangguan mental
- e) Pemeriksaan gangguan kognitif
- f) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- g) Anamnesa perilaku berisiko

Prosentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut tahun 2019 sebesar 79,9%, dengan jumlah usia lanjut yang menerima pelayanan sesuai standar sebanyak 77.437, dari jumlah usia lanjut target sasaran pelayanan sebesar 96.978. Sedangkan pada tahun 2018 prosentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar 62,24% , dengan jumlah usia lanjut yang menerima pelayanan sesuai standar sebanyak 58.141 dari total target sasaran pelayanan sebesar 93.419. Capaian kinerja tersebut di atas masih jauh dari target nasional Standar Pelayanan Minimal 100%, sehingga memerlukan upaya dan strategi khusus untuk pencapaiannya. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

- Kurangnya informasi mengenai pelayanan kesehatan usia lanjut
- Adanya usia lanjut yang mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja kabupaten/kota
- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh faktor sosial budaya
- Terbatasnya biaya, terutama stick kolesterol yang cukup mahal



Gambar 2. 60: Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo 2021

2.1.3.1.2.14. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Setiap penderita hipertensi berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi Pengukuran tekanan darah dan edukasi. Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:

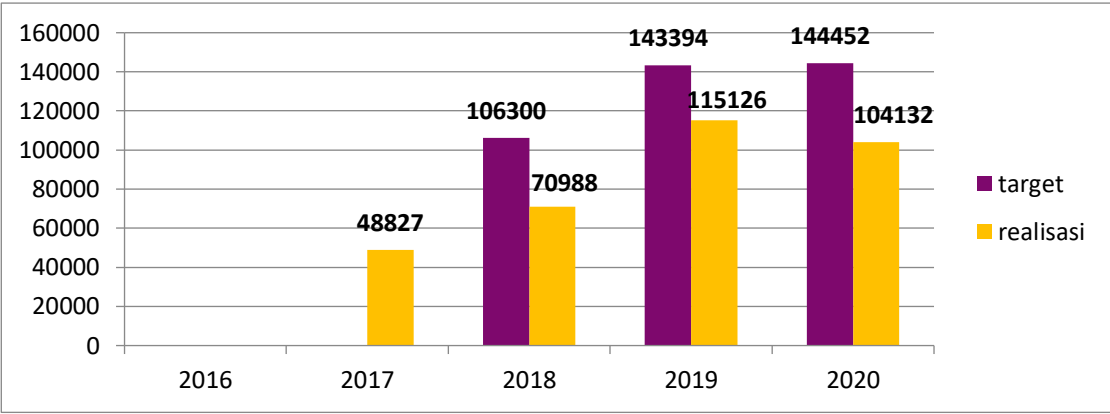
- Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
- Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat.
- Melakukan rujukan jika diperlukan.
- Penderita Hipertensi dengan Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.

Prosentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi tahun 2019 sebesar 80,3%, dengan jumlah penderita hipertensi yang menerima pelayanan sebanyak 115.126, dari target sasaran sebanyak 143.394. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 66,78%, dengan jumlah penderita hipertensi yang menerima pelayanan sebanyak 70.988 dari target sasaran sebanyak 106.300. Kinerja tahun 2018 dan 2019 ini masih belum mencapai target nasional Standar Pelayanan Minimal sebesar 100%. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah:

- Hambatan manajemen (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi, yakni laporan yang tercover hanya dari Puskesmas dan jaringannya, klinik dan RS belum tercover.



- 2) Hambatan pada pemberdayaan masyarakat, yakni kemauan dan kesadaran penderita hipertensi belum sepenuhnya mampu melakukan pengobatan sendiri.



Gambar 2. 61: Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020

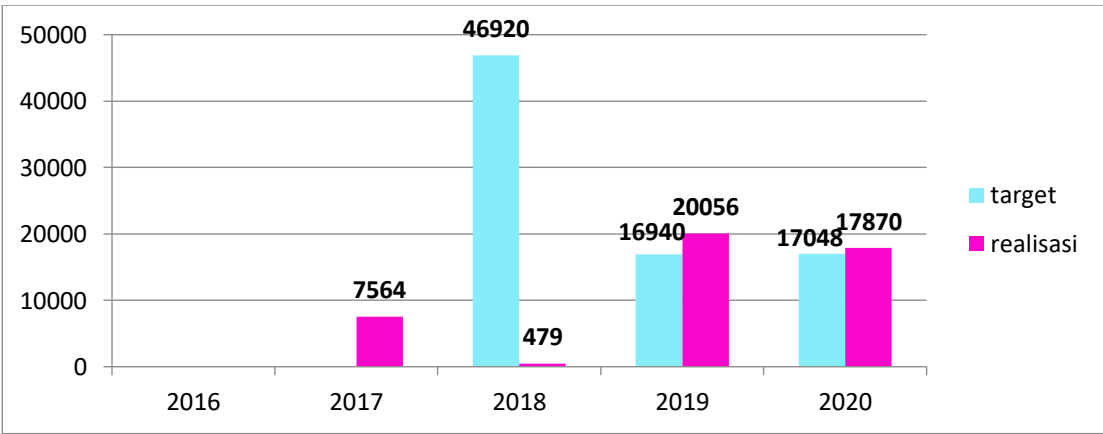
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo 2021

2.1.3.1.2.15. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabeter Mellitus

Penderita diabetes berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi :

- 1) Pengukuran tekanan darah, minimal dilakukan satu kali sebulan di fasilitas kesehatan.
- 2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat.
- 3) melakukan rujukan jika diperlukan.
- 4) Untuk Penderita Hipertensi dengan Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.

Prosentase pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus pada tahun 2019 sebesar 118,4%, dengan perhitungan jumlah penduduk penderita hipertensi yang dilayani sebanyak 20.056 orang, dari target sasaran yang ditetapkan sebanyak 16.940 orang. Sedangkan di tahun 2018, sebesar 1,02%, dengan dilayaninya 479 orang dari target sasaran sebanyak 46.920 orang. Kinerja tahun 2019 naik cukup signifikan dibandingkan tahun 2018, bahkan kinerja tahun 2019 melebihi target nasional Standar Pelayanan Minimal sebesar 100%.



Gambar 2. 62: Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo 2021

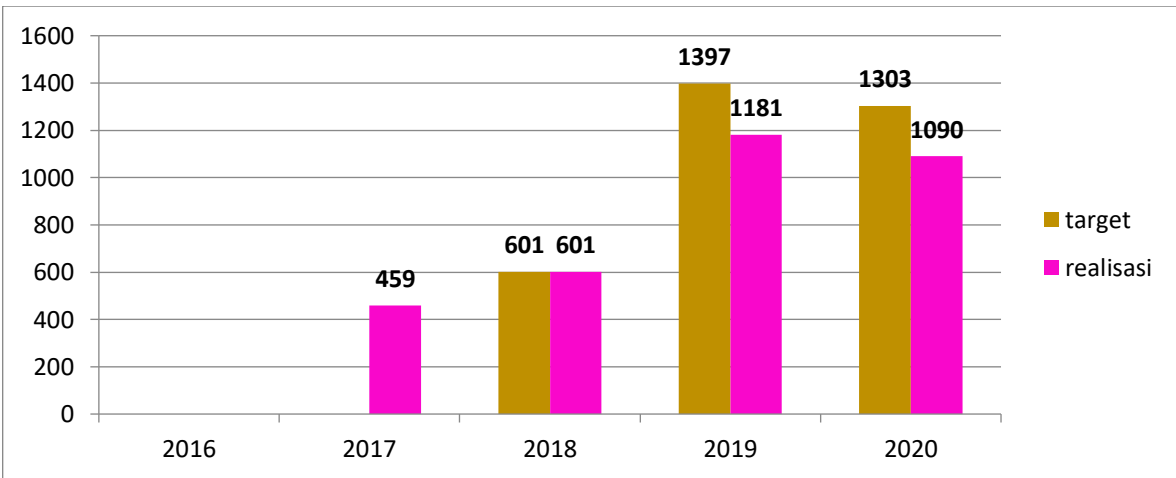
2.1.3.1.2.16. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Setiap ODGJ berat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi:

- 1) Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi Pemeriksaan status mental dan Wawancara;
- 2) Edukasi, pada pasien ODGJ berat dengan materi tentang kepatuhan minum obat.

Prosentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat pada tahun 2019 sebesar 84,5%, dengan jumlah ODGJ Berat Mendapat Pelayanan Standar sebanyak 1.181 orang, dari target sasaran 1.397 orang. Sedangkan di tahun 2018 kinerjanya sebesar 100%, dengan terlayannya 601 orang dari 601 orang dengan gangguan jiwa berat. Capaian kinerja tahun 2019 ini turun dari tahun 2018 sebesar 15,5 poin, dan tidak mencapai target nasional Standar Pelayanan Minimal 100%. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah

- 1) Pasien ODGJ sebagian besar masyarakat miskin sehingga pengobatan banyak kendala, salah satunya biaya makmin keluarga yang menjaga pasien.
- 2) Penolakan dari masyarakat karena masih adanya stigma negatif penyakit jiwa sehingga disembunyikan dari petugas
- 3) pengobatan pasien ODGJ Berat relatif lama sehingga rujukan ke Puskesmas Mlandingan terbatas dan bisa inden sampai 3 bulan



Gambar 2. 63: Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ Berat Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2021

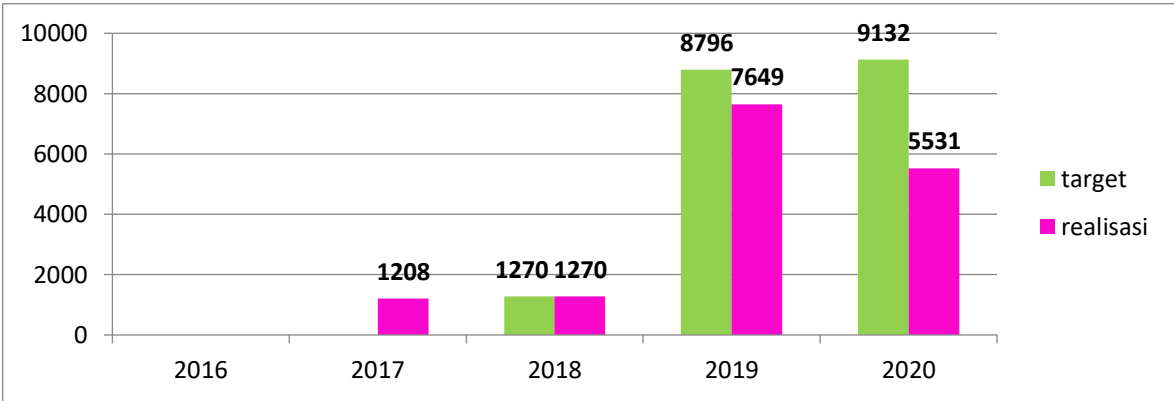
2.1.3.1.2.17. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi:

- 1) Pemeriksaan klinis, dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, dengan pemeriksaan gejala dan tanda.
- 2) Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis
- 3) Edukasi berupa perilaku berisiko dan pencegahan penularan.



Prosentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis tahun 2019 sebesar 84%, dengan pemberian pelayanan pada orang terduga penderita tuberculosis sebanyak 7.385 orang dari target sasaran sebanyak 8.796 orang. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 100%, dengan terlayannya 1.270 orang dari 1.270 orang terduga penderita tuberculosis. Capaian kinerja tahun 2019 tidak mencapai target dikarenakan kurangnya informasi tentang pelayanan orang terduga tuberkulosis dan masih banyak masyarakat yang menganggap batuk itu sebagai penyakit biasa dan pasien menolak untuk diperiksa dengan beralasan tidak bisa berdahak, dan masih ada Pelayanan kesehatan yang tidak melaporkan orang terduga tuberkulosis. Pelayanan pada tahun 2019 ini tidak mencapai target nasional Standar Pelayanan Minimal 100%.



Gambar 2. 64: Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2021

2.1.3.1.2.18. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang berisiko dimulai dengan:

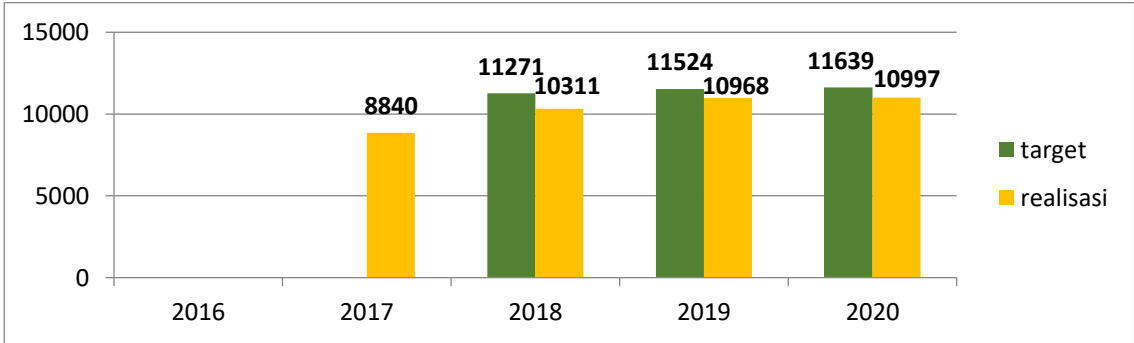
- 1) pemberian informasi terkait HIV-AIDS.
- 2) pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan.
- 3) orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya.
- 4) orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah tiga (3) bulan, enam (6) bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

Prosentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) pada tahun 2019 sebesar 93,7%, dengan dilayannya orang dengan resiko terinfeksi HIV sebanyak



10.802 orang, dari target sasaran sebanyak 11.524 orang. Sementara pada tahun 2018 sebesar 91,48%, dengan terlayannya orang dengan resiko terinfeksi HIV sebanyak 10.311 orang dari target sasaran 11.271 orang. Kinerja 2 tahun ini masih belum mencapai target nasional Standar Pelayanan Minimal sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi adalah :

- 1) Hambatan pada pemberdayaan masyarakat, terlihat dengan masih adanya penolakan untuk tes HIV karena stigma atau anggapan negatif tentang HIV masih melekat kuat.
- 2) Koordinasi antar programmer di Dinas Kesehatan yang harus ditingkatkan lagi kinerjanya, agar tidak terjadi gap data.
- 3) Upaya layanan kesehatan, yakni adanya kesalahan informasi tentang pelayanan ANC terpadu K1 yang menyatakan bahwa pemeriksaan HIV bumil terikat wilayah / KTP.



Gambar 2. 65: Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi (HIV) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2021

2.1.3.1.2.19. Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam

Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya/meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Kejadian KLB penyakit dan keracunan di Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 sebanyak 6 kasus KLB, yang meliputi keracunan pangan 5 kasus, dan leptospirosis 1 kasus, dan semua kasus tersebut telah tertangani <24 jam.

Tabel 2.19: Jumlah Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Situbondo Tahun 2014-2019

Jenis KLB	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Difteri	19	8	6	6	29	0
TN	2	1	1	0	0	0
AFP	3	5	6	5	5	0
Keracunan makanan	2	2	4	1	0	5
campak	1	1	0	8	0	0
Cikungunyah	0	3	0	0	0	0
Longsor	0	0	1	0	0	0
Keracunan Bahan Kimia	0	0	0	0	1	0
Leptospirosis	0	0	0	0	0	1
Jumlah total	27	20	18	20	35	6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2021

Dari tabel di atas tampak bahwa pada tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2018, yaitu turun sebesar 82,86%.



Tabel 2.20: Jumlah Kejadian Luar Biasa Per Kecamatan di Kabupaten Situbondo

NO	Kecamatan	Puskesmas	KLB di Desa/Kelurahan		
			Jumlah	Ditangani <24 jam	%
1	Asembagus	Asembagus	1	1	100
2	Mlandingan	Mlandingan	0	0	0
3	Kapongan	Kapongan	1	1	100
4	Panji	Panji	0	0	0
		Klampokan	0	0	0
5	Kendit	Kendit	0	0	0
6	Jangkar	Jangkar	3	3	0
7	Sumbermalang	Sumbermalang	0	0	0
8	Panarukan	Panarukan	0	0	0
9	Mangaran	Mangaran	0	0	0
10	Bungatan	Bungatan	0	0	0
11	Jatibanteng	Jatibanteng	0	0	0
12	Besuki	Besuki	0	0	0
		Widoropayung	0	0	0
13	Banyuputih	Banyuputih	0	0	0
		Wonorejo	0	0	0
14	Suboh	Suboh	0	0	0
15	Banyuglugur	Banyuglugur	0	0	0
16	Situbondo	Situbondo	1	1	100
17	Arjasa	Arjasa	0	0	0
Jumlah			6	6	

SUMBER : DINAS Kesehatan KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020

2.3.1.2.20 Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

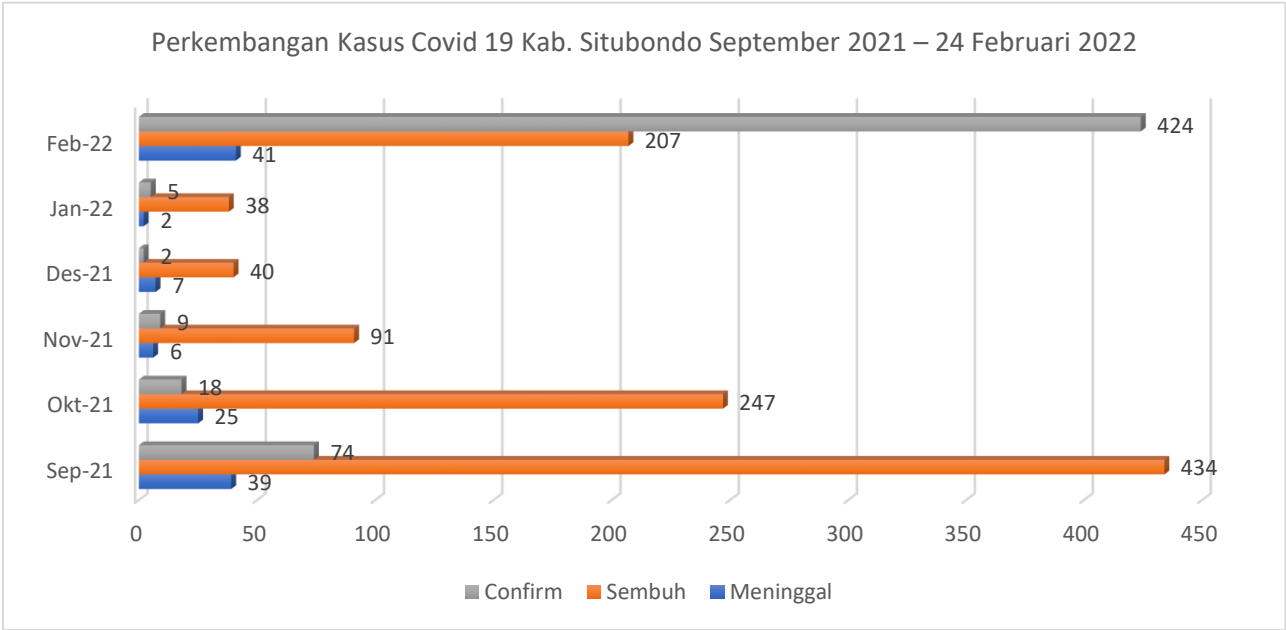
Kasus Covid-19 di Kabupaten Situbondo per tanggal 24 Februari tahun 2022 mencapai 8.339 kasus. Dari 8.339 kasus konfirmasi, 6.704 kasus dinyatakan sembuh (80,39%) dan 882 kasus meninggal akibat Covid (10,57%). Di awal tahun 2022, kasus Covid-19 di Kabupaten Situbondo sebenarnya sudah mengalami penurunan. Namun pada pertengahan bulan februari 2022 kembali mengalami peningkatan dengan ditemukannya varian baru jenis omikron di Jawa Timur. Dari 17 kecamatan di Situbondo, hanya Kecamatan Jatibanteng saja yang masuk dalam zona penularan resiko rendah. Sedangkan kecamatan lainnya masuk dalam zona penularan resiko sedang.

Tabel 2. 21: Data Sebaran Pasien Covid 19 Kabupaten Situbondo

No	Kecamatan	Confirm	Sembuh	Meninggal	Aktif
1	Banyuglugur	201	170	19	12
2	Besuki	794	641	59	94
3	Jatibanteng	115	110	5	0
4	Sumbermalang	99	86	8	5
5	Suboh	238	214	14	10
6	Mlandingan	191	152	19	20
7	Bungatan	172	145	18	9
8	Kendit	220	157	27	36
9	Panarukan	1.149	933	122	94
10	Situbondo	1.562	1.277	169	116
11	Mangaran	215	162	39	14
12	Panji	1.389	1.109	144	136
13	Kapongan	285	218	33	34
14	Arjasa	217	169	26	22
15	Jangkar	300	234	34	32
16	Asembagus	761	575	99	87
17	Banyuputih	431	352	47	32
TOTAL		8.339	6.704	882	753

Sumber : Data Satgas Covid Kab. Situbondo per 24 Februari tahun 2022

Sementara perkembangan kasus Covid 19 di Kabupaten Situbondo secara keseluruhan sejak September 2021 – Februari 2022 dapat dilihat pada diagram dibawah ini



Gambar 2. 66: Perkembangan Kasus Covid 19 Kabupaten Situbondo Tahun 2022

Sumber : Data Satgas Covid Kab. Situbondo per 24 Februari 2022

Selain itu, sebagai upaya untuk mewujudkan *herd immunity*, pelaksanaan vaksinasi terus digencarkan dan diperluas Sasarannya. Terdapat 548.304 jiwa sasaran yang akan divaksin, yang terdiri dari unsur tenaga kesehatan, pelayan publik, masyarakat umum, lanjut usia (lansia), usia remaja serta anak usia 6-11 tahun. Secara keseluruhan, jumlah capaian vaksin tahap I mencapai 435.792 sasaran (79,5%), untuk vaksin tahap II terlaksana sebanyak 281.607 sasaran (51,4%) dan untuk vaksin tahap III terlaksana sebanyak 12.546 sasaran (2,3%).

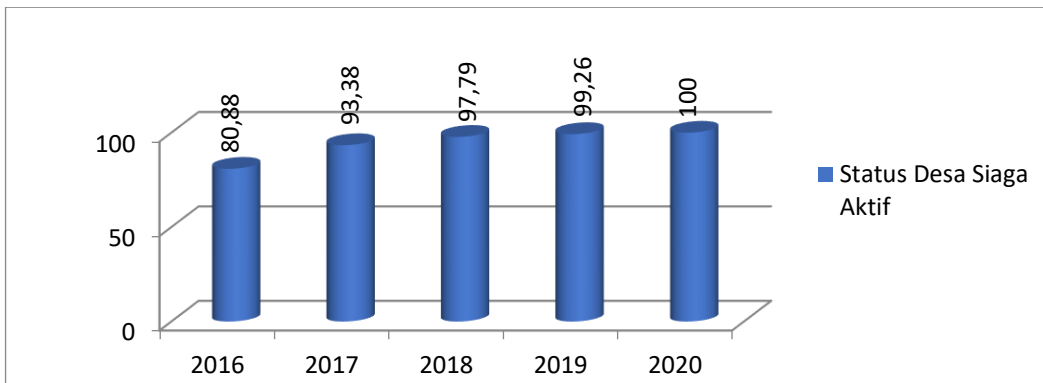
Tabel 2. 22: Capaian Vaksinasi Covid 19 di Kabupaten Situbondo

No	Sasaran	Vaksin I	Vaksin II	Vaksin III
1	Tenaga Kesehatan (2.984)	3.812 (127,7%)	3.649 (122,3%)	3.140 (105,2%)
2	Pelayan Publik (30.613)	29.566 (96,6%)	22.387 (73,1%)	4.362 (14,2%)
3	Masyarakat Umum (370.153)	262,254 (70,9%)	178.656 (48,3%)	4.148 (1,1%)
4	Lanjut Usia (86.422)	60.705 (70,2%)	36.363 (42,1%)	896 (1%)
5	Remaja (58.132)	52.754 (90,7%)	39.050 (67,2%)	0 (0%)
6	Anak usia 6-11 tahun (53.490)	24.529 (45,9%)	284 (0,5%)	0 (0%)

Sumber : Data Satgas Covid Kab. Situbondo per 23 Juli 2021

2.1.3.1.2.20. Persentase Kelurahan Siaga Aktif

Suatu Desa dan Kelurahan Siaga bisa menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif jika memenuhi 8 (delapan) kriteria berdasarkan Pedoman Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor 1519/Menkes/SK/X/2010. Perkembangan Desa Siaga aktif di Kabupaten Situbondo Tahun 2013 – 2019 tampak pada gambar berikut :



Gambar 2. 67: Perkembangan Desa Siaga aktif di Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2021

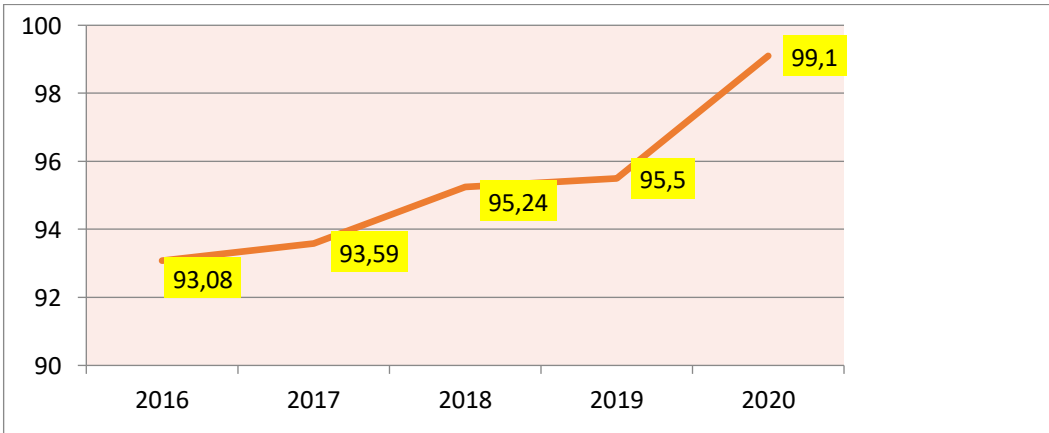
Dari 136 desa/kelurahan siaga di Kabupaten Situbondo di tahun 2019 ada 135 desa/kelurahan yang sudah menjadi desa siaga aktif (99,26%) dengan komposisi Pratama sejumlah 80 desa (58,82%), Madya 49 desa (36%) dan Purnama 7 desa (5%). Untuk mendukung Program Desa Siaga telah dilakukan upaya kemitraan baik dengan Lintas Program, Lintas Sektor, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, Organisasi Wanita, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi dan Pemuda, melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain dengan pertemuan dan monitoring terpadu pengembangan Desa Siaga di Kabupaten.

2.1.3.1.2.21. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan pada ibu nifas yang sesuai standart adalah mulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan. Hal ini dilakukan untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas. Kunjungan nifas minimal dilakukan 3 kali dengan ketentuan waktu sbb:

- 1) Kunjungan nifas I pada masa 6 jam-3 hari setelah persalinan,
- 2) kunjungan nifas II dalam waktu 4-28 hari setelah persalinan dan
- 3) kunjungan nifas III dalam waktu 29-42 hari setelah persalinan termasuk pemberian Vitamin A 200.000 IU serta persiapan dan atau pemasangan KB.

Pada tahun 2019 cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Situbondo sebesar 95,5%, dan selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan

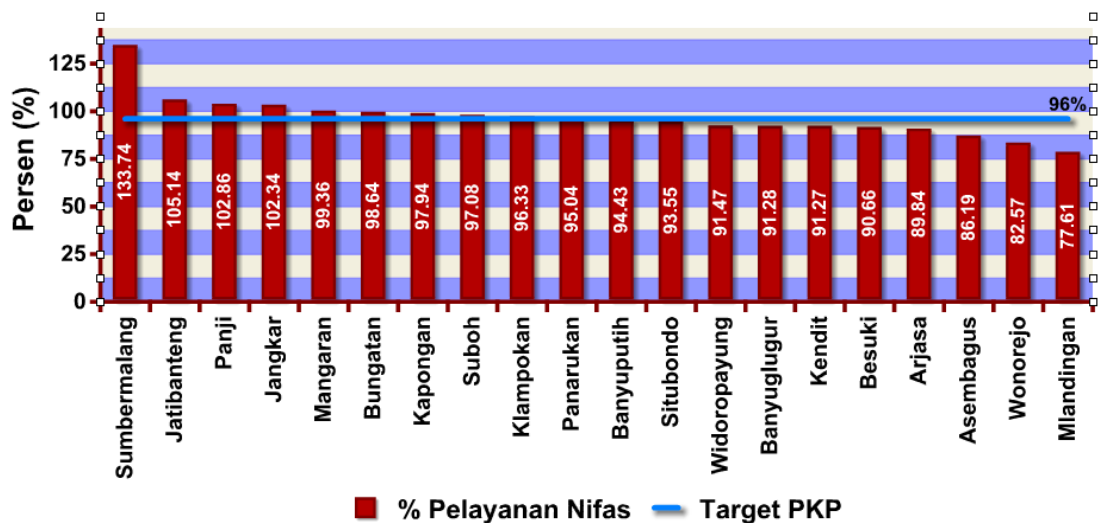


Gambar 2. 68: Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Situbondo Tahun 2016- 2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2021



Kecamatan dengan cakupan pelayanan nifas tertinggi adalah kecamatan Sumbermalang (133,74%) dan kecamatan dengan cakupan pelayanan nifas terendah adalah kecamatan Mlandingan dengan capaian sebesar 77,61%. Cakupan Pelayanan Nifas Per Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2020 tampak seperti gambar di bawah ini.

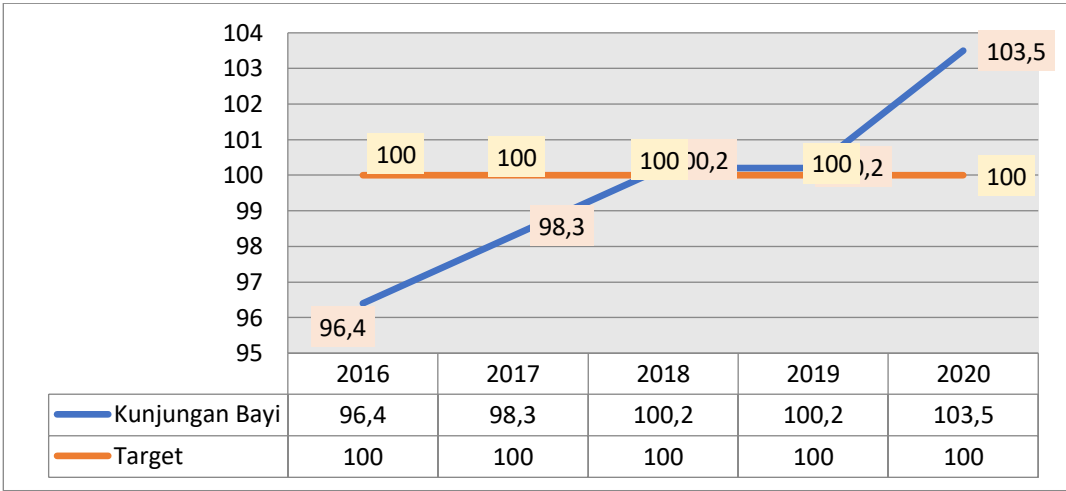


Gambar 2. 69: Cakupan Pelayanan Nifas Per Puskesmas di Kabupaten Situbondo Tahun 2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2021

Rendahnya cakupan pelayanan nifas di beberapa kecamatan dikarenakan beberapa hambatan yang ditemui di lapangan, yakni pasien lahir di dukun sehingga tidak akses dengan tenaga kesehatan, pasien lahir di RS dan Bidan Praktek Mandiri sehingga tidak tercatat oleh bidan wilayah. Selain itu, ibu nifas juga tidak datang untuk kontrol sesuai standar. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kemitraan bidan dan dukun, peningkatan peran kader, mengoptimalkan pelaksanaan program P4K, peningkatan cakupan persalinan nakes serta melakukan kunjungan ibu nifas yang tidak akses ke petugas kesehatan.

2.1.3.1.2.22. Cakupan Kunjungan Bayi

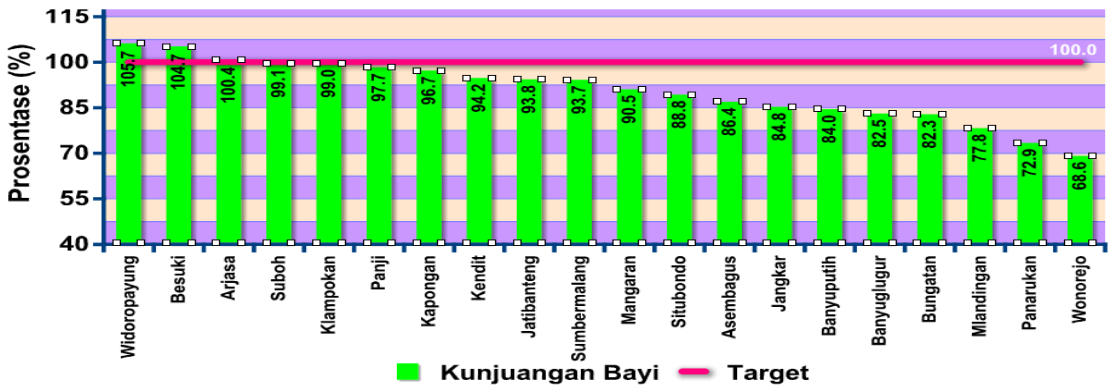
Bayi atau anak usia kurang dari satu tahun (29 hari-11 bulan) dikatakan sudah mendapatkan pelayanan kesehatan paripurna jika sudah dilayani sesuai standar minimal empat kali, yaitu satu kali pada umur 29 hari – 11 bulan, satu kali pada umur 3-5 bulan, satu kali pada umur 6-8 bulan dan satu kali pada umur 9-11 bulan dan telah lulus KN Lengkap. Pelayanan kesehatan sesuai standar tersebut meliputi imunisasi dasar lengkap, 1 kali mendapatkan Vitamin A , 4 kali dilakukan pemantauan tumbuh kembang dan jika sakit dilakukan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).



Gambar 2. 70: Trend Kunjungan Bayi Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2021

Berdasarkan Gambar diatas diketahui bahwa trend cakupan bayi Kabupaten Situbondo cukup fluktuatif dan naik turun. Cakupan kunjungan bayi Kabupaten Situbondo tahun 2017 kembali mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2017, yakni dari 96,52% di tahun 2016 menjadi 87,85% tahun 2017 atau menurun sebesar 8,67 poin. Kenaikan di tahun 2019 dikarenakan ada 3 Puskesmas Wldoropayung, Besuki, Arjasa. Cakupan kunjungan bayi per Kecamatan di Kabupaten Situbondo dapat diamati pada Diagram di bawah ini.



Gambar 2. 71: Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Situbondo Per Puskesmas Tahun 2019

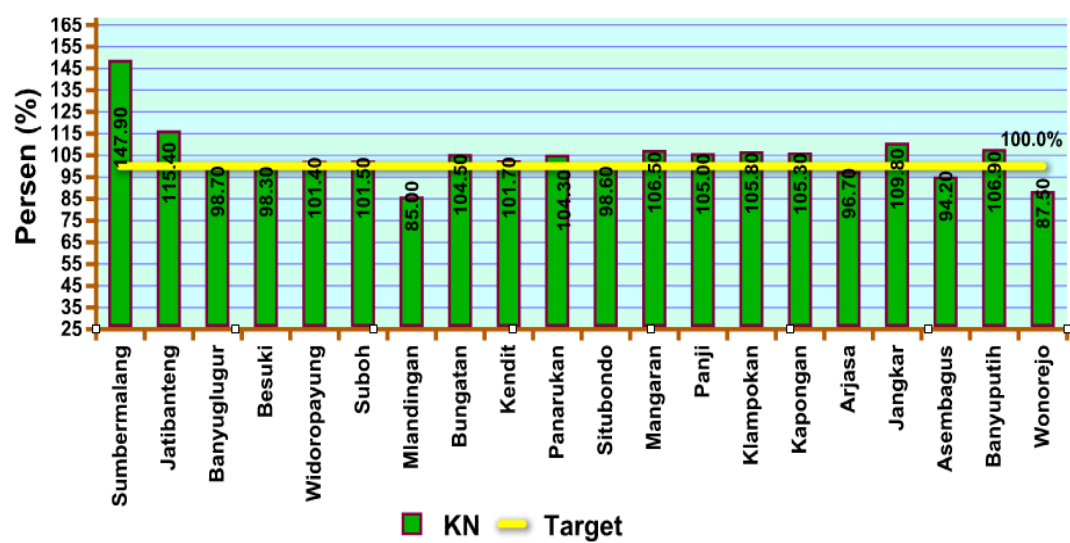
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

2.1.3.1.2.23. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi

Setiap bayi baru lahir wajib mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Bayi usia kurang dari satu bulan (0-28 hari) merupakan golongan umur yang rentan gangguan kesehatan. Upaya untuk mengurangi resiko tersebut adalah melalui pelayanan kesehatan pada neonatus (bayi baru lahir) minimal tiga kali yaitu satu kali pada 6-48 jam setelah lahir (disebut KN1), satu kali pada usia 3-7 hari dan satu kali pada usia 8 – 28 hari atau disebut KN lengkap. Pelayanan yang diberikan meliputi Inisiasi Menyusui Dini (IMD), pencegahan infeksi berupa perawatan mata (salep mata), perawatan tali pusat, pemberian vitamin K1 injeksi apabila tidak diberikan pada saat lahir, pemberian imunisasi Hepatitis B (HB0) dan MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda).



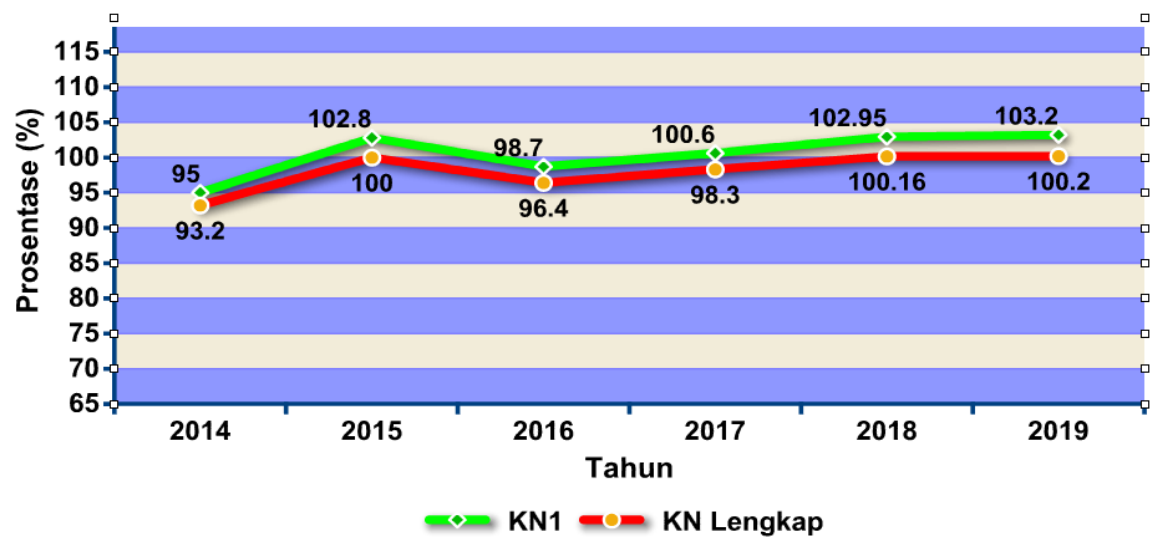
Cakupan KN1 di Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 sebesar 103% sedangkan cakupan kunjungan neonatus lengkap sebesar 100,2% dari target 100%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Drop Out KN lengkap Kabupaten Situbondo tahun 2019 sebesar 2,8% atau sebanyak 251 Bayi Baru Lahir. Cakupan kunjungan neonatus per kecamatan tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2. 72: Cakupan Kunjungan Neonatus per Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2020

Trend cakupan kunjungan neonatus kabupaten situbondo selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan meskipun di tahun 2016 pernah mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, cakupan kunjungan neonatus Tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016, yakni meningkat sebesar 1,9 poin dan di Tahun 2018 meningkat sebesar 2,4 point dan pada Tahun 2019 kenaikan hanya 0,04 poin. Trend cakupan kunjungan neonatus kabupaten situbondo selama lima tahun terakhir disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 2. 73: Trend Cakupan Kunjungan Neonatus Kabupaten Situbondo Tahun 2014 s.d 2019

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2020



Tabel 2.23: Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Situbondo

Nama Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita
Sumbermalang	38	929
Jatibanteng	42	956
Banyuglugur	33	1211
Besuki	72	3450
Suboh	37	2069
Mlandingan	33	1267
Bungatan	43	1391
Kendit	35	1427
Panarukan	75	2967
Situbondo	65	2517
Mangaran	56	1780
Panji	82	3598
Kapongan	62	2019
Arjasa	66	2155
Jangkar	53	1933
Asembagus	78	2598
Banyuputih	55	2717
Jumlah Total	925	34984

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dan BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2020

Tabel 2.24 : Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Poliklinik	Pustu
Sumbermalang	-	1	-	4
Jatibanteng	-	1	-	2
Banyuglugur	-	1	-	1
Besuki	2	2	1	4
Suboh	-	1	-	2
Mlandingan	-	1	-	1
Bungatan	-	1	2	3
Kendit	-	1	-	3
Panarukan	-	1	-	4
Situbondo	2	1	4	4
Mangaran	-	1	-	4
Panji	1	2	1	5
Kapongan	-	1	1	3
Arjasa	-	1	1	4
Jangkar	-	1	1	1
Asembagus	1	1	-	3
Banyuputih	-	2	2	3
Jumlah Total	6	20	13	51

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Tahun 2020

Tabel 2.25: Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2020

Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah
Dokter	226
Perawat	927
Bidan	684
Farmasi	92

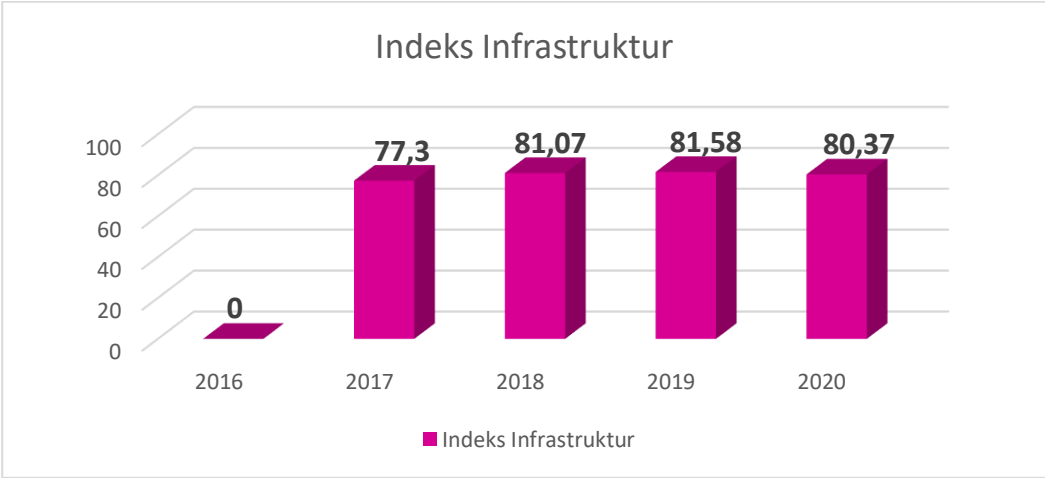
Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2020



2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum merupakan salah satu kegiatan wajib Pemerintah Kabupaten Situbondo yang memiliki kontribusi sangat menentukan dalam pencapaian visi dan misi daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

2.1.3.1.3.1. Indeks Infrastruktur

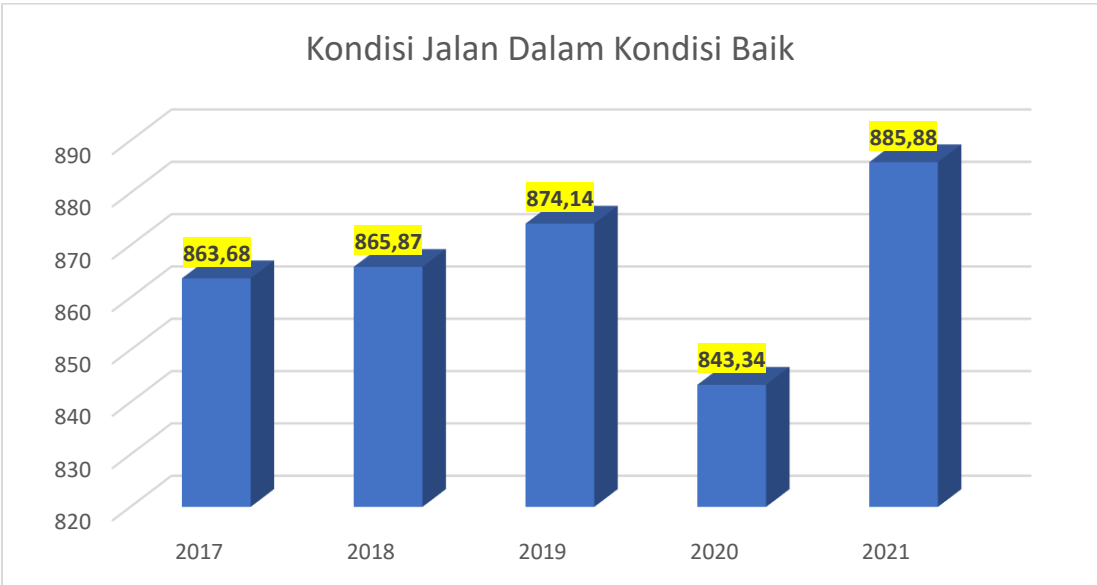


Gambar 2.74: Presentase Indeks Infrastruktur Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusan Statistik Kabupaten Situbondo, 2021

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Indeks infrastruktur di Kabupaten Situbondo menunjukkan adanya peningkatan pada setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 indeks infratraktur sebesar 77,3 kemudian meningkat pada tahun 2018 sebesar 81,07 dan terus meningkat pada tahun 2019 sebesar 81,85. Oleh karena itu diperlukan adanya konsistensi agar indeks infratraktur di Kabupaten Situbondo ini terus mengalami peningkatan pada tahun berikutnya.

2.1.3.1.3.2. Kondisi Jalan dalam Keadaan Baik



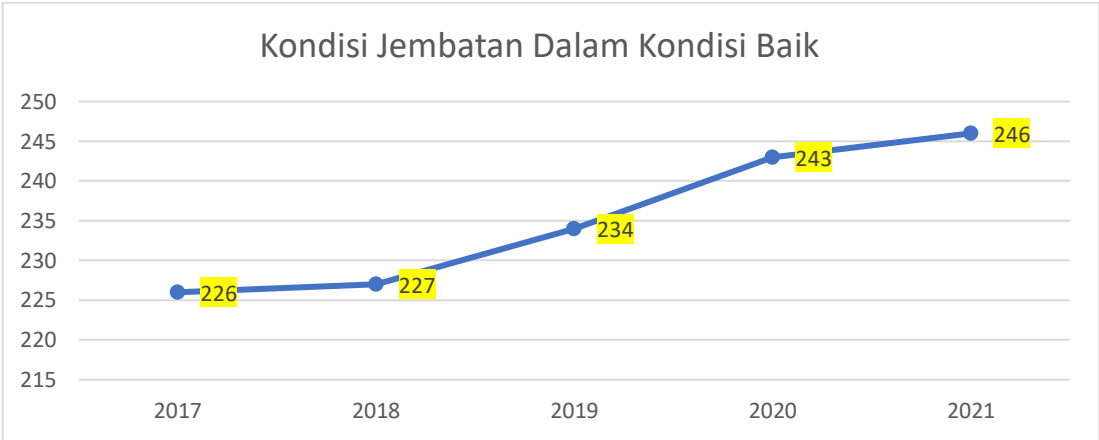
Gambar 2.75: Kondisi Jalan dalam Keadaan Baik Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo Tahun 2022



Jumlah kondisi jalan yang baik di Kabupaten Situbondo pada tahun 2016 berdasarkan data LKPJ pada tahun 2016-2020 direalisasikan 50,15 km dari targetnya sepanjang 25 km, maka capaiannya sebesar 49,85%. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan dilihat dari realisasinya sebesar 30,74 km dengan target sebesar 8,5 km dan capaiannya sebesar 27,65%. Namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup tinggi apabila berdasarkan realisasinya sepanjang 821,11 km dengan target sepanjang 9,39 km dan capaiannya adalah 1,14%. Sementara pada tahun 2019 realisasinya sepanjang 840, 13 km dengan target sepanjang 19,02 km dan capaiannya adalah 2,26%. Pada tahun 2020 jalan kondisi baik menjadi 843,34 Km (80,79%) dari panjang total keseluruhan jalan kabupaten 1.043,934 km.

2.1.3.1.3.3. Kondisi Jembatan dalam Keadaan Baik

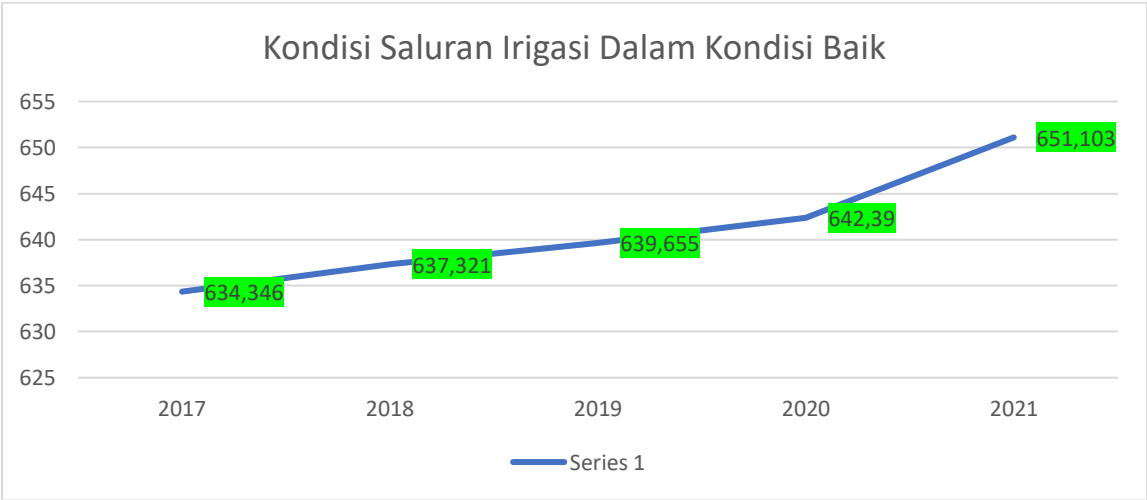


Gambar 2.76: Kondisi Jembatan dalam Keadaan Baik Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo Tahun 2021

Jumlah kondisi jembatan dalam keadaan baik di Kabupaten Situbondo pada tahun 2017 sebesar 226 jembatan dalam keadaan baik. Selanjutnya, pada tahun 2018 jumlahnya bertambah 1 sehingga sebanyak 227 jembatan dalam keadaan baik. Sementara pada Tahun 2019 jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik 234 unit (67,50%), tahun 2020 243 unit dari 360 unit (67,50%).

2.1.3.1.3.4. Kondisi Saluran Irigasi



Gambar 2.77: Presentase Kondisi Saluran Irigasi Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Pusan Statistik Kabupaten Situbondo, 2022



Pada tahun 2016 indeks kondisi jaringan irigasi sebesar 55,38% kemudian, tahun 2017 turun menjadi 50,66%. Pada Tahun 2018 Indeks Kondisi Jaringan Irigasi meningkat tercatat sebesar 52.78%. Untuk tahun 2019 target Indeks Kondisi Jaringan Irigasi adalah sebesar 54.17% dan berhasil terealisasi sebesar 54.28% dan pada tahun 2020 target Indeks Kondisi Jaringan Irigasi adalah sebesar 56,07 dan telah terealisasi sebesar 55,94% dengan capaian panjang jaringan irigasi 2,67 km sehingga sampai dengan saat ini panjang jaringan irigasi kondisi baik adalah 642.33 km dari panjang total keseluruhan saluran jaringan irigasi kabupaten 1.134.523 km. Terdapat 6 (enam) faktor yang mempengaruhi pengukuran Indeks Kondisi Jaringan Irigasi yaitu:

- 1) Prasarana Fisik dimana 232 Jaringan irigasi dilihat kondisi/tingkat kerusakannya;
- 2) Produktivitas (padi) dimana dari 232 lokasi jaringan irigasi yang mempunyai potensi sebagai produktivitas padi;
- 3) Sarana Penunjang dimana dari dari 232 lokasi jaringan irigasi yang memiliki sarana penunjang seperti saranaoperasi dan pemeliharaan
- 4) Organisasi Personalia untuk membantu kepala dinas dalam hal pengelolaan daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggungjawab dari pemerintah kabupaten;
- 5) Dokumentasi dalam setiap lokasi diperlukan data dan peta Daerah irigasi yang merupakan petunjuk dan informasi mengenai jaringan irigasi;
- 6) P3A/GP3A/IP3A dalam pengelolaan air irigasi diperlukan peran serta masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yaitu HIPPA.

2.1.3.1.3.5. Air Minum bagi Rumah Tangga



Gambar 2.78: Data Air Minum bagi Rumah Tangga Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar di atas nampak bahwa capaian akses air minum bagi rumah tangga di Kabupaten Situbondo pada tahun 2016 hingga 2019 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada persentase capaian pada tahun 2016 terdapat 64,38%, setiap tahun mengalami peningkatan hingga tahun 2020 mencapai 77,38% rumah tangga.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar pada pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Pemenuhan SPM bidang air minum merupakan pemenuhan Air minum yang berkualitas (layak) bagi masyarakat. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

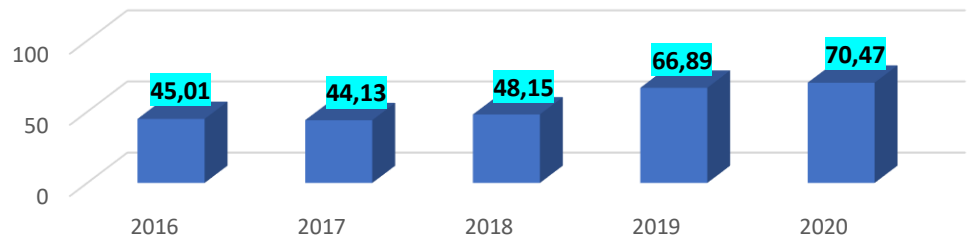
Berdasarkan Gambar 2.74, SPM bidang air minum penduduk Kabupaten pada tahun 2020 baru mencapai 77,38%, hal ini menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo untuk lebih serius dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar penduduk berupa air minum hingga 100% baik melalui Jaringan Perpipaan maupun Jaringan Bukan Perpipaan.

2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Rumah dianggap layak huni apabila memiliki akses Air Limbah Domestik (ALD) layak yang dilihat dari beberapa komponen, antara lain (1) penggunaan fasilitas sanitasi digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu, (2) bangunan atas/jenis kloset berupa leher angsa, dan (3) bangunan bawah/tempat pembuangan akhir tinja dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL). Capaian akses layak air limbah domestik di Kabupaten Situbondo dijabarkan dalam grafik pada gambar....., dengan capaian akses aman sebesar 1,46% dan capaian SPM akses dasar sebesar 4,46% pada tahun 2020. Sehingga dibutuhkan upaya percepatan peningkatan pencapaian akses air limbah domestik di Kabupaten Situbondo dan diperlukan pengumpulan dan pengolahan data SPM untuk perencanaan pemenuhan SPM air limbah domestik yang tepat dan efektif. Untuk itu, peningkatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan di bidang air limbah domestik dan juga kolaborasi data sangat dibutuhkan, mengingat sudah adanya amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

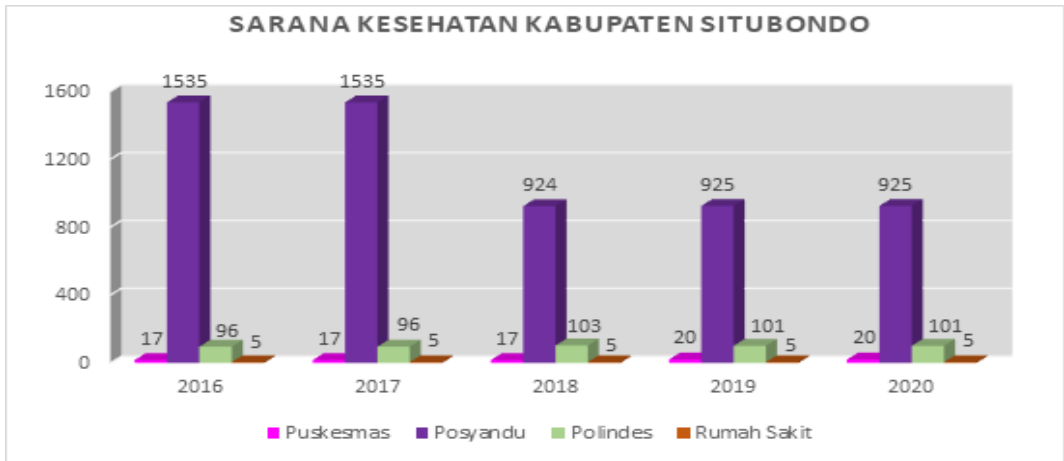


Air Limbah Domestik



Gambar 2. 79: Air Limbah Domestik Layak Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020
Sumber: BPS dan analisis Pokja AMPL Kabupaten Situbondo

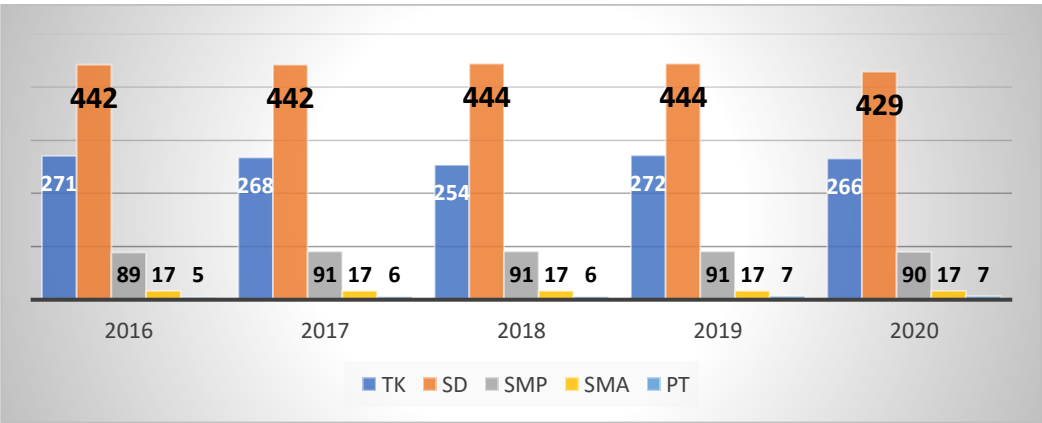
2.1.3.1.3.6. Ketersediaan Sarana Kesehatan



Gambar 2.80: Ketersediaan Sarana Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020
Sumber: Badan Pusan Statistik Kabupaten Situbondo, 2021

Sarana Kesehatan terbanyak pada Kabupaten Situbondo adalah Posyandu, pada tahun 2016 dan 2017 jumlah Posyandu di Situbondo 1535 kemudian turun lagi di tahun 2018 menjadi 924 dan 925 di tahun 2019. Untuk Puskesmas dari tahun 2016 sampai 2018 berjumlah 17 kemudian bertambah di tahun 2019 menjadi 20 puskesmas. Selanjutnya polindes dengan jumlah 96 pada tahun 2016 dan 2017 lalu meningkat di tahun 2018 menjadi 103 dan Kembali turun di tahun 2019 menjadi 101. Untuk Terakhir, rumah sakit yang jumlahnya tetap dari tahun 2016-2020 yang berjumlah 5 Rumah Sakit.

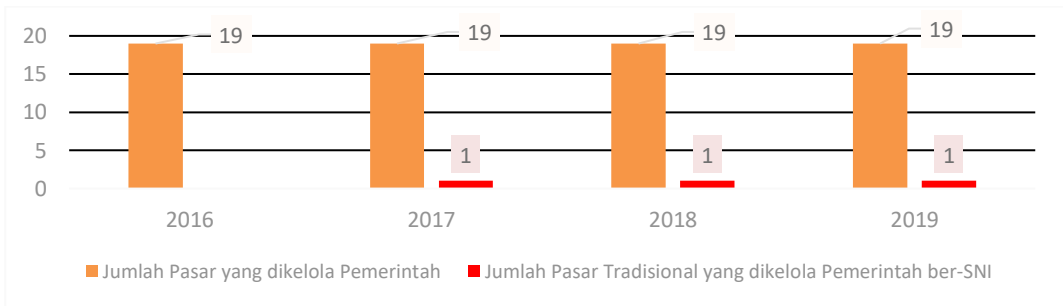
2.1.3.1.3.7. Ketersediaan Sarana Pendidikan



Gambar 2.81: Ketersediaan Sarana Pendidikan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020
Sumber: Badan Pusan Statistik Kabupaten Situbondo, 2021

Jumlah sarana Pendidikan tertinggi adalah Sekolah Dasar dengan jumlah 442 pada tahun 2016 dan 2017. Kemudian meningkat menjadi 444 jumlah sekolah dasar pada tahun 2018 dan 2019 dan 429 di tahun 2020. Selanjutnya, diikuti dengan jumlah Taman Kanak-Kanak dengan jumlah 271 pada tahun 2016, menurun menjadi 268 TK pada tahun 2015, dan semakin menurun pada tahun 2018 dengan jumlah 254. Namun, pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan dengan jumlah 272 dan 266 unit TK. Jumlah SMP pada tahun 2016 sebanyak 89 sekolah dan mengalami peningkatan menjadi 91 unit SMP hingga tahun 2019. Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dari tahun 2016 hingga tahun 2020 tetap sejumlah 17 sekolah SMA. Serta perguruan tinggi yang memiliki jumlah 5 PT pada tahun 2016, meningkat menjadi 6 PT pada tahun 2017 dan 2018 dan pada tahun 2019 dan 2020 bertambah menjadi 7 sekolah PT.

2.1.3.1.3.8. Presentase Ketersediaan Pasar

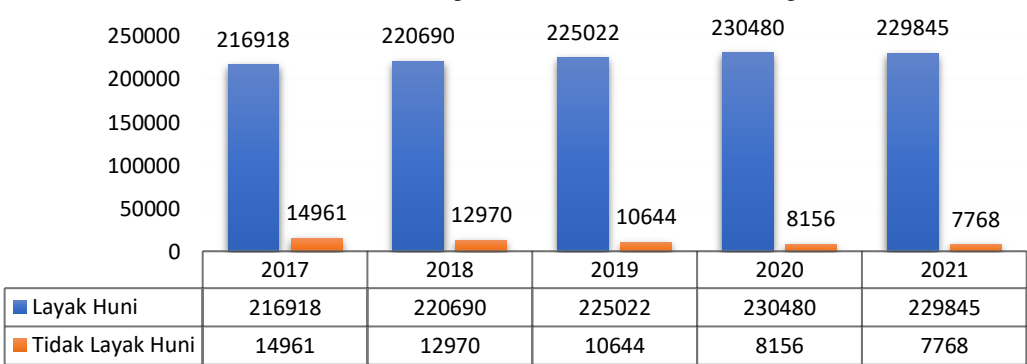


Gambar 2.82: Presentase Ketersediaan Pasar Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2020

Berdasarkan data di atas nampak bahwa jumlah pasar yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Situbondo dari tahun 2016 hingga tahun 2019 memiliki jumlah yang sama dan tetap yaitu sebanyak 19 pasar. Sedangkan untuk jumlah pasar tradisional yang dikelola pemerintah ber-SNI di Kabupaten Situbondo memiliki jumlah yang sama dan tetap yaitu pada tahun 2017 hingga 2019 sebanyak 1 pasar tradisional.

2.1.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

2.1.3.1.4.1. Presentase Rumah Layak Huni dan Tidak Layak Huni



Gambar 2.83: Presentase Rumah Layak Huni dan Tidak Layak Huni Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo, 2021



Presentase rumah layak huni dan tidak layak huni di Kabupaten Situbondo berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman nampak bahwa rumah layak huni dari tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada tahun 2017 sebanyak 216.918 rumah layak huni, pada tahun 2018 meningkat menjadi sebanyak 220.690 rumah layak huni. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali dengan jumlah sebesar 225.022 rumah layak huni dan pada tahun 2020 rumah layak huni mengalami kenaikan menjadi 230.480 rumah layak huni dan turun di tahun 2021 menjadi 229.845. Hal ini berbanding terbalik dengan rumah tidak layak huni di Kabupaten Situbondo dimana sejak tahun 2017 sebanyak 14.961 rumah tidak layak huni yang kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 12.970 rumah tidak layak huni, pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi berjumlah 10.644 rumah tidak layak huni dan pada tahun 2020 rumah tidak layak huni mengalami penurunan kembali menjadi 8.156 unit, sehingga total rumah tidak layak huni yang sudah ditangani dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah 7.768 unit.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar pada pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :

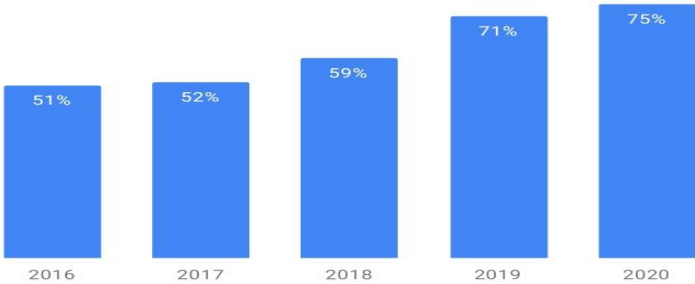
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

Pemenuhan SPM Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten Situbondo sebesar n/a (not available), hal ini dikarenakan belum ada rencana relokasi karena program pemerintah Kabupaten Situbondo.

2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pemenuhan SPM fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten Situbondo sebesar n/a (not available), hal ini dikarenakan belum ada rencana relokasi karena program pemerintah Kabupaten Situbondo.

2.1.3.1.4.2. Ketersediaan Jamban



Gambar 2.84: Data Capaian Stop BABS atau Open Defecation Free (ODF) di Kabupaten Situbondo tahun 2016 – 2020
Sumber: Aplikasi SMART STBM



Kebiasaan BABS tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya sanitasi yang layak dan aman demi terciptanya lingkungan yang sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Pemerintah Kabupaten Situbondo telah melakukan berbagai upaya untuk mentuntaskan kebiasaan BABS di masyarakat dan menargetkan praktik BABS akan mencapai nol persen pada 2024, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang buang air besar secara sembarangan.

2.1.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan harapan yang dikehendaki dari setiap pemerintah daerah, keadaan masyarakat yang tentram, kondusif sesuai dengan pengertian dari tantribum itu sendiri. Di Kabupaten Situbondo urusan Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh 2 organisasi perangkat daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo melaksanakan 3 program pembangunan sebagaimana dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.26: Realisasi Capaian Indikator Sasaran Urusan Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Presentasi Penegakan Perda	80%	92,5%	115%
		Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki Linmas Terlatih Sesuai Standar	2,2%	0%	0%
		Prasentase Penanganan Kebakaran Sesuai Resptime	70%	42%	60%

Sumber: Satpol PP Kabupaten Situbondo, 2022

Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo melaksanakan 3 program pembangunan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27: Realisasi Capaian Indikator Sasaran Urusan Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menurunkan Resiko bencana di Daerah	Indeks Resiko Bencana (IRB)	127,39	113,48	110%
		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,70	0,71	101%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo, 2020

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka bencana menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang masuk dalam rumpun Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar agar hidup secara layak.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pelayanan Dasar ini merupakan Pelayanan yang secara konstitusional berhak diterima warga negara secara minimal.

Berdasarkan kondisi geo fisik wilayah Kabupaten Situbondo merupakan wilayah yang berpotensi rawan bencana sehingga penanganan bencana memerlukan perencanaan dan penanganan yang serius. Untuk mengurangi resiko bencana maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan memberikan pelayanan publik secara maksimal dalam penanggulangan bencana. Jenis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 yaitu :

- Pelayanan informasi rawan bencana;
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Berkaitan dengan urusan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat juga mencakup adanya tindak pidana, dimana Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut. Berikut merupakan Jumlah Tindak Pidana yang ada di Kabupaten Situbondo dari Tahun 2016-2020:



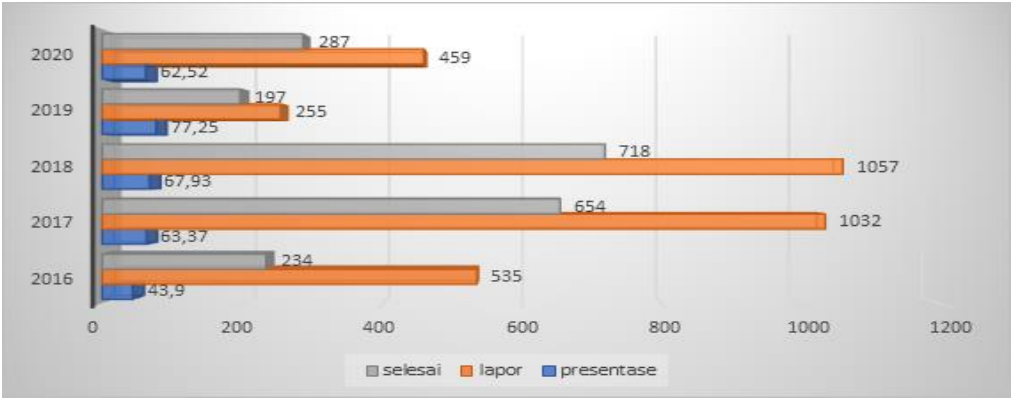
Gambar 2.85: Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana di Kabupaten Situbondo mengalami penurunan dan peningkatan kasus. Tahun 2016 sebanyak 505 kasus, tahun 2017 sebanyak 504 kasus dan tahun 2018 sebanyak 369 kasus. Hal tersebut mengindikasikan hal yang negatif karena semakin tingginya tindak pidana maka menandakan bahwa masih tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi di antara masyarakat Kabupaten Situbondo. Hal tersebut juga



akan mempengaruhi turunnya tingkat keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Situbondo. Sedangkan untuk presentase penyelesaian Tindak Pidana di Situbondo dapat dilihat dari grafik di bawah ini:



Gambar 2.86: Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo 2021

Untuk kasus penyelesaian tindak pidana dapat dilihat lebih jelas lagi melalui grafik diatas, persentase penyelesaian tindak pidana meningkat di setiap tahunnya yakni di tahun 2016 (43,9), 2017 (63,37) dan 2018 (67,93) dan tahun 2019 sebanyak 536 kasus yang terselesaikan. Hal tersebut mengindikasikan hal yang positif bahwa hukum di Kabupaten Situbondo sudah berjalan dengan baik dilihat dari peningkatan penyelesaian kasus tindak pidananya yang meningkat dari tahun 2016-2018.

Adapun Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 3 indikator sasaran dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 2.28: Realisasi Capaian Indikator Sasaran Urusan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2020

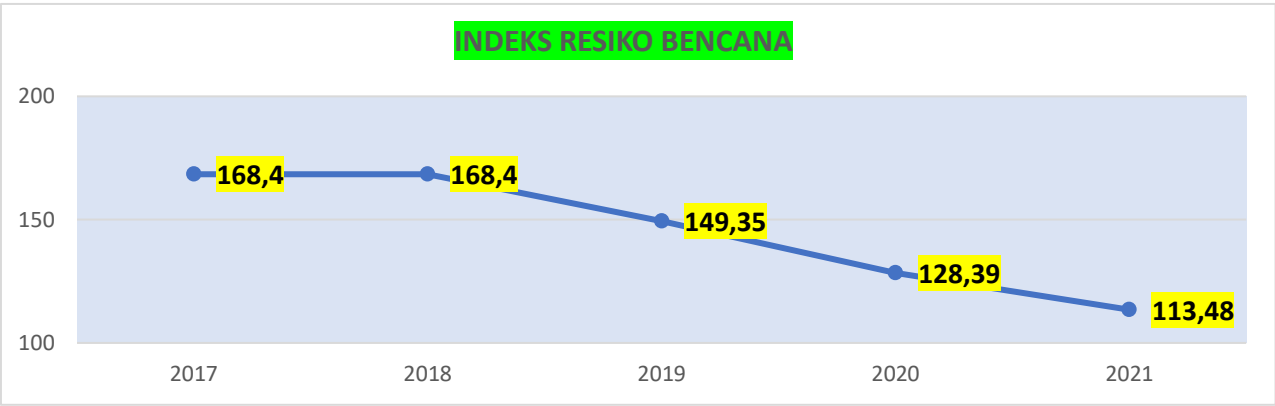
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dan Parpol dalam berdemokrasi di Kabupaten Situbondo	Indeks Demokrasi Indonesia	88%	77,68%	88,27%
Meningkatnya Antisipasi Konflik SARA untuk Menciptakan Rasa Tenang, Tertib dan Aman di Masyarakat	Persentase Potensi Konflik Terkait Poleksosbud yang Ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo 2020

Indeks Resiko Bencana

Risiko bencana adalah salah satu Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Situbondo yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026. Indeks Resiko Bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dengan demikian perhitungan kali ini ditekankan pada potensi kemungkinan dan besarnya dampak yang diukur dari keterpaparan (exposure) dari setiap bahaya (hazard) dan gabungan dari beberapa hazard yang ada (multi hazard). Jadi apabila kerawanan yang lalu dihitung dari data korban/kerusakan yang tercatat (data yang tersedia) untuk setiap bencana, saat ini indeks risiko ini dihitung dari potensi kemungkinan korban dan dampak yang akan

ditimbulkan dari suatu bencana. Berikut nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020.



Gambar 2. 87: Indeks Resiko Bencana Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022

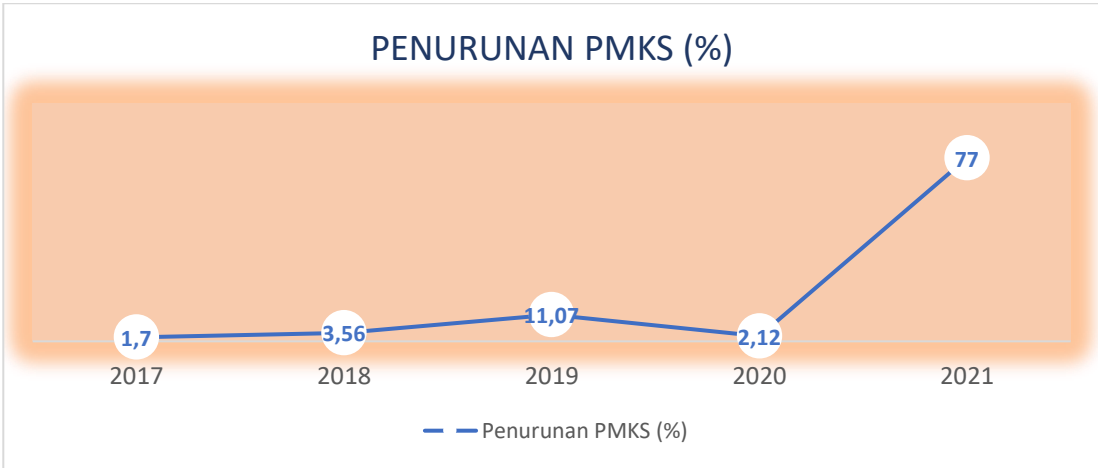
Beberapa Permasalahan dan Solusi PD yang menangani kebencanaan sebagai berikut:

- a. Permasalahan :
1. Kurangnya jumlah PNS dibandingkan dengan beban kinerja yang harus dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo, sehingga sangat dibutuhkan tambahan PNS guna mendukung kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.
 2. Kurangnya sarana mobilitas/operasional yang memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.
 3. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung sistem tanggap bencana.
 4. Kurangnya alat pendeteksi bencana (banjir, longsor, angin puting beliung).
- b. Solusi :
1. Merencanakan dan mengajukan penambahan PNS untuk personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.
 2. Mengajukan tambahan alokasi anggaran berkaitan sarana/prasarana untuk mobilitas/operasional dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo maupun Pemerintah Provinsi/Pusat melalui bantuan keuangan atau bantuan peralatan Penanggulangan Bencana

2.1.3.1.6. Sosial

2.1.3.1.6.1. Presentase Penurunan PMKS

Pemantauan perkembangan jumlah PMKS dapat digunakan sebagai salah satu indikator sosial ekonomi. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsisosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Perkembangan PMKS di Kabupaten Situbondo dapat dilihat melalui grafik penurunan PMKS dalam bentuk persentase sebagai berikut:



Gambar 2.88: Persentase Penurunan PMKS Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, 2022

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah penurunan PMKS di Kabupaten Situbondo meningkat secara signifikan di setiap tahunnya. Tahun 2017 prosentase penurunan PMKS sebesar 1,7%, tahun 2018 (3,56%), tahun 2019 (11,07%) dan tahun 2020 (2,12%) dan prosentase penurunan PMKS tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 77%. Peningkatan penurunan PMKS secara signifikan di setiap tahunnya mengindikasikan hal yang positif karena semakin meningkatnya angka penurunan PMKS maka akan bertambah pula angka masyarakat yang berstatus sejahtera. Untuk lebih lengkapnya mengenai PMKS di Kabupaten Situbondo maka dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.29: Data PMKS Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS Kabupaten	satuan	50.111	49.848	47255	42.026	41.134
2	Target PMKS yang Ditangani	satuan	313	960	2025	5680	23.392
3	Realisasi PMKS yang ditangani	satuan	263	848	1.745	5.229	26.547
4	Sisa Jumlah PMKS Kabupaten	satuan	49.848	4.000	47.255	42.026	14.587
5	Jumlah Penduduk	satuan	673.282	676.703	679.993	682.978	685.967
6	% PMKS dari Jumlah Penduduk	%	7,44	7.37	7.2	6.95	5.99

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, 2021

Tabel di atas menjabarkan mengenai data PMKS di Kabupaten Situbondo diantaranya yakni: Jumlah PMKS Kabupaten Situbondo, Target PMKS yang ditangani, Realisasi PMKS yang di tangani, Sisa Jumlah PMKS Kabupaten Situbondo, Jumlah Keseluruhan Penduduk Situbondo dan yang terakhir Persentase PMKS dari Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo.

Pada jenis layanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial, dengan indikator jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan keterampilan, realisasi



kinerja sebesar 100%, sesuai dengan target nasional Standar Pelayanan Minimal 100%. Pada jenis layanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial dengan indikatornya jumlah anak yang terbina melalui UPT Panti Sosial Dinas Provinsi, realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 60%. Tidak mencapai target nasional Standar Pelayanan Minimal 100%.

Pada jenis layanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial dengan indikator pencapaiannya adalah Jumlah lanjut usia yang mendapat bantuan, realisasi kinerja pada tahun 2019 sebesar 100%, dan mencapai target nasional Standar Pelayanan Minimal 100%. Pada jenis pelayanan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, indikator pencapaiannya adalah jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) gepeng dan anjal yang dioperasi, dengan realisasi kinerja sebesar 87,5%, dan masih belum mencapai target nasional Standar Pelayanan Minimal 100%.

Pada jenis pelayanan Perindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota dengan indikator pencapaiannya jumlah penyaluran paket sembako pada bencana alam, dan Jumlah penyaluran paket sembako pada bencana sosial, realisasi kinerjanya sebesar 77,05%, masih belum mencapai target nasional Standar Pelayanan Minimal 100%. Dan apabila dirata-rata keseluruhan capaian SPM bidang Sosial Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 sebesar 84,91%, dan masih belum mencapai target nasional.

2.3.1.6. Kesatuan Bangsa dan Politik

kebebasan berserikat dan berkumpul di Kabupaten Situbondo tercermin dalam keberadaan lembaga / organisasi kemasyarakatan yang ada dan terdaftar secara legal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sampai dengan saat ini, tercatat 143 lembaga / kelompok / organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari berbagai latar pendirian antara lain ada 46 organisasi kepemudaan, 28 lembaga organisasi keagamaan, 32 organisasi profesi, 12 organisasi wanita, 2 organisasi penghayat kepercayaan serta 23 organisasi kemasyarakatan lainnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 3 indikator sasaran dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 2. 30: Realisasi Capaian Indikator Sasaran Urusan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2020

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dan Parpol dalam berdemokrasi di Kabupaten Situbondo	Indeks Demokrasi Indonesia	88%	77,68%	88,27%
2	Meningkatnya Antisipasi Konflik SARA untuk Menciptakan Rasa Tenram, Tertib dan Aman di Masyarakat.	Presentasi potensi konflik terkait Ipoleksosbud yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020

Sementara Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Situbondo, berada pada kategori sedang, dimana sejak tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuatif namun pada 2 tahun terakhir mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Yaitu 70,92 pada tahun 2018 dan naik



menjadi 72,86 di tahun 2019 dan 2020. Kondisi ini menunjukkan situasi demokrasi, kebebasan sipil dan pelibatan peran masyarakat di Situbondo dapat dikatakan kondusif dan berjalan dengan baik, termasuk tercapainya target penyelesaian konflik Poleksosbud yang muncul, dimana pada 5 tahun terakhir capaiannya selalu 100%.

Tabel 2. 31: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indek Demokrasi Indonesia	Indeks	72,24	70,92	70,92	72,86	72,86
2	Persentase Potensi Konflik Terkait Poleksosbud yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

2.1.3.2.1.1. Ketersediaan Lapangan Kerja

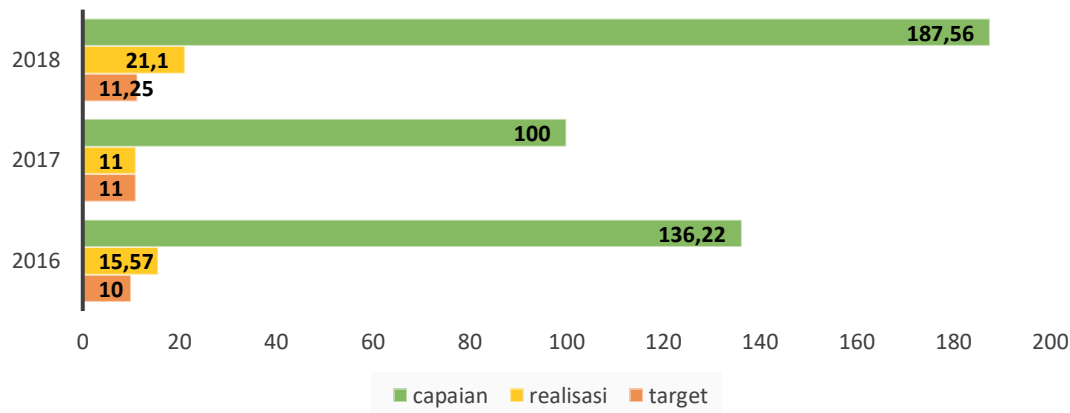
Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah angkatan kerja sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi maka perlu adanya upaya perluasan lapangan kerja. Untuk melaksanakan amanat UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu upaya meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan guna meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja dalam agenda penanggulangan pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan. Selain itu juga pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, antara pekerja dan pengusaha dan juga antara pengusaha dengan serikat pekerja.

Tabel 2.32: Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Kabupaten Situbondo berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SD	-	1	1
SMP	2	6	8
SMA	43	19	62
SMK	38	35	73
DI/DII/DIII/Akademi	5	7	13
Universitas	17	22	39
Jumlah	105	90	195

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2021

Jumlah pencari kerja terdaftar Kabupaten Situbondo menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2020, tangka SD 1 orang, SMP 8 orang, SMA 62 orang, SMK 73 orang, Diploma I/II/III/Akademi 13 orang, dan Universitas 39 orang, dengan total jumlah pencari kerja sebanyak 195 orang. Dan apabila dilihat dari sisi jenis kelamin, dari 195 orang tersebut 90 diantaranya adalah perempuan, dan 105 orang adalah laki laki .



Gambar 2.89: Persentase Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2020

Pada tahun 2016 target persentase ketersediaan lapangan pekerjaan yakni 10% kemudian terealisasi sebesar 15,57%, untuk capaiannya menempati angka 136,22%. Sedangkan untuk tahun 2017 targetnya yakni 11% dan terealisasi sebesar 11% yang menandakan bahwa capaian berada pada angka 100%. Tahun 2018 target persentase ketersediaan lapangan pekerjaan yakni 11,25% dan terealisasi sebesar 21,1% dan capaian sebesar 187,56%. Berdasarkan persentase ketersediaan lapangan kerja dari tahun 2016-2018 mengindikasikan bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke 2018 menunjukkan hal yang positif karena semakin meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan maka akan mengurangi persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Situbondo. Untuk itu perlu adanya konsistensi peningkatan dalam hal tersebut.

Tabel 2.33: Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Kabupaten Situbondo Tahun 2021

	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Angkatan Kerja	233.192	169.038	402.230
Bekerja	222.675	164.768	387.443
Pengangguran	10.517	4.270	14.787

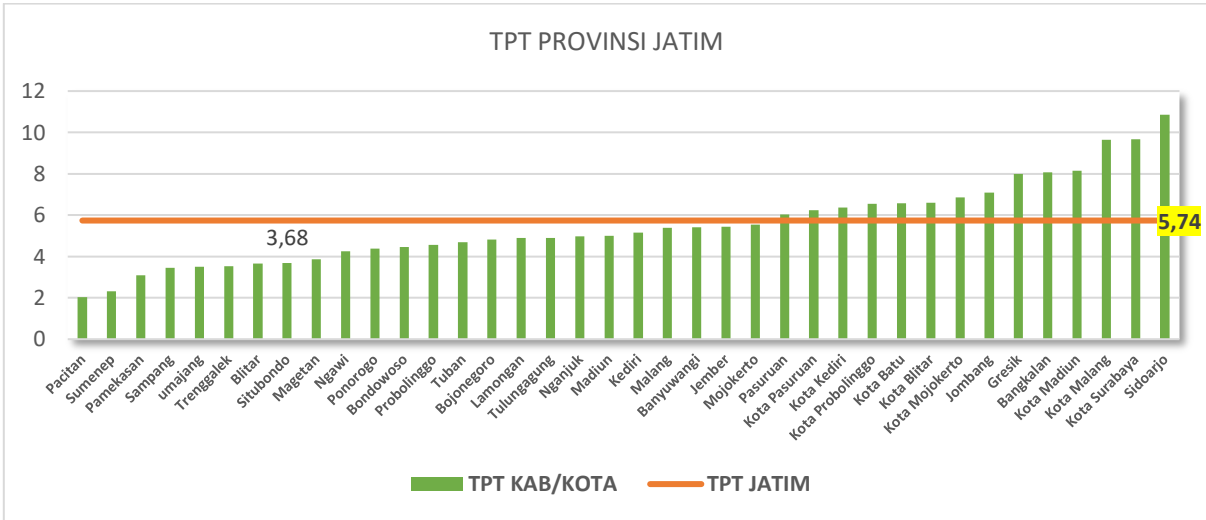
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2021

Ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Situbondo di Tahun 2021 dapat diketahui dari tabel di atas. Dari jumlah angkatan kerja sebanyak 402.230 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki, terdapat sejumlah 387.443 jiwa yang bekerja. Sedangkan sisanya menganggur yakni sebanyak 14.787 jiwa. Hal tersebut menandakan bahwa masih kurangnya jumlah lapangan kerja yang ada di masyarakat. Jumlah lapangan kerja yang kurang akan mengakibatkan tingginya jumlah TPT di Kabupaten Situbondo.



2.1.3.2.1.2. **Tingkat Pengangguran Terbuka**

BPS menyatakan bahwa dilihat dari tren lapangan pekerjaan selama Agustus 2019-Agustus 2020, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terutama pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,50 persen poin), Industri Pengolahan (0,24 persenpoin), dan Perdagangan (0,20 persenpoin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada Pertanian (1,46 persenpoin), Jasa Keuangan (0,06 persenpoin), dan Pertambangan (0,04 persenpoin). Sedangkan untuk pekerja formal yaitu mereka yang berusaha dibantu buruh tetap dan yang menjadi buruh/karyawan/pegawai. Terdapat sejumlah 56,02 juta orang (44,28 persen) pekerja formal. Sedangkan penduduk yang bekerja pada kegiatan informal (mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja tak dibayar) ada sebanyak 70,49 juta orang (55,72 persen). Berikut ini merupakan grafik persentase TPT Per Kabupaten di Provinsi Jawa Timur:



Gambar 2.90: Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Situbondo masih berada di bawah rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi. Tahun 2021 Persentase TPT Kabupaten yakni 3,68% dan rata-rata provinsi sebesar 5,74%. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki Persentase TPT dengan angka tertinggi di Tahun 2021 yakni Kota Surabaya sebesar 10,97%.



Gambar 2. 91: Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Nasional, 2021
Keterangan : * Agustus 2019

TPT Situbondo sebesar 2.82%. terdiri dari TPT laki-laki sebesar 3.71% dan TPT perempuan sebesar 1.59%. atau jumlah pengangguran terbuka total sebanyak 11.148 orang, terdiri dari laki-laki 8.507 orang dan perempuan 2.641 orang. Jumlah angkatan Kerja Jawa Timur pada agustus 2018 sebesar 21.30 juta orang, meningkat 1.73% dibandingkan agustus 2017. Dalam periode yang sama, jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 350 ribu orang atau sebesar 1,74% dari 20.10 juta orang menjadi 20.35 juta orang. Perkembangan tersebut mendorong TPT pada agustus 2018 sedikit menurun dibandingkan 2017 dari 4% menjadi 3.99%. Pada posisi TPT Kabupaten Situbondo kecenderungan menurun, di tahun 2018 mencapai angka 1.92%. pada posisi rata-rata TPT provinsi Jawa Timur dan Nasional masih di angka 3.99% dan 5.34%. Tahun 2019 TPT Kabupaten Situbondo berada di angka 2.82 naik 0.90% dari tahun 2018. Sedangkan Jawa Timur turun 0.07 menjadi 3.92. Pada tahun 2020 TPT Kabupaten Situbondo terus mengalami kenaikan hingga mencapai angka 3.85 yang artinya naik sebesar 1.03 dari tahun 2019. Begitujuga dengan Jawa Timur yang naik sebesar 1.92 menjadi 5.84. Naiknya TPT di Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia saat ini masih belum mampu memenuhi permintaan permintaan pekerjaan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja di Kabupaten Situbondo. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Situbondo.

Untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka, dilakukan dengan upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja dan peningkatan perlindungan tenaga kerja. Berikut merupakan indikator beserta capaiannya selama beberapa tahun terakhir:



Tabel 2.34: Capaian Indikator Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Presentase ketersediaan lapangan pekerjaan	%	100	187.56	n/a	n/a	n/a
2	Tingkat pengangguran terbuka (upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka) dengan:	%	1.49	1.92	2.82	3,85	n/a
	a.Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja	%	n/a	100	100	n/a	100
	• Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat ketenagakerjaan						
	• Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi		n/a	86,84	100	100	100
	b.Peningkatan perlindungan masyarakat	%	n/a	83	84	85	86,90
	• Prosentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan						
	• Prosentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama		n/a	100	100		100
3	Presentase penempatan transmigran	%	100	100	100	100	0
4	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	%	6,42	6,62	6,89	0,07	n/a
5	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	71.10	71.87	72.20	73.74	n/a

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa TPT Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2018, hal ini terlihat dari capaian tingkat pengangguran terbuka yang pada tahun 2018 sebesar 1,92%, mengalami kenaikan menjadi 2.82% pada tahun 2019 dan berada pada angka 3.85 di tahun 2020. Selanjutnya, Indikator Presentasi pencari kerja yang memiliki sertifikat ketenagakerjaan mengalami capaian yang sama pada tahun 2018 dan 2019 yakni 100%, sedangkan indikator presentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi pada tahun 2018 memiliki capaian sebesar 86,84% dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 100%. Pada indikator prosentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, pada tahun 2019 relisasi kinerjanya sebesar 84%, dan pada tahun 2018 realisasi kinerjanya sebesar 83%. Sedangkan Presentasi kasus

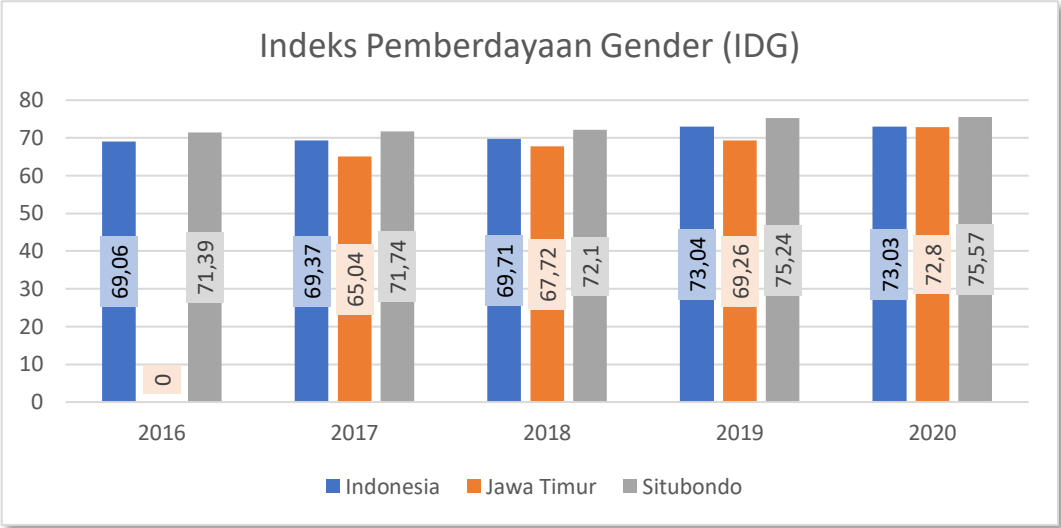


perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama pada tahun 2018 dan 2019 memiliki capaian sebesar 100%. Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Situbondo pada Tahun 2020 terselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebesar 100%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 99,40%, sehingga capaiannya sebesar 100,60%. Jumlah kasus hubungan industrial di Kabupaten Situbondo Tahun 2020 sebanyak 4 kasus, dan sudah diselesaikan dengan Perjanjian Bersama atau 100%.

Selanjutnya indikator Presentase penempatan transmigran dalam lima tahun terakhir mengalami capaian yang sama yakni 100% dan diproyeksikan masih pada angka yang sama di tahun 2020. sedangkan indikator Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan yakni pada tahun 2018 sebesar 6.62% dan pada tahun 2019 sebesar 6.89%. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2019 peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan diproyeksikan akan menurun sebesar 6.82 menjadi 0.07. Selanjutnya, indikator Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2017 memiliki capaian sebesar 71.10%, pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 71.87%, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 71.1% dan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 73.74

2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu urusan yang sangat penting. Perempuan, dalam kaitan dengan pembangunan dan hasil pembangunan selalu menarik jika dikaji dan dibandingkan antar tahun maupun antar Kabupaten /Kota. Dari tahun ke tahun perempuan selalu ada peningkatan dalam perannya di berbagai bidang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan selalu meliris hasil dari pembangunan, dan bagaimana peran dalam pembangunan. Sasaran program adalah perempuan dan anak yang rentan terhadap tindakan pidana kekerasan. Hasil yang diharapkan adalah meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak melalui upaya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan dan sosialisasi serta advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang mendukung yaitu: Sosialisasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, orientasi UU tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta relawan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Dan hasilnya adalah terpecahkannya dan terselesaikannya beberapa permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).



Gambar 2.92. Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2021

Dari gambar grafik tersebut di atas tampak bahwa perkembangan IDG Kabupaten Situbondo tiap tahunnya menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, dari tahun 2018 ke tahun 2019 naik 1,54 poin atau naik sebesar 2,27 persen, dan tahun 2020 naik 3,54 poin dari tahun 2019, namun masih dibawah Jawa Timur dan Nasional. Selain itu ada beberapa indikator lain yang menjadi tolak ukur keberhasilan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.35: Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tertangani	Kasus	61	50	32	142	41
2	perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100%	100%	100%	100%	100%
3	perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	34%	37%	30%	36%	100%
4	Presentase Kelompok Usaha Perempuan Mandiri	%	n/a	n/a	67,81	62,13	62,13
5	Presentase Organisasi Perempuan yang Berdaya	%	n/a	n/a	n/a	90%	n/a

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Situbondo, 2021

Berdasarkan table diatas pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Situbondo terlihat pada indikator perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu memilih capaian yang stabil yakni 100% selama lima tahun terakhir, sedangkan indikator perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum memiliki capaian sebesar 30% pada tahun 2019 dan 36% pada



tahun 2020 36% serta pada tahun 2021 capaian mencapai angka masimum yakni 100%. Serta indikator Presentase Kelompok Usaha Perempuan Mandiri memiliki angka capaian 62,13% pada tahun 2019 dan angka mengalami penurunan menjadi 62.13% pada tahun 2020 dan tahun 2021. Indikator yang terakhir yakni persentase organisasi perempuan yang berdaya hanya memiliki capaian hasil pada tahun 2020 yakni 90% dan pada tahun 2021 data masih belum diketahui.

2.1.3.2.3. Pangan

Ketahanan Pangan berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 telah mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Oleh karena itu, ketahanan pangan mutlak harus dapat dicapai untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian Ketahanan Pangan dilakukan dengan berlandaskan pada Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan. Kemandirian pangan diartikan bahwa pangan yang beraneka ragam harus dapat dipenuhi dari kemampuan dalam negeri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Sedangkan kedaulatan pangan menekankan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

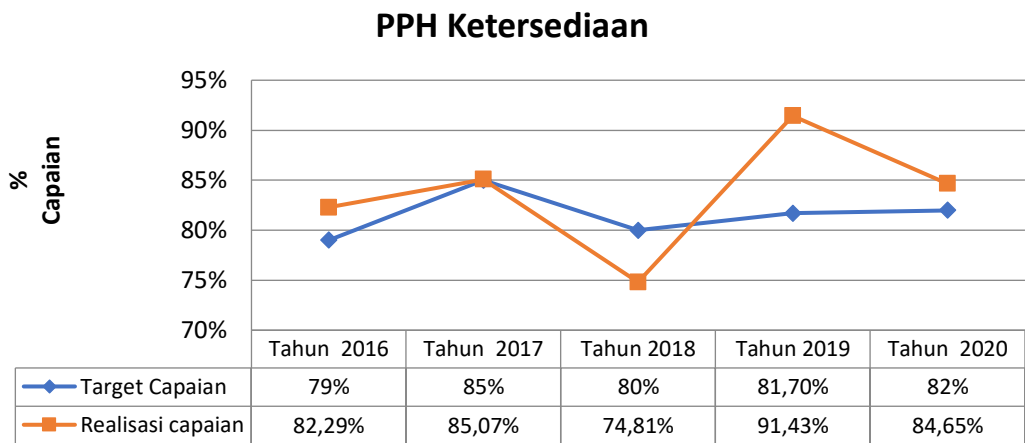
Implementasi Kebijakan dan Program Pembangunan Ketahanan Pangan dilaksanakan dengan memperhatikan Sub-Sistem Ketahanan Pangan, yang mencakup : (1) Sub-Sistem Ketersediaan Pangan; (2) Sub-Sistem Keterjangkauan Pangan; serta (3) Sub-Sistem Konsumsi Pangan dan Gizi. Kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mengusahakan pencapaian (a) Angka Pola Pangan Harapan; (b) Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Beras), dan (c) Stabilisasi Harga Bahan Pangan Strategis di Tingkat Konsumen.

Tabel 2.36: Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dan Diversifikasi pangan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020

No	URAIAN	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ketersediaan Energi	kkl/ kapita/ hr	-	3998,78	2524,66	2814,98	2.154,09
2	Jumlah Ketersediaan Protein	gr/kapita/ hr	-	155,69	113,74	122,05	61,43
3	Persentase Desa yang mempunyai cadangan pangan masyarakat	%	-	23,08	13,65	48,44	
4	Prosentase Koefisien Keragaman Harga Tingkat Konsumen	%	-	13,54	39,06	13	13,29
5	Presentasi Keragaman Konsumsi Pangan	%	-	84	72,1	88,1	80,2
6	Presentasi capaian keamanan pangan segar	%	-	78,26	100	83,33	80
7	Presentasi penanganan daerah rawan pangan	%	-	39	60,29	61,76	61,03

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, 2021

Ketahanan pangan merupakan salah satu ukuran dalam melihat ketercukupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan yang layak (bergizi). Adapun indikator dari terpenuhian pangan tersebut adalah Skor Pola Pangan Harapan masyarakat. Berikut adalah Skor Pola Pangan Harapan masyarakat di Kabupaten Situbondo tahun 2016 hingga tahun 2020:



Gambar 2.93. Skor Pola Pangan harapan Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, 2021

Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas ketersediaan pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2012 merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan yang ditetapkan minimal 2400 kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 63 gram/kapita/hari untuk protein. Tingkat ketersediaan pangan selain dilihat dari kecukupan gizinya, baik energi dan protein, juga dinilai dari sisi keberagaman ketersediaan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). Keberagaman ketersediaan pangan akan mendukung pencapaian keberagaman konsumsi pangan sehingga dapat dicapai sasaran konsumsi pangan yang diharapkan. Perkembangan skor PPH Ketersediaan selama 5 (lima) tahun secara keseluruhan sudah melebihi target, kecuali pada Tahun 2018, dimana realisasi capaian kurang dari target, bila dibandingkan target rata - rata capaian sebesar 81,54% dengan realisasi sebesar 83, 65%. Namun demikian rata - rata capaian sebesar 83,65% dinilai masih jauh dari angka ideal yaitu 100 %, hal ini menunjukkan bahwa kualitas keragaman kelompok bahan pangan yang tersedia di Kabupaten Situbondo belum seimbang pada 9 (sembilan) kelompok bahan pangan.

Tabel Skor PPH Konsumsi Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020

No	Kelompok Pangan	Skor Maks	2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi-padian	25,0	25,0	15,6	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	2,5	2,5	1,2	0,9	1,2	1,0
3	Pangan Hewani	24,0	14,85	20,5	10,1	18,9	16,7
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	1,0	1,0	0,7	0,2	0,2	0,3
6	Kacang-Kacangan	10,0	10,0	10,0	9,2	9,1	8,0
7	Gula	2,5	2,5	1,1	2,5	2,1	2,1
8	Sayur dan Buah	30,0	20,6	30,0	19,2	26,8	22,2
Total		100	81,45	84,0	72,1	88,4	80,2

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Tahun 2021



Dari tabel di atas, skor PPH kelompok pangan padi-padian (padi, jagung, terigu) mencapai Skor Maksimal (25,0). Hal ini dapat menggambarkan bahwa kecukupan gizi karbohidrat sudah tercukupi dengan baik, akan tetapi sebagai makanan pokok (sumber zat tenaga), kelompok pangan padi-padian mendominasi dibanding umbi-umbian, dimana skor PPH untuk umbi-umbian masih jauh dari skor maksimal. Tidak dapat dipungkiri bahwa beras (Nasi) tetap menjadi menu utama dalam pemenuhan karbohidrat, dan pemakaian terigu juga mendominasi sebagai bahan campuran membuat olahan pangan seperti kue atau jajanan karena resep olahan pangan banyak yang menggunakan tepung terigu sebagai bahan dasar.

Skor PPH Maksimum juga terjadi pada kelompok pangan minyak dan lemak. Hal ini mengisyaratkan bahwa konsumsi masyarakat terhadap minyak dan lemak telah mencukupi standart ideal konsumsi. Dominasi konsumsi terhadap minyak kelapa sawit dikarenakan masyarakat cenderung mengolah bahan pangannya dengan cara menggoreng, hampir semua olahan lauk pauk (tempe, tahu, ikan) diolah dengan digoreng karena lebih praktis dari sisi bumbu. Bahkan mengolah sayur pun dengan menumis bukan direbus. Selain itu jajanan atau olahan pangan juga banyak yang digoreng, bahkan penjual gorengan (pisang goreng, tahu petis, ote-ote, kripik singkong) banyak sekali dijumpai di pinggir jalan. Fenomena penggemar krupuk juga mempengaruhi, banyak orang merasa kurang nikmat jika makan tanpa krupuk.

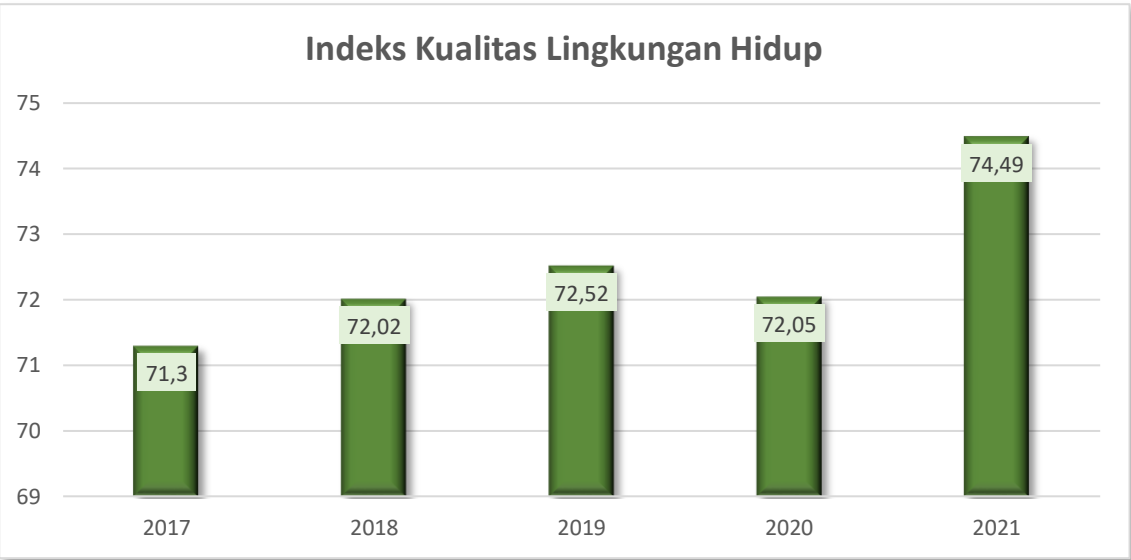
Kelompok pangan Gula juga memiliki skor PPH yang relatif mendekati Skor Maksimum (2,5), sehingga dapat diartikan bahwa konsumsi kelompok pangan ini cukup baik dilihat dari kecukupan gizi. Berdasarkan data pola konsumsi pangan Gula Pasir pastinya mendominasi konsumsi gula karena hampir semua makanan dan minuman yang membutuhkan rasa manis akan memakai gula pasir sebagai bahan tambahannya. Pemakaian gula pasir bukan hanya pada makanan dan minuman sehari-hari seperti teh dan kopi, pelaku usaha, khususnya penjual minuman seperti es campur, sop buah, es puding, dan warung makan juga memakai gula pasir sebagai pemanis pada dagangannya (minumannya). Hanya sebagian kecil makanan atau jajanan saja yang menggunakan gula merah sebagai bahan pemanisnya seperti kue lupis, putu, apem, serabi dan es dawet.

Skor PPH yang masih jauh dari Skor Maksimal adalah konsumsi buah dan sayur. Diperlukan intervensi secara intensif untuk membiasakan masyarakat agar mengkonsumsi sayur dan buah. Beberapa masyarakat tidak setiap hari mengkonsumsi sayur bahkan beberapa orang ada yang tidak suka sayur atau hanya mau memakan jenis sayur tertentu saja, bahkan ketika ikan, tempe atau tahu telah diolah menjadi lauk yang berkuah maka sayur sudah tidak lagi dikonsumsi. Menurunnya skor PPH untuk sayur juga disebabkan makin beragamnya macam sayur dalam daftar survey sehingga mempengaruhi jumlah secara kuantitatif akan tetapi konsumsi sayur masyarakat secara kualitatif cukup tinggi dan beragam. Rendahnya skor PPH konsumsi buah karena masyarakat tidak terbiasa mengkonsumsi buah setiap hari, buah untuk sebagian besar masyarakat masih berupa bahan pangan yang mewah karena harganya mahal. Disamping daya beli, kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi buah setiap hari masih sangat kurang, biasanya konsumsi buah hanya sesekali saja. Penjualan buah yang harus dalam jumlah banyak (pisang harus beli sesisir, buah lainnya setidaknya harus beli 0,5 kg) juga mempengaruhi minat masyarakat khususnya yang berpenghasilan menengah ke bawah.

Dengan pendekatan Pola Pangan Harapan, keadaan perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan dapat memenuhi tidak hanya kecukupan gizi (nutritional adequacy), akan tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance) yang didukung oleh citarasa (palatability), daya guna (digestability), daya terima masyarakat (acceptability), kuantitas, dan kemampuan daya beli (affordability).

2.1.3.2.4. Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup yang tercemin dengan pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Berikut merupakan gambaran variabel IKLH dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020:

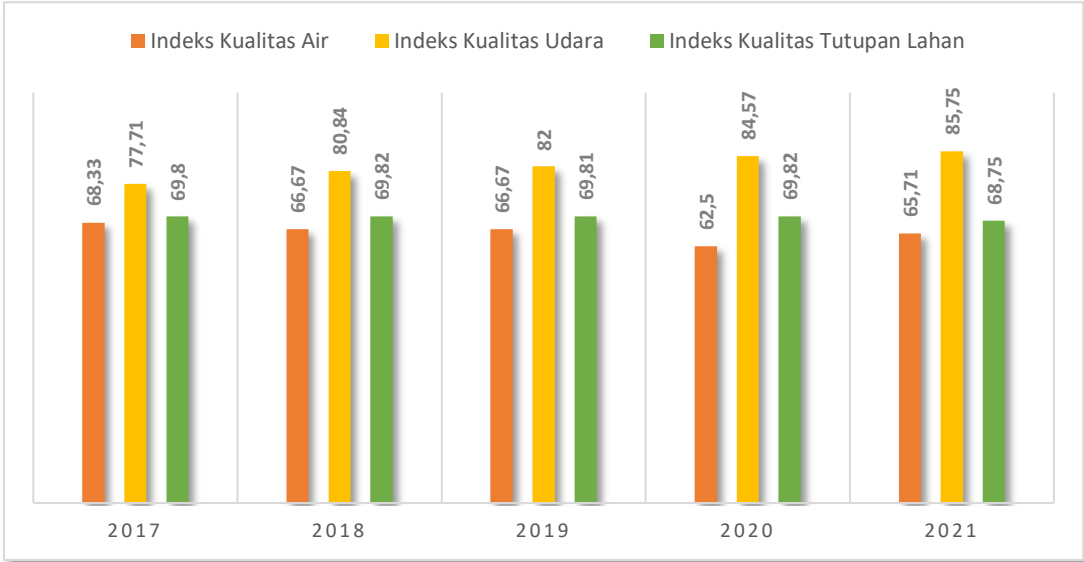


Gambar 2.94. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021
Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo Tahun 2021

Dalam menganalisa IKLH diketahui dengan melihat hasil dari nilai IKLH yang didapat dan masuk dalam kategori mana nilai IKLH tersebut. Berikut adalah kategori dan range nilai IKLH setiap IKLH:

KATEGORI	RANGE NILAI
Unggul	>90
Sangat baik	82 – 90
Baik	74 - 82
Cukup	66 – 74
Kurang	58 - 66
Sangat Kurang	50 – 58
Waspada	<50

Berdasarkan tabel kategori nilai IKLH diketahui bahwa Kabupaten Situbondo dari tahun 2017 hingga tahun 2021 masuk dalam kategori “Cukup” dan belum ada peningkatan kategori selama 5 tahun tersebut. Adapun bila dilihat dari nilai indikator pembentuk IKLH yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Tutupan Lahan adalah sebagai berikut:



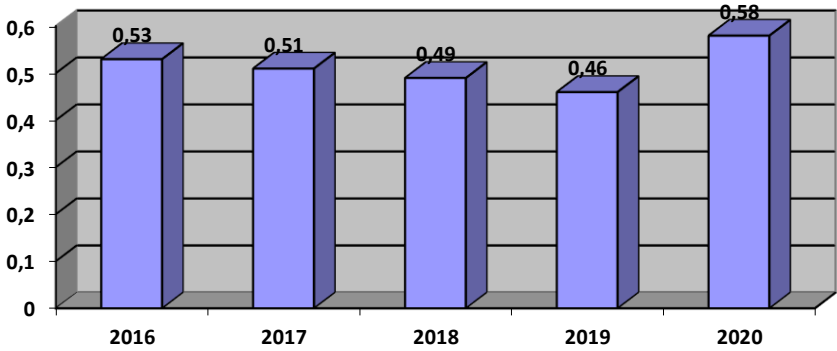
Gambar 2.95. Indeks Kualitas Air, Udara, Dan Tutupan Lahan Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo 2017-2020

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2021 yaitu 74,49%. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, dimana IKLH merupakan generalisasi dari tiga penilaian. Indeks kualitas lingkungan hidup meliputi penilaian kualitas air, udara dan tutupan lahan. Indeks kualitas air memiliki capaian kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 65,71%, sedangkan kualitas udara meningkat menjadi 85,75%, indeks tutupan lahan terpantau fluktuatif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 hingga pada tahun 2021 mencapai angka 68.75.

2.1.3.2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

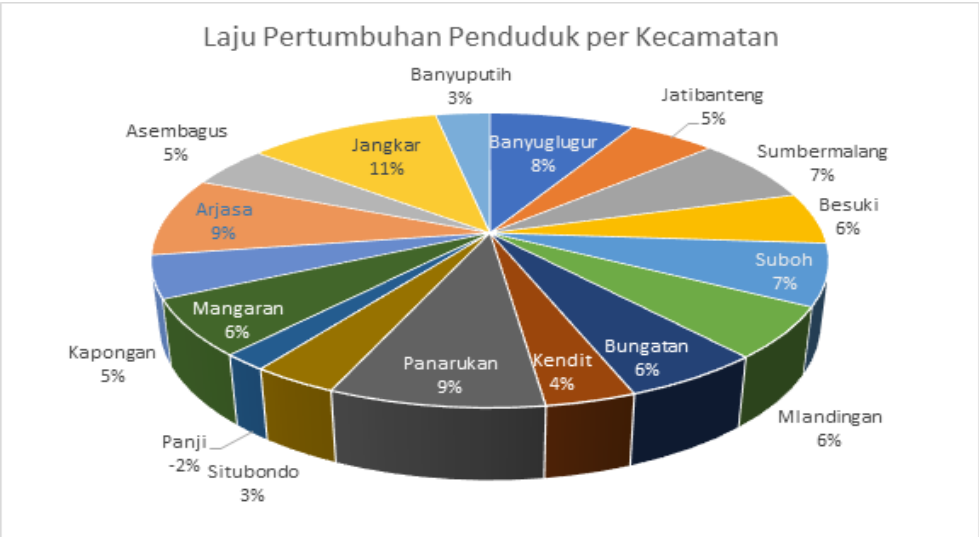
2.1.3.2.5.1. Pertumbuhan penduduk



Gambar 2.96: Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2020

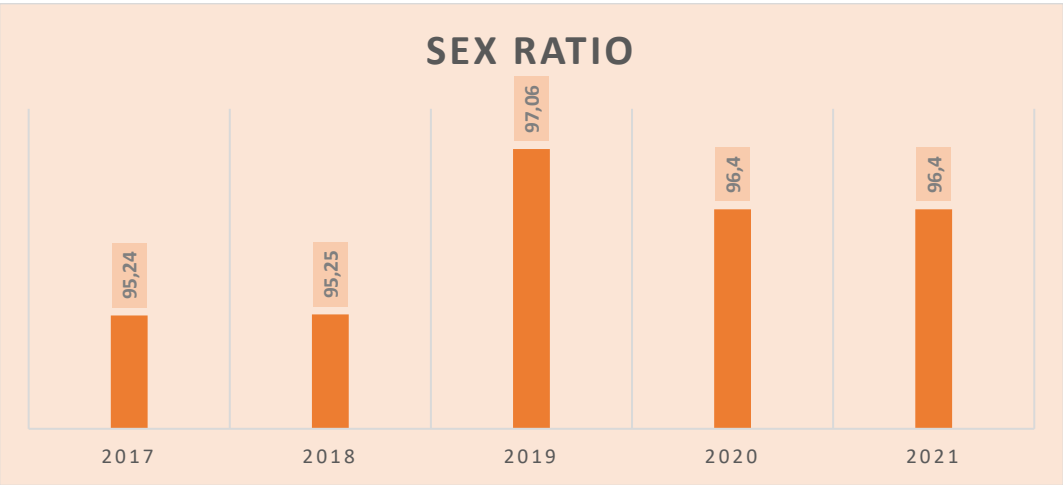
Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan kecuali di tahun 2020 yang mengalami kenaikan. Laju pertumbuhan tahun 2016 sebesar 0.53, tahun 2017 sebesar 0,51, tahun 2018 sebesar 0,49, dan tahun 2019 turun menjadi 0,46. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengendalikan penduduk telah menunjukkan keberhasilan.



Gambar 2.97: Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan di Kabupaten Situbondo tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2020

Laju pertumbuhan penduduk kecamatan pada Kabupaten Situbondo menunjukkan laju pertumbuhan penduduk tercepat adalah Kecamatan Jangkar sebesar 11%. Laju pertumbuhan terlambat adalah Kecamatan Panji sebesar -2%. Laju pertumbuhan penduduk kecamatan di Kabupaten Situbondo rata- rata sedang.

2.1.3.2.5.2. Sex Ratio



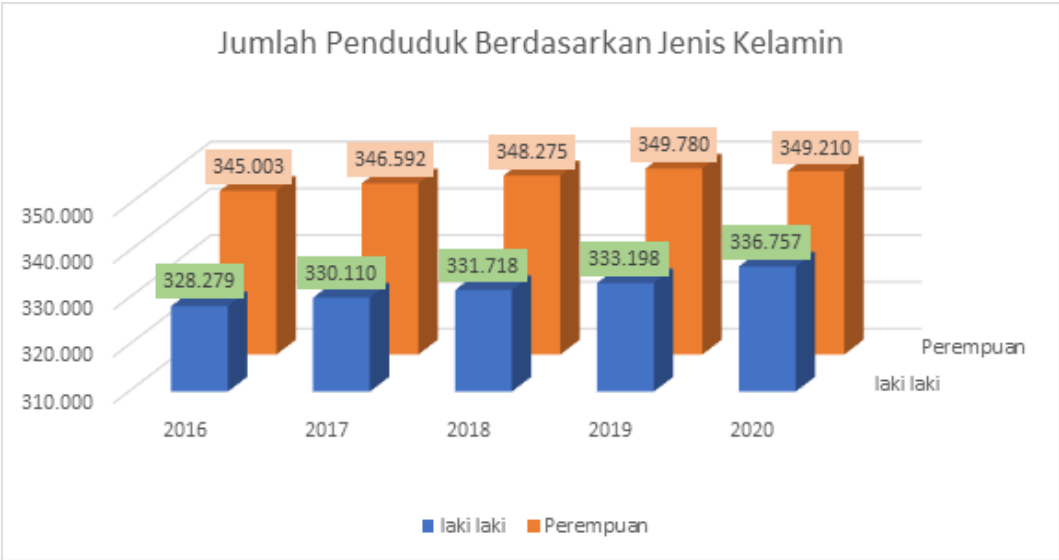
Gambar 2.98: Rasio Jenis Kelamin tahun 2017-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo Tahun 2017 – 2021

Rasio jenis kelamin Kabupaten Situbondo dari tahun 2017-2019 menunjukkan kenaikan. Seks rasio di tahun 2017 sebesar 95,24 yang menunjukkan bahwa dari 100 perempuan terdapat 95 penduduk laki-laki. Tahun 2018 sebesar 95,25 hal ini menunjukkan dari 100 perempuan terdapat 95 penduduk laki-laki. Tahun 2019 sebesar 97,06, sedangkan tahun 2020 sebesar 96,4. Rasio tersebut stagnan sampai dengan pada tahun 2021 menjadi 96,4. Hal ini menunjukkan setiap 100 perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Pada dasarnya rasio jenis kelamin tahun 2017-2021 menunjukkan ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan.



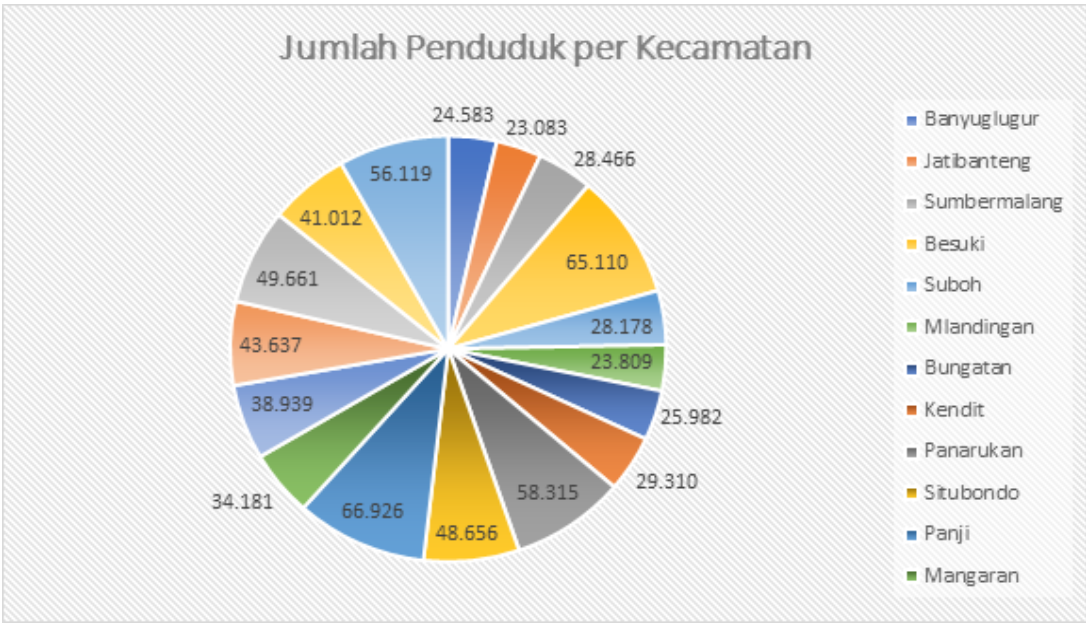
2.1.3.2.5.3. **Kepadatan Penduduk**

Kepadatan Penduduk Kabupaten Situbondo setiap tahunnya mengalami kenaikan. Jumlah kepadatan penduduk di tahun 2016 sebanyak 673.282 orang, di tahun 2017 sebanyak 676.703 orang dan di tahun 2018 sebanyak 679.993 orang. Kepadatan penduduk perempuan dari tahun 2016-2020 menunjukkan angka yang lebih banyak dari laki-laki. Kepadatan penduduk perempuan tahun 2016 sebanyak 345.003 orang, tahun 2017 sebanyak 346.592 orang, tahun 2018 sebanyak 348.275 orang, 2019 sebanyak 349.780 orang dan tahun 2020 sebanyak 349.210. Kepadatan penduduk laki-laki tahun 2016 sebanyak 328.279 orang, tahun 2017 sebanyak 330.111 orang, tahun 2018 sebanyak 331.718, tahun 2019 sebanyak 333.198 orang, dan tahun 2020 sebanyak 336.757.



Gambar 2.99: Kepadatan Penduduk tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2020



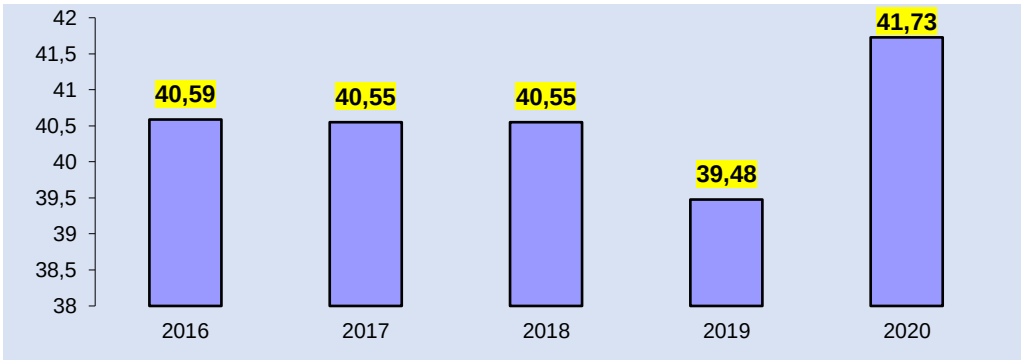
Gambar 2.100 : Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo Tahun 2021



Kepadatan Penduduk pada Kecamatan di Kabupaten Situbondo tahun 2020 menggambarkan jumlah kepadatan penduduk terbesar pada kecamatan Panji sebesar 66.926 orang. Kepadatan penduduk terkecil ada pada Kecamatan Jatibanteng sebesar 23.083. Kepadatan penduduk pada kecamatan di Kabupaten Situbondo memiliki jumlah yang bervariasi salah satu faktor yang bisa menyebabkan karena faktor luas wilayah.

2.1.3.2.5.4. Ratio Ketergantungan



Gambar 2.101: Angka Beban Ketergantungan tahun 2016-2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2020

Beban ketergantungan Kabupaten Situbondo dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan dan kenaikan. Angka ketergantungan di tahun 2016 sebesar 40.59 tahun 2017 turun menjadi sebesar 40,55 dan di tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi sebesar 40.55. Beban ketergantungan di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 39.48 namun meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 41,73. Hal ini menunjukkan kemandirian Kabupaten Situbondo sudah mengalami kenaikan, diperlukan upaya yang baik untuk menyukseskan program kemandirian.

2.1.3.2.5.5. Indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.37: Capaian Indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Data Kependudukan yang valid dan update (data yang akurat)	%	n/a	n/a	96.45%	9.59%	94.73%
2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%	133387	136925 32.326	150379 38.859	155643 42.471	164139 39.744
3	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	%	n/a	31.641	33.673	45.002	52.475
4	Persentase Bayi lahir procot pulang bawa akta Jumlah rumah tangga seluruhnya	%		3 230.068 249701	2 234.343 258182	2 234.447 255659	53 239.078

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator Persentase Data Kependudukan yang valid dan update (data yang akurat) pada tahun 2018



memiliki ketercapaian sebesar 96.45%, pada tahun 2019 sebesar 95,59%, dan pada tahun 2020 diproyeksikan menurun menjadi 94.73%. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran memiliki capaian yang terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 mencapai angka 164.139 dan indikator Jumlah rumah tangga seluruhnya memiliki angka yang fluktuatif setiap tahunnya, yakni pada tahun 2017 sebesar 249.701, tahun 2018 sebesar 258.182, dan tahun 2019 sebesar 255.659.

2.1.3.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Desa merupakan wilayah pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Secara sosiologis desa berperan strategis sebagai unit sosial dan budaya yang menjadi wadah berlangsungnya sosialisasi, internalisasi dan institusional nilai-nilai sosial dan budaya yang akan membangun mentalitas penduduk desa pada khususnya. Hal tersebut yang membuat desa memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang pembangunan. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial asyarakata, penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat serta peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi sosial dan politik. Berikut merupakan gambaran kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020:

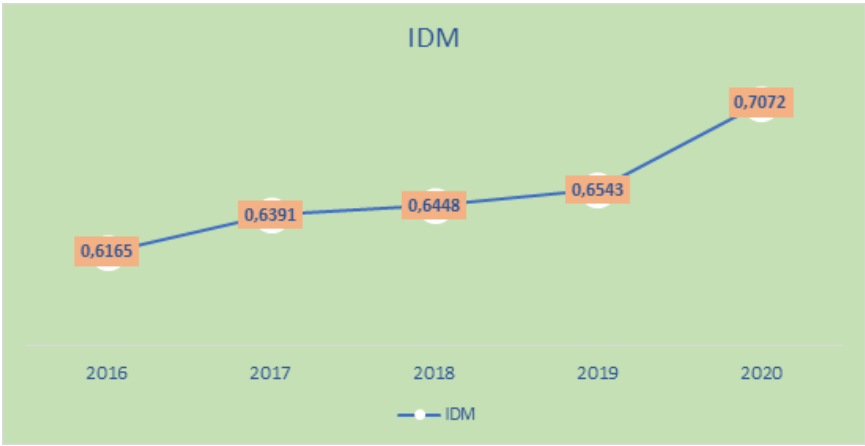
Tabel 2.38: Capaian Indikator Sasaran Daerah Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa Maju	15 Desa	15 Desa	29 Desa	39 Desa	39 Desa

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo, 2020

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir (2016-2020) Jumlah Desa Maju di Kabupaten Situbondo terus mengalami peningkatan dari basic tahun 15 desa pada tahun 2019 menjadi 29 desa dan pada tahun 2021 menjadi 39 desa.

Menyadari Desa secara esensial merupakan Pemerintahan Otonomi Tingkat 4, tingkatan paling dasar (Pondasi) dari 4 lapis Struktur NKRI (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa), sekaligus masyarakat Desa adalah Entitas Komunitas Bangsa Nusantara yang terkecil (Inti). Maka harus dapat dipastikan penyusunan IDM berdasarkan substansi berbagai regulasi dalam kerangka pelaksanaan kebijakan konsep pembangunan nasional yang paripurna dalam semua aspek yang telah ditetapkan secara nasional. Selain hal tersebut, juga harus dapat dipastikan IDM telah sejalan dengan strategi pencapaian sasaran strategis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang secara berkelanjutan. IDM di Kabupaten Situbondo dapat dilihat melalui grafik sebagai berikut:



Gambar 2.102: Indeks Desa Membangun Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2021

Tahun 2016 hingga tahun 2020, IDM Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan angka IDM yang signifikan. Tahun 2016 angka IDM Kabupaten Situbondo yakni 0,6165, tahun 2017 sebesar 0,6391, tahun 2018 sebesar 0,6448, tahun 2019 sebesar 0,6543 dan tahun 2020 sebesar 0,7072.

Tabel 2.39: Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017-2021

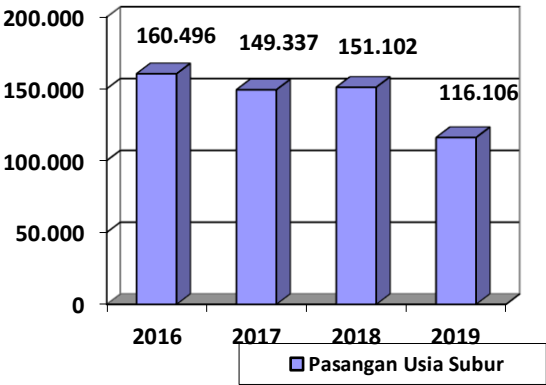
No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks desa membangun	skala	0,6391	0,6448	0,6543	0.7072	n/a
	• Indeks ketahanan ekonomi		0,58	0,61	0,62	0.66	n/a
	• Indeks ketahanan sosial		0,7	0,75	0,77	0.79	n/a
	• Indeks ketahanan lingkungan		0.64	0.65	0.68	0.69	n/a
2	Jumlah desa tertinggal		16	21	10	0	0
3	Jumlah desa mandiri		0	0	0	0	6
4	Jumlah desa berkembang menjadi maju		3	0	14	10	7

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo, 2021

2.1.3.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.1.3.2.7.1. Pasangan Usia Subur

Dalam rangka mengatur kelahiran/kehamilan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, telah dilaksanakan pemasangan alat kontrasepsi KB kepada pasangan usia subur (PUS), baik itu kepada suami maupun kepada istri (salah satu dalam keluarga) secara umum pasangan usia subur (PUS) telah ikut berpartisipasi aktif dalam mensukseskan Program KB artinya telah menjadi Akseptor KB Aktif tanpa adanya paksaan dari pihak lain.



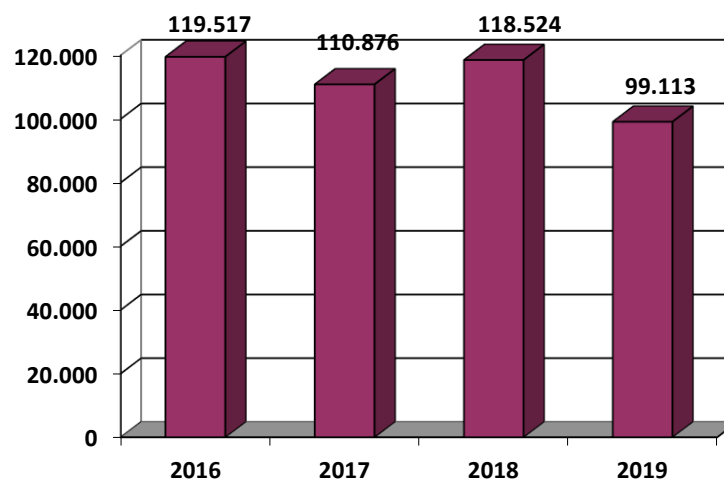
Gambar 2.103: Jumlah Pasangan Usia Subur tahun 2016-2019

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2020

Jumlah pasangan usia subur Kabupaten Situbondo dari tahun 2016-2019 fluktuatif. Pasangan usia subur tahun 2016 sebanyak 160.496 orang. Jumlah pasangan usia subur tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebanyak 149.337 orang. Pasangan usia subur di tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 151.102 orang, dan tahun 2019 turun menjadi 116.106. Tahun 2016-2019 menunjukkan jumlah usia subur terbanyak di tahun 2016. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk di tahun 2019, dengan ditandainya jumlah pasangan usia subur yang turun sebesar 23% dari tahun 2018.

2.1.3.2.7.2. Jumlah Peserta KB Aktif

Keluarga Berencana merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.



Gambar 2.104: Jumlah Peserta KB aktif tahun 2016-2019

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2020

Jumlah Peserta KB aktif Kabupaten Situbondo dari tahun 2016-2019 mengalami kenaikan. Jumlah peserta KB tahun 2016 sebanyak 119.517 orang, tahun 2017 sebanyak 110.876 orang, tahun 2018 sebanyak 118.524 orang, dan tahun 2019 sebanyak 99.113 orang. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk menyukseskan program pemerintah tinggi, yang akan berdampak pada berkurangnya kepadatan penduduk, meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Selain indikator diatas, ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai pengukuran keberhasilan sebagai berikut:



Tabel 2. 40: Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur		160,495	149,337	151,102	116,106	n/a
2	Jumlah peserta KB aktif		119,517	110,876	118,524	99,113	n/a
3	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.		20	20	20	18	18

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tahun 2021

2.1.3.2.8. Perhubungan

Pemenuhan kebutuhan pelayanan transportasi merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kebutuhan pelayanan transportasi dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan transportasi ini, maka tidak sedikit timbul persoalan di dalam penyelenggaraannya. Meningkatnya kebutuhan transportasi sebagai akibat meningkatnya intensitas pergerakan manusia sebagai man power dan barang sebagai bahan produksi memerlukan kelancaran mobilitas. Kelancaran mobilitas penumpang maupun barang sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana transportasi antara lain infrastruktur jalan yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan berlalu lintas.

Pemerintah pusat bertanggung jawab secara nasional atas keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, walaupun pelaksanaan operasionalnya diserahkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, merumuskan peran pemerintah pusat di era desentralisasi ini lebih banyak bersifat menetapkan kebijakan makro, norma, standarisasi, pedoman, kriteria, serta pelaksanaan supervisi, evaluasi, pengawasan dan pemberdayaan ke daerah, sehingga otonomi daerah dapat berjalan secara optimal.

Untuk mengaktualisasikannya khususnya urusan wajib bidang perhubungan di Kabupaten Situbondo, maka perlu meningkatnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar dan terjangkau di wilayah Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perhubungan mencapai 70 atau sudah masuk dalam kategori Baik. Terdapat 3 (tiga) pelayanan yang diukur dalam survey kepuasan masyarakat tersebut yaitu Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), Pelabuhan, dan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

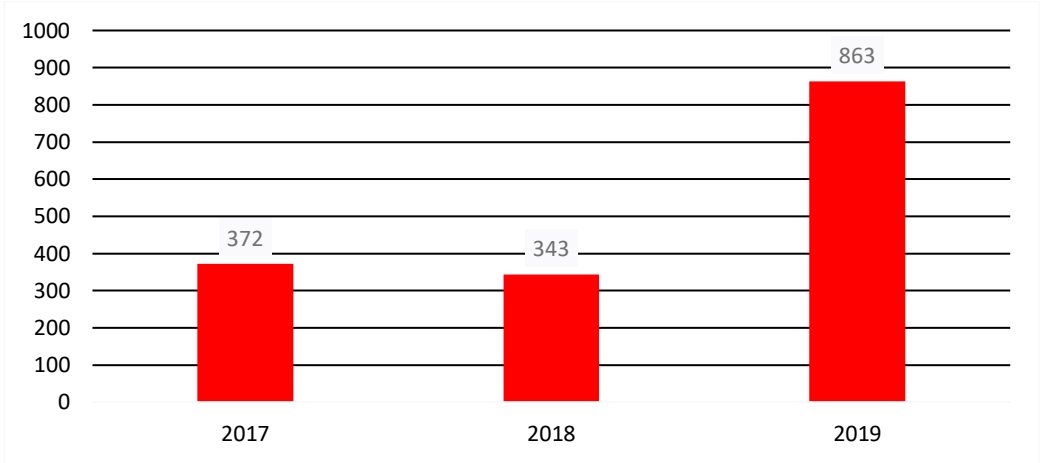
Tabel 2.41: Capaian Kinerja Pemerintah Urusan Perhubungan

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	IKM Perhubungan	76	78	80,3	69,71	68,10
2	Keselamatan Transportasi	2,45%	5,14	18,75	16,72	n/a

Sumber : Dinas perhubungan Kabupaten Situbondo, 2020



Berikut ini adalah data terkait penerangan jalan di Kabupaten Situbondo tahun 2017 hingga tahun 2019:



Gambar 2.105: Penerangan Jalan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2019
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2020

Ketersediaan penerangan jalan di Kabupaten Situbondo berdasarkan data Dinas Perhubungan pada tahun 2017 hingga 2019 cukup fluktuatif. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah terbanyak pada tahun 2019 sebesar 836 titik. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi berjumlah 343 titik dan pada tahun 2017 jumlahnya melebihi dari tahun 2017 sebesar 372 titik. Selain indikator di atas, ada beberapa indikator yang memiliki capaian sebagai berikut:

Tabel 2.42: Capaian Indikator Dinas Perhubungan

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	%	44,43	42,96	40,26	21,34	n/a
2	Persentase panjang jalan terlayani	%	80	81	85	82	n/a
3	Kualitas prasarana dan fasilitas transportasi Darat	%	78	77	75	75	n/a

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, 2021

Persentase Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor mengalami penurunan setiap tahunnya yakni pada tahun 2018 mecapai 42,96% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi menjadi 40,26% serta pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 21,34% dan ditahun terakhir data masih belum dapat diketahui. Persentase panjang jalan terlayani di Kabupaten Situbondo mengalami ketercapaian yang fluktuatif, hal ini dapat dilihat dari ketercapaian pada tahun 2018 yakni 81%, tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 85%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 82% dan pada tahun 2021 data masih belum bisa diketahui. Selain itu, kualitas prasarana dan fasilitas transportasi Darat memiliki angka yang stagnan yaitu 75% pada tahun 2019 dan 2020.



2.1.3.2.9. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan informasi yang cepat saat ini menuntut Pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk menyediakan, menyebarkan dan memanfaatkan informasi dengan sebaik-baiknya. Pemerintah secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk diakses oleh masyarakat dan menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat. Melalui program penyebaran informasi publik yang bermanfaat bagi pengembangan kapasitas masyarakat dan program peningkatan implementasi e-government sampai tingkat daerah, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan program tersebut dan dapat mengembangkan kapasitas Yang ada dalam masyarakat serta terlaksananya dengan baik system e-government pada Kabupaten Situbondo. Berikut beberapa indikator dalam bidang komunikasi dan informatika:

2.1.3.2.9.1. Persentase aplikasi dan jaringan OPD dan Pemdes yang terintegrasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Berikut merupakan grafik mengenai persentase aplikasi dan jaringan OPD Pemdes yang terintegrasi:



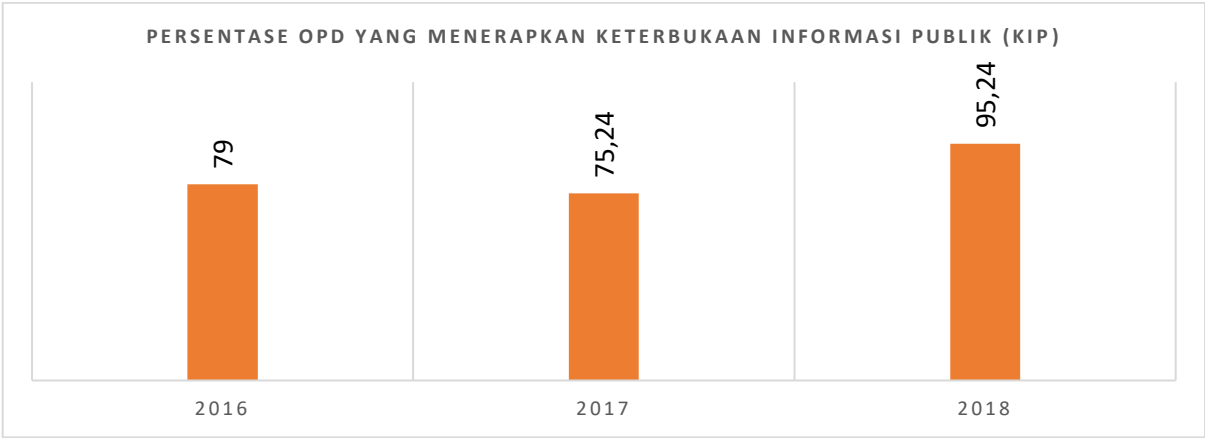
Gambar 2.106: Presentase Aplikasi dan Jaringan OPD dan Pemerintah Desa yang Terintegrasi

Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2018

Berdasarkan Gambar grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 capaian dari aplikasi dan jaringan OPD yang terintegrasi dengan baik mencapai 70%. Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami penurunan 5% menjadi 65%. Sedangkan pada tahun 2018 naik kembali menjadi 92.86% yang hampir 100%. Hal tersebut membuktikan pada persentase aplikasi dan jaringan OPD yang terintegrasi dengan baik bersifat fluktuatif.

2.1.3.2.9.2. Persentase OPD yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Berkenaan dengan keterbukaan informasi, UU KIP telah menyediakan payung hukum bagi masyarakat yang berhak mendapatkan informasi oleh badan publik. Informasi publik yang dimaksud yakni: informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan data mengenai persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi public (KIP):



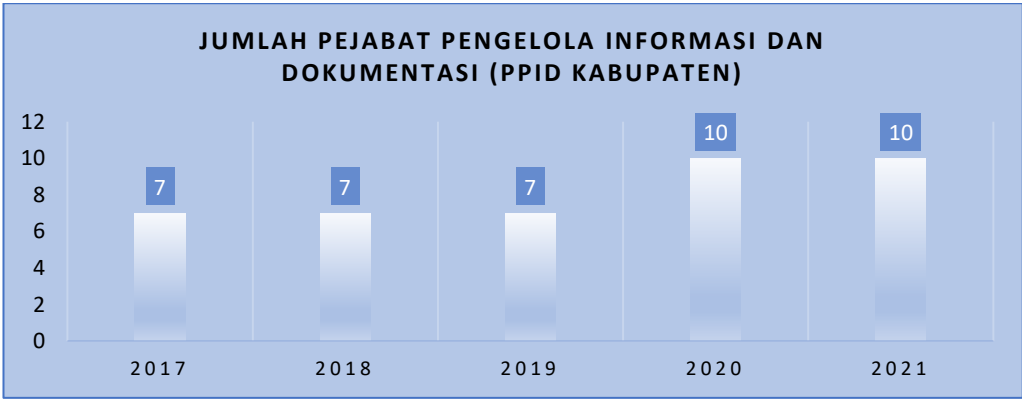
Gambar 2.107: Presentase OPD yang Menerapkan Keterbukaan Publik (KIP)

Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2018

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 data mengenai persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi public berada pada angka 79%. Pada tahun berikutnya yaitu di tahun 2017 mencapai capaian 75.24%. Namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 95.24%. hal tersebut membuktikan bahwa persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik bersifat fluktuatif dan naik-turun.

2.1.3.2.9.3. Jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) (PPID Kabupaten)

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Sedangkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Berikut akan disajikan data mengenai jumlah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kabupaten Situbondo:



Gambar 2.108: Jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Kabupaten)

Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 2021

Melihat pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dari kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2019 stagnan di angka 7 pejabat. Namun pada tahun 2021 mengalami penambahan pegawai sehingga menjadi 10 pejabat. Hal tersebut menandakan bahwa pada kurun waktu 2017 sampai dengan 2020 terjadi peningkatan angka dari jumlah pejabat yang mengelolah informasi dan dokumentasi (PPID) Kabupaten Situbondo.

2.1.3.2.9.4. Jumlah informasi pemerintah daerah yang tersebarluaskan

Informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan juga merupakan realisasi dari negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Untuk memaksimalkan keterbukaan informasi dan mewujudkan amanat dari Pasal 28f UUD 1945 mengenai hak atas informasi, pemerintah membentuk Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jaminan hak atas informasi merupakan sarana dan strategi untuk mendorong pemerintah agar lebih terbuka dan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan ciri transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Maka dari itu sangat diperlukan ketersebarluasan informasi dari Pemerintah Daerah setempat kepada masyarakat secara keseluruhan. Berikut akan disajikan data tentang indikator tersebut:



Gambar 2.109: Jumlah Informasi Pemerintah Daerah yang Tersebarluaskan

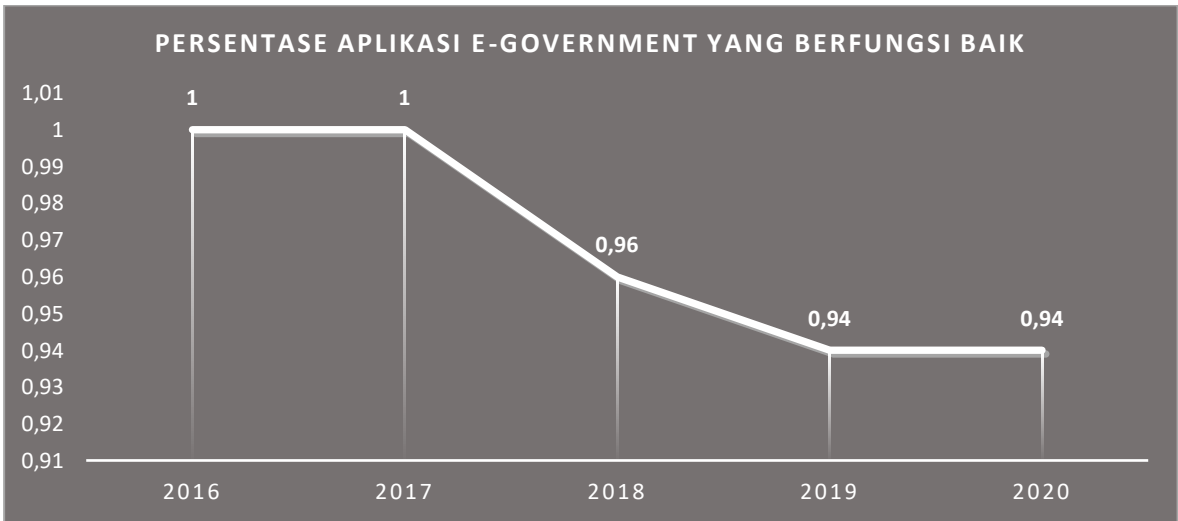
Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 2021



Berdasarkan pada grafik di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah informasi pemerintah daerah yang tersebarluaskan di wilayah Kabupaten Situbondo meningkat dari kurun waktu 2018 sampai dengan 2021. Dapat dilihat dari data tahun 2018 berada pada angka 9 informasi dan pada tahun berikutnya meningkat secara dratis menjadi 48 informasi. Selanjutnya meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 830 informasi.

2.1.3.2.9.5. **Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik**

E-government (e-gov) intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, ada dua hal utama dalam pengertian e-gov di atas; yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, dan yang kedua, tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintahan dapat berjalan lebih efisien. Untuk itulah diperlukan aplikasi guna menunjang fungsi dan keberadaan e-government. Akan ditampilkan grafik mengenai Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik yaitu diantaranya:



Gambar 2.110: Presentase Apliaksi E-Government yang Berfungsi Baik

Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 2021

Berdasarkan gambar yang tersaji dalam grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik menurun dari tahun dasar sampai dengan tahun terakhir. Pada tahun 2016 berada pada angka 1% dan kemudian stagnan pada angka tersebut sampai dengan tahun 2017. Berikutnya pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,96%. Pada tahun 2019 menurun kembali pada angka 0,94%. Angka yang sama ditunjukkan pada tahun 2020 yaitu 0,94%.



Tabel 2.43: Capaian Kinerja Pemerintah Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Inikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase aplikasi dan jaringan PD dan Pemdes yang terintegrasi	%	65	92,86	65	108,7	n/a
2	Persentase PD yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	%	75,24	95,24	75,24	87,5	70
3	Jumlah pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	%	7	7	7	10	10
4	Jumlah informasi pemerintah daerah yang tersebarluaskan	Angka	9	9	48	58	100
5	Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik	%	1	0.96	0.94	0.94	n/a

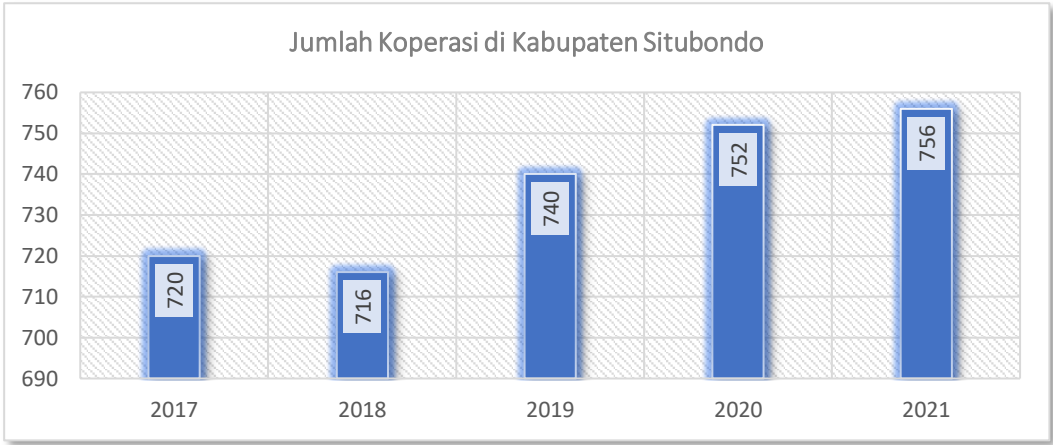
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo, Tahun 2022

2.1.3.2.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam sistem agribisnis diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuat kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Dalam mendukung ekonomi kerakyatan salah satunya adalah pengembangan koperasi dimana koperasi merupakan salah satu sebagai penunjang ekonomi masyarakat karena merupakan unit usaha yang bersifat kebersamaan dan berdasarkan azas kekeluargaan sehingga antar anggota koperasi saling mendukung dalam bersama-sama meningkatkan kesejahteraan mereka.

2.1.3.2.10.1. Jumlah Koperasi di Kabupaten Situbondo

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama baik di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Secara hukum, koperasi diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2012. Pada pasal 1, koperasi didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Berikut merupakan grafik mengenai jumlah koperasi di Kabupaten Situbondo:



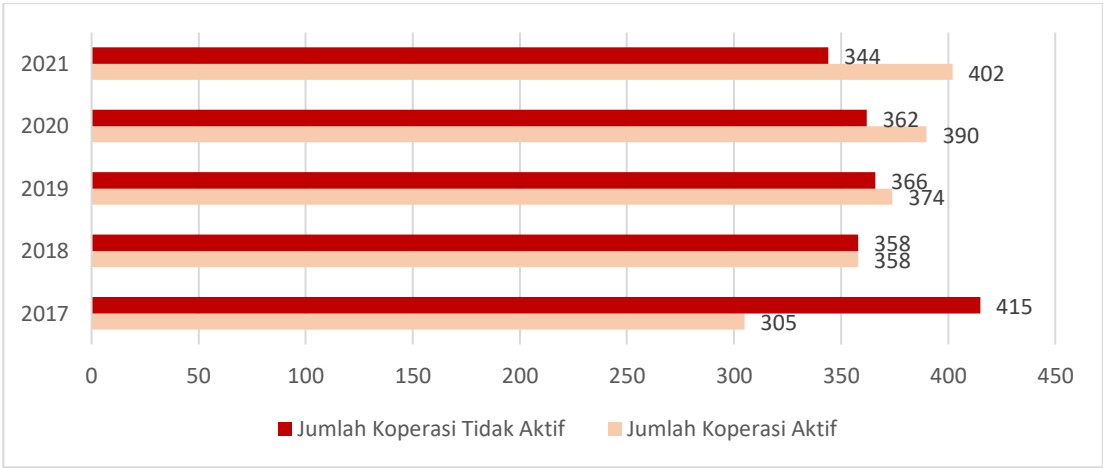
Gambar 2.111: Jumlah Koperasi di Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo Tahun 2021

Merujuk pada data yang tersajikan dalam grafik di atas yaitu menunjukkan bahwa jumlah koperasi di Kabupaten Situbondo rata-rata meningkat. Dari tahun 2017 menunjukkan angka 720 koperasi, selanjutnya pada tahun 2018 berkurang empat koperasi yang berdiri menjadi 716 koperasi. Kemudian pada tahun 2019 jumlah tersebut memiliki capaian yang meningkat menjadi 740 koperasi. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan signifikan yaitu 752 koperasi dan 756 koperasi. Hal tersebut membuktikan bahwa minat masyarakat meningkat dengan mempercayakan pemenuhan kebutuhannya ke koperasi, secara tidak langsung juga menandakan adanya peningkatan taraf ekonomi masyarakat Kabupaten Situbondo.

2.1.3.2.10.2. Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Situbondo

Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha. Dalam hal ini koperasi yang sistem kepengurusannya tidak berjalan dengan baik. Berikut grafik mengenai jumlah koperasi yang tidak aktif dari kurun waktu 2016-2020 di Kabupaten Situbondo:



Gambar 2.112: Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Situbondo



Berdasarkan dengan data grafik diatas jumlah koperasi tidak aktif di wilayah Kabupaten Situbondo bersifat fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2017 jumlah koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Situbondo berada pada angka 415 koperasi. Selanjutnya menurun secara drastis pada tahun 2018 menjadi 358 koperasi. Dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 366 koperasi namun kemudian menurun Kembali di tahun 2020 dan 2021 dengan jumlah masing masing 362 dan 344.

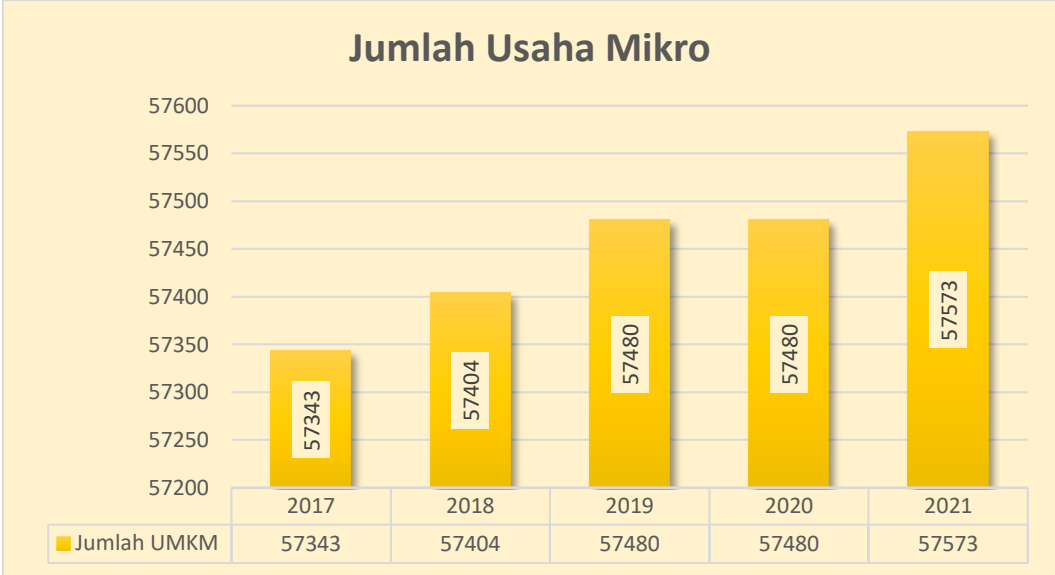
Dalam mendukung ekonomi kerakyatan salah satunya adalah pengembangan koperasi dimana koperasi merupakan salah satu sebagai penunjang ekonomi masyarakat karena merupakan unit usaha yang bersifat kebersamaan dan berdasarkan azas kekeluargaan sehingga antar anggota koperasi saling mendukung dalam bersama-sama meningkatkan kesejahteraan mereka. Adapun jumlah koperasi di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

2.1.3.2.10.3. Jumlah UMKM di Kabupaten Situbondo

Dapat diketahui bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Situbondo bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah UMKM dengan peringkat 26 terbanyak dimana secara persentase Kabupaten Situbondo memiliki jumlah UMKM sebanyak 2,22% dari total jumlah UMKM di Jawa Timur sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Situbondo masih rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur.

Adapun existing koperasi Provinsi Jawa Timur berdasarkan Kabupaten dan Kota berdasarkan data Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia tahun 2019 adalah Koperasi aktif (NIK) di Kabupaten Situbondo sebanyak 375 koperasi, Koperasi aktif (sertifikat NIK) sebanyak 286 koperasi atau 76,27% lebih baik jika dibandingkan dengan koperasi aktif (NIK) di 38 Kabupaten/Kota di Timur sebesar 21.757 koperasi, koperasi aktif (sertifikat NIK) sebesar 12.089 koperasi atau 55,56%.

Adapun bila dilihat jumlah usaha mikro di Kabupaten Situbondo pada tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.113: Jumlah Usaha Mikro Kabupaten Situbondo pada Tahun 2017-2021
Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo, 2021

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa pada jumlah usaha mikro di Kabupaten situbondo dari tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan dimana pada tahun 2018 mengalami kemajuan sebanyak 61 Usaha mikro dari tahun 2017 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 76 usaha mikro dari tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan sehingga angka stagna di 57480 keperasi.

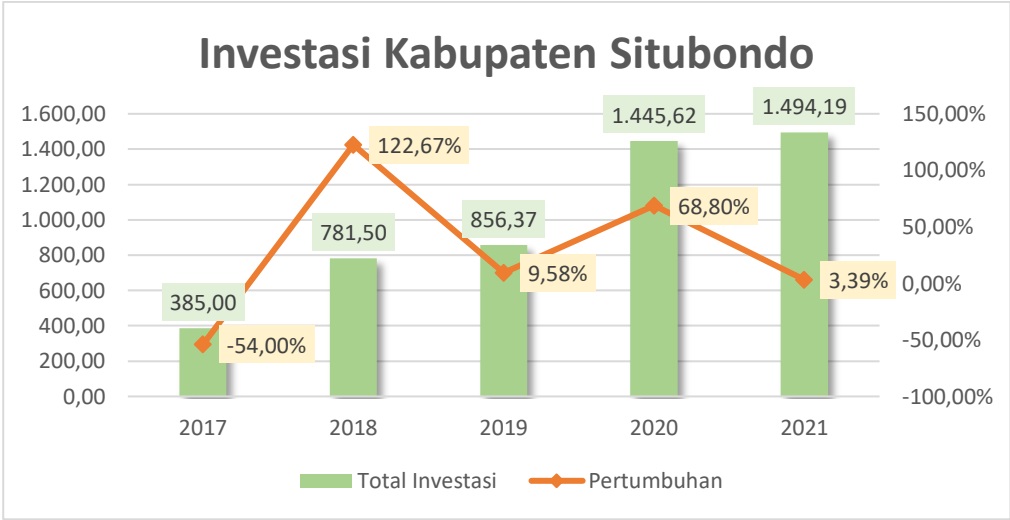
2.1.3.2.11. Penanaman Modal

Salah satu tolok ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi atau penanaman modal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan, sebab dengan investasi kita dapat mengubah sumber daya manusia menjadi kekuatan ekonomi nyata. Melalui kegiatan investasi akan dihasilkan barang dan jasa untuk memperluas kesempatan berusaha, melaksanakan alih teknologi dan sebagainya. Hal ini diselaraskan dengan kenyataan bahwa investasi dapat menghasilkan barang dan jasa yang pada akhirnya akan menghasilkan dan meningkatkan pendapatan. Penanaman Modal merupakan salah satu sasaran pemerintah dalam rangka mencapai target yang ditentukan yaitu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sedangkan permasalahan penanaman modal telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memberikan arah pengembangan kebijakan Penanaman Modal di Indonesia.



2.1.3.2.11.1. Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Situbondo

Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Ada banyak hal yang terlibat dalam aktivitas ini, dan beberapa di antaranya adalah jumlah dana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Adapun perbandingan nilai investasi dengan pertumbuhan investasi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat dari gambar berikut :



Gambar 2.114: Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Situbondo Tahun 2017- 2021

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo, 2021

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir (2017-2021) total realisasi investasi di Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan dari Rp 385.00 Milyar di tahun 2017 menjadi Rp. 781.50 Milyar pada tahun 2018. Pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan kembali secara signifikan yaitu di tahun 2019 sebesar Rp. 856.37 Milyar, tahun 2020 sebesar 1,445.62 Milyar dan pada tahun 2021 senilai Rp. 1,494.19 Milyar. Sedangkan tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 122,68% dan tingkat pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2017 yang mencapai -53,86%.

Tabel 2.44: Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

No	Indikator Sasaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Perkembangan Total Investasi Kabupaten Situbondo	Milyar	385.00	781.50	856.37	1.445.62	1494,19
2	Persentase Kesesuaian Pelayanan Investasi dan Perizinan dengan SOP yang telah Ditetapkan	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo, 2021

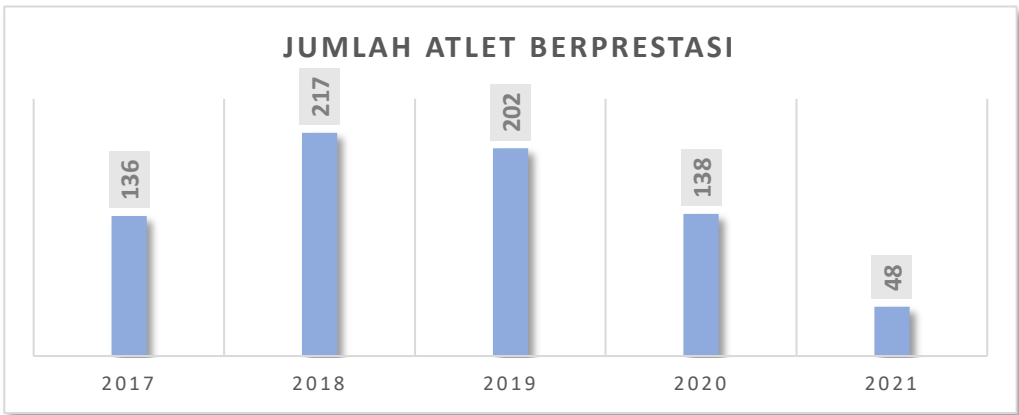


2.1.3.2.12. **Kepemudaan dan Olahraga**

Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Para Pemuda sangat menentukan laju sebuah perubahan dalam dunia yang dinamis. Berikut merupakan indikator yang mengukur tingkat capaian urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Situbondo dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

2.1.3.2.12.1. **Jumlah Atlet Berprestasi**

Atlet merupakan profesi yang menekuni dan berkompetisi pada satu atau lebih bidang olahraga, yang menggunakan kekuatan, ketangguhan, atau kecepatan fisik di dalamnya. Dalam beberapa cabang olahraga tertentu, atlet harus mempunyai kemampuan fisik yang lebih tinggi dari rata-rata orang biasa. Berikut merupakan grafik mengenai jumlah atlet berprestasi yang ada di Kabupaten Situbondo yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.115: Jumlah Atlet Berprestasi

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo Tahun 2021

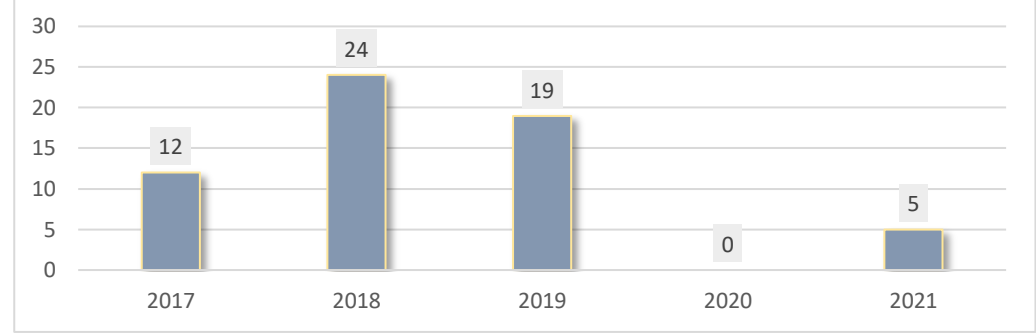
Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah atlet berprestasi pada tahun 2017 mencapai angka 136 atlet. Kemudian meningkat pada tahun 2018 sehingga menjadi 217 atlet. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan angka yaitu 202 atlet di tahun 2019, 138 atlet di tahun 2020, dan hanya tersisa 48 atlet di tahun 2020. Sehingga melihat pada data di atas jumlah atlet yang berprestasi di Kabupaten Situbondo cenderung menurun, hal ini dikarenakan ada kepengurusan yang tidak beres, serta pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan event perlombaan nasional dibatalkan bahkan tidak diselenggarakan.

2.1.3.2.12.2. **Jumlah Event Olahraga**

Event olahraga merupakan ajang atau perlombaan dalam bidang olahraga yang biasanya dibagi mulai dari tingkat kecamatan sampai



dengan nasional. Event yang diadakan dalam beberapa jenis olahraga dan dilaksanakan dalam momen-momen tertentu. Berikut merupakan grafik yang menyajikan data mengenai jumlah event olahraga di Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu 2016-2020:



Gambar 2.116: Jumlah Event Olahraga

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, Tahun 2021

Berdasarkan pada grafik diatas jumlah event olahraga di Kabupaten Situbondo bersifat fluktuatif. Pada tahun 2017 terdapat 12 event dan mengalami peningkatan dua kali lipat di tahun 2018 menjadi 24 even pada tahun 2019 menurun kembali menjadi 19 even, sedangkan pada tahun 2020 tidak terdapat event olahraga yang diselenggarakan di Kabupaten Situbondo, dimana hal ini dikarenakan terjadi pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2021 mulai adanya perkembangan iklim perubahan disegala aspek sehingga mulai adanya even olahraga kembali menjadi 5 even.

Tabel 2.45: Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

No	Indikator Sasaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase pemuda yang berprestasi minimal nasional	%	20,00	n/a	89,00	n/a	58
2	Presentase Prestasi olahraga tingkat nasional	%	n/a	n/a	87,00	n/a	131
3	Persentase Pemuda Terlatih Yang Menjadi Wirausaha Mandiri	%	n/a	n/a	n/a	10	50
4	Jumlah Atlit Berprestasi	Angka	136	217	202	138	11
5	Jumlah Even Olahraga	Angka	7	12	24	24	5

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase pemuda berprestasi di Kabupaten Situbondo menurun dari 89% di tahun 2029 mencapai 0% di tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga event kejuaraan/perlombaan yang diselenggarakan tingkat nasional dibatalkan bahkan tidak diselenggarakan.

2.1.3.2.13. Statistik

Tujuan pembangunan bidang statistik untuk merumuskan kebijakan di bidang statistik guna pengamanan informasi.



Tabel 2.46: Capaian Indikator Kinerja PD Urusan Statistik Kabupaten Situbondo

N	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun	%	100	100	100	100	
2	Persentase Penyusunan Data & Informasi Statistik	%	n/a	n/a	61	100	
3	Jumlah Petugas Pengelola Pusda	Orang	n/a	n/a	n/a	4	n/a
4	Jumlah materi dalam rangka kegiatan Koordinasi Aplikasi Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)	Materi	n/a	n/a	n/a	65	n/a
5	Persentase Data Statistik Daerah yang dipublikasikan	%	100	100	100	90	81

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penyusunan data dan informasi statistik meningkat dari 61% di tahun 2019 menjadi 100% di tahun 2020. Untuk mewujudkan Publikasi Data Statistik yang optimal diukur melalui persentase Data Statistik Daerah yang dipublikasikan dengan target 80% dan terealisasi 90% di tahun 2020. Untuk mewujudkan Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang akurat dan tepat diukur dengan persentase data informasi dan statistik capaiannya sebesar 98,39%. Pencapaian realisasi kinerja sebesar 62% didapatkan dari 5 data informasi dan statistic (SIPD, Data Dinamis, IKM, IPM, PDRB) sesuai target tahun 2019, dibandingkan seluruh data sebanyak 8 data informasi dan statistik (SIPD, pusda, data dinamis, IKM, IPM, PDRB, Situbondo Dalam Angka dan data statistik lainnya) yang diharapkan.

2.1.3.2.14. Persandian

Urusan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melaksanakan program pembangunan yaitu : Program Peningkatan Kapasitas Persandian dan Pengamanan Informasi dengan nilai capaian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.47: Realisasi Indikator Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Situbondo

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Dokumen Sandi dan Keamanan Informasi yang dikelola	%	n/a	n/a	90	100	n/a
2	Persentase data dan informasi daerah yang diamankan	%	n/a	n/a	n/a	90	119

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase Dokumen Sandi dan Keamanan Informasi yang dikelola sebesar 90% di tahun 2019 dan mengalami peningkatan menjadi 100% di tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa tercapainya perumusan kebijakan, peraturan teknis, koordinasi, pengawasan dan pengendalian di bidang persandian serta pelaksanaan survei, koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang statistik Kabupaten Situbondo. Sedangkan pada indicator persentase data dan informasi daerah yang diamankan memiliki tren capaian yang meningkat dari tahun 2019 sebesar 90% dan meningkat menjadi 100% di tahun 2021.



2.1.3.2.15. **Kebudayaan**

Urusan Kebudayaan yang diampu oleh Dinas Pariwisata melaksanakan 1 program pembangunan yaitu Program Pengembangan Nilai Budaya, dimana dalam program tersebut ada 4 kegiatan yang di laksanakan. Berikut capaian Kinerja Urusan Kebudayaan pada Dinas Pariwisata:

Tabel 2.48: Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase seni dan budaya lokal diakui Tingkat Provinsi dan Nasional.	%	n/a	n/a	18,00%	38%	n/a
2	Jumlah seni dan budaya lokal yang dilestarikan	Angka	n/a	n/a	76,00%	78%	118,75%

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase seni dan budaya lokal yang diakui tingkat provinsi dan nasional pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dari 17% menjadi 38%. Sedangkan jumlah seni dan budaya lokal yang dilestarikan pada tahun 2019 hingga 2020 mengalami kenaikan yaitu dari angka 75 menjadi 78. Sedangkan pada tahun terakhir yakni tahun 2021 terus mengalami peningkatan hingga menginjak angka 118,75%.

2.1.3.2.16. **Perpustakaan**

Perpustakaan merupakan sarana belajar yang terdapat berbagai macam koleksi buku dan majalah. Saat ini perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku dan majalah saja akan tetapi juga sebagai tempat penyimpanan map, hasil seni, CD, dan lain sebagainya. Perpustakaan saat ini merupakan tempat yang disediakan pada setiap instansi pembelajaran hal ini didukung agar sistem pembelajaran lebih mudah terkait fokus-fokus pembelajaran. Adanya perpustakaan pada setiap daerah dianggap penting karena dapat menunjang berbagai aspek untuk sarana pembelajaran. Adapun capaian program, indikator kinerja untuk pembangunan daerah Urusan Perpustakaan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.49: Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	IKM Perpustakaan	%	84,44	80,42	78,38	79,30	81,42
2	Kunjungan Perpustakaan/ Jumlah Pemustaka Aktif	orang	28.948	34.087	37.398	14.294	14.294
3	Koleksi buku	judul	13.078	13.189	13.189	13.62	n/a

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator IKM Perpustakaan memiliki capaian fluktuatif, dapat dilihat dari data tahun 2017 sebesar 84,44% terus mengalami menurun hingga tahun 2021 menjadi 79,30% namun pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 81,42%. Begitu pula juga terjadi pada Indikator yang kedua yakni kunjungan perpustakaan/ jumlah



pemustaka aktif pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan hingga mencapai angka 37.398 pemustaka namun pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan lumayan signifikan menjadi 14.294 pemustaka. Hal tersebut sehubungan dengan adanya pandemic covid-19 yang menyebabkan adanya pembatasan jumlah pengunjung perpustakaan sehingga juga adanya pengurangan jumlah pemustaka. Terakhir, pada indicator jumlah koleksi buku .

2.1.3.2.17. Kearsipan

Arsip merupakan salah satu unsur penting dalam perencanaan sebagai bentuk pengorganisasian informasi guna mencapai tujuan dalam proses pembangunan. Hal tersebut dikarenakan arsip merupakan naskah yang dibuat sebagai bukti autentik atas kinerja suatu organisasi, berbagai jenis kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan hasil evaluasi atas kinerja sebuah organisasi terekam dalam sebuah arsip. Arsip juga dapat diartikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun capaian program, indikator kinerja untuk pembangunan daerah Urusan Kearsipan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.50: Realisasi Capaian Urusan Kearsipan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku/Persentase PD yang pengelolaan Arsipnya sudah baik	%	64,59	72	81,13	81	90
2	Jumlah pengelola kearsipan yang mendapatkan pembinaan	orang	68	197	137	25	n/a

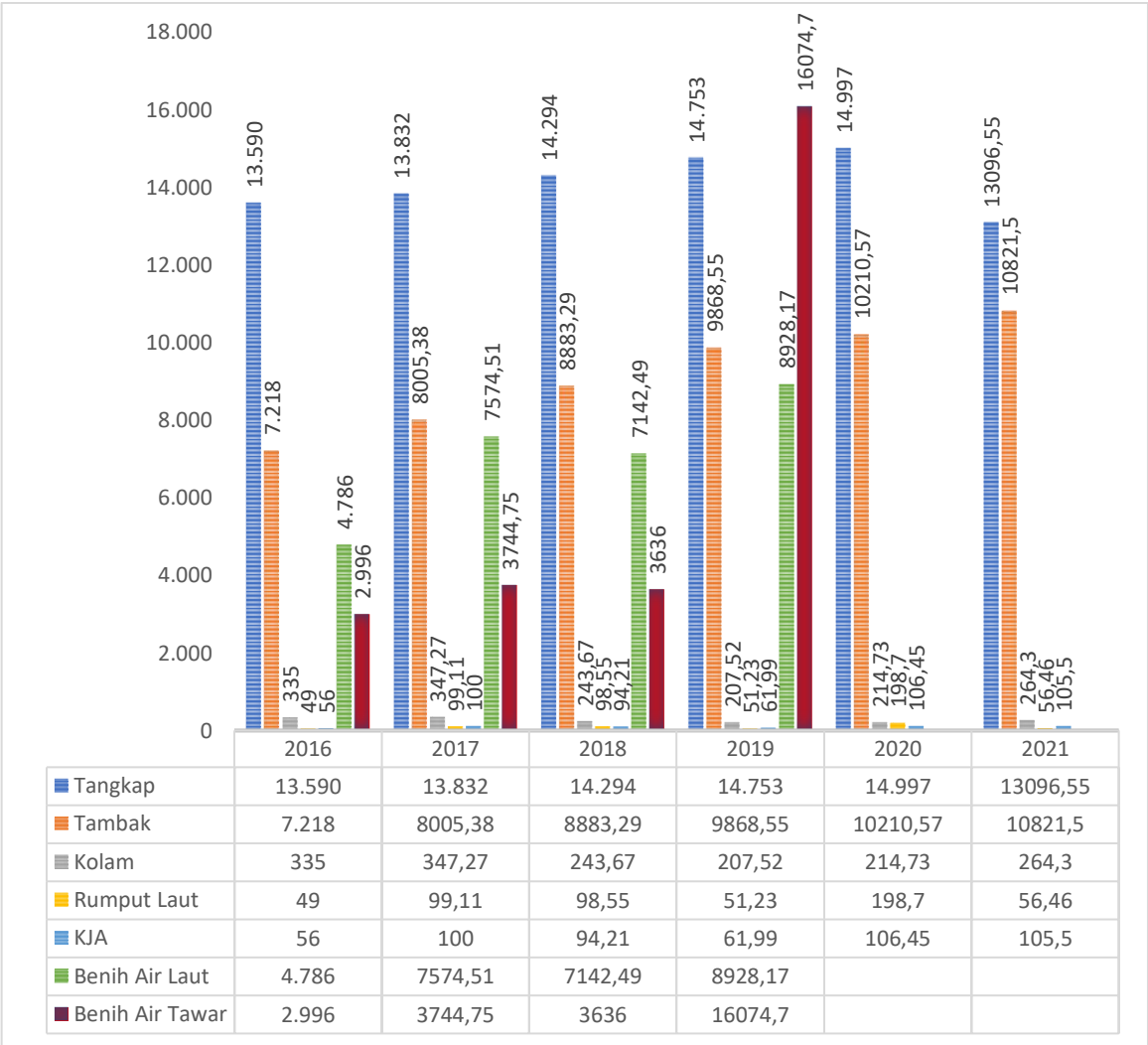
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020

Meningkatnya pengelolaan arsip Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja PD yang pengelolaan arsipnya sudah baik berdasarkan hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi sampai dengan tahun 2020, realisasi sebesar 81 %, (PD yang telah dimonev sebanyak 43 PD dari keseluruhan PD sebanyak 53 PD). Akan tetapi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tentang pengklasifikasian suratnya terhadap penyimpanan arsip belum tertata sesuai standart karena minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PD belum memadai, namun demikian perlu adanya pendampingan dan pembinaan tindak lanjut agar pengelolaan arsipnya lebih baik sesuai dengan standart tata kelola kearsipan berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

2.1.3.3. Pelayanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Pada sektor perikanan di Kabupaten Situbondo terdiri atas perikanan tambak, perikanan tangkap, perikanan kolam, budidaya rumput laut, budidaya keramba jaring apung, budidaya benih air laut, dan budidaya air tawar. Berikut adalah hasil produksi dari perikanan di Kabupaten Situbondo:



Gambar 2.117: Grafik Produksi Perikanan 2016-2021 (Ton)

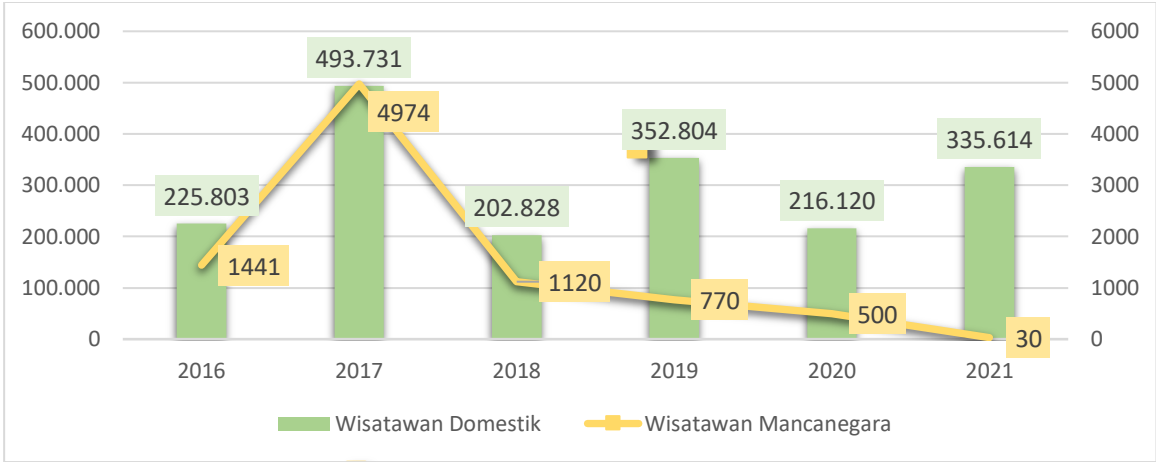
Sumber: Dinas Perikanan Tahun 2021

Gambar grafik tersebut merupakan produksi perikanan di kabupaten Situbondo periode tahun 2017 hingga tahun 2021, dapat kita cermati Bersama bahwa terjadi peningkatan produksi perikanan tangkap tiap tahunnya, sektor produksi perikanan tangkap pada tahun 2018 adalah tahun dengan peningkatan yang cukup signifikan yaitu sejumlah 14.295 Ton dari yang sebelumnya 13.831 ton pada tahun 2017. Peningkatan hasil perikanan tangkap ini dikarenakan semua nelayan mentaati aturan pemakaian alat tangkap serta tidak melakukan penangkapan ikan yang berlebihan pada tahun sebelumnya sehingga ketersediaan sumberdaya ikan di laut tetap terjaga.



2.1.3.3.2. Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Situbondo merupakan salah satu potensi unggulan karena memiliki potensi destinasi wisata yang banyak mulai dari pariwisata pantai, pegunungan, padang savana, wisata religius, dan wisata kesenian dan budaya. Berikut adalah jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Situbondo:



Gambar 2. 118. Grafik Jumlah Wisatawan Domestik & Mancanegara 2016-2021

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo Tahun 2021

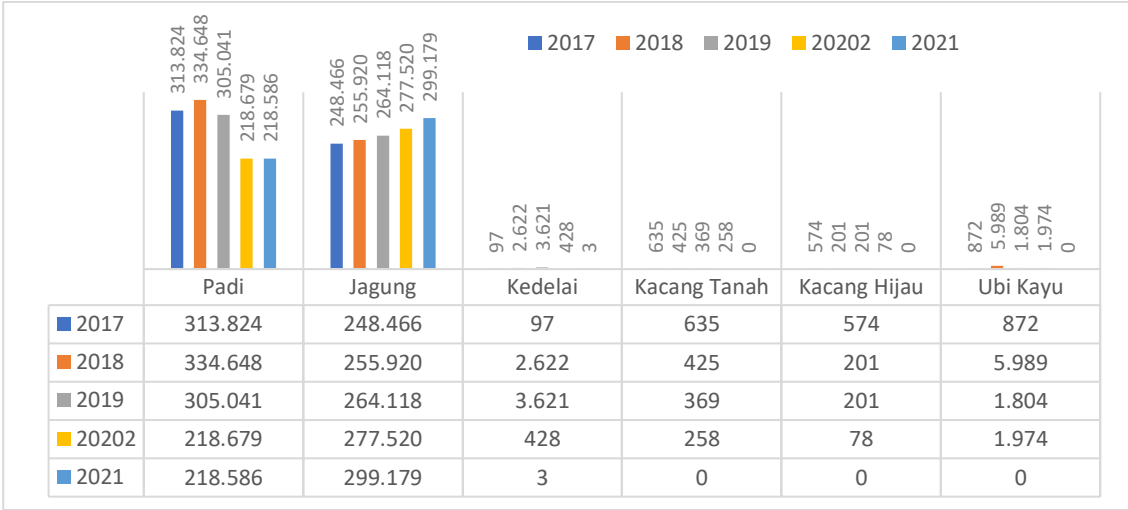
Grafik jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2021 memperlihatkan kecenderungan jumlah data kunjungan sangat fluktuatif. Jumlah wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara menunjukkan pola peningkatan dan penurunan jumlah yang sama pada tahun-tahun tertentu. Tahun dengan kunjungan wisatawan terbanyak yaitu terjadi pada tahun 2017 yaitu sejumlah 493.731 orang wisatawan domestik dan 4.974 orang wisatawan mancanegara. Pada tahun 2016 dan 2018 menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan, pada tahun 2016 tercatat sejumlah 225.803 wisatawan domestik dan 1.441 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Situbondo dan pada tahun 2018 tercatat sejumlah 202.828 wisatawan domestik dan 1.120 wisatawan mancanegara. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah wisatawan mengalami peningkatan kembali yang cukup signifikan terutama wisatawan domestik yaitu sejumlah 352.804, berbanding terbalik dengan wisatawan mancanegara dimana pada tahun 2019 kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan menjadi 770 orang wisatawan. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah wisatawan mengalami penurunan kembali yaitu menjadi 327.561 orang wisatawan domestik dan 245 orang wisatawan mancanegara. Pada tahun 2021 jumlah wisatawan domestik 335,314 wisatawan sedangkan jumlah wisatawan manca negara berjumlah 30 wisatawan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa ada penurunan jumlah wisatawan di tahun 2020 dan tahun 2021, dikarenakan adanya bencana pandemi Covid-19. Kendati demikian berdasarkan data tersebut, pariwisata Kabupaten Situbondo sangat menarik bagi wisatawan domestik sehingga ada peluang pengembangan pariwisata daerah guna menarik minat wisatawan domestik.

2.1.3.3.3. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Situbondo karena meyumbang PDRB terbesar. Adapun dalam pertanian terbagi atas pertanian tanaman pangan, perkebunan, holtikultura, peternakan.

2.1.3.3.3.1. Pertanian Tanaman Pangan

Pertanian tanaman pangan terdiri atas pada, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu. Berikut penjabaran atas produksi pertanian pangan di Kabupaten Situbondo:



Gambar 2.119 : Produksi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2017-2021 (Ton)

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo 2020

Berdasarkan tabel di atas jumlah produksi padi tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 9,51% dari tahun 2016, yaitu pada tahun 2017 jumlah produksi padi hanya sebesar 313.824 Ton. Meskipun demikian di tahun selanjutnya 2018 produksi padi mengalami kenaikan kembali. Pada tahun 2019 produksi padi kembali mengalami penurunan sebesar 8,84% dari tahun 2018 yang mana sebelumnya berjumlah 334.647 turun menjadi 305.041 ton pada tahun 2019 dan terus turun mencapai angka 218.679 di tahun 2020. Kemudian Produksi jagung di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 277.520 ton. Produksi pertanian kacang hijau mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 78 ton dari sebelumnya sejumlah 201 ton pada tahun 2018 & 2019, hal yang sama terjadi dengan produksi pertanian kedelai dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu menjadi 428 dari yang sebelumnya berkisar 3621 ton pada tahun 2019. Dari semua produksi pertanian yang mengalami kenaikan pada tahun 2020 adalah jagung dan ubi kayu yakni sebanyak 277.520 ton dan 1974 ton.

Tabel 2.51: Produksi Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

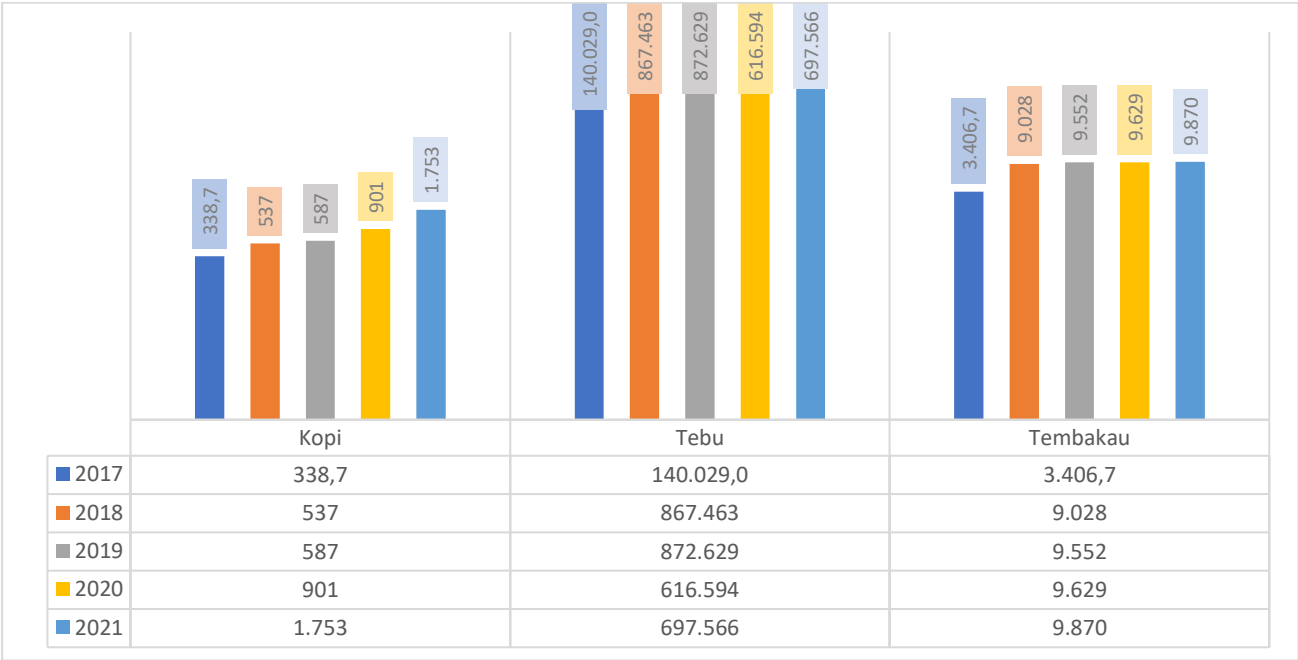
No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi	Ton	313,824	334,648	305,041	218,679	218.586
2	Jagung	Ton	248,466	255,920	264,118	277,520	299.179
3	Kedelai	Ton	97	2,622	3621	428	2,69

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
4	Kacang Tanah	Ton	635	425	369	258	0
5	Kacang Hijau	Ton	574	201	201	78	0
6	Ubi Kayu	Ton	8,720	5,989	1804	1974	0

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo 2020

2.1.3.3.3.2. Perkebunan

Pada pertanian perkebunan di Kabupaten Situbondo adalah kopi, tebu, dan tembakau. Berikut adalah hasil produksi pertanian perkebunan di Kabupaten Situbondo:



Gambar 2.120 : Grafik Produksi Perkebunan 2017-2021 (Ton)

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo 2020

Berdasarkan grafik produksi perekebunan tersebut diketahui produksi tanaman kopi mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2020 yakni mencapai 901 ton lebih tinggi dari tahun 2017 dan 2018, sejumlah 537 ton dan 587 ton. Selanjutnya, penurunan tren terjadi pada tanaman tebu dari yang sebelumnya pada tahun 2019 sejumlah 872.629 ton namun menurun hinga sejumlah 616.594 ton pada tahun 2020. Berbeda dengan produksi tebu, produksi tembakau mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang mencapai 9.552 ton meningkat menjadi 9620 ton pada tahun 2020. Agar produksi komoditas perkebunan terus meningkat, maka pemerintah akan membangun UPH kopi di sentra penghasil kopi (kayumas dan sumber malang) dan gudang tembakau untuk rakyat di sentra penghasil tembakau (kecamatan Sumber Malang, Jatibanteng dan Besuki)

2.1.3.3.3.3. Pertanian Holtikultura

Pada pertanian holtikultura di Kabupaten Situbondo adalah cabai rawit, cabai besar, bawang merah, tomat, dan mangga. Berikut adalah hasil produksi pertanian holtikultura di Kabupaten Situbondo:



Tabel 2.52: Produksi Pertanian Holtikultura Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cabai Rawit	Ton	9.629	14.767	8.592	14.875	20.714
2	Cabai Besar	Ton	791	481	345	661	549.1
3	Bawang Merah	Ton	3.153	2.425	2.160	3.587	5.411.8
4	Tomat	Ton	402	148	2.761	6.962	435.885
5	Mangga	Ton	8.397	15.851	23.503	27.682	30.942

Jika diperhatikan berdasarkan data pada tabel di atas, pada sub sektor tanaman holtikultura produksi cabai rawit pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni tahun 2016 yang merupakan jumlah produksi cabai rawit terbesar yaitu sejumlah 103.518 Ton. Jumlah produksi di tahun berikutnya bergerak fluktuatif, dimana di tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 14.767, menurun kembali di tahun 2019 menjadi 8.592, dan naik lagi di tahun 2020 menjadi 14.875. dan pada tahun 2021 naik kembali menjadi 20.17 ton. Kemudian cabai besar juga mengalami tren penurunan di tahun 2017 hingga 2019 yang awalnya sebesar 791 ton menjadi 3345 ton di tahun 2019, namun di tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan menjadi 661 ton. Kemudian pada komoditas bawang merah produksi terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 5.411,8 Ton, yang mana pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 memiliki tren capaian meningkat pada umumnya, penurunan hasil produksi hanya terjadi pada tahun 2019 yakni hanya 2.160 ton. Sedangkan hasil produksi tomat paling rendah terjadi di tahun 2018 yakni sebesar 148 ton dan terus berlanjut mengalami kenaikan dari tahun berikutnya yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yakni dengan hasil akhir 30.942 ton. Hasil produksi yang terakhir pada sub ini yaitu produksi manga yang memiliki tren capaian meningkat pada setiap tahun dari kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan hasil produksi pada tahun 2021 yakni 30.942 ton.

2.1.3.3.4. **Peternakan**

Tabel 2.53: Produksi Peternakan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Daging Sapi	ton	1.501	1.903	1.941	1.782	2.117
2	Daging Kambing/Domba	ton	85	404	327	274	111
3	Daging Ayam	ton	5.679	5.899	5.817	5.893	7.011
4	Telur	ton	922	965	948	1.055	1.21
5	Susu	Liter	279.936	402.245	270.545	194.879	162.593

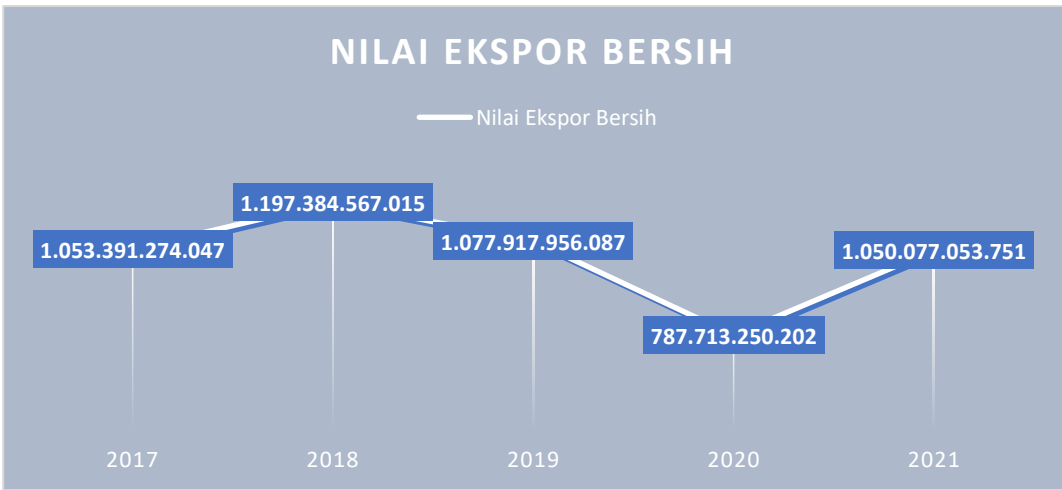
Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo Tahun 2021



Berdasarkan tabel di atas secara garis besar dapat terlihat bahwasannya pada komoditas hasil peternakan rata-rata terjadi peningkatan produksi pada kurun waktu 2018 & 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2017-2018 terutama pada komoditas Daging sapi, Daging Kambing dan Daging Ayam. Salah satu gambaran terjadi peningkatan signifikan pada hasil produksi daging kambing pada tahun 2018 yang meningkat sebesar 381% sebesar 404 Ton dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya berjumlah 85 Ton, namun di tahun selanjutnya terjadi penurunan hingga menjadi 274 ton di tahun 2020. Komoditas telur maupun susu terjadi penurunan dan peningkatan yang beragam di tiap tahunnya. Produksi tertinggi pada komoditas telur hanya terjadi pada tahun 2016 yaitu sejumlah 2.952 Ton yang kemudian pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan hingga pada kurun waktu 2017-2019, namun di tahun 2020 mengalami kenaikan kembali mencapai 1.055 ton. Sedangkan produksi komoditas susu, produksi paling tinggi berada di tahun 2018 yaitu sebesar 402.245, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan signifikan menjadi 270.545 Liter dan menurun lagi di tahun 2020 menjadi 194.879 Liter.

2.1.3.3.4. Perdagangan

Sasaran yang ingin dicapai dalam urusan pilihan perdagangan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Situbondo Yaitu “Meningkatnya Kontribusi Perdagangan terhadap Pembangunan”. Hasil capaian indikator kinerja sasaran pembangunan daerah untuk urusan Pilihan Perdagangan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo. Urusan perdagangan menjadi salah satu urusan prioritas karena urusan perdagangan berkaitan dengan sasaran daerah yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan daerah.



Gambar 2.121 : Nilai Ekspor Bersih Kabupaten Situbondo 2017-2020

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2020

Dari data di atas menunjukkan nilai ekspor perdagangan bersih Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan yang cukup baik dari Rp.



1.053.391.274.047 pada tahun 2017 menjadi Rp. 1.197.384.567.015 pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1.077.917.956.087 dan menurun signifikan menjadi 787.713.250.202 di tahun 2020. Memasuki tahun 2020 merupakan masa Pandemi Covid-19 dimana pada tahun 2017-2020 proses ekspor impor masih berjalan normal seperti biasanya akan tetapi memasuki tahun 2020 sudah mulai banyak negara-negara di belahan dunia yang membatasi aktivitas keluar, termasuk produk-produk yang akan masuk ke negara-negara tersebut dilarang, sehingga banyak proses-proses transaksi yang dilaksanakan pada tahun 2020 banyak yang dibatalkan. Dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali menjadi 1,050,077,053,751.

Era digitalisasi membawa dampak perubahan pola bekerja pada sektor perdagangan dan pengembangan SDM dalam persaingan usaha. Pola perdagangan dan penyediaan layanan berbasis daring menjadikan banyak model usaha. Kondisi ini mengharuskan adanya kebijakan dan pola adaptasi menyeluruh dalam pemanfaatan transformasi digital bagi keberlanjutan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, perbaikan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan.

2.1.3.3.5. Perindustrian

Peningkatan pembangunan perindustrian diarahkan pada peningkatan usaha mikro dan kecil, promosi serta peningkatan kewirausahaan. Pembangunan ekonomi di bidang industri di Kabupaten Situbondo, memiliki peranan yang berarti sebagai penggerak utama dan ujung tombak pembangunan ekonomi dan mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan sektor industri sangat tergantung pada sumberdaya yang tersedia, karakteristik wilayah dan mampu dioptimalkan penggunaannya serta mampu memberikan nilai tambah, utamanya bahan baku, penyerapan tenaga kerja dan memperluas kesempatan berusaha, menambah devisa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil capaian indikator kinerja sasaran pembangunan daerah untuk urusan Pilihan Perindustrian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.54: Capaian Urusan Perindustrian Kabupaten Situbondo
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan Industri Pengolahan	%	2.96	2.98	3.07	3,00	3,14
2	Peningkatan Produksi Industri Pengolahan	%	24.31	24.5	26.3	24,75	25,20

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo Tahun 2021



Data menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan industri pengolahan dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami kenaikan dan mencapai 3,07% di tahun 2019, namun di tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 3,00%. Serta capaian indikator pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali menjadi 3,14%. Sedangkan persentase peningkatan produksi industri pengolahan juga mengalami tren yang sama, dimana di tahun 2017 tercatat sebesar 24,31% dan meningkat menjadi 26,30% di tahun 2019, namun menurun menjadi 24,75% di tahun 2020. Dan pada tahun terakhir yakni ditahun 2021 terus mengalami kenaikan kembali menjadi 25,21%. Semakin meluasnya wabah pandemi Covid-19 yang berujung pada pembatasan pergerakan aktivitas masyarakat serta banyaknya biro jasa pengiriman barang yang tidak beroperasi hal ini yang menyebabkan permintaan barang oleh masyarakat semakin menurun yang mengakibatkan penurunan produksi industri pengolahan.

2.1.3.3.6. Transmigrasi

Urusan transmigrasi dilaksanakan pada bidang Pelatihan kerja dan Prodiktivitas dengan program Pengembangan Wilayah Ketransmigrasian dan Kegiatan Peningkatan Transmigran Berhasil dan Mampu Hidup Mandiri. Program Pengembangan Wilayah Ketransmigrasian terdapat 1 indikator program yaitu Prosentase calon transmigrasi yang dilatih dengan capaian 0% di tahun 2020. Target pada indikator program ini adalah 0% dan terealisasi sebesar 0%. Urusan Transmigrasi yang diampu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki 1 Program Pembangunan pada Tahun 2019 yaitu Program Pengembangan Wilayah Ketransmigrasian dengan pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.55: Realisasi Capaian Urusan Transmigrasi Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2021

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021
1	Prosentase calon transmigrasi yang dilatih	%	n/a	100	100	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo, 2022

Sasaran urusan ketransmigrasian adalah Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calon transmigran untuk bertransmigrasi dengan indikator Persentase calon transmigran yang terseleksi. Target yang dipasang sebesar 0% mengacu pada surat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi RI Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi perihal Penundaan Transmigran Tahun 2020 antisipasi Dampak Wabah Pandemi Covid. 19. Nomor B676/PKT.04.01/IV/2020 sehingga realisasi pun juga 0%.

2.1.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1. Perencanaan

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional yang disebut Perencanaan adalah suatu proses untuk



menentukan Tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dilaksanakan untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan selama 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun. Urusan perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo dengan capaian sasaran perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 2.56: Realisasi Capaian Indikator Urusan Perencanaan Kabupaten Situbondo Tahun 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Prosentase OPD yang capaian programnya minimal 80 persen dari target	Jumlah OPD yang capaian programnya minimal 80 %	90,00%	100,00%	111,00%
Prosentase Program RKPD yang konsisten terhadap Program RPJMD	Presentase Program RKPD tahun berkenaan	90,00%	100,00%	111,00%
	Presentase Program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan			
Prosentase renstra OPD yang selaras dengan RPJMD	Jumlah renstra OPD yang selaras dengan RPJMD	90,00%	100,00%	111,00%

Sumber: Bappeda Kabupaten Situbondo 2020

Capaian indikator urusan perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 4 (empat) indikator, dimana masing-masing indikator sasaran capaian kinerjanya lebih dari 100%. Hal Ini menandakan bahwa Perangkat Daerah di Kabupaten Situbondo telah melaksanakan programnya sesuai dengan Dokumen Perencanaan yang ada serta pendampingan yang dilakukan Bidang-bidang di Bappeda Kabupaten Situbondo kepada OPD koordinasi telah dilaksanakan dengan baik.

2.1.3.4.2. Keuangan

Dalam upaya keseriusan pemerintah dalam melaksanakan tranparansi publik dalam bidang keuangan maka pemerintah berusaha melakukan pengelolaan keuangan yang baik . Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang baik di Kabupaten Situbondo, pemerintah Kabupaten Situbondo menarget untuk mencapai opini



laporan keuangan WTP oleh BPK RI. Opini WTP oleh BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa keuangan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material dan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Tabel 2.57: Opini Laporan Keuangan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Opini Laporan Keuangan oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPPKAD Kabupaten Situbondo Tahun 2022

Berdasarkan Indikator capaian diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Situbondo telah mampu mengelola keuangan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya sehingga mencapai Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 Tahun berturut - turut. Hal ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan dalam dan terus dipertahankan hingga waktu yang akan datang.

2.1.3.4.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip *good governance*. Untuk urusan kepegawaian capaian indikator kinerja sarasanya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.58: Realisasi Capaian Urusan Kepegawaian Kabupaten Situbondo Tahun 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Jumlah OPD yang capaian programnya minimal 80 %	86,00%	100,00%	116,28%
Meningkatnya Kinerja ASN dan Pelayanan	Persentase ASN yang mendapatkan nilai prestasi	95,00%	99,58%	104,82%



Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Administrasi Kepegawaian	kerja minimal 76 (baik) selaras dengan perjanjian kinerja			
	Persentase pegawai ASN yang puas terhadap pelayanan kepegawaian	100,00%	97,50%	97,50%
	Persentase updating data kepegawaian tepat waktu	95,00%	100,00%	105,26%

Sumber : BKPSDM Kabupaten Situbondo 2021

Berdasarkan Indikator capaian di atas dapat dilihat perubahan realisasi capaian-capaian indikator urusan kinerja urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Indeks Profesionalitas ASN secara substansial memuat komponen kapasitas dan kapabilitas ASN dalam melaksanakan tugas aparatur. Untuk melihat kinerja ASN yang tangkas dan profesional diperlukan alat ukur atau instrumen yang digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN, yaitu indeks Profesionalitas ASN, yang akan diukur di perencanaan 5 (lima) tahun ke depan.

2.1.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk mengolah informasi dan data yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan pusat dan daerah. Pengembangan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, sehingga berhasil guna dan berdayaguna bagi masyarakat. Capaian indikator sasaran untuk urusan Penelitian dan Pengembangan mulai dari tahun 2016 – 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.59: Realisasi Capaian Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

Sasaran	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai <i>policy brief</i> s	90	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo Tahun 2021

Pada APBD tahun anggaran 2020 untuk Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan difocusing sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019



(Covid-19) serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

2.1.3.4.5. Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo mempunyai Tugas dan Fungsi menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan DPRD, Administrasi Keuangan DPRD, tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Capaian indikator sasaran untuk urusan Sekretariat DPRD mulai dari tahun 2017 – 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.60: Realisasi Capaian Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

No	Sasaran	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD kabupaten	8	8	8	13	13
2	Jumlah seluruh anggota DPRD kabupaten	45	45	45	45	45

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo Tahun 2021

Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Situbondo selama tahun 2017-2021 cenderung stagnan, namun mengalami peningkatan di tahun 2020 dan 2021 yang berjumlah 13 orang dibandingkan tahun sebelumnya hanya sebesar 8 orang. Sedangkan jumlah seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo selama tahun 2017-2021 selalu berjumlah 45 orang dan tidak pernah mengalami perubahan. Sehingga persentasi jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD di tahun 2020 sebesar 29%, sedangkan persentase anggota laki-laki yang menjadi DPRD sebesar 71%.

2.1.3.4.6. Sekretariat Daerah

Capaian indikator sasaran untuk urusan Sekretariat Daerah dari Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.61: Capaian Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kategori Evaluasi LPPD Kabupaten Situbondo	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Capaian Nilai Sakip Pemerintah Daerah	B	BB	A	A	A

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020



Berdasarkan tabel capaian urusan sekretariat daerah Kabupaten Situbondo terdapat 2 (dua) indikator. Kategori evaluasi LPPD Kabupaten Situbondo periode 2016 s/d 2020 tergolong prestasi sangat baik. Hal tersebut terbukti dari data table diatas, menunjukkan bahwa mulai dari tahun 2017-2021 berpredikat “Sangat Baik”. Seiring dengan semangat Reformasi Birokrasi maka Pemerintah Kabupaten Situbondo optimis untuk terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun-tahun yang akan datang. Sedangkan indikator kedua adalah Capaian Nilai SAKIP Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2017, realisasi capaian nilai SAKIP Kabupaten adalah 61,96 dengan kategori B, dari target kategori B. Pada tahun 2018 capaian nilai SAKIP terealisasi dengan memperoleh kategori BB dengan nilai 70,88, kemudian untuk tahun 2019 target capaian nilai SAKIP Kabupaten Situbondo adalah kategori BB, dengan realisasi kategori A dengan nilai 81,5 sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah di atas 100% atau sangat baik. Sedangkan untuk tahun 2020 target capaian nilai SAKIP Kabupaten Situbondo adalah kategori A begitu pula bertahan hingga tahun 2021. Secara umum terdapat kenaikan yang signifikan terhadap nilai akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Situbondo dari tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan adanya perubahan yang cukup signifikan baik dari segi kelengkapan dokumen maupun komitmen dari pimpinan. Untuk itu diperlukan upaya upaya yang lebih baik dalam rangka mempertahankan predikat tersebut.

2.1.3.4.7. **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Inspektorat diharapkan menjadi katalisator bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk dapat memberikan informasi umpan balik kepada Bupati Situbondo melalui pelaksanaan pengawasan internal dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Berikut ini adalah capaian indikator sasaran dari urusan pengawasan :

Tabel 2.62: Realisasi Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal A	%	n/a	60,38	82,61	47,62	72,91	93,75
2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	%	89,22	70,87	64,37	91,06	75,41	85,34
3	Persentase penyelesaian kasus/pengaduan yang ditangani	%	100	100	100	75,73	100	100
4	Persentase SKPD yang menyusun Laporan keuangan sesuai SAP	%	n/a	92,45	100	100	100	100

Sumber: Inspektorat Kabupaten Situbondo, Tahun 2021



Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja diatas, dari 4 indikator kinerja sasaran strategis pembangunan daerah untuk Urusan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo, selama periode 2015 s/d 2020 secara keseluruhan sudah cukup membaik dan memenuhi target. Pada tahun 2020 Persentase Kategori Evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal A, realisasinya terdapat 45 OPD yang nilai evaluasi SAKIPnya A dari 48 OPD yang dinilai SAKIPnya, atau sebesar 93,75%. Tercapainya capaian kinerja pada indikator ini disebabkan SAKIP OPD telah dievaluasi internal oleh Inspektorat Daerah, dokumen disusun dengan memperhatikan ukuran kinerja atas program/kegiatan yang dianggarkan serta keterkaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, yang pada akhirnya menunjukkan tingkat efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran di OPD.

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang Telah Ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 85% dari rekomendasi pada Tahun 2020, realisasinya telah mencapai 85,34% atau 649 rekomendasi dari 899 rekomendasi pemeriksaan internal dan 19 rekomendasi dari 19 rekomendasi eksternal pada tahun 2020 yang ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja sebesar 100,04%. Obyek pemeriksaan pada tahun 2020 hanya sebanyak 67 entitas dari 722 entitas yang dapat diperiksa dengan output 69 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Entitas sebanyak 67 yang diperiksa terdiri atas 13 OPD, 6 Kecamatan, 16 Desa untuk Pemeriksaan atas APBDes 2019, dan 32 Desa untuk Pemeriksaan atas APBDes 2020.

Persentase penyelesaian kasus/pengaduan yang ditangani selama tahun 2015 s/d 2020 secara umum terealisasi sebesar 100%, hanya di tahun 2018 realisasinya sebesar 76,73%. Hal ini disebabkan meningkatnya kompetensi Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD). Sedangkan persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP selama tahun 2017-2020 realisasinya sebesar 100%. OPD telah menyusun laporan keuangannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, realisasinya seluruh OPD telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SIRKA. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Akrua telah memudahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi

2.1.4.1.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Fokus kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Situbondo. Secara rinci data PDRB Kabupaten Situbondo dapat dilihat dalam tabel berikut:



**Tabel 2.63: Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen)
Kabupaten Situbondo**

No.	Sektor	2017	2018	2019	2020*	2021**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,95	0,38	1,57	-2,09	1,69
2.	Pertambangan dan Penggalian	6,16	3,83	2,12	-6,59	1,25
3.	Industri Pengolahan	8,23	10,35	9,35	3,18	3,74
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,33	3,03	3,66	-0,37	2,04
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,62	4,19	4,28	3,91	5,13
6.	Konstruksi	6,46	5,71	5,65	-7,28	-0,61
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,79	7,88	7,08	-8,70	6,93
8.	Transportasi dan Pergudangan	7,49	9,16	7,52	-7,94	6,84
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,02	8,37	7,42	-13,06	4,12
10.	Informasi dan Komunikasi	7,04	7,37	7,47	7,86	6,31
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,6	6,68	3,45	-0,15	1,10
12.	Real Estate	6,43	6,35	6,28	3,03	2,11
13.	Jasa Perusahaan	6,74	7,97	6,46	-7,49	1,51
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,16	3,89	3,20	-1,84	-0,08
15.	Jasa Pendidikan	4,39	6,56	6,98	1,92	1,28
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,83	5,29	4,79	9,22	4,81
17.	Jasa Lainnya	5,15	6,71	7,84	-15,55	4,71
	PDRB Kabupaten Situbondo	5,07	5,46	5,44	-2,33	3,26

**) AngkaSementara*

***) AngkaSangatSementara*

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2020

Berdasarkan tabel laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Situbondo beberapa sektor mengalami pasang dan surut pertumbuhan. Sampai pada tahun ke-2 pandemi Covid-19, beberapa sektor pada tahun 2021 masih menunjukkan laju yang negatif. Sektor yang mengalami pertumbuhan PDRB paling tinggi di masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Situbondo adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Sedangkan sektor yang masih menunjukkan laju yang kurang baik adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Konstruksi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, dan sektor Pertambangan dan Penggalian. Secara umum, PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Kabupaten Situbondo pada tahun 2021 kenaikannya adalah sebesar 3,26%.

2.1.4.1.2. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran perkapita dapat mengungkap tentang pola



konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 2.64: Pengeluaran per Kapita Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021

No	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran per kapita (dalam ribuan)	Rp 9.178	9.692	10.097	9.857	9 996

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2022

Berdasarkan tabel di atas pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Situbondo pada tahun 2017-2019 cenderung mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan karena pandemi Covid-19, sedangkan pada tahun 2021 pengeluaran per kapita Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan walau kenaikannya tidak signifikan.

2.1.4.2. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah modal dan kekayaan penting dari setiap kegiatan manusia agar kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. Sumber daya manusia menyangkut dimensi jumlah karakteristik (kualitas) dan persebaran penduduk. Maka pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan sebagai upaya untuk pengembangan aktivitas dalam bidang pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas, peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi. Peningkatan untuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator dari kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dianalisis dengan melihat kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat beban ketergantungan penduduk.

2.1.4.2.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas sumber daya manusia (SDM) berhubungan dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri maupun luar negeri. Kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat



Pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat Pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2, dan S3.

Tabel 2.65: Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tahun	Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Diploma	S1	S2	S3
2013	-	39,712	260,326	89,416	96,251	5,071	17,963	809	41
2014	-	45,080	262,423	90,701	98,127	5,267	18,747	829	49
2015	-	48,191	261,438	91,160	98,932	5,378	19,593	898	53
2016	225,897	47,333	218,725	78,045	84,801	4,803	17,782	854	58
2017	216,819	51,018	219,056	80,023	88,501	5,110	19,769	912	72

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka, Tahun 2020

2.1.4.2.2. Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Dengan konsep ini maka dapat digambarkan jumlah penduduk yang memiliki ketergantungan pada penduduk usia produktif. Konsep ini juga memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan menjelaskan bahwa semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.66: Rasio Ketergantungan Kabupaten Situbondo

Sektor	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Usia Produktif (15 – 64 tahun)	penduduk	481.464	487 488	485 915	484.009	484.328
Jumlah Penduduk Usia non Produktif (<15 tahun dan >64 tahun)	penduduk	195.239	192 505	197 063	201.958	204.009
Rasio Ketergantungan	%	40	39	40,56	41,73	42,12

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo Dalam Tahun 2021, data diolah



Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Situbondo sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan. Rasio ketergantungan Kabupaten Situbondo pada tahun 2021 meningkat menjadi 42,12% jika dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 41,73. Hal tersebut menunjukkan pada tahun 2021 bahwa beban yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) adalah sebanyak 42 orang penduduk usia tidak produktif (usia <15 dan usia >64 tahun). Nilai rasio ketergantungan ini diharapkan kedepannya terus mengalami penurunan agar rasio beban jumlah penduduk usia tidak produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif semakin berkurang juga.

2.1.4.3 Fokus Fasilitas wilayah / Infrastruktur

Dalam rangka untuk meningkatkan Daya Saing Daerah, salah satu hal yang paling yang paling penting adalah Penataan Ruang, yang secara spasial tertuang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dimana penataan ruang ini mengatur peruntukkan ruang sesuai dengan peruntukkannya sehingga jaminan kepastian investasi di Kabupaten Situbondo dapat dilaksanakan. Perencanaan Struktur dan Pola Ruang Kabupaten Situbondo, diharapkan menjadi daya tarik yang kuat bagi masuknya investasi. Adapun Indikator penyediaan fasilitas infrastruktur tersebut dipengaruhi oleh indikator-indikator berikut :

2.4.2.1. Ketaatan Terhadap RTRW

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo no 9 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo membawa dampak terhadap pemanfaatan ruang di Kabupaten Situbondo hal ini ditunjukkan dengan kesadaran masyarakat untuk memproses Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) / Kekesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dari tahun ke tahun semakin meningkat seperti ditunjukkan dalam tabel sehingga penggunaan lahannya sesuai dengan RTRW Kabupaten Situbondo. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat tentang tata ruang yang ada serta keterbukaan informasi tentang tata ruang yang ada.

Tabel 2. 67: Permohonan Ijin Pemanfaatan Ruang Kabupaten Situbondo

Tahun	Jumlah Permohonan disetujui	Jumlah Permohonan tidak disetujui
2017	9	-
2018	39	-
2019	49	4
2020	31	5

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.4.2.2. Luas Wilayah Perkotaan

Kawasan perkotaan dan 4kawasan perdesaan pada dasarnya dapat ditetapkan atas dasar penetapan kawasan perkotaan yang berarti sisanya adalah kawasan perdesaan; sedangkan penetapan kawasan perkotaan adalah:

- a. Jumlah penduduk diatas 50.000 jiwa
- b. Kepadatan penduduk diatas 100 jiwa/Ha
- c. Luas kawasan terbangun diatas 60% dari area yang telah ditetapkan,
- d. Penduduk yang bermatapencaharian non pertanian diatas 60%.



Pembagian kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Situbondo sesuai dengan kondisi dan karakteristik kegiatan dibedakan menjadi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Identifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan jenis kegiatan yang akan ditentukan sehingga sesuai dengan peruntukkan tata ruangnya.

Kawasan perkotaan yang berada di wilayah kabupaten Situbondo dihitung berdasarkan bagian/wilayah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan Untuk rasio luas kawasan perkotaan di Kabupaten Situbondo adalah 17,35 % atau seluas 284,26 km² dari luas seluruh wilayah Kabupaten Situbondo seluas 1.638,5 km² . Adapun luas kawasan perkotaan di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel di berikut:

Tabel 2. 68: Luas Kawasan Perkotaan di Kabupaten Situbondo

No	Kecamatan	Perkotaan / Perdesaan	Desa/ Kelurahan	Luas (Km ²)
1	ARJASA	Perkotaan	Desa Arjasa	5,82
2	JANGKAR	Perkotaan	Desa Jangkar	5,5
3	JATIBANTENG	Perkotaan	Desa Jatibanteng	4,67
4	KAPONGAN	Perkotaan	Desa Kapongan	3,11
			Desa Kesambirampak	2,92
5	PANJI	Perkotaan	Desa Panji Lor	2,05
			Desa Tokelan	2,37
			Desa Curah Jeru	3,53
			Kelurahan Mimbaan	7,49
6	SUBOH	Perkotaan	Desa Suboh	4,34
			Desa Buduan	3,91
7	SUMBERMALANG	Perkotaan	Desa Tlogomas	6,51
8	ASEMBAGUS	Perkotaan	Desa Asembagus	1,87
			Desa Awar-awar	3,55
			Desa Gudang	1,61
			Desa Perante	4,66
			Desa Trigonco	2,27
9	BANYUGLUGUR	Perkotaan	Desa Banyuglugur	11,57
			Desa Kalianget	13,83
10	BANYUPUTIH	Perkotaan	Desa Banyuputih	10,25
			Desa Sumberejo	23,24
11	BESUKI	Perkotaan	Desa Besuki	2,31
			Desa Bloro	2,68
			Desa Demung	3,59
			Desa Jetis	4,23
			Desa Kalimas	0,6
			Desa Langkap	1,14
			Desa Pesisir	0,56
12	BUNGATAN	Perkotaan	Desa Bungatan	12,67
			Desa Mlandingan Wetan	3,75
			Desa Bletok	3,19
			Desa Pasir Putih	18,09
			Desa Selowogo	5,9
13	KENDIT	Perkotaan	Desa Balung	10,4
			Desa Kendit	7,26
			Desa Klatangan	17,46
14	MANGARAN	Perkotaan	Desa Mangaran	3,40125
			Desa Tanjung Glugur	3,40369
			Desa Tanjung Kamal	9,184



No	Kecamatan	Perkotaan / Perdesaan	Desa/ Kelurahan	Luas (Km ²)
15	MLANDINGAN	Perkotaan	Desa Mlandingan Kulon	2,85
			Desa Selomukti	9,83
			Desa Sumber Pinang	3,85
16	PANARUKAN	Perkotaan	Desa Kilensari	3,92
			Desa Paowan	10,44
17	SITUBONDO	Perkotaan	Kelurahan Dawuhan	1,81
			Kelurahan Patokan	3,76
			Desa Kotakan	8,71
			Desa Talkadang	4,2
TOTAL			284,25894	

Sumber: Bappeda Kabupaten Situbondo

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pada sub bab ini dijelaskan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Evaluasi detail pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan disjikan dalam lampiran.

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tujuan

Kabupaten Situbondo mempunyai empat misi yang kinerja pencapaian misinya direpresentasikan oleh tujuh indikator tujuan. Indikator tujuan dari Kabupaten Situbondo adalah Indeks Kesalehan Sosial, Indeks Pembangunan Manusia, Persentase Kemiskinan, Gini Rasio, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Reformasi Birokrasi. Berikut akan dijabarkan kinerja capaian dari ke tujuh indikator tujuan tersebut.

Tabel 2-69: Tabel Evaluasi Indikator Tujuan Kabupaten Situbondo

No.	Indikator Tujuan	Target dan capaian Indikator Tujuan Tahun 2021		Keterangan
		Target	Realisasi	
1	Indeks Kesalehan Sosial	65,00 - 68,44	65,66	Telah mencapai target
2	Indeks Pembangunan Manusia	68,07 - 68,58	67,78	Belum mencapai target
3	Persentase Kemiskinan	11,95-11,66	12,63	Belum mencapai target
4	Gini Rasio	0,304-0,300	0,323	Belum mencapai target
5	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	81,84 - 82,40	81,91	Telah mencapai target
6	Pertumbuhan Ekonomi	2,00-2,89	3,26	Melebihi target
7	Indeks Reformasi Birokrasi	69,52 - 70,02	74,21	Melebihi target



Pada tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Utama (indikator sasaran) Kabupaten Situbondo dapat diketahui capaiannya. Kabupaten Situbondo memiliki tujuh Indikator Kinerja Utama, dimana terdapat dua indikator telah mencapai target. Sedangkan terdapat dua indikator yang capaiannya pada tahun 2021 melebihi target, yaitu pertumbuhan ekonomi dan Indeks Reformasi Birokrasi. Sedangkan tiga indikator lainnya yaitu indeks pembangunan manusia, persentase kemiskinan, dan gini rasio belum mencapai target.

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Sasaran

Sasaran Kabupaten Situbondo yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2021-2026 merupakan penjabaran upaya pencapaian dari tujuan Kabupaten Situbondo. Kinerja pencapaian dari sasaran Kabupaten Situbondo ditandai dengan tercapainya target dari indikator sasaran yang telah ditentukan pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Situbondo Periode 2021-2026. Kinerja pelaksanaan pencapaian sasaran Kabupaten Situbondo akan dijabarkan pada penjabaran di bawah ini

No.	Indikator Sasaran	Target dan capaian Tahun Indikator Sasaran Tahun 2021		Keterangan
		Target	Realisasi	
1	Indeks Stabilitas	68,50 - 71,70	57,2	Belum mencapai target
2	Indeks Risiko Bencana	127,39 - 126,38	113,48	Melebihi target
3	Indeks Toleransi	70,00 - 73,19	72,80	Belum mencapai target
4	Indeks Solidaritas Sosial	70,00 - 72,89	72,90	Melebihi target
5	Indeks Pembangunan Gender	87,35-87,48	87,16	Belum mencapai target
6	Indeks Pendidikan	0,586 - 0,593	0,594	Melebihi target
7	Indeks Kesehatan	0,759 - 0,763	0,757	Belum mencapai target
8	Purchasing Power Parity	0,350 – 0,360*	1,42	Belum mencapai target
9	Jumlah Desa Maju	46	39	Belum mencapai target
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,25-3,03	3,68	Belum mencapai target
11	Indeks Infrastruktur	67,32-68,86	67,86	Telah mencapai target
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,11 -72,14	74,49	Melebihi target
13	Pertumbuhan PDRB Kategori Akomodasi	3,00 - 4,50	4,12	Telah mencapai target
14	Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,15 - 0,50	1,69	Melebihi target
15	Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	4,00 - 5,40	3,74	Belum mencapai target



No.	Indikator Sasaran	Target dan capaian Tahun Indikator SasaranTahun 2021		Keterangan
		Target	Realisasi	
16	Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,00 - 3,60	6,93	Melebihi target
17	Nilai Realisasi Investasi	1.467.305,32	1.494.194,01	Melebihi target
18	Indeks SPBE	3,48 – 3,49	2,43	Belum mencapai target
19	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,00 - 79,00	80,63	Melebihi target
20	Indeks Profesionalisme ASN	59,80 - 62,64	58,44	Belum mencapai target
21	Nilai SAKIP	82,40 - 83,54	82,40 - 83,54	Hasil belum diketahui
22	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP	Telah mencapai target
23	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Telah mencapai target

Secara keseluruhan, Kabupaten Situbondo memiliki indikator sasaran/indikator kinerja daerah sebanyak 23 indikator. Berdasarkan hasil capaian seluruh indikator kinerja daerah tersebut, terdapat tujuh indikator kinerja daerah yang belum diketahui hasilnya atau sebesar 30,43%. Belum diketahuinya hasil capaian indikator kinerja daerah tersebut disebabkan karena hasil capaian indikator kinerja daerah belum dirilis oleh Lembaga/Instansi terkait yang berwenang melakukan pengukuran dan perilsan capaian hasil indikator kinerja daerah tersebut. Selanjutnya terdapat tujuh indikator kinerja daerah yang melebihi target atau sebesar 30,43% dari keseluruhan indikator kinerja daerah. Terdapat indikator kinerja daerah sebanyak enam indikator yang belum mencapai target atau sebesar 26,08%. Kemudian tiga indikator kinerja daerah yang telah mencapai target atau sebesar 13,04% dari keseluruhan indikator kinerja daerah.

2.2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program

Program yang dilaksanakan oleh Kabupaten Situbondo merupakan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berikut adalah penjabaran mengenai kinerja pelaksanaan program Kabupaten Situbondo berdasarkan capaian target program dan kinerja capaian keuangan.

2.2.4. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, untuk mencapai visi dan misi Bupati Situbondo Periode 2021-2026. Berikut akan dijabarkan mengenai capaian kinerja kegiatan berdasarkan capaian target dan realisasi anggaran.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan	I-6
1.5 Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-12
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-30
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-129
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan Rkpd Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi Rpjmd	II-135
2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tujuan.....	II-135
2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Sasaran	II-136
2.2.3. Evaluasi Pelaksaaan Program	II-137
2.2.4. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.....	II-137
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-212
2.3.1 Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-212
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-214
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah	III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-11
3.2.1 Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah	III-12
3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah	III-24
3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah.....	III-27
3.2.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah.....	III-30
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Situbondo	IV-1
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 Kabupaten Situbondo.....	IV-5



4.2	Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2023	IV-8
4.2.1	Telaah Tematik dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-9
4.2.2	Telaah Tematik dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023	IV-12
4.2.3	Telaah Agenda Pembangunan Daerah Tahun 2023 dalam Percepatan Pemulihan Kondisi Daerah Akibat Dampak Pandemi Covid-19.....	IV-13
4.2.4	Linearitas Agenda Pembangunan Daerah Tahun 2023 dalam Menjawab Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah.....	IV-14
4.2.5	Tematik dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Serta Linearitas Terhadap Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur	IV-16
4.2.6	Program Prioritas Daerah Berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam RKPD 2023	IV-19
4.2.7	Dukungan Program Intervensi Daerah Terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-32
4.2.8	<i>Cross Cutting</i> dalam Pencapaian Pembangunan Daerah	IV-34
4.2.9	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-43
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....		V-1
5.1	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pembangunan Tahun 2023	V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		VI-1
6.1	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	VI-2
6.2	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD).....	III-3
BAB VII PENUTUP.....		VII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Situbondo	II-2
Tabel 2.2	: Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, Rata - Rata Hujan dan Hujan Maksimum Bulanan, 2021	II-4
Tabel 2.3	: Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2017-2021	II-5
Tabel 2.4	: Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Tahun 2017-2021	II-5
Tabel 2.5	: Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2017-2021	II-6
Tabel 2.6	: Produksi Hasil Peternakan Tahun 2017-2021	II-7
Tabel 2.7	: Rekap Kejadian Bencana di Kabupaten Situbondo Tahun 2021	II-8
Tabel 2.8	: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin di Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021	II-9
Tabel 2.9	: Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021	II-12
Tabel 2.10	: Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021	II-13
Tabel 2.11	: Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Situbondo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (%)	II-14
Tabel 2.12	: Hasil Perhitungan Indeks LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi Kabupaten Situbondo Tahun 2017 – 2021	II-17
Tabel 2.13	: Jumlah Balita Stunting Per Kecamatan di Kabupaten Situbondo	II-29
Tabel 2.14	: Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Situbondo Tahun 2020	II-37
Tabel 2.15	: sebaran kondisi ruang Kelas pada Jenjang SD dan SMP di Kabupaten situbondo	II-38
Tabel 2.16	: Jumlah Guru dan Jumlah Murid di Kabupaten Situbondo Tahun 2020	II-39
Tabel 2.17	: Jumlah Guru Menurut Kualifikasi Pendidikan pada Jenjang SD dan SMP 2020	II-39
Tabel 2.18	: Klasifikasi Kelulusan Akreditasi	II-48
Tabel 2.19	: Jumlah Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Situbondo Tahun 2014-2019	II-61
Tabel 2.20	: Jumlah Kejadian Luar Biasa Per Kecamatan di Kabupaten Situbondo	II-62
Tabel 2.21	: Data Sebaran Pasien Covid 19 Kabupaten Situbondo	II-62
Tabel 2.22	: Capaian Vaksinisasi Covid 19 di Kabupaten Situbondo	II-63
Tabel 2.23	: Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Situbondo	II-68
Tabel 2.24	: Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu	II-68
Tabel 2.25	: Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2020	II-68
Tabel 2.26	: Realisasi Capaian Indikator Sasaran Urusan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2021	II-76
Tabel 2.27	: Realisasi Capaian Indikator Sasaran Urusan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2020	II-76
Tabel 2.28	: Realisasi Capaian Indikator Sasaran Urusan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2020	II-78
Tabel 2.29	: Data PMKS Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020	II-80
Tabel 2.30	: Realisasi Capaian Indikator Sasaran Urusan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2020	II-81



Tabel 2.31 : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten situbondo Tahun 2016-2021	II-82
Tabel 2.32 : Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Kabupaten Situbondo berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin Tahun 2021	II-82
Tabel 2.33 : Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Kabupaten Situbondo Tahun 2021	II-83
Tabel 2.34 : Capaian Indikator Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2017-2021	II-96
Tabel 2.35 : Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2021	II-88
Tabel 2.36 : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dan Diversifikasi pangan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020	II-89
Tabel 2.37 : Capaian Indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-96
Tabel 2.38 : Capaian Indikator Sasaran Daerah Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021	II-97
Tabel 2.39 : Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017-2021	II-98
Tabel 2.40 : Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-100
Tabel 2.41 : Capaian Kinerja Pemerintah Urusan Perhubungan	II-100
Tabel 2.42 : Capaian Indikator Dinas Perhubungan	II-101
Tabel 2.43 : Capaian Kinerja Pemerintah Urusan Komunikasi dan Informatika	II-106
Tabel 2.44 : Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021	II-110
Tabel 2.45 : Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021	II-112
Tabel 2.46 : Capaian Indikator Kinerja PD Urusan Statistik Kabupaten Situbondo	II-113
Tabel 2.47 : Realisasi Indikator Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Situbondo	II-113
Tabel 2.48 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021	II-114
Tabel 2.49 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Situbondo Tahun 2020.....	II-114
Tabel 2.50 : Realisasi Capaian Urusan Kearsipan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021	II-115
Tabel 2.51 : Produksi Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021	II-118
Tabel 2.52 : Produksi Pertanian Holtikultura Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021	II-120
Tabel 2.53 : Produksi Peternakan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021	II-120
Tabel 2.54 : Capaian Urusan Perindustrian Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021	II-122
Tabel 2.55 : Realisasi Capaian Urusan Transmigrasi Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2021	II-123
Tabel 2.56 : Realisasi Capaian Indikator Urusan Perencanaan Kabupaten Situbondo Tahun 2021	II-124
Tabel 2.57 : Opini Laporan Keuangan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021.....	II-125



Tabel 2.58 : Realisasi Capaian Urusan Kepegawaian Kabupaten Situbondo
Tahun 2021 II-125

Tabel 2.59 : Realisasi Capaian Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Situbondo Tahun 2017-2021 II-126

Tabel 2.60 : Realisasi Capaian Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo
Tahun 2017-2021..... II-127

Tabel 2.61 : Capaian Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2017-2021..... II-127

Tabel 2.62 : Realisasi Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten
Situbondo Tahun 2015-2020 II-128

Tabel 2.63 : Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Situbondo II-130

Tabel 2.64 : Pengeluaran per Kapita Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun
2017-2021..... II-131

Tabel 2.65 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan II-132

Tabel 2.66 : Rasio Ketergantungan Kabupaten Situbondo..... II-132

Tabel 2.67 : Permohonan Ijin Pemanfaatan Ruang Kabupaten Situbondo..... II-133

Tabel 2.68 : Luas Kawasan Perkotaan di Kabupaten Situbondo II-134

Tabel 2.69 : Evaluasi indikator Tujuan Kabupaten Situbondo II-135

Tabel 2.70 : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun
Berjalan Kabupaten Situbondo..... II-138

Tabel 2.71 : Permasalahan Yang Berhubungan dengan Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah II-213

Tabel 2.72 : Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah II-214

Tabel 3.1. : Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2018 – 2022..... III-13

Tabel 3.2 : Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2018 – 2022 III-15

Tabel 3.3 : Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2018 – 2021 III-17

Tabel 3.4 : Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Situbondo III-18

Tabel 3.5 : Proyeksi/Target Penerimaan Daerah Kabupaten Situbondo III-19

Tabel 3.6 : Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2018 – 2022 III-21

Tabel 3.7 : Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 – 2022..... III-22

Tabel 3.8 : Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten
Situbondo III-23

Tabel 3.9 : Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 - 2021,
APBD Tahun 2022, dan Hasil Proyeksi Tahun 2023 – 2024 III-26

Tabel 3.10 : Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 – 2021,
APBD Tahun 2022, dan Hasil Proyeksi Tahun 2023 – 2024 III-29

Tabel 3.11 : Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 - 2021,
APBD Tahun 2022, dan Hasil Proyeksi Tahun 2023 – 2024 III-31

Tabel 4.1 : Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran IV-4

Tabel 4.2 : Strategi Pembangunan Kabupaten Situbondo..... IV-6



Tabel 4.3	: Linearitas Agenda Pembangunan Daerah Tahun 2023 Dalam Percepatan Pemulihan Kondisi Daerah Akibat Dampak Pandemi Covid-19	IV-13
Tabel 4.4	: Linearitas antara Isu Strategis Dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023	IV-15
Tabel 4.5	: Linearitas Antara Arah Kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Situbondo Tahun 2023	IV-18
Tabel 4.6	: Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2023 yang Diterjemahkan dalam Program Intervensi Daerah	IV-19
Tabel 4.7	: Pemetaan Program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 1	IV-21
Tabel 4.8	: Pemetaan Program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 2	IV-23
Tabel 4.9	: Pemetaan Program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 3	IV-25
Tabel 4.10	: Pemetaan Program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 4	IV-27
Tabel 4.11	: Pemetaan Program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 5	IV-28
Tabel 4.12	: Pemetaan Program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 6	IV-30
Tabel 4.13	: Program Intervensi Daerah Terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-33
Tabel 4.14	: Cross Cutting antar Perangkat Daerah dalam Mencapai Arah Kebijakan Pembangunan: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis	IV-35
Tabel 4.15	: Cross Cutting antar Perangkat Daerah dalam Mencapai Arah Kebijakan Pembangunan Pengembangan Produk Olahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Peternakan	IV-37
Tabel 4.16	: Cross Cutting antar Perangkat Daerah dalam Mencapai Arah Kebijakan Pembangunan Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Kemudahan Akses Permodalan	IV-38
Tabel 4.17	: Cross Cutting antar Perangkat Daerah dalam Mencapai Arah Kebijakan Pembangunan Penguatan Kesiapsiagaan Bencana Dan Bantuan Sosial Untuk Penuntasan Kemiskinan Ekstrem	IV-39
Tabel 4.18	: Cross Cutting antar Perangkat Daerah dalam Mencapai Arah Kebijakan Pembangunan Pengembangan Inovasi dan Investasi Untuk Peningkatan PAD	IV-40
Tabel 4.19	: Cross Cutting antar Perangkat Daerah dalam Mencapai Arah Kebijakan Pembangunan Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Trampil dan Berdaya Saing	IV-41
Tabel 5.1	: Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Daerah	V-1
Tabel 6.1	: Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Situbondo	VI-2
Tabel 6.2	: Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Situbondo	VI-3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-5

Gambar 2.1 : Peta Kabupaten Situbondo II-1

Gambar 2.2 : Penggunaan Lahan Kabupaten Situbondo II-4

Gambar 2.3 : Peta Rawan Bencana Kabupaten Situbondo II-8

Gambar 2.4 : Jumlah Penduduk Tahun 2017-2021 II-9

Gambar 2.5 : Piramida Penduduk Kabupaten Situbondo Tahun 2021..... II-11

Gambar 2.6 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Nasional..... II-12

Gambar 2.7 : PDRB Perkapita Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021 (juta rupiah)..... II-14

Gambar 2.8 : Pengelompokan Sektor Ekonomi/ Lapangan Usaha di Kabupaten
Situbondo Berdasarkan Pertumbuhan dan Kontribusi Tahun 2021..... II-15

Gambar 2.9 : Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017-2021 II-18

Gambar 2.10: Gini Ratio Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021 II-18

Gambar 2.11: Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021 II-19

Gambar 2.12: Prosentase Kemiskinan Situbondo dan Provinsi Jawa Timur Tahun
2017-2021 II-19

Gambar 2.13: Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur
Tahun 2017-2021 II-20

Gambar 2.14: Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur
Tahun 2017-2021 II-21

Gambar 2.15: Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2017–2021.... II-21

Gambar 2.16: Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021 II-22

Gambar 2.17: Indeks Pendidikan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021 II-22

Gambar 2.18: Angka Melek Huruf Usia 15 s.d. 59 Tahun Kabupaten Situbondo Tahun
2017-2021 II-23

Gambar 2.19: Angka Melek Huruf Usia 15 s.d. 55 Tahun Kabupaten/Kota di Jawa
Timur Tahun 2020 II-23

Gambar 2.20: Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Situbondo Tahun 2017-
2021 II-24

Gambar 2.21: Indeks Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021..... II-24

Gambar 2.22: Indeks Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020..... II-25

Gambar 2.23: Angka Harapan Hidup Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur Tahun
2017-2021 II-25

Gambar 2.24: Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020 II-26

Gambar 2.25: Tren Gizi Buruk di Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2020 II-26

Gambar 2.26: Prevalensi Gizi Kurang di Kabupaten Situbondo Tahun 2019 II-27

Gambar 2.27: Status Gizi Berdasarkan BB/U di Kabupaten Situbondo Tahun 2019..... II-27

Gambar 2.28: Hasil Penanganan Gizi Buruk di Kabupaten Situbondo Tahun 2019 II-28

Gambar 2.29: Rangkang Stanting per Puskesmas Hasil BT Februari 2020 II-30

Gambar 2.30: Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021 .. II-31

Gambar 2.31: Angka Partisipasi Murni SMP / MTs Kabupaten Situbondo Tahun 2017-
2021 II-31

Gambar 2.32: Angka Partisipasi Kasar PAUD Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021.... II-32



Gambar 2.33: Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021...	II-33
Gambar 2.34: Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021	II-33
Gambar 2.35: Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021	II-34
Gambar 2.36: Angka Partisipasi Sekolah Usia 12-15 Tahun Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020	II-34
Gambar 2.37: Angka Partisipasi Sekolah usia 12-15 Tahun Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019	II-35
Gambar 2.38: Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020	II-35
Gambar 2.39: Angka Putus Sekolah SD/MI dan MTs Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021	II-36
Gambar 2.40: Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020.....	II-37
Gambar 2.41: Angka Kematian Bayi Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020	II-40
Gambar 2.42: Usia Kematian Bayi di Kabupaten Situbondo Tahun 2021	II-41
Gambar 2.43: Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Situbondo Tahun 2021	II-41
Gambar 2.44: Angka Kematian Ibu Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021	II-42
Gambar 2.45: Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Situbondo Tahun 2010-2020	II-42
Gambar 2.46: Trend Kasus Baru HIV/AIDS di Kabupaten Situbondo Tahun 2010-2019	II-43
Gambar 2.47: Angka Kasus Baru HIV/AIDS di Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020 ...	II-44
Gambar 2.48: Trend Angka Kesembuhan dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru Kabupaten Situbondo 2016 s.d 2020	II-44
Gambar 2.49: Angka Kasus Penyakit TB Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020.....	II-45
Gambar 2.50: Cakupan Penemuan dan Penanganan Diare Balita Kabupaten Situbondo Tahun 2019	II-46
Gambar 2.51: Akreditasi Puskesmas Kabupaten Situbondo 2020	II-48
Gambar 2.52: Presentase Masyarakat Miskin terlayani JIKN Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020	II-49
Gambar 2.53: Angka Stunting Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021	II-50
Gambar 2.54: Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2020.	II-51
Gambar 2.55: Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2020.....	II-52
Gambar 2.56: Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020.....	II-52
Gambar 2.57: Pelayanan Kesehatan Bayi Balita Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2020.....	II-54
Gambar 2.58: Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020	II-55
Gambar 2.59: Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020	II-56
Gambar 2.60: Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020	II-57



<i>Gambar 2.61: Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020</i>	II-58
<i>Gambar 2.62: Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020</i>	II-58
<i>Gambar 2.63: Pelayanan Kesehatan Penderita ODGI Berat Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020</i>	II-59
<i>Gambar 2.64: Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020</i>	II-60
<i>Gambar 2.65: Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi (HIV) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020</i>	II-61
<i>Gambar 2.66: Perkembangan Kasus Covid 19 Kabupaten Situbondo 2022</i>	II-63
<i>Gambar 2.67: Perkembangan Des Siaga Aktif di Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020</i>	II-64
<i>Gambar 2.68: Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020</i>	II-64
<i>Gambar 2.69: Cakupan Pelayanan Nifas Per Puskesmas di Kabupaten Situbondo Tahun 2020</i>	II-65
<i>Gambar 2.70: Trend Kunjungan Bayi Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020</i>	II-66
<i>Gambar 2.71: Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Situbondo Per Puskesmas Tahun 2019</i>	II-66
<i>Gambar 2.72: Cakupan Kunjungan Neonatus per Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2019</i>	II-67
<i>Gambar 2.73: Trend Cakupan Kunjungan Kabupaten Situbondo Tahun 2014 s.d 2019</i>	II-67
<i>Gambar 2.74: Presentase Indeks Infrastruktur Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2020.</i>	II-69
<i>Gambar 2.75: Kondisi Jalan dalam Keadaan Baik Tahun 2017-2021</i>	II-69
<i>Gambar 2.76: Kondisi Jembatan dalam Keadaan Baik Tahun 2017-2021</i>	II-70
<i>Gambar 2.77: Presentase Kondisi Saluran Irigasi Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021</i>	II-70
<i>Gambar 2.78: Data Air Minum bagi Rumah Tangga Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020</i>	II-71
<i>Gambar 2.79: Air Limbah Domestik Layak Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020</i>	II-73
<i>Gambar 2.80: Ketersediaan Sarana Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020</i>	II-73
<i>Gambar 2.81: Ketersediaan Sarana Pendidikan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020</i>	II-73
<i>Gambar 2.82: Persentase Ketersediaan Pasar Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019 ..</i>	II-74
<i>Gambar 2.83: Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020 ...</i>	II-74
<i>Gambar 2.84: Data Capaian Stop BABS atau Open Defaction Free (ODF) di Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020</i>	II-75
<i>Gambar 2.85: Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020</i>	II-77
<i>Gambar 2.86: Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020</i>	II-78
<i>Gambar 2.87: Indeks Resiko Bencana Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021</i>	II-79
<i>Gambar 2.88: Persentase Penurunan PMKS Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021</i>	II-80



<i>Gambar 2.89: Persentase Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2018</i>	II-83
<i>Gambar 2.90: Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021.....</i>	II-84
<i>Gambar 2.91: Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021</i>	II-85
<i>Gambar 2.92: Indeks Pemberdayaan gender Tahun 2016 – 2020</i>	II-88
<i>Gambar 2.93: Skor Pola Pangan harapan Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020</i>	II-90
<i>Gambar 2.94: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021.....</i>	II-92
<i>Gambar 2.95: Indeks Kualitas Air, Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2016-2020</i>	II-93
<i>Gambar 2.96: Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2016-2020.....</i>	II-93
<i>Gambar 2.97: Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2020.....</i>	II-94
<i>Gambar 2.98: Rasio Jenis Kelamin tahun 2017-2021</i>	II-94
<i>Gambar 2.99: Kepadatan Penduduk tahun 2016-2020.....</i>	II-95
<i>Gambar 2.100: Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020</i>	II-95
<i>Gambar 2.101: Angka Beban Ketergantungan tahun 2016-2020.....</i>	II-96
<i>Gambar 2.102: Indeks Desa Membangun Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020</i>	II-98
<i>Gambar 2.103: Jumlah Pasangan Usia Subur tahun 2016-2019.....</i>	II-98
<i>Gambar 2.104: Jumlah Peserta KB aktif tahun 2016-2019</i>	II-99
<i>Gambar 2.105: Penerangan Jalan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2019</i>	II-100
<i>Gambar 2.106: Presentase Aplikasi dan Jaringan OPD dan Pemderintah Desa yang Terintegrasi.....</i>	II-102
<i>Gambar 2.107: Presentase OPD yang Menerapkan Keterbukaan Publik (KIP)</i>	II-103
<i>Gambar 2.108: Jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Kabupaten).....</i>	II-104
<i>Gambar 2.109: Jumlah Informasi Pemerintah Daerah yang Tersebarluaskan</i>	II-104
<i>Gambar 2.110: Presentase Apliksi E-Government yang Berfungsi Baik.....</i>	II-105
<i>Gambar 2.111: Jumlah Koperasi di Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021.....</i>	II-107
<i>Gambar 2.112: Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Situbondo</i>	II-107
<i>Gambar 2.113: Jumlah Usaha Mikro Kabupaten Situbondo pada Tahun 2017-2021.....</i>	II-109
<i>Gambar 2.114: Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021</i>	II-110
<i>Gambar 2.115: Jumlah Atlet Berprestasi.....</i>	II-111
<i>Gambar 2.116: Jumlah Event Olahraga.....</i>	II-112
<i>Gambar 2.117: Grafik Produksi Perikanan 2016-2021 (Ton).....</i>	II-116
<i>Gambar 2.118: Grafik Jumlah Wisatawan Domestik & Mancanegara 2016-2021.....</i>	II-117
<i>Gambar 2.119: Produksi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2017-2021 (Ton)</i>	II-118
<i>Gambar 2.120: Grafik Produksi Perkebunan 2017-2021 (Ton).....</i>	II-119
<i>Gambar 2.121: Nilai Ekspor Bersih Kabupaten Situbondo 2017-2020</i>	II-121
<i>Gambar 3.1: Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo Tahun 2017 – 2021</i>	III-1



<i>Gambar 3.2: Perkembangan PDRB Kabupaten Situbondo Tahun 2017 - 2021 (dalam Juta)</i>	III-2
<i>Gambar 3.3: Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Situbondo Tahun 2021</i>	III-3
<i>Gambar 3.4: Pengelompokan Sektor Ekonomi/ Lapangan Usaha di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Pertumbuhan dan Kontribusi Tahun 2021</i>	III-4
<i>Gambar 3.5: Inflasi Nasional dan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo Tahun 2017 – 2021</i>	III-6
<i>Gambar 3.6: Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo Tahun 2017 – 2021</i>	III-7
<i>Gambar 3.7: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021</i>	III-8
<i>Gambar 3.8: Tingkat Pengangguran Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo Tahun 2017 – 2021</i>	III-9
<i>Gambar 3.9: Gini Rasio Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo Tahun 2017 – 2021</i>	III-11
<i>Gambar 4.1: Linieritas Misi dengan Tujuan Pembangunan</i>	IV-1
<i>Gambar 4.2: Sasaran Pada Tujuan Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Religius.....</i>	IV-2
<i>Gambar 4.3: Sasaran Pada Tujuan Peningkatkan Kualitas dan Kesenjangan Sumber Daya Manusia.....</i>	IV-2
<i>Gambar 4.4: Sasaran Pada Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kesenjangan secara Berkelanjutan.....</i>	IV-3
<i>Gambar 4.5: Sasaran Pada Tujuan Mewujudkan Kualitas Layanan dan Kapasitas Birokrasi yang Profesional</i>	IV-4
<i>Gambar 4.6: Arsitektur Arah Kebijakan Kabupaten Situbondo Berdasarkan Strategi Pembangunan.....</i>	IV-8
<i>Gambar 4.7: Perumusan Tema Pembangunan RKPD Tahun 2023</i>	IV-16
<i>Gambar 4.8: Linearitas Tema Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Situbondo Tahun 2023</i>	IV-17
<i>Gambar 4.9: Cross Cutting Arah Kebijakan Pembangunan: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis.....</i>	IV-35
<i>Gambar 4.10: Cross Cutting Arah Kebijakan Pembangunan: Pengembangan Produk Olahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Peternakan.....</i>	IV-36
<i>Gambar 4.11: Cross Cutting Arah Kebijakan Pembangunan: Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Kemudahan Akses Permodalan</i>	IV-37
<i>Gambar 4.12: Cross Cutting Arah Kebijakan Pembangunan: Penguatan Kesiapsiagaan Bencana Dan Bantuan Sosial Untuk Penuntasan Kemiskinan Ekstrem</i>	IV-38
<i>Gambar 4.13: Cross Cutting Arah Kebijakan Pembangunan: Pengembangan Inovasi dan Investasi Untuk Peningkatan PAD.....</i>	IV-40
<i>Gambar 4.14: Cross Cutting Arah Kebijakan Pembangunan: Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Trampil dan Berdaya Saing</i>	IV-41



BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



5.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pembangunan Tahun 2023

Pada rencana kerja dan pendanaan daerah adalah meliputi program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dan merupakan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang menunjang arah pembangunan daerah, provinsi, nasional serta berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Terkait kerangka pendanaan pada RKPD tahun 2023 akan mengikuti kerangka pendanaan pada RPJMD periode tahun 2021-2026. Selain itu, alokasi sumber dana dalam RKPD tahun 2023 ini tidak hanya memperhitungkan kemampuan dana APBD sebagaimana dalam RPJMD, tetapi sudah memperhitungkan dana dari APBN ataupun APBD Provinsi.

Tabel 5. 1 Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Situbondo
Tahun 2023

(Halaman selanjutnya)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana pembangunan tahunan daerah, yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2023 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur maupun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun RKPD ini juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Kecamatan hingga Kabupaten.

Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai bentuk dokumen perencanaan jangka pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada di dalam RPJMD, sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh Perangkat Daerah (PD) pada tahun perencanaan, yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal RKPD, sehingga masing-masing PD memiliki arahan/tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya. Penyusunan RKPD Tahun 2023 merupakan masuk tahun kedua pada RPJMD Kabupaten Situbondo periode tahun 2021-2026.

Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya maupun dengan dokumen anggaran, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan dalam RPJMD akan dijabarkan secara operasional per tahun selama lima tahun menjadi prioritas perencanaan tahunan daerah yang dituangkan ke dalam RKPD yang berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja (RENJA-PD) yang tetap mengacu pada RENSTRA Perangkat Daerah. Selain itu, perumusan tema pembangunan pada RKPD juga harus selaras dengan agenda pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023, agenda pembangunan provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang arahan penyusunan RKPD Tahun 2023.

Substansi penting dalam RKPD ini merupakan gambaran investasi pemerintah yang dalam penjabarannya diinteraksikan dengan komponen sumber daya yang lain seperti PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan, serta dana-dana bagi hasil lainnya. Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik dimana sesuai amanat Undang-Undang

nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku efektif pada tanggal 01 Mei 2010 maka diharapkan dokumen ini harus dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan baik dalam kapasitas untuk melaksanakan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Pada RKPD tahun 2023 juga perlu memperhatikan terkait masa pemulihan akibat pandemik Covid-19 yang mempengaruhi berbagai aspek hingga adanya realokasi anggaran. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan guna mendukung pemulihan kondisi akibat pandemik. Kebijakan-kebijakan upaya pemulihan daerah akibat dampak pandemik Covid-19 dan masukan *stakeholder* terhadap proses perencanaan dan penganggaran diharapkan mampu mendukung upaya pemulihan kondisi daerah pasca pandemik Covid-19 pada tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 berlandaskan pada beberapa dasar hukum seperti dibawah ini:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Diubah Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Diubah Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan

Bromo – Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan

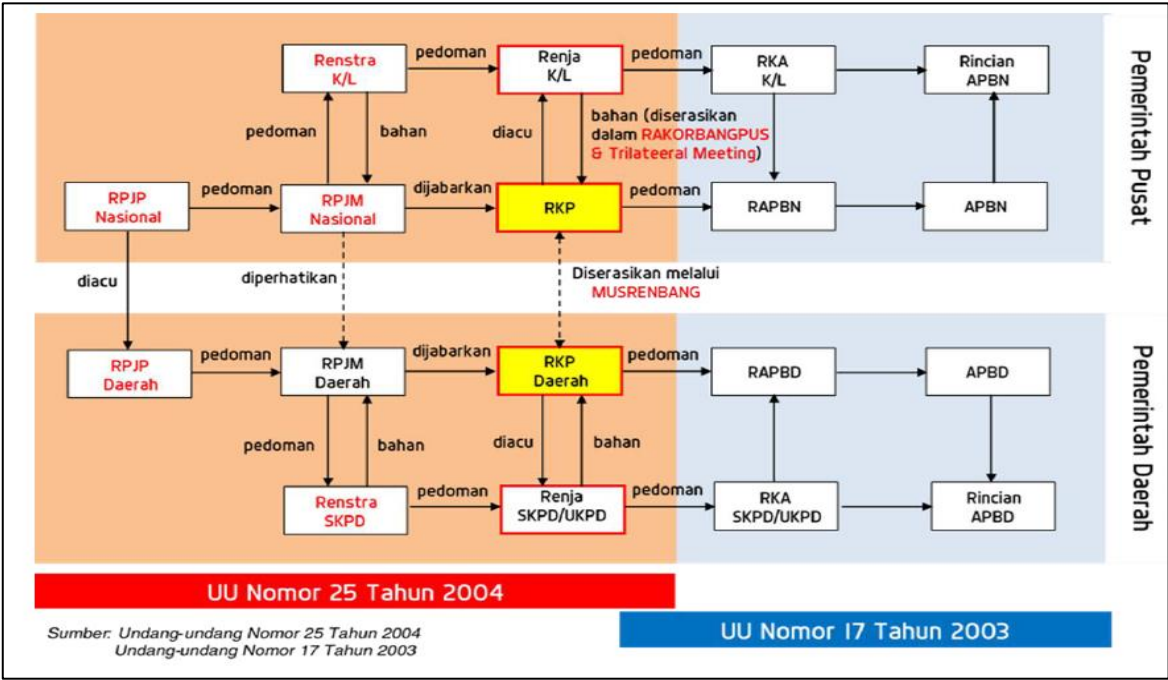
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2031;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.;
40. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo No. 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Situbondo Tahun 2005-2025;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RKPD Tahun 2023 juga sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah

untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2023. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan Renstra K/L.

Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 1. Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Arah kebijakan tahun 2023 pemerintah pusat adalah “**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” dan Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2023 tercermin dalam tematik pembangunan tahun 2023. Tema pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2023 adalah “**Peningkatan dan Pemerataan**

Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Mendukung Daya Saing Daerah Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". Tema pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2023 disusun sesuai dengan tema pada RPJMD Kabupaten Situbondo Periode 2021-2026. Selain itu, perumusan tema pembangunan pada RKPD juga harus selaras dengan agenda pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023, agenda pembangunan provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang arahan penyusunan RKPD Tahun 2023. Tema Kabupaten Situbondo "**Percepatan Infrastruktur Strategis Terintegrasi Untuk Peningkatan Investasi Dan Inovasi Daerah Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat**" dengan program prioritas meliputi:

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis;
2. Pengembangan Produk Olahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Peternakan;
3. Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Kemudahan Akses Permodalan;
4. Penguatan Kesiapsiagaan Bencana Dan Bantuan Sosial Untuk Penuntasan Kemiskinan Ekstrem;
5. Pengembangan Inovasi dan Investasi Untuk Peningkatan PAD;
6. Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, trampil dan berdaya saing.

RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Program yang terdapat dalam RPJMD dalam hal penentuan indikator, target capaian, program dan kegiatan serta pagu pendanaan. Serta memuat pedoman kebijakan pelaksanaan kegiatan tiap-tiap urusan yang harus dipedomani oleh Perangkat Daerah serta yang nantinya akan dijabarkan menjadi kegiatan prioritas pada RENJA PD.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2023 adalah untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD dan merupakan acuan dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2023.

Tujuan disusunnya RKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Kabupaten Situbondo, dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator dan target kinerja prioritas/agenda/program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 yang akhirnya ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Berikut ini merupakan sistematika dokumen RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2023:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan dan kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode penyusunan RPJMD, keterikatan dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran serta tatacara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan secara ringkas hubungan dokumen RKPD dengan RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Jawa Timur, serta RKP nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud, tujuan, dan sasaran penyusunan dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sub bab ini mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan RKPD tahun yang lalu selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan.

2.1 Kondisi Umum Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara umum mengenai kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun berjalan, dan permasalahan.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Bagian ini berisi kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi dan demografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Umum

Sub bab ini menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Berisi kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Sub bab ini berisi kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD

Bagian ini merupakan telaahan terhadap hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah. Evaluasi meliputi seluruh urusan baik wajib maupun pilihan pemerintah daerah khususnya menyangkut realisasi capaian kinerja program tahun lalu.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Bagian ini mengemukakan beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi baik yang berhubungan dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah maupun program-program lain yang mendapatkan perhatian dalam rangka identifikasi permasalahan.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Menjelaskan tentang permasalahan daerah yang dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana

serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendanaan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perkonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Bagian ini mengemukakan implementasi program perekomonian untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah, isu strategis daerah sebagai dasar untuk menyusun prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2023

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menguraikan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Situbondo

Pada sub bab ini diuraikan substansi pembangunan Kabupaten Situbondo secara makro yang diturunkan dari RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021. Gambaran makro yang diturunkan meliputi Tujuan dan sasaran

pembangunan, serta Strategi dan Arah pembangunan 2023 dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Pada sub bab ini diuraikan keterkaitan antara pembangunan nasional, dan provinsi terhadap RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2023. Selain itu pada sub bab ini juga diuraikan secara lebih detail terkait tematik beserta intervensi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Sistematika uraian pembahasan pada sub bab ini adalah sebagai berikut:

4.2.1 Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

4.2.2 Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

4.2.3 Tematik Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Terhadap Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

4.2.4 Telaah Agenda Pembangunan Daerah Tahun 2023 dalam Percepatan Pemulihan Kondisi Daerah Akibat Dampak Pandemi Covid-19

4.2.5 Telaah Agenda Pembangunan Daerah Tahun 2023 dalam Menjawab Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah

4.2.6 Konsistensi Agenda Pembangunan Nasional Terhadap Program Pembangunan Daerah Tahun 2023

4.2.7 Dukungan Program Intervensi Daerah Terhadap Pencapaian Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2023

4.2.8 Program Prioritas Daerah Berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam RKPD 2023

4.2.9 Pokok-pokok pikiran DPRD

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

**Tabel 2.70 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Situbondo**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									-	-	-	-	-	-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	Nilai	85 (A)	2.680.022.647.760	82,5 (A)	428.014.178.633	83 (A)	439.690.249.053	0	135.210.907.422			563.225.086.055		21%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	1.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengang Garan, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	12	1.820.000.000	12	1.049.989.400	12	1.210.000.000	4	36.680.680	33%	3%	16	1.086.670.080	133%	60%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	1.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn Dan P3k Dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	PPPK	6385	445.067.316.731	6385	445.039.788.131	6385	445.067.316.731	6385	122.719.042.268	100%	28%	6385	283.879.415.200	100%	64%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	1.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	orang	0,06	930.000.000	120	930.000.000	120	930.000.000	0	-	0%	0%	120	930.000.000	200000%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	1.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	barang	4	380.000.000	4	380.000.000	4	380.000.000	4	87.639.300	100%	23%	4	467.639.300	100%	123%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	1.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	rekening	35	370.045.000	35	420.045.000	35	420.045.000	0	-	0%	0%	35	420.045.000	100%	114%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	1.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rekening Dan Surat Masuk Dan Keluar	rekening	4	1.312.000.000	4	1.312.000.000	4	1.312.000.000	4	10.706.636.911	100%	816%	4	12.018.636.911	100%	916%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	1.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	bulan	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	6	27.896.013	50%	5%	18	627.896.013	150%	105%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		112%	212%	
															Predikat Kinerja		ST	ST	
11	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD 4-6 Th	persen	1,1112	684.504.659.783	1,11111	127.224.816.039	1,1112	125.441.751.764	0	-	0%	0%	1,11111	127.224.816.039	100%	19%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12			Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	persen	0,9589		0,9564		0,9589		0,9589	-	100%		0,95765		100%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13			JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN	persen	150		100		110		120	-	109%		110		73%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14			APK SD/MI	persen	0,9613		0,9589		0,9613		0,9613	-	100%		0,9601		100%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15			APM SD/MI	persen	1,0596		1,0553		1,0596		1,0596	-	100%		1,05745		100%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16			APK SMP/MTS	persen	0,82		0,8127		0,8168		0,82	-	100%		0,81635		100%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17			APM SMP/MTS	persen	0,8534		0,8459		0,8497		0,8534	-	100%		0,84965		100%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18			APS SD/MI	persen	0.081%		0.09%		0.084%		0	-							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19			APS SMP/MTS	persen	0.21%		0.28%		0.25%		0	-							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20			AM SD/MI KE SMP/MTS	persen	0,83		0,8127		0,8162		0,8235	-	101%		0,8181		99%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21			AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	persen	1		1		1		0,8235	-	82%		0,91175		91%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Sd Yang Dibina Untuk Peningkatan Mutu Pendidik	lembaga	15	258.792.161.800	15	55.913.972.980	15	99.283.217.400	0	69.281.000	0%	0%	15	55.983.253.980	100%	22%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23			Jumlah Lembaga Sd Yang Mendapatkan Bantuan Infrastruktur	lembaga	15		15		15		0	-	0%		15		100%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24	1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Smp Yang Dibina Untuk Peningkatan Mutu Pendidik	lembaga		28.782.700.000	13	26.313.386.974	13	28.236.700.000	0	30.563.400	0%	0%	13	26.343.950.374		92%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25			Jumlah Lembaga Smp Yang Mendapatkan Bantuan Infrastruktur	lembaga	13		13		13		0	-	0%		13		100%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26	1.1.2.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga Paud Yang Dibina Untuk Peningkatan Mutu Pendidik	lembaga	16	19.762.700.000	16	16.188.500.161	16	19.762.700.000	0	-	0%	0%	16	16.188.500.161	100%	82%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									-	-			-	-			Dinas Kesehatan
3	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai		604.885.929.247	88 (A)	62.182.860.269	88 (A)	64.387.200.832	0	12.460.559.579		19%		74.643.419.848	12%		Dinas Kesehatan
49			Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai	persentase	100,00%		90,00%		90,00%		93,00%	-	103,33%		91,50%		92%		Dinas Kesehatan
50			Indeks nilai RB Dinas Kesehatan	indeks	76		75		75		75,5	-	101%		75,25		99%		Dinas Kesehatan
51			Prosentase Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan	persentase	6,00%		83,00%		83,00%		85,00%	-	102,41%		84,00%		1400%		Dinas Kesehatan
52		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra SKPD	dokumen	1		1	109.266.477	1	78.828.572	1	-	100%	0%	1	109.266.477	100%		Dinas Kesehatan
53			Jumlah dokumen Renja SKPD	dgokumen	3		3		3		3	-	100%		3		100%		Dinas Kesehatan
54			Jumlah dokumen LAKIP, LPPD dan LKPI	dokumen	3		3		3		3	-	100%		3		100%		Dinas Kesehatan
55			Jumlah tersedianya dokumen RKA dan DPA	dokumen	2		2		2		2	-	100%		2		100%		Dinas Kesehatan
56		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS yang dibayar	Bulan	12		12	60.691.950.029	12	61.984.464.056	12	12.268.849.336	100%	20%	12	72.960.799.365	100%		Dinas Kesehatan
57			Jumlah tenaga Pengelola keuangan dan THLP yang dibayar	orang	85		85		85		85	-	100%		85		100%		Dinas Kesehatan
58			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	laporan/ dokumen	1		1		1		1	-	100%		1		100%		Dinas Kesehatan
59		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di OPD	item instalasi	20		20	175.190.120	20	1.031.943.812	20	16.349.000	100%	2%	20	191.539.120	100%		Dinas Kesehatan
60			Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Item	10		10		10		10	-	100%		10		100%		Dinas Kesehatan
61			Jumlah terbelinya belanja tetap dan nonpeternakan OPD	Item	5		5		5		5	-	100%		5		100%		Dinas Kesehatan
62			Jumlah terbelinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Media	6		6		6		6	-	100%		6		100%		Dinas Kesehatan
63			Jumlah tersedianya makan dan minum di OPD	Item	10		10		10		10	-	100%		10		100%		Dinas Kesehatan
64			Jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam dan luar daerah	kali dalam provinsi	200		200		200		50	-	25%		250		125%		Dinas Kesehatan
65				kali luar provinsi	15		15		15		4	-	27%		9,5		63%		Dinas Kesehatan
66		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rekening listrik, telepon, air yang dibayar	bulan	12		12	884.445.168	12	1.167.025.392	12	168.116.993	100%	14%	12	1.052.562.161	100%		Dinas Kesehatan
67			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara kondisinya	item	10		10		10		10	-	100%		10		100%		Dinas Kesehatan
68			Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum di kantor	orang	13		13		13		13	-	100%		13		100%		Dinas Kesehatan
69		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah terbayarnya STNK untuk roda 4 dan roda 2	unit	30		30	322.008.475	30	124.939.000	12	7.244.250	40%	6%	21	329.252.725	70%		Dinas Kesehatan
70			Jumlah kendaraan kantor yang dipelihara kondisinya	unit	30		30		30		12	-	40%		21		70%		Dinas Kesehatan
71			Jumlah meubelair yang terpelihara	item	6		6		6		6	-	100%		6		100%		Dinas Kesehatan
Rata-Rata capaian kinerja (%)																153%	0%		
Predikat Kinerja																ST	SR		
72	01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penurunan AKI	per.100.000 kb	110	467.669.739.938	204	60.253.548.050	190	58.623.505.790	252	41.000.000	133%	0%	228	60.294.548.050	207%	13%	Dinas Kesehatan
73			Penurunan AKB	per.1000 kb	12,5		0,62569444		14,5		12,6	-	87%		6,612847222		53%		Dinas Kesehatan
74			Prosentase Stunting	persentase	13,00%		30,00%		28,00%		23,70%	-	84,64%		26,85%		207%		Dinas Kesehatan
75			Prosentase skrining faktor risiko PTM usia produktif	persentase	100,00%		100,00%		100,00%		35,00%	-	35,00%		67,50%		68%		Dinas Kesehatan
76			Prosentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar	persentase	100,00%		92,00%		93,00%		0,00%	-	0,00%		92,00%		92%		Dinas Kesehatan
77			Prosentase penemuan dan penanganan suspek penderita penyakit menular (TBC dan HIV sesuai standar	persentase	100,00%		100,00%		100,00%		30,00%	-	30,00%		65,00%		65%		Dinas Kesehatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 / (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
78			Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam program sehati	persentase	100,00%		80,00%		80,00%		1,29%	-	1,61%		81,29%		81%		Dinas Kesehatan
79			Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan	persentase	90,00%		80,00%		82,00%		83,00%	-	101,22%		81,50%		91%		Dinas Kesehatan
80			Prosentase Puskesmas dengan hasil Reakreditasi paripurna	persentase	25,00%		10,00%		10,00%		0,00%	-	0,00%		10,00%		40%		Dinas Kesehatan
81			Prosentase Reakreditasi Rumah Sakit paripurna	persentase	100,00%		30,00%		30,00%		50,00%	-	166,67%		80,00%		80%		Dinas Kesehatan
82			Prosentase RS Rujukan sesuai dengan standart	persentase	85,00%		65,00%		65,00%		100,00%	-	153,85%		82,50%		97%		Dinas Kesehatan
83		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Puskesmas sesuai standart	Puskesmas	5		5	31.864.182.248	5 Puskesmas	27.111.631.040	0	-		0%	5	31.864.182.248	100%		Dinas Kesehatan
84			Jumlah Pengembangan Fasilitas Kesehatan Pustu & Ponkesdes sesuai standart	Ponkesdes & Pustu/ Sarana	5		5		5		0	-	0%		5		100%		Dinas Kesehatan
85			Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas sesuai standart	Puskesmas			2		5		0	-	0%		2				Dinas Kesehatan
86			Jumlah Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan Pustu & Ponkesdes sesuai standart	Ponkesdes & Pu stu/ Sarana	5		2		5		0	-	0%		2		40%		Dinas Kesehatan
87			Jumlah pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	sarana	5		3		5		0	-	0%		3		60%		Dinas Kesehatan
88			Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang terpenuhi aksesnya sesuai standart	PKM	15		10		11		0	-	0%		10		67%		Dinas Kesehatan
89			Jumlah Puskesmas yang melakukan klaribrasi sesuai standart	PKM	20		15		16		0	-	0%		15		75%		Dinas Kesehatan
90			Jumlah kecukupan obat dan Vaksin & BHP di Puskesmas sesuai standart	macam Obat,Vaksin & BHP	125		100		105		0	-	0%		100		80%		Dinas Kesehatan
91		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan yang ODF	desa/kelurahan ber_ODF	120		68	26.900.311.342	75	30.505.182.040	83	39.000.000	111%	0%	75,5	26.939.311.342	63%		Dinas Kesehatan
92			Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (backulitas)	persentase	100,00%		100,00%		93,00%		91,00%	-	97,85%		95,50%		96%		Dinas Kesehatan
93			Jumlah Pos UKK yang dibentuk dan dibina	Pos UKK	80		65		68		69	-	101%		67		84%		Dinas Kesehatan
94			Jumlah kelompok olahraga yang dibentuk	kelompok	120		125		140		19	-	14%		72		60%		Dinas Kesehatan
95			Jumlah Desa STRM	Desa STRM	120		30		40		0	-	0%		30		25%		Dinas Kesehatan
96			Jumlah Puskesmas dengan cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %	Puskesmas	20		8		9		6	-	67%		14		70%		Dinas Kesehatan
97			Jumlah Puskesmas dengan cakupan persalinan nakes di fasyankes yang memenuhi target 100%	Puskesmas	20		10		14		4	-	29%		14		70%		Dinas Kesehatan
98			Jumlah Puskesmas dengan cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir yang memenuhi target 100 %	Puskesmas	20		11		13		8	-	62%		19		95%		Dinas Kesehatan
99			Jumlah Puskesmas dengan cakupan Pelayanan Kesehatan Balita yang memenuhi target > 80 %	Puskesmas	20		11		14		10	-	71%		10,5		53%		Dinas Kesehatan
100			Jumlah Puskesmas dengan cakupan Pelayanan Kesehatan Pada usia Pendidikan Dasar (7-15 th) yang memenuhi target 100%	Puskesmas	20		12		14		0	-	0%		12		60%		Dinas Kesehatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
101			Jumlah Puskesmas dengan cakupan Pelayanan Kesehatan usia lanjut dengan kemandirian A memenuhi target > 70 %	Puskesmas	20		11		12		10	-	83%		10,5		53%		Dinas Kesehatan
102			Jumlah Pelacakan kasus gizi buruk	kasus gizi buruk	20		20		20		0	-	0%		10		50%		Dinas Kesehatan
103			Jumlah sasaran rentan gangguan gizi yang mendapatkan intervensi (Gizi kurang, Gizi Buruk dan Bumil KEK)	gizi buruk dan bumil	Gizi kurang 2825 Gizi Buruk 86 Bumil KEK 1075		Gizi kurang 3911 Gizi Buruk 108 Bumil KEK 1037		Gizi kurang 3911 Gizi Buruk 108 Bumil KEK 1037		0	-							Dinas Kesehatan
104			Jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit menular berbasis bioteknologi	penyakit	370		335		350		128	-	37%		231,5		63%		Dinas Kesehatan
105			Jumlah penderita HIV yang mendapatkan penanganan sesuai standart	penderita HIV	350		250		260		328	-	126%		289		83%		Dinas Kesehatan
106			Jumlah suspek penderita TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standart	penderita TBC	9700		9250		9250		281	-	3%		9531		98%		Dinas Kesehatan
107			Jumlah sasaran masyarakat usia produktif yang mendapatkan layanan skrening faktor risiko PTM	orang	458522		450895		451890		95918	-	21%		546813		119%		Dinas Kesehatan
108			Jumlah Sasaran Masyarakat yang mendapatkan layanan hipertensi (HT) standart	orang	150356		147164		148182		26206	-	18%		86685		58%		Dinas Kesehatan
109			Jumlah Sasaran Masyarakat yang mendapatkan layanan diabetes mellitus (DM) standart	15,22	17732		17386		17476		6616	-	38%		12001		68%		Dinas Kesehatan
110			Jumlah sasaran ODGI berat yang mendapatkan layanan standart	ODGI	1340		1310		1320		424	-	32%		867		65%		Dinas Kesehatan
111			Jumlah Puskesmas dengan cakupan investigasi (PE/penyelidikan Epidemiologi) > 90%	Puskesmas	20		20		20		20	-	100%		20		100%		Dinas Kesehatan
112			Jumlah Puskesmas yang mencapai Imunisasi Dasar Lengkap sesuai target	Puskesmas	14		4		6		0	-	0%		4		29%		Dinas Kesehatan
113			Jumlah Penduduk yang terlayani Program Sehat	penduduk	149000		153109		153109		1983	-	1%		77546		52%		Dinas Kesehatan
114			Jumlah masyarakat yang preminya dibayarkan pemerintah daerah yang sesuai standar	orang	24700		23317		23500		29534	-	126%		26425,5		107%		Dinas Kesehatan
115			Jumlah Puskesmas yang menyerap anggaran BOK > 90%	Puskesmas	20		20		20		0	-	0%		20		100%		Dinas Kesehatan
116			Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standart	Puskesmas	20		12		14		0	-	0%		12		60%		Dinas Kesehatan
117			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Intervensi Keluarga Sehat	Puskesmas	15		10		10		0	-	0%		10		67%		Dinas Kesehatan
118			Jumlah jaringan Puskesmas yang standar dan menerapkan strategi pergi berdansa di masa pandemi	jaringan	127		110		112		0	-	0%		110		87%		Dinas Kesehatan
119			Jumlah Puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standart	PKM	12		4		4		2	-	50%		6		50%		Dinas Kesehatan
120			Jumlah kasus gawat darurat yang telah di tangani PSC	kasus	60		10		20		6	-	30%		16		27%		Dinas Kesehatan
121			Jumlah Puskesmas yang menangani krisis bencana sesuai standart	PKM	20		20		20		0	-	0%		20		100%		Dinas Kesehatan
122			Jumlah Puskesmas yang telah mengikuti reaktidasi dengan nilai 100%	PKM	17		9		9		0	-	0%		9		53%		Dinas Kesehatan
123			Jumlah puskesmas dengan nilai > 90%	PKM	6		2		2		2	-	100%		4		67%		Dinas Kesehatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
124			Jumlah RS yang telah mengikuti rekrutasi dengan nilai ~~padipurna~~	RS	6		4		4		0	-	0%		4		67%		Dinas Kesehatan
125		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Puskesmas yang telah menyusun& melaporan data profil dan SPM kesehatan ~~sesuai standar~~	PKM	20		15	924.583.530	13	821.692.710	0	-	0%	0%	15	924.583.530	75%		Dinas Kesehatan
126			Jumlah Puskesmas yang sudah mengemplementasikan SI Messem sesuai dengan ~~standar~~	PKM	20		20		20		0	-	0%		20		100%		Dinas Kesehatan
127		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat ~~Daerah Kabupaten/Kota~~	Jumlah kasus rujukan yang dirujuk ke fasilitas keshatan lanjutan yang sesuai dengan ~~standar~~	kasus	40895		25392	564.470.930	27932	185.000.000	0	2.000.000	0%	1%	25392	566.470.930	62%		Dinas Kesehatan
Rata-Rata capaian kinerja (%)																71%		0%	
Predikat Kinerja																S		SR	
128	01.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai ~~standar~~	persentase	100,00%	24.523.197.886	75,00%	8.329.357.430	80,00%	3.005.420.000	75,00%	24.000.000	93,75%	0,80%	75,00%	8.353.357.430	75%	34%	Dinas Kesehatan
129			Prosentase Rumah Sakit dengan ketersediaan tenaga dokter spesialis sesuai standar	persentase	100,00%		80,00%		83,00%	24.220.000	50,00%	-	60,24%	0,00%	65,00%		65%		Dinas Kesehatan
130		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah ~~Kabupaten/Kota~~	Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan	PKM	20		10	8.286.054.410	15	2.881.200.000	15	24.000.000	100%	1%	25	8.310.054.410	125%		Dinas Kesehatan
131			Jumlah Rumah Sakit yang memiliki ketersediaan dokter ~~spesialis sesuai standar~~	Rumah Sakit	6		4		4		2	-	50%		6		100%		Dinas Kesehatan
132			Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDM ~~Kesehatan~~	PKM	20 PKM		20		20		20	-	100%		40				Dinas Kesehatan
133		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya ~~Manusia~~	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan	orang	434			43.303.020	223	100.000.000	22	-	10%	0%		43.303.020			Dinas Kesehatan
Rata-Rata capaian kinerja (%)																58%		0%	
Predikat Kinerja																R		SR	
134	01.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan ~~Minuman~~	Prosentase PIRT yang mendapatkan ijin PIRT	persentase	75,00%	3.621.240.244	50,00%	42.268.935	55,00%	77.000.000	1700,00%	-	3090,91%	0,00%	1750,00%	42.268.935	2333%	1%	Dinas Kesehatan
135		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat ~~Tradisional (UMOT)~~	Jumlah PIRT yang mendapat sertifikat PIRT	PIRT	55		30	7.886.325	35	20.000.000	30	-	86%	0%	60	7.886.325	109%		Dinas Kesehatan
136		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu ~~dan~~	Jumlah PIRT yang mendapat sertifikat PIRT	PIRT							0	-							Dinas Kesehatan
137		Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang mendapat sertifikat PIRT	PIRT							0	-							Dinas Kesehatan
138		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri	Jumlah sampel yang diperiksa tidak mengandung bahan tidak diperbolehkan dalam makanan (BTP)	sampel				34.382.610		45.000.000	0	-		0%		34.382.610			Dinas Kesehatan
139		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah ~~dan~~	Jumlah sampel yang diperiksa tidak mengandung bahan tidak diperbolehkan dalam makanan (BTP)	sampel	75		50		55	12.000.000	0	-	0%	0%	50		67%		Dinas Kesehatan
Rata-Rata capaian kinerja (%)																35%		0%	
Predikat Kinerja																SR		SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
140	01.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	persentase	81% (756)	6.568.155.507	76% (709)	775.142.192	78% (728)	609.593.420	0,00%	-	0,00%	0,00%	775.142.192	12%			Dinas Kesehatan
141		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	Jumlah OPD yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	OPD	8		4	617.473.027	5	317.634.000	0	-	0%	0%	4	617.473.027	50%		Dinas Kesehatan
142		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media yang digunakan dalam pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif dan Preventif Tingkat Kabupaten	Publikasi	3036		3036	45.377.990	3036	100.000.000	0	-	0%	0%	3036	45.377.990	100%		Dinas Kesehatan
143		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	PKM	20		10	112.291.175	12	191.959.420	0	-	0%	0%	10	112.291.175	50%		Dinas Kesehatan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		67%	0%	
															Predikat Kinerja		S	SR	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
2	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									-	-			-	-			Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
3	1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD		1	112.377.657.295	1	38.711.611.495	1	18.472.299.442	0	2.230.340.223	0%	12%	1	40.941.951.718	100%	36%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
144	1.3.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	8	788.078.578	8	102.852.400	8	191.425.850	0	-	0%	0%	8	102.852.400	100%	13%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
145	1.3.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Admin Keuangan Perangkat Daerah	orang	197	90.719.723.007	168	11.404.242.269		14.316.909.570	0	2.073.504.292		14%	168	13.477.746.561	85%	15%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
146	1.3.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0,06					50.000.000	0	-		0%					Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
147	1.3.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Admin Kepegawaian Perangkat Daerah	Stel	271	388.400.835	271	56.812.250			0	-			271	56.812.250	100%	15%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
148	1.3.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Admin Umum Perangkat Daerah	orang		2.675.902.837		246.547.420		417.099.784	0	25.062.000		6%		271.609.420		10%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
149	1.3.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	142	2.044.471.227	6	425.005.000	19	1.676.258.020	0	-	0%	0%	6	425.005.000	4%	21%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
150	1.3.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	orang		3.970.795.417		453.605.341		751.084.470	0	117.454.537		16%		571.059.878		14%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
151	1.3.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	barang		11.201.739.631		845.249.114		1.018.219.348	0	14.319.394		1%		859.568.508		8%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
152	1.3.1.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana	dokumen	1	57.760.600					0	-							Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		32%	11%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
153	01.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Prosentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	persentase	61,04%	94.934.288.704	57,80%	11.160.203.252	58,99%	53.124.579.700	0,00%	198.000.000	0,00%	0,37%	57,80%	11.358.203.252	95%	12%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
154	1.3.2.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	m'	4987,18	28.520.276.790	912	3.886.176.815	3613,7	35.964.830.000	0	-	0%	0%	912	3.886.176.815	18%	14%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
155	1.3.2.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	m'	5736,39	41.225.824.929	215	7.274.026.537	6833,51624	17.159.828.000	0	198.000.000	0%	1%	215	7.472.026.537	4%	18%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
Rata-Rata capaian kinerja (%)																	11%	16%	
Predikat Kinerja																	SR	SR	
156	01.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prosentase rumah tangga yang terlayani akses air minum layak	persentase	83,67%	54.173.981.990	81,97%	6.698.141.624	82,37%	7.655.029.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	81,97%	6.698.141.624	98%	12%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
157	1.3.3.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	m'	79,68	57.025.160.831	35	6.707.090.424	2988	7.655.029.000	0	-	0%	0%	35	6.707.090.424	44%	12%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
Rata-Rata capaian kinerja (%)																	44%	0%	
Predikat Kinerja																	SR	SR	
158	01.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Prosentase rumah tangga yang menggunakan Air Limbah Domestik layak	persentase	80,54%	18.547.730.955	77,90%	1.049.460.000	78,40%	3.298.270.955	0,00%	-	0,00%	0,00%	77,90%	1.049.460.000	97%	6%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
159	1.3.5.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi	unit					510	3.298.270.955	0	-	0%	0%					Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
Rata-Rata capaian kinerja (%)																	0%	0%	
Predikat Kinerja																	SR	SR	
160	01.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Prosentase pembangunan drainase kabupaten dalam kondisi baik	persentase	29,02%	36.073.933.078	28,14%	4.602.918.915	28,30%	1.550.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	28,14%	4.602.918.915	97%	13%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
161	1.3.6.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	m'	17151,25	34.809.285.684		4.593.970.115	2846,9	1.550.000.000	0	-	0%	0%		4.593.970.115		13%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
Rata-Rata capaian kinerja (%)																	0%	0%	
Predikat Kinerja																	SR	SR	
162	01.03.07	Program Kawasan Permukiman	Prosentase jalan lingkungan yang terbangun	persentase	44,23%	5.153.070.452	40,08%	2.391.073.500	40,91%	99.996.952	0,00%	-	0,00%	0,00%	40,08%	2.391.073.500	91%	46%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
163	1.3.7.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Km	3,875	4.859.843.402		2.391.073.500	89,8509183	50.000.000	0	-	0%	0%		2.391.073.500		49%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
Rata-Rata capaian kinerja (%)																	0%	0%	
Predikat Kinerja																	SR	SR	
164	01.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Prosentase Penyelenggaraan bangunan gedung yang ber IMB dan Laik Fungsi	persentase	70,58%	2.605.552.800	11,70%	380.552.800	23,52%	225.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	11,70%	380.552.800	17%	15%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
165	1.3.8.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	bangunan		465.600.000		327.302.800		225.000.000	0	-	0%	0%		327.302.800		70%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
Rata-Rata capaian kinerja (%)																	0%	0%	
Predikat Kinerja																	SR	SR	
166	0,04386574	Program Penyelenggaraan Jalan	Prosentase Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kabupaten dalam kondisi baik	persentase	85,74%	449.627.516.138	77,20%	34.144.424.655	85,14%	254.294.663.000	0,00%	351.750.000	0,00%	0,14%	77,20%	34.496.174.655	90%	8%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
167	1.3.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	meter	85,75	37.957.070.000		34.144.424.655	54034,5591	254.294.663.000	0	351.750.000	0%	0%		34.496.174.655		91%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
168	0,04387731	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Prosentase Pengembangan jasa Konstruksi	persentase	100,00%	1.036.831.400	100,00%	111.831.400	100,00%	25.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	111.831.400	100%	11%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
169	1.3.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	orang		600.000.000		87.264.550			0	-				87.264.550		15%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
170	1.3.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Badan usaha		750.000.000		24.566.850	25	25.000.000	0	-	0%	0%		24.566.850		3%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
171	01.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Wilayah Perencanaan yang telah disusun dokumen Kebijakan Tata Ruang	kabupaten	Wilayah/Kecamatan	16.039.847.020	1 Kabupaten	439.847.020	1 Kabupaten	1.600.000.000	0	-		0%		439.847.020		3%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
172	1.3.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	dokumen	21	31.500.000.000	3	47.569.500	3	1.300.000.000	0	-	0%	0%	3	47.569.500	14%	0%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
173	1.3.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	kali audit	6	4.500.000.000	10	392.277.520	10	300.000.000	0	-	0%	0%	10	392.277.520	167%	9%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
174	1.3.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota									0	-							Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		60%	0%	
															Predikat Kinerja		R	SR	
175	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									0	-							Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
176	01.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase ketersediaan data perumahan dan permukiman rawan bencana	persentase	70,58%	1.386.717.225	11,76%	486.718.150	23,53%	99.999.075	0,00%	-	0,00%	0,00%	11,76%	486.718.150	17%	35%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
177	1.4.2.2.01	Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya data perumahan dan permukiman rawan bencana	dokumen	10	1.000.000.000					0	-							Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		8%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
178	01.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani	persentase	8,88%	8.203.871.000	0,00%	153.871.000	0,00%	50.000.000	0,00%	-		0,00%	0,00%	153.871.000	0%	2%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
179	1.4.3.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah lokasi Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	dokumen	20,96	3.250.000.000			3	99.996.952	0	-	0%	0%					Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
180	1.4.3.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas kawasan kumuh yang ditingkatkan	ha							0	-							Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
181	01.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni menjadi layak huni	persentase	100,00%	72.425.000.000	10,47%	7.560.000.000	20,00%	12.865.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	10,47%	7.560.000.000	10%	10%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
182	1.4.4.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang diperbaiki	unit	2900	49.264.292.111				12.865.000.000	0	-		0%					Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
183	01.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase terpenuhinya PSU perumahan	persentase	100,00%	6.940.388.737	10,00%	4.490.388.837	20 %	449.999.900	0,00%	-	0,00%	0,00%	10,00%	4.490.388.837	10%	65%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan
184	1.4.5.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terpenuhinya PSU di Perumahan	m2	2100	2.281.847.884			2100	449.999.900	0	-	0%	0%					Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan
185	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									0	-							Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan
186	02.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									0	-							Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
187	02.10.02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Presentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	persentase		400.000.000	100,00%		10000,00%	-	0,00%	-	0,00%		100,00%				Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
188	02.10.10	Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah	Capaian Jumlah Bidang lahan milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat	bidang	74 bidang	625.000.000			10 bidang	-	0	-							Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	Satuan Polisi Pamong Praja
2	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									-	-			-	-			Satuan Polisi Pamong Praja
3	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	84,5 (A)	68.268.171.347	82 (A)	10.603.344.509	82,5 (A)	11.308.652.198	0	-		0%		10.603.344.509	16%		Satuan Polisi Pamong Praja
189	1.5.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tertangani	dokumen							0	-							Satuan Polisi Pamong Praja
190	1.5.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	ASN							0	-							Satuan Polisi Pamong Praja
191	1.5.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terkirim	orang	0,06						0	-							Satuan Polisi Pamong Praja
192	1.5.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia								0	-							Satuan Polisi Pamong Praja
193	1.5.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara								0	-							Satuan Polisi Pamong Praja
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
194	01.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Pelanggar Perda yang Ditangani	persentase	80,00%	4.011.478.213	75,00%	873.549.569	76,00%	54.998.600	0,00%	-	0,00%	0,00%	75,00%	873.549.569	94%	22%	Satuan Polisi Pamong Praja
195			Prosentase Kasus Pelanggar Perda Yang Selesaikan	persentase	75,00%		70,00%		71,00%		72,00%	-	101,41%		142,00%		189%		Satuan Polisi Pamong Praja
196	1.5.2.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum daerah Kabupaten/Kota yang tertangani								0	-							Satuan Polisi Pamong Praja
197	1.5.2.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota									0	-							Satuan Polisi Pamong Praja
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		63%	0%	
															Predikat Kinerja		R	SR	
198	01.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Linmas Desa/ Kelurahan yang Terlatih	Desa	15 Desa	1.764.824.923	3 Desa	54.005.000	3 Desa	38.316.000	0	-		0%		54.005.000	3%		Satuan Polisi Pamong Praja

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
199			Jumlah Satgas Linmas Desa/ Kelurahan yang Terlatih	orang	155 Org		31 Org		31 Org		0	-							Satuan Polisi Pamong Praja
200	1.5.3.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terjani								0	-							Satuan Polisi Pamong Praja
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
201	01.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Resptime	persentase	90,00%	667.005.558	80,00%	229.135.250	80,00%	30.999.900	0,00%	-	0,00%	0,00%	80,00%	229.135.250	89%	34%	Satuan Polisi Pamong Praja
202			Prosentase Sarana dan Prasarana Pendukung Pemadam Kebakaran yang Terpenuhi	persentase	85,00%		60,00%		65,00%		70,00%	-	107,69%		130,00%		153%		Satuan Polisi Pamong Praja
203	1.5.4.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota yang tertangani								0	-							Satuan Polisi Pamong Praja
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		76%	0%	
															Predikat Kinerja		T	SR	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									-	-			-	-			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	persentase	100,00%	19.182.871.014	83,26	3.048.014.767	83,66	3.779.796.427	0,00%	540.487.286	0,00%	14,30%	8326,00%	3.588.502.053	8326%	19%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
204	1.5.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan yang di Susun	persentase	100,00%	231.508.500	10000,00%	40.808.100	10000,00%	23.000.000	2000,00%	-	20,00%	0,00%	12000,00%	40.808.100	12000%	18%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
205	1.5.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	persentase	100,00%	13.431.941.836	10000,00%	2.169.281.482	10000,00%	2.830.362.127	2500,00%	390.345.627	25,00%	13,79%	12500,00%	2.559.627.109	12500%	19%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
206	1.5.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase	6,00%	40.000.000	10000,00%		10000,00%		0,00%	-	0,00%		10000,00%		166667%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
207	1.5.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase	100,00%	1.418.171.118	10000,00%	115.883.850	10000,00%	233.655.000	2500,00%	40.467.500	25,00%	17,32%	12500,00%	156.351.350	12500%	11%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
208	1.5.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah	persentase	100,00%	55.000.000	5000,00%	134.750.000	10000,00%	7.675.800	0,00%	-	0,00%	0,00%	5000,00%	134.750.000	5000%	245%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
209	1.5.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	persentase	100,00%	3.151.838.510	10000,00%	475.451.033	10000,00%	561.903.500	2500,00%	86.601.448	25,00%	15,41%	12500,00%	562.052.481	12500%	18%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
210	1.5.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana, Prasarana, dan Aset Dalam kondisi baik	persentase	100,00%	854.411.050	10000,00%	111.840.302	10000,00%	123.200.000	2500,00%	23.072.711	25,00%	18,73%	12500,00%	134.913.013	12500%	16%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		33381%	47%	
															Predikat Kinerja		ST	SR	
211	01.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase capaian peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	persentase	100,00%	13.748.694.139	10000,00%	3.230.524.846	10000,00%	505.816.800	0,00%	-	0,00%	0,00%	10000,00%	3.230.524.846	10000%	23%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
212	1.5.3.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Peserta Sosialisasi rawan Bencana	persentase	100,00%	1.342.388.700	0,00%	2.880.000	10000,00%	40.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	2.880.000	0%	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
213	1.5.3.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Jumlah Desa Tangguh Bencana	persentase	100,00%	7.570.222.267	10000,00%	164.002.280	10000,00%	275.500.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	10000,00%	164.002.280	10000%	2%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
214	1.5.3.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Laporan Kejadian Bencana yang di Tangani	persentase	100,00%	4.006.083.222	10000,00%	3.063.642.566	10000,00%	181.316.800	0,00%	-	0,00%	0,00%	10000,00%	3.063.642.566	10000%	76%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
215	1.5.3.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Lembaga yang Aktif dalam Penanggulangan Bencana	persentase	100,00%	829.999.950	10000,00%		10000,00%	9.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	10000,00%		10000%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		7500%	20%	
															Predikat Kinerja		ST	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	Dinas Sosial
2	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									-	-			-	-			Dinas Sosial
3	1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	90 (A)	31.112.803.152	85 (A)	4.247.753.036	87 (A)	4.668.275.164	0	-		0%		4.247.753.036	14%		Dinas Sosial
216	1.6.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen							0	-							Dinas Sosial
217	1.6.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Laporan							0	-							Dinas Sosial
218	1.6.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	0,06						0	-							Dinas Sosial
219	1.6.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah	Sub Kegiatan							0	-							Dinas Sosial
220	1.6.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	sub kegiatan							0	-							Dinas Sosial
221	1.6.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rekening							0	-							Dinas Sosial
222	1.6.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan							0	-							Dinas Sosial
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
223	01.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang terlatih dalam Validasi Data	persentase	100,00%	2.447.363.670	100,00%	283.732.985	100,00%	249.999.470	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	283.732.985	100%	12%	Dinas Sosial
224			Persentase Peningkatan kualitas Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKKS)	persentase	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	-	100,00%		200,00%		200%		Dinas Sosial
225	1.6.2.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang ditingkatkan Kualitasnya	orang							0	-							Dinas Sosial
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	
															Predikat Kinerja		ST	SR	
226	01.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi yang terlatih sasaran	persentase	100,00%	6.257.776.357	100,00%	352.367.033	100,00%	558.882.700	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	352.367.033	100%	6%	Dinas Sosial
227	1.6.4.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	Jumlah PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial	orang							0	-							Dinas Sosial
228	1.6.4.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial	Jumlah PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat Rehabilitasi Sosial	orang							0	-							Dinas Sosial
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		ST	SR	
229	01.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Verifikasi dan Validasi Data	persentase	100,00%	9.127.781.090	100,00%	62.827.800	100,00%	1.925.823.290	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	62.827.800	100%	1%	Dinas Sosial
230			Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	persentase	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	-	100,00%		200,00%		200%		Dinas Sosial
231	1.6.5.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dan mendapat bantuan sosial	orang							0	-							Dinas Sosial
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	
															Predikat Kinerja		ST	SR	
232	01.06.06	Program Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terdampak	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terdampak	persentase	100,00%	10.497.543.231	100,00%	3.038.051.390	100,00%	1.091.330.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	3.038.051.390	100%	29%	Dinas Sosial

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
233	1.6.6.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat Perlindungan Sosial	orang							0	-							Dinas Sosial
234	1.6.6.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	orang							0	-							Dinas Sosial
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
235	01.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Ketersediaan sarana dan Taman Makam Pahlawan Nasional sesuai standar	persentase	100,00%	403.970.108	100,00%	54.057.708	100,00%	229.912.400	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	54.057.708	100%	13%	Dinas Sosial
236	1.6.7.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	TMP							0	-							Dinas Sosial
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	Dinas Ketenagakerjaan
2	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									-	-			-	-			Dinas Ketenagakerjaan
3	2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	82,50 (A)	22.828.070.168	80,05 (A)	2.985.240.598	80,55 (A)	3.665.036.561	0	502.996.111		14%	3.488.236.709		15%		Dinas Ketenagakerjaan
237	2.7.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	100 dokumen	570.692.490	14 dokumen	96.389.446	14 dokumen	75.661.900	0	-		0%		96.389.446		17%	Dinas Ketenagakerjaan
238	2.7.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	15 dokumen	18.121.521.260	3 dokumen	2.233.589.041	3 dokumen	2.791.274.561	0	351.163.626		13%		2.584.752.667		14%	Dinas Ketenagakerjaan
239	2.7.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis kebutuhan administrasi kepegawaian yang dieneubi	Jenis	0,06	57.000.000	1 jenis	6.650.000	1 jenis	9.502.500	0	-		0%		6.650.000		12%	Dinas Ketenagakerjaan
240	2.7.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis kebutuhan administrasi umum yang dieneubi	Jenis	650 jenis	1.134.408.890	103 jenis	231.090.048	85 jenis	222.279.000	0	89.821.400		40%		320.911.448		28%	Dinas Ketenagakerjaan
241	2.7.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jenis	100 jenis	119.505.328	0 jenis	-	0 jenis	-	0	-				-		0%	Dinas Ketenagakerjaan
242	2.7.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jenis	20 jenis	1.560.000.000	4 jenis	236.829.413	4 jenis	300.093.600	0	46.937.585		16%		283.766.998		18%	Dinas Ketenagakerjaan
243	2.7.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jenis	85 jenis	1.264.942.200	14 jenis	180.692.650	16 jenis	266.225.000	0	15.073.500		6%		195.766.150		15%	Dinas Ketenagakerjaan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	15%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
244	02.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Prosentase perencanaan tenaga kerja daerah yang disusun	persentase	97,5 %	3.834.261.541	95,00%	66.993.852	95,5 %	90.002.400	0,00%	-	0,00%	0,00%	95,00%	66.993.852	97%	2%	Dinas Ketenagakerjaan
245	2.7.2.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang disusun	dokumen	7 dokumen	3.834.261.541	2 dokumen	66.993.852	1 dokumen	90.002.400	0	-		0%		66.993.852		2%	Dinas Ketenagakerjaan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	2%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
246	02.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.Prosentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi 2.Prosentase tenaga kerja terlayih yang siap bekerja	persentase	97,5 %	7.583.088.435	95,00%	1.421.719.250	95,5 %	850.000.000	0,00%	199.043.560	0,00%	23,42%	95,00%	1.620.762.810	97%	21%	Dinas Ketenagakerjaan
247	2.7.3.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja berbasis ketenagakerjaan dan kompetensi	orang	2000 orang	5.814.000.000	236 orang	1.421.719.250	191 orang	850.000.000	0	199.043.560		23%		1.620.762.810		28%	Dinas Ketenagakerjaan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
248	2.7.3.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja yang mengikuti kegiatan produktivitas tingkat daerah kabupaten	orang	1250 orang	1.969.888.435	0 orang	-	0 orang	-	0	-					0%		Dinas Ketenagakerjaan
249	02.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Prosentase pencari kerja yang ditempatkan	persentase	97,5 %	1.537.450.000	97,00%	69.795.000	97,2 %	100.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	97,00%	69.795.000	99%	5%	Dinas Ketenagakerjaan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		99%	5%	
															Predikat Kinerja		ST	SR	
250	2.7.4.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan Informasi Bursa Tenaga Kerja	orang	640 orang	1.537.450.000	90 orang	69.795.000	65 orang	100.000.000	0	-		0%		69.795.000		5%	Dinas Ketenagakerjaan
251	02.07.05	Program Hubungan Industrial	Prosentase kasus ketenagakerjaan yang ditangani	persentase	100 %	1.099.000.000	100,00%	78.653.450	100 %	108.155.000	0,00%	650.000	0,00%	0,60%	100,00%	79.303.450	100%	7%	Dinas Ketenagakerjaan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	
															Predikat Kinerja		ST	SR	
252	3	URUSAN PEMERINTAHAN									0	-							Dinas Ketenagakerjaan
253	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									0	-							Dinas Ketenagakerjaan
254	03.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase calon transmigran yang dilatih	persentase	100 %	924.603.451	100 %	37.110.400	100 %	-	0,00%	-	0,00%			37.110.400		4%	Dinas Ketenagakerjaan
255	3.2.3.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang berhasil dan mampu hidup mandiri	KK	20 KK	924.603.451	3 KK	37.110.400	0 KK	-	0	-				37.110.400		4%	Dinas Ketenagakerjaan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
1	2.7.5.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	165 kasus															Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
2	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									-	-			-	-			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
3	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	Nilai	89 (A)	17.279.083.256	89 (A)	2.562.873.121	89 (A)	5.669.826.495	0,25	748.328.119		13%		3.311.201.240		19%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
256	2.8.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	14	166.695.900	11	27.963.000	11	28.932.961	0	-	0%	0%	11	27.963.000	79%	17%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
257	2.8.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	12	15.268.863.103	12	1.658.120.299	12	4.548.238.523	3	610.728.628	25%	13%	15	2.268.848.927	125%	15%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
258	2.8.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	0,06	533.528.123	12	149.455.660	12	353.163.327	3	9.376.000	25%	3%	15	158.831.660	25000%	30%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
259	2.8.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12	811.266.145	12	628.928.584	12	620.901.684	3	124.957.191	25%	20%	15	753.885.775	125%	93%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
260	2.8.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12	498.729.985	12	98.405.578	12	118.590.000	3	3.266.300	25%	3%	15	101.671.878	125%	20%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		5091%	35%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
															Predikat Kinerja		ST	SR	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
261	02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kelompok dan organisasi Perempuan yang diberdayakan	persentase	68%	2.294.785.984		579.159.386	64,00%	241.381.890	0,00%	4.000.000	0,00%	1,66%		583.159.386		25%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
262	2.8.2.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Pemerintah yang terfasilitasi PUG	Lembaga	288	1.030.984.395	47	86.352.035	60	11.644.760	0	-	0%	0%	47	86.352.035	16%	8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
263	2.8.2.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keterwakilan perempuan di parlemen	Persentase	36%	963.765.269	31%	469.873.351	31%	209.408.130	400,00%	4.000.000	1290,32%	1,91%	431,00%	473.873.351	1197%	49%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
264	2.8.2.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan yang mendapat penguatan PUG	Lembaga	24	300.036.320	4	22.934.000	4	20.329.000	0	-	0%	0%	4	22.934.000	17%	8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		410%	22%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
															Predikat Kinerja		ST	SR	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
265	02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai SOP	persentase	100%	638.869.511		94.253.161	100,00%	184.023.815	0,00%	6.000.000	0,00%	3,26%		100.253.161		16%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
266	2.8.3.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani	Persentase	100,00%	8.499.115	100,00%	14.357.000	100%	40.470.800	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	14.357.000	100%	169%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
267	2.8.3.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	Persentase	100%	133.999.505	100,00%	16.941.211	100%	79.872.970	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	16.941.211	100%	13%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
268	2.8.3.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendapat penguatan dan pengembangan	Lembaga	24	496.370.891	3	62.954.950	2	63.680.045	2	6.000.000	100%	9%	5	68.954.950	21%	14%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		74%	0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
																Predikat Kinerja	S	SR	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
269	02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase terbentuknya Forum Anak Desa/Kelurahan	persentase	70%	1.426.679.607		241.933.003	70,00%	136.439.760	0,00%	6.000.000	0,00%	4,40%		247.933.003		17%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
270	2.8.6.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang mengikuti evaluasi kelembagaan PHA	Lembaga	17	629.568.782	11	86.667.853	48	52.517.800	0	-	0%	0%	11	86.667.853	65%	14%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
271	2.8.6.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan peningkatan kualitas Hidup Anak	Lembaga	17	797.110.825	11	155.265.150	338	83.921.960	3	6.000.000	1%	7%	14	161.265.150	82%	20%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		74%	0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
																Predikat Kinerja	S	SR	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
272	02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase penyediaan layanan pengaduan masyarakat	persentase	100%	249.999.082		129.563.166	100,00%	166.709.701	0,00%	-	0,00%	0,00%		129.563.166		52%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
273	2.8.7.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan/sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	Kegiatan	3	75.000.000	0	-	3	46.879.925	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
274	2.8.7.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan	Persentase	100,00%	119.999.282	100,00%	122.923.166	100%	89.935.486	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	122.923.166	100%	102%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
275	2.8.7.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang mendapat penguatan dan pengembangan	Lembaga	24	54.999.800	3	6.640.000	2	29.894.290	0	-	0%	0%	3	6.640.000	13%	12%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		38%	0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
																Predikat Kinerja	SR	SR	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
276	02.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase penyediaan layanan pengaduan masyarakat	persentase	100,00%	416.272.867	100,00%	129.563.166	100,00%	166.709.701	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	129.563.166	100%	31%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
277	2.8.7.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan	persentase							0,00%	-							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
278	2.8.7.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang mendapat penguatan dan pengembangan	lembaga							0	-							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
																Predikat Kinerja	SR	SR	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
279	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									0	-							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
280	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Penyediaan Data Basis Bangsa Kencana	persentase	100%	226.888.000	100,00%	38.718.800	100,00%	158.195.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	38.718.800	100%	17%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
281	2.14.2.2.01	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten	Gokumen	17	226.888.000	17	38.718.800	17	158.195.000	0	-	0%	0%	17	38.718.800	100%	17%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
															Predikat Kinerja		ST	SR	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
282	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase KB Baru Semua Metode	persentase	100%	46.485.962.274	79,38%	4.167.747.851	100,00%	4.157.895.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	79,38%	4.167.747.851	79%	9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
283			Persentase KB Baru MKJP	Persentase	8%		8,52%		7,50%		0,00%	-	0,00%		8,52%		107%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
284	2.14.3.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS yang terpapar informasi program bangga kencana	Orang	3798	9.232.209.080	3570	1.111.156.177	1743	1.093.715.000	0	125.390.000	0%	11%	3570	1.236.546.177	94%	13%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
285	2.14.3.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB dan IMP	Orang	1350	4.204.500.000	1024	663.600.000	1225	693.900.000	0	-	0%	0%	1024	663.600.000	76%	16%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
286	2.14.3.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Orang	3922	27.706.543.132	3312	1.719.181.674	1216	1.714.780.000	0	-	0%	0%	3312	1.719.181.674	84%	6%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
287	2.14.3.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah peserta pemberdayaan dan peningkatan kemasyarakatan dalam pembinaan Kesertaan Ber-KB	Orang	2096	5.342.710.062	1534	673.810.000	1976	655.500.000	0	-	0%	0%	1534	673.810.000	73%	13%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		87%	0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
															Predikat Kinerja		T	SR	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
288	2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase PUS anggota kelompok pembangunan keluarga yang Menjadi Peserta KB Aktif	persentase	89%	5.567.414.568	80,72%	710.324.300	84,00%	3.274.756.168	0,00%	-	0,00%	0,00%	80,72%	710.324.300	91%	13%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
289	2.14.4.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orang	3542	5.567.414.568	1	710.324.300	1647	3.274.756.168	0	-	0%	0%	1	710.324.300	0%	13%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
																Predikat Kinerja	SR	SR	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									-	-	-	-	-	-			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									0	-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
290	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									0	-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
291	2.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	83.2 (A)	76.946.379.762	80,7 (A)	12.414.715.032	81.2 (A)	13.256.912.116	0	2.071.278.635		16%		14.485.993.667		19%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
292	3.27.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	dokumen	0,06	1.204.465.886	30 Dokumen	215.455.077	7 Dokumen	272.871.305	0	21.594.000		8%		237.049.077		20%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
293	3.27.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun	laporan	624 Orang	65.678.535.178	986 Orang	9.070.455.879	130 Orang	12.351.022.915	0	1.769.689.957		14%		10.840.145.836		17%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
294	3.27.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Yang Disediakan	Stel	1000 Stel	254.429.336	1000 Stel	36.450.000	200 Stel	37.296.600	0	-		0%		36.450.000		14%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
295	3.27.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pendukung Administrasi Umum Perangkat daerah yang disediakan	Unit	1686 Unit	2.560.846.402	636 Unit	344.269.866	281 Unit	428.113.175	0	47.184.450		11%		391.454.316		15%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
296	3.27.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rekening yang Dibayarkan	Rekening	204 Rekening	4.843.630.798	40 Rekening	706.608.891	34 Rekening	1.010.989.800	0	184.003.828		18%		890.612.719		18%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
297	3.27.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara dengan Baik	Unit	42 Unit	1.834.533.412	42 Unit	456.322.600	15 Unit	1.052.285.610	0	40.954.400		4%		497.277.000		27%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	16%	
																Predikat Kinerja	SR	SR	
298	2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai							0	-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
299	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	5 Laporan	11.646.800	1 Laporan	1.646.800	1 Laporan	1.000.000	0	-		0%		1.646.800		14%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
300	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara dengan Baik	Unit	53 Unit	807.988.755	12 Unit	77.579.500	2 Unit	33.249.800	0	7.852.000		24%		85.431.500		11%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	12%	
																Predikat Kinerja	SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
301	02.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita		1	2.869.119.880	95	640.808.030	0,95	357.662.370	0	-	0%	0%	95	640.808.030	9500%	22%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
302			Jumlah Tingkat Konsumsi Energi	kkal/kap/hari	2.150		2.154,09		2.154		0	-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
303			Jumlah Tingkat Konsumsi Protein	gram/kap/hari	57		61,43		61		0	-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
304			Jumlah cadangan pangan daerah	ton	115 Ton		15 Ton		35 Ton		0	-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
305			Prosentase koefisien keragaman harga bahan pangan strategis tingkat kecamatan	persen	12,18 %		13,29 %		13,02 %		0	-	0%		0,1329		109%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
306	2.9.3.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Jenis	11 Jenis	1.351.598.991	11 Jenis	178.934.930	11 Jenis	140.003.200	0	-	0%		178.934.930		13%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
307	2.9.3.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan/stok cadangan pangan daerah yang tersedia	ton	40 Ton	1.227.893.510	-		-		0	-			-		0%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
308	2.9.3.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah jenis bahan pangan yang dianalisa	Jenis bahan pangan	9 Jenis Bahan Pangan	3.403.359.029	9 Jenis Bahan Pangan	441.903.100	9 Jenis Bahan Pangan	217.659.170	0	-	0%		441.903.100		13%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		16%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
309	02.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase daerah rawan pangan yang tertangani	persentase	64,55%	393.939.720	61,76%	123.356.920	62,50%	54.116.560	0,00%	-	0,00%	0,00%	61,76%	123.356.920	96%	31%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
310	2.9.4.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Jenis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	desa	89 Desa	68.541.000	89 Desa	123.356.920	86 Desa	54.116.560	0	-	0%		123.356.920		180%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
311	2.9.4.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa rawan pangan yang tertangani	Dokumen	1	1.089.385.820					0	-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
312	02.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase capaian keamanan pangan segar	persen	0,95	528.848.950	1	85.796.450	0,95	56.610.500	0	-	0%	0%	1	85.796.450	105%	16%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
313	2.9.5.2.02	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahan pangan segar yang diujikan	Sampel Bahan Pangan Segar	60 Sampel Bahan Pangan Segar	852.153.080	60 Sampel Bahan Pangan Segar	85.796.450	35 sampel	56.610.500	0	-	0%		85.796.450		10%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
314	03.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase sarana pertanian yang dimanfaatkan	persen	1	78.945.875.626	1	13.294.656.336	1	18.139.681.367	0	-	0%	0%	1	13.294.656.336	100%	17%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
315	3.27.2.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang dilaksanakan	Dokumen	85 Dokumen	78.945.875.626	17 Dokumen	13.294.656.336	17 Dokumen	18.139.681.367	0	-	0%		13.294.656.336		17%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
316	03.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	persen	1	63.818.771.876	1	12.830.545.282	1	10.645.436.506	0	-	0%	0%	1	12.830.545.282	100%	20%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
317	3.27.3.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian yang dilaksanakan	Dokumen	40 Dokumen	6.466.175.285	8 Dokumen	1.454.091.525	8 Dokumen	1.045.121.406	0	-	0%		1.454.091.525		22%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
318	3.27.3.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Dokumen	15 Dokumen	57.352.596.591	12 Dokumen	11.376.453.757	3 Dokumen	8.701.348.000	0	-	0%		11.376.453.757		20%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
319	3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase Bencana Pertanian tertangani dan terkendali	persentase	100,00%	1.396.254.530	100,00%	162.381.175	100,00%	66.496.538	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	162.381.175	100%	12%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
320	3.27.5.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengendalian yang Disediakan	Hektar	250 Hektar	1.396.254.530	50 Hektar	162.381.175	50 Hektar	66.496.538	0	-	0%		162.381.175		12%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
321	3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase Fasilitas penerbitan izin usaha pertanian	persentase	100,00%	200.000.000	100,00%	-	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	-	100%	0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
322	03.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase kelompok tani yang melakukan pola usaha pertanian	persentase	59,00%	8.398.728.524	9,83%	763.745.364	20,00%	661.151.379	0,00%	8.523.730	0,00%	1,29%	9,83%	772.269.094	17%	9%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
323	8.1.6.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Kebalik Sosial	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Kebalik Sosial	orang	600 Orang	8.398.728.524	54 Orang	763.745.364	90 Orang	661.151.379	0	8.523.730		1%		772.269.094		9%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	Dinas Lingkungan Hidup
2	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									-	-			-	-			Dinas Lingkungan Hidup
3	2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	84 (A)	121.421.375.934	86.29 (A)	16.707.130.572	84 (A)	23.860.095.705	0	-		0%		16.707.130.572		14%	Dinas Lingkungan Hidup
324	2.11.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan benar dan tepat waktu	persentase							0,00%	-							Dinas Lingkungan Hidup
325	2.11.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu	persentase							0,00%	-							Dinas Lingkungan Hidup
326	2.11.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan administrasi barang yang disusun dengan benar dan tepat waktu	persentase	6,00%						0,00%	-							Dinas Lingkungan Hidup
327	2.11.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase peningkatan administrasi kepegawaian PD yang dilaksanakan	persentase							0,00%	-							Dinas Lingkungan Hidup
328	2.11.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Umum	persentase							0,00%	-							Dinas Lingkungan Hidup
329	2.11.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah	persentase							0,00%	-							Dinas Lingkungan Hidup
330	2.11.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran	persentase							0,00%	-							Dinas Lingkungan Hidup
331	2.11.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah	persentase							0,00%	-							Dinas Lingkungan Hidup
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
332	02.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup yang dijadikan dasar penyusunan kebijakan bidang lingkungan hidup	dokumen	27 Dokumen	1.884.962.455	119 Dokumen	1.036.264.795	1 Dokumen	303.250.920	0	-		0%		1.036.264.795		55%	Dinas Lingkungan Hidup
333	2.11.2.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan LH dan Peraturan Perundangan yang disusun	dokumen							0	-							Dinas Lingkungan Hidup
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
334	02.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase jumlah sungai yang memenuhi peruntukan Kelas II di wilayah Kabupaten Situbondo dari 14 sungai yang ditetapkan dalam Pergub Jatim Nomor 32 Tahun 2013 dengan peruntukan Kelas II (%)	persentase	50,00%	16.033.456.028	78,57%	2.653.229.323	50,00%	2.284.270.417	0,00%	-	0,00%	0,00%	78,57%	2.653.229.323	157%	17%	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
335			Rata Rata Presentase Penurunan Konsentrasi Sumber Pencemaran Udara Ambient (untuk parameter SO2 dan NO2) Wilayah Kab. Situbondo	persentase	0,50%		0,30%		0,30%		0,30%	-	100,00%		0,60%		120%		Dinas Lingkungan Hidup
336			Jumlah Laboratorium uji untuk parameter lingkungan yang telah terakreditasi KAN atau teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan (Kecamatan)	lab							0	-							Dinas Lingkungan Hidup
337	2.11.3.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Segmen Badan Air Sungai Yang Memenuhi Peruntukan Kelas II (Segmen Sungai)								0	-							Dinas Lingkungan Hidup
338			Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara Ambient di kawasan permukiman, industri, komersial dan transportasi yang mengalami peningkatan kualitas udaranya (parameter	titik							0	-							Dinas Lingkungan Hidup
339			Jumlah Kawasan/ Wilayah/Daerah yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan Reklamasi	lokasi							0	-							Dinas Lingkungan Hidup
340			Jumlah parameter lingkungan yang dapat diuji di Laboratorium DLH (parameter)	parameter							0	-							Dinas Lingkungan Hidup
341	2.11.3.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kg beban BOD yang dapat diturunkan per tahun	kg							0	-							Dinas Lingkungan Hidup
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		17%	0%	
342	02.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Penambahan Luasan Tutupan Vegetasi di luar kawasan hutan (hektar)	Ha	30 Ha	6.635.693.932	5 Ha	732.354.021	5 Ha	1.097.592.087	0	-		0%	Predikat Kinerja		SR	SR	Dinas Lingkungan Hidup
343			Jumlah Kawasan Konservasi Lingkungan Hidup Yang dikelola (lokasi)	Lokasi	2 Lokasi		1 Lokasi		1 Lokasi		0	-							Dinas Lingkungan Hidup
344	2.11.4.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penambahan Luasan Tutupan Vegetasi Non Pesisir di Luar Kawasan Hutan (hektar)	Ha							0	-							Dinas Lingkungan Hidup
345			Penambahan Luasan Tutupan Vegetasi Pesisir di Kabupaten Situbondo) (Hektar)	Ha							0	-							Dinas Lingkungan Hidup
346			Jumlah Lokasi RTH yang dikelola (lokasi)	lokasi							0	-							Dinas Lingkungan Hidup
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
347	02.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3)	Prosentase Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan monitoring dan evaluasi	persentase	35,00%	249.999.070	22,00%		25,00%	49.999.070	0,00%	-	0,00%	0,00%	22,00%	Predikat Kinerja		63%	Dinas Lingkungan Hidup
348	2.11.5.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									0	-							Dinas Lingkungan Hidup
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
349	02.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	Prosentase pemberian rekomendasi perijinan teknis terhadap pelaku usaha yang mengajukan rekomendasi.	persentase	100,00%	455.352.465	100,00%	62.799.715	100,00%	44.212.750	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	Predikat Kinerja		100%	Dinas Lingkungan Hidup
350			Prosentase pelaku usaha yang mentaati komitmen sebagaimana tertuang dalam dokumen lingkungan UKL-UPL/	persentase	20,00%		10,00%		10,00%		10,00%	-	100,00%		20,00%		100%		Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
362	2.12.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai perangkat daerah	orang	0,06						0		-						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
363	2.12.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan								0		-						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
364	2.12.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0		-						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
365	2.12.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0		-						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
366	2.12.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara								0		-						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
																	Rata-Rata capaian kinerja (%)	0%	0%		
																		Predikat Kinerja SR	SR		
367	02.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Prosentase kartu keluarga yang diterbitkan	persentase	100,00%	10.902.177.634	100,00%	12.332.500	100,00%	131.304.420	0,00%		-	0,00%	0,00%	100,00%	12.332.500	100%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
368			Prosentase wajib KTP el yang melakukan perekaman	persentase	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		-	100,00%		200,00%		200%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
369			Prosentase kartu identitas anak (KIA) yang dicetak	persentase	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		-	100,00%		200,00%		200%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
370	2.12.2.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pemohon KK	orang							0		-						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
371			Jumlah pemohon KTP el	orang							0		-						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
372			Jumlah pemohon KIA	orang							0		-						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
373	2.12.2.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk									0		-						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
																		Rata-Rata capaian kinerja (%)	67%	0%	
																			Predikat Kinerja S	SR	
374	02.12.03	Program Pencatatan Sipil	Prosentase Akta Kelahiran yang diterbitkan	persentase	100,00%	2.114.524.370	100,00%	12.075.000	100,00%	152.449.370	0,00%		-	0,00%	0,00%	100,00%	12.075.000	100%	1%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
375			Prosentase penduduk yang memiliki Akta Kematian	persentase	80,00%		70,00%		72,00%		74,00%		-	102,78%		144,00%		180%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
376	2.12.3.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pemohon yang mengurus dokumen pencatatan sipil	dokumen							0		-						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
																		Rata-Rata capaian kinerja (%)	90%	0%	
																			Predikat Kinerja T	SR	
377	02.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase pelaporan data SIAK yang sesuai pedoman dan batas waktu	persentase	100,00%	2.972.250.059	100,00%	21.508.345	100,00%	187.548.390	0,00%		-	0,00%	0,00%	100,00%	21.508.345	100%	1%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
378			Prosentase OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	persentase	45,00%		20,00%		25,00%		30,00%		-	120,00%		50,00%		111%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
379			Prosentase pemutakhiran data penduduk	persentase	50,00%		25,00%		30,00%		35,00%		-	116,67%		60,00%		120%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
380	2.12.4.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan									0		-						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
381	2.12.4.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									0		-						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
382	2.12.4.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								0		-						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
																		Rata-Rata capaian kinerja (%)	46%	0%	
																			Predikat Kinerja SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
383	02.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Prosentase data perkembangan kependudukan	persentase	100,00%	919.659.187	100,00%	-	100,00%	13.299.700	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	-	100%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
384	2.12.5.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan									0	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									-	-			-	-			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
3	2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	90,0 (A)	20.490.840.253	88,0 (A)	2.821.416.135	88,25 (A)	3.502.857.549	0	546.870.077		16%		3.368.286.212		16%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
385	2.13.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen	84	305.518.355	14	42.302.380	14	51.149.500	14	9.200.000	100%	18%	28	51.502.380	33%	17%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
386	2.13.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	laporan	36	16.091.798.049	6	2.463.148.204	6	2.465.568.382	6	378.215.492	100%	15%	12	2.841.363.696	33%	18%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
387	2.13.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	sub kegiatan	0,06	44.983.450	1	7.227.000	1	7.920.000	1	-	100%	0%	2	7.227.000	3333%	16%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
388	2.13.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan penyediaan jasa administrasi umum yang tersedia	sub kegiatan	36	1.126.343.542	6	191.122.540	6	178.424.800	6	42.976.100	100%	24%	12	234.098.640	33%	21%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
389	2.13.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	18	849.211.060	3	175.975.060	3	88.271.000	0	-	0%	0%	3	175.975.060	17%	21%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
390	2.13.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	18	2.003.161.422	3	320.563.305	3	439.905.300	3	77.025.985	100%	18%	6	397.589.290	33%	20%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
391	2.13.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	24	1.649.470.525	4	213.979.825	4	271.618.567	4	39.452.500	100%	15%	8	253.432.325	33%	15%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		502%	18%	
															Predikat Kinerja		ST	SR	
392	02.13.02	Program Penataan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tertib penyelenggaraan pemerintahan desa, optimalisasi layanan	Desa	1	2.685.273.544	-	-	100	700.000.000	0	-	0%	0%					Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
393	2.13.2.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan penataan	desa	4	2.685.273.544	-	-	1	700.000.000	0	-	0%	0%					Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
394	02.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Desa yang ditindaklanjuti	persentase	100	194.999.650	10000,00%	104.969.600	10000,00%	60.000.000	0,00%	17.237.080	0,00%	28,73%	10000,00%	122.206.680	100%	63%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
395	2.13.3.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah kelompok Kerjasama desa	kelompok	114 Desa	194.999.650	114	104.969.600	114	60.000.000	0	17.237.080	0%	29%	114	122.206.680		63%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
396	02.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tertib administrasi desa dan pelayanan masyarakat	persentase	10000,00%	4.690.649.760	10000,00%	1.065.181.905	100,00%	4.101.958.480	0,00%	400.792.720	0,00%	9,77%	10000,00%	1.465.974.625	100%	31%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
397			Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	persentase	10000,00%	10.462.728.581					0,00%	-							Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
398	2.13.4.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa	desa	132	15.153.378.341	132	1.065.181.905	132	4.101.958.480	132	400.792.720	100%	10%	264	1.465.974.625	200%	10%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	
															Predikat Kinerja		ST	SR	
399	02.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat	persentase	100	8.924.856.677	10000,00%	780.875.300	10000,00%	1.455.370.824	10000,00%	90.180.700	100,00%	6,20%	20000,00%	871.056.000	200%	10%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
400	2.13.5.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan desa yang mampu meningkatkan kinerja pemberdayaan masyarakat.	lembaga	136	8.924.856.677	136	780.875.300	136	1.455.370.824	136	90.180.700	100%	6%	272	871.056.000	200%	10%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		200%	0%	
															Predikat Kinerja		ST	SR	
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	Dinas Perhubungan
2	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									-	-			-	-			Dinas Perhubungan
3	2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	persentase	100,00%	123.753.178.373	100,00%	7.380.121.489	100,00%	24.206.694.487	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	7.380.121.489	100%	6%	Dinas Perhubungan
401	2.15.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persentase	100,00%	84.811.000	100,00%	84.811.000	0,00%		0,00%	-			100,00%	84.811.000	100%	100%	Dinas Perhubungan
402	2.15.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase	100,00%	7.678.883.968	100,00%	5.460.450.529	45,00%	2.218.433.439	25,50%	940.470.326	56,67%	42,39%	125,50%	6.400.920.855	126%	83%	Dinas Perhubungan
403	2.15.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase	6,00%	3.249.600	100,00%	3.249.600	0,00%		0,00%	-			100,00%	3.249.600	1667%	100%	Dinas Perhubungan
404	2.15.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase	100,00%	78.793.000	100,00%	78.793.000	0,00%		0,00%	-			100,00%	78.793.000	100%	100%	Dinas Perhubungan
405	2.15.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase	100,00%	553.014.533	100,00%	420.581.723	72,50%	132.432.810	73,00%	29.633.556	100,69%	22,38%	173,00%	450.215.279	173%	81%	Dinas Perhubungan
406	2.15.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase	100,00%	300.360.000	100,00%	300.360.000	0,00%		0,00%	-			100,00%	300.360.000	100%	100%	Dinas Perhubungan
407	2.15.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase	100,00%	7.677.463.309	100,00%	548.897.215	80,50%	7.128.566.094	30,00%	4.174.201.559	37,27%	58,56%	130,00%	4.723.098.774	130%	62%	Dinas Perhubungan
408	2.15.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase	100,00%	641.800.351	100,00%	482.978.422	40,00%	158.821.929	40,00%	69.631.202	100,00%	43,84%	140,00%	552.609.624	140%	86%	Dinas Perhubungan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		317%	89%	Dinas Perhubungan
															Predikat Kinerja		ST	T	Dinas Perhubungan
409	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	persentase	5,75%	49.438.378.511	5,11%	9.093.015.082	5,11%	4.539.827.724	0,00%	-	0,00%	0,00%	5,11%	9.093.015.082	89%	18%	Dinas Perhubungan
410	2.15.2.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana induk LLAJ yang disusun	dokumen	1	2.806.000	0	2.806.000	0		0	-			0	2.806.000	0%	100%	Dinas Perhubungan
411	2.15.2.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perlengkapan jalan	jenis	5	5.417.016.439	1	5.390.719.089	0,1	26.297.350	0,1	-	100%	0%	1,1	5.390.719.089	22%	100%	Dinas Perhubungan
412	2.15.2.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Yang Dikelola	terminal	1	820.823.467	1	820.823.467	0		0	-			1	820.823.467	100%	100%	Dinas Perhubungan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
413	2.15.2.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Peningkatan Pendapatan Parkir	persentase	1,47%	1.998.982.425	100,00%	1.727.657.375	80,00%	271.325.050	9,12%	35.450.575	11,40%	13,07%	109,12%	1.763.107.950	7423%	88%	Dinas Perhubungan
414	2.15.2.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Angkutan Umum Yang Lulus Uji	persentase	93,33%	487.279.440	100,00%	487.279.440	0,00%	-	0,00%	-	-	-	100,00%	487.279.440	107%	100%	Dinas Perhubungan
415	2.15.2.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan manajemen rekayasa dan pengamanan lalu lintas yang disusun	dokumen	2	541.789.711	1	538.279.711	0,1	3.510.000	0,1	-	100%	0%	1,1	538.279.711	55%	99%	Dinas Perhubungan
416	2.15.2.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Andalalin	Dokumen	1	-	1	-	0	-	0	-	-	-	1	-	100%	-	Dinas Perhubungan
417	2.15.2.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan di Jalan	Persentase Ketertiban LLAI	persentase	56,00%	125.450.000	100,00%	125.450.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	100,00%	125.450.000	179%	100%	Dinas Perhubungan
418	2.15.2.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum Yang Tersedia	Kendaraan	6715	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0%	-	Dinas Perhubungan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		887%	76%	Dinas Perhubungan
															Predikat Kinerja		ST	T	Dinas Perhubungan
419	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Prosentase pelayanan angkutan laut	persentase	100,00%	28.498.202.292	70,00%	1.979.667.602	70,00%	7.235.499.028	0,00%	-	0,00%	0,00%	70,00%	1.979.667.602	70%	7%	Dinas Perhubungan
420	2.15.3.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Bermisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Kapal Pelra Pemerintah yang dikelola	armada	2	166.520.550	1	160.520.550	0,4	6.000.000	0,1875	6.000.000	47%	100%	1,1875	166.520.550	59%	100%	Dinas Perhubungan
421	2.15.3.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan	Jumlah fasilitas Pelabuhan Yang Terbangun	fasilitas	3	3.853.307.562	1	1.819.147.052	0,1	2.034.160.510	0,2826	2.034.160.510	283%	100%	1,2826	3.853.307.562	43%	100%	Dinas Perhubungan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		51%	0%	Dinas Perhubungan
															Predikat Kinerja		R	SR	Dinas Perhubungan
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
2	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									-	-			-	-			Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
3	2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai SAKIP OPD	persentase	100,00%	42.959.112.974	9913,00%	8.858.600.052	10000,00%	9.953.037.451	0,00%	-	0,00%	0,00%	9913,00%	8.858.600.052	9913%	21%	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
422	2.16.1.2.01	Pencapaian Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
423	2.16.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan Administrasi Keuangan	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
424	2.16.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perencanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase	6,00%						0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
425	2.16.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perencanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
426	2.16.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
427	2.16.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
428	2.16.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
429	2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Pelayanan penyediaan Informasi Publik	persentase	100,00%	3.505.071.680	41,67%	1.180.815.760	45,00%	700.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	41,67%	1.180.815.760	42%	34%	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
430			Persentase Kualitas Informasi Publik	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
431			Prosentase Akses Informasi	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
432			Prosentase Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Informasi yang Dibagikan	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
433	2.16.2.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
434			Persentase Informasi yang disebarluaskan melalui Komunitas Masyarakat/Mitra strategis pemerintah daerah	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
435			Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
436			Jumlah Informasi yang dibangun Pemerintah Daerah								0	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
437	2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	persentase	100,00%	5.090.242.806	100,00%	397.077.676	100,00%	60.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	397.077.676	100%	8%	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
438			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persentase	100,00%	-	100,00%	-	75,00%	-	80,00%	-	106,67%	-	180,00%	-	180%	-	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
439	2.16.3.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
440			Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
441			Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
442			Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
443			Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
444			Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
445			Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
446			Persentase data yang dapat berbagi pakai	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
447	2.16.3.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
448			Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
449			Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah								0	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
450			Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
451			Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
452			Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
453			Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
454			Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
455			Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
456			Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government								0	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		9%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
457	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									0	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
458	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan dan Evaluasi pembangunan Daerah	persentase	100,00%	356.596.792	81,00%	60.996.600	81,00%	3.600.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	81,00%	60.996.600	81%	17%	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
459	2.20.2.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									0	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		41%	17%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
460	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									0	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
461	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Aplikasi,Data dan informasi daerah yang diamankan (Radiogram,Aplikasi dan Website Layanan Publik, Dokumen dengan sertifikat	persentase	100,00%	200.282.250	100,00%	20.692.050	100,00%	50.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	20.692.050	100%	10%	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
462			Persentase Dokumen dengan sertifikat Elektronik yang diamankan	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
463			Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip prinsip manajemen keamanan informasi	persentase	100,00%	-	100,00%		100,00%		100,00%	-	100,00%		200,00%		200%		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
464			Persentase Sistem elektronik / asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	persentase	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	-	100,00%		200,00%		200%		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
465	2.21.2.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi (radiogram) yang diamankan	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
466			Persentase Aplikasi dan Website Layanan Publik yang diamankan	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
467			Dokumen dengan sertifikat Elektronik yang diamankan	sertifikat							0	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
468	2.21.2.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik pada PHKS (Pola Hubungan Komunikasi Sandi) yang diamankan	persentase							0,00%	-							Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		63%	0%	
															Predikat Kinerja		R	SR	
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									-	-			-	-			Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
3	2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	87 (A)	74.449.350.744	87 (A)	12.904.814.369	87 (A)	12.077.200.730	0	-		0%		12.904.814.369		17%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
469	2.17.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen							0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
470	2.17.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi keuangan daerah yang dilaksanakan								0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
471	2.17.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi kepegawaian yang dilaksanakan		0,06						0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
472	2.17.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis administrasi umum yang dilaksanakan								0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
473	2.17.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah peninjang urusan Pemerintah daerah								0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
474	2.17.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia								0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
475	2.17.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan								0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
476	02.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi	persentase	5,00%	200.000.000			4,00%		0,00%	-	0,00%						Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
477	02.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	persentase	69,23%	671.962.550	11,54%	66.924.550	23,10%	-	0,00%	-	0,00%		11,54%	66.924.550	17%	10%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
478	2.17.3.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pemeriksaan dan pengawasan	koperasi							0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
479	04.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP sehat	persentase	52,00%	746.161.854	42,00%	37.595.600	44,00%	51.686.650	0,00%	-	0,00%	0,00%	42,00%	37.595.600	81%	5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
480	2.17.4.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya dan mendapatkan penghargaan	KSP/USP							0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
481	05.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang difasilitasi pendidikan dan latihan perkoperasian	persentase	33,20%	3.098.516.770	21,00%	706.391.770	22,00%	404.200.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	21,00%	706.391.770	63%	23%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
482	2.17.5.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus/anggota koperasi yang memperoleh pendidikan dan latihan perkoperasian	pengurus/ anggota							0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
483	2.17.5.2.02	Pendidikan Dan Pelatihan SDM Usaha Mikro Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Mikro yang memperoleh pendidikan dan latihan	pelaku usaha							0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
484	2.17.5.2.02	Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota									0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
485	06.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	capaian rata2 volume usaha koperasi RAT per tahun		2 M	2.925.758.804	1,5 M	538.856.700	1,6 M	39.419.193	0	-		0%		538.856.700		18%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
486	2.17.6.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberdayakan dan mendapatkan perlindungan usaha	koperasi							0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
487	07.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	persentase	1,67%	6.477.594.146	0,91%	452.852.400	1,37%	140.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,91%	452.852.400	54%	7%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
488	2.17.7.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pihak	Jumlah usaha mikro yang terbina dalam pendataan, pemberdayaan kemitraan, kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pihak	pelaku usaha							0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
489	08.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan produksi	persentase	0,70%	1.568.956.259	0,45%	445.330.958	0,50%	-	0,00%	-	0,00%		0,45%	445.330.958	64%	28%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
490	2.17.8.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang terbina dalam rangka orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	pelaku usaha							0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
491	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
492	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
493	03.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Prosentase fasilitasi penerbitan izin dan tanda daftar perusahaan	persentase	100,00%	674.381.653	100%	118.761.215	100,00%	50.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	118.761.215	100%	18%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
494	3.30.2.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah surat izin usaha toko/pasar rakyat yang diterbitkan								0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
495	3.30.2.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan								0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
496	3.30.2.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Eceran	Jumlah pemohon surat tanda pendaftarannya waralaba dalam negeri yang dilayani								0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
497	3.30.2.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Distribusi bahan berbahaya yang dilaksanakan								0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
498	3.30.2.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Surat Keterangan Asal yang diterbitkan								0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		14%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
499	03.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase sarana dan Prasarana pasar yang dibangun	persentase	100,00%	8.963.345.677	25%	554.383.335	25,00%	325.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	25,00%	554.383.335	25%	6%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
500	3.30.3.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar menuju standart SNI yang di bangun								0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
501	3.30.3.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah standart prosedur operasional								0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
502	03.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase harga barang kebutuhan pokok yang stabil	persentase	100,00%	3.814.959.170	16%	744.456.620	16,00%	470.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	16,00%	744.456.620	16%	20%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
503	3.30.4.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang tersedia di Kabupaten/ Kota								0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
504	3.30.4.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah pasar murah yang dilaksanakan								0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
505	3.30.4.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemantauan pupuk dan pestisida bersubsidi								0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
506	03.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Prosentase produk unggulan yang memenuhi standar perdagangan antar daerah	persentase	100,00%	4.360.219.839	12%	233.064.549	14,00%	90.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	12,00%	233.064.549	12%	5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
507	3.30.5.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produk unggulan yang berdaya saing								0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
508	03.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTPP sesuai standar kemetrolagian	persentase	100,00%	3.134.605.782	17%	516.257.750	17,00%	200.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	17,00%	516.257.750	17%	16%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
509	3.30.6.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTPP yang sudah ditera/tera ulang								0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
510	03.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase jenis produk yang beredar ditoko modern serta showroom di kabupaten	persentase	100,00%	5.175.045.311	7%	494.583.050	11,00%	340.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	7,00%	494.583.050	7%	10%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
511	3.30.7.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Jenis barang yang diminati masyarakat								0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
512	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
513	03.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	prosentase potensi sumber daya alam yang dikembangkan.	persentase	100%	32.082.091.242	17,00%	2.953.933.527	17,00%	11.649.525.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	17,00%	2.953.933.527		9%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
514			prosentase IKM yang dibina	persentase	100,00%	-	17,00%		17,00%		16,00%	-	94,12%		33,00%		33%		Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
515	3.31.2.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber daya alam yang disusun								0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		11%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
516	3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Prosentase fasilitasi penerbitan izin usaha industri	persentase	100,00%	400.000.000	-		17,00%	-	0,00%	-	0,00%						Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
517	3.31.3.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota									0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
518	03.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Prosentase Pengelolaan Data dan Informasi Industri	persentase	100,00%	530.000.000	-		17,00%	50.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%					Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
519	3.31.4.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota									0	-							Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									-	-			-	-			Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	87,50 (A)	20.308.123.203	85,00 (A)	2.737.156.572	85,5 (A)	4.215.773.131	342	463.732.572		11%		3.200.889.144		16%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
520	2.18.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang Tersusun	dokumen	6	100.301.158	0	6.925.000	1	12.693.000	0	-	0%	0%	0	6.925.000	0%	7%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
521			Jumlah Dokumen RKA Induk – SKPD yang Disusun	dokumen	6	15.427.593	0	1.965.000	1	1.986.000	0	-	0%	0%	0	1.965.000	0%	13%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
522			Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang Tersusun	dokumen	0,06	13.499.231	4	4.996.000	1	1.771.500	0	-	0%	0%	4	4.996.000	6667%	37%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
523			Jumlah Dokumen DPA Induk yang Tersusun	dokumen	6	15.430.281	4	6.961.000	1	1.986.000	0	-	0%	0%	4	6.961.000	67%	45%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
524			Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang Tersusun	dokumen	6	13.499.267	0	-	1	1.771.500	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
525			Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Dilaporkan	laporan	24	177.456.561	4	18.444.000	4	15.000.000	0	-	0%	0%	4	18.444.000	17%	10%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
526			Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	dokumen	6	115.732.143	0	-	1	10.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
527	2.18.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN yang Disuliskan	dokumen	138	2.594.518.748	26	1.935.510.263	26	2.098.096.440	4	305.935.970	15%	15%	30	2.241.446.233	22%	86%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
528			Jumlah orang Tenaga Pengelola Keuangan yang Terdaftar	orang	102	731.439.828	0	123.950.000	120	135.100.000	20	20.300.000	17%	15%	20	144.250.000	20%	20%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
529			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun	laporan	6	38.576.738	1	9.147.000	1	4.999.970	1	-	100%	0%	2	9.147.000	33%	24%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
530	2.18.1.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian dinas ASN beserta kelengkapannya yg dibeli	stel	210	92.272.523	36	11.952.800	0	-	0	-			36	11.952.800	17%	13%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
531	2.18.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instalasi/listrik bangunan gedung kantor yang tersedia	jenis	36	77.149.658	6	13.999.165	8	10.098.000	8	2.768.700	100%	27%	14	16.767.865	39%	22%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
532			Jumlah bahan logistik yang tersedia	jenis	288	506.141.778	48	65.525.350	48	65.814.540	14	19.591.900	29%	30%	62	85.117.250	22%	17%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
533			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	180	385.778.417	30	82.968.245	34	50.341.221	9	14.889.820	26%	30%	39	97.858.065	22%	25%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
534			Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Exp	144	35.646.118	24	6.570.000	36	5.328.000	9	850.000	25%	16%	33	7.420.000	23%	21%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
535			Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	Orang	3336	192.697.360	556	12.475.000	500	14.800.000	148	2.220.000	30%	15%	704	14.695.000	21%	8%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
536			Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan kedalam daerah yang diselenggarakan	tenaga	102	1.233.869.845	17	41.830.000	22	119.656.000	16	6.600.000	73%	6%	33	48.430.000	32%	4%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
537	2.18.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan	unit	12	231.156.589	5	10.411.000	1	20.334.600	0	-	0%	0%	5	10.411.000	42%	5%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
538			Jumlah Gedung yang dibangun	gedung	2	1.079.665.400	0	-	2	1.079.665.400	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
539	2.18.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	surat	2700	5.784.393	390	740.000	110	1.760.000	51	520.000	46%	30%	441	1.260.000	16%	22%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
540			Jumlah rekening air, telepon, internet, fax, dan listrik yang tersedia	rekening	288	928.773.498	48	81.050.669	60	100.375.900	15	20.671.862	25%	21%	63	101.722.531	22%	11%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
541			Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	orang	288	1.941.799.759	144	210.671.580	144	314.561.960	38	49.207.320	26%	16%	182	259.878.900	63%	13%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
542	2.18.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pajak/STNK kendaraan dinas/operasional yang terbayar	Unit	108	1.474.879.898	15	132.235.000	18	119.993.100	3	19.462.000	17%	16%	18	151.697.000	17%	10%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
543			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Jenis	18	153.425.616	3	19.882.500	12	19.880.000	2	205.000	17%	1%	5	20.087.500	28%	13%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
544			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Jenis	6	77.125.238	1	9.996.000	12	9.760.000	4	510.000	33%	5%	5	10.506.000	83%	14%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		291%	18%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																Predikat Kinerja	ST	SR	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
545	02.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Dokumen Pengembangan Iklim yang terusun	persentase	100,00%	801.458.363	100,00%	-	100,00%	60.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	-	100%	0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
546	2.18.2.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/intensif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Bahan Rumusan/ Rekomendasi Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	dokumen	5	375.000.000	0	-	0	-	0	-			0	-	0%	0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
547	2.18.2.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dkumen Peta Potensi Dan Peluang Penanaman Modal	dokumen	6	565.149.910	0	-	1	60.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
																Predikat Kinerja	SR	SR	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
548	02.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Meningkatnya Minat Investasi	persentase	10,00%	1.319.159.083	10,00%	288.978.011	10,00%	65.000.000	0,00%	6.000.000	0,00%	9,23%	10,00%	294.978.011	100%	22%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
549	2.18.3.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah partisipasi keikutsertaan pameran investasi	partisipasi	23	603.300.000	3	288.978.011	1	65.000.000	0	6.000.000	0%	9%	3	294.978.011	13%	49%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		13%	0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
																Predikat Kinerja	SR	SR	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
550	02.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	nilai	90,50 (A)	2.156.826.631	88,00 (B)	294.800.085	88,50 (A)	350.388.101	0	6.063.540		2%		300.863.625		14%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
551	2.18.4.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan yang diterbitkan - Jumlah pengembangan aplikasi berbasis sistem Pelayanan berbasis terintegrasi secara elektronik	izin	14350	1.274.999.680	2072	175.195.260	2000	104.481.571	0	6.063.540	0%	6%	2072	181.258.800	14%	14%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
552			Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen perusahaan berusaha	usaha/kegiatan	1650	674.999.855	121	42.632.870	350	113.414.000	0	-	0%	0%	121	42.632.870	7%	6%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
553			Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	persentase	100,00%	67.799.830	100,00%	6.090.000	100,00%	11.992.530	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	6.090.000	100%	9%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
554			Jumlah koordinasi pemberian fasilitas/insentif Penanaman Modal	Investor	26	507.312.405	1	70.881.955	50	120.500.000	0	-	0%	0%	1	70.881.955	4%	14%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		31%	0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
																Predikat Kinerja	SR	SR	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
555	02.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kontribusi PMDN dan UKM terhadap realisasi investasi	persentase	100,00%	496.081.405	75,00%	140.498.905	76,00%	150.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	75,00%	140.498.905	75%	28%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
556	2.18.5.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal yang dilakukan	Pemantauan	165	187.500.000	15	33.251.155	30	75.000.000	0	-	0%	0%	15	33.251.155	9%	18%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
557			Jumlah Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal yang dilakukan	pembinaan	250	187.500.000	15	93.448.850	0	-	0	-			15	93.448.850	6%	50%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
558			Jumlah Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal yang dilakukan	pengawasan	190	187.500.000	12	13.798.900	30	75.000.000	0	-	0%	0%	12	13.798.900	6%	7%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		7%	0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																Predikat Kinerja	SR	SR	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
559	02.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dapat diakses	persentase	100,00%	527.040.100	100,00%	131.177.000	100,00%	40.628.100	300,00%	4.800.000	300,00%	11,81%	400,00%	135.977.000	400%	26%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
560	2.18.6.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Penanaman Modal - Jumlah Data Penanaman Modal Yang Disediakan - Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Laporan	60	1.082.757.321	12	131.177.000	12	40.628.100	3	4.800.000	25%	12%	15	135.977.000	25%	13%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		25%	0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
																Predikat Kinerja	SR	SR	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	Dinas Pariwisata
2	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									-	-			-	-			Dinas Pariwisata
3	02.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pelaksanaan pembinaan/pelatihan kepemudaan	pelatihan	10	5.138.716.570	2	263.943.600	4	826.990.570	1	65.524.000	25%	8%	3	329.467.600	30%	6%	Dinas Pariwisata
561	2.19.2.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan/Pelatihan	orang	500	3.744.772.970	100	263.943.600	100	436.990.470	15	7.800.000	15%	2%	115	271.743.600	23%	7%	Dinas Pariwisata
562	2.19.2.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	organisasi	30	1.393.943.600	2	-	2	390.000.100	1	57.724.000	50%	15%	3	57.724.000	10%	4%	Dinas Pariwisata
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		17%	6%	Dinas Pariwisata
																Predikat Kinerja	SR	SR	Dinas Pariwisata
563	02.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah kegiatan peningkatan pegembangan kepramukaan daerah	kegiatan	9	2.397.217.500	0	-	5	300.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pariwisata
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	Dinas Pariwisata
																Predikat Kinerja	SR	SR	Dinas Pariwisata
564	2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlet daerah yang mengikuti kejuaraan tingkat regional	orang	500	25.747.457.780	58	5.785.207.780	390	5.052.250.000	58	520.025.000	15%	10%	116	6.305.232.780	23%	24%	Dinas Pariwisata
565	2.19.3.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabor yang disediakan sarana prasarana olahraga	cabor	11	15.382.250.000	5	3.435.207.780	6	2.902.250.250	0	-	0%	0%	5	3.435.207.780	45%	22%	Dinas Pariwisata
566	2.19.3.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan	atlet	500	3.200.000.000	370	-	390	49.999.750	0	-	0%	0%	370	-	74%	0%	Dinas Pariwisata
567	2.19.3.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah yang mengikuti pembinaan	atlet	150	7.165.207.780	100	2.350.000.000	80	2.100.000.000	109	520.025.000	136%	25%	209	2.870.025.000	139%	40%	Dinas Pariwisata
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		86%	0%	Dinas Pariwisata
																Predikat Kinerja	T	SR	Dinas Pariwisata
568	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									0	-							Dinas Pariwisata
569	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									0	-							Dinas Pariwisata
570	03.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah ODTW yang dikembangkan	ODTW	40	43.457.358.681	23	1.800.395.830	22	13.941.936.708	0	-	0%	0%	23	1.800.395.830	58%	4%	Dinas Pariwisata
571	3.26.2.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten yang dikelola	ODTW	7	33.457.358.681	1	1.443.759.180	3	12.891.033.995	0	-	0%	0%	1	1.443.759.180	14%	4%	Dinas Pariwisata
572	3.26.2.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah KSPK yang dikelola	kawasan	3	6.000.000.000	0	-	1	351.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pariwisata

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
573	3.26.2.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku di DPK yang dijina	orang	200	3.000.000.000	150	356.636.650	120	699.902.713	0	-	0%	0%	150	356.636.650	75%	12%	Dinas Pariwisata
Rata-Rata capaian kinerja (%)																	29%	20%	Dinas Pariwisata
574	3.26.2.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi TDUP yang ditetapkan dan terstandarisasi	rekomen	18	1.000.000.000	5	-	0	-	0	-	-	-	5	-	28%	0%	Dinas Pariwisata
575	03.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah ODTW yang terpromosikan	ODTW	18	13.143.957.274	9	1.143.823.812	10	1.249.999.900	5	107.653.800	50%	9%	14	1.251.477.612	78%	10%	Dinas Pariwisata
576	3.26.3.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 jumlah event Promosi yang dilaksanakan/diikuti	kegiatan	14	-	9	-	10	-	5	107.653.800	50%	-	14	-	100%	-	Dinas Pariwisata
Rata-Rata capaian kinerja (%)																	89%	0%	Dinas Pariwisata
577	03.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	orang	160	2.232.759.678	125	413.263.394	120	599.496.284	0	-	0%	0%	125	413.263.394	78%	19%	Dinas Pariwisata
578	3.26.5.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan/Pelatihan	orang	230	-	125	-	150	-	0	-	0%	-	125	-	54%	-	Dinas Pariwisata
Rata-Rata capaian kinerja (%)																	54%	0%	Dinas Pariwisata
579	2.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan administrasi perkantoran yang disediakan	persentase	100,00%	16.977.913.568	99,70%	4.267.421.916	100,00%	3.231.474.746	35,00%	686.326.285	35,00%	21,24%	134,70%	4.953.748.201	135%	29%	Dinas Pariwisata
580			Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan	persentase	100,00%	4.000.000.000	100,00%	-	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	-	100%	0%	Dinas Pariwisata
581	3.26.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	11	820.000.000	11	64.804.530	11	87.643.700	2	14.979.500	18%	17%	13	79.784.030	118%	10%	Dinas Pariwisata
582	3.26.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah karyawan yang terbavarkan	orang	35	13.553.913.568	21	2.027.718.245	28	2.277.488.766	28	456.327.164	100%	20%	49	2.484.045.409	140%	18%	Dinas Pariwisata
583	3.26.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah kelengkapan dinas yang disediakan	stel	60	114.000.000	46	8.742.300	50	-	0	-	0%	-	46	8.742.300	77%	8%	Dinas Pariwisata
584	3.26.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah rapat/koordinasi yang dilaksanakan	kali	40	200.000.000	35	194.917.200	40	203.084.590	9	47.292.200	23%	23%	44	242.209.400	110%	121%	Dinas Pariwisata
585	3.26.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit barang yang diadakan	Jenis	15	2.200.000.000	9	1.281.389.215	10	88.308.505	2	27.791.000	20%	31%	11	1.309.180.215	73%	60%	Dinas Pariwisata
586	3.26.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang terbavarkan	orang	30	1.550.000.000	23	316.598.326	26	363.383.585	26	72.010.421	100%	20%	49	388.608.747	163%	25%	Dinas Pariwisata
Rata-Rata capaian kinerja (%)																	112%	0%	Dinas Pariwisata
Predikat Kinerja																	ST	SR	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									-	-			-	-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	2.23.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP		A	19.740.758.665	A	2.714.689.167	A	2.957.250.279	0	456.797.432	15%		3.171.486.599		16%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
587	2.23.1.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan/dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	dokumen	40	78.949.680	3	11.420.200	2	4.244.700	3	-	150%	0%	6	11.420.200	15%	14%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
588	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan administrasi keuangan yang dilaksanakan	Laporan	120	16.783.694.700	12	2.306.739.173	12	2.554.774.579	3	404.062.962	25%	16%	15	2.710.802.135	13%	16%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
589	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian	Laporan	0,06	62.410.575	1	10.090.575		10.150.000	0	-		0%	1	10.090.575	1667%	16%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
590	2.23.01.2.06	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan urusan kantor yang dilayani	Laporan	72	706.038.450	12	88.236.500	12	70.962.800	3	3.110.000	25%	4%	15	91.346.500	21%	13%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
591	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang kantor yang tersedia	Jenis	60	1.390.506.500	12	186.907.344	12	227.723.200	3	39.579.920	25%	17%	15	226.487.264	25%	16%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
592	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis penunjang sarana dan prasarana yang dipelihara	Jenis	36	719.158.760	12	111.295.375	12	89.395.000	3	10.044.550	25%	11%	15	121.339.925	42%	17%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Rata-Rata capaian kinerja (%)																	297%	15%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
593	2.23.02	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengunjung	%	5,25	1.349.912.334	4	30.444.850	4,25	135.910.200	0	15.405.000	0%	11%	4	45.849.850	76%	3%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
594	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pemustaka		0	1.224.912.334	0	30.444.850		128.710.700	0	15.405.000		12%	0	45.849.850		4%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
595	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah jenis Pemberdayaan gemar membaca	24	0	125.000.000	2	0	2	7.199.500	2	-	100%	0%	4	-		0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	2%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
596	2.23.02	PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase jumlah naskah kuno yang dilestarikan	%	100	120.000.000		-	100	104.185.000	0	-	0%	0%		-	0%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
597	2.23.02.201	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah jenis Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang dilestarikan	Naskah	5	120.000.000	1	0	1	104.185.000	1	-	100%	0%	2	-	40%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		40%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
598	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									0	-							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
599	2.24.02	PENGLOLAAN ARSIP	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	78	512.999.952	74	40.550.145	75	44.478.000	0	-	0%	0%	74	40.550.145	95%	8%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
600	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis arsip statis yang dikelola	Arsip	1000	137.000.000	200	0	200	22.272.400	0	-	0%	0%	200	-	20%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
601	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah jenis Kegiatan yang dilaksanakan	Keg	5	375.999.952	1	40.550.145	1	22.205.600	0	-	0%	0%	1	40.550.145	20%	11%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		45%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
1	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									-	-			-	-			Dinas Peternakan dan Perikanan
3	2.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	100%	74.544.229.105	87 (A)	10.863.160.196	87,50 (A)	13.421.068.909	0,114366606	1.534.922.099		11%		12.398.082.295		17%	Dinas Peternakan dan Perikanan
602	3.25.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	12		12	251.159.800	12	367.722.319	1	20.814.400	8%	6%	13	271.974.200	108%		Dinas Peternakan dan Perikanan
603	3.25.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan	dokumen	1		1	7.560.615.035	1	8.812.128.851	0	1.128.574.765	0%	13%	1	8.689.189.800	100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
604	3.25.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah	laporan	0,06		1	22.195.000	1	4.887.600	1	4.407.600	100%	90%	2	26.602.600	3333%		Dinas Peternakan dan Perikanan
605	3.25.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	dokumen	1		1	399.907.833	1	335.204.229	0	23.870.000	0%	7%	1	423.777.833	100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
606	3.25.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase	100,00%		100,00%	610.016.344	100,00%	1.566.434.250	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	610.016.344	100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
607	3.25.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket	1		1	1.067.765.883	1	2.180.260.560	0	340.889.922	0%	16%	1	1.408.655.805	100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
608	3.25.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	1		1	430.899.285	1	178.401.000	0	16.365.412	0%	9%	1	447.264.697	100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
609	3.25.1.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi	dokumen	1		1	58.713.500	1	14.062.400	0	-	0%	0%	1	58.713.500	100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		505%	0%	
															Predikat Kinerja		ST	SR	
610	03.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	-Prosentase nelayan yang menerima manfaat -Prosentase sarana dan prasarana TPI yang dikelola	persentase	36%39%	14.054.550.118	24%28%	3.195.128.121	24%28%	2.109.421.997	2,19%	46.171.246		2,19%		3.241.299.367		23%	Dinas Peternakan dan Perikanan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
611	3.25.3.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan	dokumen	1		1	413.350.943	1	549.676.238	0	9.917.326	0%	2%	1	423.268.269	100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
612			Jumlah sarana prasarana perikanan tangkap yang ditingkatkan	unit	5		5		5		0	-	0%		5		100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
613	3.25.3.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang meningkat kapasitas	kelompok	4		4	927.402.980	4	499.999.920	0	23.116.200	0%	5%	4	950.519.180	100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
614			Jumlah nelayan kecil yang dibina	orang	1600		1600		1600		0	-	0%		1600		100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
615	3.25.3.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pengelola TPI dan pedagang ikan yang dibina	orang	200		200	1.854.374.198	200	1.059.745.839	0	13.137.720	0%	1%	200	1.867.511.918	100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
616			Jumlah sarana dan prasarana TPI yang ditingkatkan	unit	20		20		20		0	-	0%		20		100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	Dinas Peternakan dan Perikanan
																Predikat Kinerja	ST	SR	Dinas Peternakan dan Perikanan
617	03.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Prosentase pembudidaya yang menerapkan teknologi yang direkomendasikan	persentase	57%	15.803.428.272	34%	5.016.369.527	34%	1.157.058.745	0,89%	10.244.200		0,89%		5.026.613.727		32%	Dinas Peternakan dan Perikanan
618	3.25.4.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Penerima Manfaat	kelompok	11		11	1.066.326.234	11	365.000.445	0	-	0%	0%	11	1.066.326.234	100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
619	3.25.4.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan	unit	8		8	3.950.043.293	8	792.058.300	0	10.244.200	0%	1%	8	3.960.287.493	100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
620			Jumlah Kelompok Penerima manfaat	kelompok	2		2		2		0	-	0%		2		100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
621			Jumlah produksi budidaya air laut	ekor	170000		170000		170000		0	-	0%		170000		100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
622			Jumlah produksi budidaya air tawar	ton	13		13		13		0	-	0%		13		100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	Dinas Peternakan dan Perikanan
																Predikat Kinerja	ST	SR	Dinas Peternakan dan Perikanan
623	03.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Prosentase kejadian pelanggaran hukum di wilayah pesisir yang diselesaikan	persentase	100,00%	291.198.860	100,00%	-	100,00%	31.198.860	4,65%	1.451.400	4,65%	4,65%	104,65%	1.451.400	105%	0%	Dinas Peternakan dan Perikanan
624	3.25.5.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Masyarakat yang dibina	Orang	80		0		80	311.988.600	0	1.451.400	0%	0%	0	1.451.400	0%		Dinas Peternakan dan Perikanan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	Dinas Peternakan dan Perikanan
																Predikat Kinerja	SR	SR	Dinas Peternakan dan Perikanan
625	3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	persentase POKLAHSAR yang meningkat kelas kelompoknya	persentase	24%	2.206.561.950	18%	368.834.790	18%	337.727.160	1,56%	5.273.700	8,68%	1,56%	19,56%	374.108.490	82%	17%	Dinas Peternakan dan Perikanan
626	3.25.6.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok yang dibina	kelompok	2		0	-	2	62.727.160	0	5.273.700	0%	8%	0	5.273.700	0%		Dinas Peternakan dan Perikanan
627	3.25.6.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Masyarakat Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Difasilitasi	orang	200		200	368.834.790	200	275.000.000	0	-	0%	0%	200	368.834.790	100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		50%	0%	Dinas Peternakan dan Perikanan
																Predikat Kinerja	SR	SR	Dinas Peternakan dan Perikanan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
628	3.26.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang penunjang yang terpelihara	unit	18	2.540.000.000	15	373.252.100	15	211.565.600	4	67.926.000	27%	32%	19	441.178.100	106%	17%	Dinas Peternakan dan Perikanan
629	03.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Prosentase Kelompok Ternak Yang Menerapkan Good Farming Practice /GEP	persentase	30%	21.371.148.535	15,28 %	4.246.474.760	17,00%	2.774.673.775	1,41%	39.110.200	8,29%	1,41%	16,69%	4.285.584.960	56%	20%	Dinas Peternakan dan Perikanan
630			2. Prosentase Peningkatan Populasi Ternak yang dihasilkan melalui Teknologi Peternakan	persentase	55,00%		37,27 %	-	40,00%	-	0,00%	-	0,00%			-			Dinas Peternakan dan Perikanan
631	3.27.2.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Populasi Ternak Dan Kawasan Peternakan Terpadu	kecamatan	17		17	3.194.903.912	17	2.404.124.575	0	36.510.200	0%	2%	17	3.231.414.112	100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
632	3.27.2.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah	1. Jumlah Pembinaan Dan Fasilitas Kelompok Ternak Yang Menerapkan Teknologi Dan Tersedianya Data Pakan Ternak	wilayah	3		3	1.051.570.847	3	370.549.200	0	2.600.000	0%	1%	3	1.054.170.847	100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
633			2. Jumlah Ketersediaan Bibit Ternak Dan HPT	-	-		-		-		0	-							Dinas Peternakan dan Perikanan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		51%	0%	Dinas Peternakan dan Perikanan
															Predikat Kinerja		R	SR	Dinas Peternakan dan Perikanan
634	03.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		persentase	100%	8.930.314.960	100,00%	199.732.660	100%	1.380.582.300	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	199.732.660	100%	2%	Dinas Peternakan dan Perikanan
635	3.27.3.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Paket	1		0	199.732.660	1	1.380.582.300	0	-	0%	0%	0	199.732.660	0%		Dinas Peternakan dan Perikanan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	Dinas Peternakan dan Perikanan
															Predikat Kinerja		SR	SR	Dinas Peternakan dan Perikanan
636	03.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Prosentase Peningkatan Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas Yang Sehat;	persentase	94%	4.645.563.540	92 %	909.234.440	93%	436.329.100	0,00%	-	0,00%	0,00%		909.234.440		20%	Dinas Peternakan dan Perikanan
637			2. Prosentase Produk Pangan Asal Hewan dan Produk Olahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	persentase	93,00%		78,00%		81,00%		0,00%	-	0,00%		78,00%		84%		Dinas Peternakan dan Perikanan
638			3. Prosentase Omset Hasil Penjualan	persentase	133,00%		118,00%		121,00%		0,00%	-	0,00%		118,00%		89%		Dinas Peternakan dan Perikanan
639			4. Prosentase Produksi Hasil Olahan Produk Peternakan	persentase	116,00%		106,00%		108,00%		0,00%	-	0,00%		106,00%		91%		Dinas Peternakan dan Perikanan
640	3.27.4.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas Dan Hewan Pembawa Rabies (HPR) Yang Dilayani	kecamatan	17		17	203.208.732	17	71.335.100	0	681.400	0%	1%	17	203.890.132	100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
641	3.27.4.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Yang Di Pantau	wilayah	3		3	53.718.000	3	14.086.500	0	3.214.200	0%	23%	3	56.932.200	100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
642	3.27.4.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel yang diuji	sampel	369		369		369	7.715.100	0	247.500	0%	3%	369		100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
643	3.27.4.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Produk Asal Hewan Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal Serta Terlaksananya Kesehatan Hewan	wilayah	3		3	578.442.257	3	82.276.700	0	-	0%	0%	3	578.442.257	100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
644	3.27.4.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pertemuan Sinkronisasi Bidang Kesehatan Hewan Dan Masyarakat Veteriner	kali	23		23	578.442.257	23	10.915.700	0	-	0%	0%	23	578.442.257	100%		Dinas Peternakan dan Perikanan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		95%	0%	Dinas Peternakan dan Perikanan
															Predikat Kinerja		ST	SR	Dinas Peternakan dan Perikanan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
645	3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase Fasilitas Penerbitan Izin dan Pengawasan Izin Usaha Peternakan	persentase	100,00%	250.000.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	100,00%	-	100%	0%	Dinas Peternakan dan Perikanan
646	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase Fasilitas Penerbitan Izin dan Pengawasan Izin Usaha Peternakan	persentase	100,00%	3.850.000.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	100,00%	-	100%	0%	Dinas Peternakan dan Perikanan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	Dinas Peternakan dan Perikanan
															Predikat Kinerja		ST	SR	Dinas Peternakan dan Perikanan
1	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	Sekretariat Daerah
2	4.01.0.00.0.0.01.0001	Bagian Umum									-	-	-	-					Sekretariat Daerah
3	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	persentase	100,00%	77.949.467.882	100,00%	15.476.144.089	100,00%	11.166.041.774	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	15.476.144.089	100%	20%	Sekretariat Daerah
647	4.01.0.00.0.0.01.0002	Bagian Protokol dan Komunikasi				10.276.306.832		1.516.418.939		1.359.972.175	0	-		0%		1.516.418.939		15%	Sekretariat Daerah
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	15%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
648	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	persentase	100,00%	10.276.306.832	100,00%	1.516.418.939	100,00%	1.359.972.175	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	1.516.418.939	100%	15%	Sekretariat Daerah
649	4.01.0.00.0.0.01.0003	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama				4.516.597.657		470.573.000		321.712.470	0	-		0%		470.573.000		10%	Sekretariat Daerah
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	10%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
650	4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketersediaan LPDP dengan benar dan tepat waktu	persentase	100,00%	4.516.597.657	100,00%	470.573.000	100,00%	321.712.470	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	470.573.000	100%	10%	Sekretariat Daerah
651			Persentase MOU kerjasama yang ditandatangani	persentase	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	-	100,00%		200,00%		200%		Sekretariat Daerah
652			Persentase kecamatan yang menerapkan PATEN sesuai dasar hukumnya	persentase	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	-	100,00%		200,00%		200%		Sekretariat Daerah
653			Persentase pelaksanaan otonomi daerah yang difasilitasi	persentase	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	-	100,00%		200,00%		200%		Sekretariat Daerah
654		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen LPDP yang disusun	dokumen							0	-							Sekretariat Daerah
655			Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	kecamatan							0	-							Sekretariat Daerah
656			Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Otonomi Daerah dan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	kegiatan							0	-							Sekretariat Daerah
657		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kesepakatan Bersama yang dihasilkan								0	-							Sekretariat Daerah
658	4.01.0.00.0.0.01.0004	Bagian Kesejahteraan Rakyat				14.521.961.414		1.950.437.660		2.732.464.439	0	-		0%		1.950.437.660		13%	Sekretariat Daerah
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		75%	0%	
															Predikat Kinerja		S	SR	
659	04.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kepuasan masyarakat terhadap fasilitasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan	persentase	100,00%	14.521.961.414	100,00%	1.950.437.660	100,00%	2.732.464.439	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	1.950.437.660	100%	13%	Sekretariat Daerah
660			Persentase sarana prasarana tempat ibadah dan pondok pesantren dalam keadaan baik	persentase							0,00%	-							Sekretariat Daerah
661		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diambil	persentase							0,00%	-							Sekretariat Daerah
662	4.01.0.00.0.0.01.0005	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam				15.338.655.627		9.660.775.419		1.144.930.528	0	-		0%		9.660.775.419		63%	Sekretariat Daerah
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
663	04.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Prosentase Rekomendasi dibidang perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan	persentase	100,00%	15.338.655.627	100,00%	9.660.775.419	100,00%	1.144.930.528	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	9.660.775.419	100%	63%	Sekretariat Daerah
664		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase BUMD dalam Keadaan Sehat	persentase							0,00%	-							Sekretariat Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
665		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam									0	-							Sekretariat Daerah
666	4.01.0.00.0.0.01.0006	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			5.113.023.661		654.573.674		420.021.320		0	-		0%		654.573.674	13%		Sekretariat Daerah
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
667	04.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Prosentase pengadaan paket barang dan jasa yang dilelang selesai tepat waktu	persentase	100,00%	5.113.023.661	100,00%	654.573.674	100,00%	420.021.320	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	654.573.674	100%	13%	Sekretariat Daerah
668	4.01.0.00.0.0.01.0007	Bagian Hukum			6.285.643.094		1.466.432.650		1.139.904.634		0	-		0%		1.466.432.650	23%		Sekretariat Daerah
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
669	4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kesesuaian produk Hukum Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan	persentase	100,00%	6.285.643.094	100,00%	1.466.432.650	100,00%	1.139.904.634	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	1.466.432.650	100%	23%	Sekretariat Daerah
670			Persentase penyusunan keputusan Bupati, pendokumentasian dan publikasi produk hukum daerah yang dilaksanakan	persentase	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	-	100,00%		200,00%		200%		Sekretariat Daerah
671			Persentase penyelesaian kasus hukum, sosialisasi peraturan dan pelaporan aksi HAM yang dilaksanakan	persentase	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	-	100,00%		200,00%		200%		Sekretariat Daerah
672		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Kebijakan Daerah yang Disusun	persentase							0,00%	-							Sekretariat Daerah
673	4.01.0.00.0.0.01.0009	Bagian Organisasi			9.333.867.122		1.080.424.610		1.097.294.688		0	-		0%		1.080.424.610	12%		Sekretariat Daerah
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	
															Predikat Kinerja		ST	SR	
674	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	persentase	100,00%	9.333.867.122	100,00%	1.080.424.610	100,00%	1.097.294.688	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	1.080.424.610	100%	12%	Sekretariat Daerah
675			Persentase ketersediaan Laporan Kinerja Kabupaten dengan benar dan tepat waktu	persentase	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	-	100,00%		200,00%		200%		Sekretariat Daerah
676			Persentase PD dan UPP yang memiliki inovasi pelayanan publik	persentase	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	-	100,00%		200,00%		200%		Sekretariat Daerah
677		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyuluhan Hukum yang Dilaksanakan	kegiatan							0	-							Sekretariat Daerah
678	4.01.0.00.0.0.01.0010	Bagian Perencanaan dan Keuangan			111.385.552.341		15.770.176.957		18.833.177.223		0	-		0%		15.770.176.957	14%		Sekretariat Daerah
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	
															Predikat Kinerja		ST	SR	
679	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	persentase	100,00%	111.385.552.341	100,00%	15.770.176.957	100,00%	18.833.177.223	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	15.770.176.957	100%	14%	Sekretariat Daerah
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
1	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	Sekretariat DPRD
2	4.02	SEKRETARIAT DPRD									-	-				-			Sekretariat DPRD
3	4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	82,09 (A)	148.305.172.932	80,07 (A)	26.325.058.084	80,47 (A)	28.158.361.933	0,201817898	5.682.861.410		20%		32.007.919.494	22%		Sekretariat DPRD
680	4.2.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	35	527.013.735	7	92.482.800	8	105.144.504	0	-	0%	0%	7	92.482.800	20%	18%	Sekretariat DPRD
681	4.2.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	persentase	100,00%	12.377.369.701	91,89%	3.019.410.602	100,00%	3.495.552.296	13,52%	472.709.744	13,52%	13,52%	105,41%	3.492.120.346	105%	28%	Sekretariat DPRD
682	4.2.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik Daerah yang disediakan	Dokumen	0,06	10.700.936		Tidak ada di Tahun 2021	1	1.865.200	0	-	0%	0%					Sekretariat DPRD
683	4.2.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase capaian administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	persentase	100,00%	2.045.100.604	80,09%	137.130.500	100,00%	304.379.604	1,59%	4.850.000	1,59%	1,59%	81,68%	141.980.500	82%	7%	Sekretariat DPRD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
684	4.2.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase capaian administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	persentase	100,00%	7.205.474.750	83,85%	1.751.935.150	100,00%	838.937.671	8,50%	71.270.500	8,50%	8,50%	92,35%	1.823.205.650	92%	25%	Sekretariat DPRD
685	4.2.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	Unit	211	2.678.967.477	0,92037152	1.379.408.650	211	835.729.600	0	-	0%	0%	0,920371525	1.379.408.650	0%	51%	Sekretariat DPRD
686	4.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	37	3.831.544.156	0,89461197	661.395.675	37	1.027.666.020	0,145723407	149.754.994	0%	15%	1,040335379	811.150.669	3%	21%	Sekretariat DPRD
687	4.2.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Unit	225	3.866.338.964	0,86158586	1.057.677.111	10	1.384.624.308	0,1027228	142.232.486	1%	10%	0,964308662	1.199.909.597	0%	31%	Sekretariat DPRD
688	4.2.1.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase capaian fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	persentase	100,00%	113.336.161.857	98,67%	17.906.909.596	100,00%	19.902.836.600	24,33%	4.841.443.686	24,33%	24,33%	123,00%	22.748.353.282	123%	20%	Sekretariat DPRD
689	4.2.1.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Prosentase capaian fasilitasi layanan administrasi DPRD	persentase	100,00%	2.426.500.752	68,87%	318.708.000	100,00%	261.626.130	0,23%	600.000	0,23%	0,23%	69,10%	319.308.000	69%	13%	Sekretariat DPRD
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		50%	21%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
690	04.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya dukungan fasilitasi pembentukan peraturan daerah	persentase	100,00%	127.543.386.219	100,00%	9.446.206.716	100,00%	15.941.999.664	14,95%	2.382.828.771	14,95%	14,95%	114,95%	11.829.035.487	115%	9%	Sekretariat DPRD
691			Meningkatnya dukungan fasilitasi pengawasan dan penganggaran	persentase	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	-	100,00%		200,00%		200%		Sekretariat DPRD
692	4.2.2.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	dokumen	75	23.913.908.910	0,5346184	1.968.824.200	15	2.670.348.822	0,030365846	81.087.400	0%	3%	0,564984243	2.049.911.600	1%	9%	Sekretariat DPRD
693	4.2.2.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	dokumen	25	8.150.464.391	0,69519879	599.504.000	5	750.610.000	0	-	0%	0%	0,695198787	599.504.000	3%	7%	Sekretariat DPRD
694	4.2.2.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Difasilitasi	persentase	100,00%	5.555.055.398		Penghapusan pada PAPBD karena WTP	100,00%	953.724.430	6,46%	61.645.000	6,46%	6,46%					Sekretariat DPRD
695	4.2.2.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase capaian fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	persentase	100,00%	27.342.974.377	70,11%	1.816.216.250	100,00%	4.073.396.973	14,04%	572.097.311	14,04%	14,04%	84,16%	2.388.313.561	84%	9%	Sekretariat DPRD
696	4.2.2.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Aspirasi Masyarakat Yang Terhimpun	dokumen	20	16.486.931.802	0,79733055	1.215.512.000	4	2.004.991.660	0,24313368	487.481.000	6%	24%	1,040464226	1.702.993.000	5%	10%	Sekretariat DPRD
697	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	cakupan	10	4.535.693.927	0	0	0	0	0	-			0	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		42%	5%	
															Predikat Kinerja		SR	SR	
1	4.2.2.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase Tugas DPRD Yang Difasilitasi	1															Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	5.01	PERENCANAAN									0	-			0	-			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	persentase	89,00%	45.223.625.200	100,00%	7.740.182.300	100,00%	6.951.174.553	44,79%	896.113.887	44,79%	12,89%	144,79%	8.636.296.187	163%	19%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
698	5.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	dokumen	9	623.254.000	9	105.555.400	9	101.490.362	3	15.000.000	33%	15%	12	120.555.400	133%	19%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
699	5.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	persentase	100,00%	29.072.317.733	100,00%	3.688.766.018	100,00%	4.170.799.014	29,86%	594.750.882	29,86%	14,26%	129,86%	4.283.516.900	130%	15%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
700	5.1.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	dokumen	3	142.603.000	2	35.282.200	2	15.000.140	1	-	50%	0%	3	35.282.200	100%	25%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
701	5.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan baik	persentase	100,00%	3.162.176.103	100,00%	1.492.786.038	100,00%	607.500.000	25,00%	-	25,00%	0,00%	125,00%	1.492.786.038	125%	47%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
702	5.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	persentase	100,00%	3.220.633.834	100,00%	505.917.086	100,00%	485.782.640	25,00%	53.423.767	25,00%	11,00%	125,00%	559.340.853	125%	17%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
703	5.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	persentase	100,00%	118.257.500	100,00%	78.210.000	100,00%	65.067.200	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	78.210.000	100%	66%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		90%	32%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
															Predikat Kinerja		T	SR	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
704	5.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	persentase	100,00%	7.422.757.300	100,00%	1.158.141.468	100,00%	1.370.535.021	25,00%	212.745.238	25,00%	15,52%	125,00%	1.370.886.706	125%	18%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
705	5.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	persentase	100,00%	1.461.625.730	100,00%	675.524.090	100,00%	135.000.176	25,00%	20.194.000	25,00%	14,96%	125,00%	695.718.090	125%	48%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
706			prosentase ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah	persentase	90,00%		100,00%		85,00%		15,00%	-	17,65%		115,00%		128%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
707	5.1.2.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan	dokumen	14	5.022.473.118	3	895.099.375	2	814.341.540	0	12.820.000	0%	2%	3	907.919.375	21%	18%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
708	5.1.2.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Pelaksanaan kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase	100,00%	861.744.973	100,00%	68.350.700	100,00%	145.692.700	105,00%	103.204.600	105,00%	70,84%	205,00%	171.555.300	205%	20%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
709	5.1.2.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen	9	1.751.283.283	9	228.410.265	9	336.496.600	2	15.400.000	22%	5%	11	243.810.265	122%	14%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		120%	20%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
															Predikat Kinerja		ST	SR	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
710	5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase OPD yang capaian programnya minimal 80 persen dari target	persentase	98,00%	11.808.603.956	91,32%	1.688.544.051	100,00%	1.194.420.234	40,00%	298.574.925	40,00%	25,00%	131,32%	1.987.118.976	134%	17%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
711			Prosentase Program RKPD yang konsisten terhadap Program RPJMD	persentase	98,70%		100,00%		100,00%		63,33%	-	63,33%		163,33%		165%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
712			Prosentase renstra OPD yang selaras dengan RPJMD	persentase	95,00%		100,00%		100,00%		75,00%	-	75,00%		175,00%		184%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
713	5.1.3.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keterpaduan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persentase	100,00%	2.402.711.556	100,00%	625.534.147	100,00%	218.000.000	25,00%	24.880.000	25,00%	11,41%	125,00%	650.414.147	125%	27%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
714	5.1.3.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Prosentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	persentase	100,00%	4.499.792.450	100,00%	394.562.370	87,50%	460.560.000	26,07%	135.747.900	29,79%	29,47%	126,07%	530.310.270	126%	12%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
715	5.1.3.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	prosentase koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan wilayah	persentase	100,00%	4.906.099.950	100,00%	668.447.534	100,00%	515.860.234	33,75%	137.947.025	33,75%	26,74%	133,75%	806.394.559	134%	16%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		147%	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
															Predikat Kinerja		ST	SR	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
716	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									0	-							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
717	05.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	prosentase Penelitian/kajian yang menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan	persentase	100,00%	2.120.304.160	100,00%	169.618.250	100,00%	455.480.985	0,00%	35.550.300	0,00%	7,81%	100,00%	205.168.550	100%	10%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
718	5.5.2.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Kajian / Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan yang disusun untuk mengakomodir permasalahan pelaksanaan pembangunan	Dokumen	1	1.474.802.550	1	165.118.250	1	195.900.000	0	31.492.800	0%	16%	1	196.611.050	100%	13%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
719	5.5.2.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang disusun dengan baik	Dokumen	1	225.000.000	0	-	2	200.000.185	0	2.319.700	0%	1%	0	2.319.700	0%	1%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
720	5.5.2.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang disusun dengan baik	Dokumen	1	420.501.610	1	4.500.000	1	59.580.800	0	1.737.800	0%	3%	1	6.237.800	100%	1%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		75%	26%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
																Predikat Kinerja	S	SR	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	Badan Pendapatan Daerah
2	5.02	KEUANGAN									-	-			-	-			Badan Pendapatan Daerah
3	5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	indeks	86	84.688.916.786			86	9.670.182.492	0	-	0%	0%					Badan Pendapatan Daerah
721	5.2.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	51	803.515.061			10	18.009.210	4	4.995.100	40%	28%					Badan Pendapatan Daerah
722	5.2.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan keuangan yang benar dan tepat waktu	Laporan	256	49.687.993.047			51	5.927.595.442	12	647.112.948	24%	11%					Badan Pendapatan Daerah
723	5.2.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	dokumen	0,06	188.249.101			26	41.966.800	6	-	23%	0%					Badan Pendapatan Daerah
724	5.2.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan baik	persentase	100,00%	372.520.166			100,00%	38.428.100	25,00%	-	25,00%	0,00%					Badan Pendapatan Daerah
725	5.2.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	persentase	100,00%	4.664.936.175			100,00%	386.304.580	25,00%	6.923.000	25,00%	1,79%					Badan Pendapatan Daerah
726	5.2.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Paket	11	5.474.516.501			2	98.535.800	0	-	0%	0%					Badan Pendapatan Daerah
727	5.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	18.321.550.936			12	2.875.671.760	3	393.305.492	25%	14%					Badan Pendapatan Daerah
728	5.2.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara/direhabilitasi	unit	276	2.465.052.099			55	278.790.100	7	7.084.500	13%	3%					Badan Pendapatan Daerah
729	5.2.1.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	Laporan	21	4.880.700			4	4.880.700	1	-	25%	0%					Badan Pendapatan Daerah
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
																Predikat Kinerja	SR	SR	Badan Pendapatan Daerah
730	5.2.4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan PAD	persentase	100,00%	15.900.176.313		1.459.249.355	100,00%	1.383.676.560	0,00%	-	0,00%	0,00%		1.459.249.355		9%	Badan Pendapatan Daerah
731	5.2.4.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan PAD	persentase	100,00%	15.900.176.313			100,00%	1.383.676.560	25,00%	87.622.310	25,00%	6,33%					Badan Pendapatan Daerah
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
																Predikat Kinerja	SR	SR	Badan Pendapatan Daerah
1	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	5.02	KEUANGAN									0	-			0	-			Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	persentase	86,50%	62.006.394.542		18.394.343.196	86,50%	11.440.416.102	10,80%	1.235.330.280	12,48%	10,80%	10,80%	19.629.673.476	12%	32%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
732	5.2.2.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	70	538.717.031	14	65.355.645	14	83.374.600	5	11.040.000	36%	13%	19	76.395.645	27%	14%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
733	5.2.2.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi perangkat daerah yang disusun	Laporan	3320	38.231.353.264	664	9.399.736.037	664	6.915.314.732	167	732.776.845	25%	11%	831	10.132.512.882	25%	27%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
734	5.2.2.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD yang disusun	Laporan	90	281.064.430	4	29.348.000	18	42.064.150	5	-	28%	0%	9	29.348.000	10%	10%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
735	5.2.2.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah yang disusun	Laporan	2	55.676.775	2	55.676.775	0	-	0	-			2	55.676.775	100%	100%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
736	5.2.2.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi perangkat daerah perangkat daerah yang disusun	Laporan	1125	626.837.248	225	115.460.900	225	63.789.600	3	-	1%	0%	228	115.460.900	20%	18%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
737	5.2.2.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadministrasian umum yang disusun	Laporan	251290	2.773.662.865	50258	1.462.828.232	50258	581.400.280	30	42.653.500	0%	7%	50288	1.505.481.732	20%	54%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
738	5.2.2.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah	Unit	130	1.511.989.382	26	764.643.350	26	372.431.400	0	800.000	0%	0%	26	765.443.350	20%	51%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		33%	57%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
															Predikat Kinerja		SR	R	Badan Keuangan dan Aset Daerah
739	05.02.03	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyusunan rancangan APBD	persentase	100,00%	1.348.512.667.357	100,00%	243.154.139.147	100,00%	270.213.266.857	5,94%	16.041.392.631	5,94%	5,94%	105,94%	259.195.531.778	106%	19%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
740	5.2.2.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang disusun	dokumen	2620	7.730.359.511	524	1.919.125.883	524	1.728.841.391	0	65.579.400	0%	4%	524	1.984.705.283	20%	26%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		89%	74%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
															Predikat Kinerja		T	S	Badan Keuangan dan Aset Daerah
741	05.02.04	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatnya Nilai Aset Tetap	persentase	5,00%	3.640.625.544	5,00%	1.088.470.190	5,00%	909.139.184	2,89%	26.273.200	57,80%	2,89%	7,89%	1.114.743.390	158%	31%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
742	5.2.3.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengelolaan BMD yang disusun	dokumen	555	3.640.625.544	111	1.088.470.190	111	909.139.184	133	26.273.200	120%	3%	244	1.114.743.390	44%	31%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		44%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
															Predikat Kinerja		SR	SR	Badan Keuangan dan Aset Daerah
743											0	-							Badan Keuangan dan Aset Daerah
744											0	-							Badan Keuangan dan Aset Daerah
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
															Predikat Kinerja		SR	SR	Badan Keuangan dan Aset Daerah
745											0	-							Badan Keuangan dan Aset Daerah
746											0	-							Badan Keuangan dan Aset Daerah
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
															Predikat Kinerja		SR	SR	Badan Keuangan dan Aset Daerah
747											0	-							Badan Keuangan dan Aset Daerah
748											0	-							Badan Keuangan dan Aset Daerah
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
															Predikat Kinerja		SR	SR	Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
1	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
2	5.03	KEPEGAWAIAN									-	-			-	-			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
3	5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	86 (A)	114.354.857.633	81 (A)	8.213.171.304	82 (A)	63.005.680.012	0	-		0%		8.213.171.304		7%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
749	5.3.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja yang disusun dengan benar dan tepat waktu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	persentase	10,00%						0,00%	-							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
750	5.3.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan dan pelaporan yang disusun dengan benar dan tepat waktu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	persentase	3,00%						0,00%	-							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
751	5.3.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terciptanya kapasitas sumber daya aparatur yang disiplin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	persentase	6,00%						0,00%	-							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
752	5.3.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	persentase	8,00%						0,00%	-							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
753	5.3.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	persentase	10,00%						0,00%	-							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
754	5.3.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	persentase	50,00%						0,00%	-							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
																Predikat Kinerja	SR	SR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
755	05.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ketersediaan data pegawai ASN yang akurat	persentase	100,00%	9.614.971.191	100,00%	1.749.585.455	100,00%	1.096.662.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	1.749.585.455	100%	18%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
756			Persentase penyelesaian administrasi penerbitan karis/karsu/karpeg dan taspen tepat waktu	persentase	96,00%		94,00%		94,00%		95,00%	-	101,06%		189,00%		197%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
757			Persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai ASN yang terselesaikan	persentase	98,00%		96,00%		96,00%		97,00%	-	101,04%		193,00%		197%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
758			Penempatan ASN Sesuai analisa jabatan dan analisa beban kerja	persentase	100,00%		80,00%		80,00%		90,00%	-	112,50%		170,00%		170%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
759			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	persentase	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	-	100,00%		200,00%		200%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
760			persentase Pengadaan Pegawai (CPNS dan PPPK) sesuai kebutuhan	persentase	100,00%		80,00%		80,00%		90,00%	-	112,50%		170,00%		170%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
761			Persentase ASN yang memiliki sertifikat manajerial,teknis dan fungsional	persentase	100 %		100 %		100 %		0,00%	-	0,00%		100,00%		100%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
762	5.3.2.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ketersediaan data Pegawai ASN yang akurat	persentase							0,00%	-							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
763			Persentase Pengadaan pegawai (CPNS dan PPPK) sesuai kebutuhan	persentase							0,00%	-							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
764			Persentase Penyelesaian administrasi penerbitan (karis/karsu/KPE/karpeg/KIP/Cu ti/Satya Lencana Krya Satya dan taspen) tepat waktu	persentase							0,00%	-							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
765	5.3.2.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Penempatan ASN sesuai analisa jabatan dan analisa beban kerja								0	-							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
766			Pengelolaan kenaikan Pangkat ASN								0	-							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
767	5.3.2.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki sertifikat manajerial, teknis dan fungsional	persentase							0,00%	-							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
768	5.3.2.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai ASN yang terselesaikan	persentase							0,00%	-							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
769			Persentase Penyelesaian administrasi penerbitan (karis/karsu/KPE/karpeg/KIP/Cu ti/Satya Lencana Krya Satya dan taspen) tepat waktu	persentase							0,00%	-							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		74%	0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
																Predikat Kinerja	S	SR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
770	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									0	-							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
771	05.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memiliki sertifikat manajerial,teknis dan fungsional	persentase	100,00%	5.926.344.016	100,00%	1.170.332.852	100,00%	881.638.830	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	1.170.332.852	100%	20%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
772	5.4.2.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memiliki sertifikat manajerial, teknis dan fungsional	persentase							0,00%	-							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
773	5.4.2.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memiliki sertifikat manajerial, teknis dan fungsional	persentase							0,00%	-							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		33%	20%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																Predikat Kinerja	SR	SR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Inspektorat
1	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
2	6.01	INSPEKTORAT DAERAH									-	-			-	-			Inspektorat
3	6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	A	33.574.847.409	A	5.367.309.858	A	5.463.382.912	0	-		0%		5.367.309.858	16%		Inspektorat
774	6.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	persentase							0,00%	-							Inspektorat
775	6.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan yang	persentase							0,00%	-							Inspektorat
776	6.1.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	persentase	6,00%						0,00%	-							Inspektorat
777	6.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	persentase							0,00%	-							Inspektorat
778		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang dilaksanakan	persentase							0,00%	-							Inspektorat
779	6.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang dilaksanakan	persentase							0,00%	-							Inspektorat
780	6.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang dilaksanakan	persentase							0,00%	-							Inspektorat
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
781	06.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kapabilitas APIP	nilai	Level 3	9.004.772.172	Level 3	1.415.321.270	Level 3	943.864.100	0	-		0%		Predikat Kinerja	SR	SR	Inspektorat
782	6.1.2.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase Laporan Hasil Pengawasan yang disusun	persentase							0,00%	-							Inspektorat
783	6.1.2.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	persentase							0,00%	-							Inspektorat
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
784	06.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	nilai	Level 3	4.381.003.648	Level 3	351.636.500	Level 3	370.666.600	0	-		0%		Predikat Kinerja	SR	SR	Inspektorat
785	6.1.3.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang disusun	persentase							0,00%	-							Inspektorat
786	6.1.3.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Prosentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	persentase							0,00%	-							Inspektorat
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN														Predikat Kinerja	SR	SR	Kecamatan Banyuglugur
2	7.01	KECAMATAN									-	-		-					Kecamatan Banyuglugur
3	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	A	10.788.999.759	A	1.410.521.627	A	1.921.163.491	0	-		0%		1.410.521.627	13%		Kecamatan Banyuglugur
787	7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	13	16.779.550	11	23.379.550	10	26.902.600	0	-	0%	0%	11	23.379.550	85%	139%	Kecamatan Banyuglugur
788	7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Org/Dok	100	1.114.677.740	229	1.715.110.034	275	1.480.015.197	53	193.718.309	19%	13%	282	1.908.828.343	282%	171%	Kecamatan Banyuglugur
789	7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas ASN yang dihibi	Stel	0,06	8.493.750	25	8.493.750	25	10.149.980	0	9.825.200	0%	97%	25	18.318.950	41667%	216%	Kecamatan Banyuglugur

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
790	7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis/Dokumen yang disusun	Jenis/Dok	8	78.780.500	430	78.780.550	45	88.588.751	17	32.954.100	38%	37%	447	111.734.650	5588%	142%	Kecamatan Banyuglugur
791	7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibeli	Unit	6	417.218.678	5	59.908.000	2	42.695.400	2	36.600.000	100%	86%	7	96.508.000	117%	23%	Kecamatan Banyuglugur
792	7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100%	92.613.200	100%	92.613.200	100%	95.084.320	1100,00%	20.374.572	1100,00%	21,43%	1200,00%	112.987.772	1200%	122%	Kecamatan Banyuglugur
793	7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah teelihara	Jenis	6	148.545.950	25	137.545.950	14	177.727.243	0	21.785.440	0%	12%	25	159.331.390	417%	107%	Kecamatan Banyuglugur
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		7051%	131%	Kecamatan Banyuglugur
															Predikat Kinerja		ST	ST	Kecamatan Banyuglugur
794	07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase	100,00%	783.327.826	100,00%	117.752.000	100,00%	102.357.400	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	117.752.000	100%	15%	Kecamatan Banyuglugur
795	7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti	Rekom	3	41.897.848	3	59.478.650	4	15.495.600	0	-	0%	0%	3	59.478.650	100%	142%	Kecamatan Banyuglugur
796	7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP Paten dan Jumlah Dokumen IKM yang disusun	Layanan	1	100.000.000	2	100.448.800	600	86.861.800	0	15.059.800	0%	17%	2	115.508.600	200%	116%	Kecamatan Banyuglugur
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		150%	129%	Kecamatan Banyuglugur
															Predikat Kinerja		ST	ST	Kecamatan Banyuglugur
797	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase	100,00%	711.005.663			100,00%	-	0,00%	-	0,00%						Kecamatan Banyuglugur
798	7.1.2.2.02	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Rekomendasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rekom	10	124.745.272	10	201.892.050	10	64.261.500	0	689.500	0%	1%	10	202.581.550	100%	162%	Kecamatan Banyuglugur
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	Kecamatan Banyuglugur
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Banyuglugur
799	07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKUKAN	Persentase	100,00%	686.381.271	100,00%	126.983.047	100,00%	64.261.500	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	126.983.047	100%	19%	Kecamatan Banyuglugur
800	7.1.2.2.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Rekomendasi koordinasi FORKOMPIMCA yang difasilitasi	Rekom	-		4	140.595.460	6	15.325.000	0	6.950.000	0%	45%	4	147.545.460			Kecamatan Banyuglugur
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%	Kecamatan Banyuglugur
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Banyuglugur
801	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase	100,00%	113.162.500	100,00%	113.162.500			0,00%	-			100,00%	113.162.500	100%	100%	Kecamatan Banyuglugur
802	7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kegiatan	10	124.745.272	10	201.892.050	10	64.261.500	1	689.500	10%	1%	11	202.581.550	110%	162%	Kecamatan Banyuglugur
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		110%	0%	Kecamatan Banyuglugur
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Banyuglugur
803	07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase	100,00%	312.324.870	100,00%	25.774.000	100,00%	24.637.800	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	25.774.000	100%	8%	Kecamatan Banyuglugur
804	7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rekom	8	65.986.656	8	74.370.950	6	9.312.800	2	3.456.750	33%	37%	10	77.827.700	125%	118%	Kecamatan Banyuglugur
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		125%	0%	Kecamatan Banyuglugur
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Banyuglugur

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																	Kecamatan Jatibanteng
2	7.01	KECAMATAN									-	-			-	-			Kecamatan Jatibanteng
3	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	85,5	13.457.320.190	80,99	1.620.362.459	80,10	2.141.823.322	0	261.516.660	0%	12%	80,99	1.881.879.119	95%	14%	Kecamatan Jatibanteng
805	7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	120	62.139.710	0		0		0	-			0		0%		Kecamatan Jatibanteng
806	7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	18	9.791.472.483	3	1.272.373.868	15	1.645.060.204	3	212.745.430	20%	13%	6	1.485.119.298	33%	15%	Kecamatan Jatibanteng
807	7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang difasilitasi	Stel	0,06	60.524.275	30	10.000.000	0		0	-			30	10.000.000	50000%	17%	Kecamatan Jatibanteng
808	7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	120	1.516.908.668	20	102.599.690	50	60.623.100	22	25.714.600	44%	42%	42	128.314.290	35%	8%	Kecamatan Jatibanteng
809	7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibeli	Jenis	33	336.896.706	4	41.200.500	4	36.401.200	0	-	0%	0%	4	41.200.500	12%	12%	Kecamatan Jatibanteng
810	7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	72	583.789.070	65	70.047.221	13	98.466.600	4	14.323.494	31%	15%	69	84.370.715	96%	14%	Kecamatan Jatibanteng
811	7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	Unit	14	1.105.589.278	14	124.141.180	21	301.272.218	3	8.733.136	14%	3%	17	132.874.316	121%	12%	Kecamatan Jatibanteng
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		7185%	11%	Kecamatan Jatibanteng
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Jatibanteng
812	07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase	100,00%	637.354.516	100,00%	76.800.000	100,00%	72.000.000	100,00%	12.000.000	100,00%	16,67%	200,00%	88.800.000	200%	14%	Kecamatan Jatibanteng
813	7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	90	196.221.617	15	4.800.000	0		0	-			15	4.800.000	17%	2%	Kecamatan Jatibanteng
814	7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP Paten dan Jumlah Dokumen IKM yang disusun	Layanan	3000	441.132.899	500	72.000.000	500	72.000.000	100	12.000.000	20%	17%	600	84.000.000	20%	19%	Kecamatan Jatibanteng
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		18%	11%	Kecamatan Jatibanteng
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Jatibanteng
815	07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase	100,00%	807.763.842	79,00%	43.890.646	100,00%	-	0,00%	-	0,00%		79,00%	43.890.646	79%	5%	Kecamatan Jatibanteng
816	7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	90	807.763.842	15	43.890.646	0		0	-			15	43.890.646	17%	5%	Kecamatan Jatibanteng
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		17%	0%	Kecamatan Jatibanteng
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Jatibanteng
817	07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	persentase	100,00%	379.574.028	60,00%	70.000.000	100,00%		0,00%	-	0,00%		60,00%	70.000.000	60%	18%	Kecamatan Jatibanteng
818	7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi FORKOMPIMCA yang difasilitasi	Koordinasi	4	379.574.028	4	70.000.000	0		0	-			4	70.000.000	100%	18%	Kecamatan Jatibanteng
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	Kecamatan Jatibanteng
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Jatibanteng
819	07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase	100,00%	560.918.393	100,00%	40.000.000	100,00%	38.499.920	17,31%	6.664.100	17,31%	17,31%	117,31%	46.664.100	117%	8%	Kecamatan Jatibanteng

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
820	7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rekomendasi	90	560.918.393	15	40.000.000	15	38.499.920	3	6.664.100	20%	17%	18	46.664.100	20%	8%	Kecamatan Jatibanteng
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		20%	0%	Kecamatan Jatibanteng
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Jatibanteng
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																	Kecamatan Sumbermalang
2	7.01	KECAMATAN									-	-			-	-			Kecamatan Sumbermalang
3	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	A	8.386.231.690	A	2.915.116.536	A	2.204.176.090	0	291.617.464		13%		3.206.734.000		38%	Kecamatan Sumbermalang
821	7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase	100,00%	86.449.220	100,00%	30.593.000	100,00%	17.180.700	33,33%	3.593.000	33,33%	20,91%	133,33%	34.186.000	133%	40%	Kecamatan Sumbermalang
822	7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase	100,00%	6.222.244.192	100,00%	2.285.445.174	100,00%	1.847.958.240	20,69%	246.540.197	20,69%	13,34%	120,69%	2.531.985.371	121%	41%	Kecamatan Sumbermalang
823	7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase	6,00%	10.887.207	100,00%	3.567.520	100,00%	5.400.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	3.567.520	1667%	33%	Kecamatan Sumbermalang
824	7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase	100,00%	403.439.675	100,00%	138.390.210	100,00%	43.422.110	25,84%	6.182.250	25,84%	14,24%	125,84%	144.572.460	126%	36%	Kecamatan Sumbermalang
825	7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase	100,00%	519.745.606	100,00%	100.173.200	100,00%	4.738.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	100.173.200	100%	19%	Kecamatan Sumbermalang
826	7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase	100,00%	623.720.184	100,00%	173.649.192	100,00%	158.982.600	25,68%	22.314.017	25,68%	14,04%	125,68%	195.963.209	126%	31%	Kecamatan Sumbermalang
827	7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase	100,00%	519.745.606	100,00%	183.298.240	100,00%	126.494.440	0,06%	12.988.000	0,06%	10,27%	100,06%	196.286.240	100%	38%	Kecamatan Sumbermalang
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		339%	34%	Kecamatan Sumbermalang
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Sumbermalang
828	07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	PERSENTASE PENELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase	100,00%	247.662.780	100,00%	125.907.440	100,00%	73.753.000	0,00%	8.000.000	0,00%	10,85%	100,00%	133.907.440	100%	54%	Kecamatan Sumbermalang
829	7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase	100,00%	176.719.482	100,00%	57.907.440	100,00%	24.789.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	57.907.440	100%	33%	Kecamatan Sumbermalang
830	7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	persentase	100,00%	70.943.298	100,00%	68.000.000	100,00%	48.964.000	0,17%	8.000.000	0,17%	16,34%	100,17%	76.000.000	100%	107%	Kecamatan Sumbermalang
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	70%	Kecamatan Sumbermalang
															Predikat Kinerja		ST	S	Kecamatan Sumbermalang
831	07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	PROSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase	100,00%	296.091.003	100,00%	99.277.100	100,00%	33.774.280	0,00%	2.254.000	0,00%	6,67%	100,00%	101.531.100	100%	34%	Kecamatan Sumbermalang
832	7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase	100,00%	296.091.003	100,00%	99.277.100	100,00%	33.774.280	0,08%	2.254.000	0,08%	6,67%	100,08%	101.531.100	100%	34%	Kecamatan Sumbermalang
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	Kecamatan Sumbermalang
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Sumbermalang
833	07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase	100,00%	497.979.431	100,00%	169.609.900	100,00%	31.701.000	0,00%	6.432.000	0,00%	20,29%	100,00%	176.041.900	100%	35%	Kecamatan Sumbermalang
834	7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase	100,00%	497.979.431	100,00%	169.609.900	100,00%	31.701.000	0,10%	6.432.000	0,10%	20,29%	100,10%	176.041.900	100%	35%	Kecamatan Sumbermalang
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	Kecamatan Sumbermalang

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																Predikat Kinerja	ST	SR	Kecamatan Sumbermalang
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																	Kecamatan Besuki
2	7.01	KEKAMATAN																	Kecamatan Besuki
3	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	A	14.873.163.724	A	2.203.128.238	A	2.316.156.761	0,17078602	395.567.196		17%		2.598.695.434		17%	Kecamatan Besuki
835	7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	270.996.550	7	24.867.600	7	17.410.000	1	3.898.900	14%	22%	8	28.766.500	114%	11%	Kecamatan Besuki
836	7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	44	12.084.636.624	44	1.811.028.918	44	1.856.758.023	7	291.233.643	16%	16%	51	2.102.262.561	116%	17%	Kecamatan Besuki
837	7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Asn Yang Dibeli	Stel	0,06	55.374.500	21	7.474.000	21	8.932.000	0	-	0%	0%	21	7.474.000	35000%	13%	Kecamatan Besuki
838	7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum Yang Disediakan	Jenis	701	591.240.250	701	97.561.465	701	135.205.030	110	25.611.400	16%	19%	811	123.172.865	116%	21%	Kecamatan Besuki
839	7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Yang Dibeli	Jenis	9	478.661.550	9	26.275.150	9	57.118.600	8	40.025.000	89%	70%	17	66.300.150	189%	14%	Kecamatan Besuki
840	7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	435	529.227.385	435	91.915.850	435	96.854.320	120	18.689.950	28%	19%	555	110.605.800	128%	21%	Kecamatan Besuki
841	7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	Unit	36	789.127.165	36	142.315.755	36	141.558.788	7	16.108.303	19%	11%	43	158.424.058	119%	20%	Kecamatan Besuki
842	7.1.1.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen IkM Yang Disusun	Dokumen	10	73.899.700	10	1.689.500	10	2.320.000	0	-	0%	0%	10	1.689.500	100%	2%	Kecamatan Besuki
																Rata-Rata capaian kinerja (%)	4485%	15%	
																Predikat Kinerja	ST	SR	
843	07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase	100,00%	677.164.891	100,00%	87.190.300	100,00%	75.994.500	27,00%	20.520.000	27,00%	27,00%	127,00%	107.710.300	127%	16%	Kecamatan Besuki
844	7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kegiatan Pemerintahan Yang Tidak diadopsi	Dokumen	4	311.279.350	4	22.956.750	4	12.421.700	2	6.970.000	50%	56%	6	29.926.750	150%	10%	Kecamatan Besuki
845	7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Layanan Sesuai Dengan SOP Paten Dan Jumlah Dokumen IKM Yang Disusun	Dokumen	5	365.885.541	5	64.233.550	5	63.572.800	1	13.550.000	20%	21%	6	77.783.550	120%	21%	Kecamatan Besuki
																Rata-Rata capaian kinerja (%)	135%	15%	
																Predikat Kinerja	ST	SR	
846	07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase	100,00%	326.226.426	100,00%	44.067.200	100,00%	8.742.200	34,50%	3.016.000	34,50%	34,50%	134,50%	47.083.200	134%	14%	Kecamatan Besuki
847	7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Tidak diadopsi	Dokumen	6	326.226.426	6	44.067.200	6	8.742.200	3	3.016.000	50%	34%	9	47.083.200	150%	14%	Kecamatan Besuki
																Rata-Rata capaian kinerja (%)	150%	0%	
																Predikat Kinerja	ST	SR	
848	07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase	100,00%	321.038.205	100,00%	69.998.500	100,00%	-	0,00%	-	0,00%		100,00%	69.998.500	100%	22%	Kecamatan Besuki
849	7.1.3.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi FOKOMPIMKA Yang Difasilitasi	Desa	10	321.038.205	10	69.998.500	0	-	0	-			10	69.998.500	100%	22%	Kecamatan Besuki
																Rata-Rata capaian kinerja (%)	100%	0%	
																Predikat Kinerja	ST	SR	
850	07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase	100,00%	365.924.393	100,00%	39.173.400	100,00%	24.070.000	64,19%	15.449.900	64,19%	64,19%	164,19%	54.623.300	164%	15%	Kecamatan Besuki
851	7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	12	365.924.393	12	39.173.400	12	24.070.000	8	15.449.900	67%	64%	20	54.623.300	167%	15%	Kecamatan Besuki
																Rata-Rata capaian kinerja (%)	167%	0%	
																Predikat Kinerja	ST	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
868	7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase	100,00%	575.114.580	97,83%	17.610.000	100,00%	10.650.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	97,83%	17.610.000	98%	3%	Kecamatan Mlandingan
869	7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase	100,00%	10.166.918.700	88,32%	1.340.112.525	100,00%	1.619.789.509	15,63%	253.125.448	15,63%	15,63%	103,95%	1.593.237.973	104%	16%	Kecamatan Mlandingan
870	7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	persentase	100,00%	40.135.040	0,00%	-	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0%	0%	Kecamatan Mlandingan
871	7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase	100,00%	818.334.341	99,33%	69.942.000	100,00%	71.545.684	22,20%	15.885.050	22,20%	22,20%	121,53%	85.827.050	122%	10%	Kecamatan Mlandingan
872	7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase	100,00%	700.810.541	99,99%	27.150.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	99,99%	27.150.000	100%	4%	Kecamatan Mlandingan
873	7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase	100,00%	2.208.974.722	98,88%	216.188.188	100,00%	221.931.600	17,12%	37.994.505	17,12%	17,12%	116,00%	254.182.693	116%	12%	Kecamatan Mlandingan
874	7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase	100,00%	2.033.390.310	56,34%	128.789.569	100,00%	154.859.700	15,78%	24.430.800	15,78%	15,78%	72,12%	153.220.369	72%	8%	Kecamatan Mlandingan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		72%	7%	Kecamatan Mlandingan
															Predikat Kinerja		S	SR	Kecamatan Mlandingan
875	07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	PERSENTASE PEMENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase	100,00%	578.962.715	100,00%	83.571.000	100,00%	68.887.275	11,61%	8.000.000	11,61%	11,61%	111,61%	91.571.000	112%	16%	Kecamatan Mlandingan
876	7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	persentase	100,00%	261.804.980	99,34%	21.096.000	100,00%	5.117.275	0,00%	-	0,00%	0,00%	99,34%	21.096.000	99%	8%	Kecamatan Mlandingan
877	7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	persentase	100,00%	391.702.125	99,96%	62.475.000	100,00%	63.770.000	12,55%	8.000.000	12,55%	12,55%	112,51%	70.475.000	113%	18%	Kecamatan Mlandingan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		106%	13%	Kecamatan Mlandingan
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Mlandingan
878	07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	PROSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase	100,00%	312.279.981	100,00%	42.376.250	100,00%	4.930.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	42.376.250	100%	14%	Kecamatan Mlandingan
879	7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase kegiatan pemberdayaan desa	persentase	100,00%	312.279.981	99,87%	42.376.250	100,00%	4.930.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	99,87%	42.376.250	100%	14%	Kecamatan Mlandingan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	Kecamatan Mlandingan
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Mlandingan
880	07.01.04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase	100,00%	463.127.972	100,00%	28.888.600	100,00%	9.860.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	28.888.600	100%	6%	Kecamatan Mlandingan
881	7.1.3.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peresentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase	100,00%	463.127.972	99,77%	28.888.600	100,00%	9.860.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	99,77%	28.888.600	100%	6%	Kecamatan Mlandingan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	Kecamatan Mlandingan
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Mlandingan
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																	Kecamatan Bungatan
2	7.01	KECAMATAN									-	-			-	-			Kecamatan Bungatan
3	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	A	14.660.886.912	A	2.067.192.291	A	2.168.186.980	0	284.772.375		13%		2.351.964.666		16%	Kecamatan Bungatan
882	7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja tersusun	dokumen	48	76.022.715	8	11.860.300	8	10.491.400	0	-	0%	0%	8	11.860.300	17%	16%	Kecamatan Bungatan
883	7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan tersusun	dokumen	72	10.982.046.858	12	1.312.352.287	12	1.755.763.340	25	249.709.494	208%	14%	37	1.562.061.781	51%	14%	Kecamatan Bungatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
884	7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai tertib administrasi kepegawaian	orang	0,06	46.226.025	14	3.430.000	19	8.840.700	0	-	0%	0%	14	3.430.000	23333%	7%	Kecamatan Bungatan
885	7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi dalam 1 tahun	persentase	10000,00%	639.828.380	10000,00%	73.980.508	10000,00%	92.891.200	2500,00%	840.000	25,00%	0,90%	12500,00%	74.820.508	125%	12%	Kecamatan Bungatan
886	7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	paket	22	480.276.220	4	78.670.000	4	17.204.000	0	-	0%	0%	4	78.670.000	18%	16%	Kecamatan Bungatan
887	7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dalam 1 tahun	persentase	10000,00%	852.470.790	10000,00%	113.917.146	10000,00%	125.501.540	2500,00%	18.063.221	25,00%	14,39%	12500,00%	131.980.367	125%	15%	Kecamatan Bungatan
888	7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang mendapat pemeliharaan kondisi baik	unit	170	1.584.015.924	27	472.982.050	25	157.494.800	6	16.159.660	24%	10%	33	489.141.710	19%	31%	Kecamatan Bungatan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		3384%	16%	Kecamatan Bungatan
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Bungatan
889	07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian IKM	persentase	100,00%	391.037.873	100,00%	54.317.000	100,00%	50.631.900	0,00%	6.000.000	0,00%	11,85%	100,00%	60.317.000	100%	15%	Kecamatan Bungatan
890	7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan	desa	42	187.840.085	7	15.977.000	7	12.864.300	0	-	0%	0%	7	15.977.000	17%	9%	Kecamatan Bungatan
891	7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan PATEN terlayani	jenis	120	203.197.788	20	38.340.000	20	37.767.600	3	6.000.000	15%	16%	23	44.340.000	19%	22%	Kecamatan Bungatan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		18%	15%	Kecamatan Bungatan
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Bungatan
892	07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Berdesaan	persentase	100,00%	635.590.887	100,00%	80.195.000	100,00%	51.868.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	80.195.000	100%	13%	Kecamatan Bungatan
893	7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terlaksana	kegiatan	30	635.590.887	5	80.195.000	5	51.868.000	0	-	0%	0%	5	80.195.000	17%	13%	Kecamatan Bungatan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		17%	0%	Kecamatan Bungatan
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Bungatan
894	07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Keteriban Umum	persentase	100,00%	349.548.470	100,00%	69.491.000	100,00%	34.802.800	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	69.491.000	100%	20%	Kecamatan Bungatan
895	7.1.4.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa mendapatkan pembinaan trantibum	desa	42	349.548.470	7	69.491.000	7	34.802.800	0	-	0%	0%	7	69.491.000	17%	20%	Kecamatan Bungatan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		17%	0%	Kecamatan Bungatan
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Bungatan
896	07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang baik	persentase	100,00%	444.684.583	100,00%	19.733.600	100,00%	58.190.600	0,00%	90.000	0,00%	0,15%	100,00%	19.823.600	100%	4%	Kecamatan Bungatan
897	7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa mendapatkan pendampingan pengelolaan keuangan	desa	42	444.684.583	7	19.733.600	7	58.190.600	1	90.000	14%	0%	8	19.823.600	19%	4%	Kecamatan Bungatan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		19%	0%	Kecamatan Bungatan
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Bungatan
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																	Kecamatan Kendit
2	7.01	KECAMATAN									-	-							Kecamatan Kendit
3	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	A	12.016.194.307	A	1.598.378.382	A	2.151.024.316	0	-		0%		1.598.378.382		13%	Kecamatan Kendit
898	7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersedia	dokumen	60	120.900.350	9	13.847.300	10	13.736.000	0	-	0%	0%	9	13.847.300	15%	11%	Kecamatan Kendit

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
899	7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat Daerah yang disusun	dokumen	88	11.625.438.008	71	1.264.477.592	1	1.619.810.403	0	219.125.915	0%	14%	71	1.483.603.507	81%	13%	Kecamatan Kendit
900	7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas ASN yang dihel	stel	0,06	29.473.325	-		17	7.592.200	13	5.720.000	76%	75%					Kecamatan Kendit
901	7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum yang disediakan	jenis	340	1.171.904.805	44	33.638.966	53	127.432.010	10	10.990.000	19%	9%	54	44.628.966	16%	4%	Kecamatan Kendit
902	7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan kantor dibeli	jenis	49	471.447.050	8	32.148.000	2	4.008.400	0	-	0%	0%	8	32.148.000	16%	7%	Kecamatan Kendit
903	7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terbayarkan	jenis jasa	30	1.385.314.315	9	155.461.734	3	214.747.200	0	32.419.671	0%	15%	9	187.881.405	30%	14%	Kecamatan Kendit
904	7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	unit	121	2.204.759.975	55	98.804.790	11	163.698.103	2	29.090.000	18%	18%	57	127.894.790	47%	6%	Kecamatan Kendit
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		29%	8%	Kecamatan Kendit
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Kendit
905	07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase	100,00%	553.175.213	100,00%	83.150.000	100,00%	4.401.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	83.150.000	100%	15%	Kecamatan Kendit
906	7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti	rekomen	12	375.240.000	2	43.980.000	2	3.300.000	1	1.650.000	50%	50%	3	45.630.000	25%	12%	Kecamatan Kendit
907	7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah laporan layanan sesuai SOP PATEN	dokumen	6	234.497.325	2	39.170.000	1	1.101.000	0	-	0%	0%	2	39.170.000	33%	17%	Kecamatan Kendit
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		29%	14%	Kecamatan Kendit
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Kendit
908	07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase	100,00%	799.269.761	100,00%	53.951.600	100,00%	28.260.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	53.951.600	100%	7%	Kecamatan Kendit
909	7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Kesra yang ditindaklanjuti	rekomen	18	560.855.460	2	53.951.600	3	28.260.000	1	1.800.000	33%	6%	3	55.751.600	17%	10%	Kecamatan Kendit
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		17%	0%	Kecamatan Kendit
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Kendit
910	07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN JUMUM	persentase	100,00%	350.115.719	100,00%	69.150.000	100,00%	33.600.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	69.150.000	100%	20%	Kecamatan Kendit
911	7.1.4.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Forkopimka	rekomen	16	420.000.000	2	69.150.000	2	33.600.000	0	-	0%	0%	2	69.150.000	13%	16%	Kecamatan Kendit
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		13%	0%	Kecamatan Kendit
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Kendit
912	07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase	100,00%	729.779.032	100,00%	78.600.000	100,00%	8.275.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	78.600.000	100%	11%	Kecamatan Kendit
913	7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	rekomen	42	824.809.100	5	78.600.000	7	8.275.000	1	6.000.000	14%	73%	6	84.600.000	14%	10%	Kecamatan Kendit
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		14%	0%	Kecamatan Kendit
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Kendit
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																	Kecamatan Panarukan
2	7.01	KECAMATAN									-	-			-	-			Kecamatan Panarukan
3	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	A	12.863.557.560	A	1.305.817.785	A	2,309,03 9,747	0	343.157.152			1.648.974.937		13%		Kecamatan Panarukan
914	7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	66	110.957.040	6	11.340.000	11	18.227.840	5	2.685.000	45%	15%	11	14.025.000	17%	13%	Kecamatan Panarukan
915	7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	90	11.757.889.782	4	1.054.986.470	15	1,945,95 8,297	13	269.623.508	87%		17	1.324.609.978	19%	11%	Kecamatan Panarukan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
916	7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas ASN yang dihel	stel	0,06	31.257.000	15	5.096.250	16	5.096.250	16	6.472.000	100%	127%	31	11.568.250	51667%	37%	Kecamatan Panarukan
917	7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis administrasi umum yang disediakan	jenis	8	708.229.775	6	62.771.085	8	92.637.950	1	15.559.800	13%	17%	7	78.330.885	88%	11%	Kecamatan Panarukan
918	7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis	3	927.884.750	4	105.363.980	3	150.052,400	3	28.500.934	100%		7	133.864.914	233%	14%	Kecamatan Panarukan
919	7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	26	635.003.910	4	66.260.000	25	92.077.240	2	20.315.910	8%	22%	6	86.575.910	23%	14%	Kecamatan Panarukan
920	7.1.1.2.09	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen IKM yang disusun	dokumen	1	104.986.020	0	-	1	4.989.770	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Panarukan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		7435%	14%	Kecamatan Panarukan
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Panarukan
921	07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase	100,00%	775.190.923	93,61%	84.447.300	100,00%	113.999.120	0,00%	20.466.700	0,00%	17,95%	93,61%	104.914.000	94%	14%	Kecamatan Panarukan
922	7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti	dokumen	78	209.677.448	5	21.125.300	13	27.587.240	1	4.866.700	8%	18%	6	25.992.000	8%	12%	Kecamatan Panarukan
923	7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP Paten dan Jumlah Dokumen IKM yang disusun	dokumen	6	543.371.280	1158	63.322.000	1000	86.411.880	265	15.600.000	27%	18%	1423	78.922.000	23717%	15%	Kecamatan Panarukan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		11862%	13%	Kecamatan Panarukan
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Panarukan
924	07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase	100,00%	119.776.571	86,56%	10.240.000	100,00%	11.830.100	0,00%	6.946.000	0,00%	58,71%	86,56%	17.186.000	87%	14%	Kecamatan Panarukan
925	7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	dokumen	178	131.487.156	8	10.240.000	33	11.830.100	1	6.946.000	3%	59%	9	17.186.000	5%	13%	Kecamatan Panarukan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		5%	0%	Kecamatan Panarukan
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Panarukan
926	07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	persentase	100,00%	345.793.712	64,54%	45.112.000	100,00%	17.039.000	0,00%	7.088.000	0,00%	41,60%	64,54%	52.200.000	65%	15%	Kecamatan Panarukan
927	7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi FORKOMPIMCA yang difasilitasi	koordinasi	18	153.169.743	3	45.112.000	3	17.039.000	2	7.088.000	67%	42%	5	52.200.000	28%	34%	Kecamatan Panarukan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		28%	0%	Kecamatan Panarukan
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Panarukan
928	07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase	100,00%	760.669.922	78,77%	62.562.980	100,00%	79.427,704	0,00%	11.405.800	0,00%		78,77%	73.968.780	79%	10%	Kecamatan Panarukan
929	7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	rekomendasi	295	601.116.174	3	62.562.980	52	79.427,704	4	11.405.800	8%		7	73.968.780	2%	12%	Kecamatan Panarukan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		2%	0%	Kecamatan Panarukan
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Panarukan
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																	Kecamatan Panarukan
2	7.01	KECAMATAN									-	-			-	-			Kecamatan Situbondo
3	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	A	33.726.057.844	A	4.115.772.237	A	5.398.307.016	0	713.430.846		13%		4.829.203.083		14%	Kecamatan Situbondo

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
930	7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	153	616.686.680	44	135.227.415	28	21.170.000	0	-	0%	0%	44	135.227.415	29%	22%	Kecamatan Situbondo	
931	7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen	271	30.347.101.958	24	501.553.100	39	4.080.488.917	3	560.509.705	8%	14%	27	1.062.062.805	10%	3%	Kecamatan Situbondo	
932	7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pakaian dinas asn yang dibeli	Stel/Potong	0,06	113.727.000	204	68.330.000	52	13.227.400	0	-	0%	0%	204	68.330.000	340000%	60%	Kecamatan Situbondo	
933	7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	Jenis	1510	4.766.641.035	511	810.341.341	230	326.775.824	50	27.164.060	22%	8%	561	837.505.401	37%	18%	Kecamatan Situbondo	
934	7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dibeli	Unit	202	3.659.800.240	36	361.001.500	38	236.313.000	6	22.990.000	16%	10%	42	383.991.500	21%	10%	Kecamatan Situbondo	
935	7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis	5	3.586.581.730	5	1.544.779.320	5	477.342.100	5	76.136.881	100%	16%	10	1.620.916.201	200%	45%	Kecamatan Situbondo	
936	7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Unit	370	4.226.159.205	181	272.303.820	57	161.962.275	15	26.630.200	26%	16%	196	298.934.020	53%	7%	Kecamatan Situbondo	
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		48621%	24%	Kecamatan Situbondo	
																Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Situbondo
937	07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase	100,00%	2.086.527.666	100,00%	117.398.250	100,00%	323.202.800	30,00%	15.831.200	30,00%	4,90%	130,00%	133.229.450	130%	6%	Kecamatan Situbondo	
938	7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti	dokumen	76	2.172.939.053	9	381.573.850	14	395.000.000	3,5	3.831.200	25%	1%	12,5	385.405.050	16%	18%	Kecamatan Situbondo	
939	7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	jumlah dokumen layanan administrasi terpadu kecamatan yang disusun	dokumen	12	1.734.828.000	8	100.595.250	6	350.000.000	2	12.000.000	33%	3%	10	112.595.250	83%	6%	Kecamatan Situbondo	
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		50%	12%	Kecamatan Situbondo	
																Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Situbondo
940	07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase	100%	4.147.377.820	100%	240.024.300	100%	324.328.000	37,50%	25.252.600	37,50%	7,79%	137,50%	265.276.900	138%	6%	Kecamatan Situbondo	
941	7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah dokumen rekomendasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	dokumen	51	3.313.241.815	16	839.358.150	6	51.383.800	1	9.507.600	17%	19%	17	848.865.750	33%	26%	Kecamatan Situbondo	
942	7.1.3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemberdayaan kelurahan yang ditindaklanjuti	dokumen	63	3.731.951.630	50	302.847.955	2	272.944.200	2	15.745.000	100%	6%	52	318.592.955	83%	9%	Kecamatan Situbondo	
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		58%	0%	Kecamatan Situbondo	
																Predikat Kinerja		R	SR	Kecamatan Situbondo
943	07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase	100%	1.177.227.242	100%	182.967.088	100%	95.143.260	16,67%	19.750.000	16,67%	20,76%	116,67%	202.717.088	117%	17%	Kecamatan Situbondo	
944	7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah rekomendasi ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti dan jumlah RT yang dibina	dokumen	24	1.050.983.490	12	183.731.100	6	90.543.260	1	19.750.000	17%	22%	13	203.481.100	54%	19%	Kecamatan Situbondo	
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		54%	0%	Kecamatan Situbondo	
																Predikat Kinerja		R	SR	Kecamatan Situbondo
945	07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase	100%	1.767.785.401	100%	85.441.800	100%	97.300.600	3,45%	27.056.600	3,45%	27,81%	103,45%	112.498.400	103%	6%	Kecamatan Situbondo	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
946	7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	dokumen	158	4.404.171.990	22	1.219.440.700	29	97.300.600	1	27.056.600	3%	28%	23	1.246.497.300	15%	28%	Kecamatan Situbondo
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		15%	0%	Kecamatan Situbondo
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Situbondo
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																	Kecamatan Panji
2	7.01	KECAMATAN									-	-			-	-			Kecamatan Panji
3	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	A	45.707.838.140	A	3.971.791.272	A	4.895.058.040	0	-		0%		3.971.791.272		9%	Kecamatan Panji
947	7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	72	304.033.070	7	19.498.000	13	22.597.500	0	-	0%	0%	7	19.498.000	10%	6%	Kecamatan Panji
948	7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	dokumen	512	29.151.029.930	66	3.570.808.344	90	4.310.482.140	0	631.994.174	0%	15%	66	4.202.802.518	13%	14%	Kecamatan Panji
949	7.1.1.2.05	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	jumlah administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan		0,06						0	-							Kecamatan Panji
950	7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pengadaan pakaian dinas aso yang dibeli	Stel	418	143.287.200	93	9.728.283	65	4.356.000	0	11.165.000	0%	256%	93	20.893.283	22%	15%	Kecamatan Panji
951	7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah disediakan	Jenis	1178	3.199.111.865	177	109.252.850	201	161.026.486	14	34.872.772	7%	22%	191	144.125.622	16%	5%	Kecamatan Panji
952	7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dibeli	Unit	61	4.815.469.420	3	11.000.000	14	33.605.000	5	23.747.907	36%	71%	8	34.747.907	13%	1%	Kecamatan Panji
953	7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis	28114	6.375.665.680	4203	179.967.495	4767	213.923.900	3	79.704.781	0%	37%	4206	259.672.276	15%	4%	Kecamatan Panji
954	7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	Unit	352	1.689.241.025	62	71.536.300	58	149.067.014	15	20.727.000	26%	14%	77	92.263.300	22%	5%	Kecamatan Panji
955	7.1.1.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen IKM yang disusun	Dokumen	1	29.999.950					0	-							Kecamatan Panji
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		12%	6%	Kecamatan Panji
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Panji
956	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase	1	1.183.068.000	1	2.399.600	1	72.251.400	0	-	0%	0%	1	2.399.600	100%	0%	Kecamatan Panji
957	7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindak lanjuti	Rekomendasi	46	487.510.000	26		4	34.047.400	3	9.020.000	75%	26%	29		63%		Kecamatan Panji
958	7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	jumlah layanan sesuai dengan sop paten dan jumlah dokumen ikm /profil yang disusun	Layanan / Dokumen	2850	695.558.000	5 Layanan 1 Dokumen	2.399.600	500 Layanan 7 Dokumen	38.204.000	100	22.640.000		59%		25.039.600		4%	Kecamatan Panji
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		32%	2%	Kecamatan Panji
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Panji
959	7.1.2.2.04	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT						37.162.200			0	-				37.162.200			Kecamatan Panji
960	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase	1	2.691.683.750	1	39.677.350	1	30.318.000	0	-	0%	0%	1	39.677.350	100%	1%	Kecamatan Panji
961	7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah dokumen rekomendasi kegiatan kesra yang ditindak lanjuti	Dokumen / Rekomendasi	368	2.164.752.000	78	39.677.350	58	30.318.000	5	16.815.000	9%	55%	83	56.492.350	23%	3%	Kecamatan Panji
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		61%	4%	Kecamatan Panji
															Predikat Kinerja		R	SR	Kecamatan Panji
962	7.1.3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah dokumen rekomendasi kegiatan kesra yang ditindak lanjuti	Dokumen / Rekomendasi	312	526.931.750	26		52		0	35.135.000	0%		26		8%		Kecamatan Panji
963	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase	1	70.000.000	1	76.099.000	1	10.078.800	0	-	0%	0%	1	76.099.000	100%	109%	Kecamatan Panji

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	109%	Kecamatan Panji
															Predikat Kinerja		ST	ST	Kecamatan Panji
964	7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertarikan Umum	jumlah koordinasi forkompika yang difasilitasi	Operasional FORKOPIIM KA	4	70.000.000	4	76.099.000	4	10.078.800	0	9.762.000	0%	97%	4	85.861.000	100%	123%	Kecamatan Panji
965	07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LUMUM	Presentase	1	2.637.867.200	1	106.904.200	-	0	-	-	-	-	1	106.904.200	100%	4%	Kecamatan Panji
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	Kecamatan Panji
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Panji
966	7.1.4.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah dokumen rekomendasi penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Dokumen / Rekomendasi	312	2.637.867.200	52	106.904.200	52	-	0	-	0%	-	52	106.904.200	17%	4%	Kecamatan Panji
967	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase	1	818.182.800	1	-	1	64.238.000	0	-	0%	0%	1	-	100%	0%	Kecamatan Panji
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	Kecamatan Panji
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Panji
1	7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	112															Kecamatan Mangaran
2	7.01	KECAMATAN									-	-			-	-			Kecamatan Mangaran
3	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	A	100	13.014.512.895	81	1.585.005.153	82	1.919.686.453	0	307.271.132	0%	16%	81	1.892.276.285	81%	15%	Kecamatan Mangaran
968	7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	60	124.925.450	14	16.900.949	14	35.075.170	0,05	10.905.930	0%	31%	14,05	27.806.879	23%	22%	Kecamatan Mangaran
969	7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen	15	11.983.213.955	12	1.314.510.317	12	1.522.738.773	0,03	237.315.332	0%	16%	12,03	1.551.825.649	80%	13%	Kecamatan Mangaran
970	7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas ASN yang dibeli	stel	0,06	36.788.325	25	4.516.875	25	6.187.500	0	-	0%	0%	25	4.516.875	41667%	12%	Kecamatan Mangaran
971	7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	jenis	342	1.195.188.665	8	38.583.270	8	80.387.970	0,06	18.265.970	1%	23%	8,06	56.849.240	2%	5%	Kecamatan Mangaran
972	7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	persentase	100,00%	1.390.691.815	0,00%	-	800,00%	129.342.840	8,00%	21.790.000	1,00%	16,85%	8,00%	21.790.000	8%	2%	Kecamatan Mangaran
973	7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola	unit	132	2.736.276.435	22	87.716.750	14	145.954.200	0,05	18.993.900	0%	13%	22,05	106.710.650	17%	4%	Kecamatan Mangaran
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		6966%	10%	Kecamatan Mangaran
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Mangaran
974	07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase	100,00%	553.823.067	100,00%	47.818.842	100,00%	82.889.240	100,00%	15.619.800	100,00%	18,84%	200,00%	63.438.642	200%	11%	Kecamatan Mangaran
975	7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	rekomenai	12	411.825.000	3	12.381.262	3	52.909.860	0,06	9.684.900	2%	18%	3,06	22.066.162	26%	5%	Kecamatan Mangaran
976	7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	dokumen	6	246.497.325	1	35.437.580	2	29.979.380	0,07	5.934.900	4%	20%	1,07	41.372.480	18%	17%	Kecamatan Mangaran
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		22%	11%	Kecamatan Mangaran
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Mangaran
977	07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase	100,00%	451.173.794	100,00%	42.699.395	100,00%	43.970.990	0,00%	6.800.000	0,00%	15,46%	100,00%	49.499.395	100%	11%	Kecamatan Mangaran

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
978	7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	rekomen	3	718.660.320	3	42.699.395	3	43.970.990	0,04	6.800.000	1%	15%	3,04	49.499.395	101%	7%	Kecamatan Mangaran
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		101%	0%	Kecamatan Mangaran
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Mangaran
979	07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	persentase	100,00%	320.549.553	100,00%	70.000.000	100,00%		0,00%	-	0,00%		100,00%	70.000.000	100%	22%	Kecamatan Mangaran
980	7.1.3.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah koordinasi forkompimka yang difasilitasi	rekomen	3	420.000.000	3	70.000.000	0	-	0	-			3	70.000.000	100%	17%	Kecamatan Mangaran
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	Kecamatan Mangaran
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Mangaran
981	07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase	100,00%	972.987.850	100,00%	135.208.855	100,00%	109.551.010	0,00%	28.807.480	0,00%	26,30%	100,00%	164.016.335	100%	17%	Kecamatan Mangaran
982	7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	rekomen	7	942.048.750	3	135.208.855	3	109.551.010	0,15	28.807.480	5%	26%	3,15	164.016.335	45%	17%	Kecamatan Mangaran
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		45%	0%	Kecamatan Mangaran
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Mangaran
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																	Kecamatan Kapongan
2	7.01	KECAMATAN									-	-			-	-			Kecamatan Kapongan
3	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	A (85,50)	22.516.667.526	A (82,45)	1.894.426.582	A (85,10)	2.874.196.197	0	285.780.376		10%		2.180.206.958		10%	Kecamatan Kapongan
983	7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi, kinerja perangkat daerah	dokumen	120	113.895.000	21	4.380.000	19	5.280.000	3	-	16%	0%	24	4.380.000	20%	4%	Kecamatan Kapongan
984	7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	persentase	100,00%	15.167.210.725	80,00%	1.632.376.832	100,00%	2.214.037.647	23,56%	273.780.376	23,56%	12,37%	103,56%	1.906.157.208	104%	13%	Kecamatan Kapongan
985	7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	Stel	0,06	72.000.000	63	-	32	8.712.000	0	-	0%	0%	63		105000%		Kecamatan Kapongan
986	7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase administrasi umum perangkat daerah	persentase	100,00%	861.884.995	100,00%	42.342.400	100,00%	88.041.340	29,49%	-	29,49%	0,00%	129,49%	42.342.400	129%	5%	Kecamatan Kapongan
987	7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persentase	100,00%	1.023.024.306	99,00%	18.850.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%		99,00%	18.850.000	99%	2%	Kecamatan Kapongan
988	7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tercapainya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persentase	100,00%	948.222.500	100,00%	101.652.350	100,00%	139.317.010	32,62%	12.000.000	32,62%	8,61%	132,62%	113.652.350	133%	12%	Kecamatan Kapongan
989	7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persentase	100,00%	4.330.430.000	98,00%	94.825.000	100,00%	418.808.200	25,52%	-	25,52%	0,00%	123,52%	94.825.000	124%	2%	Kecamatan Kapongan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		15087%	5%	Kecamatan Kapongan
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Kapongan
990	07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase	100,00%	1.400.000.000	100,00%	65.600.000	100,00%	72.425.000	32,56%	11.000.000	32,56%	15,19%	132,56%	76.600.000	133%	5%	Kecamatan Kapongan
991	7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti	persentase	100,00%	600.000.000	100,00%	25.600.000	100,00%	1.200.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	25.600.000	100%	4%	Kecamatan Kapongan
992	7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	orang	600	800.000.000	66	40.000.000	100	71.225.000	30	11.000.000	30%	15%	96	51.000.000	16%	6%	Kecamatan Kapongan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		58%	5%	Kecamatan Kanongkan
															Predikat Kinerja		R	SR	Kecamatan Kanongkan
993	07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase	100,00%	1.098.000.000	100,00%	24.400.000	100,00%	5.927.500	28,59%	-	28,59%	0,00%	128,59%	24.400.000	129%	2%	Kecamatan Kapongan
994	7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Desa	48	1.098.000.000	1	24.400.000	1	5.927.500	0,2859	-	29%	0%	1,2859	24.400.000	3%	2%	Kecamatan Kanongkan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		3%	0%	Kecamatan Kanongkan
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Kanongkan
995	07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase	100,00%	420.000.000	100,00%	69.900.000	100,00%	-	2,36%	-	2,36%		102,36%	69.900.000	102%	17%	Kecamatan Kapongan
996	7.1.4.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi forkompimca yang difasilitasi	persentase	100,00%	420.000.000	100,00%	69.900.000	100,00%	-	2,36%	-	2,36%		102,36%	69.900.000	102%	17%	Kecamatan Kapongan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		102%	0%	Kecamatan Kanongkan
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Kanongkan
997	07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase	100,00%	1.200.000.000	100,00%	54.000.000	100,00%	67.816.400	59,57%	10.000.000	59,57%	14,75%	159,57%	64.000.000	160%	5%	Kecamatan Kapongan
998	7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	persentase	100,00%	1.200.000.000	98,00%	54.000.000	100,00%	67.816.400	59,57%	10.000.000	59,57%	14,75%	157,57%	64.000.000	158%	5%	Kecamatan Kapongan
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		158%	0%	Kecamatan Kanongkan
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Kanongkan
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																	Kecamatan Arjasa
2	7.01	KECAMATAN																	Kecamatan Arjasa
3	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	A	12.123.546.940	A	1.318.336.876	A	1.907.946.658	0	278.827.959		15%		1.597.164.835		13%	Kecamatan Arjasa
999	7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	68	100.806.535	10	24.073.650	9	4.710.000	1	580.000	11%	12%	11	24.653.650	16%	24%	Kecamatan Arjasa
1000	7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	66	9.808.119.166	1	964.585.149	13	1.528.341.368	0	206.772.059	0%	14%	1	1.171.357.208	2%	12%	Kecamatan Arjasa
1001	7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas ASN yang dibeli	stel	0,06	43.059.975	10	6.290.000	16	6.902.000	4	-	25%	0%	14	6.290.000	23333%	15%	Kecamatan Arjasa
1002	7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah disediakan	jenis	265	904.254.733	41	91.377.285	1	99.726.000	1	22.275.900	100%	22%	42	113.653.185	16%	13%	Kecamatan Arjasa
1003	7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah	unit	42	519.960.859	0		2	13.258.300	1	5.600.000	50%	42%	1		2%		Kecamatan Arjasa
1004	7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	jenis	15	709.277.490	6	113.752.590	6	120.235.600	2	16.663.000	33%	14%	8	130.415.590	53%	18%	Kecamatan Arjasa
1005	7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	unit	112	1.462.307.530	11	118.258.202	11	134.773.390	11	26.937.000	100%	20%	22	145.195.202	20%	10%	Kecamatan Arjasa
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		3349%	13%	Kecamatan Arjasa
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Arjasa
1006	07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase	100,00%	571.732.112	100,00%	88.383.400	100,00%	86.950.000	100,00%	16.960.000	100,00%	19,51%	200,00%	105.343.400	200%	18%	Kecamatan Arjasa
1007	7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kegiatan	18	170.478.979	3	15.360.000	3	14.080.000	3	4.960.000	100%	35%	6	20.320.000	33%	12%	Kecamatan Arjasa

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1008	7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP PATEN dan Jumlah Dokumen IKM yang disusun	layanan / dokumen	6000 / 6	437.796.498	1000 / 1	73.023.400	1000 / 1	72.870.000	0	12.000.000		16%		85.023.400		19%	Kecamatan Arjasa
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		17%	16%	Kecamatan Arjasa
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Arjasa
1009	07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase	100,00%	337.100.451	100,00%	37.720.000	100,00%	14.400.000	100,00%	2.880.000	100,00%	20,00%	200,00%	40.600.000	200%	12%	Kecamatan Arjasa
1010	7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Persentase	10000,00%	434.078.679	10000,00%	37.720.000	10000,00%	14.400.000	10000,00%	2.880.000	100,00%	20,00%	20000,00%	40.600.000	200%	9%	Kecamatan Arjasa
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		200%	0%	Kecamatan Arjasa
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Arjasa
1011	07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	persentase	100,00%	336.399.681	100,00%	69.660.000	100,00%	18.000.000	100,00%	15.300.000	100,00%	85,00%	200,00%	84.960.000	200%	25%	Kecamatan Arjasa
1012	7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Forkopimka	kegiatan	48	378.877.188	2	69.660.000	1	18.000.000	1	15.300.000	100%	85%	3	84.960.000	6%	22%	Kecamatan Arjasa
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		6%	0%	Kecamatan Arjasa
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Arjasa
1013	07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase	100,00%	343.316.723	100,00%	34.968.650	100,00%	46.700.000	100,00%	13.240.000	100,00%	28,35%	200,00%	48.208.650	200%	14%	Kecamatan Arjasa
1014	7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kegiatan	54	398.539.091	3	34.968.650	5	46.700.000	1	13.240.000	20%	28%	4	48.208.650	7%	12%	Kecamatan Arjasa
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		7%	0%	Kecamatan Arjasa
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Arjasa
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																	Kecamatan Asembagus
2	7.01	KECAMATAN									0	-			0	-			Kecamatan Asembagus
3	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	A	85,1	14.220.879.630	81,71	2.090.999.403	83,55	2.357.550.940	0	383.432.805	0%	16%	81,71	2.474.432.208	96%	17%	Kecamatan Asembagus
1015	7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersusun	dokumen	52	117.000.000	7	15.514.000	7	4.200.000	1	-	14%	0%	8	15.514.000	15%	13%	Kecamatan Asembagus
1016	7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	dokumen	72	11.319.327.630	12	1.668.645.297	12	1.973.012.710	3	280.933.840	25%	14%	15	1.949.579.137	21%	17%	Kecamatan Asembagus
1017	7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai tertib administrasi kepegawaian	orang	30	46.800.000	20	6.800.000	0	-	0	-			20	6.800.000	67%	15%	Kecamatan Asembagus
1018	7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi dalam 1 tahun	persentase	100,00%	713.752.000	100,00%	56.035.200	100,00%	55.651.430	19,00%	11.000.900	19,00%	19,77%	119,00%	67.036.100	119%	9%	Kecamatan Asembagus
1019	7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan BMD	paket	13	560.000.000	1	36.298.350	2	28.947.600	1	28.136.000	50%	97%	2	64.434.350	15%	12%	Kecamatan Asembagus
1020	7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dalam 1 tahun	persentase	100,00%	689.000.000	100,00%	124.361.412	100,00%	143.235.400	22,00%	31.696.825	22,00%	22,13%	122,00%	156.058.237	122%	23%	Kecamatan Asembagus
1021	7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang mendapat pemeliharaan kondisi baik	unit	141	775.000.000	22	183.345.144	24	152.503.800	6	31.665.240	25%	21%	28	215.010.384	20%	28%	Kecamatan Asembagus
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		40%	17%	Kecamatan Asembagus
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Asembagus
1022	07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase	100,00%	451.064.059	100,00%	72.785.700	100,00%	72.000.000	25,00%	12.000.000	25,00%	16,67%	125,00%	84.785.700	125%	19%	Kecamatan Asembagus
1023	7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase	100,00%	20.680.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			0,00%	-	0%	0%	Kecamatan Asembagus

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1024	7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan PATEN terlayani	Jenis	20	430.383.559	20	72.785.700	20	72.000.000	5	12.000.000	25%	17%	25	84.785.700	125%	20%	Kecamatan Asembagus	
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		63%	10%	Kecamatan Asembagus	
															Predikat Kinerja		R	SR	Kecamatan Asembagus	
1025	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Berdesaan	persentase	100,00%	674.945.375	100,00%	45.101.700	100,00%	62.798.837	30,00%	17.295.000	30,00%	27,54%	130,00%	62.396.700	130%	9%	Kecamatan Asembagus	
1026	7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terlaksana	kegiatan	55	674.945.375	5	45.101.700	10	62.798.837	3	17.295.000	30%	28%	8	62.396.700	15%	9%	Kecamatan Asembagus	
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		15%	0%	Kecamatan Asembagus	
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Asembagus	
1027	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	persentase	100,00%	337.452.619	100,00%	69.984.000	100,00%	17.280.000	30,00%	4.320.000	30,00%	25,00%	130,00%	74.304.000	130%	22%	Kecamatan Asembagus	
1028	7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa mendapatkan pembinaan trantibum	desa	10	337.452.619	10	69.984.000	10	17.200.000	3	4.320.000	30%	25%	13	74.304.000	130%	22%	Kecamatan Asembagus	
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		130%	0%	Kecamatan Asembagus	
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Asembagus	
1029	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase	100,00%	79.342.506	100,00%	22.867.000	0,00%	-	0,00%	-			100,00%	22.867.000	100%	29%	Kecamatan Asembagus	
1030	7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase	100,00%	79.342.506	100,00%	22.867.000	0,00%	-	0,00%	-			100,00%	22.867.000	100%	29%	Kecamatan Asembagus	
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	Kecamatan Asembagus	
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Asembagus	
1031	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang baik	persentase	100,00%	603.060.818	100,00%	29.155.000	100,00%	28.800.000	30,00%	7.200.000	30,00%	25,00%	130,00%	36.355.000	130%	6%	Kecamatan Asembagus	
1032	7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa mendapatkan pendampingan pengelolaan keuangan	desa	10	603.060.818	10	29.155.000	10	28.800.000	3	7.200.000	30%	25%	13	36.355.000	130%	6%	Kecamatan Asembagus	
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		130%	0%	Kecamatan Asembagus	
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Asembagus	
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																		Kecamatan Jangkar
2	7.01	KECAMATAN																		Kecamatan Jangkar
3	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	A	A(85,10)	11.222.225.095	A(81,71)	1.540.035.623	A(83,55)	1.862.870.861	0	220.462.945		12%		1.760.498.568		16%	Kecamatan Jangkar	
1033	7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase	5200,00%	143.650.650	700,00%	23.941.775	700,00%	9.030.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	700,00%	23.941.775	13%	17%	Kecamatan Jangkar	
1034	7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	72	9.373.731.766	12	1.194.458.913	12	1.562.288.626	0	210.462.945	0%	13%	12	1.404.921.858	17%	15%	Kecamatan Jangkar	
1035	7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas ASN yang dibeli	orang	0,06	39.420.000	17	4.000.000	17	6.570.000	0	-	0%	0%	17	4.000.000	28333%	10%	Kecamatan Jangkar	
1036	7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum yang disediakan	persentase	6000,00%	578.518.200	1000,00%	96.419.700	1000,00%	10.422.035	0,00%	-	0,00%	0,00%	1000,00%	96.419.700	17%	17%	Kecamatan Jangkar	
1037	7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase	1300,00%	554.773.200	1000,00%	86.560.650	2000,00%	92.462.200	100,00%	10.000.000	5,00%	10,82%	1100,00%	96.560.650	85%	17%	Kecamatan Jangkar	
1038	7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	141	807.927.510	22	134.654.585	22	182.098.000	0	-	0%	0%	22	134.654.585	16%	17%	Kecamatan Jangkar	
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		4747%	15%	Kecamatan Jangkar	
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Jangkar	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1039	07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase	100,00%	349.397.437	100,00%	64.888.950	100,00%	55.147.703	10,00%	10.000.000	10,00%	18,13%	110,00%	74.888.950	110%	21%	Kecamatan Jangkar
1040	7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP Paten dan Jumlah Dokumen IKM yang disusun	jenis	10	349.397.437	10	64.888.950	20	55.147.703	10	10.000.000	50%	18%	20	74.888.950	200%	21%	Kecamatan Jangkar
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		200%	21%	Kecamatan Jangkar
1041	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Berdesaan	persentase	100,00%	710.242.096	100,00%	62.572.150	100,00%	28.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	62.572.150	100%	9%	Kecamatan Jangkar
1042	7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	dokumen	10	710.242.096	10	62.572.150	10	28.000.000	0	-	0%	0%	10	62.572.150	100%	9%	Kecamatan Jangkar
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	Kecamatan Jangkar
1043	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Keteriban Umum	persentase	100,00%	333.592.640	100,00%	68.166.000	10,00%	18.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	68.166.000	100%	20%	Kecamatan Jangkar
1044	7.1.4.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi FORKOMPIMCA yang difasilitasi	orang	10	333.592.640	10	68.166.000	10	18.000.000	0	-	0%	0%	10	68.166.000	100%	20%	Kecamatan Jangkar
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	Kecamatan Jangkar
1045	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang baik	persentase	100,00%	819.056.357	100,00%	54.975.000	100,00%	24.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	54.975.000	100%	7%	Kecamatan Jangkar
1046	7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	desa	8	819.056.357	8	54.975.000	8	24.000.000	0	-	0%	0%	8	54.975.000	100%	7%	Kecamatan Jangkar
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	Kecamatan Jangkar
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN													Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Jangkar
2	7.01	KECAMATAN									-	-			-		-	-	Kecamatan Banyuputih
3	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	nilai	A	13.216.747.821	A	1.865.765.700	A	2.010.444.465	0	-		0%		1.865.765.700		14%	Kecamatan Banyuputih
1047	7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersedia	dokumen	52	210.000.000	11	30.130.000	10	20.300.000	8	11.810.000	80%	58%	19	41.940.000	37%	20%	Kecamatan Banyuputih
1048	7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase	100,00%	10.363.747.821	100,00%	1.422.062.088	100,00%	1.600.532.038	14,61%	233.859.832	14,61%	14,61%	114,61%	1.655.921.920	115%	16%	Kecamatan Banyuputih
1049	7.1.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	persentase	6,00%	15.000.000	100,00%	2.340.000	100,00%	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	100,00%	200,00%	3.640.000	3333%	24%	Kecamatan Banyuputih
1050	7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase	100,00%	48.000.000	100,00%	7.600.000	100,00%	7.425.000	100,00%	7.425.000	100,00%	100,00%	200,00%	15.025.000	200%	31%	Kecamatan Banyuputih
1051	7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase	100,00%	480.000.000	100,00%	66.229.250	100,00%	52.336.900	100,00%	50.843.500	100,00%	97,15%	200,00%	117.072.750	200%	24%	Kecamatan Banyuputih
1052	7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan kantor dibeli	Unit	60	480.000.000	13	82.452.200	0	-	0	-			13	82.452.200	22%	17%	Kecamatan Banyuputih
1053	7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah tersedia	persentase	100,00%	900.000.000	98,07%	146.852.633	100,00%	151.036.400	17,73%	26.786.540	17,73%	17,74%	115,80%	173.639.173	116%	19%	Kecamatan Banyuputih
1054	7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang Milik Daerah dipelihara	Unit	54	720.000.000	9	108.099.529	9	177.514.127	0,555	98.527.500	6%	56%	9,555	206.627.029	18%	29%	Kecamatan Banyuputih
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		505%	23%	Kecamatan Banyuputih
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Banyuputih

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun berjalan (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1055	07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase	100,00%	645.599.794	100,00%	107.905.000	100,00%	107.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	107.905.000	100%	17%	Kecamatan Banyuputih
1056	7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa menyelesaikan SPJ benar dan tepat waktu	Desa	30	30.000.000	5	5.905.000	5	5.000.000	5	5.000.000	100%	100%	10	10.905.000	33%	36%	Kecamatan Banyuputih
1057	7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pengguna Layanan PATEN terlayani sesuai SOP	orang	12000	615.599.794	2010	102.000.000	2000	102.000.000	496	17.000.000	25%	17%	2506	119.000.000	21%	19%	Kecamatan Banyuputih
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		27%	28%	Kecamatan Banyuputih
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Banyuputih
1058	07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	persentase	100,00%	132.772.893	100,00%	10.175.000	100,00%	3.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	10.175.000	100%	8%	Kecamatan Banyuputih
1059	7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang kelompok masyarakatnya diberdayakan	Desa	30	132.772.893	5	10.175.000	5	3.000.000	5	3.000.000	100%	100%	10	13.175.000	33%	10%	Kecamatan Banyuputih
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		33%	0%	Kecamatan Banyuputih
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Banyuputih
1060	07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Keteriban Umum	persentase	100,00%	322.126.629	100,00%	69.988.200	100,00%	3.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	69.988.200	100%	22%	Kecamatan Banyuputih
1061	7.1.4.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa tercapai Zona Hijau Covid-19	Desa	10	322.126.629	5	69.988.200	5	3.000.000	5	3.000.000	100%	100%	10	72.988.200	100%	23%	Kecamatan Banyuputih
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		100%	0%	Kecamatan Banyuputih
															Predikat Kinerja		ST	SR	Kecamatan Banyuputih
1062	07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang baik	persentase	100,00%	155.931.474	100,00%	12.423.300	100,00%	8.383.200	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	12.423.300	100%	8%	Kecamatan Banyuputih
1063	7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa mendapatkan pembinaan bidang trantibum dan Pembangunan	Desa	30	155.931.474	5	12.423.300	5	8.383.200	5	8.333.000	100%	99%	10	20.756.300	33%	13%	Kecamatan Banyuputih
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		33%	0%	Kecamatan Banyuputih
															Predikat Kinerja		SR	SR	Kecamatan Banyuputih
																	182%	16%	
																	ST	SR	



2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Indikator kinerja utama Kabupaten Situbondo yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 7 indikator meliputi Indeks Kesalehan Sosial, Indeks Pembangunan Manusia, Persentase Kemiskinan, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi, Gini Rasio, dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Dari tujuh indikator tersebut, penarikan isu dari hasil evaluasi kinerja hanya dapat dilakukan pada lima indikator saja meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Persentase Kemiskinan, dan Gini Rasio. Sedangkan tiga indikator kinerja utama lainnya yaitu Indeks Kesalehan Sosial, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, dan Indeks Reformasi Birokrasi masih belum diketahui hasil penghitungannya. Berikut merupakan isu yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,26%, jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami kontraksi hingga -2,33% maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo pada tahun 2021 sangat baik. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo pada tahun 2021 dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang sebesar 3,57%, namun hal ini menunjukkan kondisi yang baik karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo pada tahun 2021 tidak berbeda jauh dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021. Berdasarkan penjabaran tersebut, isu yang dapat disimpulkan adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo yang positif pada tahun 2021 harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Situbondo pada 5 tahun terakhir mengalami Peningkatan namun dengan laju peningkatan yang tidak tinggi, utamanya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Selain itu capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Situbondo berada di bawah Provinsi Jawa Timur. Isu yang dapat disimpulkan adalah lambatnya laju pertumbuhan indeks pembangunan manusia Kabupaten Situbondo pada tiga tahun terakhir (2019-2021).
3. Persentase Kemiskinan di Kabupaten Situbondo pada tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami Peningkatan signifikan yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Persentase kemiskinan Kabupaten Situbondo pada tahun 2021 berada di atas Provinsi Jawa Timur yang sebesar 11,4%. Isu yang dapat disimpulkan adalah persentase kemiskinan Kabupaten Situbondo yang mengalami peningkatan pada dua tahun terakhir dan persentase kemiskinan Kabupaten Situbondo yang berada di atas Provinsi Jawa Timur.
4. Gini Rasio Kabupaten Situbondo pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Hal tersebut disebabkan karena menurunnya pendapatan masyarakat kelas menengah ke bawah akibat pandemi Covid-19. Gini rasio Kabupaten Situbondo pada tahun 2021 berada di bawah Provinsi Jawa



Timur. Isu yang dapat disimpulkan adalah kenaikan gini rasio di Kabupaten Situbondo yang terjadi akibat pandemi Covid-19.

Seperti halnya pada permasalahan yang berkaitan dengan IKU RPJMD, pada permasalahan yang berkaitan dengan IKD RPJMD juga terdapat beberapa indikator yang tidak memiliki baseline, sehingga terdapat beberapa indikator yang masih belum dapat diidentifikasi isunya. Berikut merupakan permasalahan terkait IKD RPJMD yang dapat diidentifikasi.

Tabel 2. 71: Permasalahan Yang Berhubungan dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

IKD	PERMASALAHAN
Indeks Stabilitas	-
Indeks Risiko Bencana	-
Indeks Toleransi	-
Indeks Solidaritas Sosial	-
Indeks Pembangunan Gender	Laju peningkatan Indeks Pembangunan Gender masih lambat
Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan masih rendah meskipun trendnya naik
	Indeks pendidikan berada dibawah Provinsi Jatim
Indeks Kesehatan	Indeks kesehatan belum mencapai target RPJMD
Purchasing Power Parity (PPP)	-
Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT sudah dibawah Provinsi Jatim dan nasional
	Terdapat peningkatan pengangguran Terbuka
Indeks Infrastruktur	-
IKLH	-
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-
Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan belum mencapai target RPJMD
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-
Nilai Investasi	-
Indeks SPBE	Indeks SPBE cenderung menurun dan belum mencapai target RPJMD
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-
Indeks Profesional Aparatur	-
Nilai SAKIP	-
Opini WTP BPK terhadap LKPD	-
Tingkat Maturnitas SPIP	-
Persentase Desa Mandiri	Jumlah desa maju belum mencapai target RPJMD



2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa isu yang cukup relevan untuk menjadi perhatian bagi pembangunan di Kabupaten Situbondo Tahun 2022. Berikut merupakan isu yang dimaksud dikelompokkan berdasarkan urusan.

Tabel 2. 72: Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

URUSAN	PERMASALAHAN
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	Tren PE masih naik
	Tren PDRB ADHK maupun ADHB naik
	Gini rasio memiliki tren turun
	Persentase Penduduk Miskin memiliki tren menurun
	Angka Kemiskinan masih diatas Provinsi Jatim
Kesejahteraan Sosial	Indeks Pendidikan masih rendah meskipun trendnya naik
	Indeks pendidikan berada di bawah Provinsi Jatim
	Angka Melek Huruf Memiliki tren meningkat
	AMH masih di bawah Provinsi Jatim
	Rata-rata lama sekolah masih di bawah Provinsi Jatim
	Angka harapan hidup masih di bawah provinsi jatim
	Gizi Buruk memiliki tren menurun
Pendidikan	APM SD/MI tahun 2020 mengalami penurunan, dan memiliki tren menurun
	APM SMP/MTs memiliki tren menurun
	APK Paud memilik tren menurun
	APK SD/MI memiliki tren meningkat
	APK SMP memiliki tren menurun
	Angka partisipasi sekolah usia 12-15 tahun memiliki tren menurun
	Angka putus sekolah memiliki tren menurun
	Angka Harapan Lama Sekolah masih di bawah Provinsi Jatim
Kesehatan	Angka Kematian Bayi mengalami tren meningkat
	46% Kematian bayi disebabkan karena BBLR
	Angka kematian ibu mengalami tren meningkat
	Kasus penyakit menular (HIV AIDS) mengalami tren meningkat, khususnya HIV angka peningkatannya cukup tajam
	Ada penurunan <i>Success Rate</i> pada kasus penyakit TBC
	Persentase penduduk miskin terlayani JKN meningkat
	Angka Stunting Menurun
Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan
	Terdapat penurunan jumlah jembatan dalam kondisi baik
	Kondisi irigasi baik masih di bawah 70%
	Ketersediaan air minum bagi rumah tangga meningkat
Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	Masih terdapat rumah tidak layak huni



URUSAN	PERMASALAHAN
Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran perda menurun
	Terdapat peningkatan tren pada tindak pidana
Sosial	Jumlah PMKS menurun
Tenaga Kerja	TPT sudah di bawah Provinsi Jatim dan nasional
	Terdapat peningkatan pengangguran Terbuka
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Kekerasan terhadap perempuan sudah memiliki tren menurun
	Belum semua perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan bantuan hukum
Pangan	Skor PPH memiliki tren Meningkat
Lingkungan Hidup	Capaian IKLH tahun 2020 menurun
	Indeks kualitas air memiliki tren menurun
Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil	Pertumbuhan penduduk melambat
	Rasio ketergantungan memiliki tren menurun
Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Jumlah desa maju meningkat
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indeks desa membangun meningkat
	Jumlah peserta KB aktif menurun
Perhubungan	IKM Perhubungan memiliki tren meningkat
Komunikasi & Informatika	Belum semua aplikasi e-gov berfungsi baik
Koperasi, Usaha Kecil, & Menengah	belum semua koperasi masuk dalam kategori aktif
	Jumlah usaha mikro cenderung meningkat
Penanaman Modal	Realisasi investasi cenderung meningkat
Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi cenderung menurun
Statistik	belum semua data statistik dipublikasikan
Persandian	Dokumen sandi dan keamanan terkelola sudah semuanya dikelola
Kebudayaan	Belum semua budaya lokal dilestarikan
Perpustakaan	Masih rendahnya minat baca masyarakat
Kearsipan	Semua instansi sudah menerapkan tata kelola kearsipan sesuai dengan pedoman
Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan menggunakan kolam cenderung menurun
Pariwisata	jumlah wisatawan baik wisman dan wisnus cenderung menurun
Pertanian	Produksi Pertanian tanaman pangan cenderung menurun
Perdagangan	Nilai Ekspor cenderung naik
	Perdagangan luar daerah cenderung meningkat
Perindustrian	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan cenderung meningkat
Transmigrasi	Semua calon transmigran sudah dilatih



BAB 3

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

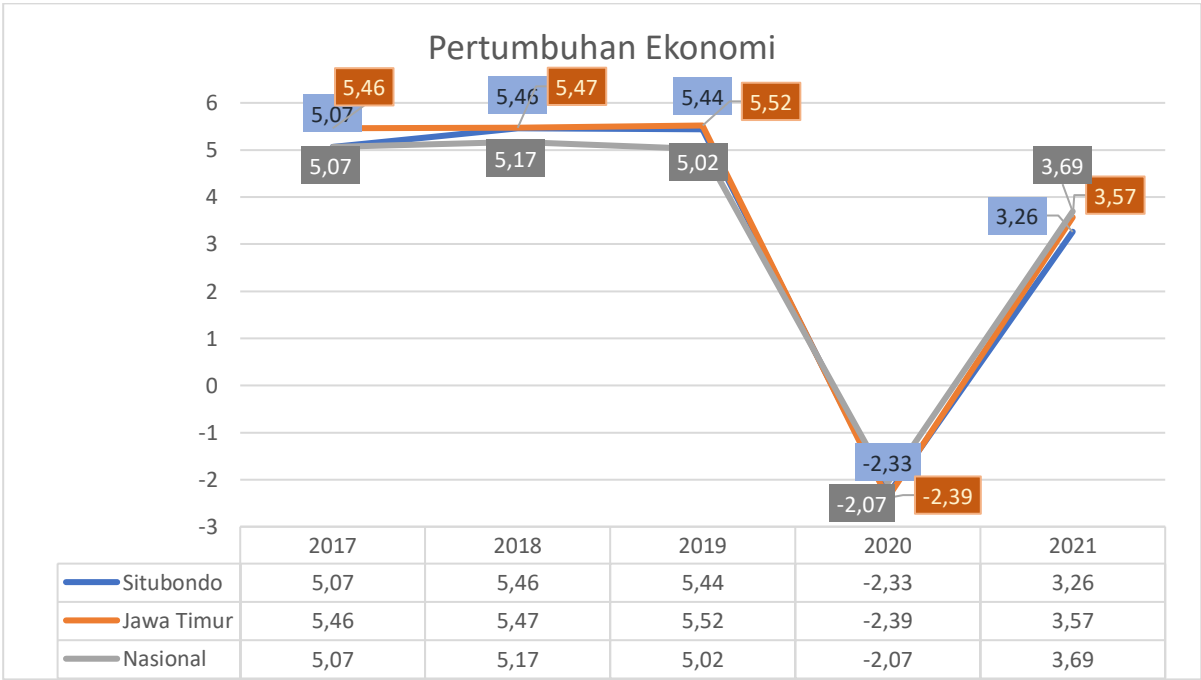
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada pembahasan sub bab arah kebijakan ekonomi daerah akan diberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi tahun lalu, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah dan beberapa indikator terkait lainnya, seperti: inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan indeks gini. Selain itu, dalam sub bab ini juga dijelaskan gambaran mengenai perkiraan tahun berjalan terhadap beberapa indikator, serta arah kebijakan ekonomi daerah itu sendiri yang didalamnya memasukkan arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), serta kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara/ daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara/ daerah, seperti pertambahan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang dan modal. Untuk mengetahui terkait Pertumbuhan Ekonomi secara Nasional, di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo pada tahun 2017 hingga 2021 secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut.

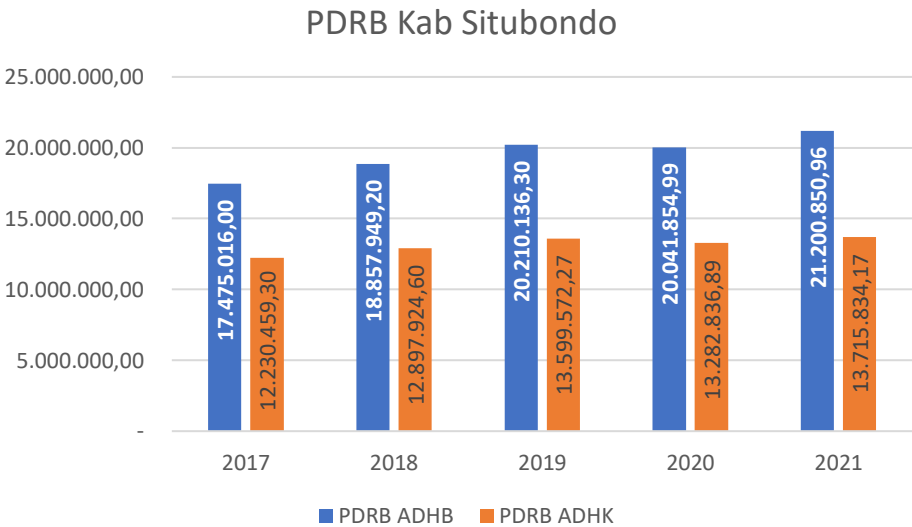


Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo Tahun 2017 – 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2022



Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo selama periode tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan tren yang positif, berdasarkan data yang dipaparkan, tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo selama 5 tahun terakhir cenderung berada di atas rata-rata nasional, meskipun di beberapa tahun masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo mengalami penurunan hingga mencapai -2,33% di mana capaian tersebut lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur, namun masih lebih tinggi dari nasional. Secara nasional pada tahun 2020, semua komponen pengeluaran masih mengalami kontraksi, kecuali sektor konsumsi pemerintah. Pada tahun 2021, kontraksi ekonomi yang disebabkan pandemi mulai berkurang, hal ini ditandai dengan pulihnya pertumbuhan ekonomi ke nilai positif (tidak lagi minus). Meskipun demikian, pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maupun nasional. Kondisi perkembangan PDRB Kabupaten Situbondo pada tahun 2016 - 2020 (dalam juta) dapat dijelaskan pada gambar berikut.

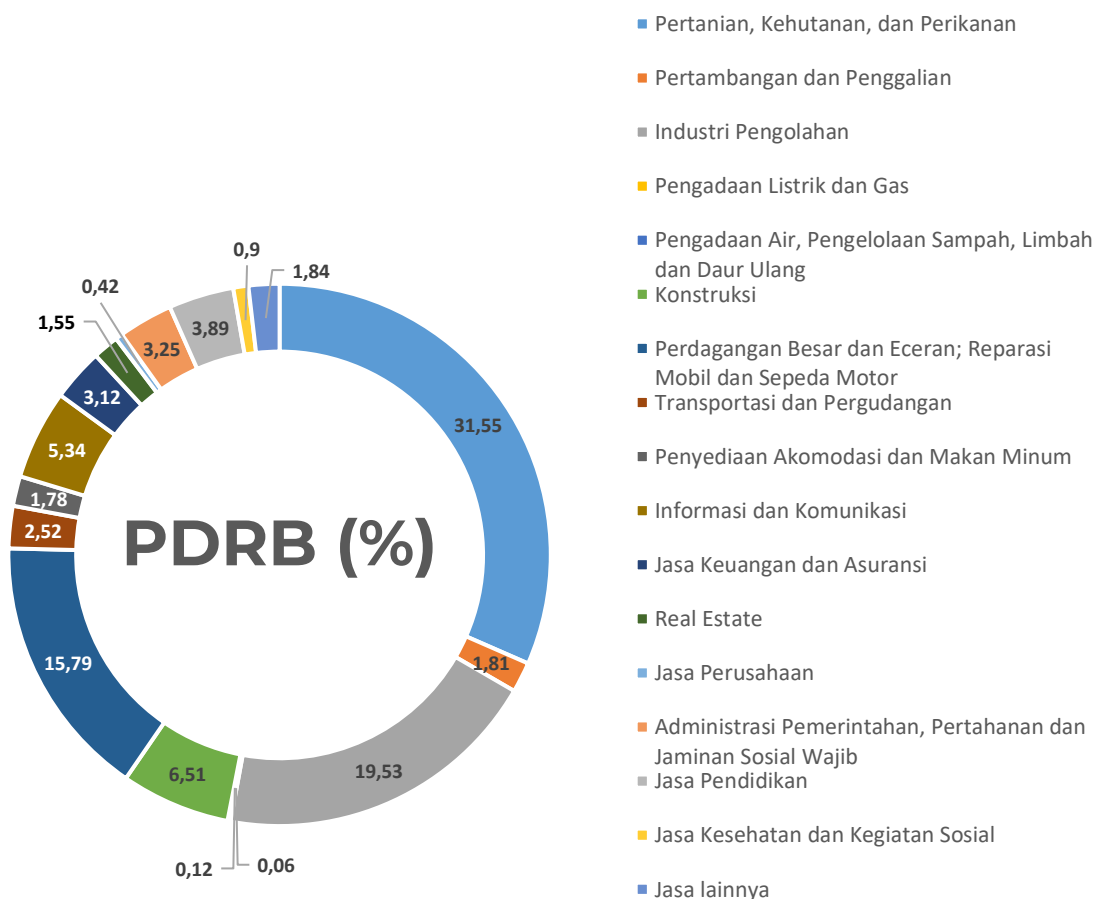


Gambar 3.2 Perkembangan PDRB Kabupaten Situbondo Tahun 2017 - 2021 (dalam Juta)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2022

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2016 sebesar Rp. 17.475.016,00 juta. Pada tahun-tahun berikutnya PDRB ADHB Kabupaten Situbondo konsisten mengalami peningkatan sampai pada tahun 2019 mencapai Rp. 20.210.136,3 juta, namun untuk tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 20.041.854,99 juta, Hingga dan pada tahun 2021 kembali meningkat sehingga mencapai Rp 21.200.850,96 juta.

Kondisi yang sama terjadi pada PDRB ADHK yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni pada tahun 2017 sebesar Rp. 12.230.459,30 juta, capaian tersebut mengalami kenaikan konsisten hingga tahun 2019 mencapai Rp. 13.599.572,3 juta namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi Rp. 13.282.836,9 juta dan kembali meningkat seiring terjadinya pemulihan ekonomi hingga mencapai Rp 13.715.834,17.

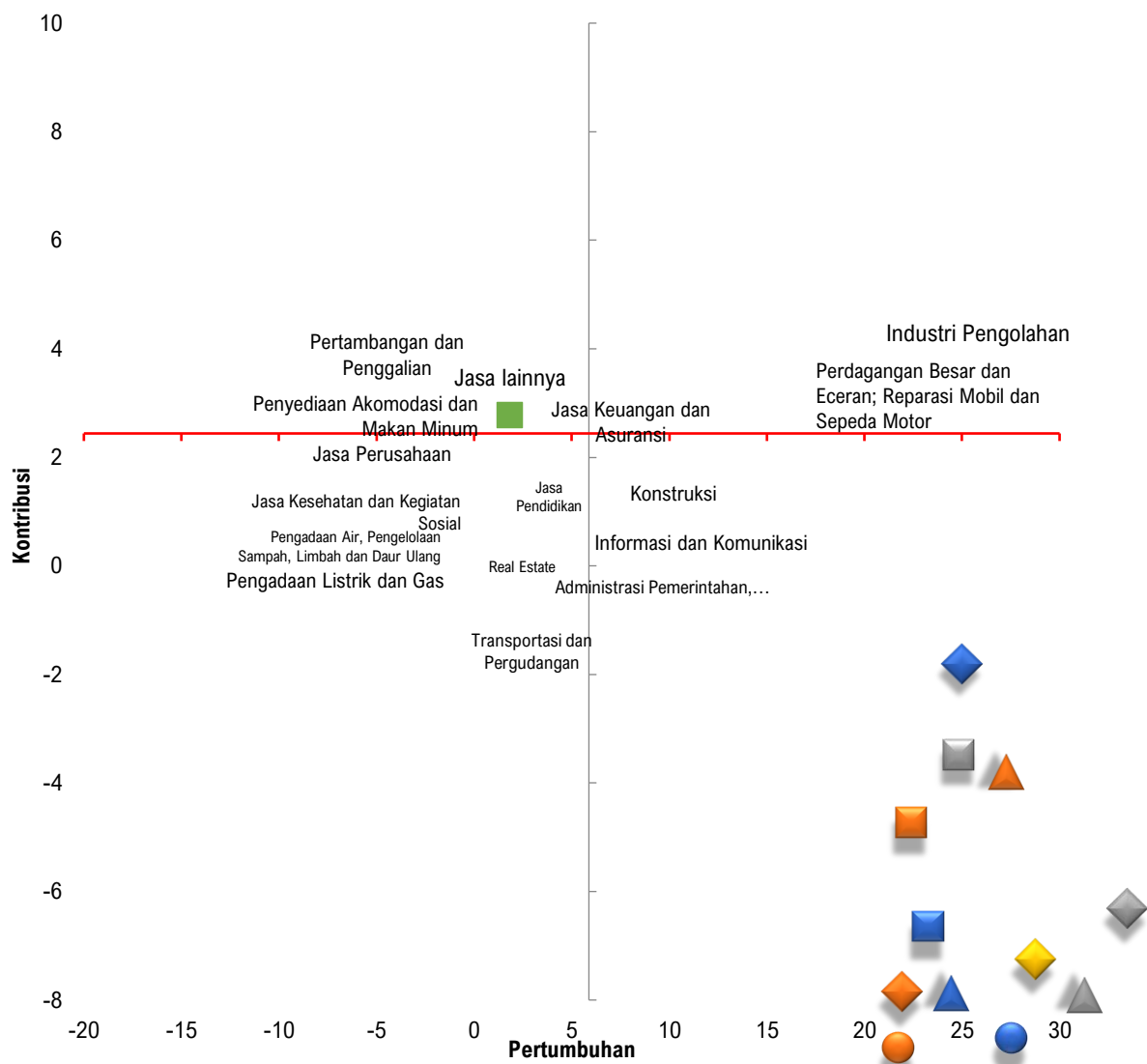
Sedangkan apabila dilihat dari distribusi persentase PDRB Kabupaten Situbondo tahun 2021, tiga sektor yang mempunyai kontribusi besar yaitu: Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 31,55%; kemudian Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 15,79% dan disusul oleh Sektor Industri Pengolahan yang menyumbang sebesar 19,53%. Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai kontribusi keseluruhan sektor PDRB Kabupaten Situbondo pada tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.3 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Situbondo Tahun 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2022

Berdasarkan tingkat pertumbuhan dan kontribusi yang dimiliki oleh masing-masing lapangan usaha/ sektor perekonomian (PDRB) di Kabupaten Situbondo, maka untuk mengetahui lapangan usaha/ sektor perekonomian yang memiliki pertumbuhan dan/ atau kontribusi yang tinggi (diatas rata-rata) dalam struktur perekonomian Kabupaten Situbondo dapat dilakukan dengan membandingkan kedua kriteria tersebut. Gambar di bawah ini menunjukkan pengelompokkan sektor ekonomi/ lapangan usaha yang didasarkan atas rata-rata tingkat pertumbuhan dan kontribusi dalam struktur PDRB Kabupaten Situbondo pada tahun 2017-2021. Struktur PDRB yang digunakan adalah tahun 2019 dengan pertimbangan bahwa kondisi perekonomian masih berlangsung normal sebelum adanya pandemi Covid-19, sehingga hasil analisis ini nantinya lebih valid.



Gambar 3.4 Pengelompokan Sektor Ekonomi/ Lapangan Usaha di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Pertumbuhan dan Kontribusi Tahun 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2022 (diolah)

Berdasarkan pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa posisi lapangan usaha/ sektor ekonomi di Kabupaten Situbondo pada tahun 2022 terkait dengan pertumbuhan dan kontribusi dalam struktur perekonomian dapat dikelompokkan kedalam 4 kategori, yaitu memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang tinggi (Kuadran I), memiliki pertumbuhan tinggi dan kontribusi rendah (Kuadran II), memiliki pertumbuhan rendah dan kontribusi tinggi (Kuadran III), dan memiliki pertumbuhan rendah dan kontribusi rendah (Kuadran IV) Hasil analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi dan memiliki kontribusi tinggi terhadap perekonomian Kabupaten Situbondo, yaitu Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
- Sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun memiliki kontribusi yang rendah adalah Sektor Kontruksi.



- Sektor yang memiliki pertumbuhan rendah, namun memiliki kontribusi yang tinggi adalah Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Jasa Lainnya serta Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
- Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan rendah dan memiliki kontribusi yang rendah meliputi: Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, , Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Transportasi dan Pergudangan, , Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Real Estat, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas serta Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

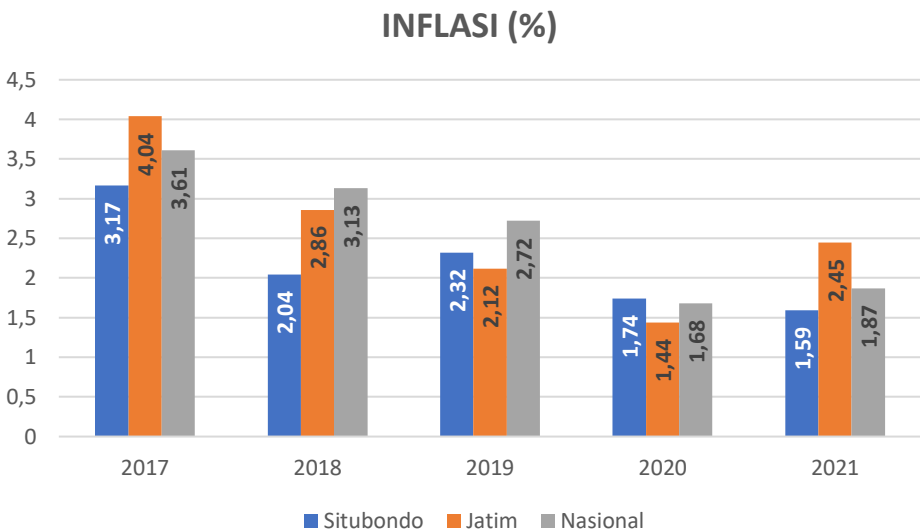
b. Inflasi

Inflasi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan dinamika perkembangan harga sekelompok barang dan jasa yang biasa dikonsumsi masyarakat dan juga merupakan salah satu indikator yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Angka inflasi juga digunakan sebagai salah satu dasar untuk merumuskan suatu kebijakan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan yang dimaksud laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga Konsumen (IHK) menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Laju inflasi dapat terjadi pada tingkat yang ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah 10%; inflasi sedang antara 10% hingga 30%; dan inflasi berat antara 30% hingga 100%; dan hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100%. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Terkait inflasi ada tiga hal yang perlu diwaspadai : Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang terutama orang miskin bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.



Mengingat Kabupaten Situbondo sebagai salah satu wilayah yang tidak terpilih sampel SBH, maka untuk mengetahui laju inflasi disajikan data inflasi Kabupaten Banyuwangi yang secara metode perhitungan berdasarkan pendekatan metode *sister city* terhadap inflasi di Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan *sister city* itu menggunakan diagram timbang daerah-daerah dengan pola fenomena yang sama. Berikut dijelaskan terkait perkembangan inflasi (tahun kalender) Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021.



Gambar 3.5 Inflasi Nasional dan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo Tahun 2017 - 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2022; Analisis Inflasi BI, 2022

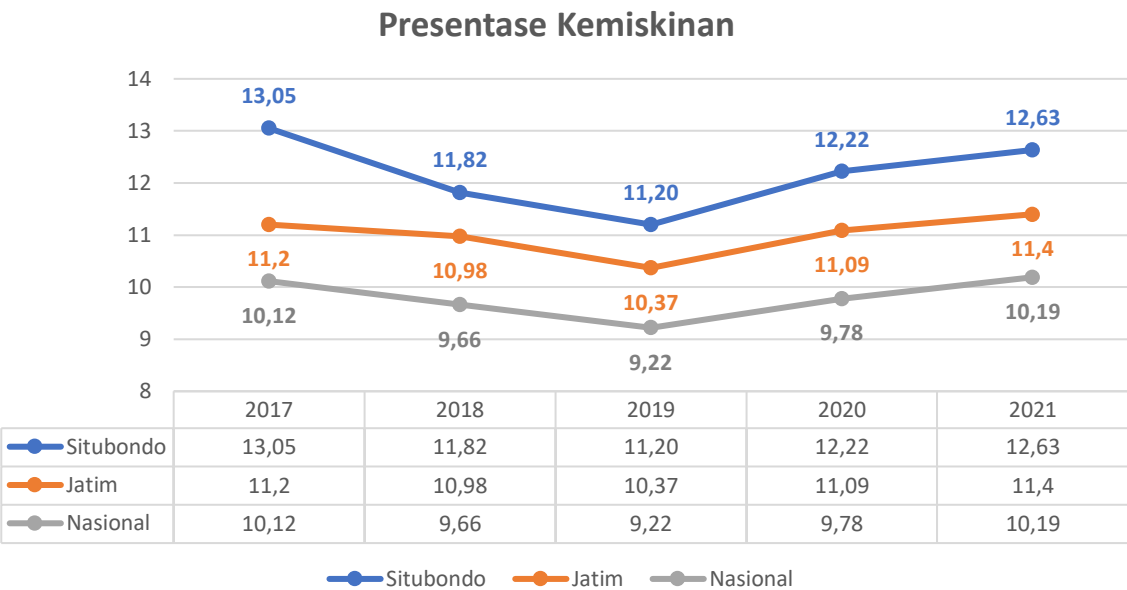
Berdasarkan data grafik perbandingan laju inflasi Kabupaten Situbondo dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa inflasi Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2019 (dengan rata-rata 2,45%) selalu berada dibawah capaian inflasi nasional (dengan rata-rata 3,15%) maupun provinsi (dengan rata-rata 3%). Hal ini menunjukkan laju peningkatan harga di Kabupaten Situbondo relatif lebih terkendali dibandingkan pada tingkat nasional maupun provinsi. Akan tetapi dengan adanya Pandemi Covid-19, Laju inflasi Kabupaten Situbondo tahun 2020 justru menurun hingga 1,81% yang berada diatas laju inflasi Nasional (1,68%) dan capaian Provinsi Jawa Timur (1,44%) termasuk laju inflasi Kabupaten Situbondo tahun 2021 menurun hingga 1,76%. Penurunan laju inflasi di Kabupaten Situbondo diasumsikan dalam kondisi daya beli masyarakat konstan, perputaran barang cenderung naik dan konsumsi masyarakat sedikit mengalami kenaikan

c. Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya melihat berdasarkan ketidakcukupan pendapatan namun lebih luas lagi, kemiskinan adalah ketiadaan satu atau beberapa kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk memperoleh fungsi minimal dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini termasuk tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk memperoleh kecukupan makan, pakaian dan tempat berlindung. Penurunan tingkat kemiskinan secara nasional terjadi di hampir seluruh provinsi. Penurunan angka persentase penduduk miskin seluruh provinsi di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Bali mencatatkan penurunan persentase penduduk miskin. Perkembangan



positif ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah yang lebih merata melalui perbaikan akses konektivitas dan perluasan skema bansos. Melihat dari tren dan data nampaknya bahwa isu strategis yang menjadi upaya utama Kabupaten Situbondo adalah mengentaskan kemiskinan. Data terkait Kemiskinan Nasional, di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo pada tahun 2017 hingga 2021 secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.6 Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo Tahun 2017 - 2021

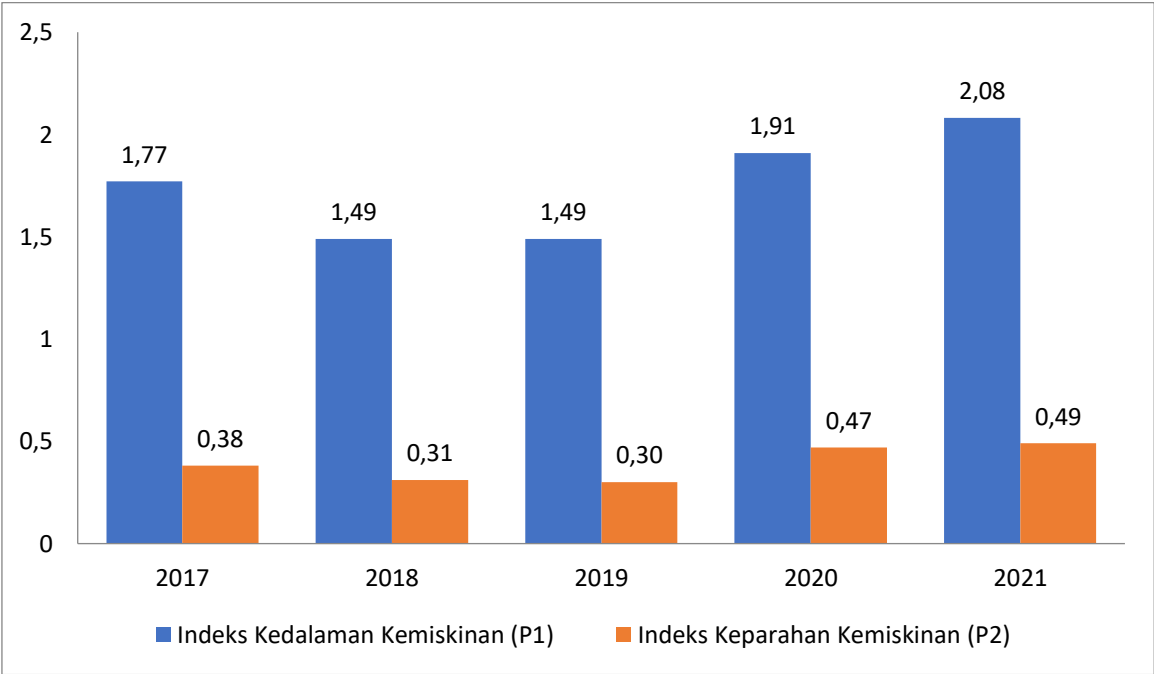
Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2021; BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sempat mengalami penurunan pada tahun 2019. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2019 tercatat sebanyak 4.112,25 ribu jiwa atau 10,37% dari total penduduk, tetapi di tahun 2020 jumlah penduduk miskin Jawa Timur meningkat menjadi sebanyak 4.410,10 ribu jiwa atau 11,09% dari total penduduk. Persentase penduduk miskin di Jawa Timur tertinggi ketiga dibandingkan provinsi di Pulau Jawa dan lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan Nasional yang sebesar 9,78%.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Situbondo dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 mencapai angka 13,03%, kemudian terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 yang mencapai 11,20%. Namun kembali mengalami tren kenaikan hingga pada tahun 2021 mencapai 12,63%. Hal itu mencerminkan bahwa Kabupaten Situbondo masih perlu upaya untuk menekan angka kemiskinan dan kemakmuran rakyat. Sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan, perkembangan jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan.

Persoalan kemiskinan pada dasarnya tidak terbatas hanya tentang jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana

mengurangi kesenjangan di antara penduduk miskin. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan dapat diketahui dengan melihat indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Untuk mengetahui perkembangan hasil perhitungan dari kedua indeks tersebut di Kota Pasuruan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021
Sumber:BPS Kabupaten Situbondo, 2022

Sementara itu, data menunjukkan bahwa perkembangan Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahahan Kemiskinan (P2) selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Situbondo mengalami kondisi yang fluktuatif. Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) terendah terjadi pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 1,49. Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 2,08. Pada tahun 2019 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kondisi stagnan. Hal tersebut menunjukkan kondisi yang baik bagi perekonomian Kabupaten Situbondo, tetapi di tahun 2020 dan 2021 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan sebesar 2,08. Selanjutnya yaitu Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,30. Sedangkan, Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,49. Kondisi tersebut dikatakan buruk bagi perekonomian karena hasil capaian P2 pada tahun 2021 menunjukkan Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) yang semakin meningkat.



d. Pengangguran

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran pada suatu daerah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, sehingga berdasarkan definisi tersebut dan rumus yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka besar kecilnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat ditentukan oleh 2 variabel, yaitu: Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Situbondo tercatat sebesar 1,49 dan mengalami tren peningkatan sampai pada 2020 menjadi 3,85, hingga pada 2021 mengalami penurunan menjadi 3,68

Data terkait Tingkat Pengangguran secara Nasional, di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo pada tahun 2017 hingga 2021 secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.8 Tingkat Pengangguran Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo Tahun 2017 - 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2022

Data pada gambar di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo berhasil memposisikan diri lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur maupun Nasional dengan prestasi angka TPT sebesar 3,85% di tahun 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Situbondo cenderung mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2017 jumlah TPT tercatat sebesar 1,49% dan secara signifikan naik menjadi 3,85% di tahun 2020. Kondisi tersebut tentu saja tidak baik untuk perekonomian karena semakin banyaknya pengangguran dan mengurangi produktifitas suatu daerah. Meningkatnya jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia akibat dampak dari pandemi Virus Corona (Covid-19) yang telah menghambat aktivitas/ pertumbuhan perekonomian. Dengan semakin banyaknya pengangguran, maka produktivitas akan berkurang, sehingga daya beli juga akan mengalami penurunan. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

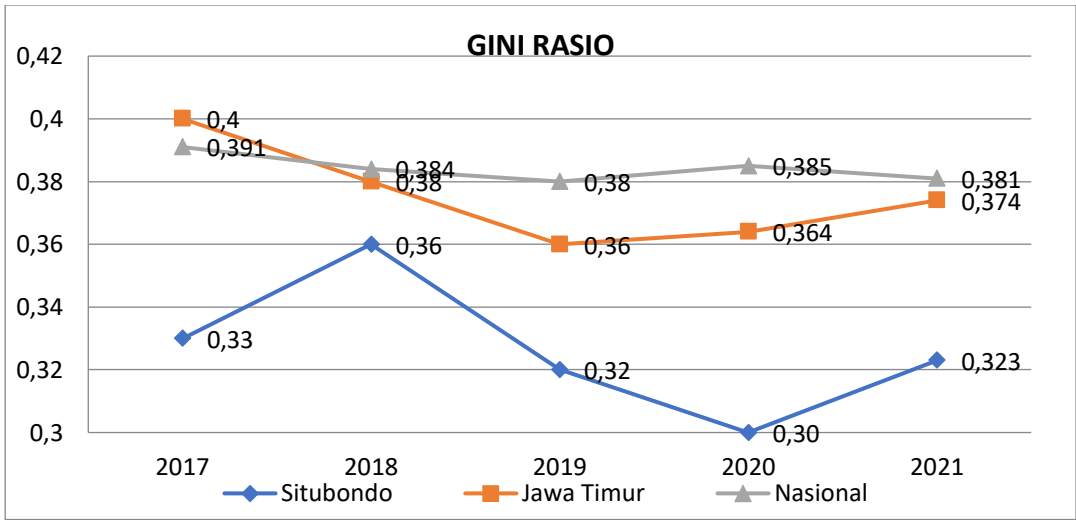


e. Gini Rasio

Suatu daerah bisa dianggap sejahtera dapat diketahui dengan melihat bagaimana daerah tersebut mendistribusikan pendapatan, apakah didistribusikan secara merata atau terjadi ketimpangan. Distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah baik yang diterima masing-masing orang atau dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Untuk mengetahui ketimpangan atau meratanya pendapatan pada suatu daerah dapat dilihat dari Koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna, dimana semua nilai sama) hingga satu (ketimpangan yang sempurna, dimana satu orang menguasai semuanya dan yang lainnya nihil). Koefisien Gini dihitung dengan pengukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana, yaitu dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dengan kurva terhadap bidang yang terletak antara kurva dengan garis vertikal dan horisontal sebelah kanan. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur mencatat bahwa pada bulan September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur dengan Gini Rasio tercatat sebesar 0,364. Angka ini turun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio Maret 2020 yang sebesar 0,366. Penurunan ketimpangan terjadi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Meskipun demikian tingkat ketimpangan kemiskinan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Penurunan ketimpangan kemiskinan tersebut juga tidak terlepas dari berbagai program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jatim melakukan tiga intervensi untuk mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses layanan masyarakat, sekaligus untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian di masa depan. Intervensi yang dilakukan antara lain dengan penguatan dan pemberdayaan pembangunan ekonomi masyarakat, pemberantasan kemiskinan secara komprehensif, dan kepastian layanan dasar yang berkualitas.

Untuk mengetahui data perkembangan Gini Rasio secara Nasional, di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.9 Gini Rasio Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo Tahun 2017 - 2021

Sumber: LKPJ Kabupaten Situbondo, 2021; BPS Kabupaten Situbondo, 2022

Gini rasio Kabupaten Situbondo selama 5 tahun terakhir mengalami kondisi yang fluktuatif dan relatif konstan. Gini rasio terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 0,30. Sedangkan Gini Rasio pada tahun 2021 menunjukkan angka kenaikan yaitu sebesar 0,323, naik dari angka gini rasio tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan dari suatu daerah semakin besar, dimana belum adanya pemerataan pendapatan yang secara efisien di Kabupaten Situbondo. Ketimpangan ini masih dalam angka wajar (tingkat ketimpangan rendah dibawah 0,4) mengingat pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak permasalahan di daerah. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional gini rasio di Kabupaten Situbondo masih lebih rendah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting. Hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah. Oleh karena itu perlu disusun sebuah kebijakan mengenai keuangan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Situbondo yang terdapat pada



dokumen ini disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3.2.1 Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah

3.2.1.1. Analisis Perhitungan Penerimaan Daerah

1. Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Keuangan daerah terdiri atas penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah dapat dilihat dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Situbondo secara umum mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan hasil rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	APBD 2022	Rata-rata Pertum- buhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	1,755,587,299,205.04	1,819,658,453,341.45	1,766,327,291,059.22	1,752,517,991,266.94	1,727,323,882,377.00	-0.38
1.1	Pendapatan Asli Daerah	187,287,219,449.41	204,727,875,621.05	218,842,796,084.89	228,770,585,248.80	228,576,266,181.00	5.16
1.1.1	Pajak daerah	43,654,005,946.48	53,364,172,516.00	42,657,767,499.00	45,896,491,659.00	51,932,129,478.00	5.73
1.1.2	Retribusi daerah	10,563,574,281.00	11,656,985,435.00	10,094,506,982.50	12,284,042,373.00	15,907,215,242.00	12.03
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4,177,807,076.24	4,054,829,225.43	4,426,562,006.19	4,787,494,637.37	3,892,055,140.00	-1.08
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	128,891,832,145.69	135,651,888,444.62	161,663,959,597.20	165,802,556,579.43	156,844,866,321.00	5.39
1.2	Pendapatan Transfer	1,515,955,140,593.00	1,556,208,927,395.00	1,487,177,251,054.00	1,465,951,802,521.14	1,497,389,010,196.00	-0.27
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1,369,650,232,587.00	1,369,734,577,264.00	1,318,193,808,131.00	1,319,569,035,549.00	1,352,343,074,955.00	-0.29
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1,227,769,851,587.00	1,224,410,192,664.00	1,124,819,473,131.00	1,143,019,587,549.00	1,214,755,548,955.00	-0.13
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	118,074,249,542.00	99,778,212,434.00	97,420,136,562.00	137,516,801,274.00	101,659,598,955.00	-0.69
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	806,660,581,000.00	831,861,637,000.00	753,652,189,000.00	744,920,418,000.00	744,920,418,000.00	-1.86
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	303,035,021,045.00	292,770,343,230.00	273,747,147,569.00	260,582,368,275.00	368,175,532,000.00	6.65
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	26,750,000,000.00	12,483,707,000.00	55,531,634,000.00	36,261,547,000.00	-	64.20
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0.00
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	0.00
1.2.1.5	Dana Desa	115,130,381,000.00	132,840,677,600.00	137,842,701,000.00	140,287,901,000.00	137,587,526,000.00	4.75
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	146,304,908,006.00	186,474,350,131.00	168,983,442,923.00	146,382,766,972.14	145,045,935,241.00	0.95
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	96,768,038,006.00	115,700,411,131.00	90,359,371,923.00	122,452,398,615.00	87,575,644,453.00	1.17
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	49,536,870,000.00	70,773,939,000.00	78,624,071,000.00	23,930,368,357.14	57,470,290,788.00	31.14
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	52,344,939,162.63	58,721,650,325.40	60,307,243,920.33	57,795,603,497.00	1,358,606,000.00	-21.73
1.3.1	Hibah	52,344,939,162.63	58,721,650,325.40	60,307,243,920.33	56,701,724,797.00	-	2.23
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	0.00
1.3.3	Lain-lain pendapatan	-	-	-	1,093,878,700.00	1,358,606,000.00	6.05

Berdasarkan tabel realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2018 hingga tahun 2021 serta anggaran pada APBD Kabupaten Situbondo tahun 2022 terlihat bahwa secara umum Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo memiliki tren yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,38%. Adanya peningkatan dan penurunan jumlah pendapatan Kabupaten Situbondo disebabkan oleh fluktuasi komponen-komponen pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Masing-masing komponen pendapatan memiliki rata-rata pertumbuhan yang berbeda. Rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 5,16%. Kemudian rata-rata pertumbuhan terbesar selanjutnya adalah dari komponen Pendapatan Transfer -0,27%. Dan yang terakhir adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang memiliki nilai minus yaitu sebesar -21,73%.

Jika melihat pada jumlah PAD Kabupaten Situbondo, maka dalam waktu 5 tahun jumlahnya menunjukkan tren naik. Dimana jumlah PAD Tahun 2018 sebesar Rp. 187.287.219.449,41 di tahun 2019 naik menjadi Rp. 204.727.875.621,05 kemudian Tahun 2022 naik menjadi Rp. 228.576.266.181,00. Masing-masing komponen PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah menunjukkan adanya fluktuasi, tidak ada satu pun komponen yang menunjukkan adanya kondistensi peningkatan nilai realisasi. Oleh sebab itu kondisi tersebut menyebabkan fluktuasi pada jumlah total pendapatan yang didapatkan oleh Kabupaten Situbondo pada setiap tahunnya.

Pendapatan transfer Kabupaten Situbondo terbagi menjadi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Dimana Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Situbondo bersumber dari Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa. Sedangkan Transfer Antar Daerah bersumber dari 2 hal yaitu Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Transfer Pemerintah Pusat yang dimiliki Kabupaten Situbondo menunjukkan adanya fluktuasi pada tahun 2017 hingga tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,29%. Dimana komponen yang memiliki rata-rata pertumbuhan terbesar adalah Dana Insentif Daerah dengan nilai 64,20% dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 6,65%. Berbeda kondisi dengan Transfer Pemerintah Pusat. Transfer Antar Daerah yang dimiliki Kabupaten Situbondo menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,95%.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam kurun waktu 2018 - 2022 hanya terdapat realisasi Hibah dari tahun 2018 - 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -21,73%. Hal ini disebabkan karena struktur Pendapatan untuk Hibah BOS dimasukkan kedalam komponen Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Sedangkan komponen lain yaitu Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan tidak menunjukkan adanya realisasi dalam 5 tahun sehingga rata-rata pertumbuhannya adalah 6,05%.

2. Analisis Sumber Pendapatan

Analisis Sumber Pendapatan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk melihat persentase sumber Pendapatan Daerah tersebut terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	APBD Tahun 2022	Rata- Rata Proporsi
		%	%	%	%	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENDAPATAN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	10.67	11.25	12.39	13.05	13.23	12.12
1.1.1	Pajak daerah	2.49	2.93	2.42	2.62	3.01	2.69
1.1.2	Retribusi daerah	0.60	0.64	0.57	0.70	0.92	0.69
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0.24	0.22	0.25	0.27	0.23	0.24
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	7.34	7.45	9.15	9.46	9.08	8.50
1.2	Pendapatan Transfer	86.35	85.52	84.20	83.65	86.69	85.28
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	78.02	75.27	74.63	75.30	78.29	76.30
1.2.1.1	Dana Perimbangan	69.93	67.29	63.68	65.22	70.33	67.29
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	6.73	5.48	5.52	7.85	5.89	6.29
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	45.95	45.72	42.67	42.51	43.13	43.99
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	17.26	16.09	15.50	14.87	21.31	17.01
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	1.52	0.69	3.14	2.07	0.00	1.48
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5	Dana Desa	6.56	7.30	7.80	8.00	7.97	7.53
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	8.33	10.25	9.57	8.35	8.40	8.98
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	5.51	6.36	5.12	6.99	5.07	5.81
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	2.82	3.89	4.45	1.37	3.33	3.17
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.98	3.23	3.41	3.30	0.08	2.60
1.3.1	Hibah	2.98	3.23	3.41	3.24	0.00	2.57
1.3.2	Dana darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Lain-lain pendapatan	0.00	0.00	0.00	0.06	0.08	0.03

Sumber: LRA Kab. Situbondo Th.2018 - 2022 dan APBD Kab. Situbondo Th.2022 (diolah)

Berdasarkan tabel persentase sumber pendapatan daerah Kabupaten Situbondo dapat diketahui bahwa sumber pendapatan terbesar Kabupaten Situbondo dalam waktu 5 tahun (2018 - 2022) berasal dari Pendapatan Transfer dengan rata-rata proporsi lebih dari 50% yaitu sebesar 85,28%. Selanjutnya

pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata proporsi 12,12%. Dan terakhir penyumbang pendapatan Kabupaten Situbondo bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rata-rata proporsi sebesar 2,60%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendapatan Kabupaten Situbondo Tahun 2018 yaitu sebesar 10,67% dan kemudian naik menjadi 11,25% di tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 naik menjadi 13,23%. Komponen PAD yang paling banyak memberikan kontribusi pada setiap tahunnya adalah Lain-lain Pendapatan yang sah dengan rata-rata proporsi 8,50%. Sedangkan komponen PAD dengan kontribusi terkecil adalah hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dengan rata-rata proporsi sebesar 0,24%.

Kontribusi Pendapatan Transfer yang tinggi terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo didominasi oleh Transfer Pemerintah Pusat yang memiliki rata-rata proporsi sebesar 76,30% dengan komponen penyumbang terbesar adalah Dana Perimbangan dengan rata-rata proporsi sebesar 67,29%, Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rata-rata proporsi 43,99% serta Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan rata-rata proporsi 17,01%. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan sebagai komponen dari Transfer Pemerintah Pusat tidak pernah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Kabupaten Situbondo pada setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sehingga rata-rata proporsinya 0%. Dana Insentif daerah hanya memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Kabupaten Situbondo yang dianggarkan pada tahun 2018-2021 dengan proporsi sebesar 1,48%.

Sedangkan Transfer Antar Daerah memiliki rata-rata kontribusi sebesar 8,98%. Sumbangsih Transfer Antar Daerah berasal dari Pendapatan Bagi Hasil dengan rata-rata proporsi sebesar 5,81% dan Bantuan Keuangan dengan rata-rata proporsi 3,71%. Secara keseluruhan, kontribusi terbesar dari Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo terdapat pada tahun 2022 yaitu sebesar 86,69%, sedangkan sumbangan terkecil terjadi pada tahun 2021 sebesar 83,65%.

Sedangkan pada Lain-lain Pendapatan Sah, kontribusi dalam komponennya hanya disumbang dari Hibah sejak tahun 2018-2022. Pada realisasi Pendapatan Daerah Situbondo tahun 2018 - 2022 setiap tahunnya kontribusi Lain-lain Pendapatan Sah terus meningkat hingga pada tahun 2022 menjadi 0,08% setelah sebelumnya menyumbang sebesar 3,30% di tahun 2021 dan 3,41% di tahun 2020.

Melihat hasil perhitungan sumber-sumber pendapatan Kabupaten Situbondo yang menunjukkan proporsi terbesar adalah pada Pendapatan Transfer, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Situbondo masih rendah karena mengandalkan bantuan keuangan dari pusat maupun provinsi dalam pembiayaan pemerintahannya. Ketika melihat proporsi PAD yang lebih kecil mengindikasikan kurang optimalnya dalam pengelolaan PAD di Kabupaten Situbondo, sehingga diperlukan usaha pengoptimalan PAD agar dapat memaksimalkan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Situbondo.

3. Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan

Analisis kinerja realisasi pendapatan daerah dilakukan untuk mengetahui perkembangan tingkat realisasi pada setiap objek pendapatan daerah. Analisis kinerja realisasi pendapatan daerah dilaksanakan dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun tertentu. Untuk melihat hasil kinerja realisasi pendapatan daerah Kabupaten Situbondo secara lebih jelas dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3. Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 - 2021

No	Uraian	Kinerja			
		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	PENDAPATAN	101,43%	99,51%	100,63%	105.21%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	105,05%	108,28%	112,25%	114.43%
1.1.1	Pajak Daerah	113,93%	122,73%	120,85%	107.89%
1.1.2	Retribusi Daerah	85,24%	94,24%	105,51%	94.17%
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	98,04%	100,52%	102,56%	108.20%
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	104,53%	105,01%	110,90%	118.51%
1.2	Pendapatan Transfer	101,03%	98,52%	99,17%	104.13%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	100,27%	96,40%	99,10%	100.78%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	100,30%	96,02%	98,95%	100.95%
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	126,83%	73,96%	97,04%	129.55%
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	100,00%	99,84%	99,03%	100.00%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	93,43%	95,35%	99,41%	84.94%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100.00%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.1.5	Dana Desa	100,00%	99,76%	100,00%	99.61%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	108,69%	117,51%	99,77%	148.71%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	113,75%	131,60%	127,71%	164.35%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	100,00%	100,00%	79,72%	100.00%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	100,58%	97,93%	99,18%	99.63%
1.3.1	Hibah	100,58%	97,93%	99,18%	100.02%
1.3.2	Dana darurat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.3	Lain-lain pendapatan	0,00%	0,00%	0,00%	83.02%

Sumber: LRA Kab. Situbondo Tahun 2018 – 2021 (diolah)

Hasil perhitungan kinerja pendapatan daerah Kabupaten Situbondo pada tabel diatas menunjukan bahwa realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan dalam APBD (kinerjanya) tahun 2018 hingga 2021 cukup fluktuatif. Di tahun 2018 hasil kinerja pendapatan Kabupaten Situbondo tercatat sebesar 101,43% dari angka tersebut menjadi 99,51% pada tahun 2019 dimana angka ini merupakan capaian kinerja pendapatan terendah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Akan tetapi pada tahun 2020 kinerja pendapatan daerah Kabupaten Situbondo kembali naik menjadi 100,63 dan kembali naik tahun 2021 menjadi 105,21%.

Melihat pada komponen pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan hasil kinerja yang variatif. PAD merupakan satu-satunya komponen pendapatan yang memiliki kinerja lebih dari 100% pada setiap tahunnya pada tahun 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018 kinerja PAD tercatat sebesar 105,05% kemudian naik menjadi 108,28% pada tahun 2019. Kinerja PAD kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 112,25% dan terus meningkat menjadi 114,43% di tahun 2021. Maka secara garis besar kinerja PAD Kabupaten Situbondo memiliki trend kinerja yang positif serta pertumbuhan kinerja yang meningkat.

Berbeda dengan PAD, kinerja pada realisasi Pendapatan Transfer menunjukkan ada 2 tahun anggaran yang memiliki kinerja Pendapatan Transfer lebih dari 100% yaitu pada tahun 2018 sebesar 101,03%. Meskipun begitu hasil kinerja Pendapatan Transfer pada 2 tahun lainnya sudah mampu mendekati angka 100% yaitu sebesar 98,52% pada tahun 2019, serta 99,17% pada tahun 2020. Sehingga dapat dikatakan juga kinerja Pendapatan Transfer Kabupaten Situbondo memiliki tren kinerja yang positif dan pertumbuhan kinerja yang meningkat.

Lain-lain pendapatan yang sah pada Kabupaten Situbondo memiliki realisasi hanya pada tahun 2018 hingga 2020. Sedangkan pada tahun 2017 tidak terdapat realisasi. Nilai kinerja Lain-lain pendapatan yang Sah paling tinggi yaitu pada tahun 2018 sebesar 100,58%. Sedangkan hasil kinerja terendah berada pada tahun 2020 sebesar 99,18%.

4. Analisis Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah

Analisis penerimaan pembiayaan daerah dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan pembiayaan daerah tahun rencana. Berdasarkan hasil proyeksi penerimaan pembiayaan daerah dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 jumlah penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Situbondo diperkirakan mencapai Rp. 99.797.319.332,56.-. Adapun komponen penerimaan pembiayaan daerah berdasarkan hasil proyeksi secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Situbondo

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2023
		(Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	99.797.319.332,56
1.1	Pelampauan penerimaan PAD	-
1.2	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	-
1.3	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-
1.4	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	99.797.319.332,56
1.5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-
1.6	Kegiatan lanjutan	-
2	Pencairan Dana Cadangan	-
2.1	Pencairan Dana Cadangan	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2023
		(Rp)
3.1	Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD	-
3.2	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
4.1	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah	-
4.2	Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain	-
4.3	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank	-
4.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank	-
4.5	Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
5.1	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-
6.1	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah	-
6.2	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah	-
6.3	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain	-
6.4	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank	-
6.5	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank	-

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun, 2022

Hasil analisis proyeksi pendapatan Kabupaten Situbondo untuk tahun rencana yaitu tahun 2023 secara keseluruhan kemudian dibandingkan dengan proyeksi pendapatan tahun rencana pada RPJMD. Dari perbandingan tersebut, maka selanjutnya akan diketahui selisihnya, apakah terjadi penambahan atau pengurangan. Adapun hasil perbandingan tersebut secara lebih jelas dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5. Proyeksi/ Target Penerimaan Daerah Kabupaten Situbondo

No	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun Rencana	Proyeksi RKPD Tahun Rencana	Selisih	Ket
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1,769,327,053,535.53	1,703,410,036,524.44	(65,917,017,011.09)	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	240,976,167,444.10	261,681,572,900.75	20,205,405,456.65	
1.1.1	Pajak daerah	50,659,642,761.00	58,086,965,192.05	7,427,322,431.05	
1.1.2	Retribusi daerah	13,229,608,617.10	15,887,264,634.50	2,657,656,017.40	
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4,033,881,019.00	4,475,863,411.00	441,982,392.00	
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	173,053,035,047.00	183,231,479,663.20	10,178,444,616.20	
1.2	Pendapatan Transfer	1,475,584,545,819.94	1,441,728,463,623.69	(33,856,082,196.25)	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1,338,008,185,519.62	1,339,456,886,485.69	1,448,700,966.07	
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1,160,903,543,519.62	1,189,385,653,485.69	28,482,109,966.07	
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	90,605,322,788.93	116,999,152,000.00	26,393,829,211.07	
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	769,567,632,000.00	744,920,418,000.00	(24,647,214,000.00)	
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	300,730,588,730.69	327,466,083,485.69	26,735,494,755.00	
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	36,261,547,000.00	12,483,707,000.00	(23,777,840,000.00)	
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus			-	

No	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun Rencana	Proyeksi RKPD Tahun Rencana	Selisih	Ket
1.2.1.4	Dana Keistimewaan			-	
1.2.1.5	Dana Desa	140,843,095,000.00	137,587,526,000.00	(3,255,569,000.00)	
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	137,576,360,300.32	102,271,577,138.00	(35,304,783,162.32)	
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	81,234,224,730.32	94,099,370,473.00	12,865,145,742.68	
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	56,342,135,570.00	8,172,206,665.00	(48,169,928,905.00)	
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	52,766,340,271.50	-	(52,766,340,271.50)	
1.3.1	Hibah	52,766,340,271.50	-	(52,766,340,271.50)	
1.3.2	Dana darurat				
1.3.3	Lain-lain pendapatan				
	Total Pendapatan (a)	1,769,327,053,535.53	1,703,410,036,524.44	(65,917,017,011.09)	
2	PEMBIAYAAN				
2.1	Penerimaan Pembiayaan				
2.1.1	Pencairan Dana Cadangan				
2.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
2.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah				
2.1.4	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (b)	-	-		
3	Proyeksi SiLPA Riil				
3.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	84,897,319,664.83	99,797,319,332.56	14,899,999,667.73	
	Dikurangi:				
3.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	62,499,999,012.00	62,322,999,012.00	(177,000,000.00)	
3.3	Pembentukan Dana Cadangan		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	
	Jumlah (c)	22,397,320,652.83	27,674,320,652.83	5,277,000,000.00	
	Jumlah Kapasitas Keuangan Daerah (a) + (b) + (c)	1,791,724,374,188.36	1,730,884,357,177.27	(60,840,017,011.09)	

Sumber : RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021 - 2026 dan Hasil Proyeksi Tim Penyusun, 2022

3.2.1.2. Analisis Perhitungan Pengeluaran Daerah

1. Kinerja Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Untuk mengetahui secara rinci dan lebih jelas terkait dengan hasil rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	APBD 2022	Rata-rata Pertum- buhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA	1,730,464,593,001.47	1,821,889,974,701.86	1,696,582,528,684.59	1,652,271,697,556.26	2,082,993,533,178.00	5.47
2.1	Belanja Operasi	1,117,452,246,961.50	1,224,027,658,168.64	1,190,105,325,042.01	1,195,776,308,569.03	1,343,988,781,461.00	4.91
2.1.1	Belanja Pegawai	732,451,792,589.00	768,435,148,940.00	750,729,142,119.29	674,615,705,105.00	744,574,939,148.00	0.71
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	335,211,201,185.42	382,605,105,252.65	346,050,510,126.72	467,161,771,157.10	522,053,030,356.00	12.83
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	9,798,561.00	12,996,157,486.00	0.00
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	41,866,751,287.08	58,943,739,600.99	87,771,347,896.00	47,924,534,345.93	51,931,464,571.00	13.16
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7,922,501,900.00	14,043,664,375.00	5,554,324,900.00	6,064,499,400.00	12,433,189,900.00	32.75
2.2	Belanja Modal	398,444,375,446.97	354,702,115,633.22	237,667,540,138.58	217,518,027,645.23	487,119,151,887.00	17.87
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3,157,523,240.00	28,500,000.00	-	1,099,180,000.00	-	-74.77
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81,959,314,658.51	92,958,877,629.70	98,251,371,626.62	96,515,416,655.34	85,959,395,145.00	1.60
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128,469,504,858.32	88,011,477,120.87	69,729,748,552.15	43,538,582,232.36	80,842,576,800.00	-1.04
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	179,794,520,390.14	155,915,073,757.42	51,796,579,357.81	71,700,602,412.53	319,662,524,519.00	76.05
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,063,512,300.00	17,788,187,125.23	17,889,840,602.00	4,664,246,345.00	654,655,423.00	23.00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-	0.00
2.3	Belanja Tidak Terduga	1,571,405,100.00	10,890,000.00	43,060,200,358.00	10,252,137,348.00	22,036,752,425.00	98812.48
2.4	Belanja Transfer	212,996,565,493.00	243,149,310,900.00	225,749,463,146.00	228,725,223,994.00	229,848,847,405.00	2.20
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	2,928,470,000.00	5,448,896,000.00	4,625,642,000.00	5,387,723,000.00	6,042,480,605.00	24.90
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	210,068,095,493.00	237,700,414,900.00	221,123,821,146.00	223,337,500,994.00	223,806,366,800.00	1.85

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Situbondo mengalami fluktuatif. Belanja daerah Kabupaten Situbondo terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Berdasarkan tabel rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Situbondo, dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2018 hingga 2022 sebesar 5,014%. Tren pertumbuhan realisasi belanja daerah mengalami fluktuatif. Belanja daerah dengan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir adalah belanja tidak terduga, dengan rata-rata sebesar 98.798,190%. Tingginya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan realisasi belanja tidak terduga yang sangat signifikan pada tahun 2020 yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Belanja dengan pertumbuhan terendah dalam beberapa tahun terakhir adalah belanja transfer dengan rata-rata sebesar 2,21%. Sedangkan belanja bunga, belanja subsidi dan belanja aset lainnya rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 0%, karena tidak terdapat realisasi dalam setiap tahunnya.

Realisasi belanja terbesar Kabupaten Situbondo adalah belanja pegawai. Pada tahun 2018 belanja pegawai tercatat sebesar Rp. 732,451,792,589.00, pada tahun 2019 belanja pegawai mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar Rp. 768,435,148,940.00, sedangkan pada tahun 2020 belanja pegawai kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 750,729,142,119.29. Pada tahun 2021 belanja pegawai mencapai sebesar Rp. 773,940,655,205.00, dan pada APBD tahun 2022 belanja pegawai Kabupaten Situbondo dianggarkan sebesar Rp. 744,574,939,148.00. Namun karena jumlah realisasi belanja pegawai cukup stabil dalam setiap tahunnya, maka rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar 0%.

2. Analisis Proporsi Belanja

Belanja merupakan pengeluaran yang ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Situbondo. Belanja daerah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer memiliki proporsi yang beragam. Berikut disajikan data terkait dengan proporsi belanja daerah Kabupaten Situbondo dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.7. Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018 (%)	Realisasi Tahun 2019 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	APBD Tahun 2022 (%)	Rata-Rata Proporsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	BELANJA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1	Belanja Operasi	64.58	67.18	70.15	72.37	64.52	67.76
2.1.1	Belanja Pegawai	42.33	42.18	44.25	40.83	35.75	41.07
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.37	21.00	20.40	28.27	25.06	22.82
2.1.3	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.12
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Belanja Hibah	2.42	3.24	5.17	2.90	2.49	3.24
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0.46	0.77	0.33	0.37	0.60	0.50

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018 (%)	Realisasi Tahun 2019 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	APBD Tahun 2022 (%)	Rata-Rata Proporsi (%)
2.2	Belanja Modal	23.03	19.47	14.01	13.16	23.39	18.61
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0.18	0.00	0.00	0.07	0.00	0.05
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.74	5.10	5.79	5.84	4.13	5.12
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.42	4.83	4.11	2.64	3.88	4.58
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.39	8.56	3.05	4.34	15.35	8.34
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.29	0.98	1.05	0.28	0.03	0.53
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Belanja Tidak Terduga	0.09	0.00	2.54	0.62	1.06	0.86
2.4	Belanja Transfer	12.31	13.35	13.31	13.84	11.03	12.77
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0.17	0.30	0.27	0.33	0.29	0.27
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	12.14	13.05	13.03	13.52	10.74	12.50

Sumber: LRA Kab. Situbondo Th.2018 - 2022 dan APBD Kab. Situbondo Th. 2021 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi belanja daerah menggambarkan belanja operasi yang memiliki nilai proporsi belanja terbesar dibandingkan belanja yang lain. Di dalam belanja operasi, belanja pegawai memiliki nilai proporsi terbesar. Pada tahun 2018 proporsi belanja pegawai menca pai sebesar 42,33%, pada tahun 2019 sebesar 42,18%, tahun 2020 sebesar 44,25%, tahun 2021 sebesar 40,83% dan pada tahun 2022 sebesar 35,75%. Sedangkan belanja yang tidak terealisasi pada beberapa tahun terakhir adalah belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja aset lainnya, sehingga memiliki proporsi sebesar 0,00%.

3. Analisis Pengeluaran Pembiayaan

Analisis pengeluaran pembiayaan dalam pembahasan ini menggambarkan semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang mencakup kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah, sehingga menghasilkan nilai total pengeluaran wajib dan mengikat. Kebutuhan belanja mencakup belanja tidak langsung, sedangkan pengeluaran pembiayaan meliputi Pembentukan Dana Cadangan dan Pembayaran Pokok Utang. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambahan dana cadangan. Berikut disajikan data terkait dengan hasil proyeksi kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Situbondo pada tahun rencana.

Tabel 3.8. Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Situbondo

No	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun Rencana	Proyeksi RKPD Tahun Rencana	Selisih
1	2	3	4	5 = 4-3
A	Belanja Operasi	1,228,389,679,897.79	1,180,594,525,649.71	(47,795,154,248.08)
1	Belanja Pegawai	727,398,980,517.54	703,540,476,514.42	(23,858,504,003.12)
2	Belanja Barang dan Jasa (BLUD)	426,286,326,205.69	409,739,918,504.11	(16,546,407,701.58)
3	Belanja Bunga	11,200,445,651.00	12,366,599,999.00	1,166,154,348.00

No	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun Rencana	Proyeksi RKPD Tahun Rencana	Selisih
4	Belanja Subsidi	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	0.00
5	Belanja Hibah	46,750,413,789.37	42,155,123,165.69	(4,595,290,623.68)
6	Belanja Bantuan Sosial	10,753,513,734.19	6,792,407,466.49	(3,961,106,267.70)
B	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000.0000	10,000,000,000.00	-
1	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000.0000	10,000,000,000.00	-
C	Belanja Transfer	233,249,315,616.70	231,126,905,982.66	(2,122,409,634.04)
1	Belanja Bagi Hasil ke Pemdes	6,388,925,137.81	7,347,422,982.66	958,497,844.85
2	Belanja Bantuan Keuangan	226,860,390,478.89	223,779,483,000.00	(3,080,907,478.89)
D	Pengeluaran Pembiayaan	62,499,999,012.00	72,322,999,012.00	9,823,000,000.00
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
2	Pembayaran Pokok Utang	62,499,999,012.00	62,322,999,012.00	(177,000,000.00)
	TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT	1,534,138,994,526.49	1,494,044,430,644.37	(40,094,563,882.12)

Sumber : Ranwal RPJMD Kab.Situbondo Th.2021 - 2026 dan Hasil Proyeksi Tim Penyusun, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah antara proyeksi RPJMD tahun rencana dengan Proyeksi RKPD tahun rencana, dimana bila dibandingkan berdasarkan aspek kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan terdapat selisih nilai, dengan nilai total pengeluaran wajib dan mengikat sebesar Rp. 1.494.044.430.644,37.

3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendanaan pembangunan memerlukan sumber-sumber penerimaan yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan pengelolaan yang tepat dalam menentukan arah penggalan penerimaan daerah dalam periode tahun 2023 sebagai sumber pendapatan daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Situbondo dalam RKPD tahun 2023 adalah berupa kerangka pikir yang bersifat umum sebagai kebijakan periodik tahunan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kebijakan pengelolaan pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan pendapatan dalam tahun 2023. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya.

Adapun kebijakan terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Situbondo pada RKPD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemungutan pajak daerah dengan memanfaatkan data potensi pajak yang dimiliki, khususnya terhadap wajib pajak daerah yang hingga saat ini belum dilakukan pemungutan pajak daerah;
2. Meningkatkan memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, seperti: e-BPHTB; e-PAD; NPWPD; serta merencanakan dan melaksanakan pemasangan APTB (alat perekam transaksi elektronik) khususnya pajak hotel, pajak restaurant, pajak hiburan dan pajak parkir; dan sebagainya;
3. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah, serta melakukan verifikasi terhadap laporan pajak daerah dari wajib pajak (*Self Assessment*);

4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya manusia (SDM) pemungut pajak/ retribusi daerah di Kabupaten Situbondo melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
5. Meningkatkan koordinasi secara lebih intensif dengan OPD dan instansi terkait serta pihak-pihak terkait lainnya dalam penentuan dan perencanaan target pajak dan retribusi daerah, pemetaan potensi-potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta menyusun perencanaan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan mendorong peningkatan kinerja Badan Usaha;
7. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan penyediaan dan peningkatan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat, untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah;
8. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi sebagai upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi.

Komposisi pendapatan daerah Kabupaten Situbondo dalam setiap tahunnya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan Transfer dalam bentuk dana perimbangan, dana desa, dana penyesuaian, pendapatan bagi hasil, dan bantuan keuangan; serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa hibah yang realisasinya terdapat pada tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2023 Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo diproyeksikan mencapai Rp. 1.703.410.036.524,44 dimana nilai tersebut berada dibawah realisasi yang terjadi pada tahun 2019, mengingat terjadi penurunan dana transfer dari pusat serta masih dalam masa pemulihan dari adanya dampak Covid-19. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 261.681.572.900,75 atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021, dimana pendapatan dari Pajak Daerah diperkirakan mulai menunjukkan kondisi yang lebih baik. Seiring dengan masih belum optimalnya pemulihan pendapatan secara *agregate* dan banyaknya kebutuhan belanja Pemerintah Provinsi dalam rangka pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pasca Covid-19, maka untuk pendapatan transfer antar daerah pada tahun 2023 diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022, yang sehingga turut mempengaruhi pendapatan transfer secara keseluruhan yang akan diterima.

Untuk mengetahui perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan realisasi tahun 2018 hingga 2021, APBD Tahun 2022, maupun proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2023 dan 2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 - 2021, APBD Tahun 2022, dan Hasil Proyeksi Tahun 2023 – 2024

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	APBD Tahun 2022	Proyeksi/ Target pada Tahun 2023	Proyeksi/ Target pada Tahun 2024	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	1,755,587,299,205.04	1,819,658,453,341.45	1,766,327,291,059.22	1,752,517,991,266.94	1,727,323,882,377.00	1,703,410,036,524.44	1,804,107,803,702.88	-0.38
1.1	Pendapatan Asli Daerah	187,287,219,449.41	204,727,875,621.05	218,842,796,084.89	228,770,585,248.80	228,576,266,181.00	261,681,572,900.75	263,589,412,450.76	5.16
1.1.1	Pajak daerah	43,654,005,946.48	53,364,172,516.00	42,657,767,499.00	45,896,491,659.00	51,932,129,478.00	58,086,965,192.05	52,731,923,046.00	5.73
1.1.2	Retribusi daerah	10,563,574,281.00	11,656,985,435.00	10,094,506,982.50	12,284,042,373.00	15,907,215,242.00	15,387,264,634.50	12,991,190,784.60	12.03
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4,177,807,076.24	4,054,829,225.43	4,426,562,006.19	4,787,494,637.37	3,892,055,140.00	4,475,863,411.00	4,033,881,019.00	-1.08
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	128,891,832,145.69	135,651,888,444.62	161,663,959,597.20	165,802,556,579.43	156,844,866,321.00	183,231,479,663.20	193,832,417,601.16	5.39
1.2	Pendapatan Transfer	1,515,955,140,593.00	1,556,208,927,395.00	1,487,177,251,054.00	1,465,951,802,521.14	1,497,389,010,196.00	1,441,728,463,623.69	1,487,527,070,098.37	-0.27
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1,369,650,232,587.00	1,369,734,577,264.00	1,318,193,808,131.00	1,319,569,035,549.00	1,352,343,074,955.00	1,339,456,886,485.69	1,346,018,014,938.22	-0.29
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1,227,769,851,587.00	1,224,410,192,664.00	1,124,819,473,131.00	1,143,019,587,549.00	1,214,755,548,955.00	1,189,385,653,485.69	1,168,913,372,938.22	-0.13
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	118,074,249,542.00	99,778,212,434.00	97,420,136,562.00	137,516,801,274.00	101,659,598,955.00	116,999,152,000.00	91,655,679,548.30	-0.69
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	806,660,581,000.00	831,861,637,000.00	753,652,189,000.00	744,920,418,000.00	744,920,418,000.00	744,920,418,000.00	769,567,632,000.00	-1.86
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	303,035,021,045.00	292,770,343,230.00	273,747,147,569.00	260,582,368,275.00	368,175,532,000.00	327,466,083,485.69	307,690,061,389.92	6.65
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	26,750,000,000.00	12,483,707,000.00	55,531,634,000.00	36,261,547,000.00	-	12,483,707,000.00	36,261,547,000.00	64.20
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	0.00
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-	-	0.00
1.2.1.5	Dana Desa	115,130,381,000.00	132,840,677,600.00	137,842,701,000.00	140,287,901,000.00	137,587,526,000.00	137,587,526,000.00	140,843,095,000.00	4.75
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	146,304,908,006.00	186,474,350,131.00	168,983,442,923.00	146,382,766,972.14	145,045,935,241.00	102,271,577,138.00	141,509,055,160.15	0.95
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	96,768,038,006.00	115,700,411,131.00	90,359,371,923.00	122,452,398,615.00	87,575,644,453.00	94,099,370,473.00	85,166,919,590.15	1.17
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	49,536,870,000.00	70,773,939,000.00	78,624,071,000.00	23,930,368,357.14	57,470,290,788.00	8,172,206,665.00	56,342,135,570.00	31.14
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	52,344,939,162.63	58,721,650,325.40	60,307,243,920.33	57,795,603,497.00	1,358,606,000.00	-	52,991,321,153.75	-21.73
1.3.1	Hibah	52,344,939,162.63	58,721,650,325.40	60,307,243,920.33	56,701,724,797.00	-	-	52,991,321,153.75	2.23
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-	-	0.00
1.3.3	Lain-lain pendapatan	-	-	-	1,093,878,700.00	1,358,606,000.00	-	-	6.05



3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Pemanfaatan pendapatan daerah adalah melalui penggunaan dana untuk keperluan belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sedangkan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Untuk itu dalam pengelolaannya diperlukan adanya kebijakan pengelolaan belanja daerah yang mendasarkan pada pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap PD, serta dengan memperhatikan pada hasil pengelolaan keuangan lima tahun sebelumnya.

Adapun kebijakan terkait dengan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Situbondo pada RKPD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengalokasikan anggaran untuk penanganan kemiskinan ekstrim yang telah menjadi isu nasional;
2. Menerapkan konsep *money follows* program prioritas dalam pengalokasian anggaran;
3. Memenuhi persentase alokasi belanja berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja daerah, dan kesehatan minimal sebesar 10% dari total belanja APBD diluar gaji;
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya;
5. Belanja pegawai dianggarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mengarahkan proporsi belanja pegawai di bawah 50% dalam setiap tahunnya, sedangkan untuk tunjangan pegawai diberikan dengan mempertimbangkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Belanja untuk pembangunan infrastruktur diupayakan minimal 25% dari Dana Transfer Umum dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas di Kabupaten Situbondo;
7. Memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;



8. Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo setelah dikurangi dengan DAK.

Komposisi belanja daerah Kabupaten Situbondo dalam setiap tahunnya terdiri dari belanja operasi dalam bentuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial; belanja modal; belanja tidak terduga; serta belanja transfer yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 diproyeksikan mencapai Rp. 1.730.884.357.177,27, dimana untuk belanja operasi diproyeksikan mencapai Rp. 1.180.594.525.649,71 atau sebesar 68,5%. Sedangkan untuk belanja modal diproyeksikan mencapai Rp. 309.162.925.544,89 atau sebesar 17,8%, untuk belanja transfer pada tahun 2022 diproyeksikan mencapai Rp. 231.126.905.982,66 atau sebesar 13,3%, dan belanja tidak terduga diproyeksikan sebanyak Rp. 10.000.000.000,00 atau sebesar 0,58%.

Untuk mengetahui perkembangan belanja daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2018 hingga 2021, APBD Tahun 2022, maupun proyeksi belanja daerah pada tahun 2023 dan 2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 – 2021, APBD Tahun 2022, dan Hasil Proyeksi Tahun 2023 - 2024

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	APBD 2022	Proyeksi/ Target pada Tahun 2023	Proyeksi/ Target pada Tahun 2024	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA	1,730,464,593,001.47	1,821,889,974,701.86	1,696,582,528,684.59	1,652,271,697,556.26	2,082,993,533,178.00	1,730,884,357,177.27	1,822,827,433,443.53	5.01
2.1	Belanja Operasi	1,117,452,246,961.50	1,224,027,658,168.64	1,190,105,325,042.01	1,195,776,308,569.03	1,343,988,781,461.00	1,180,594,525,649.71	1,203,940,164,884.97	4.86
2.1.1	Belanja Pegawai	732,451,792,589.00	768,435,148,940.00	750,729,142,119.29	674,615,705,105.00	744,574,939,148.00	703,540,476,514.42	730,799,325,353.26	0.47
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	335,211,201,185.42	382,605,105,252.65	346,050,510,126.72	467,161,771,157.10	522,053,030,356.00	409,739,918,504.11	404,873,728,647.33	12.89
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	9,798,561.00	12,996,157,486.00	12,366,599,999.00	7,638,379,737.00	0.00
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	-25.00
2.1.5	Belanja Hibah	41,866,751,287.08	58,943,739,600.99	87,771,347,896.00	47,924,534,345.93	51,931,464,571.00	42,155,123,165.69	44,412,893,099.90	12.24
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7,922,501,900.00	14,043,664,375.00	5,554,324,900.00	6,064,499,400.00	12,433,189,900.00	6,792,407,466.49	10,215,838,047.48	33.92
2.2	Belanja Modal	398,444,375,446.97	354,702,115,633.22	237,667,540,138.58	217,518,027,645.23	487,119,151,887.00	309,162,925,544.90	375,349,531,020.67	11.88
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3,157,523,240.00	28,500,000.00	-	1,099,180,000.00	-	-	4,256,798,214.04	-74.77
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81,959,314,658.51	92,958,877,629.70	98,251,371,626.62	96,515,416,655.34	85,959,395,145.00	94,673,504,101.70	159,263,396,543.21	3.15
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128,469,504,858.32	88,011,477,120.87	69,729,748,552.15	43,538,582,232.36	80,842,576,800.00	73,123,350,987.74	88,777,835,995.49	-8.83
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	179,794,520,390.14	155,915,073,757.42	51,796,579,357.81	71,700,602,412.53	319,662,524,519.00	132,620,040,315.88	112,433,091,526.34	65.48
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,063,512,300.00	17,788,187,125.23	17,889,840,602.00	4,664,246,345.00	654,655,423.00	8,746,030,139.58	10,618,408,741.59	26.14
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3	Belanja Tidak Terduga	1,571,405,100.00	10,890,000.00	43,060,200,358.00	10,252,137,348.00	22,036,752,425.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	9.8
2.4	Belanja Transfer	212,996,565,493.00	243,149,310,900.00	225,749,463,146.00	228,725,223,994.00	229,848,847,405.00	231,126,905,982.66	233,537,737,537.89	2.21
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	2,928,470,000.00	5,448,896,000.00	4,625,642,000.00	5,387,723,000.00	6,042,480,605.00	7,347,422,982.66	6,572,311,383.06	24.92
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	210,068,095,493.00	237,700,414,900.00	221,123,821,146.00	223,337,500,994.00	223,806,366,800.00	223,779,483,000.00	226,965,426,154.83	1.85



3.2.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutup defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah, yang bersumber dari pemanfaatan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Kebijakan pembiayaan pada umumnya diarahkan untuk memanfaatkan surplus APBD dan mengatasi apabila terjadi defisit anggaran. Kebijakan terkait dengan pembiayaan daerah di Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 adalah penggunaan SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka menutup defisit anggaran; mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah; mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Bila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tidak mencukupi untuk menutupi defisit, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo akan berupaya mencari Pinjaman Daerah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Komposisi penerimaan pembiayaan Kabupaten Situbondo dalam setiap tahunnya lebih banyak berasal dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dengan nilai yang berfluktuasi, sedangkan pada sisi pengeluaran dalam 3 tahun terakhir tidak terdapat pengeluaran pembiayaan. Pada tahun 2023 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022, yaitu sebesar Rp. 99.797.319.332,56. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh adanya defisit dari tahun-tahun sebelumnya yang ditutup dengan menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), mengingat dengan berkurangnya pendapatan daerah yang disebabkan oleh dampak Covid-19, belanja daerah tidak serta merta menyesuaikan/ berkurang jumlahnya, sehingga defisit akan semakin besar.

Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2018 hingga 2021, APBD Tahun 2022, maupun proyeksi pembiayaan daerah pada tahun 2023 dan 2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 - 2021, APBD Tahun 2022, dan Hasil Proyeksi Tahun 2023 - 2024

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	APBD Tahun 2022	Proyeksi/ Target pada Tahun 2023	Proyeksi/ Target pada Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	PEMBIAYAAN							
3.1	Penerimaan Pembiayaan	119.948.905.863,19	145.116.726.615,76	141.915.456.376,76	124.685.546.164,00	371.250.400.554	99,797,319,332.56	81,219,628,752.66
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	119.896.546.863,19	145.021.289.614,76	141.883.444.042,56	124.685.546.164,00	184.281.400.554	99,797,319,332.56	81,219,628,752.66
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	186.969.000.000	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	52.359.000,00	95.437.001,00	32.012.334,20	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	15.580.749.753	72,322,999,012.00	62,499,999,012.00
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	15.580.749.753	62,322,999,012.00	62,499,999,012.00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	10,000,000,000.00	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	-	-



BAB 4

SASARAN DAN

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

DAERAH



4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2023

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan Sasaran merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Situbondo yang merepresentasikan atau tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah *measurable* yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan bupati dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran dalam RPJMD. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan *logframe* Kabupaten Situbondo. Berikut merupakan linieritas Misi terhadap Tujuan Pembangunan Kabupaten Situbondo:



Gambar 4. 1. Linieritas Misi dengan Tujuan Pembangunan

Berdasarkan Gambaran di atas, menunjukkan linieritas Misi Kepala Daerah Kabupaten Situbondo terhadap Tujuan Pembangunan Pembangunan RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026. Terdapat 1 tujuan pada masing-masing misi yang menunjukkan fokus pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menjalankan pembangunan selama periode 2021-2026. Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026:

a. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis Dan Religius

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I yakni **“Membangun Masyarakat Situbondo yang Beriman dalam Keberagaman”**, maka tujuan pembangunannya adalah **“Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Religius”**, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat.
2. Meningkatnya Toleransi Sosial.
3. Meningkatnya Solidaritas Sosial Masyarakat.



Gambar 4. 2. Sasaran Pada Tujuan Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Religius

b. Meningkatkan kualitas dan kesetaraan sumber daya manusia

Sebagai upaya untuk mencapai Misi II yakni “**Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas Dan Meningkatkan Peran Perempuan**”, maka tujuan pembangunannya adalah “Peningkatan Kualitas dan Kesetaraan Sumber Daya Manusia”, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

- 1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
- 2. Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan.
- 3. Meningkatkan Akses dan Mutu Kesehatan.
- 4. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat.



Gambar 4. 3. Sasaran Pada Tujuan Peningkatan Kualitas dan Kesetaraan Sumber Daya Manusia

c. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kesenjangan secara Berkelanjutan

Sebagai upaya untuk mencapai Misi III yakni **“Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan dan Berdaya Saing”**, maka tujuan pembangunannya adalah **“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kesenjangan secara Berkelanjutan”**, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

1. Menurunnya Angka Pengangguran.
2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan.
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing.
4. Meningkatnya Desa Maju.



Gambar 4. 4. Sasaran Pada Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kesenjangan secara Berkelanjutan

d. Mewujudkan Kualitas Layanan dan Kapasitas Birokrasi yang Profesional

Sebagai upaya untuk mencapai Misi IV yakni **“Membangun Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Tangguh”**, maka tujuan pembangunannya adalah **“Mewujudkan Kualitas Layanan dan Kapasitas Birokrasi yang Profesional”**, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

1. Meningkatnya Inovasi Layanan Berbasis Digital.
2. Terciptanya Aparatur yang Tangkas dan Profesional.
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik.
4. Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel.



Gambar 4. 5. Sasaran Pada Tujuan Mewujudkan Kualitas Layanan dan Kapasitas Birokrasi yang Profesional

Berdasarkan penjelasan diatas tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD, maka dengan melihat proses konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut ke dalam matriks berikut ini:

Tabel 4. 1. Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD
VISI: SITUBONDO BERAKHLAK, SEJAHTERA, ADIL DAN BERDAYA			
1	Membangun Masyarakat Situbondo yang Beriman dalam Keberagaman	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan religius	Indeks Kesalehan Sosial
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat	Indeks Stabilitas
		Meningkatnya Toleransi Sosial.	Indeks Resiko Bencana
		Meningkatnya Solidaritas Sosial Masyarakat	Indeks Toleransi
2	Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas Dan Meningkatkan Peran Perempuan	Meningkatkan Kualitas dan Kesenjangan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia
		Meningkatnya Kesenjangan Gender dalam Pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender
		Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan.	Indeks Pendidikan
		Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan.	Indeks Kesehatan



No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD
VISI: SITUBONDO BERAKHLAK, SEJAHTERA, ADIL DAN BERDAYA			
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks PPP
3	Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kesenjangan Secara Berkelanjutan	Angka Kemiskinan
			Gini Rasio
			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
			Pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatnya Desa Maju.	Jumlah Desa berkembang menjadi Maju
		Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan.	Indeks Infrastruktur
			IKLH
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing.	Indeks Daya Saing Pariwisata
			Pertumbuhan PDRB Katagori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
4	Membangun Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Tangguh	Mewujudkan Kualitas Layanan dan Kapasitas Birokrasi yang Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
		Meningkatnya Inovasi Layanan Berbasis Digital.	Indeks SPBE
		Terciptanya Aparatur yang Tangkas dan Profesional.	Indeks Profesional Aparatur
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel.	Nilai SAKIP
			Opini WTP BPK terhadap LKPD
			Tingkat Maturnitas SPIP

4. 1. 2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 Kabupaten Situbondo

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026, yang dilaksanakan melalui 4 (Empat) misi. Agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam kurun waktu 2021-2026 per masing-masing Misi, adalah sebagai berikut:



Tabel 4. 2. Strategi Pembangunan Kabupaten Situbondo

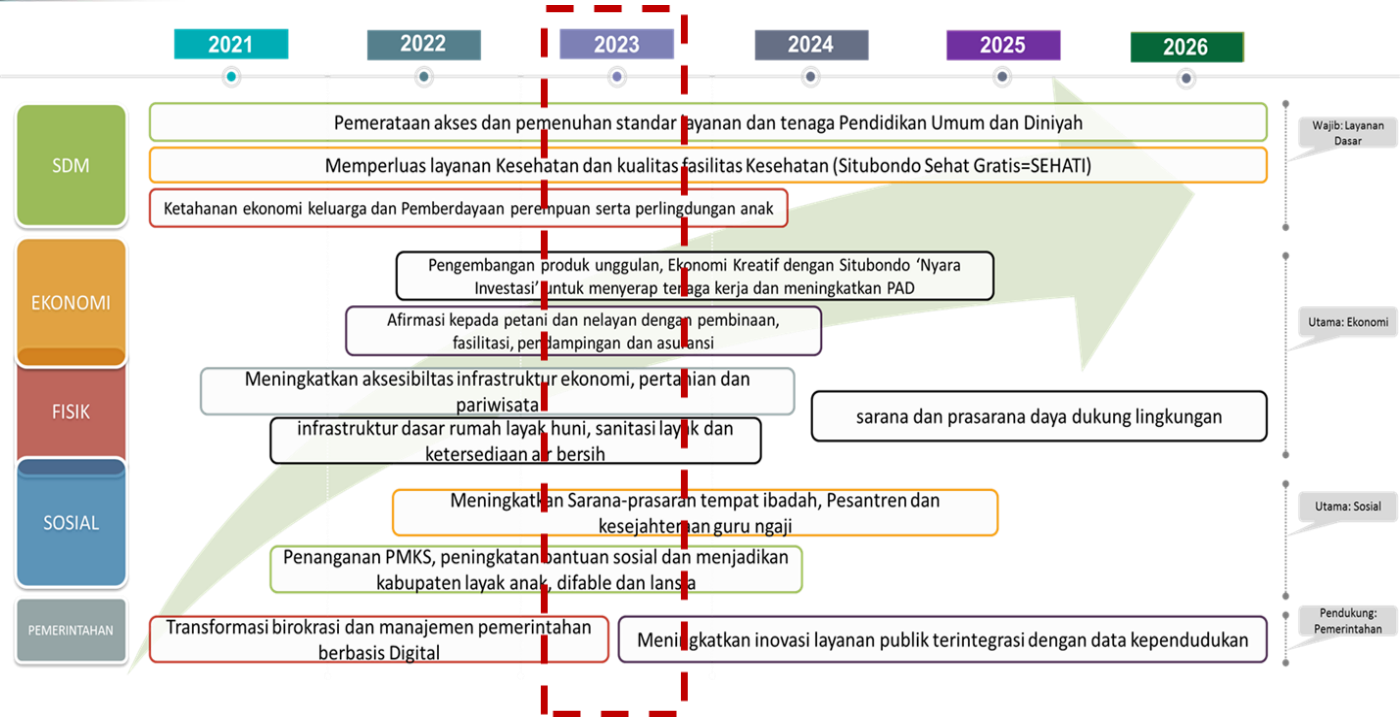
VISI : SITUBONDO BERAKHLAK SEJAHTERA, ADIL DAN BERDAYA		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
MISI I: MEMBANGUN MASYARAKAT SITUBONDO YANG BERIMAN DALAM KEBERAGAMAN		
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis Dan Religius	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat	Membangun persatuan dalam keberagaman yang didukung dengan adanya pemberian perlindungan kepada masyarakat
	Meningkatnya Toleransi Sosial	
	Meningkatnya Solidaritas Sosial Masyarakat	
MISI II: MEMBANGUN MASYARAKAT SITUBONDO SEHAT, CERDAS DAN MENINGKATKAN PERAN PEREMPUAN		
MENINGKATKAN KUALITAS DAN KESETARAAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Pemenuhan Kebutuhan dasar yang merata melalui perluasan Akses dan Kualitas serta melibatkan peran perempuan dalam kesejahteraan keluarga
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	
	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan	
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	
MISI III: MEMBANGUN INFRASTRUKTUR, EKONOMI BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING		
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MENGURANGI KESENJANGAN SECARA BERKELANJUTAN	Meningkatnya Desa Maju	Keberpihakan penganggaran dana ke desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa yang mandiri dan aparatur yang berkompeten
	Menurunnya Angka Pengangguran	Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan melalui Pemberdayaan dan Kewirausahaan Masyarakat serta peningkatan akses lapangan pekerjaan
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan	Peningkatan Aksesibilitas Penunjang Kebutuhan Masyarakat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi yang Berkelanjutan
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi, Peningkatan sarana Produksi, Distribusi dan Pemasaran Produk Unggulan.
MISI IV: MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, BERSIH DAN TANGGUH		
MEWUJUDKAN KUALITAS LAYANAN DAN KAPASITAS BIROKRASI YANG PROFESIONAL	Meningkatnya Inovasi Layanan Berbasis Digital	Penguatan budaya kerja Pemerintah yang adaptif dan inovatif melalui kontruksi proses kelembagaan dan transformasi sistem digitalisasi pelayanan publik
	Terciptanya Aparatur yang Tangkas dan Profesional	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	
	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel	



Mengingat RPJMD Kabupaten Situbondo telah dilakukan penyusunan sesuai periode 2021-2026, maka strategi yang dihasilkan juga merupakan strategi baru sebagaimana isu yang berhasil diidentifikasi. Jumlah strategi yang dimuat dalam RPJMD berjumlah 7 strategi meliputi:

- Strategi 1:** Membangun persatuan dalam keberagaman yang didukung dengan adanya pemberian perlindungan kepada masyarakat.
- Strategi 2:** Pemenuhan Kebutuhan dasar yang merata melalui perluasan Akses dan Kualitas serta melibatkan peran perempuan dalam kesejahteraan keluarga.
- Strategi 3:** Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan melalui Pemberdayaan dan Jaminan Sosial Masyarakat.
- Strategi 4:** Peningkatan Aksesibilitas Penunjang Kebutuhan Masyarakat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi yang Berkelanjutan.
- Strategi 5:** Percepatan Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi, Peningkatan sarana Produksi, Distribusi dan Pemasaran Produk Unggulan.
- Strategi 6:** Penguatan budaya kerja Pemerintah yang adaptif dan inovatif melalui kontruksi proses kelembagaan dan transformasi sistem digitalisasi pelayanan publik.
- Strategi 7:** Keberpihakan penganggaran dana ke desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa yang maju dan aparatur yang berkompeten

Ketujuh Strategi tersebut didistribusikan untuk pembangunan lima tahunan dalam agenda pembangunan daerah. Dengan didistribusikannya strategi pembangunan untuk pembangunan selama lima tahun, maka dapat dilihat arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan tahunan dilihat berdasarkan irisan waktu implementasi strategi yang telah ditetapkan. Berikut merupakan arsitektur arah kebijakan pembangunan berdasarkan distribusi strategi dan sasaran pembangunan:



Gambar 4. 6. Arsitektur Arah Kebijakan Kabupaten Situbondo Berdasarkan Strategi Pembangunan

Berdasarkan gambar pemetaan strategi dan sasaran pembangunan pada periode RPJMD 2021-2026 diketahui bahwa pada tahun 2023 Kabupaten Situbondo memiliki prioritas pembangunan dengan tematik **“Percepatan Infrastruktur Strategis Terintegrasi Untuk Peningkatan Investasi Dan Inovasi Daerah Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat”**. Adapun berdasarkan tematik pembangunan tersebut, arah kebijakan yang menjadi fokus pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2023 antara lain:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur Kawasan strategis;
2. Pengembangan produk-produk olahan hasil pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penguatan kelembagaan ekonomi dan kemudahan akses permodalan;
4. Penguatan kesiapsiagaan bencana dan bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan ekstrem;
5. Pengembangan inovasi dan investasi untuk peningkatan PAD;
6. Peningkatan dan pemerataan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, trampil dan berdaya saing.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Situbondo dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal meliputi, hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan pada periode RKPD sebelumnya, kondisi ekonomi makro nasional dan daerah, dan telaah tematik dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi untuk periode pembangunan tahun 2023.



4.2.1. Telaah Tematik dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023

Tematik dan arah kebijakan pembangunan nasional dijabarkan dalam RKP tahun 2023. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023 yaitu "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan yang meliputi:

- 1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,
- 2) Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job,
- 3) Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan,
- 4) Mendorong pemulihan dunia usaha,
- 5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,
- 6) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim),
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi,
- 8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan tersebut, adapun indikator ketercapaian dari arah kebijakan tersebut antara lain:

- 1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan sasaran pembangunan antara lain:
 - a. Sistem Jaminan Sosial,
 - b. Modernisasi Pertanian,
 - c. Pemerataan Pembangunan.

Berdasarkan sasaran pembangunan tersebut, adapun indikator sasaran pembangunannya antara lain:

- a. Penghapusan kemiskinan ekstrem 1,5-2,0% (2023) → 0-1% (2024),
 - b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 91%,
 - c. Nilai Tukar Petani /Nelayan 103-105/105-107.
- 2) Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*, dengan sasaran pembangunan antara lain:
 - a. Penyediaan lapangan usaha

Berdasarkan sasaran pembangunan tersebut, adapun indikator sasaran pembangunannya antara lain:

- a. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43 %,
 - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas 48%,
 - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional 50.000 orang,
 - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 60,71%.
- 3) Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan, dengan sasaran pembangunan antara lain:



- a. Sistem Kesehatan,
- b. Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter).

Berdasarkan sasaran pembangunan tersebut, adapun indikator sasaran pembangunannya antara lain:

- a. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita 17,5% → 14% (2024),
 - b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk,
 - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 71%,
 - d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43%,
 - e. Persentase Sumber Daya Manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 17,48%,
 - f. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas 9,24 tahun,
 - g. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (PT) 31,89 Persen.
- 4) Mendorong pemulihan dunia usaha, dengan sasaran pembangunan antara lain:
- a. Revitalisasi pariwisata
 - b. Pengembangan UMKM

Berdasarkan sasaran pembangunan tersebut, adapun indikator sasaran pembangunannya antara lain:

- a. Pertumbuhan Wirausaha 3,50%,
 - b. Pertumbuhan PDB Pertanian 3,9-4,2%,
 - c. Nilai Devisa Pariwisata US\$ 1,76-6,08 Miliar,
 - d. Kontribusi PDB Pariwisata 4,3%,
 - e. Nilai tambah ekonomi kreatif Rp.1.279 triliun.
- 5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, dengan sasaran pembangunan antara lain:
- a. Industrialisasi,
 - b. Riset dan Inovasi.

Berdasarkan sasaran pembangunan tersebut, adapun indikator sasaran pembangunannya antara lain:

- a. Pertumbuhan Industri Pengolahan 5,4-5,9%,
 - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan 20,6 %
 - c. Produk Inovasi dan Produk Prioritas Riset Nasional yang Dihasilkan 10,
 - d. Peringkat Global Innovation Index 75-80,
 - e. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 5,55-6,08%,
 - f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas 18,80%.
- 6) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim), dengan sasaran pembangunan antara lain:
- a. Ekonomi rendah karbon
 - b. Transisi energi



Berdasarkan sasaran pembangunan tersebut, adapun indikator sasaran pembangunannya antara lain:

- a. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02%,
 - b. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT-kumulatif 1.778,2 GW,
 - c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan 61 perusahaan,
 - d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau 6%.
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi, dengan sasaran pembangunan antara lain:
- a. Penyediaan air bersih dan sanitasi
 - b. Infrastruktur Digital
 - c. Infrastruktur Konektivitas

Berdasarkan sasaran pembangunan tersebut, adapun indikator sasaran pembangunannya antara lain:

- a. Volume tampungan air per kapita 54,50m³/det,
 - b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman),
 - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 97,5%,
 - d. Masyarakat Pengguna Internet 80,7%,
 - e. Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik-kumulatif 50%.
- 8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dengan sasaran pembangunan antara lain:
- a. Fasilitas dasar di IKN

Berdasarkan sasaran pembangunan tersebut, adapun indikator sasaran pembangunannya antara lain:

- a. Inisiasi Pembangunan KIPP-IKN Tahap 1A
- b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara 5.600 Ha*

Adapun dari 8 arah kebijakan tersebut, akan direalisasikan masing-masing melalui *Major Project* (MP) RKP 2023. Berikut adalah *Major Project* (MP) RKP 2023:

- 1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan Major Project berikut:
 - a. MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial,
 - b. MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan),
 - c. MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
- 2) Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job, dengan Major Project berikut:
 - a. Didukung oleh MP pada Arah Kebijakan 1,2, 4 dan 5
- 3) Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan, dengan Major Project berikut:



- a. MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional,
- b. MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0).
- 4) Mendorong pemulihan dunia usaha, dengan Major Project berikut:
 - a. MP Destinasi Pariwisata Prioritas,
 - b. MP Pengelolaan Terpadu UMKM.
- 5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, dengan Major Project berikut:
 - a. MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter
- 6) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim), dengan Major Project berikut:
 - a. MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3,
 - b. MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi, dengan Major Project berikut:
 - a. MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional,
 - b. MP Transformasi Digital,
 - c. MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu,
 - d. MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan stunting.
- 8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dengan Major Project berikut:
 - a. MP Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

4.2.2. Telaah Tematik dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Salah satu pertimbangan dalam menentukan tema pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2023 ialah dengan mempertimbangkan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur. Pada Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menentukan tematik yang mengacu terhadap beberapa pertimbangan salah satunya ialah arah kebijakan yang termaktub pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Disebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 ialah sebagai berikut:

“Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Mendukung Daya Saing Daerah Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”

dan disepakati tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sekaligus memperhatikan tema RKP Nasional 2023 yakni sebagai berikut:

“Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk mendukung Daya Saing Daerah dalam menyambut era industry Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro”

Dari tematik pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2023 tersebut mempunyai arah kebijakan antara lain:



1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur.

4.2.3. Telaah Agenda Pembangunan Daerah Tahun 2023 dalam Percepatan Pemulihan Kondisi Daerah Akibat Dampak Pandemi Covid-19

Dalam rangka Percepatan Pemulihan Kondisi Daerah Akibat Dampak Pandemi Covid-19 Kabupaten Situbondo menerapkan beberapa strategi dalam rangka percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi. Strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Penuntasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan PMKS,
2. Penguatan sarana-prasarana penunjang sektor ekonomi,
3. Penguatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kualitas angkatan kerja,
4. Peningkatan ketercukupan infrastruktur dasar dan penunjang sektor strategis daerah,
5. Penguatan sistem jaminan sosial dan sistem mitigasi bencana daerah,
6. Penguatan inovasi dan kualitas pelayanan publik dalam peningkatan investasi daerah.

Berdasarkan strategi percepatan pemulihan kondisi daerah akibat dampak pandemi covid-19 Kabupaten Situbondo di atas, maka berikut linearitas agenda pembangunan daerah tahun 2023 dalam percepatan pemulihan kondisi daerah akibat dampak pandemi Covid-19:

Tabel 4. 3 Linearitas Agenda Pembangunan Daerah Tahun 2023 Dalam Percepatan Pemulihan Kondisi Daerah Akibat Dampak Pandemi Covid-19

Agenda Percepatan Pemulihan Kondisi Daerah Akibat Dampak Pandemi Covid-19	Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2023
Penuntasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan PMKS,	Penguatan Kesiapsiagaan Bencana Dan Bantuan Sosial Untuk Penuntasan Kemiskinan Ekstrem
Penguatan sarana-prasarana penunjang sektor ekonomi,	Pengembangan Produk Olahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
	Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Kemudahan Akses Permodalan



Agenda Percepatan Pemulihan Kondisi Daerah Akibat Dampak Pandemi Covid-19	Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2023
Penguatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kualitas angkatan kerja,	Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, trampil dan berdaya saing
Peningkatan ketercukupan infrastruktur dasar dan penunjang sektor strategis daerah,	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis
Penguatan sistem jaminan sosial dan sistem mitigasi bencana daerah,	Penguatan Kesiapsiagaan Bencana Dan Bantuan Sosial Untuk Penuntasan Kemiskinan Ekstrem
Penguatan inovasi dan kualitas pelayanan publik dalam peningkatan investasi daerah.	Pengembangan Inovasi dan Investasi Untuk Peningkatan PAD

4.2.4. Linearitas Agenda Pembangunan Daerah Tahun 2023 dalam Menjawab Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah

Hasil evaluasi pembangunan adalah berdasarkan hasil capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya penyusunan dokumen RKPD yaitu n-1 (tahun 2021). Sehingga, bila dilihat berdasarkan hasil capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2021 yang dijabarkan pada Bab 2 mempunyai isu strategis pembangunan daerah antara lain:

1. Karakteristik Wilayah yang yang memanjang dan masih adanya Disparitas Pembangunan Infrastruktur antar wilayah
2. Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur ekonomi, pertanian dan pariwisata
3. Infrastruktur dasar rumah layak huni, sanitasi layak dan ketersediaan air bersih
4. Peningkatan Sarana-Prasarana Penunjang pengembangan produk unggulan, Ekonomi Kreatif.
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
6. Penguatan Daya Saing Sektor Industri Olahan dan Perdagangan
7. Penurunan Ekonomi Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19
8. Belum Optimalnya Iklim Usaha di Kabupaten Situbondo
9. Optimalisasi Pemberdayaan masyarakat desa dan BUMDES
10. Kemiskinan ekstrem sebanyak 29.330 jiwa di Kabupaten Situbondo
11. Masih berlangsungnya pandemi Covid-19
12. Potensi PAD yang belum dimaksimalkan
13. Potensi Pengembangan Pariwisata Alam maupun Budaya di Kabupaten Situbondo untuk peningkatan PAD
14. Meningkatnya Angka Kematian Ibu
15. Angka Stunting menurun (23,7%), namun masih cukup tinggi untuk mencapai target nasional 14% di tahun 2024
16. Meningkatnya Angka Putus Sekolah.
17. Guru SD dan SMP yang bersertifikat pendidik masih rendah
18. Kasus kekerasan perempuan dan anak menurun.
19. Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan perempuan serta disabilitas
20. ketrampilan dan kemampuan wira usaha muda millennial, dan penduduk usia produktif, baik yang miskin maupun yang tidak miskin, perlu ditumbuhkan dan dioptimalkan.



Berdasarkan isu strategis di atas, bila ditelaah arah kebijakan pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2023 dalam menjawab isu strategis yang ada dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

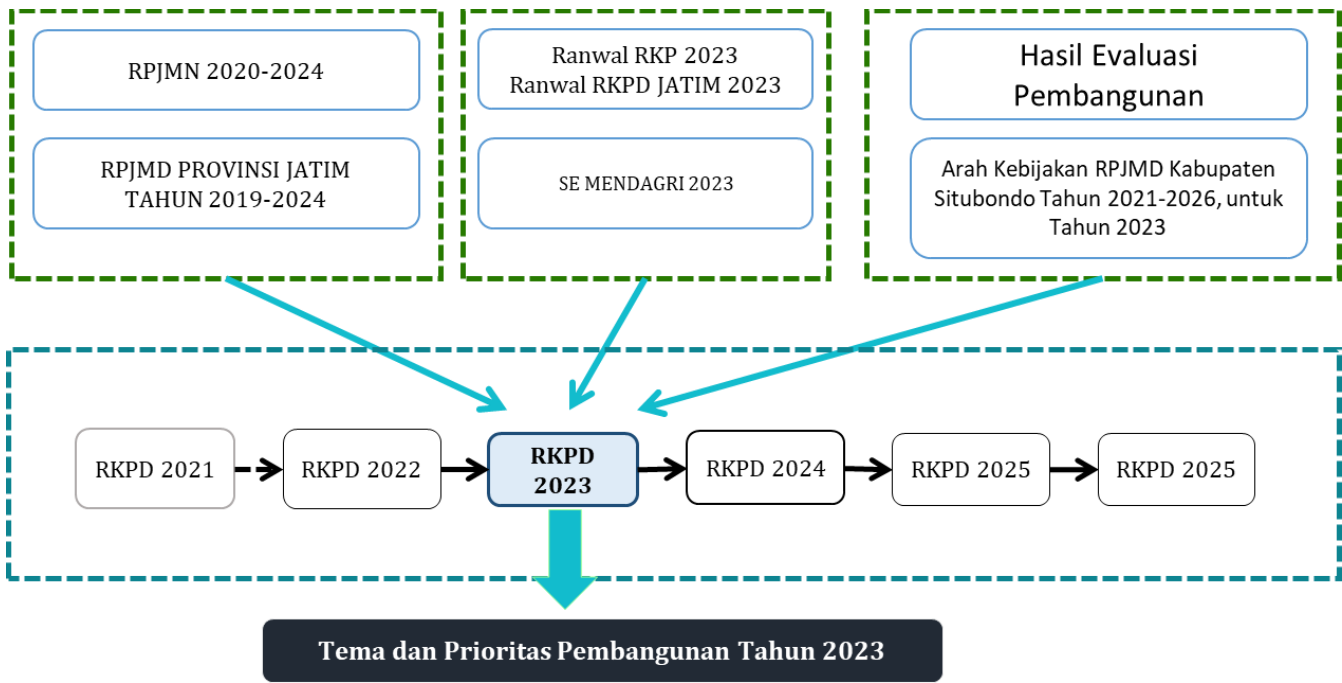
Tabel 4. 4 Linearitas antara Isu Strategis Dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023

Isu Strategis	Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2023
Karakteristik Wilayah yang yang memanjang dan masih adanya Disparitas Pembangunan Infrastruktur antar wilayah	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis
Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur ekonomi, pertanian dan pariwisata	
Infrastruktur dasar rumah layak huni, sanitasi layak dan ketersediaan air bersih	
Peningkatan Sarana-Prasarana Penunjang pengembangan produk unggulan, Ekonomi Kreatif.	
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	
Penguatan Daya Saing Sektor Industri Olahan dan Perdagangan	Pengembangan Produk Olahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
Penurunan Ekonomi Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19	Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Kemudahan Akses Permodalan
Belum Optimalnya Iklim Usaha di Kabupaten Situbondo	
Optimalisasi Pemberdayaan masyarakat desa dan BUMDES	
Kemiskinan ekstrem sebanyak 29.330 jiwa di Kabupaten Situbondo	Penguatan Kesiapsiagaan Bencana Dan Bantuan Sosial Untuk Penuntasan Kemiskinan Ekstrem
Masih berlangsungnya pandemi Covid-19	
Potensi PAD yang belum dimaksimalkan	Pengembangan Inovasi dan Investasi Untuk Peningkatan PAD
Potensi Pengembangan Pariwisata Alam maupun Budaya di Kabupaten Situbondo untuk peningkatan PAD	
Meningkatnya Angka Kematian Ibu	Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, trampil dan berdaya saing
Angka Stunting menurun (23,7%), namun masih cukup tinggi untuk mencapai target nasional 14% di tahun 2024	
Meningkatnya Angka Putus Sekolah.	
Guru SD dan SMP yang bersertifikat pendidik masih rendah	
Kasus kekerasan perempuan dan anak menurun.	
Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan perempuan serta disabilitas	
ketrampilan dan kemampuan wira usaha muda millenial, dan penduduk usia produktif, baik yang miskin maupun yang tidak miskin, perlu ditumbuhkan dan dioptimalkan.	



4.2.5. Tematik dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Serta Linearitas Terhadap Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

Tema pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan telaah pada RPJMD Kabupaten Situbondo Periode 2021-2026 dan hasil evaluasi pembangunan daerah, selain itu perumusan tema pembangunan pada RKPD juga harus selaras dengan agenda pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023, agenda pembangunan provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang arahan penyusunan RKPD Tahun 2023. Hubungan atau keterkaitan antar dokumen dalam perumusan tema pembangunan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4. 7 Perumusan Tema Pembangunan RKPD Tahun 2023

Mengacu pada kerangka penyusunan tematik pembangunan tersebut maka telah diketahui bahwasanya tematik pembangunan pada RKP tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Sedangkan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur Untuk tahun 2023 adalah **“Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk mendukung Daya Saing Daerah dalam menyambut era industry Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro”**. Tematik pembangunan tahun 2023 di Kabupaten Situbondo, berdasarkan RPJMD periode tahun 2021-2026 adalah **“Percepatan Infrastruktur Strategis Terintegrasi Untuk Peningkatan Investasi Dan Inovasi Daerah Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat”**. Berikut adalah linearitas Tema Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Situbondo Tahun 2023:



Gambar 4. 8 Linearitas Tema Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Berdasarkan linearitas tema pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten Situbondo tahun 2023 di atas, serta telaah hasil evaluasi pembangunan daerah, telaah tema dan arah kebijakan nasional tahun 2023, serta telaah tema dan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur tahun 2023, maka dilakukannya penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2023 yang terdapat pada RPJMD. Berikut adalah arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2023 yang terdapat pada RPJMD:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur Kawasan strategis;
2. Pengembangan produk-produk olahan hasil pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penguatan sarana-prasaran kesiapsiagaan bencana dan lingkungan;
4. Penguatan bantuan permodalan dan akses kelembagaan ekonomi;
5. Pengembangan pasar rakyat dan pasar digital;
6. Membangun kerjasama antar daerah dalam pengembangan pasar.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2023 yang terdapat pada RPJMD tersebut kemudian disesuaikan menjadi, berikut:

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis;
2. Pengembangan Produk Olahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Peternakan;
3. Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Kemudahan Akses Permodalan;
4. Penguatan Kesiapsiagaan Bencana Dan Bantuan Sosial Untuk Penuntasan Kemiskinan Ekstrem;
5. Pengembangan Inovasi dan Investasi Untuk Peningkatan PAD;
6. Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, trampil dan berdaya saing.



Dari arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2023 yang telah disesuaikan, berikut adalah linearitas antara arah kebijakan nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Situbondo tahun 2023:

Tabel 4. 5 Linearitas Antara Arah Kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur	Arah Kebijakan Daerah
Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan	Penguatan Kesiapsiagaan Bencana Dan Bantuan Sosial Untuk Penuntasan Kemiskinan Ekstrem
	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	
Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, trampil dan berdaya saing
Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, trampil dan berdaya saing
	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur	
Mendorong pemulihan dunia usaha	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Kemudahan Akses Permodalan
Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Pengembangan Produk Olahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
		Pengembangan Inovasi dan Investasi Untuk Peningkatan PAD
Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Penguatan Kesiapsiagaan Bencana Dan Bantuan Sosial Untuk Penuntasan Kemiskinan Ekstrem
Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis
Pembangunan Ibu Kota Nusantara	-	-



4.2.6. Program Prioritas Daerah Berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam RKPD 2023

Sebagai upaya mengimplementasikan arah kebijakan pembangunan daerah, maka selanjutnya dari arah kebijakan pembangunan daerah tersebut diturunkan menjadi program intervensi daerah. Adapun program intervensi daerah dari setiap arah kebijakan pembangunan memperhatikan isu strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah program intervensi daerah dari masing-masing arah kebijakan:

Tabel 4. 6 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2023 yang Diterjemahkan dalam Program Intervensi Daerah

Arah Kebijakan	Program Intervensi Daerah
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis	Peningkatan Kemantapan Jaringan Jalan Dan Jembatan
	Peningkatan Infrastruktur Dasar, RLH, Sanitasi ,Dan Air Minum
	Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
	Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan, Permukiman Dan Penerangan Jalan
	Pengembangan Kawasan Religi Dan Pengelolaan Kawasan Wisata
	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku (irigasi, domestik dan industri)
	Perluasan Jaringan Dan Layanan Teknologi Informasi
Pengembangan Produk Olahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Peternakan	Optimalisasi Kawasan Minapolitan dan Agropolitan
	Rintisan Kawasan Industri Tembakau
	Penyediaan Insfratruktur Pertanian dan Pasca Panen
	Fasilitasi Keperantaraan Pasar
	Optimalisasi Lahan Kering Untuk Komoditas Ekonomis
Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Kemudahan Akses Permodalan	Optimalisasi Pemberdayaan masyarakat desa dan BUMDES
	Optimalisasi Kelembagaan dan Kapasitas Petani, Nelayan dan Koperasi
	Penumbuhan <i>Integrated Farming</i>
Penguatan Kesiapsiagaan Bencana Dan Bantuan Sosial Untuk Penuntasan Kemiskinan Ekstrem	Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pemberian Sembako kepada masyarakat miskin (prioritas miskin ekstrem)
	Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk meminimalkan <i>inclusion error</i> dan <i>exclusion error</i>
	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
	Pengembangan Sistem deteksi dini kebencanaan
	Penataan kelembagaan kebencanaan
	Peningkatan kesiapsiagaan penanganan bencana
Pengembangan Inovasi dan Investasi Untuk Peningkatan PAD	Legalisasi kebijakan penataan ruang
	Mengembangkan sistem informasi kebijakan penataan ruang
	Nyara Investasi (Nyaman Ramah Berinvestasi)
	PAKEM (Pelayanan, Aktif, Kreatif, Efektif, Efisien, dan Memuaskan)
	MPP (Mall Pelayanan Publik)
	Optimalisasi Retribusi Pajak Berbasis Sistem Informasi
Peningkatan dan pemerataan kualitas	Situbondo Sehat Gratis (SEHATI)
	Optimalisasi Penurunan AKI, AKB, Stunting, dan Hipertensi



Arah Kebijakan	Program Intervensi Daerah
sumber daya manusia yang sehat, cerdas, trampil dan berdaya saing	Optimalisasi desa ODF (Open Defecation Free)
	Pendidikan Kesetaraan berupa Kejar Paket A,B,C untuk mendongkrak capaian IPM Kabupaten
	Peningkatan Kualitas Pendidik/Guru SD dan SMP
	Beasiswa Situbondo CERDAS Dan Bantuan kepada Siswa Putus Sekolah
	Pemberdayaan PMKS untuk Peningkatan kualitas hidup
	Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan perempuan serta disabilitas dengan prioritas masyarakat kategori miskin ekstrem

Dari masing-masing program intervensi daerah, akan diterjemahkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan nomenklatur beserta Perangkat Daerah pengampu (*leading sector*) dari masing-masing program nomenklatur. Berikut adalah penerjemahan program intervensi daerah menjadi program nomenklatur:

a. **Arah Kebijakan Pembangunan 1: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis**

Pada arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 yaitu **Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis** dijawab oleh 7 program intervensi daerah. Dari 7 program intervensi daerah tersebut selanjutnya akan dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur, dan sub kegiatan nomenklatur. Tujuh (7) program intervensi daerah tersebut antara lain:

- 1) Peningkatan Kemantapan Jaringan Jalan Dan Jembatan
- 2) Peningkatan Infrastruktur Dasar, RLH, Sanitasi ,Dan Air Minum
- 3) Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 4) Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan, Permukiman Dan Penerangan Jalan
- 5) Pengembangan Kawasan Religi Dan Pengelolaan Kawasan Wisata
- 6) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku (irigasi, domestik dan industri)
- 7) Percepatan Pemulihan Perdagangan dan Daya Saing produk Perdagangan

Berikut adalah adalah program intervensi daerah yang dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur dan sub kegiatan nomenklatur pada arah kebijakan **Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis**:



Tabel 4. 7 Pemetaan Program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 1

Arah Kebijakan	Program Prioritas RKPD	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Sub Kegiatan Nomenklatur	OPD
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis	Peningkatan Kemantapan Jaringan Jalan Dan Jembatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
				Pemeliharaan Rutin Jalan	
				Rehabilitasi Jembatan	
	Peningkatan Infrastruktur Dasar, RLH, Sanitasi ,Dan Air Minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
				Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
	Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	ROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup
	Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan, Permukiman Dan Penerangan Jalan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan



Arah Kebijakan	Program Prioritas RKPD	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Sub Kegiatan Nomenklatur	OPD
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
	Pengembangan Kawasan Religi Dan Pengelolaan Kawasan Wisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian kesenian Tradisional yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku (irigasi, domestic dan industri)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
	Perluasan Jaringan Dan Layanan Teknologi Informasi	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Diskominfo
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo
				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Diskominfo
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Diskominfo
				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo
				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Diskominfo

b. Arah Kebijakan Pembangunan 2: Pengembangan Produk Olahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Peternakan

Pada arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 yaitu **Pengembangan Produk Olahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Peternakan** dijawab oleh 5 program intervensi daerah. Dari 5 program intervensi daerah tersebut selanjutnya akan dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur, dan sub kegiatan nomenklatur. Lima (5) program intervensi daerah tersebut antara lain:

- 1) Optimalisasi Kawasan Minapolitan dan Agropolitan
- 2) Rintisan Kawasan Industri Tembakau
- 3) Penyediaan Insfratruktur Pertanian dan Pasca Panen
- 4) Fasilitasi Keperantaraan Pasar
- 5) Optimalisasi Lahan Kering Untuk Komoditas Ekonomis



Berikut adalah adalah program intervensi daerah yang dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur dan sub kegiatan nomenklatur pada arah kebijakan **Pengembangan Produk Olahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Peternakan:**

Tabel 4. 8 Pemetaan Program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 2

Arah Kebijakan	Program Prioritas RKPD	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Sub Kegiatan Nomenklatur	OPD
Pengembangan Produk Olahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Peternakan	Optimalisasi Kawasan Minapolitan dan Agropolitan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penyediaan Insfratruktur Pertanian dan Pasca Panen	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Dinas Peternakan dan Perikanan
				Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan
				Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Dinas Peternakan dan Perikanan



Arah Kebijakan	Program Prioritas RKPD	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Sub Kegiatan Nomenklatur	OPD
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Pternakan dan Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Pternakan dan Perikanan
				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dinas Pternakan dan Perikanan
			Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Pternakan dan Perikanan
				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Pternakan dan Perikanan
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Pternakan dan Perikanan
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Pternakan dan Perikanan
	Optimalisasi Lahan Kering Untuk Komoditas Ekonomis	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



c. Arah Kebijakan Pembangunan 3: Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Kemudahan Akses Permodalan

Pada arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 yaitu **Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Kemudahan Akses Permodalan** dijawab oleh 3 program intervensi daerah. Dari 3 program intervensi daerah tersebut selanjutnya akan dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur, dan sub kegiatan nomenklatur. Tiga (3) program intervensi daerah tersebut antara lain:

- 1) Optimalisasi Pemberdayaan masyarakat desa dan BUMDES
- 2) Optimalisasi Kelembagaan dan Kapasitas Petani, Nelayan dan Koperasi
- 3) Penumbuhan Integrated Farming

Berikut adalah adalah program intervensi daerah yang dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur dan sub kegiatan nomenklatur pada arah kebijakan **Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Kemudahan Akses Permodalan**:

Tabel 4. 9 Pemetaan Program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 3

Arah Kebijakan	Program Prioritas RKPD	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Sub Kegiatan Nomenklatur	OPD
Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Kemudahan Akses Permodalan	Optimalisasi Pemberdayaan masyarakat desa dan BUMDES	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Optimalisasi Kelembagaan dan Kapasitas Petani, Nelayan dan Koperasi	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Peternakan dan Perikanan
				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Peternakan dan Perikanan



Arah Kebijakan	Program Prioritas RKPDP	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Sub Kegiatan Nomenklatur	OPD
			Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Peternakan dan Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Peternakan dan Perikanan
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
	Penumbuhan Integrated Farming	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

d. Arah Kebijakan Pembangunan 4: Penguatan Kesiapsiagaan Bencana Dan Bantuan Sosial Untuk Penuntasan Kemiskinan Ekstrem

Pada arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 yaitu **Penguatan Kesiapsiagaan Bencana Dan Bantuan Sosial Untuk Penuntasan Kemiskinan Ekstrem** dijawab oleh 7 program intervensi daerah. Dari 7 program intervensi daerah tersebut selanjutnya akan dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur, dan sub kegiatan nomenklatur. Tujuh (7) program intervensi daerah tersebut antara lain:

- 1) Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pemberian Sembako kepada masyarakat miskin (prioritas miskin ekstrem)
- 2) Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk meminimalkan inclusion error dan exclusion error
- 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
- 4) Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
- 5) Pengembangan Sistem deteksi dini kebencanaan
- 6) Penataan kelembagaan kebencanaan
- 7) Peningkatan kesiapsiagaan penanganan bencana



Berikut adalah adalah program intervensi daerah yang dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur dan sub kegiatan nomenklatur pada arah kebijakan **Penguatan Kesiapsiagaan Bencana Dan Bantuan Sosial Untuk Penuntasan Kemiskinan Ekstrem**:

Tabel 4. 10 Pemetaan Program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 4

Arah Kebijakan	Program Prioritas RKPD	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Sub Kegiatan Nomenklatur	OPD
Penguatan Kesiapsiagaan Bencana Dan Bantuan Sosial Untuk Penuntasan Kemiskinan Ekstrem	Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pemberian Sembako kepada masyarakat miskin (prioritas miskin ekstrem)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial
	Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk meminimalkan inclusion error dan exclusion error	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten / Kota	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	DP3AP2KB
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3AP2KB
	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Dinas Sosial
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pengembangan Sistem deteksi dini kebencanaan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penataan kelembagaan kebencanaan	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinas Sosial
	Peningkatan kesiapsiagaan penanganan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



e. Arah Kebijakan Pembangunan 5: Pengembangan Inovasi dan Investasi Untuk Peningkatan PAD

Pada arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 yaitu **Pengembangan Inovasi dan Investasi Untuk Peningkatan PAD** dijawab oleh 6 program intervensi daerah. Dari 6 program intervensi daerah tersebut selanjutnya akan dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur, dan sub kegiatan nomenklatur. Enam (6) program intervensi daerah tersebut antara lain:

- 1) Legalisasi kebijakan penataan ruang
- 2) Mengembangkan sistem informasi kebijakan penataan ruang
- 3) Nyara Investasi (Nyaman Ramah Berinvestasi)
- 4) PAKEM (Pelayanan, Aktif, Kreatif, Efektif, Efisien, dan Memuaskan)
- 5) MPP (Mall Pelayanan Publik)
- 6) Optimalisasi Retribusi Pajak Berbasis Sistem Informasi

Berikut adalah adalah program intervensi daerah yang dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur dan sub kegiatan nomenklatur pada arah kebijakan **Pengembangan Inovasi dan Investasi Untuk Peningkatan PAD**:

Tabel 4. 11 Pemetaan Program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 5

Arah Kebijakan	Program Prioritas RKPD	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Sub Kegiatan Nomenklatur	OPD
Pengembangan Inovasi dan Investasi Untuk Peningkatan PAD	Legalisasi kebijakan penataan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman
	Nyara Investasi (Nyaman Ramah Berinvestasi)	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP
	PAKEM (Pelayanan, Aktif, Kreatif, Efektif, Efisien, dan Memuaskan)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan



Arah Kebijakan	Program Prioritas RKPD	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Sub Kegiatan Nomenklatur	OPD
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	MPP (Mall Pelayanan Publik)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	DPMPTSP
				Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	
				Pengadaan gedung kantor atau gedung lainnya	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Optimalisasi Retribusi Pajak Berbasis Sistem Informasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah

f. Arah Kebijakan Pembangunan 6: Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, trampil dan berdaya saing

Pada arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 yaitu **Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, trampil dan berdaya saing** dijawab oleh 8 program intervensi daerah. Dari 8 program intervensi daerah tersebut selanjutnya akan dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur, dan sub kegiatan nomenklatur. Delapan (8) program intervensi daerah tersebut antara lain:

- 1) Situbondo Sehat Gratis (SEHATI)
- 2) Optimalisasi Penurunan AKI, AKB, Stunting, dan Hipertensi
- 3) Optimalisasi desa ODF (Open Defecation Free)
- 4) Pendidikan Kesenjangan berupa Kejar Paket A,B,C untuk mendongkrak capaian IPM Kabupaten



- 5) Peningkatan Kualitas Pendidik/Guru SD dan SMP
- 6) Beasiswa Situbondo CERDAS Dan Bantuan kepada Siswa Putus Sekolah
- 7) Pemberdayaan PMKS untuk Peningkatan kualitas hidup
- 8) Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan perempuan serta disabilitas dengan prioritas masyarakat kategori miskin ekstrem

Berikut adalah adalah program intervensi daerah yang dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur dan sub kegiatan nomenklatur pada arah kebijakan **Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, trampil dan berdaya saing**:

Tabel 4. 12 Pemetaan Program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 6

Arah Kebijakan	Program Prioritas RKPD	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Sub Kegiatan Nomenklatur	OPD
Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, trampil dan berdaya saing	Situbondo Sehat Gratis (SEHATI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Optimalisasi Penurunan AKI, AKB, Stunting, dan Hipertensi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
	Optimalisasi desa ODF (Open Defecation Free)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
	Pendidikan Kesenjangan berupa Kejar Paket A,B,C untuk mendongkrak capaian IPM Kabupaten	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Arah Kebijakan	Program Prioritas RKPD	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Sub Kegiatan Nomenklatur	OPD		
	Peningkatan Kualitas Pendidik/ Guru SD dan SMP	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			Beasiswa Situbondo CERDAS Dan Bantuan kepada Siswa Putus Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Pemberdayaan PMKS untuk Peningkatan kualitas hidup	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial		
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial		
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial		
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				Dinas Sosial			
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				Dinas Sosial			



Arah Kebijakan	Program Prioritas RKP	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Sub Kegiatan Nomenklatur	OPD
	Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan perempuan serta disabilitas dengan prioritas masyarakat kategori miskin ekstrem	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial

4.2.7. Dukungan Program Intervensi Daerah Terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Berdasarkan arah kebijakan nasional, terdapat sasaran pembangunan nasional guna mencapai arah kebijakan nasional. Adapun program intervensi daerah Kabupaten Situbondo dalam mendukung sasaran pembangunan nasional tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4. 13 Program Intervensi Daerah Terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Arah Kebijakan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Intervensi Daerah
Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	Sistem Jaminan Sosial,	Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pemberian Sembako kepada masyarakat miskin (prioritas miskin ekstrem)
	Modernisasi Pertanian,	Optimalisasi Kawasan Minapolitan dan Agropolitan
		Rintisan Kawasan Industri Tembakau
		Penyediaan Insfratraktur Pertanian dan Pasca Panen
		Fasilitasi Keperantaraan Pasar
		Optimalisasi Lahan Kering Untuk Komoditas Ekonomis
	Pemerataan Pembangunan.	Peningkatan Kemantapan Jaringan Jalan Dan Jembatan
		Peningkatan Infrastruktur Dasar, RLH, Sanitasi ,Dan Air Minum
		Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan, Permukiman Dan Penerangan Jalan
		Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku (irigasi, domestic dan industri)
		Perluasan Jaringan Dan Layanan Teknologi Informasi
Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job	Penyediaan lapangan usaha	Optimalisasi Pemberdayaan masyarakat desa dan BUMDES
		Optimalisasi Kelembagaan dan Kapasitas Petani, Nelayan dan Koperasi
		Penumbuhan Integrated Farming
Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan	Sistem Kesehatan,	Situbondo Sehat Gratis (SEHATI)
		Optimalisasi Penurunan AKI, AKB, Stunting, dan Hipertensi
		Optimalisasi desa ODF (Open Defecation Free)
	Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter)	Pendidikan Kesetaraan berupa Kejar Paket A,B,C untuk mendongkrak capaian IPM Kabupaten
		Peningkatan Kualitas Pendidik/Guru SD dan SMP
		Beasiswa Situbondo CERDAS Dan Bantuan kepada Siswa Putus Sekolah
Mendorong pemulihan dunia usaha	Revitalisasi pariwisata	Pengembangan Kawasan Religi Dan Pengelolaan Kawasan Wisata
	Pengembangan UMKM	Optimalisasi Pemberdayaan masyarakat desa dan BUMDES



Arah Kebijakan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Intervensi Daerah
Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan	Industrialisasi,	Rintisan Kawasan Industri Tembakau
		Nyara Investasi (Nyaman Ramah Berinvestasi)
	Riset dan Inovasi.	Mengembangkan sistem informasi kebijakan penataan ruang
		Nyara Investasi (Nyaman Ramah Berinvestasi)
		PAKEM (Pelayanan, Aktif, Kreatif, Efektif, Efisien, dan Memuaskan)
		MPP (Mall Pelayanan Publik)
		Optimalisasi Retribusi Pajak Berbasis Sistem Informasi
Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)	Ekonomi rendah karbon	Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
	Transisi energi	
Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi	Penyediaan air bersih dan sanitasi	Peningkatan Infrastruktur Dasar, RLH, Sanitasi ,Dan Air Minum
		Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan, Permukiman Dan Penerangan Jalan
		Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku (irigasi, domestic dan industri)
	Infrastruktur Digital	Perluasan Jaringan Dan Layanan Teknologi Informasi
	Infrastruktur Konektivitas	
Pembangunan Ibu Kota Nusantara	Inisiasi Pembangunan KIPP-IKN Tahap 1A	-
	Luas area pembangunan Ibu Kota Negara 5.600 Ha*	

4.2.8. Cross Cutting dalam Pencapaian Pembangunan Daerah

Cross Cutting dalam Pencapaian Pembangunan Daerah adalah strategi dalam mencapai setiap prioritas pembangunan daerah melalui sinergitas antar perangkat daerah berdasarkan fungsi atau kewenangan masing-masing perangkat daerah sehingga anggaran melekat pada pencapaian prioritas pembangunan daerah. Tujuan dari Cross Cutting adalah agar aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah daerah lebih terarah sehingga perencanaan aktivitas yang dilakukan fokus terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah serta sebagai upaya dalam efisiensi keuangan daerah karena aktivitas perangkat daerah yang dilakukan adalah dalam upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah dan anggaran tidak melekat pada satu perangkat daerah saja. Adapun dalam pencapaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2023, dalam pencapaiannya juga menerapkan strategi cross cutting. Hal tersebut dijabarkan dalam masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

a. *Cross Cutting* Arah Kebijakan Pembangunan: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis.

Pada pencapaian arah kebijakan pembangunan percepatan pembangunan infrastruktur kawasan strategis dapat dilihat *cross cutting* antar perangkat daerah sebagai berikut:



Gambar 4. 9. *Cross Cutting* Arah Kebijakan Pembangunan: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa terdapat **6** perangkat daerah dalam pencapaian arah kebijakan. Adapun perangkat daerah tersebut mempunyai peran masing-masing berdasarkan tugas dan fungsi dari perangkat daerah tersebut. Adapun aktivitas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi dalam mencapai arah kebijakan pembangunan daerah ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. 14. *Cross Cutting* antar Perangkat Daerah dalam Mencapai Arah Kebijakan Pembangunan: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis

Arah Kebijakan	Program Prioritas RKPD	OPD	Anggaran (Rp)
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis	Peningkatan Kemantapan Jaringan Jalan Dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	43.450.000.000
	Peningkatan Infrastruktur Dasar, RLH, Sanitasi ,Dan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	6.250.000.000
		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	8.505.000.000

	Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	224.287.592
	Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan, Permukiman Dan Penerangan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	200.000.000
		Dinas Perhubungan	13.805.000.000
	Pengembangan Kawasan Religi Dan Pengelolaan Kawasan Wisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga	150.000.000
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	242.479.000
	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku (irigasi, domestic dan industri)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.050.000.000
	Perluasan Jaringan Dan Layanan Teknologi Informasi	Diskominfo	178.797.045

b. *Cross Cutting* Arah Kebijakan Pembangunan: Pengembangan Produk Olahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Peternakan.

Pada pencapaian arah kebijakan pembangunan pengembangan produk olahan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan dapat dilihat *cross cutting* antar perangkat daerah sebagai berikut:



Gambar 4. 10. *Cross Cutting* Arah Kebijakan Pembangunan: Pengembangan Produk Olahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Peternakan

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa terdapat **3** perangkat daerah dalam pencapaian arah kebijakan. Adapun perangkat daerah tersebut mempunyai peran masing-masing berdasarkan tugas dan fungsi dari perangkat daerah tersebut.

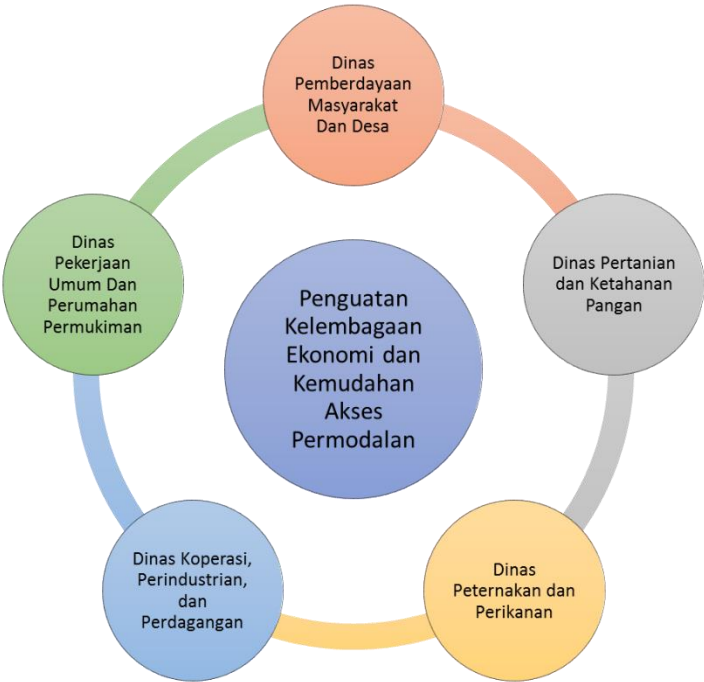
Adapun aktivitas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi dalam mencapai arah kebijakan pembangunan daerah ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. 15. Cross Cutting antar Perangkat Daerah dalam Mencapai Arah Kebijakan Pembangunan Pengembangan Produk Olahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Peternakan

Arah Kebijakan	Program Prioritas RKPD	OPD	Anggaran (Rp)
Pengembangan Produk Olahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Peternakan	Optimalisasi Kawasan Minapolitan dan Agropolitan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	250.000.000
	Penyediaan Insfratraktur Pertanian dan Pasca Panen	Dinas Peternakan dan Perikanan	2.384.888.400
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.825.700.000
	Optimalisasi Lahan Kering Untuk Komoditas Ekonomis	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	462.154.100

c. *Cross Cutting* Arah Kebijakan Pembangunan: Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Kemudahan Akses Permodalan.

Pada pencapaian arah kebijakan pembangunan penguatan kelembagaan ekonomi dan kemudahan akses permodalan dapat dilihat *cross cutting* antar perangkat daerah sebagai berikut:



Gambar 4. 11. Cross Cutting Arah Kebijakan Pembangunan: Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Kemudahan Akses Permodalan.

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bakhwa terdapat **5** perangkat daerah dalam pencapaian arah kebijakan. Adapun perangkat daerah tersebut mempunyai peran masing-masing berdasarkan tugas dan fungsi dari perangkat daerah tersebut. Adapun aktivitas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi dalam mencapai arah kebijakan pembangunan daerah ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. 16. Cross Cutting antar Perangkat Daerah dalam Mencapai Arah Kebijakan Pembangunan Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Kemudahan Akses Permodalan

Arah Kebijakan	Program Prioritas RKPD	OPD	Anggaran (Rp)
Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Kemudahan Akses Permodalan	Optimalisasi Pemberdayaan masyarakat desa dan BUMDES	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	410.000.000
	Optimalisasi Kelembagaan dan Kapasitas Petani, Nelayan dan Koperasi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	190.700.000
		Dinas Peternakan dan Perikanan	266.980.000
		Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	844.725.000
	Penumbuhan Integrated Farming	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	355.700.000

d. Cross Cutting Arah Kebijakan Pembangunan: Penguatan Kesiapsiagaan Bencana Dan Bantuan Sosial Untuk Penuntasan Kemiskinan Ekstrem.

Pada pencapaian arah kebijakan pembangunan penguatan kesiapsiagaan bencana dan bantuan sosial untuk penuntasan kemiskinan ekstrem. dapat dilihat cross cutting antar perangkat daerah sebagai berikut:



Gambar 4. 12. Cross Cutting Arah Kebijakan Pembangunan: Penguatan Kesiapsiagaan Bencana Dan Bantuan Sosial Untuk Penuntasan Kemiskinan Ekstrem.

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa terdapat 4 perangkat daerah dalam pencapaian arah kebijakan. Adapun perangkat daerah tersebut mempunyai peran masing-masing berdasarkan tugas dan fungsi dari perangkat daerah tersebut. Adapun aktivitas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi dalam mencapain arah kebijakan pembangunan daerah ini antara lain sebagai berikut:

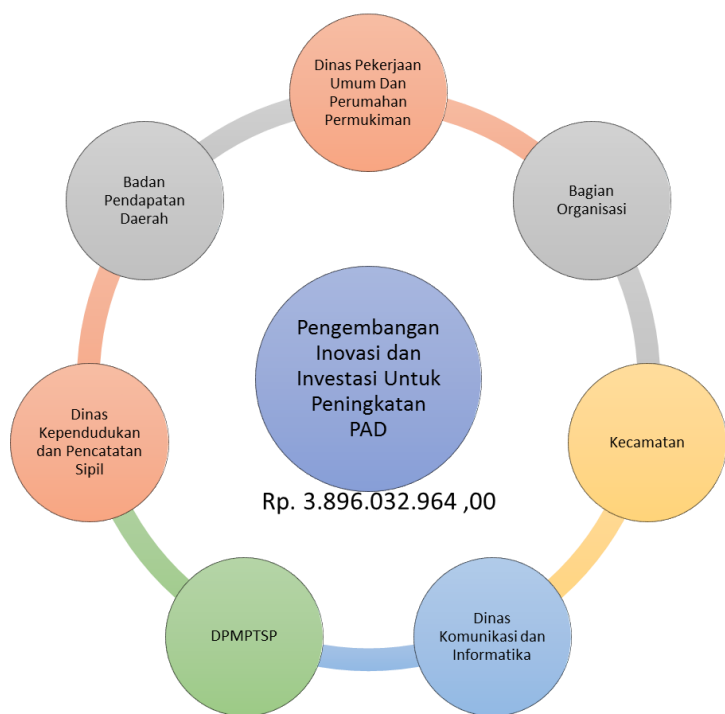


Tabel 4. 17. *Cross Cutting* antar Perangkat Daerah dalam Mencapai Arah Kebijakan Pembangunan Penguatan Kesiapsiagaan Bencana Dan Bantuan Sosial Untuk Penuntasan Kemiskinan Ekstrem.

Arah Kebijakan	Program Prioritas RKPD	OPD	Anggaran (Rp)
Penguatan Kesiapsiagaan Bencana Dan Bantuan Sosial Untuk Penuntasan Kemiskinan Ekstrem	Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pemberian Sembako kepada masyarakat miskin (prioritas miskin ekstrem)	Dinas Sosial	3.000.000.000
	Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk meminimalkan inclusion error dan exclusion error	Dinas Sosial	110.000.000
	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Dinas Ketenagakerjaan	1.225.000.000
		DP3AP2KB	3.254.818.700
	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Dinas Sosial	280.000.000
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100.000.000
	Pengembangan Sistem deteksi dini kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100.000.000
	Penataan kelembagaan kebencanaan	Dinas Sosial	20.000.000
	Peningkatan kesiapsiagaan penanganan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150.000.000

e. *Cross Cutting* Arah Kebijakan Pembangunan: Pengembangan Inovasi dan Investasi Untuk Peningkatan PAD.

Pada pencapaian arah kebijakan pembangunan pengembangan inovasi dan investasi untuk peningkatan PAD dapat dilihat *cross cutting* antar perangkat daerah sebagai berikut:



Gambar 4. 13. Cross Cutting Arah Kebijakan Pembangunan: Pengembangan Inovasi dan Investasi Untuk Peningkatan PAD.

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bakhwa terdapat **7** perangkat daerah dalam pencapaian arah kebijakan. Adapun perangkat daerah tersebut mempunyai peran masing-masing berdasarkan tugas dan fungsi dari perangkat daerah tersebut. Adapun aktivitas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi dalam mencapai arah kebijakan pembangunan daerah ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. 18. Cross Cutting antar Perangkat Daerah dalam Mencapai Arah Kebijakan Pembangunan Pengembangan Inovasi dan Investasi Untuk Peningkatan PAD.

Arah Kebijakan	Program Prioritas RKPD	OPD	Anggaran (Rp)
Pengembangan Inovasi dan Investasi Untuk Peningkatan PAD	Legalisasi kebijakan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	1.150.000.000
	Nyara Investasi (Nyaman Ramah Berinvestasi)	DPMPTSP	190.000.000
	PAKEM (Pelayanan, Aktif, Kreatif, Efektif, Efisien, dan Memuaskan)	Bagian Organisasi	275.000.000
		Kecamatan	361.547.514
		Dinas Komunikasi dan Informatika	102.697.045
	MPP (Mall Pelayanan Publik)	DPMPTSP	1.500.000.000
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38.067.800
	Optimalisasi Retribusi Pajak Berbasis Sistem Informasi	Badan Pendapatan Daerah	278.720.605

f. *Cross Cutting* Arah Kebijakan Pembangunan: Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Trampil dan Berdaya Saing.

Pada pencapaian arah kebijakan pembangunan peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, trampil dan berdaya saing dapat dilihat *cross cutting* antar perangkat daerah sebagai berikut:



Gambar 4. 14. *Cross Cutting* Arah Kebijakan Pembangunan: Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Trampil dan Berdaya Saing.

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bakhwa terdapat **7** perangkat daerah dalam pencapaian arah kebijakan. Adapun perangkat daerah tersebut mempunyai peran masing-masing berdasarkan tugas dan fungsi dari perangkat daerah tersebut. Adapun aktivitas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi dalam mencapain arah kebijakan pembangunan daerah ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. 19. *Cross Cutting* antar Perangkat Daerah dalam Mencapai Arah Kebijakan Pembangunan Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Trampil dan Berdaya Saing.

Arah Kebijakan	Program Prioritas RKPD	OPD	Anggaran (Rp)
Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, trampil dan berdaya saing	Situbondo Sehat Gratis (SEHATI)	Dinas Kesehatan	10.000.000.000
	Optimalisasi Penurunan AKI, AKB, Stunting, dan Hipertensi	Dinas Kesehatan	4.743.337.573
	Optimalisasi desa ODF (Open Defecation Free)	Dinas Kesehatan	3.796.405.000
	Optimalisasi desa ODF (Open Defecation Free)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	8.505.000.000



	Pendidikan Kesenjangan berupa Kejar Paket A,B,C untuk mendongkrak capaian IPM Kabupaten	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.203.864.689
	Peningkatan Kualitas Pendidik/Guru SD dan SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.259.316.155
	Beasiswa Situbondo CERDAS Dan Bantuan kepada Siswa Putus Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.685.730.000
	Pemberdayaan PMKS untuk Peningkatan kualitas hidup	Dinas Sosial	500.000.000
	Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan perempuan serta disabilitas dengan prioritas masyarakat kategori miskin ekstrem	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	1.620.743.700
	Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan perempuan serta disabilitas dengan prioritas masyarakat kategori miskin ekstrem	Dinas Ketenagakerjaan	1.625.000.000
	Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan perempuan serta disabilitas dengan prioritas masyarakat kategori miskin ekstrem	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	300.000.000
	Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan perempuan serta disabilitas dengan prioritas masyarakat kategori miskin ekstrem	Dinas Sosial	50.000.000

4.2.9. Pokok-pokok Pikiran DPRD

	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
1	2	3	4	5	6
1	untuk memperbaiki rumah tak layak huni agar menjadi layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD Pagu : 150000000 Koefisien : 10 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 10 unit Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 10 unit Anggaran : 150000000
2	pembangunan pagar Madrasah Zainul Ihsan Desa Paowan Kec. Panarukan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
3	Pembangunan pagar MTs. Darussalam Al Fathony Kendit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD pagu : 145000000 Koefisien : 150 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 150 meter Anggaran : 145000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 150 meter Anggaran : 145000000
4	untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
5	untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian			

1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
		Penduduk dan Keluarga Berencana			
6	Pembuatan Kandang Kambing Bugeman	Dinas Peternakan dan Perikanan			
7	Pembuatan Kandang ternak Kambing	Dinas Peternakan dan Perikanan			
8	Rehab Asrama Pondok Pesantren Pp. Jauharul Ulum Desa Paowan Kec. Paarukan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
9	minimnya penerangan di jalan panarukan dan kecmatan kendit	Dinas Perhubungan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD pagu 105000000 Koefisien : 15 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 6 titik Anggaran : 105000000	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 6 titik Anggaran : 105000000
10	memudahkan mengangkut sampah untuk kebersihan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup			
11	untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni agar menjadi layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
12	Untuk Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
13	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 5 Dawuhan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
14	untuk menahan gerusakan air Sungai agar tidak terjadi longsor	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
15	untuk memperbaiki jalan yang rusak agar dapat memperlancar akses masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
16	Kurangnya sumber air bersih	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 150000000 Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Catatan : Harus Sesuai dengan Ketentuan Teknis Koefisien : 1 Unit Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Catatan : Harus Sesuai dengan Ketentuan Teknis Koefisien : 1 Unit Anggaran : 150000000
17	Kurangnya mendapatkan sumber air bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD pagu 75.000.000 Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 1 Unit Anggaran : 75000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 1 Unit Anggaran : 75000000
18	Roda Tiga yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam hal mengangkut sampah dan lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 105000000 Koefisien : 3 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 2 Unit Anggaran : 105000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 2 Unit Anggaran : 105000000
19	Kurangnya mendapatkan sumber air bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD pagu 75.000.000 Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 1 unit Anggaran : 75000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 1 unit Anggaran : 75000000
20	Kurannya mendapatkan sumber air bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD pagu 75.000.000 Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 1 unit Anggaran : 75000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 1 unit Anggaran : 75000000

1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
21	Aksen jalan yang rusak	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 220000000 Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 1 unit Anggaran : 220000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 1 unit Anggaran : 220000000
22	Membutuhkan hand traktor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
23	Rumah yang tidak layak memenuhi persyaratan rumah layak huni dimana konstruksi bangunan tidak handal	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
24	Membutuhkan gerobak sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : 0 Koefisien : 1 unit Anggaran : 0		
25	minimnya penerangan Desa Blimbing	Dinas Perhubungan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD pagu: 200.000.000 Koefisien : 25 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 11 titik Anggaran : 200000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 11 titik Anggaran : 200000000
26	memperlancar saluran air agar tidak terjadi banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD Pagu: 100.000.000 Koefisien : 400 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 400 meter Anggaran : 100000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 400 meter Anggaran : 100000000
27	memperlancar saluran air agar tidak terjadi banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD pagu: 100.000.000 Koefisien : 400 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 400 meter Anggaran : 100000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 400 meter Anggaran : 100000000
28	memperlancar saluran air agar tidak terjadi banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
29	untuk menambah pengairan area persawahan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
30	RTLH (RUMAH TIDAK LAYAK HUNI)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 225000000 Koefisien : 15 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 15 Unit Anggaran : 225000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 15 Unit Anggaran : 225000000
31	PEMBUATAN VIDIO UNTUK PROMO WISATA	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 50000000 Koefisien : 1 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 Titik Anggaran : 50000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 Titik Anggaran : 50000000
32	TRIAL AVENTURE SITUBONDO	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			
33	PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 50000000 Koefisien : 2 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 2 Titik Anggaran : 50000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 2 Titik Anggaran : 50000000
34	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG IDIOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELANEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAHARUAN KEBANGSAAN , BHINNEKA TUNGGAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 75000000 Koefisien : 1 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 Titik Anggaran : 75000000	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 Titik Anggaran : 75000000

1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
	IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN				
35	PEMBANGUNAN GAPURA GANG PERSERI	Dinas Lingkungan Hidup			
36	PEMBERHENTIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (IPAL DAN MCK)	Dinas Lingkungan Hidup			
37	karena kondisi rumah tidak layak untuk di tempati	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 5 unit, Anggaran = 75.000.000 Koefisien : 6 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 6 unit Anggaran : 75000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 6 unit Anggaran : 75000000
38	kondisi rumah tidak layak di tempati	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 5 unit, Anggaran = 75.000.000 Koefisien : 6 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 6 Unit Anggaran : 75000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 6 Unit Anggaran : 75000000
39	Karena Kondisi rumah tidak layak untuk di tempati	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 4 unit, Anggaran = 60.000.000 Koefisien : 4 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 unit Anggaran : 60000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 unit Anggaran : 60000000
40	karena kondisi rumah tidak laya di tempati	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
41	karena kekurangan sarana air bersih	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 unit, Anggaran = 75.000.000 Koefisien : 2 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 75000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 75000000
42	untuk meningkatkan wawasan tentang politik bermasyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 115.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 115000000	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 115000000
43	pengeboran air dangkal untuk air bersih	Dinas Lingkungan Hidup			
44	pengeboran dangkal air bersih	Dinas Lingkungan Hidup			
45	pelatihan teknologi penangkapan ikan	Dinas Peternakan dan Perikanan			
46	beberapa rumah yang terletak di kecamatan sumbermalng belum layak huni sehingga perlu perbaikan dan pembangunan rumah yg layak huni	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 200000000 Koefisien : 10 15.000.000 Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 10 15.000.000 Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 10 15.000.000 Anggaran : 200000000
47	beberapa rumah yang terletak di kecamatan sumbermalng belum layak huni sehingga perlu perbaikan dan pembangunan rumah yg layak huni	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
48	beberapa rumah yang terletak di kecamatan sumbermalng belum layak huni sehingga	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			



1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
	perlu perbaikan dan pembangunan rumah yg layak huni				
49	beberapa rumah yang terletak di kecamatan sumbermalng belum layak huni sehingga perlu perbaikan dan pembangunan rumah yg layak huni	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
50	banyak perumahan warga yang berada di bantaran sungai ketika musim hujan sering terjadi banjir dan masuk kedalam pemukiman warga.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
51	sumbermalang memiliki populasi ternak sapi yang tergolong tinggi, namun sebagian besar peternak belum paham teknis budidaya sapi yang baik dan menguntungkan.	Dinas Peternakan dan Perikanan			
52	banyak peternak kambing di kecamatan sumbermalang yang masih kesulitan membuat formulasi pakan dan cara budidaya yang baik	Dinas Peternakan dan Perikanan			
53	Terdapat dusun yang rawan longsor dikarenakan pemukiman berada di bawah lembah yang belum terdapat penahan tanah nya.	Dinas Peternakan dan Perikanan			
54	Terdapat jalan desa yang masih belum memiliki penerangan sehingga rawan perampokan.	Dinas Perhubungan			
55	terdapat jalan desa yang belum mendapat penerangan	Dinas Perhubungan			
56	terdapat jalan desa yang belum mendapat penerangan	Dinas Perhubungan			
57	Dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari diadakan pasar murah untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok yang dibutuhkan sehari-hari	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
58	untuk menjaga keselamatan pengguna jalan maka dilakukan pembangunan jalan yang ada di dusun ketah desa ketah kecamatan suboh	Dinas Perhubungan			
59	untuk menjaga keselamatan pengguna jalan maka dilakukan pembangunan jalan yang ada di dusun	Dinas Perhubungan			



1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
	janti desa ketah kecamatan suboh				
60	untuk menjaga keselamatan pengguna jalan maka dilakukan dipembangunan jalan yang ada di dusun watu-ketu desa besuki	Dinas Perhubungan			
61	belum tersedianya air untuk kebutuhan sanitasi masyarakat disekitar maka dilakukan pengeboran untuk mendapatkan sumber air	Dinas Lingkungan Hidup			
62	belum tersedianya air untuk kebutuhan sanitasi masyarakat disekitar maka dilakukan pengeboran untuk mendapatkan sumber air di daerah dusun DAM agung desa bungatan kecamatan bungatan	Dinas Lingkungan Hidup			
63	untuk meningkatkan kemampuan las listrik dibutuhkan pelatihan untuk meningkatkn kompetensi keahlian masyarakat di sekitar	Dinas Ketenagakerjaan			
64	untuk pemecah ombak, mencegah terjadinya abrasi (pengikisan air laut)	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 125.000.000,- dengan volume 1 titik Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 125000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 125000000
65	Dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari diadakan pasar murah untuk memenuhi kebuthan bahan pokok yang dibutuhkan sehari-hari	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 150.000.000,- pada 5 titik lokasi Koefisien : 5 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 5 paket Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 5 paket Anggaran : 150000000
66	Perbaikan jalan desa Jati BantengKecamatan Jati Banteng	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 200.000.000,- pada 1 titik lokasi Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 1 titik Anggaran : 200000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 1 titik Anggaran : 200000000
67	Perbaikan jalan desa Kalianget kecamatan Banyugligur	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 105.000.000,- pada 1 titik lokasi Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 1 titik Anggaran : 105000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 1 titik Anggaran : 105000000
68	Normalisasi drainase	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 100.000.000,- pada 1 titik lokasi Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000
69	pengadaan PJU	Dinas Perhubungan	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 195.000.000,- pada 15 titik lokasi Koefisien : 20 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 12 titik Anggaran : 195000000	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 12 titik Anggaran : 195000000
70	perbaikan ruas jalan leces	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
71	Pelatihan untuk meningkatkan nilai nilai pancasila	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			

1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
72	untuk Efektitas proses belajar mengajar di MI Nurul Huda Gebangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
73	masyarakat sangat membutuhkan pengetahuan pendidikan politik agar masyarakat cerdas dalam menentukan sikap politiknya setiap momentum pemilihan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD pagu : 150000000 Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 paket Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 paket Anggaran : 150000000
74	untuk memperbaiki rumah tak layak huni agar menjadi layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD pagu : 150000000 lokasi: mangaran Koefisien : 10 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 10 unit Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 10 unit Anggaran : 150000000
75	untuk memperbaiki rumah tak layak huni agar menjadi layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD pagu : 100000000 Koefisien : 10 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 10 unit Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 10 unit Anggaran : 100000000
76	untuk pengelolaan lahan pertanian dan meningkatkan kualitas hasil panen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
77	memudahkan mengangkut sampah agar lingkungan menjadi bersih	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD pagu : 100000000 Koefisien : 3 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk di akomodir Koefisien : 2 unit Anggaran : 100000000	Rekomendasi : disetujui untuk di akomodir Koefisien : 2 unit Anggaran : 100000000
78	memperbaiki rumah tidak layak huni agar menjadi layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
79	Membutuhkan kandang sapi	Dinas Peternakan dan Perikanan			
80	Membutuhkan roda tiga	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 100000000 Koefisien : 3 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 2 unit Anggaran : 100000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 2 unit Anggaran : 100000000
81	Membutuhkan roda tiga	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 100000000 Koefisien : 3 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 2 unit Anggaran : 100000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 2 unit Anggaran : 100000000
82	Membutuhkan pembangunan sumber air berupa sumur bor untuk menambah sumber air irigasi pada lahan pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 200000000 Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Catatan : Harus sesuai dengan ketentuan Teknis Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Catatan : Harus sesuai dengan ketentuan Teknis Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000
83	Membutuhkan sarpras budidaya ikan	Dinas Peternakan dan Perikanan			
84	Membutuhkan sarpras budidaya ikan	Dinas Peternakan dan Perikanan			
85	Untuk pembangunan gapura	Dinas Lingkungan Hidup			
86	Untuk pembangunan Gapura	Dinas Lingkungan Hidup			
87	Membutuhkan kandang sapi	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 200000000 Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000

1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
88	Pemasangan paving	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 200000000 Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000
89	Membutuhkan gerobak sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. usulan kegiatan menjadi Pemb IPAL. Pagu : 200000000 Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk direkomendasi Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000	Rekomendasi : disetujui untuk direkomendasi Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000
90	membutuhkan air bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 100.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000
91	membutuhkan MCK untuk masyarakat sekitar	Dinas Lingkungan Hidup			
92	membutuhkan MCK Untuk santri	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 unit, Anggaran = 100.000.000 Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk direkomendasi Koefisien : 1 unit Anggaran : 100000000	Rekomendasi : disetujui untuk direkomendasi Koefisien : 1 unit Anggaran : 100000000
93	membutuhkan MCK untuk warga	Dinas Lingkungan Hidup			
94	rehabilitasi pipa air bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 50.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000
95	pelatihan pembuatan aneka masakan	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 100.000.000 Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 100000000
96	membutuhkan pengeboran air dangkal	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
97	peningkatan mutu da"i da"iyah	Bagian Kesejahteraan Rakyat			
98	rehabilitasi pipanisasi air bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 50.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000
99	karena kondisi rumah tidak layak di tempati	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 28 Unit, Pagu Anggaran = 420.000.000 Koefisien : 40 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 40 Unit Anggaran : 420000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 40 Unit Anggaran : 420000000
100	kondisi rumah tidak layak di tempati	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 5 Unit, Pagu Anggaran = 75.000.000 Koefisien : 5 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 5 unit Anggaran : 75000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 5 unit Anggaran : 75000000
101	karena kondisi rumah tidak layak huni	Dinas Pekerjaan Umum dan			

1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
		Perumahan Permukiman			
102	kondisi jalan rusak	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 200m, Pagu Anggaran = 150.000.000 Koefisien : 200 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 200 meter Anggaran : 150000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 200 meter Anggaran : 150000000
103	kondisi jalan rusak parah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 200m, Pagu Anggaran = 150.000.000 Koefisien : 200 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 200 meter Anggaran : 150000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 200 meter Anggaran : 150000000
104	kondisi jalan rusak	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
105	membutuhkan saluran drainase	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 150.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0		
106	membutuhkan saluran drainase	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 200.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0		
107	membutuhkan saluran drainase	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 200.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0		
108	membutuhkan lampu penerangan	Dinas Perhubungan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 20 unit, Anggaran = 200.000.000 Koefisien : 20 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 12 unit Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 12 unit Anggaran : 200000000
109	pengadaan gerobak sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 paket, Anggaran = 200.000.000 Koefisien : 1 paket Anggaran : 0		
110	untuk keperluan sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 paket, Anggaran = 100.000.000 Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 100000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 100000000
111	untuk acara kegiatan sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 unit, Anggaran = 150.000.000 Koefisien : 1 unit Anggaran : 0		
112	Untuk menambah produktifitas para nelayan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000

1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
			unit, Anggaran = 100.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0		
113	Kondisi ruang kelas tidak kondusif	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 unit, Anggaran = 150.000.000 Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 unit Anggaran : 150000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 unit Anggaran : 150000000
114	butuh roda tiga pengangkut sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 2 unit, Anggaran = 70.000.000 Koefisien : 3 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 unit Anggaran : 70000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 unit Anggaran : 70000000
115	pelatihan KUBE	Dinas Ketenagakerjaan			
116	kondisi Gedung sekolah rusak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 unit, Anggaran = 75.000.000 Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 Unit Anggaran : 75000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 Unit Anggaran : 75000000
117	Kurangnya lampu penerangan	Dinas Perhubungan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 7 unit, Anggaran = 70.000.000 Koefisien : 10 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 4 Unit Anggaran : 70000000	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 4 Unit Anggaran : 70000000
118	untuk kebutuhan masyarakat	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
119	untuk mencegah pencemaran lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
120	karena kondisi jalan rusak	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
121	pelatihan pembuatan kue	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
122	membanguan akses pertanian untuk mempermudah mengangkut hasil pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD pagu: 100000000 Koefisien : 500 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Catatan : Harus sesuai dengan Ketentuan teknis Koefisien : 500 meter Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Catatan : Harus sesuai dengan Ketentuan teknis Koefisien : 500 meter Anggaran : 100000000
123	Untuk memperindah pintu gerbang SMPN 1 Jangkar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD Pagu: 50.000.000 Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 unit Anggaran : 50000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 unit Anggaran : 50000000
124	agar Halaman Sekolah tidak becek saat hujan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD Pagu: 50.000.000 Koefisien : 300 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 300 m2 Anggaran : 50000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 300 m2 Anggaran : 50000000
125	untuk memperbaiki jalan desa palangan menuju desa gadingan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD Pagu: 100.000.000 Koefisien : 300 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 300 meter Anggaran : 100000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 300 meter Anggaran : 100000000



1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
126	meningkatkan produktivitas hasil usaha nelayan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD Pagu: 50.000.000 Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000
127	meningkatkan keterampilan dalam pengolahan kue	Dinas Ketenagakerjaan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD Pagu: 50.000.000 Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000
128	untuk perbaikan jalan menuju akses TPI Jangkar	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD Pagu: 100.000.000 Koefisien : 300 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 300 meter Anggaran : 100000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 300 meter Anggaran : 100000000
129	untuk melakukan pelatihan terhadap petani cabe	Dinas Ketenagakerjaan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD Pagu: 50.000.000 Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000
130	untuk memperbaiki akses jalan ke pasarangka banyakan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD Pagu: 100.000.000 Koefisien : 300 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 300 meter Anggaran : 100000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 300 meter Anggaran : 100000000
131	pengadaan alsintan handtraktor dan cultivator masing-masing 2 unit untuk poktan pembaharuan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rekomendasi : dise Koefisien : 4 unit Anggaran : 0		
132	untuk memperbaiki akses jalan Nangger – Bengko Kampung desa Sopet	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : tujui untuk diteruskan ke PD Pagu: 100.000.000 Koefisien : 300 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 300 meter Anggaran : 100000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 300 meter Anggaran : 100000000
133	minimnya penerangan jalan umum di kecamatan jangkar	Dinas Perhubungan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD pagu: 150.000.000 Koefisien : 32 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 9 unit Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 9 unit Anggaran : 150000000
134	memperlancar aliran air agar tidak terjadi banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : tujui untuk diteruskan ke PD Pagu: 100.000.000 Koefisien : 500 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 500 meter Anggaran : 100000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 500 meter Anggaran : 100000000
135	mempermudah akses jalan usaha tani	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
136	Memperlancar aliran air agar tidak terjadi banjir di musim penghujan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD pagu: 150000000 Koefisien : 500 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 500 meter Anggaran : 150000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 500 meter Anggaran : 150000000
137	untuk memperlancar aliran saluran irigasi persawahan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
138	memperbaiki rumah yang tak layak huni agar bisa di huni	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
139	memperbaiki rumah yang tak layak huni agar layak dihuni	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk di teruskan ke PD pagu: 125000000 volume : 8 unit Koefisien : 5 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 5 unit Anggaran : 125000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 5 unit Anggaran : 125000000

1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
140	untuk memperbaiki rumah yang tidak layak dihuni agar layak di huni	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk di teruskan ke PD pagu: 125000000 volume : 8 unit Koefisien : 5 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 5 unit Anggaran : 125000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 5 unit Anggaran : 125000000
141	pengadaan Handraktor dan gerobak sampah untuk kebersihan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup			
142	pengadaan sepeda roda tiga	Dinas Lingkungan Hidup			
143	karena kondisi rumah tidak layak di tempati	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD pagu: 240000000 Koefisien : 30 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 30 unit Anggaran : 240000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 30 unit Anggaran : 240000000
144	karena kondisi rumah tidak layak di tempati	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD pagu: 150000000 Koefisien : 10 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 10 unit Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 10 unit Anggaran : 150000000
145	karena kondisi rumah tidak layak di tempati	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
146	kurangnya alat transport pembuang sampah	Dinas Lingkungan Hidup			
147	karena kurangnya lampu penerangan	Dinas Perhubungan			
148	kurangnya lampu penerangan di Desa olean	Dinas Perhubungan			
149	untuk menghindari adanya pencemaran lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
150	Minimnya penerangan Jalan di Desa Talkandang	Dinas Perhubungan			
151	Minimnya penerangan di jalan desa Olean	Dinas Perhubungan			
152	Minimnya Penerangan jalan di Desa Kalibagor	Dinas Perhubungan			
153	agar tidak becek saat musim hujan dan memperindah halaman SDN 2 Talkandang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
154	Pengadaan sarana Prasaran Gerobak Roda 3	Dinas Lingkungan Hidup			
155	Pengadaan Gerobak Roda 3 Di Desa Olean	Dinas Lingkungan Hidup			
156	Pengadaan Roda 3 Di Desa Kalibagor	Dinas Lingkungan Hidup			
157	Pengadaan Roda 3 Di Desa Kotakan	Dinas Lingkungan Hidup			
158	Memudahkan untuk sarana ibadah agar aman dan nyaman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
159	Minimnya penerangan jalan di desa Talkandang	Dinas Perhubungan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD pagu: 10000000 Koefisien : 30 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 10000000	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 10000000
160	Minimnya penerangan jalan umum di Desa	Dinas Perhubungan			



1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
	Olean Kecamatan Situbondo				
161	Minimnya penerangan Jalan Umum di Desa Kalibagor	Dinas Perhubungan			
162	Minimnya penerangan Jalan Umum di Kelurahan Dawuhan	Dinas Perhubungan			
163	Minimnya penerangan Jalan Umum di Desa Patokan	Dinas Perhubungan			
164	Minimnya penerangan Jalan Umum di Desa Battal	Dinas Perhubungan			
165	Minimnya penerangan Jalan Umum di Desa Duwet	Dinas Perhubungan			
166	Minimnya penerangan Jalan Umum di Desa Alasmalang	Dinas Perhubungan			
167	untuk meningkatkan kualitas siswa di SDN 2 Talkandang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
168	untuk memperindah halaman SDN 2 Talkandang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
169	butuh penerangan	Dinas Perhubungan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 5 unit, Anggaran = 50.000.000 Koefisien : 5 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 3 unit Anggaran : 50000000	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 3 unit Anggaran : 50000000
170	pelatihan pembuatan olahan kue	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 50.000.000 Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000
171	pelatihan aneka olahan ikan	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 50.000.000 Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000
172	pelatihan aneka olahan ikan	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 50.000.000 Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000
173	pelatihan aneka olahan kue	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 50.000.000 Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000
174	MCK untuk lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 100.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000
175	mck lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup			
176	butuh lampu penerangan	Dinas Perhubungan			
177	mck lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup			

1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
178	pembangunan saluran drainase	Dinas Lingkungan Hidup			
179	butuh penerangan	Dinas Perhubungan			
180	pelatihan aneka olahan kue	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 50.000.000 Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000
181	butuh penerangan	Dinas Perhubungan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 35 unit, Anggaran = 350.000.000 Koefisien : 60 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 21 unit Anggaran : 350000000	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 21 unit Anggaran : 350000000
182	pelatihan disnaker	Dinas Ketenagakerjaan			
183	kondisi jalan rusak	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 200 meter, Anggaran = 150.000.000 Koefisien : 200 m Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 200 m Anggaran : 150000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 200 m Anggaran : 150000000
184	untuk kenyamanan fasilitas sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 unit, Anggaran = 100.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000
185	untuk membangun akses jalan masyarakat di desa sumberejo	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD pagu 200000000 Koefisien : 500 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 500 meter Anggaran : 200000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 500 meter Anggaran : 200000000
186	untuk mengairi area persawahan di sumberejo	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD pagu: 200000000 Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Catatan : Harus sesuai dengan Ketentuan Teknis Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Catatan : Disetujui Harus sesuai dengan Ketentuan Teknis Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000
187	untuk pengadaan air bersih	Dinas Lingkungan Hidup			
188	untuk meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD pagu: 100000000 Koefisien : 3 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 2 unit Anggaran : 100000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 2 unit Anggaran : 100000000
189	memperbaiki rumah yang tidak layak huni agar menjadi layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD pagu: 100000000 Koefisien : 3 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 3 unit Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 3 unit Anggaran : 100000000
190	Pembangunan Sekolah tahfidz	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
191	Agar tidak becek saat musim hujan di SMP Sunan Ampel Sumberejo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD pagu: 100.000.000 Koefisien : 300 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 300 meter Anggaran : 100000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 300 meter Anggaran : 100000000
192	Pengaspalan hotmix	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. usulan kegiatan berubah menjadi RTLH. Pagu :	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 1 unit Anggaran : 240000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 1 unit Anggaran : 240000000

1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
			240000000 Koefisien : 1 unit Anggaran : 0		
193	PJU	Dinas Perhubungan			
194	PJU	Dinas Perhubungan			
195	Membutuhkan roda 3	Dinas Lingkungan Hidup			
196	Untuk menambah pengetahuan baru	Dinas Peternakan dan Perikanan			
197	Pengaspalan hotmix	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 150000000 Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 unit Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 unit Anggaran : 150000000
198	Drainase	Dinas Lingkungan Hidup			
199	Pelatihan ternak unggas/itik	Dinas Ketenagakerjaan			
200	Sering meluapnya air sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran 200.000.000,- dan volume 100 meter Koefisien : 100 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 100 meter Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 100 meter Anggaran : 200000000
201	Untuk ANBK tidak Memiliki Perangkat Komputer	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran 160.000.000,- dan volume 20 Unit Koefisien : 20 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 20 Unit Anggaran : 160000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 20 Unit Anggaran : 160000000
202	kurangnya sarana prasarana mebeler	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran 50.000.000,- dan volume 60 set Koefisien : 120 set Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 120 set Anggaran : 500000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 120 set Anggaran : 500000000
203	Masi Minimnya Pengatuhan Alat Tangkap	Dinas Peternakan dan Perikanan			
204	Banyaknya Meja Dan Kursi Rusak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran 90.000.000,- dan 120 set Koefisien : 120 set Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 120 set Anggaran : 900000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 120 set Anggaran : 900000000
205	PENINGKATAN JALAN RUAS ARJASA - KETOWAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 200000000 Koefisien : 200 M Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUUJUI Koefisien : 200 M Anggaran : 200000000	Rekomendasi : DISETUUJUI Koefisien : 200 M Anggaran : 200000000
206	PENGERASAN JALAN TELAGA - MINDHI	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 200000000 Koefisien : 200 M Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUUJUI Koefisien : 200 M Anggaran : 200000000	Rekomendasi : DISETUUJUI Koefisien : 200 M Anggaran : 200000000
207	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN RUAS ARJASA - KETOWAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
208	PENGADAAN RODA TIGA	Dinas Lingkungan Hidup			
209	PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN KEDEWASAAN POLITIK MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 100000000 Koefisien : 2 Kegiatan Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 2 Kegiatan Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 2 Kegiatan Anggaran : 100000000
210	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG IDIOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA,	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 100000000 Koefisien : 2 Kegiatan Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 2 Kegiatan Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 2 Kegiatan Anggaran : 100000000



1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
	PEMBAHARUAN KEBANGSAAN , BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN				
211	BIMBINGAN TEKNIS DAN PELAYANAN ANTAR KERJA	Dinas Ketenagakerjaan			
212	PENGEMBANGAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Dinas Ketenagakerjaan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 100000000 Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 100000000
213	INDUSTRI PRODUK OLAHAN MAKANAN DAN MINUMAN MELALUI PELATIHAN MEMBUAT ROTI DAN KUE	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 150000000 Koefisien : 2 Kegiatan Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 2 Kegiatan Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 2 Kegiatan Anggaran : 150000000
214	PEMBINAAN ORGANISASI PEDAGANG KAKI LIMA MELALUI PENGADAAN GEROBAK DORONG	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
215	INDUSTRI FURNITURE DARI KAYU, PELATIHAN PERTUKANGAN KAYU	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 150000000 Koefisien : 2 Kegiatan Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 2 Kegiatan Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 2 Kegiatan Anggaran : 150000000
216	PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)	Dinas Perhubungan			
217	PENGADAAN MESIN DAN POMPA AIR	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
218	PENINGKATAN JALAN TIMUR CURAH - KARASAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
219	PEMBUATAN SALURAN DRAINASE (PLENGSENGAN)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
220	PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
221	pelatihan pengurangan sampah, daur ulang dan pemanfaatan kembali	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = , Anggaran = 35.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 35000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 35000000
222	untuk menambah wawasan ibu-ibu	Dinas Ketenagakerjaan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 40.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 40000000	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 40000000
223	pavingisasi jalan lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 40.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 40000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 40000000
224	untuk menambah wawasan ibu-ibu	Dinas Ketenagakerjaan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 35.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 35000000	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 35000000

1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
225	untuk menambah wawasan ibu-ibu	Dinas Ketenagakerjaan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 35.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 35000000	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 35000000
226	untuk menambah kreatifitas ibu-ibu	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 35.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir oleh bidang PPKG Koefisien : 1 titik Anggaran : 35000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir oleh bidang PPKG Koefisien : 1 titik Anggaran : 35000000
227	untuk menambah wawasan ibu-ibu	Dinas Peternakan dan Perikanan			
228	untuk menambah wawasan peserta	Dinas Peternakan dan Perikanan			
229	menambah protein dan vitamin	Dinas Peternakan dan Perikanan			
230	untuk menambah protein dan vitamin	Dinas Peternakan dan Perikanan			
231	untuk tumbuh kembang siswa	Dinas Kesehatan			
232	kpndisi jalan rusak	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = , Anggaran = 105.000.000 Koefisien : 245 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 245 meter Anggaran : 105000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 245 meter Anggaran : 105000000
233	pavingisasi jalan lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = , Anggaran = 40.000.000 Koefisien : 175 m Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 175 m Anggaran : 40000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 175 m Anggaran : 40000000
234	pelatihan aneka cemilan berbahan lokal	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 35.000.000 Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 35000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 35000000
235	untuk menambah protein dan vitamin	Dinas Peternakan dan Perikanan			
236	untuk menambah gizi	Dinas Kesehatan			
237	untuk menambah wawasan dalam membatic	Dinas Ketenagakerjaan			
238	pelatihan pembuatan kue	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
239	kurangnya alat pembuang sampah	Dinas Lingkungan Hidup			
240	kurangnya alat pembuang sampah	Dinas Lingkungan Hidup			
241	pembangunan MCK	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 unit, Anggaran = 150.000.000 Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 unit Anggaran : 150000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 unit Anggaran : 150000000
242	kurangnya alat transportasi pengangkut sampah	Dinas Lingkungan Hidup			
243	kurangnya lampu penerangan di permukiman warga	Dinas Perhubungan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 10 unit, Anggaran =	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 9 unit Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 9 unit Anggaran : 150000000

1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
			150.000.000 Koefisien : 10 unit Anggaran : 0		
244	membutuhkan drainase	Dinas Lingkungan Hidup			
245	membutuhkan sumur resapan air hujan	Dinas Lingkungan Hidup			
246	Menghindari dampak banjir dan pencemaran lingkungan untuk Normalisasi dan Pembersihan waled	Dinas Lingkungan Hidup			
247	Menghindari dampak banjir dan pencemaran lingkungan maka dibutuhkan pembuatan sumur resapan	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran 100.000.000,- dan volume pada 1 titik. Koefisien : 1 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 Titik Anggaran : 100000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 Titik Anggaran : 100000000
248	Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian/Perkebunan (Penyebaran Informasi) sebagai Sarana Penyebaran Informasi tentang Penyuburan Lahan serta kelengkapan peralatan penyuluh pertanian.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 100.000.000,- dan volume pada 1 titik Koefisien : 1 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Catatan : Harus Sesuai dengan Ketentuan teknis Koefisien : 1 Titik Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Catatan : Harus Sesuai dengan Ketentuan teknis Koefisien : 1 Titik Anggaran : 100000000
249	Perkerasan Halaman UPTD GELLUNG untuk Memudahkan jalur transportasi yang sering becek/ banjir	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 200.000.000,- dan volume pada 1 titik Koefisien : 1 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 Titik Anggaran : 200000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 Titik Anggaran : 200000000
250	Belanja Pengadaan Perlengkapan Sekolah untuk enuhi kelengkapan Kesiswaan guna melancarkan pelaksanaan proses belajar mengajar kepada siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 200.000.000,- dan volume pada 1 titik Koefisien : 1 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 Titik Anggaran : 200000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 Titik Anggaran : 200000000
251	untuk fasilitas madrasah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
252	pengadaan handtractor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
253	membutuhkan lampu penerangan	Dinas Perhubungan			
254	pelatihan kepemudaan KNPI	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			
255	butuh roda tiga pengangkut sampah.	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 3 unit, Anggaran = 105.000.000 Koefisien : 6 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 2 unit Anggaran : 105000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 2 unit Anggaran : 105000000
256	pembangunan pagar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 170.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 170000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 170000000
257	Pembangunan pagar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran =	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 125000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 125000000



1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
			125.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0		
258	pembangunan MCK Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
259	Untuk menutup permukaan tanah dan daya serapnya yang baik sehingga menghindari munculnya genangan air dipermukaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
260	Untuk menutup permukaan tanah dan daya serapnya yang baik sehingga menghindari munculnya genangan air dipermukaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
261	Roda Tiga yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam hal mengangkut sampah dan lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Usulan kegiatan berubah menjadi pengeboran dan perpipaan air minum di Pesisir. Pagu : 60000000 Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 Unit Anggaran : 60000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 Unit Anggaran : 60000000
262	Agar sekolah terhindar dari kemalingan dan sebagai pembatas lingkungan sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 100000000 Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 Unit Anggaran : 100000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 Unit Anggaran : 100000000
263	Pelatihan pembuatan kue	Dinas Ketenagakerjaan			
264	Agar sekolah terhindar dari kemalingan dan sebagai pembatas lingkungan sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 50000000 Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 unit Anggaran : 50000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 unit Anggaran : 50000000
265	Untuk menutup permukaan tanah dan daya serapnya yang baik sehingga menghindari munculnya genangan air dipermukaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
266	Untuk menutup permukaan tanah dan daya serapnya yang baik sehingga menghindari munculnya genangan air dipermukaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 100000000 Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 unit Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 unit Anggaran : 100000000
267	Untuk menutup permukaan tanah dan daya serapnya yang baik sehingga menghindari munculnya genangan air dipermukaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
268	Untuk menutup permukaan tanah dan daya serapnya yang baik sehingga menghindari munculnya genangan air dipermukaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
269	Rumah yang tidak layak memenuhi persyaratan rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke	Rekomendasi : Disetujui Koefisien	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 6 Unit Anggaran : 90000000

1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
	layak huni dimana konstruksi bangunan tidak handal	Perumahan Permukiman	PD. Pagu : 90000000 Koefisien : 6 Unit Anggaran : 0	: 6 Unit Anggaran : 90000000	
270	Membutuhkan laptop	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
271	Membutuhkan laptop	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
272	untuk menambah wawasan peserta dalam pembuatan kue	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 100.000.000 Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 100000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 100000000
273	untuk menambah wawasan peserta dalam kreatifitas memasak	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
274	untuk menambah pengetahuan dalam ilmu pertukangan	Dinas Ketenagakerjaan			
275	Kurangnya alat transportasi pengangkut sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 4 Unit, Pagu Anggaran = 150.000.000 Koefisien : 3 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk direkomendasi Koefisien : 3 unit Anggaran : 150000000	Rekomendasi : disetujui untuk direkomendasi Koefisien : 3 unit Anggaran : 150000000
276	kurangnya lampu penerangan	Dinas Perhubungan			
277	karena jalan rusak parah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
278	pengadaan tempat sampah	Dinas Lingkungan Hidup			
279	untuk memperluas wawasan olah raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			
280	memerlukan tembok penahan tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
281	untuk menambah wawasan dalam berpolitik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 100.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000
282	pelatihan pangkas rambut	Dinas Ketenagakerjaan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 100.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000
283	karena kondisi rumah tidak layak di tempati	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
284	karena kondisi rumah tidak layak di tempati	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
285	pengeboran air bersih	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 100.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000
286	pengeboran air bersih	Dinas Lingkungan Hidup			



1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
287	membutuhkan roda 3 persampahan	Dinas Lingkungan Hidup			
288	pelatihan meubeler	Dinas Ketenagakerjaan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 100.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000
289	pelatihan pembuatan kue	Dinas Ketenagakerjaan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 100.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000
290	Halaman dan Lapangan SMP Negeri 1 Mangaran kurang representatif	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
291	perbaikan atap kelas yang rusak parah di SMP Al Musyawir yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dalam kegiatan belajar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
292	Tidak adanya aliran pembuangan air hujan maka akan dibangun drainase yang berlokasi di depan masjid desa jetis	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran 100.000.000,- dan volume 1 titik Koefisien : 1 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 1 Titik Anggaran : 100000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 1 Titik Anggaran : 100000000
293	pekerjaan pemasangan bronjong untuk mitigasi bencana perubahan iklim	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran 200.000.000,- dan volume 1 titik Koefisien : 1 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 Titik Anggaran : 200000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 Titik Anggaran : 200000000
294	Pembangunan drainase sanitasi kesehatan masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran 100.000.000,- dan volume 1 titik Koefisien : 1 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 Titik Anggaran : 100000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 Titik Anggaran : 100000000
295	Karena tidak tersedianya fasilitas IPAL/MCK domestik di desa jetis	Dinas Lingkungan Hidup			
296	Stabilitas Harga (pasar murah)	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 150.000.000,- pada 1 titik lokasi Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 150000000
297	stabilitas harga (harga murah)	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 150.000.000,- pada 1 titik lokasi Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 150000000
298	Alat alat pertanian (Alsintan)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
299	gerakan makan telur dan minum susu	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 50.000.000,- pada 1 titik lokasi Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Catatan : Harus Sesuai dengan Ketentuan Teknis Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Rekomendasi : Catatan : Harus Sesuai dengan Ketentuan Teknis Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000
300	Gerakan makan telur dan minum susu	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 50.000.000,- pada 1 titik lokasi Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Catatan : Harus Sesuai dengan Ketentuan Teknis Koefisien : 1 titik	Rekomendasi : Catatan : Harus Sesuai dengan Ketentuan Teknis Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000



1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
				Anggaran : 50000000	
301	pagar sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
302	Alat alat pertanian (Alsintan)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
303	pasar murah	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
304	Pasar murah	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
305	Penerangan jalan umum	Dinas Perhubungan			
306	RTLH	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
307	Pengadaan roda 3	Dinas Lingkungan Hidup			
308	jalan usaha tani	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
309	Pelatihan kelautan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 75.000.000,- pada 1 titik lokasi Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 75000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 75000000
310	Pelatihan pertukangan	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
311	PJU (penerangan lampu jalan)	Dinas Perhubungan	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 130.000.000,- pada 10 titik lokasi Koefisien : 22 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 8 titik Anggaran : 130000000	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 8 titik Anggaran : 130000000
312	Sosialisasi nilai nilai pancasila	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 100.000.000,- pada 1 titik lokasi Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000
313	Paving Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 95.000.000,- pada 1 titik lokasi Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 95000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 95000000
314	pelatihan memasak	Dinas Ketenagakerjaan			
315	Paving jalan lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
316	rehab jalan lingkungan (aspal)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 100.000.000,- pada 1 titik lokasi Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000
317	PJU	Dinas Perhubungan	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 26.000.000,- pada 2 titik lokasi Koefisien : 2 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 2 titik Anggaran : 26000000	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 2 titik Anggaran : 26000000
318	paving jalan lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
319	Pelatihan bengkel sepeda motor	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
320	Pelatihan pengolahan hasil laut	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 50.000.000,- pada 1 titik lokasi Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000



1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
321	pju	Dinas Perhubungan	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 26.000.000,- pada 2 titik lokasi Koefisien : 2 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 2 titik Anggaran : 26000000	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 2 titik Anggaran : 26000000
322	PJU	Dinas Perhubungan			
323	PJU	Dinas Perhubungan			
324	RTLH	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
325	Kantin smpn 3 situbondo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
326	Pelatihan Las	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
327	penyusunan induk disabilitas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 150.000.000,- pada 1 kegiatan Koefisien : 1 Dokumen Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui.. Koefisien : 1 Dokumen Anggaran : 150000000	Rekomendasi : disetujui.. Koefisien : 1 Dokumen Anggaran : 150000000
328	sosialisasi nilai nilai kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 48.000.000,- pada 1 titik lokasi Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 48000000	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 48000000
329	Rehabilitasi Ruang Kelas di SMP 1 Asembagus untuk Meningkatkan sarana pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
330	Promosi Program Bangga Kencana Sebagai media informasi tentang tujuan diciptakannya Keluarga Sejahtera	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 100.000.000,- dan volume pada 1 titik Koefisien : 1 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir oleh bidang Dalduk Koefisien : 1 Titik Anggaran : 100000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir oleh bidang Dalduk Koefisien : 1 Titik Anggaran : 100000000
331	Normalisasi dan Pembersihan waled Menghindari dampak banjir dan pencemaran lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup			
332	Penyebaran Informasi melalui promosi Menu dan Gizi Seimbang sebagai Sarana Informasi akan berbagai ragam menu yang sehat dan aman untuk dikonsumsi masyarakat disertai dengan informasi kalender tahunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 100.000.000,- dan volume pada 1 titik Koefisien : 1 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Catatan : Harus sesuai dengan Ketentuan Teknis Koefisien : 1 Titik Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Catatan : Harus sesuai dengan Ketentuan Teknis Koefisien : 1 Titik Anggaran : 100000000
333	Pembangunan Fasilitas Parkir SMP1 Asembagus ASEMBAGUS untuk Meningkatkan sarana pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 100.000.000,- dan volume pada 1 titik Koefisien : 1 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 Titik Anggaran : 100000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 Titik Anggaran : 100000000
334	Rehab lapangan olahraga di SMP 1 Asembagus untuk menunjang pembelajaran olahraga di sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : telah diverifikasi dengan anggaran sebesar 200.000.000,- dan volume pada 1 titik Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 200000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 200000000
335	Drainase	Dinas Lingkungan Hidup			
336	Memberikan keterampilan bagi masyarakat yang sertifikatnya dapat	Dinas Ketenagakerjaan			

1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
	digunakan untuk membuka usaha atau mencari lowongan pekerjaan				
337	Pelatihan kerajinan kerang	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 70000000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 70000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 70000000
338	Untuk menutup permukaan tanah dan daya serapnya yang baik sehingga menghindari munculnya genangan air dipermukaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 100000000 Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 Unit Anggaran : 100000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 Unit Anggaran : 100000000
339	Membutuhkan roda 3	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 105000000 Koefisien : 3 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 2 unit Anggaran : 105000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 2 unit Anggaran : 105000000
340	Pembangunan Plengsengan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
341	PEMBANGUNAN/ REHABILITASI DRAINASE PENGAIRAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 150000000 Koefisien : 1 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 Titik Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 Titik Anggaran : 150000000
342	PEMBANGUNAN BRONJONG/ TANGKIS SUNGAI	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 150000000 Koefisien : 1 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 Titik Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 Titik Anggaran : 150000000
343	PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 100000000 Koefisien : 1 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Catatan : Harus sesuai dengan Ketentuan Teknis Koefisien : 1 Titik Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Catatan : Harus sesuai dengan Ketentuan Teknis Koefisien : 1 Titik Anggaran : 100000000
344	PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 100000000 Koefisien : 1 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Catatan : Harus sesuai dengan Ketentuan Teknis Koefisien : 1 Titik Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Catatan : Harus sesuai dengan Ketentuan Teknis Koefisien : 1 Titik Anggaran : 100000000
345	REHAB SDN 2 SUBOH KEC. SUBOH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui dan diteruskan ke PD. Pagu : 100000000 Koefisien : 1 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 Titik Anggaran : 100000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 Titik Anggaran : 100000000
346	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG IDIOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELANEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAHARUAN KEBANGSAAN , BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui di teruskan ke PD. Pagu : 100000000 Koefisien : 1 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 Titik Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 Titik Anggaran : 100000000
347	Rumah yang tidak layak memenuhi persyaratan rumah layak huni dimana	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. usulan kegiatan menjadi	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 6 Unit Anggaran : 10000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 6 Unit Anggaran : 10000000



1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
	konstruksi bangunan tidak handal		jamban di asembagus. Pagu : 10000000 Koefisien : 6 Unit Anggaran : 0		
348	Rumah yang tidak layak memenuhi persyaratan rumah layak huni dimana konstruksi bangunan tidak handal	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 390000000 Koefisien : 20 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 20 Unit Anggaran : 390000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 20 Unit Anggaran : 390000000
349	Program pemberdayaan Ormas/LSM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
350	Pelatihan pengemasan kado untuk souvenir	Dinas Ketenagakerjaan			
351	Pelatihan politik untuk perempuan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
352	Pelatihan pengelolaan hasil pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
353	Agar sekolah terhindar dari kemalingan dan sebagai pembatas lingkungan sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
354	Kerap terjadi banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
355	Selalu terjadi banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
356	Selalu terjadi banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
357	Membutuhkan roda tiga	Dinas Lingkungan Hidup			
358	Membutuhkan roda tiga	Dinas Lingkungan Hidup			
359	untuk memperbaiki tempat ibadah agar menjadi nyaman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD pagu: 50000000 Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 unit Anggaran : 50000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 unit Anggaran : 50000000
360	Pengadaan HANDSPRAYER Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
361	minimnya penerangan jalan umum kecamatan panji & situbondo	Dinas Perhubungan			
362	Penanggulan pencmaran & pengendalian Banjir	Dinas Lingkungan Hidup			
363	untuk mempermudah pembuangan sampah dilingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD pagu: 50000000 Koefisien : 3 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 unit Anggaran : 50000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 unit Anggaran : 50000000
364	untuk meningkatkan kualitas hasil panen jagung di desa Sliwung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
365	agar tidak becek saat musim hujan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD pagu: 50000000 lokasi berubah ke Mts Darul Naja Sliwung (hasil forum PD) Koefisien : 200 M2 Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 200 M2 Anggaran : 50000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 200 M2 Anggaran : 50000000

1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
366	untuk mengatasi terjadinya kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD pagu : 50000000 Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 unit Anggaran : 50000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 unit Anggaran : 50000000
367	membantu stabilisasi harga sembako di masyarakat	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
368	meningkat keterampilan masyarakat dalam membuat KUE	Dinas Ketenagakerjaan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD pagu: 50000000 Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000
369	memperbaiki rumah yang tak layak huni agar menjadi layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD pag: 100000000 Koefisien : 10 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 10 unit Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 10 unit Anggaran : 100000000
370	untuk menambah fasilitas IT di sekolah SDN 2 Dawuhan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD pagu: 50000000 Koefisien : 10 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 10 unit Anggaran : 50000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 10 unit Anggaran : 50000000
371	untuk meningkatkan kualitas hasil panen masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
372	butuh roda 3 pengangkut sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 3 unit, Anggaran = 105.000.000 Koefisien : 3 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 2 unit Anggaran : 105000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 2 unit Anggaran : 105000000
373	roda tiga pengangkut sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 3 unit, Anggaran = 105.000.000 Koefisien : 3 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 2 unit Anggaran : 105000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 2 unit Anggaran : 105000000
374	roda 3 pengangkut sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 3 unit, Anggaran = 105.000.000 Koefisien : 3 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 2 unit Anggaran : 105000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 2 unit Anggaran : 105000000
375	roda tiga pengangkut sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 unit, Anggaran = 35.000.000 Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 unit Anggaran : 35000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 unit Anggaran : 35000000
376	untuk mempermudah akses jalan lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
377	untuk melengkapi kebutuhan masyarakat	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
378	untuk melengkapi kebutuhan masyarakat	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
379	untuk menambah wawasan dalam membuat pakan ternak	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 50.000.000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000



1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
			Koefisien : 1 titik Anggaran : 0		
380	mengadakan pelatihan untuk ibu-ibu PKK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
381	RTLH (RUMAH TIDAK LAYAK HUNI)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
382	MCK	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
383	PENGADAAN RODA TIGA	Dinas Lingkungan Hidup			
384	PENGADAAN RODA TIGA	Dinas Lingkungan Hidup			
385	JALAN USAHA TANI	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 340000000 Koefisien : 1 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Catatan : Harus sesuai dengan ketentuan teknis (Nilai 200 jt lebih pelaksana melalui lelang Koefisien : 1 Titik Anggaran : 340000000	Rekomendasi : Catatan : Harus sesuai dengan ketentuan teknis (Nilai 200 jt lebih pelaksana melalui lelang Koefisien : 1 Titik Anggaran : 340000000
386	JALAN USAHA TANI	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
387	PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)	Dinas Perhubungan			
388	PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)	Dinas Perhubungan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 60000000 Koefisien : 6 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 4 Unit Anggaran : 60000000	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 4 Unit Anggaran : 60000000
389	karena kondisi jalan rusak parah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
390	butuh lampu penerangan	Dinas Perhubungan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 4 Unit, Pagu Anggaran = 40.000.000 Koefisien : 5 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 2 unit Anggaran : 40000000	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 2 unit Anggaran : 40000000
391	butuh lampu penerangan	Dinas Perhubungan			
392	pelatihan pengolahan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Pagu Anggaran = 40.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 40000000	Rekomendasi : disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 40000000
393	menambah wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 50.000.000 Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000
394	pelatihan hantaran	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
395	untuk kebutuhan ibu2 rumah tangga	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 titik, Anggaran = 50.000.000 Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000



1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
396	pembangunan lapangan basket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 1 unit, Anggaran = 120.000.000 Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 unit Anggaran : 120000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 1 unit Anggaran : 120000000
397	pelatihan UMKM	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
398	pelatihan kemasan produk	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
399	MEMBUTUHKAN SALURAN DRAINASE	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Jika usulan berupa hibah agar dipersiapkan dokumen pendukungnya, Volume = 150 m, Pagu Anggaran = 100.000.000 Koefisien : 150 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 150 meter Anggaran : 100000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 150 meter Anggaran : 100000000
400	untuk menghindari pencemaran lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
401	agar halaman sekolah PAUD tidak becek saat musim Hujan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD pagu: 70000000 Koefisien : 300 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 300 meter Anggaran : 70000000	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 300 meter Anggaran : 70000000
402	untuk pengadaan sarana air bersih	Dinas Lingkungan Hidup			
403	Minimnya penerangan jalan umu dikecamatan mlandingan	Dinas Perhubungan	Rekomendasi : 0 Koefisien : 20 titik Anggaran : 0		
404	memperbaiki rumah tidak layak huni agar menjadi layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD pagu : 210000000 Koefisien : 17 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 17 unit Anggaran : 210000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 17 unit Anggaran : 210000000
405	untuk menambah Jaringan pipanisasi di desa sumberanyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
406	untuk mengangkut sampah agar lingkungan bersih	Dinas Lingkungan Hidup			
407	menambah fasilitas IT di Sekolah SDN 2 Dawuhan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
408	Minimnya penerangan di jalan Kec. Bungatan dan Kec. Mlandingan	Dinas Perhubungan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD pagu: 120000000 Koefisien : 20 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 8 titik Anggaran : 120000000	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 8 titik Anggaran : 120000000
409	untuk memprmudah akses jalan masyarakat di Desa Campoan Kec. Mlandingan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman			
410	Minimnya Penerangan Jalan Umum Di Kecamatan Bungatan	Dinas Perhubungan			
411	Untuk menambah pengetahuan baru	Dinas Ketenagakerjaan			
412	Untuk menambah pengetahuan baru	Dinas Peternakan dan Perikanan			
413	Untuk menambah pengetahuan dan skil memasak yang baru	Dinas Ketenagakerjaan			



1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
414	Untuk menambah pengetahuan yang baru	Dinas Peternakan dan Perikanan			
415	Pelatihan Meubelair	Dinas Ketenagakerjaan			
416	Membutuhkan roda tiga	Dinas Lingkungan Hidup			
417	Membutuhkan roda tiga	Dinas Lingkungan Hidup			
418	Membutukan roda tiga	Dinas Lingkungan Hidup			
419	PJU	Dinas Perhubungan			
420	PJU	Dinas Perhubungan			
421	minimnya penerangan jalan raya desa pesanggrahan dan agel	Dinas Perhubungan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD pagu: 40000000 Koefisien : 5 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 2 titik Anggaran : 40000000	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 2 titik Anggaran : 40000000
422	minimnya penerangan jalan raya Desa ketowan	Dinas Perhubungan	Rekomendasi : Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD pagu: 16000000 Koefisien : 2 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 16000000	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 1 titik Anggaran : 16000000
423	Minimnya Penerangan Jalan raya Desa Kandang	Dinas Perhubungan	Rekomendasi : Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD pagu: 30000000 Koefisien : 4 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 2 titik Anggaran : 30000000	Rekomendasi : Bisa diakomodir Koefisien : 2 titik Anggaran : 30000000
424	untuk mengembangkan keterampilan siswa PAUD TP Diponegoro	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
425	Untuk mengembangkan Keterampilan Siswa PAUD KB Cempaka	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
426	untuk memudahkan akses jalan Dusun Konir Desa jatibasari	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD pagu: 200000000 Koefisien : 200 meter Anggaran : 0	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 200 meter Anggaran : 200000000	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 200 meter Anggaran : 200000000
427	untuk meningkatkan hasil produksi kopi di Desa Kayumas	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
428	pengadaan Roda Tiga ke kelompok Tani Tirto	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
429	bantuan bibit jagung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
430	Pembangunan saluran irigasi pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui untuk diteruskan ke PD pagu: 114000000 Koefisien : 500 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Catatan : Harus sesuai dengan Ketentuan Teknis Koefisien : 1 Unit Anggaran : 114000000	Rekomendasi : Catatan : Harus sesuai dengan Ketentuan Teknis Koefisien : 1 Unit Anggaran : 114000000
431	untuk meningkatkan hasil panen petani di desa Arjasa	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
432	Pengadaan Alat marching band lengkap PAUD KB Tunas Bangsa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
433	RTLH (RUMAH TIDAK LAYAK HUNI)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu: 150000000 Koefisien : 10 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 10 Unit Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 10 Unit Anggaran : 150000000
434	PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun	Rekomendasi : Disetujui untuk	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir

1	URAIAN POKOK- POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TANGGAPAN		
			Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
2	3	4	5	6	
	KEDEWASAAN POLITIK MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA		2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 100000000 Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 0	diakomodir Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 100000000	Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 100000000
435	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG IDIOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAHARUAN KEBANGSAAN , BHENIKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rekomendasi : Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023, Disetujui diteruskan ke PD. Pagu : 100000000 Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 0	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Disetujui untuk diakomodir Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 100000000
436	EXPLORASI & PENUYUSUNAN BUKU PANDUAN EKOWISATA BALURANESIA - Satwa liar langka unik endemik - pesona keindahan landskap - Pesona bawah laut - Daftar homestay di Desa penyangga Wonorejo & Sumberwaru - Jasa Wisata ojek perahu, kuliner	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			
437	PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH (SUMUR BOR)	Dinas Lingkungan Hidup			
438	PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH (SUMUR BOR)	Dinas Lingkungan Hidup			
439	PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH (SUMUR BOR)	Dinas Lingkungan Hidup			
440	PEMBERHENTIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (IPAL DAN MCK)	Dinas Lingkungan Hidup			

**Tabel 5.1 Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan Pembangunan
Di Kabupaten Situbondo Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6					7		8	9	10	11	12	13	14
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			505,848,267,426				528,822,300,000	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	83.5 A	473,810,532,120			83.5 A	479,672,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	158,000,000			12 Dokumen	1,615,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	95,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	850,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	12,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	25,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	35,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	12,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	30,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	20,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	650,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan P3K dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3751 ASN	448,770,932,120			3751 ASN	450,725,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5620 Orang/bulan	448,229,600,120	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5620 Orang/bulan	450,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	458,700,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	480,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	43,374,500	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	24,757,500	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	55,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	14,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	40,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35 Buah	40,500,000			35 Buah	75,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	40,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	75,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Kegiatan	672,000,000			4 Kegiatan	1,187,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	175,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	255,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	7,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	532,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	750,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran	100%	23,720,100,000			100%	25,020,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,350,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22,355,100,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	23,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	171 Barang	449,000,000			171 Barang	1,050,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	299,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	171 Unit	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	171 Unit	120,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	20,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	30,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Unit	330,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	31,308,349,506			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	45,699,800,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga SD yang dibina untuk peningkatan mutu pendidik	13 Lembaga	3,632,587,295			13 Lembaga	12,390,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Lembaga SD yang mendapatkan bantuan infrastruktur	13 Lembaga				13 Lembaga		
1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	120,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Ruang	1,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	995,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	530,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Ruang	3,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	220,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	1,600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	320,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	650,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	150 Siswa	113,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150 Siswa	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	210,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	220,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	440 Satuan Pendidikan	223,604,400	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	440 Satuan Pendidikan	1,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	440 Satuan Pendidikan	33,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	440 Satuan Pendidikan	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	85,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Peserta Didik	700,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5 Orang	47,606,895	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Orang	700,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	175,376,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Orang	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	440 Satuan Pendidikan	249,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	440 Satuan Pendidikan	670,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	20 Orang	160,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Orang	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga SMP yang dibina untuk peningkatan mutu pendidik	13 Lembaga	7,057,636,725			13 Lembaga	3,465,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Lembaga SMP yang mendapatkan bantuan infrastruktur	13 Lembaga				13 Lembaga		
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	885,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	200,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15000 Peserta Didik	5,384,050,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15000 Peserta Didik	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	45,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	2000 Peserta Didik	80,814,110	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2000 Peserta Didik	1,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	90 Satuan Pendidikan	74,229,100	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	90 Satuan Pendidikan	600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	160,736,955	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Peserta Didik	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5 Orang	78,277,460	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Orang	380,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	90 Satuan Pendidikan	49,529,100	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	90 Satuan Pendidikan	525,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga PAUD yang dibina untuk peningkatan mutu pendidik	16 Lembaga	15,057,750,100			16 Lembaga	17,194,800,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan bantuan infrastruktur	16 Lembaga				16 Lembaga		
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	555,370,400	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	1,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	110,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Lembaga yang dibiayai Proses Belajar	3 Peserta Didik	19,310,700	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Peserta Didik	120,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Akreditasi Lembaga PAUD dan Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Dapodik PAUD	795 Lembaga	210,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	795 Lembaga	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	680 Satuan Pendidikan	14,074,800,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	680 Satuan Pendidikan	15,074,800,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	15 Orang	88,269,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Orang	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga DIKMAS yang dibina untuk peningkatan mutu pendidik	9 Lembaga	5,560,375,386			9 Lembaga	12,650,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Lembaga DIKMAS yang mendapatkan bantuan infrastruktur	9 Lembaga				9 Lembaga		
1	1	2	2.04	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	150,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	251 Peserta Didik	3,416,850,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	251 Peserta Didik	5,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	300 Peserta Didik	1,943,269,386	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300 Peserta Didik	7,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	15 Satuan Pendidikan	50,256,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Satuan Pendidikan	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Murid Terhadap Guru SD/MI	9.65 %	729,385,800			9.65 %	3,450,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Rasio Murid Terhadap Guru SMP/MTS	11.05 %				11.05 %		
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	10642 PTK	729,385,800			10642 PTK	3,450,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12 Dokumen	50,760,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	2,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12 Laporan	678,625,800	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1,250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1,041,826,929				5,950,000,000	
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase kebudayaan yang dikembangkan	100 %	405,900,819			100 %	4,550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	22	2	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku seni lokal yang terbina	150 Orang	405,900,819			150 Orang	4,550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	206,107,150	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Objek	3,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	25 Sertifikat	199,793,669	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Sertifikat	1,050,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	100 %	585,926,110			100 %	750,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	3	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sanggar kesenian masyarakat yang dibina	15 Sanggar	585,926,110			15 Sanggar	750,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	25 Orang	585,926,110	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Orang	750,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Penetapan Cagar Budaya peringkat Kabupaten /Kota	29 Cagar Budaya	50,000,000			29 Cagar Budaya	650,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	5	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Lembaga	50,000,000			1 Kegiatan	650,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	5	2.02	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 Objek	50,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Objek	650,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			17,500,000				55,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	17,500,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	55,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	17,500,000			1 Lembaga	55,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	17,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	55,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			13,036,000				55,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	13,036,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	55,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	13,036,000			1 Lembaga	55,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	13,036,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	55,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			26,778,400				97,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	26,778,400			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	97,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	26,778,400			1 Lembaga	97,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	26,778,400	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	97,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			10,000,000				95,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	10,000,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	95,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	10,000,000			1 Lembaga	95,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	95,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			26,400,000				80,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	26,400,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	80,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	26,400,000			1 Lembaga	80,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	26,400,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	80,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			17,272,000				65,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	17,272,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	65,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	17,272,000			1 Lembaga	65,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	17,272,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	65,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			47,839,000				130,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	47,839,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	130,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	47,839,000			1 Lembaga	130,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	47,839,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	130,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			49,300,000				96,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	49,300,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	96,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	49,300,000			1 Lembaga	96,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	49,300,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	96,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			62,800,000				87,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	62,800,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	87,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	62,800,000			1 Lembaga	87,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	62,800,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	87,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			18,430,000				40,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	18,430,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	40,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	18,430,000			1 Lembaga	40,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	18,430,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	40,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			16,036,000				36,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	16,036,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	36,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	16,036,000			1 Lembaga	36,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	16,036,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	36,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40,000,000				120,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	40,000,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	120,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	40,000,000			1 Lembaga	120,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	40,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	120,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			29,465,200				72,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	29,465,200			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	72,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	29,465,200			1 Lembaga	72,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	29,465,200	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	72,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			14,086,560				38,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	14,086,560			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	38,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	14,086,560			1 Lembaga	38,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	14,086,560	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	38,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			12,436,000				38,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	12,436,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	38,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	12,436,000			1 Lembaga	38,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	12,436,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	38,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			35,020,000				85,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	35,020,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	85,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	35,020,000			1 Lembaga	85,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	35,020,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	85,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			20,716,600				79,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	20,716,600			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	79,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	20,716,600			1 Lembaga	79,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	20,716,600	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	79,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40,600,000				82,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	40,600,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	82,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	40,600,000			1 Lembaga	82,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	40,600,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	82,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			15,712,300				56,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	15,712,300			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	56,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	15,712,300			1 Lembaga	56,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	15,712,300	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	56,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			30,760,000				90,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	30,760,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	90,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	30,760,000			1 Lembaga	90,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	30,760,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	90,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			15,532,743				60,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	15,532,743			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	15,532,743			1 Lembaga	60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	15,532,743	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			35,200,000				95,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	35,200,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	95,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	35,200,000			1 Lembaga	95,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	35,200,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	95,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			30,040,000				97,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	30,040,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	97,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	30,040,000			1 Lembaga	97,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	30,040,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	97,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			82,500,000				90,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	82,500,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	90,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	82,500,000			1 Lembaga	90,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	82,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	90,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			45,520,000				98,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	45,520,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	98,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	45,520,000			1 Lembaga	98,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	45,520,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	98,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			14,500,000				58,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	14,500,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	58,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	14,500,000			1 Lembaga	58,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	14,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	58,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			54,200,000				103,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	54,200,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	103,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	54,200,000			1 Lembaga	103,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	54,200,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	103,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			88,588,000				123,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	88,588,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	123,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	88,588,000			1 Lembaga	123,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	88,588,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	123,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			230,600,000				300,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	230,600,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	230,600,000			1 Lembaga	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	230,600,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			62,236,000				101,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	62,236,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	101,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	62,236,000			1 Lembaga	101,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	62,236,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	101,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			47,500,000				94,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	47,500,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	94,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	47,500,000			1 Lembaga	94,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	47,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	94,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			91,242,000				130,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	91,242,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	130,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	91,242,000			1 Lembaga	130,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	91,242,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	130,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			29,100,000				88,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	29,100,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	88,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	29,100,000			1 Lembaga	88,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	29,100,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	88,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			24,792,400				78,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	24,792,400			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	78,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	24,792,400			1 Lembaga	78,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	24,792,400	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	78,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			26,242,000				70,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	26,242,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	70,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	26,242,000			1 Lembaga	70,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	26,242,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	70,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			110,300,000				186,220,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	110,300,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	186,220,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	110,300,000			1 Lembaga	186,220,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	110,300,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	186,220,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			30,700,000				95,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	30,700,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	95,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	30,700,000			1 Lembaga	95,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	30,700,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	95,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			25,101,200				78,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	25,101,200			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	78,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	25,101,200			1 Lembaga	78,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	25,101,200	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	78,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			34,160,000				80,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	34,160,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	80,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	34,160,000			1 Lembaga	80,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	34,160,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	80,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			46,000,000				98,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	46,000,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	98,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	46,000,000			1 Lembaga	98,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	46,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	98,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			13,000,000				60,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	13,000,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	13,000,000			1 Lembaga	60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	13,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			19,500,000				80,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	19,500,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	80,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	19,500,000			1 Lembaga	80,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	19,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	80,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			15,436,000				55,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	15,436,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	55,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	15,436,000			1 Lembaga	55,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	15,436,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	55,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			13,726,000				48,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	13,726,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	48,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	13,726,000			1 Lembaga	48,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	13,726,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	48,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			38,764,000				77,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	38,764,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	77,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	38,764,000			1 Lembaga	77,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	38,764,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	77,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			21,352,900				64,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	21,352,900			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	64,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	21,352,900			1 Lembaga	64,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	21,352,900	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	64,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40,600,000				105,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	40,600,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	105,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	40,600,000			1 Lembaga	105,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	40,600,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	105,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			30,121,400				77,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	30,121,400			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	77,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	30,121,400			1 Lembaga	77,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	30,121,400	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	77,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			37,000,000				98,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	37,000,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	98,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	37,000,000			1 Lembaga	98,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	37,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	98,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			77,940,000				136,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	77,940,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	136,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	77,940,000			1 Lembaga	136,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	77,940,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	136,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			15,210,000				68,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	15,210,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	68,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	15,210,000			1 Lembaga	68,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	15,210,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	68,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			29,500,000				80,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	29,500,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	80,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	29,500,000			1 Lembaga	80,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	29,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	80,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			69,839,500				112,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	69,839,500			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	112,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	69,839,500			1 Lembaga	112,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	69,839,500	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	112,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			37,633,600				85,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	37,633,600			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	85,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	37,633,600			1 Lembaga	85,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	37,633,600	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	85,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			36,706,000				82,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	36,706,000			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	82,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	36,706,000			1 Lembaga	82,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	36,706,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	82,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			124,587,735				175,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI ANGKA MENGULANG SMP/MTS ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS APK PAUD 4-6 Th APM SD/MI APM SMP/MTS JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th	0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	124,587,735			0.33 % 0.20 % 0.01 % 0.23 % 111.91 % 91.58 % 80.84 % 120 Masyarakat 95.89 %	175,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional	1 Lembaga	124,587,735			1 Lembaga	175,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	150 Peserta Didik	124,587,735	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150 Peserta Didik	175,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			127,973,301,813				124,737,281,280	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks nilai RB Dinas Kesehatan	93 %	64,723,808,556			93 %	64,988,336,000	Dinas Kesehatan
						Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai	93 %				93 %		
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra SKPD	1 dokumen	174,128,842			1 dokumen	235,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	125,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	3 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	5,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	4,700,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	5,800,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	8,021,212	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	25,107,630	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 dokumen	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	921 Orang/ Bulan	62,542,406,704			921 Orang/ Bulan	62,780,100,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	921 orang/bulan	61,899,113,774	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	921 orang/bulan	62,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	553,300,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	680,100,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	89,992,930	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 laporan	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di OPD	20 Komponen Listrik	604,223,410			20 Komponen Listrik	573,236,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	12,498,200	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 paket	20,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	5 paket	19,190,200	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 paket	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	47,015,710	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 paket	55,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	5,841,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 paket	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,736,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	5,736,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 paket	5,393,300	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	7,500,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	508,549,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 laporan	450,000,000	Dinas Kesehatan
										Pajak Rokok			
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran	12 bulan	1,278,110,600			100%	1,265,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	600,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	550,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12,749,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	665,361,600	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	700,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah terbayarnya STNK untuk roda 4 dan roda 2	30 unit	124,939,000			30 unit	135,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	124,939,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19 unit	135,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan	84 %	59,360,005,322			84 %	55,717,586,500	Dinas Kesehatan
						Prosentase Tersedianya sarana dan Prasarana sesuai standart	80 %				80 %		
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	5 sarana	23,656,624,345			5 sarana	19,050,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	650,000,000	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Sumberargo	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1 Unit	650,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	480,000,000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	400,000,000	Dinas Kesehatan
									Kab. Situbondo, Panji, Curah Jeru	Pajak Rokok			
1	2	2	2.01	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	600,000,000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	200,000,000	Dinas Kesehatan
									Kab. Situbondo, Mangaran, Tanjung Kamal	Pajak Rokok			
									Kab. Situbondo, Arjasa, Curah Tatal				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	2,050,000,000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
									Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			
									Kab. Situbondo, Panji, Curah Jeru				
1	2	2	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Unit	1,500,000,000	Kab. Situbondo, Besuki, Sumberejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
									Kab. Situbondo, Suboh, Cemara	Pajak Rokok			
									Kab. Situbondo, Panarukan, Sumberkolak	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			
									Kab. Situbondo, Situbondo, Olean				
									Kab. Situbondo, Sumbermalang, Taman				
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	5,459,512,368	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5 Unit	50,000,000	Dinas Kesehatan
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	428 Unit	200,231,650	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	428 Unit	250,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	4,897,393,527	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	1 Paket	6,100,000,000	Dinas Kesehatan
										DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	7,819,486,800	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1 Paket	7,900,000,000	Dinas Kesehatan
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dengan cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %	10 Puskesmas	35,180,856,070			10 Puskesmas	35,638,173,350	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	243,680,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	500 Orang	243,680,000	Dinas Kesehatan
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	450,415,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	500 Orang	450,415,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan			
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	35,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	500 Orang	35,000,000	Dinas Kesehatan
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang	131,320,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	60 Orang	131,320,000	Dinas Kesehatan
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	950 Orang	146,400,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	950 Orang	146,400,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450895 Orang	80,738,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	450895 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang	200,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	1200 Orang	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	147164 penderita HT	22,022,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	147164 penderita HT	22,022,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17386 Orang	31,621,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	17386 Orang	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1310 Orang	54,935,400	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	1310 Orang	54,935,400	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	425 Orang	205,060,300	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	425 Orang	210,000,000	Dinas Kesehatan
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	182,940,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok	200 Orang	182,940,800	Dinas Kesehatan
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	164,451,200	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	165,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	2 Dokumen	525,000,000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	Pajak Rokok	2 Dokumen	1,001,399,380	Dinas Kesehatan
									Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			
									Kab. Situbondo, Kendit, Kendit				
									Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan				
									Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1,280,525,870	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	1 Dokumen	1,280,525,870	Dinas Kesehatan
										DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	308,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	2 Dokumen	350,000,000	Dinas Kesehatan
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	3,696,405,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	2 Dokumen	3,691,155,000	Dinas Kesehatan
										DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
1	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	75,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	278,372,800	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	2 Dokumen	278,372,800	Dinas Kesehatan
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	3 Dokumen	328,049,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	3 Dokumen	328,049,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6 Dokumen	614,089,200	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	6 Dokumen	829,871,600	Dinas Kesehatan
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	24,187,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	24,187,000,000	Dinas Kesehatan
										Pajak Rokok			
1	2	2	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	100 Orang	34,744,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	100 Orang	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	24 Dokumen	233,436,500	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	24 Dokumen	233,436,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	20 Unit	1,130,800,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	20 Unit	830,800,000	Dinas Kesehatan
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	240,850,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	1 Laporan	240,850,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah kasus gawat darurat yang ditangani PSC119	30 kasus	200,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	30 kasus	200,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah kegiatan PSC 119 saat hari raya	2 kali				2 kali		
						Jumlah petugas pendamping program kesehatan PSC119 yang dibayar	7 petugas				7 petugas		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3 RSUD				3 RSUD		
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Puskesmas yang telah menyusun & melaporkan data profil dan SPM kesehatan sesuai standart	15 Puskesmas	287,524,907			15 Puskesmas	295,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Dokumen	70,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	3 Dokumen	70,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	142,524,907	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	20 Unit	75,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	20 Unit	75,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus rujukan yang dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan yang sesuai dengan standart	30725 kasus	235,000,000			30725 kasus	734,413,150	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	30 Unit	35,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	30 Unit	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.04	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	23 Unit	50,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	23 Unit	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	20 Unit	150,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	20 Unit	634,413,150	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	100 %	3,184,697,800			100 %	3,545,358,780	Dinas Kesehatan
						Prosentase Rumah Sakit dengan ketersediaan tenaga dokter spesialis sesuai standar	100 %				100 %		
1	2	3	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki surat ijin praktek sesuai standart	3445 nakes	73,700,000			3445 nakes	73,700,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.01	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	50 Dokumen	73,700,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	50 Dokumen	73,700,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	23 sarana	2,780,658,780			23 sarana	3,071,658,780	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	96 Orang	2,701,200,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	96 Orang	2,992,200,000	Dinas Kesehatan
										Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			
1	2	3	2.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3 Dokumen	79,458,780	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	79,458,780	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan	285 Orang	330,339,020			285 Orang	400,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Kesehatan	220 peserta	330,339,020	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	220 peserta	400,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta Pelatihan District Food Inspector (FDI)	25 peserta				25 peserta		
						Jumlah Peserta Penyelenggaraan Pra Uji Kompetensi bagi jabatan	220 peserta				220 peserta		
						Jumlah Peserta Workshop Tim Penilaian Jabatan Fungsional Kesehatan	44 peserta				44 peserta		
						Jumlah peserta yang mengikuti Workshop Tim Penilaian Angka Kredit	44 peserta				44 peserta		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	31 Orang				31 Orang		
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prosentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan ijin	60 %	95,196,580			60 %	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan tenaga kesehatan yang mendapatkan ijin	15 sarana	27,906,110			15 sarana	28,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	27,906,110	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	1 Dokumen	28,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang mendapat sertifikat PIRT	40 PIRT	54,674,570			40 PIRT	55,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	92 Dokumen	54,674,570	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	92 Dokumen	55,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang mendapat sertifikat PIRT	40 PIRT	12,615,900			40 PIRT	13,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	204 Unit	12,615,900	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	204 Unit	13,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	79 %	609,593,555			79 %	390,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	6 OPD	317,634,000			6 OPD	80,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	317,634,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	2 Dokumen	80,000,000	Dinas Kesehatan
										Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			
1	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media yang digunakan dalam pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif dan Preventif Tingkat Kabupaten	3009 media	100,000,000			3009 media	110,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	umlah Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	15 Posyandu	191,959,555			15 Posyandu	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	191,959,555	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok	4 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			151,924,216,261				104,758,600,000	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kelancaran Administrasi di Rumah Sakit	100 %	97,014,400,000			100 %	104,758,600,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	7 Dokumen	14,500,000			7 Dokumen	18,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	6,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	25 Dokumen	88,100,000			25 Dokumen	88,100,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen kontrak	88,100,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Dokumen kontrak	88,100,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	156,000,000			1 Laporan	156,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	156,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	156,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja	96,750,000,000			16 Unit Kerja	104,490,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Unit Pelayanan, Unit Penunjang yang Memenuhi Standart Mutu	16 Unit Kerja				16 Unit Kerja		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase indikator mutu keselamatan pasien yang sesuai standart	75 %	96,750,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pendapatan dari BLUD	75 %	104,490,000,000	Dinas Kesehatan
						% Indikator mutu klinis yang sesuai standart	75 %				75 %		
						% indikator mutu manajemen yang sesuai dengan standart	75 %				75 %		
1	2	1	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (IKM)	1 Dokumen	5,800,000			1 Dokumen	6,500,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	5,800,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6,500,000	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator mutu keselamatan pasien yang sesuai standart	75 %	54,909,816,261			75 %	0	Dinas Kesehatan
						% Indikator mutu klinis yang sesuai standart	75 %				75 %		
						% indikator mutu manajemen yang sesuai dengan standart	75 %				75 %		
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Pelayanan, Unit Penunjang yang Memenuhi Standart Mutu	16 Unit Kerja	54,909,816,261			16 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	5 Unit	14,068,766,533	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5 Unit	0	Dinas Kesehatan
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (DAK)	113 Unit	39,241,049,728	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	113 Unit	0	Dinas Kesehatan
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (DBHCHT)	73 Unit			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	73 Unit		
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DBHCHT)	1 Unit	1,600,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			25,819,617,848				29,261,515,950	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	100 Persen	8,569,699,409			100 Persen	9,746,400,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 Persen	102,300,000			100 Persen	107,400,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	102,300,000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	107,400,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 Persen	1,034,899,409			100 Persen	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	482,899,409	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	400,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	43 Laporan	552,000,000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	43 Laporan	600,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Laporan Analisa Rasio Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	100 Persen	7,432,500,000			100 Persen	8,639,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	7,432,500,000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	8,639,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100 Persen	15,629,918,439			100 Persen	17,515,115,950	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan	100 Persen	15,629,918,439			100 Persen	17,515,115,950	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	665,751,536	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1 Unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	2 Unit	361,665,000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	18 Unit	1,302,360,000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	18 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	12,235,652,665	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	50 Unit	15,000,000,000	Dinas Kesehatan
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
										Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			
1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	206 Unit	115,115,950	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	206 Unit	115,115,950	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	262,089,750	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1 Paket	400,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	687,283,538	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1 Paket	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100 Persen	1,620,000,000			100 Persen	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pdayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	100 Persen	1,620,000,000			100 Persen	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	14 Orang	1,620,000,000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Orang	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			56,892,683,294				71,092,145,000	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Administrasi perangkat daerah yang terlaksana	100 Persen	14,739,550,000			100 Persen	16,292,145,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terbayar honoranya	60 Orang bulan	102,300,000			60 Orang bulan	100,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	102,300,000	Kab. Situbondo, Asembagus, Wringin Anom	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rekening dan jasa komunikasi yang terbayarkan	24 Rekening	870,000,000			24 Rekening	1,050,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	540,000,000	Kab. Situbondo, Asembagus, Wringin Anom	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 laporan	600,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	330,000,000	Kab. Situbondo, Asembagus, Wringin Anom	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 laporan	450,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase Pelayanan RS yang sesuai SPM	90 Persen	13,767,250,000			90 Persen	15,142,145,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	13,767,250,000	Kab. Situbondo, Asembagus, Wringin Anom	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	15,142,145,000	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	indikator mutu keselamatan pasien yang sesuai standar	80 Persen	40,413,133,294			80 Persen	52,300,000,000	Dinas Kesehatan
						indikator mutu klinis yang sesuai standar	75 Persen				75 Persen		
						indikator mutu manajemen yang sesuai standar	80 Persen				80 Persen		
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung yang di bangun	2 Gedung	40,413,133,294			2 Gedung	52,300,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	5	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	25,673,691,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	1 Unit	36,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	1,500,000,000	Kab. Situbondo, Asembagus, Wringin Anom	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2 Unit	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	80 Unit	11,189,441,894	Kab. Situbondo, Asembagus, Wringin Anom	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	80 Unit	12,000,000,000	Dinas Kesehatan
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	900,000,000	Kab. Situbondo, Asembagus, Wringin Anom	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1 Paket	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	900,000,000	Kab. Situbondo, Asembagus, Wringin Anom	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1 Paket	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100 Unit	250,000,000	Kab. Situbondo, Asembagus, Wringin Anom	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	100 Unit	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Yang Memenuhi Standar Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	75 Persen	1,740,000,000			75 Persen	2,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Yang Memenuhi Standar Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	75 Persen	1,740,000,000			75 Persen	2,500,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15 Orang	1,740,000,000	Kab. Situbondo, Asembagus, Wringin Anom	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Orang	2,500,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,072,392,550				1,093,453,150	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	90 %	967,502,550			90 %	988,563,150	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	97 Bumil	967,502,550			97 Bumil	988,563,150	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	37,630,600	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	37,630,600	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	4,200,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	4,200,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	15,400,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	15,400,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	18,210,600	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	18,210,600	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	11,140,400	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	11,140,400	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	3,150,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	3,150,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	4,000,600	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	4,000,600	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Tahun	93,511,350	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	93,511,350	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Tahun	30,690,600	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	30,690,600	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Tahun	43,166,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	43,166,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Tahun	11,892,950	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	11,892,950	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Tahun	22,658,470	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	22,658,470	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Tahun	98,742,380	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	98,742,380	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	13,540,400	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	13,540,400	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Tahun	67,991,400	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	67,991,400	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	491,576,800	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	Lain-lain PAD Yang Sah	12 Dokumen	512,637,400	Dinas Kesehatan
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	100 %	96,000,000			100 %	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Nakes	96,000,000			7 Nakes	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Tahun	96,000,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	79 %	8,890,000			79 %	8,890,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Puri	10 Posyandu	8,890,000			10 Posyandu	8,890,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Tahun	8,890,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	8,890,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4,079,263,730				4,079,263,730	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	3,120,170,130			100 %	3,120,170,130	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Prosentase Realisasi BLUD	90 %	3,120,170,130			90 %	3,120,170,130	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Tahun	3,120,170,130	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	Pendapatan dari BLUD	1 Tahun	3,120,170,130	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	90 %	846,998,000			90 %	846,998,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	645 Bumil	846,998,000			645 Bumil	846,998,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	49,838,200	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	49,838,200	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	1,260,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	1,260,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	11,109,400	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	11,109,400	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	30,115,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	30,115,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	11,200,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	11,200,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	1,440,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	1,440,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	12,210,200	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	12,210,200	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	15,970,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	15,970,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Tahun	143,864,050	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	143,864,050	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Tahun	23,340,400	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	23,340,400	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Tahun	23,296,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	23,296,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Tahun	31,989,920	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	31,989,920	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Tahun	127,785,466	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	127,785,466	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Tahun	203,139,304	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	203,139,304	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	6,433,410	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	6,433,410	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Tahun	97,706,450	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	97,706,450	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Tahun	56,300,200	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	56,300,200	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	100 %	96,000,000			100 %	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Nakes	96,000,000			7 Nakes	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Tahun	96,000,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	79 %	16,095,600			79 %	16,095,600	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Puri	10 Posyandu	16,095,600			10 Posyandu	16,095,600	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Tahun	16,095,600	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	16,095,600	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3,910,692,300				3,910,692,300	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	2,750,000,000			100 %	2,750,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah realiasi anggaran BLUD	90 %	2,750,000,000			90 %	2,750,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Tahun	2,750,000,000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	Pendapatan dari BLUD	1 Tahun	2,750,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	90 %	1,041,460,500			90 %	1,041,460,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	618 Bumil	1,041,460,500			618 Bumil	1,041,460,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	74,356,000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	74,356,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	21,547,000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	21,547,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	16,073,000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	16,073,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	21,442,000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	21,442,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	28,653,300	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	28,653,300	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	14,203,750	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	14,203,750	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	28,264,000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	28,264,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Tahun	9,880,000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	9,880,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	14,807,050	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	14,807,050	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	21,311,900	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	21,311,900	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Tahun	174,103,850	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	174,103,850	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Tahun	34,727,700	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	34,727,700	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Tahun	30,842,520	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	30,842,520	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Tahun	20,633,740	Kab. Situbondo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	20,633,740	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Tahun	140,532,100	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	140,532,100	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Tahun	118,496,500	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	118,496,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	6,270,000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	6,270,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Tahun	203,916,090	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	203,916,090	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Tahun	61,400,000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	61,400,000	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	100 %	96,000,000			100 %	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Nakes	96,000,000			7 Nakes	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Tahun	96,000,000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	79 %	23,231,800			79 %	23,231,800	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Puri	10 Posyandu	23,231,800			10 Posyandu	23,231,800	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Tahun	23,231,800	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	23,231,800	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2,752,583,725				2,752,583,725	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	1,882,708,025			100 %	1,882,708,025	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Prosentase Realisasi BLUD	90 %	1,882,708,025			90 %	1,882,708,025	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Tahun	1,882,708,025	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Pendapatan dari BLUD	1 Tahun	1,882,708,025	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	90 %	750,565,700			90 %	750,565,700	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	515 Bumil	750,565,700			515 Bumil	750,565,700	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	61,635,200	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	61,635,200	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	9,126,700	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	9,126,700	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	15,695,800	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	15,695,800	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	39,456,090	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	39,456,090	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	6,160,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	6,160,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	28,068,556	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	28,068,556	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	11,583,750	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	11,583,750	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	18,803,550	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	18,803,550	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Tahun	130,481,350	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	130,481,350	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Tahun	25,680,144	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	25,680,144	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Tahun	12,709,200	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	12,709,200	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Tahun	14,793,170	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	14,793,170	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Tahun	53,115,400	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	53,115,400	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Tahun	117,003,750	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	117,003,750	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	8,560,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	8,560,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Tahun	155,353,040	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	155,353,040	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Tahun	42,340,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	42,340,000	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai standart	100 %	96,000,000			100 %	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	7 SDM	96,000,000			7 SDM	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Tahun	96,000,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	96,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	79 %	23,310,000			79 %	23,310,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Puri	10 Posyandu	23,310,000			10 Posyandu	23,310,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Tahun	23,310,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	23,310,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3,702,993,660				3,702,993,660	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	2,711,601,860			100 %	2,711,601,860	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Prosentase Realisasi BLUD	90 %	2,711,601,860			90 %	2,711,601,860	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Tahun	2,711,601,860	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	Pendapatan dari BLUD	1 Tahun	2,711,601,860	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	90 %	871,067,900			90 %	871,067,900	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	579 Bumil	871,067,900			579 Bumil	871,067,900	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	56,434,400	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	56,434,400	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	38,992,100	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	38,992,100	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	1,112,000	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	1,112,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	27,524,000	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	27,524,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	17,074,000	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	17,074,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	20,734,750	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	20,734,750	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	43,748,000	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	43,748,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Tahun	7,103,000	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	7,103,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	12,525,410	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	12,525,410	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	13,501,600	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	13,501,600	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Tahun	155,444,310	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	155,444,310	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Tahun	45,935,080	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	45,935,080	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Tahun	23,958,420	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	23,958,420	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Tahun	16,643,740	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	16,643,740	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Tahun	112,538,000	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	112,538,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Tahun	104,302,000	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	104,302,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Tahun	115,597,090	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	115,597,090	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Tahun	57,900,000	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	57,900,000	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	100 %	96,000,000			100 %	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Nakes	96,000,000			7 Nakes	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Tahun	96,000,000	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	79 %	24,323,900			79 %	24,323,900	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Puri	10 Posyandu	24,323,900			10 Posyandu	24,323,900	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Tahun	24,323,900	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	24,323,900	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2,663,976,950				2,663,976,950	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	1,870,000,000			100 %	1,870,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	jumlah realisasi anggaran BLUD	90 %	1,870,000,000			90 %	1,870,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Tahun	1,870,000,000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	Pendapatan dari BLUD	1 Tahun	1,870,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	90 %	686,711,950			90 %	686,711,950	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	510 bumil	686,711,950			510 bumil	686,711,950	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Paket	60,575,000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	60,575,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 paket	1,600,000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 paket	1,600,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 paket	58,815,000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 paket	58,815,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 paket	36,283,000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 paket	36,283,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Paket	26,829,000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	26,829,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Paket	1,020,000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	1,020,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Paket	42,073,400	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	42,073,400	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Paket	22,285,000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	22,285,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Paket	119,096,550	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	119,096,550	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Paket	10,280,000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	10,280,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Paket	23,155,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	23,155,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Paket	14,645,000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	14,645,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Paket	63,171,000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	63,171,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Paket	8,000,000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	8,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Paket	131,984,000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	131,984,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Tahun	66,900,000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	66,900,000	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	100 %	96,000,000			100 %	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Nakes	96,000,000			7 Nakes	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Tahun	96,000,000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	79 %	11,265,000			79 %	11,265,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	umlah Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	10 Posyandu	11,265,000			10 Posyandu	11,265,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Tahun	11,265,000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	11,265,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,398,010,900				1,443,110,900	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	90 %	1,290,655,900			90 %	1,335,755,900	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266 Bumil	1,290,655,900			266 Bumil	1,335,755,900	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	25,100,000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	25,100,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	2,720,000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	2,720,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	29,700,000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	29,700,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	10,725,000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	10,725,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	30,220,000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	30,220,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Tahun	28,610,000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	28,610,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	11,250,000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	11,250,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	27,390,000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	27,390,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Tahun	132,819,100	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	132,819,100	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Tahun	19,250,000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	19,250,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Tahun	25,905,000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	25,905,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Tahun	18,245,000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	18,245,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Tahun	59,990,000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	59,990,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Tahun	34,956,800	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	34,956,800	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Tahun	79,525,000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	79,525,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	754,250,000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	Lain-lain PAD Yang Sah	12 Dokumen	799,350,000	Dinas Kesehatan
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai standa	100 %	96,000,000			100 %	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Nakes	96,000,000			7 Nakes	96,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Tahun	96,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	79 %	11,355,000			79 %	11,355,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	10 Posyandu	11,355,000			10 Posyandu	11,355,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Tahun	11,355,000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	11,355,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2,815,392,350				2,817,214,850	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	1,906,520,000			100 %	1,906,520,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Prosentase Realisasi BLUD	90 %	1,906,520,000			90 %	1,906,520,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Tahun	1,906,520,000	Kab. Situbondo, Panji, Panji Lor	Pendapatan dari BLUD	1 Tahun	1,906,520,000	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	90 %	796,807,350			90 %	798,629,850	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	639 Bumil	796,807,350			639 Bumil	798,629,850	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	53,040,000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	53,040,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	20,420,000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	20,420,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	18,265,000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	18,265,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	16,105,000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	16,105,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	63,633,200	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	250 Orang	64,901,700	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Tahun	2,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	2,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	8,540,000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	8,540,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	11,780,000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	11,780,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Tahun	135,205,850	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	135,205,850	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Tahun	26,175,000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	26,175,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Tahun	53,949,500	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	53,949,500	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	18,510,000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	19,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	124,390,000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	123,805,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Tahun	69,942,800	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	69,942,800	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	140,936,000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	141,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	33,915,000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	34,500,000	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	100 %	96,000,000			100 %	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Nakes	96,000,000			7 Nakes	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Tahun	96,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	79 %	16,065,000			79 %	16,065,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu PURI	10 Posyandu	16,065,000			10 Posyandu	16,065,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Tahun	16,065,000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	16,065,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2,791,052,700				2,791,052,700	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	1,985,940,000			100 %	1,985,940,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Prosentase Realisasi BLUD	90 %	1,985,940,000			90 %	1,985,940,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Tahun	1,985,940,000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	Pendapatan dari BLUD	1 Tahun	1,985,940,000	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	90 %	680,356,100			90 %	680,356,100	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	476 Bumil	680,356,100			476 Bumil	680,356,100	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	75,780,200	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	75,780,200	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	7,773,840	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	7,773,840	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	35,756,950	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	35,756,950	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	42,669,100	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	42,669,100	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	9,490,000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	9,490,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	9,383,760	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	9,383,760	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Tahun	34,497,000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	34,497,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	4,622,500	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	4,622,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	11,173,500	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	11,173,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Tahun	120,766,900	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	120,766,900	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Tahun	32,255,100	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	32,255,100	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Tahun	30,310,000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	30,310,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Tahun	38,250,000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	38,250,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Tahun	80,553,590	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	80,553,590	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	7,832,000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	7,832,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Tahun	87,441,660	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	87,441,660	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Tahun	51,800,000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	51,800,000	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	100 %	96,000,000			100 %	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Nakes	96,000,000			7 Nakes	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Tahun	96,000,000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	79 %	28,756,600			79 %	28,756,600	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Puri	10 Posyandu	28,756,600			10 Posyandu	28,756,600	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Tahun	28,756,600	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	28,756,600	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2,807,148,540				2,807,148,540	

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang teresap > 90%	100 %	1,984,228,840			100 %	1,984,228,840	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Prosentase Realisasi BLUD	90 %	1,984,228,840			90 %	1,984,228,840	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Tahun	1,984,228,840	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	Pendapatan dari BLUD	1 Tahun	1,984,228,840	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	90 %	699,529,700			90 %	699,529,700	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	597 Bumil	699,529,700			597 Bumil	699,529,700	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	34,358,900	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	34,358,900	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	2,800,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	2,800,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	9,850,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	9,850,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	12,336,020	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	12,336,020	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	12,608,110	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	12,608,110	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	9,450,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	9,450,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	9,450,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	9,450,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Tahun	20,257,500	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	20,257,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	27,115,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	27,115,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	12,520,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	12,520,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Tahun	123,437,950	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	123,437,950	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Tahun	47,792,040	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	47,792,040	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Tahun	24,030,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	24,030,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Tahun	30,175,200	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	30,175,200	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Tahun	39,531,010	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	39,531,010	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Tahun	133,934,900	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	133,934,900	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Tahun	99,583,070	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	99,583,070	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Tahun	50,300,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	50,300,000	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	100 %	96,000,000			100 %	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Nakes	96,000,000			7 Nakes	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Tahun	96,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 %	27,390,000			100 %	27,390,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Puri	10 Posyandu	27,390,000			10 Posyandu	27,390,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Tahun	27,390,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	27,390,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3,284,547,950				3,284,547,950	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	2,356,208,800			100 %	2,356,208,800	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Prosentase Realisasi BLUD	90 %	2,356,208,800			90 %	2,356,208,800	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Tahun	2,356,208,800	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	Pendapatan dari BLUD	1 Tahun	2,356,208,800	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	90 %	824,144,150			90 %	824,144,150	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	818 Bumil	824,144,150			818 Bumil	824,144,150	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	69,495,200	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	69,495,200	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	6,950,000	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	6,950,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	7,350,000	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	7,350,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	33,410,250	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	33,410,250	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	15,720,000	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	15,720,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Tahun	8,880,000	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	8,880,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Tahun	322,207,300	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	322,207,300	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Tahun	37,381,400	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	37,381,400	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Tahun	18,255,000	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	18,255,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Tahun	57,320,000	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	57,320,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Tahun	113,420,000	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	113,420,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Tahun	97,555,000	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	97,555,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Tahun	36,200,000	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	36,200,000	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	100 %	96,000,000			100 %	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Nakes	96,000,000			7 Nakes	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Tahun	96,000,000	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	79 %	8,195,000			79 %	8,195,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Puri	10 Posyandu	8,195,000			10 Posyandu	8,195,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Tahun	8,195,000	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	8,195,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2,317,061,620				2,317,061,620	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	1,524,511,120			100 %	1,524,511,120	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Prosentase Realisasi BLUD	90 %	1,524,511,120			90 %	1,524,511,120	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Tahun	1,524,511,120	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	Pendapatan dari BLUD	1 Tahun	1,524,511,120	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	90 %	673,405,500			90 %	673,405,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	356 bumil	673,405,500			356 bumil	673,405,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	64,570,000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	64,570,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	19,935,000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	19,935,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	38,430,000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	38,430,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	24,500,000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	24,500,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1 Tahun	30,580,000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	30,580,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	5,535,000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	5,535,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	5,535,000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	5,535,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Tahun	11,100,000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	11,100,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	10,260,000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	10,260,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	4,370,000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	4,370,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Tahun	118,882,600	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	118,882,600	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Tahun	12,990,000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	12,990,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Tahun	37,725,000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	37,725,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Tahun	9,320,000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	9,320,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Tahun	67,045,000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	67,045,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Tahun	56,787,900	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	56,787,900	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Tahun	103,680,000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	103,680,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Tahun	52,160,000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	52,160,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	100 %	96,000,000			100 %	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Nakes	96,000,000			7 Nakes	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Tahun	96,000,000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	79 %	23,145,000			79 %	23,145,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Mandiri	10 Posyandu	23,145,000			10 Posyandu	23,145,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Tahun	23,145,000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	23,145,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2,339,031,440				2,339,031,440	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	1,511,917,440			100 %	1,511,917,440	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Prosentase Realisasi BLUD	90 %	1,511,917,440			90 %	1,511,917,440	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Tahun	1,511,917,440	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Pendapatan dari BLUD	1 Tahun	1,511,917,440	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	90 %	668,216,270			90 %	668,216,270	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	316 Bumil	668,216,270			316 Bumil	668,216,270	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	32,876,000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	32,876,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	15,120,000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	15,120,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	26,468,600	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	26,468,600	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	20,645,000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Orang	20,645,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	12,040,000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	12,040,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	3,875,000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	3,875,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	8,825,000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	8,825,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	2,790,000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	2,790,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Tahun	133,680,150	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	133,680,150	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Tahun	22,678,100	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	22,678,100	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Tahun	19,045,000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	19,045,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Tahun	28,065,000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	28,065,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Tahun	68,899,000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	68,899,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Tahun	118,453,160	Kab. Situbondo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	118,453,160	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	8,168,760	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	8,168,760	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Tahun	97,947,500	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	97,947,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Tahun	48,640,000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	48,640,000	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	100 %	96,000,000			100 %	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Nakes	96,000,000			7 Nakes	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Tahun	96,000,000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	79 %	62,897,730			79 %	62,897,730	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Puri	10 Posyandu	62,897,730			10 Posyandu	62,897,730	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Tahun	62,897,730	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	62,897,730	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2,218,055,450				2,218,055,450	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	1,475,562,000			100 %	1,475,562,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Prosentase Realisasi BLUD	90 %	1,475,562,000			90 %	1,475,562,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Tahun	1,475,562,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	Pendapatan dari BLUD	1 Tahun	1,475,562,000	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	90 %	639,793,450			90 %	639,793,450	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	343 Bumil	639,793,450			343 Bumil	639,793,450	Dinas Kesehatan

Kode					Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	32,661,214	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	32,661,214	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	22,002,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	22,002,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	34,487,700	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	34,487,700	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	31,320,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	31,320,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	3,060,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	3,060,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Tahun	16,380,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	16,380,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	7,305,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	7,305,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	4,995,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	4,995,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Tahun	111,374,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	111,374,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Tahun	53,844,430	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	53,844,430	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Tahun	18,920,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	18,920,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Tahun	18,638,400	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	18,638,400	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Tahun	112,785,300	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	112,785,300	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Tahun	30,420,406	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	30,420,406	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Tahun	84,800,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	84,800,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Tahun	56,800,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	56,800,000	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	100 %	96,000,000			100 %	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Nakes	96,000,000			7 Nakes	96,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Tahun	96,000,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	79 %	6,700,000			79 %	6,700,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Puri	10 Posyandu	6,700,000			10 Posyandu	6,700,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Tahun	6,700,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	6,700,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2,355,221,800				2,355,221,800	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	1,519,100,000			100 %	1,519,100,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Prosentase Realisasi BLUD	90 %	1,519,100,000			90 %	1,519,100,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Tahun	1,519,100,000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Pendapatan dari BLUD	1 Tahun	1,519,100,000	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	90 %	731,759,300			90 %	731,759,300	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	359 Bumil	731,759,300			359 Bumil	731,759,300	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	28,960,000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	28,960,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	12,760,000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	12,760,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	16,400,000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	16,400,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	42,985,000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	42,985,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	39,594,300	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	39,594,300	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	10,760,000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	10,760,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Tahun	9,600,000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	9,600,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	2,160,000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	2,160,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	8,594,000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	8,594,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Tahun	129,638,300	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	129,638,300	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Tahun	49,265,000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	49,265,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Tahun	35,720,000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	35,720,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Tahun	12,525,000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	12,525,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Tahun	57,105,000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	57,105,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Tahun	90,822,200	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	90,822,200	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	1,840,000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	1,840,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Tahun	146,310,500	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	146,310,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Tahun	36,000,000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	36,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	1 Tahun	720	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	720	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	100 %	96,000,000			100 %	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Nakes	96,000,000			7 Nakes	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Tahun	96,000,000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	79 %	8,362,500			79 %	8,362,500	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Puri	10 Posyandu	8,362,500			10 Posyandu	8,362,500	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Tahun	8,362,500	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	8,362,500	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3,567,811,090				3,567,811,090	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	2,804,884,940			100 %	2,804,884,940	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Prosentase Realisasi BLUD	90 %	2,804,884,940			90 %	2,804,884,940	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Tahun	2,804,884,940	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	Pendapatan dari BLUD	1 Tahun	2,804,884,940	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	90 %	655,946,150			90 %	655,946,150	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	688 Bumil	655,946,150			688 Bumil	655,946,150	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	46,870,000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	46,870,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	32,620,000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	32,620,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	27,430,000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	27,430,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	13,440,000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	13,440,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	66,350,000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	66,350,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Tahun	39,160,000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	39,160,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	4,000,000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	4,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	2,400,000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	2,400,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Tahun	114,438,900	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	114,438,900	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Tahun	43,630,000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	43,630,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Tahun	21,835,000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	21,835,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Tahun	19,933,223	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	19,933,223	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Tahun	28,350,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	28,350,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Tahun	97,919,027	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	97,919,027	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Tahun	67,370,000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	67,370,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Tahun	30,200,000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	30,200,000	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	100 %	96,000,000			100 %	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Nakes	96,000,000			7 Nakes	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Tahun	96,000,000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	79 %	10,980,000			79 %	10,980,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Puri	10 Posyandu	10,980,000			10 Posyandu	10,980,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Tahun	10,980,000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	10,980,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,563,184,300				1,633,104,300	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	90 %	1,451,659,300			90 %	1,521,579,300	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	308 Bumil	1,451,659,300			308 Bumil	1,521,579,300	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	21,220,000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	21,220,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	8,400,000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	8,400,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	1,120,000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	1,120,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	28,847,500	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	28,847,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	12,390,000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	12,390,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	20,760,000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	20,760,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	10,680,000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	10,680,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	10,680,000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	10,680,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Tahun	1,800,000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	1,800,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	2,760,000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	2,760,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	10,480,000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	10,480,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Tahun	104,757,650	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	104,757,650	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Tahun	10,848,600	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	10,848,600	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Tahun	21,860,000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	21,860,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Tahun	25,592,180	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	25,592,180	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Tahun	38,355,000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	38,355,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Tahun	121,838,490	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	121,838,490	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	900	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	900	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Tahun	96,969,880	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	96,969,880	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Tahun	901,400,000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	Lain-lain PAD Yang Sah	12 Tahun	971,320,000	Dinas Kesehatan
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	100 %	96,000,000			100 %	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Nakes	96,000,000			7 Nakes	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Tahun	96,000,000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	79 %	15,525,000			79 %	15,525,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Puri	10 Posyandu	15,525,000			10 Posyandu	15,525,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Tahun	15,525,000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	15,525,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2,374,446,135				2,374,446,135	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	1,634,026,735			100 %	1,634,026,735	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	1,634,026,735			100 %	1,634,026,735	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Tahun	1,634,026,735	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Pendapatan dari BLUD	1 Tahun	1,634,026,735	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	90 %	558,965,637			90 %	558,965,637	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	311 Bumil	558,965,637			311 Bumil	558,965,637	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	16,294,400	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	16,294,400	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	13,440,000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	13,440,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	4,650,000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	4,650,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	29,445,800	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	29,445,800	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	10,680,000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	10,680,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	72,616,920	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	72,616,920	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	6,600,000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	6,600,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Tahun	7,400,000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	7,400,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	8,900,000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	8,900,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	11,755,000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	11,755,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Tahun	111,062,900	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	111,062,900	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Tahun	20,370,000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	20,370,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Tahun	13,090,000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	13,090,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Tahun	41,283,000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	41,283,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Tahun	21,763,890	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	21,763,890	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Tahun	35,523,727	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	35,523,727	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Tahun	98,890,000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	98,890,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Tahun	35,200,000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jombang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	35,200,000	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	100 %	96,000,000			100 %	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kontrak yang di bayar	12 bulan	96,000,000			12 bulan	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Tahun	96,000,000	Kab. Situbondo, Jombang, Jombang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	79 %	85,453,763			79 %	85,453,763	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	10 posyandu	85,453,763			10 posyandu	85,453,763	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Tahun	85,453,763	Kab. Situbondo, Jombang, Jombang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	85,453,763	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3,107,446,570				3,107,446,570	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	2,222,526,570			100 %	2,222,526,570	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Prosentase Realisasi BLUD	90 %	2,222,526,570			90 %	2,222,526,570	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Tahun	2,222,526,570	Kab. Situbondo, Sumbalung, Tlogosari	Pendapatan dari BLUD	1 Tahun	2,222,526,570	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	90 %	757,855,000			90 %	757,855,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	328 Bumil	757,855,000			328 Bumil	757,855,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	44,000,000	Kab. Situbondo, Sumbalung, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	44,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	625	Kab. Situbondo, Sumbalung, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	625	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	19,135,000	Kab. Situbondo, Sumbalung, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	19,135,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	25,510,000	Kab. Situbondo, Sumbalung, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	25,510,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	17,520,000	Kab. Situbondo, Sumbalung, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	17,520,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	26,940,000	Kab. Situbondo, Sumbarmalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	26,940,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Tahun	12,415,000	Kab. Situbondo, Sumbarmalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	12,415,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	1,250,000	Kab. Situbondo, Sumbarmalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	1,250,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	17,370,000	Kab. Situbondo, Sumbarmalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	17,370,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Tahun	138,076,144	Kab. Situbondo, Sumbarmalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	138,076,144	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Tahun	67,600,000	Kab. Situbondo, Sumbarmalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	67,600,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Tahun	33,695,000	Kab. Situbondo, Sumbarmalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	33,695,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Tahun	29,945,000	Kab. Situbondo, Sumbarmalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	29,945,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Tahun	50,475,000	Kab. Situbondo, Sumbarmalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	50,475,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Tahun	121,408,856	Kab. Situbondo, Sumbarmalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	121,408,856	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Tahun	100,990,000	Kab. Situbondo, Sumbarmalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	100,990,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Tahun	50,900,000	Kab. Situbondo, Sumbarmalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	50,900,000	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	100 %	96,000,000			100 %	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Nakes	96,000,000			7 Nakes	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Tahun	96,000,000	Kab. Situbondo, Sumbarmalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	79 %	31,065,000			79 %	31,065,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Puri	10 Posyandu	31,065,000			10 Posyandu	31,065,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Tahun	31,065,000	Kab. Situbondo, Sumbarmalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	31,065,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,981,597,265				1,981,597,265	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentanse realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	1,201,899,765			100 %	1,201,899,765	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Prosentase Realisasi BLUD	90 %	1,201,899,765			90 %	1,201,899,765	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Tahun	1,201,899,765	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Pendapatan dari BLUD	1 Tahun	1,201,899,765	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	90 %	650,175,430			90 %	650,175,430	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	363 Bumil	650,175,430			363 Bumil	650,175,430	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	30,881,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	30,881,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	3,010,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	3,010,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	43,399,050	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	43,399,050	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	36,874,130	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	36,874,130	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	29,305,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	29,305,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	980	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	980	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Tahun	980	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	980	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Tahun	10,430,750	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	10,430,750	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	7,200,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	7,200,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Tahun	12,897,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	12,897,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Tahun	124,204,600	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	124,204,600	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Tahun	20,320,700	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	20,320,700	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Tahun	17,006,600	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	17,006,600	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Tahun	20,677,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	20,677,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Tahun	38,577,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	38,577,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Tahun	106,862,600	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	106,862,600	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Tahun	91,350,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	91,350,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Tahun	51,020,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	51,020,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Tahun	4,200,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	4,200,000	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	100 %	96,000,000			100 %	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Nakes	96,000,000			7 Nakes	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Tahun	96,000,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	79 %	33,522,070			79 %	33,522,070	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Puri	10 Posyandu	33,522,070			10 Posyandu	33,522,070	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Tahun	33,522,070	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	33,522,070	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			592,247,600				592,247,600	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	90 %	592,247,600			90 %	592,247,600	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Paket	143,434,000			1 Paket	143,434,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Tahun	143,434,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardrejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	143,434,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	448,813,600			1 Dokumen	448,813,600	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Tahun	448,813,600	Kab. Situbondo, Panji, Ardorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	448,813,600	Dinas Kesehatan
										Pajak Rokok			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			261,634,400				261,634,400	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	90 %	261,634,400			90 %	261,634,400	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	261,634,400			1 Dokumen	261,634,400	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Tahun	261,634,400	Kab. Situbondo, Panji, Ardorejo	Lain-lain PAD Yang Sah	1 Tahun	261,634,400	Dinas Kesehatan
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
										Pajak Rokok			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			96,380,267,203				79,567,024,408	
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase ketepatan pelayanan administrasi dan pelaporan	100 %	16,521,967,203			100 %	18,263,711,408	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 dokumen	117,500,000			8 dokumen	173,412,650	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	10,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10,952,300	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10,590,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10,590,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	5,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	80,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	118,780,350	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	13,987,880,214			100 %	15,003,610,814	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	166 Orang/bulan	13,420,863,244	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	166 Orang/bulan	14,420,726,114	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	537,885,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	537,885,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	9,131,970	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	9,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	10,999,700	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	15,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	25,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	271 stel	58,500,000			271 stel	58,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	58,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	58,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi umum perkantoran yang dipenuhi	30 jenis	504,396,070			30 jenis	559,235,474	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	12,339,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	74,553,100	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	74,553,104	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	60,000,970	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	60,000,970	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	12,804,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Dokumen	12,804,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	352 Laporan	349,538,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	352 Laporan	399,538,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	25 unit	50,000,000			25 unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	50,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa administrasi perkantoran yang dipenuhi	699 buah	780,314,834			699 buah	771,542,470	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,844,074	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	6,975,300	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	339,660,600	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 Laporan	369,660,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	433,810,160	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	394,906,570	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 unit	1,023,376,085			100 unit	1,547,410,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	103 Unit	925,966,085	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	103 Unit	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	47,410,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80 Unit	47,410,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase pengembangan sumberdaya air dalam kondisi baik	56,29 %	14,370,000,000			56,29 %	8,350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	391 meter	6,450,000,000			391 meter	1,700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	2	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.07 KM	300,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0.07 KM	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	2	2.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0.59 KM	2,850,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0.59 KM	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2.4 KM	3,200,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.4 KM	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	2	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Orang	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan dan dikelola	704.34 meter	7,920,000,000			704.34 meter	6,650,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.57 KM	5,200,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.57 KM	3,970,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3 KM			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	3 KM		
1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Aktualisasi Data Irigasi	50 D.I.	2,520,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 D.I.	2,380,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
						Jumlah Jasa/Honorarium Pemeliharaan Jaringan Irigasi	110 Orang				110 Orang		
						Jumlah Patok Batas Saluran yang Dibuat dan Dipasang	200 Unit				200 Unit		
						Jumlah Pengadaan Bahan Banjiran	25 Jenis				25 Jenis		
						Jumlah Pengadaan Bahan O dan P	25 Jenis				25 Jenis		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.5 KM				0.5 KM		
1	3	2	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Kegiatan Unit Pengelola Irigasi yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	200,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
						Jumlah Pengelola irigasi yang ditingkatkan	70 Orang				70 Orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase pengelolaan air minum di daerah rawan air	76,08 %	5,060,000,000			76,08 %	8,640,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola dan dikembangkan	76.08 %	5,060,000,000			76.08 %	8,640,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	145,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	3	2.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	60 SR	750,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	60 SR	1,150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	3	2.01	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui peningkatan kapasitas	370 SR	3,825,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	370 SR	7,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	3	2.01	8	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang SPAM yang diperbaiki	100 Meter	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Meter	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	3	2.01	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	40 Kelompok Masyarakat	140,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Kelompok Masyarakat	140,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	3	2.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	2 Unit	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,962,500,000			100 %	3,300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rumah tangga yang menggunakan Air Limbah Domestik layak	711 Rumah Tangga	5,962,500,000			711 Rumah Tangga	3,300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	711 Rumah Tangga	4,287,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	711 Rumah Tangga	1,625,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	5	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	1 M ³ /Hari	1,675,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	1 M ³ /Hari	1,675,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase kabupaten dalam kondisi layak	27,60 %	2,650,000,000			27,60 %	5,372,513,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Saluran drainase yang dibangun dan dipelihara	1683.54 meter	2,650,000,000			1683.54 meter	5,372,513,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	685 M	2,150,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	685 M	1,512,513,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	6	2.01	7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	897 M	400,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	897 M	3,760,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 M	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 M	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Prosentase jalan lingkungan yang terbangun	36,91	475,000,000			37,84	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	7	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	475,000,000			1 Kegiatan	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	7	2.01	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jalan lingkungan yang dibangun dan dipelihara	0.467 KM	475,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0.467 KM	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Prosentase identifikasi Bangunan yang ber IMB	11,76 %	170,800,000			11,76 %	170,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	50 dokumen	170,800,000			50 dokumen	170,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	50 Dokumen	150,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	8	2.01	4	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	50 Dokumen	20,800,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Dokumen	20,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase jalan dan jembatan yang terbangun dan terpelihara dalam kondisi mantap	74.47 %	49,070,000,000			74.47 %	28,020,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kabupaten dalam kondisi baik	85.3 %	49,070,000,000			85.3 %	28,020,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	15 KM	24,750,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 KM	15,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.1 KM	150,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0.1 KM	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	10 KM	11,320,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 KM	11,320,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	4 Unit	12,750,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah badan usaha (jakon) yang terverifikasi dan dibina	150 badan usaha	500,000,000			150 badan usaha	800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	40 dokumen	150,000,000			40 dokumen	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	11	2.01	3	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	40 Orang	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Orang	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000			100 %	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	11	2.02	2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen	75,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	11	2.02	6	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen	25,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	100 %	100,000,000			100 %	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	11	2.03	5	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	50 dokumen	150,000,000			50 dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	11	2.04	1	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	11	2.04	3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penataan ruang	4 dokumen	1,600,000,000			4 dokumen	6,550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	4 dokumen	1,150,000,000			4 dokumen	6,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	12	2.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1,000,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	5,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 audit	450,000,000			1 audit	450,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	10 Dokumen	450,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Dokumen	450,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			12,765,000,000				16,240,000,000	
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Akumulasi Persentase ketersediaan data perumahan dan permukiman rawan bencana dan ketersediaan data rencana lokasi untuk relokasi perumahan rawan bencana (kajian/ identifikasi)	100 %	10,000,000			100 %	60,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	2	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 dokumen	10,000,000			1 dokumen	60,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	4	2	2.06	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5 Laporan	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	60,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani	30 %	7,535,000,000			30 %	13,980,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	4	3	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	jumlah izin pembangunan dan pengembangan yang diterbitkan	5 rekomendasi	30,000,000			5 rekomendasi	30,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	4	3	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	30,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	30,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan kumuh yang ditingkatkan	6 ha	7,505,000,000			6 ha	13,950,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	4	3	2.03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	4 Dokumen	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	750 Unit Rumah	7,005,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	750 Unit Rumah	12,250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	4	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	1 Ha	400,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Ha	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni menjadi layak huni	18.39 %	4,770,000,000			18.39 %	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	4	4	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang diperbaiki	500 unit	4,770,000,000			500 unit	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	4	4	2.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	280 Unit Rumah	4,770,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	280 Unit Rumah	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	100 Unit Rumah			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	100 Unit Rumah		

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Terpenuhiya PSU di Perumahan	40 %	450,000,000			40 %	1,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terpenuhiya PSU di Perumahan	2100 m2	450,000,000			2100 m2	1,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	4	5	2.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	5 Lokasi	250,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Lokasi	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1	4	5	2.01	4	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			50,000,000				100,000,000	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Presentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000			100 %	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	50,000,000			1 Laporan	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
2	10	10	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Laporan	50,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			12,797,188,323				7,679,627,577	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 %	11,942,208,473			83 %	5,941,642,424	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 %	21,954,100			83 %	47,201,078	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA_SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7,650,250	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	16,447,500	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7,454,800	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	16,027,820	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen	6,849,050	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Dokumen	14,725,758	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 %	8,756,060,169			83 %	1,606,209,025	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/bulan	8,609,660,169	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	101 Orang/bulan	1,291,449,025	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	146,400,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Dokumen	314,760,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 %	259,277,000			83 %	557,445,550	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terbeli	285 orang	169,335,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	285 orang	364,070,250	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	285 Paket				285 Paket		
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	157 Orang	89,942,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157 Orang	193,375,300	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 %	247,747,404			83 %	502,356,634	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,089,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	21,691,350	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	1 Paket	27,239,204	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	58,942,474	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	15,000,200	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Paket	32,250,430	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	18,548,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Dokumen	32,250,430	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	28,675,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Laporan	61,651,250	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	148,196,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	72 Laporan	295,570,700	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 %	2,291,718,800			83 %	2,808,370,788	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	1,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300 Laporan	8,842,350	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	87,956,100	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Laporan	131,312,410	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	171 Laporan	2,202,262,700	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	171 Laporan	2,668,216,028	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 %	365,451,000			83 %	420,059,350	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	261,307,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Unit	300,503,050	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24,875,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Unit	28,606,250	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	44,979,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	51,516,550	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	34,290,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Unit	39,433,500	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Pelanggar Perda yang ditangani	71 %	468,423,450			71 %	906,888,893	Satuan Polisi Pamong Praja
						Prosentase Pelanggar Perda yang ditangani	77 %				77 %		
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelanggar Perda yang terselesaikan	71 %	373,868,550			71 %	741,443,383	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Pelanggar Perda yang tertangani	77 %				77 %		
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	82 Kasus	162,626,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	82 Kasus	349,645,900	Satuan Polisi Pamong Praja
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1	5	2	2.01	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	36 Kasus	38,541,700	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Kasus	82,864,655	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	62,374,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	71,730,100	Satuan Polisi Pamong Praja
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	17,931,400	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	38,552,510	Satuan Polisi Pamong Praja
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Orang	25,491,550	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Orang	54,806,833	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	10 Dokumen	66,903,900	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Dokumen	143,843,385	Satuan Polisi Pamong Praja
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggar PERDA yang terselesaikan	71 %	94,554,900			71 %	165,445,510	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Pelanggar PERDA yang tertangani	77 %				77 %		
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	60 Laporan	38,475,700	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 Laporan	82,722,755	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14					
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1	5	2	2.02	2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	60 Laporan	56,079,200	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 Laporan	82,722,755	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Linmas Desa/Kelurahan yang terlatih	6 Desa	99,024,600			6 Desa	212,902,890	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Satgas Linmas Kabupaten yang terlatih	62 Orang				62 Orang		
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Linmas Desa/Kelurahan yang terlatih	6 Desa	31,011,300			6 Desa	66,674,295	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Satgas Linmas Kabupaten yang terlatih	62 Orang				62 Orang		
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 Orang	31,011,300	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang	66,674,295	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Linmas Desa/Kelurahan yang terlatih	6 Desa	68,013,300			6 Desa	146,228,595	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Satgas Linmas Kabupaten yang terlatih	62 Orang				62 Orang		
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat darurat Bencana	60 Laporan	68,013,300	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 Laporan	146,228,595	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Kebakaran yang Ditangani	84 %	287,531,800			84 %	618,193,370	Satuan Polisi Pamong Praja
						Persentase Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	70 %				70 %		
1	5	4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kebakaran yang Ditangani	84 %	287,531,800			84 %	618,193,370	Satuan Polisi Pamong Praja
						Persentase Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	70 %				70 %		
1	5	4	2.01	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	219,981,800	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	472,960,870	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen		
1	5	4	2.01	5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	35,770,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	76,905,500	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	4	2.01	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	74 Orang	31,780,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	74 Orang	68,327,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			4,691,428,046				5,213,879,277	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	4,116,428,046			84 (A)	4,487,629,277	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang di Susun	100 %	35,000,000			100 %	39,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	11,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,300,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,300,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,300,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,300,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	11,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	3,300,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2,872,338,300			100 %	3,141,872,130	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang/bulan	2,684,338,300	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	364 Orang/bulan	2,952,772,130	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	177,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	177,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	5,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	3,300,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	3,300,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	18,000,000			100 %	19,800,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60 Paket	18,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 Paket	19,800,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	277,449,346			100 %	318,066,747	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Paket	11,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	7,449,346	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Paket	8,566,747	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	30,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Paket	34,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	15,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Paket	17,250,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Dokumen	10,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	730 Dokumen	11,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	15,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	17,250,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	190,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	218,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	10,000,000			100 %	11,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	11,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	533,640,400			100 %	533,890,400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	2,750,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	61,800,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	61,800,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	469,340,400	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	469,340,400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana dan Aset dalam Kondisi Baik	100 %	370,000,000			100 %	424,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	100,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Unit	115,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	220,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Unit	253,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	20,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	23,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	22,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	11,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	100 %	575,000,000			100 %	726,250,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Peserta Sosialisasi Rawan Bencana	100 %	100,000,000			100 %	110,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	110,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Jumlah Desa Tangguh Bencana	27 %	150,000,000			27 %	192,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Persentase Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Penanggulangan Bencana	27 %				27 %		
1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	50,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	55,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 Kawasan	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Kawasan	137,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pendistribusian Logistik Korban Bencana	100 %	225,000,000			100 %	286,250,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	120 Orang	75,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120 Orang	86,250,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	600 Orang	150,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	600 Orang	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Lembaga yang Aktif dalam Penanggulangan Bencana	100 %	100,000,000			100 %	137,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.04	6	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	12 Dokumen	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	137,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			9,374,950,512				9,711,037,740	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP SKPD	87.5 Persen	5,138,350,512			87.5 Persen	6,004,700,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	224,383,381			13 Dokumen	275,000,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	112,777,617	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	125,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,605,764	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	70,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	100,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	15,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	20,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	42 Dokumen	3,082,010,011			42 Dokumen	3,844,700,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang	2,844,310,011	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	31 Orang	3,600,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 Dokumen	197,700,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Dokumen	197,700,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24 Dokumen	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Dokumen	15,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	16,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	15,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	16,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Laporan	20,000,000			3 Laporan	20,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	10,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	10,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Daerah yang disediakan	50 Unit	15,000,000			50 Unit	20,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	15,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Paket	20,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	115 Laporan/Paket	253,907,200			115 Laporan/Paket	265,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Paket	10,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	20,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	33 Paket	25,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 Paket	10,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3,907,200	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Dokumen	5,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	15,000,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	200,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57 Laporan	1,348,049,920			57 Laporan	1,375,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	5,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	110,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Laporan	120,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	1,233,049,920	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Laporan	1,250,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89 unit	195,000,000			89 unit	205,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	150,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	34 Unit	150,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	25,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	37 Unit	30,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	20,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 Unit	25,000,000	Dinas Sosial
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100 Persen	350,000,000			100 Persen	575,000,000	Dinas Sosial
						Persentase PSKS yang Terlatih dalam Validitas Data	100 Persen				100 Persen		
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang Ditingkatkan Kualitasnya	497 Orang	350,000,000			497 Orang	575,000,000	Dinas Sosial
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	50,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	50,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Orang	200,000,000	Dinas Sosial
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	150,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Lembaga	50,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Lembaga	100,000,000	Dinas Sosial
1	6	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	150 Orang	50,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150 Orang	75,000,000	Dinas Sosial
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi yang Tepat Sasaran	100 Persen	446,600,000			100 Persen	1,203,631,656	Dinas Sosial
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial	506 Orang	178,000,000			506 Orang	388,800,000	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta kegiatan temu inklusi nasional	1 even	150,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 even	150,000,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	6	4	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	28,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Orang	238,800,000	Dinas Sosial
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial	650 Orang	268,600,000			650 Orang	814,831,656	Dinas Sosial
1	6	4	2.02	4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Balita Terlantar)	15 Orang	25,600,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Orang	40,000,000	Dinas Sosial
1	6	4	2.02	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	40,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
						Verifikasi dan Monitoring Penyandang Disabilitas	68 Orang				68 Orang		
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (sosialisasi dan pembinaan mental siswi-siswi)	300 Orang	53,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300 Orang	70,000,000	Dinas Sosial
1	6	4	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS yang menjalankan aktivitas ditempat umum	70 Orang	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70 Orang	154,831,656	Dinas Sosial
1	6	4	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (OT terlantar)	45 Dokumen	50,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45 Dokumen	450,000,000	Dinas Sosial
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang Verval	100 Persen	3,110,000,000			100 Persen	1,573,782,500	Dinas Sosial
						Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen				100 Persen		
1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	136 Desa/Kelurahan	3,110,000,000			136 Desa/Kelurahan	1,573,782,500	Dinas Sosial
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	136 Orang	50,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	136 Orang	60,000,000	Dinas Sosial
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	50 Keluarga	60,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Keluarga	68,000,000	Dinas Sosial
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Ramadhan Bersama Rakyat	13600 Keluarga	3,000,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13600 Keluarga	1,445,782,500	Dinas Sosial
						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Wilayah Kemiskinan Ekstream	900 Keluarga				900 Keluarga		
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang Tertangani	100 Persen	300,000,000			100 Persen	323,923,584	Dinas Sosial
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota Yang ditangani	250 Orang	280,000,000			250 Orang	273,923,584	Dinas Sosial
1	6	6	2.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	280,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250 orang	273,923,584	Dinas Sosial
1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	262 Orang	20,000,000			262 Orang	50,000,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Korban Bencana Alam dan sosial Yang menerima paket bantuan	200 orang	20,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 orang	50,000,000	Dinas Sosial
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Ketersediaan Sarana Taman Makam Pahlawan yang Sesuai Standar	100 Persen	30,000,000			100 Persen	30,000,000	Dinas Sosial
1	6	7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	1 TMP	30,000,000			1 TMP	30,000,000	Dinas Sosial
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	110 Makam	30,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	110 Makam	30,000,000	Dinas Sosial
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			6,792,266,650				7,463,000,000	
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,483,236,750			100 %	4,773,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	12 Dokumen	75,661,900			12 Dokumen	104,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12,351,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	17,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,400,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6,500,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,400,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6,500,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,400,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6,500,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,400,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6,500,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	12,010,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	16,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	33,700,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	45,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	17 Dokumen	2,311,989,766			17 Dokumen	3,250,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2,180,818,966	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Orang/bulan	3,100,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	118,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	130,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,335,400	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	10,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	6,335,400	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	10,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Stel	9,502,500			40 Stel	12,000,000	Dinas Ketenagakerjaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	7	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	9,502,500	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Paket	12,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis kebutuhan administrasi umum yang dipenuhi	65 Paket	319,763,984			65 Paket	293,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	12,026,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Paket	15,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	28,835,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Paket	60,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	25,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Paket	30,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	20,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Paket	30,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	6,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	8,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	30,230,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	40,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	197,672,984	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Laporan	110,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Laporan	300,093,600			10 Laporan	384,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3,150,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	4,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	103,287,600	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	130,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	193,656,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	250,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	31 Unit	466,225,000			31 Unit	730,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
						Jumlah Unit Barang Milik Daerah Oenunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	31 Unit				31 Unit		
2	7	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	241,621,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21 Unit	200,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	200,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	500,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	24,604,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Unit	30,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	rosentase Perencanaan Tenaga Kerja	100 %	56,616,000			100 %	115,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang disusun	1 Dokumen	56,616,000			1 Dokumen	115,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	56,616,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	115,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100 %	1,495,000,000			100 %	1,600,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja berbasis ketenagakerjaan dan kompetensi	192 Orang	1,495,000,000			192 Orang	1,600,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	192 Orang	1,495,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	192 Orang	1,600,000,000	Dinas Ketenagakerjaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Penempatan Tenaga Kerja	100 %	1,465,872,500			100 %	690,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	4	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	130 Orang	1,290,872,500			130 Orang	500,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	130 Orang	1,290,872,500	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	130 Orang	500,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan Informasi Bursa Tenaga Kerja	60 Orang	100,000,000			60 Orang	120,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	60 Orang	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 Orang	120,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	4	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Asing yang Ditangani	10 Orang	75,000,000			10 Orang	70,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	4	2.05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga asing yang ditangani	10 Orang	75,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Orang	70,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase kasus ketenagakerjaan yang ditangani	100 %	291,541,400			100 %	285,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek dan Penguasaan	2 Laporan	183,386,400			2 Laporan	155,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan	183,386,400	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	155,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	20 Perkara	108,155,000			20 Perkara	130,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	70,875,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Perkara	80,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	10 Lembaga	37,280,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Lembaga	50,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			100,000,000				110,000,000	
3	32	3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase calon transmigran yang dilatih	100 %	100,000,000			100 %	110,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
3	32	3	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	300 Kepala Keluarga	100,000,000			300 Kepala Keluarga	110,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
3	32	3	2.01	5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	300 Kepala Keluarga	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300 Kepala Keluarga	110,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			6,789,590,776				6,777,996,711	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	86 nilai	6,105,064,126			86 nilai	6,051,848,132	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja yang tersusun	19 dokumen	25,000,000			19 dokumen	29,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	7,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 dokumen	8,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	3,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	3,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	2,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	7,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	7,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	2,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	8	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	2 dokumen	4,345,141,336			2 dokumen	4,602,863,563	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	4,137,439,136	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	42 Orang/bulan	4,374,391,363	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	191,340,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Dokumen	210,474,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	16,362,200	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	17,998,200	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	529,297,680			1 Dokumen	93,106,948	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	19,149,400	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Paket	21,064,340	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	33,405,280	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Paket	36,745,808	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	27,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,776,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	1,953,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	8	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	5,312,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	5,843,200	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	444,655,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	948,075,110			1 Dokumen	1,042,882,621	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	3,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250 Laporan	3,850,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	115,842,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	127,426,200	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	828,733,110	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Laporan	911,606,421	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	257,550,000			1 Dokumen	283,495,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	89 Unit	155,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	89 Unit	171,050,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	89 Unit	27,100,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	89 Unit	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	8	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	38,950,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Unit	42,845,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	36,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	39,600,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Angkatan Kerja Perempuan	65 Persen	503,316,890			65 Persen	515,148,579	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	2	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah yang terfasilitasi PUG	43 lembaga	77,573,190			43 lembaga	85,330,509	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Perangkat Daerah	77,573,190	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	43 Perangkat Daerah	85,330,509	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keterwakilan perempuan di parlemen	33 Persen	362,518,700			33 Persen	360,270,570	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	362,518,700	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	360,270,570	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat penguatan PUG	4 lembaga	63,225,000			4 lembaga	69,547,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	35 Orang	63,225,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35 Orang	69,547,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai dengan SOP	100 Persen	37,004,760			100 Persen	45,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani	42 Perempuan	20,000,000			42 Perempuan	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	42 Perempuan	17,004,760			42 Perempuan	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	17,004,760	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Layanan	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase terbentuknya Forum Anak Desa/Kelurahan	75 Persen	100,005,000			75 Persen	111,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah dan non pemerintah yang mengikuti evaluasi kelembagaan PHA	11 Lembaga	95,600,000			11 Lembaga	105,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	50 Organisasi	45,600,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Organisasi	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen				1 Dokumen		
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan peningkatan kualitas Hidup Anak	12 Lembaga	4,405,000			12 Lembaga	6,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	4,405,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	6,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Peresentase penyediaan layanan pengaduan masyarakat	100 Persen	44,200,000			100 Persen	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat pelayanan	30 Anak	20,000,000			30 Anak	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan/sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	1 Kegiatan	24,200,000			1 Kegiatan	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan	24,200,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Layanan	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8,519,881,805				8,496,004,000	
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Penyediaan Data Basis Bangsa Kencana	100 Persen	181,290,000			100 Persen	37,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kuantitas penduduk	2 Kegiatan	31,290,000			2 Kegiatan	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	2 Laporan	31,290,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten	1 Dokumen	150,000,000			1 Dokumen	2,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	150,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	12 Dokumen	2,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase KB Baru MKJP	10 Persen	5,045,282,000			10 Persen	5,154,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Persentase KB Baru Semua Metode	100 Persen				100 Persen		
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS yang terpapar informasi Program Bangsa Kencana	3.57 Pasangan	1,568,262,000			3.57 Pasangan	1,495,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	25,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1 Dokumen	25,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	290,190,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	210,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	1,253,072,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	12 Laporan	1,260,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	17 Laporan				17 Laporan		
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB dan IMP	1024 Orang	698,020,000			1024 Orang	709,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.02	1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	137 Organisasi	4,120,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	137 Organisasi	9,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1037 Orang	693,900,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1037 Orang	700,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3312 Orang	1,879,000,000			3312 Orang	2,029,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35 Laporan	25,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	35 Laporan	31,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1216 Orang	807,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1216 Orang	850,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	4	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	3 Laporan	17,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	17,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	84 Unit	1,000,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	84 Unit	1,100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	46 Laporan	30,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	46 Laporan	31,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah peserta pemberdayaan dan peningkatan kemasyarakatan dalam pembinaan Kesertaan Ber-KB	1534 Orang	900,000,000			1534 Orang	920,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	44 Kampung	800,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	44 Kampung	810,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.04	4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	100,000,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Agel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase PUS anggota kelompok pembangunan keluarga yang ber KB	86 Persentase	3,293,309,805			86 Persentase	3,305,004,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui pembinaan ketahanan	100 Persentase	3,293,309,805			100 Persentase	3,305,004,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit	330,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	20 Unit	330,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	60 Orang	23,704,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 Orang	23,704,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	14	4	2.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1587 Kelompok	2,927,300,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1587 Kelompok	2,927,300,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	12,305,805	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	24,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			26,873,859,260				26,274,009,500	
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 A	23,113,819,260			84 A	25,007,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100 %				100 %		
2	11	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	41,641,100			100 %	43,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9,999,700	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,779,800	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,420,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,899,800	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,900,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,540,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,600,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4,999,800	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	12,002,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	15,620,078,000			100 %	17,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	209 Orang/bulan	15,350,068,700	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	209 Orang/bulan	17,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	244,100,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,999,400	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	11	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	20,909,900	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan administrasi barang yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	4,999,600			100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4,999,600	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase peningkatan administrasi kepegawaian PD yang dilaksanakan	100 %	67,991,000			100 %	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	67,991,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100 %	580,764,888			100 %	591,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,993,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32,714,550	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29,992,490	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5,740,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	497,324,848	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah	100 %	59,936,800			100 %	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	59,936,800	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran	100 %	5,163,844,872			100 %	5,553,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,230,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	3,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	272,945,400	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,887,669,472	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	5,250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah	100 %	1,574,563,000			100 %	1,680,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	1,500,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	65 Unit	1,600,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	24,563,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Unit	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup yang dijadikan dasar penyusunan kebijakan bidang lingkungan hidup	4 Dokumen	77,509,500			4 Dokumen	77,509,500	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	11	2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan LH dan Peraturan Perundangan yang disusun	4 Dokumen	77,509,500			4 Dokumen	77,509,500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	10,554,500	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10,554,500	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah rancangan peraturan perundangan bidang lingkungan hidup kabupaten Situbondo yang tersusun.	1 Dokumen				1 Dokumen		
2	11	2	2.01	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi data/ atau kajian bidang Lingkungan Hidup Daerah yang disusun.	1 Dokumen	66,955,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	66,955,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen				1 Dokumen		
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase jumlah sungai yang memenuhi peruntukan Kelas II di wilayah Kabupaten Situbondo dari 14 sungai yang ditetapkan dalam Pergub Jatim Nomor 32 Tahun 2013 dengan peruntukan Kelas II	50 %	1,421,198,708			50 %	115,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Rata Rata Presentase Penurunan Konsentrasi Sumber Pencemar Udara Ambient (untuk parameter SO2 dan NO2) Wilayah Kab. Situbondo	0.30 %				0.30 %		
2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan/ Wilayah/Daerah yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan Proklamasi	1 Kawasan	316,198,708			1 Kawasan	105,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah parameter lingkungan yang dapat diuji di Laboratorium DLH	15 Parameter				15 Parameter		
						Jumlah Segmen Badan Air Sungai Yang Memenuhi Peruntukan Kelas II	7 Segmen Sungai				7 Segmen Sungai		
						Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara Ambien di kawasan permukiman, industri, komersial dan transportasi yang mengalami peningkatan kualitas udaranya	1 parameter				1 parameter		
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	7,440,000	Kab. Situbondo	Pajak Daerah	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Segmen Sungai/ Saluran Yang terkelola Dalam Program Kali Bersih	1 sungai				1 sungai		
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	242,326,708	Kab. Situbondo	Pajak Daerah	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah lokasi yang dibangun / dipelihara sarana atau prasarana atau infrastruktur untuk pencegahan emisi GRK atau kegiatan mitigasi atau adaptasi perubahan iklim (lokasi)	1 lokasi				1 lokasi		
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	66,432,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Sarana Prasarana dan Bahan Pemantauan Kualitas Lingkungan yang diadakan (tanah, air, udara, mikrobiologi, gangguan)	1 laboratorium				1 laboratorium		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kg Beban BOD yang dapat diturunkan per tahun	400 Kg	1,105,000,000			400 Kg	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Infrastruktur pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang dibangun (unit)	6 Unit	1,105,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Unit	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik				1 Titik		
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah Kawasan Konservasi Lingkungan Hidup Yang Dikelola	1 Lokasi	206,141,292			1 Lokasi	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Penambahan Luasan Tutupan Vegetasi di luar kawasan hutan	5 Ha				5 Ha		
2	11	4	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi RTH yang dikelola	3 Lokasi	206,141,292			3 Lokasi	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Penambahan Luasan Tutupan Vegetasi Non Pesisir di Luar Kawasan Hutan	4 Ha				4 Ha		
						Penambahan Luasan Tutupan Vegetasi Pesisir di Kabupaten Situbondo	1 Ha				1 Ha		
2	11	4	2.01	2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah bibit tanaman konservasi lahan kritis dan pesisir (bibit)	100 bibit	21,037,210	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 bibit	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha				1 Ha		
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha	135,837,097	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Ha	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Penambahan Jumlah Tanaman Peneduh di RTH	100 bibit				100 bibit		
2	11	4	2.01	5	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Lokasi Ekosistem Esensial (pesisir/perairan/kawasan dengan kekayaan geohéritage lainnya yang terpelihara/ dikelola yang dibangun atau dipelihara sarana prasarana dan atau infrastrukturnya (area)	1 lokasi	49,266,985	Kab. Situbondo, Kendit, Klatakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 lokasi	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase pelaku usaha yang mentaati komitmen sebagaimana tertuang dalam dokumen lingkungan UKL-UPL/ Amdal	10 %	18,146,300			10 %	19,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Prosentase pemberian rekomendasi perijinan teknis terhadap pelaku usaha yang mengajukan rekomendasi	100 %				100 %		
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku Usaha yang mengetahui dan atau mendapatkan sosialisasi peraturan perundangan dan/atau NSPM Bidang Lingkungan Hidup (Norma Standart Pedoman dan Manual)	50 Pelaku Usaha	18,146,300			50 Pelaku Usaha	19,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah layanan bidang lingkungan hidup yang ditangani	7 jenis pelayanan	10,370,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 jenis pelayanan	11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Pembinaan atau sosialisasi bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan	2 kali				2 kali		
						Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen				1 Dokumen		
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	7,776,300	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	8,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Jumlah pelaku usaha atau kegiatan yang diawasi	75 pengusaha				75 pengusaha		
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	10 lembaga kelompok masyarakat	30,000,000			10 lembaga kelompok masyarakat	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	9	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan/kecamatan yang kebersihan dan pengelolaan persampahannya tertangani	9 kawasan	30,000,000			9 kawasan	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Desa Berseri yang terbentuk	5 desa	30,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 desa	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas				10 Entitas		
						Jumlah sekolah Adiwiyata terbentuk	5 sekolah				5 sekolah		
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	100 %	54,344,200			100 %	55,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	prosentase pengaduan masyarakat terhadap pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan yang telah ditindaklanjuti	100 %	54,344,200			100 %	55,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen	54,344,200	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						prosentase pengaduan masyarakat terhadap pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan yang telah ditindaklanjuti	100 persen				100 persen		
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase peningkatan timbulan sampah yang tertangani	99 %	1,952,700,000			99 %	570,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Prosentase penanganan sampah (pengolahan dan pemrosesan akhir)	72 %	1,952,700,000			72 %	570,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1 Ton	25,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Ton	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah TPST3R dan TPA yang terkelola	1 Unit				1 Unit		
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah bank sampah yang beroperasi melakukan pengelolaan sampah di sumbernya	7 Unit	115,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah pemulung yang mengikuti Pelatihan	25 orang				25 orang		
						Jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan sampah	25 orang				25 orang		
						Jumlah pondok pesantren yang mengikuti program eco pesantren	1 pesantren				1 pesantren		
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	15 Unit	1,812,700,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Unit	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			8,399,657,064				10,209,631,243	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.70 A	7,913,477,809			82.70 A	9,708,078,483	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	39,356,300			100 %	43,291,930	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8,391,300	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	9,230,430	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,262,500	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5,788,750	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,733,500	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6,306,850	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,552,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5,007,200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9,955,100	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10,950,610	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5,461,900	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	6,008,090	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	3,279,083,337			100 %	3,613,509,516	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	3,105,201,307	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	34 Orang/bulan	3,440,601,693	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	161,793,100	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	159,610,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12,088,930	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	13,297,823	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	72,588,226			100 %	240,519,649	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	34 Paket	7,405,200	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	34 Paket	8,145,720	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	91 Orang	65,183,026	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	91 Orang	232,373,929	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	2,706,625,580			100 %	2,466,947,714	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,684,800	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	18,353,280	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,209,098,980	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Paket	1,768,726,454	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	126,436,200	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	139,079,820	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,552,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,907,200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	22,281,600	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	24,509,760	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	328,572,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	512,371,200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	119,577,246			100 %	1,371,626,362	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6						7	8	9	10	11	12	13	14
2	12	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Unit	89,577,246	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	29 Unit	104,219,720	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	137 Unit	30,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	137 Unit	1,267,406,642	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,399,388,820			100 %	1,622,340,852	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6,998,500	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	76,983,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	308,108,400	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	352,647,240	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,084,281,920	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	1,192,710,112	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	296,858,300			100 %	349,842,460	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	74,036,500	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	27 Unit	81,440,150	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	140,131,800	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	154,144,980	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	39,798,330	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	67,690,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	74,459,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase kartu identitas anak (KIA) yang dicetak	100 %	82,945,010			100 %	56,039,511	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Prosentase kartu keluarga yang diterbitkan	100 %				100 %		
						Prosentase wajib KTP el yang dicetak	100 %				100 %		
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Prosentase terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	100 %	82,945,010			100 %	56,039,511	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2	2.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	64350 dokumen	35,588,520	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	64350 dokumen	39,147,372	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 laporan	47,356,490	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	16,892,139	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Akta Kelahiran yang diterbitkan	100 %	143,763,310			100 %	173,224,821	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Prosentase penduduk yang memiliki Akta Kematian	74 %				74 %		
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Prosentase terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	100 %	98,049,510			100 %	122,939,641	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	10924 dokumen	46,221,710	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10924 dokumen	77,836,561	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	40 layanan	38,067,800	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 layanan	6,674,580	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3	2.01	5	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	8 paket	13,760,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 paket	38,428,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Prosentase terselenggaranya pencatatan sipil	100 %	45,713,800			100 %	50,285,180	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	12	3	2.02	8	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	45,713,800	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	50,285,180	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	100 %	246,402,235			100 %	257,912,858	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Prosentase pelaporan data SIAK yang sesuai pedoman dan tepat waktu	100 %				100 %		
						Prosentase pemutakhiran data penduduk	35 %				35 %		
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Prosentase tersusunnya data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	100 %	52,963,010			100 %	48,755,311	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	52,963,010	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	48,755,311	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase Terlaksananya pengelolaan informasi adminstrasi kependudukan	100 %	117,896,440			100 %	143,308,484	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 dokumen	6,193,100	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 dokumen	6,812,410	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.03	6	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	5 dokumen	25,655,100	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 dokumen	27,230,610	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5 laporan	86,048,240	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 laporan	109,265,464	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100 %	75,542,785			100 %	65,849,063	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.04	1	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	23,687,170	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	11,975,887	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.04	3	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	51,855,615	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	53,873,176	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Prosentase data perkembangan kependudukan	100 %	13,068,700			100 %	14,375,570	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	5	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Prosentase Tersusunnya Dokumen Profil Kependudukan	100 %	13,068,700			100 %	14,375,570	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 dokumen	13,068,700	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	14,375,570	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			6,930,463,252				7,711,443,769	
2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat desa yang tersusun	14 Dokumen	4,010,463,252			14 Dokumen	4,036,714,864	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat desa yang tersusun	14 Dokumen	46,850,000			14 Dokumen	46,300,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2,350,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	2,350,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	13	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,400,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2,400,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	2,400,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	1,850,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2,400,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	2,400,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	27,300,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Laporan	27,300,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang di susun	6 laporan	2,899,027,389			6 laporan	3,082,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2,735,027,389	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Orang/bulan	3,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	150,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Dokumen	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	8,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	4,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Sub Kegiatan	7,000,000			1 Sub Kegiatan	7,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	7,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Paket	7,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah	6 Sub Kegiatan	214,950,000			6 Sub Kegiatan	175,414,864	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	8,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	17,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	6,950,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	6,950,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Laporan	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	150,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Laporan	118,464,864	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sub kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 Sub Kegiatan	145,635,863			3 Sub Kegiatan	135,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit Roda 2	70,635,863	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit Roda 2	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	40 Jenis	30,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Jenis	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	45,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	45,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Sub Kegiatan	441,000,000			3 Sub Kegiatan	320,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	13	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	1,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300 Laporan	1,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 unit	120,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 unit	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	23 orang	320,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23 orang	199,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan pemeliharaan barang milikdaerah penunjang urusan pemerintah daerah	4 Sub Kegiatan	256,000,000			4 Sub Kegiatan	271,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	200,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	230,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 Unit	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	16,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Unit	16,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang mampu meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa	132 Desa	1,510,000,000			132 Desa	1,432,728,905	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan penataan	132 Desa	1,510,000,000			132 Desa	1,432,728,905	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	56,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	6 Dokumen	600,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	406,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	200,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	600,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	110,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	396 Orang	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	396 Orang	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	400,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	210,228,905	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mampu meningkatkan kinerja masyarakat	136 Lembaga	1,410,000,000			136 Lembaga	2,242,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mampu meningkatkan kinerja masyarakat	136 lembaga	1,410,000,000			136 lembaga	2,242,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	136 Lembaga	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	136 Lembaga	262,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5	2.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	110,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	80,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1,000,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			34,377,965,059				44,449,000,000	
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Daerah	82.13 Nilai	23,915,965,059			82.13 Nilai	32,029,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	52,000,000			100 %	95,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja)	1 dokumen	5,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	7,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	7,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	7,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	7,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	7,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (LPPD dan IKM)	2 laporan	27,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 laporan	60,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	6,605,406,266			100 %	7,708,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	59 orang/bulan	6,449,406,266	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	59 orang/bulan	7,550,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	150,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	150,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	6,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	8,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	4,000,000			100 %	5,000,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	15	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	4,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	5,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	7,000,000			100 %	20,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	7,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	20,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	376,000,000			100 %	566,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 jenis	8,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 jenis	20,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatanrumah tangga yang disediakan	20 paket	7,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 paket	10,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	30 paket	45,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 paket	60,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20 paket	150,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 paket	150,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	2 dokumen	6,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	6,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	10,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	20,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	150,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	300,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	16,607,685,700			100 %	23,005,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	2,500,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	5,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	13,755,720,300	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	20,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah juru parkir yang dibayar	150 orang	2,849,465,400	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150 orang	3,000,000,000	Dinas Perhubungan
						Jumlah operator RTTMC yang dibayar	10 orang				10 orang		
						Jumlah operator sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah yang dibayar	2 orang				2 orang		
						Jumlah penjaga kantor yang dibayar	2 orang				2 orang		
						Jumlah petugas front office yang dibayar	2 orang				2 orang		
						Jumlah petugas kebersihan yang dibayar	19 orang				19 orang		
						Jumlah petugas kepelabuhanan yang dibayar	26 orang				26 orang		
						Jumlah petugas lalu lintas yang dibayar	33 orang				33 orang		
						Jumlah petugas PJU yang dibayar	11 orang				11 orang		
						Jumlah pra uji kir yang dibayar	15 orang				15 orang		
						Jumlah tenaga ABK yang dibayar	3 orang				3 orang		
						Jumlah tenaga akuntansi yang dibayar	1 orang				1 orang		
						Jumlah tenaga THLP yang dibayar	2 orang				2 orang		
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	263,873,093			100 %	630,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	42 unit	243,873,093	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	42 unit	600,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	42 unit	20,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	42 unit	30,000,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	5.25 %	10,457,000,000			5.25 %	12,410,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan perlengkapan jalan	32.4 %	9,678,000,000			32.4 %	10,850,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	9,608,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	10,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	25 Unit	10,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Unit		0 Dinas Perhubungan
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Kegiatan pemeliharaan traffic light dll dan pemeliharaan PJU)	2 Unit	60,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	850,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Prosentase peningkatan pendapatan parkir	3.13 %	410,000,000			3.13 %	700,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Kegiatan Parkir)	1 Laporan	410,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	700,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase angkutan umum yang lulus uji	92.13 %	240,000,000			92.13 %	260,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4000 Dokumen	160,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4000 Dokumen	180,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	80,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Unit	80,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan manajemen rekayasa dan pengamanan lalu lintas yang disusun	2 dokumen	94,000,000			2 dokumen	525,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.06	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Kegiatan Manrek)	1 Dokumen	9,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Kegiatan PAM)	1 Laporan	75,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	450,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	10,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	35,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen andalalin yang disusun	1 dokumen	10,000,000			1 dokumen	35,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.07	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 Laporan	10,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	35,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum yang tersedia	6716 kend	25,000,000			6716 kend	40,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Kegiatan Balik Gratis)	1 Laporan	25,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	40,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Prosentase Pelayanan Angkutan Laut	80 %	5,000,000			80 %	10,000,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	15	3	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah fasilitas pelabuhan yang terbangun	5 fasilitas	5,000,000			5 fasilitas	10,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	3	2.12	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (kegiatan posko jangkar)	1 Laporan	5,000,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	10,000,000	Dinas Perhubungan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			9,536,649,962				12,809,417,340	
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	8,977,057,983			100 %	11,837,213,340	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	135,885,000			100 %	147,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	6,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	6,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	9,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	6,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	6,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKIP, LPPD, LKPJ	3 Dokumen	8,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	9,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen IKM	1 Dokumen	103,385,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	105,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3,091,473,393			100 %	3,828,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	2,909,373,393	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	37 Orang/bulan	3,600,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 Orang/bulan	170,100,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Orang/bulan	180,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	24,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	6,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	24,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2,378,175,285			100 %	4,250,263,540	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas dan operasional	122 stell	33,600,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	122 stell	36,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pertauran Perundang-undangan (DBHCHT)	12 Kegiatan/Bln	2,344,575,285	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	12 Kegiatan/Bln	4,214,263,540	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	694,379,350			100 %	758,200,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	300 item	17,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300 item	18,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Unit	149,872,500	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Unit	160,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28 Jenis	43,249,750	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	28 Jenis	45,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Jenis	34,811,100	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Jenis	36,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Jenis	4,200,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Jenis	5,700,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	105 Orang	69,080,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	105 Orang	73,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	375,666,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	420,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2,357,714,171			100 %	2,502,699,800	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2,580,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	3,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon, listrik, air dan internet yang terbayar	12 Bulan	1,164,033,821	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	1,260,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	56 Orang/bulan	1,191,100,350	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	56 Orang/bulan	1,239,699,800	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	319,430,784			100 %	350,550,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	150,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Unit	160,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	11,550,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Unit	11,550,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	80,180,784	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	96,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit AC Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	25,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	27,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	52,700,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Unit	56,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Akses Informasi	71 %	168,667,250			71 %	307,604,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Persentase Kualitas Informasi Publik	75 %				75 %		
						Persentase Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Informasi yang Dibangun	50 %				50 %		
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi yang dibangun Pemerintah Daerah	450 Informasi	168,667,250			450 Informasi	307,604,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Persentase Informasi yang disebarluaskan melalui Komunitas Masyarakat/Mitra strategis pemerintah daerah	73 %				73 %		
						Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	66 %				66 %		
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	53,676,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	155,604,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Jumlah Infomrasi yang dibangun dalam pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	365 Informasi				365 Informasi		
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	2 Dokumen	21,661,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah OPD yang Aktif Selaku PPID Pembantu di Kab.Situbondo	43 OPD				43 OPD		
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	14,814,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Komunitas yang menjadi mitra penyebarluasan informasi	144 Komunitas				144 Komunitas		
2	16	2	2.01	9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	12 Dokumen	27,101,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Laporan Penanganan isu-isu yang berdampak Negatif terhadap Reputasi/Citra Lembaga Pemerintah Daerah	12 Kali				12 Kali		
2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Fasilitas untuk Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	12 Laporan	21,058,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	22,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah OPD Yang Melakukan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Sesuai Peraturan di Kabupaten Situbondo	43 OPD				43 OPD		
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	30,356,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	55,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2 Laporan				2 Laporan		
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfosandi	80 %	390,924,729			80 %	664,600,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	80 %				80 %		
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang dapat berbagi pakai	90 %	56,827,684			90 %	62,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	85 %				85 %		
						Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100 %				100 %		
						Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	90 %				90 %		
						Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	90 %				90 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	90 %				90 %		
						Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	90 %				90 %		
2	16	3	2.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Server dan aplikasi pengelolaan Server, domain dan sub domain hosting website / aplikasi yang terbeli	5 Unit	23,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	26,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pendampingan dan sinkronisasi, fasilitasi OPD dan Desa se Kabupaten Situbondo	52 OPD/Pemdes	33,827,684	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	52 OPD/Pemdes	36,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Persentase Fasilitasi permintaan fasilitasi Kegiatan Pengelolaan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Situbondo	100 Persen				100 Persen		
2	16	3	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	40 %	334,097,045			40 %	602,600,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	90 %				90 %		
						Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	90 %				90 %		
						Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	90 %				90 %		
						Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	90 %				90 %		
						Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	90 %				90 %		
						Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1 Tersedia				1 Tersedia		
						Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	1 Tersedia				1 Tersedia		
2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi/pendampingan movev OPD	4 Kali	6,600,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Kali	8,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan				12 Bulan		
						Pengawasan Pemanfaatan TIK OPD (On Site)	1 Kali				1 Kali		
2	16	3	2.02	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Fasilitasi Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemkab Situbondo	4 Kali	142,100,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Kali	400,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Pendampingan penyusunan dokumen evaluasi SPBE	12 Bulan				12 Bulan		
2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Pusat Server dan Pusat Operasional Jaringan Komunikasi Data Pemerintah Kabupaten Situbondo	12 Bulan	21,632,655	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	23,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Peningkatan Kapasitas Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Melalui Pembangunan pengembangan kapasitas Infrastruktur TIK	2 Paket	5,714,390	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	7,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah pendampingan dan fasilitasi Pengembangan Aplikasi dan/atau Desain Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	20 kali	51,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 kali	53,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Pengawasan titik Infrastruktur Teknologi dan Teknologi di Kabupaten Situbondo	170 Titik	66,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	170 Titik	67,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	12 Bulan				12 Bulan		
2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Fasilitasi pelaksanaan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112	12 Bulan	16,700,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	17,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Konsultasi masterplan smart city	2 Kali				2 Kali		
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pengelolaan sumber daya TIK Kabupaten	1 Tahun	17,200,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	18,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah SDM ASN/Non-ASN memiliki sertifikat kemampuan TIK	85 Orang				85 Orang		
2	16	3	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Konsultasi Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	12 Bulan	6,600,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	7,600,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Koordinasi Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	3 Kali				3 Kali		
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			21,373,200				23,100,000	
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik yang valid (Data Sektoral dan data Wilayah)	92 %	21,373,200			92 %	23,100,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral	100 %	21,373,200			100 %	23,100,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Sektoral	150 Jenis	16,568,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150 Jenis	17,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	2.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Terbangun	10 Jenis	4,805,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Jenis	5,600,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			173,000,000				213,000,000	
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Aplikasi,Data dan informasi daerah yang diamankan (Radiogram,Aplikasi dan Website Layanan Publik, Dokumen dengan sertifikat Elektronik)	100 %	173,000,000			100 %	213,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Persentase Dokumen dengan sertifikat Elektronik yang diamankan	100 %				100 %		
						Persentase Sistem elektronik / asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100 %				100 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI)	100 %				100 %		
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	37,000,000			1 Dokumen	38,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Dokumen				12 Dokumen		
2	21	2	2.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	37,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	38,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik pada PHKS (Pola Hubungan Komunikasi Sandi) yang diamankan	100 %	136,000,000			100 %	175,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	2.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Belanja Certificate SSL dan Lisense Firewall	4 Paket	136,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	175,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			12,126,215,895				15,519,000,000	
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 A	11,526,215,895			86 A	14,479,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	11 dokumen	52,000,000			11 dokumen	114,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	20,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	35,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	35,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	3 jenis	7,041,706,375			3 jenis	9,375,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	6,679,806,375	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70 Orang/bulan	9,000,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	351,900,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	360,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	15,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan pada OPD	1 jenis	10,000,000			1 jenis	20,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	20,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	1 jenis	600,000,000			1 jenis	650,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	600,000,000	Kab. Situbondo	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	100 Orang	650,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	7 jenis	328,000,000			7 jenis	515,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	20,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	50,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	60,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	225,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	365 Dokumen	20,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	15,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	175,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	3 jenis	3,224,509,520			3 jenis	3,455,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	5,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	600,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	650,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,622,509,520	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	2,800,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	3 jenis	270,000,000			3 jenis	350,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	225,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70 Unit	240,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Unit	60,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	20,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	50,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas	35 %	50,000,000			35 %	80,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pemeriksaan dan pengawasan	50 koperasi	50,000,000			50 koperasi	80,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Unit Usaha	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Unit Usaha	80,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang difasilitasi pendidikan dan latihan perkoperasian	23 %	450,000,000			23 %	750,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus/anggota koperasi yang memperoleh pendidikan dan latihan perkoperasian	120 orang	250,000,000			120 orang	400,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Orang	250,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Orang	400,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
2	17	5	2.02		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Pendidikan dan Latihan UKM	40 orang	200,000,000			40 orang	350,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	5	2.02	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah usaha mikro yang memperoleh pemahaman dan pengetahuan UKM serta kapasitas dan kompetensi SDM	60 Orang	200,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	60 Orang	350,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	1.44 %	100,000,000			1.44 %	210,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	jumlah usaha mikro yang terbina dalam pendataan, pemberdayaan kemitraan, kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	150 orang	100,000,000			150 orang	210,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	40 Unit Usaha	20,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Unit Usaha	50,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	3 Orang	40,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Orang	80,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
						Jumlah usaha mikro yang mendapatkan sosialisasi dan money SHAT	150 Orang				150 Orang		
2	17	7	2.01	6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	40 Orang	40,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Orang	80,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase harga barang kebutuhan pokok yang stabil	17 %	497,654,000			17 %	47,654,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Harga rata-rata sembako pertahun	36 komoditi	497,654,000			36 komoditi	47,654,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	497,654,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	47,654,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase produk unggulan yang memenuhi standar perdagangan antar daerah	16 %	47,655,805			16 %	47,655,805	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
3	30	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk unggulan yang berdaya saing	8 produk	47,655,805			8 produk	47,655,805	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
3	30	5	2.01	4	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	12 Pelaku Usaha	12,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Pelaku Usaha	12,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
3	30	5	2.01	5	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	25 Produk	28,655,805	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Produk	28,655,805	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
3	30	5	2.01	6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	20 Pelaku Usaha	7,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Pelaku Usaha	7,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTPP sesuai standar metrologian	17 %	150,000,000			17 %	150,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTPP yang sudah ditera/tera ulang	1000 alat	150,000,000			1000 alat	150,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	100 Unit	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Unit	100,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50 Orang	25,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang	25,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	30	6	2.01	3	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	25 Unit	25,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Unit	25,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase jenis produk yang beredar ditoko modern serta showroom di kabupaten	15 %	150,000,000			15 %	100,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Jenis barang yang diminati masyarakat	8 jenis	150,000,000			8 jenis	100,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
3	30	7	2.01	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	30 UMKM	150,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 UMKM	100,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1,419,000,000				1,500,000,000	
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	prosentase potensi sumber daya alam yang Kabupaten Situbondo yang dikembangkan	17 %	1,419,000,000			17 %	1,500,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber daya alam yang disusun	1 dokumen	1,419,000,000			1 dokumen	1,500,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	300,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	1,119,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	1,200,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5,783,781,919				0	
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	85,26 B	5,256,789,389			85,26 B	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Yang Tercapai	100 %	70,781,914			100 %	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 dokumen	15,729,722	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,419,431	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,117,016	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,419,431	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,117,016	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	27,829,613	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	18,149,685	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 %	2,631,227,224			100 %		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2,490,077,430	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23 Orang/bulan		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	135,100,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,049,794	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Profesionalitas ASN	100 %	15,543,543			100 %		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas ASN beserta kelengkapannya yg dibeli	36 stel	15,543,543	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 stel		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang Tersedianya	100 %	308,581,761			100 %		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dibeli	6 jenis	12,098,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 jenis		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang dibelanjakan	48 jenis	70,814,540	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 jenis		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	30 Jenis	50,341,221	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Jenis		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	5,328,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Dokumen		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	20,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Laporan		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	150,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Laporan		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir	100 %	1,500,000,000			100 %		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	500,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 Unit		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	500,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Unit		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	18	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	500,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang SKPD	100 %	473,661,847			100 %		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang dibeli	200 materai	1,760,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 materai		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	60 rekening	100,375,900	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 rekening		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	360 orang	371,525,947	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	360 orang		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	256,993,100			100 %		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	160,993,100	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 Unit		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	2 gedung	60,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 gedung		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	24,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Unit		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	12,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Unit		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Dokumen Pengembangan Iklim yang tersusun	100 %	60,000,000			100 %		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi Investasi Daerah yang tersusun	100 %	60,000,000			100 %		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Meningkatnya Minat Investasi	100 %	165,000,000			100 %		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100 %	165,000,000			100 %		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	165,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85,5 B	201,992,530			85,5 B		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan perizinan/non izin yang tepat waktu sesuai SOP	100 %	201,992,530			100 %		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2000 Pelaku Usaha	190,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2000 Pelaku Usaha		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pengaduan masyarakat yang dilayani	100 %	11,992,530	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dapat diakses	100 %	100,000,000			100 %		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100 %	100,000,000			100 %		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah aplikasi SIP yang diintegrasikan	2 SIP	100,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 SIP		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Jumlah laporan bulanan yang di susun	12 Laporan				12 Laporan		
						jumlah Penyebaran media cetak yang dilaksanakan	2 Jenis				2 Jenis		
						Jumlah Website yang dkembangkan	1 website				1 website		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			4,169,854,861				1,902,500,000	
2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	3,820,758,336			8 Dokumen	1,202,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Jumlah jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Jenis				6 Jenis		
2	23	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Terlaksana	6 Kegiatan	18,965,300			6 Kegiatan	57,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5,100,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	10,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,750,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,830,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	9,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,100,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,830,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	9,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	4,355,300	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	9,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan administrasi keuangan yang dilaksanakan	2 Jenis	3,080,527,536			2 Jenis	150,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bulan	2,946,651,986	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	420 Orang/bulan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	130,800,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	140,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	3,075,550	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	30 Pegawai	10,962,000			30 Pegawai	12,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 Orang	10,962,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	27 Orang	12,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis urusan kantor yang dilayani	7 Jenis	163,600,000			7 Jenis	318,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Jenis	6,300,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Jenis	27,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Jenis	27,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Jenis	35,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Jenis	24,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Jenis	35,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan yang Disediakan	24 Jenis/bulan	6,300,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Jenis/bulan	8,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	12,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	80,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	175,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Penunjang Sarana dan Prasarana Yang Dibeli	1 Jenis	61,657,500			1 Jenis	102,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	61,657,500	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Unit	102,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang kantor yang tersedia	3 Jenis	248,296,000			3 Jenis	273,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	7,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82,296,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	102,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	164,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	164,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis penunjang sarana dan prasarana yang dipelihara	4 Jenis	236,750,000			4 Jenis	290,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	106,750,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 unit	120,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6					7		8	9	10	11	12	13	14
2	23	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	35,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 unit	45,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 Unit	35,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Gedung	75,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Gedung	90,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Jenis Pengelolaan Perpustakaan yang dilaksanakan	4 Jenis	339,096,525			4 Jenis	660,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pengelolaan Perpustakaan yang dilaksanakan	4 Jasa	264,096,525			4 Jasa	485,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	40 Perpustakaan	18,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Perpustakaan	30,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75 Orang	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75 Orang	80,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	3 Layanan	111,096,525	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Layanan	200,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	95,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1000 Eksemplar	175,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pembudayaan Gemar Membaca yang dilaksanakan	2 Jenis	75,000,000			2 Jenis	175,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	1 Lokus	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Lokus	75,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	10 perpustakaan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 perpustakaan	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah jenis Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang dilestarikan	1 Jenis	10,000,000			1 Jenis	40,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	3	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang dilestarikan	1 Jenis	10,000,000			1 Jenis	40,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	3	2.01	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	1 Eksemplar	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Eksemplar	40,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			248,073,516				248,073,516	
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah jenis arsip dinamis yang dikelola	1 jenis	248,073,516			1 jenis	248,073,516	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis arsip dinamis yang dikelola	1 Jenis	69,819,300			1 Jenis	69,819,300	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Laporan	69,819,300	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 Laporan	69,819,300	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis arsip statis yang dikelola	1 Jenis	79,809,916			1 Jenis	79,809,916	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100 Arsip	79,809,916	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Arsip	79,809,916	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	24	2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah jenis laporan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kab/kota	1 Jenis	98,444,300			1 Jenis	98,444,300	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	16 Laporan	98,444,300	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Laporan	98,444,300	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			14,110,365,932				15,293,824,967	
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	87.5 A	12,293,305,932			87.5 A	11,714,402,800	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	90,571,232			12 Laporan	119,564,100	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	20,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Dokumen	35,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8,696,500	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	8,664,400	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6,874,732	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	5,899,700	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	25,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	45,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	45,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil Perencanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	7,201,967,840			1 Laporan	7,871,016,300	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/bulan	6,960,217,840	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	83 Orang/bulan	7,500,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	231,750,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	360,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	11,016,300	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Laporan Inventaris Barang SKPD	1 Laporan	19,887,600			1 Laporan	19,887,600	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4,887,600	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	4,887,600	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	15,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Laporan	451,171,200			6 Laporan	425,645,990	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,087,200	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	6,087,200	Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	25	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	35,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	37,061,329	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,204,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6,164,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	66,030,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	381,880,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	275,303,461	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	2,410,800,000			4 Laporan	989,724,750	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	15,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	75,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	2,395,800,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	914,724,750	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	1,910,608,060			1 Paket	2,102,348,060	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,410,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	4,150,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	510,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	700,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,398,198,060	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	1,398,198,060	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan	198,300,000			6 Laporan	171,381,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	150,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Unit	121,381,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	33,300,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	37 Unit	40,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	15,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	10,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	3 Laporan	10,000,000			3 Laporan	14,835,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	5,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7,835,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	5,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	7,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Prosentase nelayan yang menerima manfaat	27 %	1,026,150,000			27 %	1,549,422,167	Dinas Peternakan dan Perikanan
						Prosentase sarana dan prasarana TPI yang ditingkatkan	31 %				31 %		
3	25	3	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana prasarana dan informasi nelayan yang ditingkatkan	7 unit	50,000,000			7 unit	339,675,948	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	3	2.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	6 Unit	50,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Unit	339,675,948	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	3	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang meningkat kapasitas	26 kelompok	451,150,000			26 kelompok	200,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	451,150,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Orang	200,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	3	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang ditingkatkan pengelolannya	10 TPI	525,000,000			10 TPI	1,009,746,219	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	3	2.03	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3 Layanan	525,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Layanan	1,009,746,219	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Prosentase Kelompok Penerima Manfaat	51 %	602,830,000			51 %	1,650,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
						Prosentase pembudidaya yang menerapkan teknologi yang direkomendasikan	38 %				38 %		
3	25	4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Penerima Manfaat	20 kelompok	75,000,000			20 kelompok	275,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	4	2.02	3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	5 Kelompok	20,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Kelompok	75,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	55,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Kelompok	200,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya yang menerapkan teknologi yang direkomendasikan	9 pembudidaya	527,830,000			9 pembudidaya	1,375,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	30 Orang	85,830,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Orang	75,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	4	2.04	7	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	50 Orang	442,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang	1,300,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase POKLAHSAR yang meningkat kelas kelompoknya	19 %	188,080,000			19 %	380,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Manfaat	75 orang	42,080,000			75 orang	80,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	7 Unit Usaha	42,080,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit Usaha	80,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Masyarakat Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan yang difasilitasi	300 orang	146,000,000			300 orang	300,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	6	2.03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Ton	146,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Ton	300,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			7,834,793,957				6,795,000,000	
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Kelompok Ternak Yang Menerapkan Good Farming Practice (GFP)	20 %	1,078,080,000			20 %	3,550,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
						Prosentase Peningkatan Populasi Ternak yang dihasilkan melalui Teknologi Peternakan	45 %				45 %		
3	27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan Populasi Ternak dan Kawasan Peternakan Terpadu	17 Kecamatan	913,080,000			17 Kecamatan	3,050,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	98,080,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1,750,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	815,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1,300,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	2	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan fasilitasi Kelompok ternak yang menerapkan teknologi dan tersedianya data pakan ternak 2. Jumlah ketersediaan bibit ternak dan HPT	3 wilayah	165,000,000			3 wilayah	500,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	2	2.05	4	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	4598459 Ton	165,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4598459 Ton	500,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Peternakan	100 %	5,704,885,557			100 %	1,800,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1 Paket	5,704,885,557			1 Paket	1,800,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Paket	5,704,885,557	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	1,800,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Peningkatan Ternak Besar, Ternak Kecil, unggas yang Sehat	93 %	1,012,828,400			93 %	745,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas dan Hewan pembawa rabies (HPR) yang Dilayani	17 Kecamatan	739,020,000			17 Kecamatan	400,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan	739,020,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	400,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	4	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Yang di Pantau	3 wilayah	7,320,000			3 wilayah	10,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	4	2.02	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	7,320,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	10,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	4	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel yang di uji Laboratorium	469 Sampel	70,448,400			469 Sampel	60,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	4	2.03	1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	70,448,400	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	60,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	27	4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Produk Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Serta Terlaksananya Kesejahteraan Hewan	3 wilayah	196,040,000			3 wilayah	275,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	3 wilayah	179,800,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 wilayah	200,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	16,240,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	75,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase pembinaan kepada peternak maupun petugas teknis peternakan	100 %	39,000,000			100 %	700,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3 wilayah	39,000,000			3 wilayah	700,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	39,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	700,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			2,612,100,000				4,660,000,000	
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pelaksanaan pembinaan/pelatihan kepemudaan	6 kegiatan	1,112,100,000			6 kegiatan	1,820,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan/Pelatihan	250 orang	762,100,000			250 orang	1,020,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50 Orang	100,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang	170,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	2	2.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	200 Orang	662,100,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Orang	850,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	2	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	10 organisasi	350,000,000			10 organisasi	800,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 Dokumen	350,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	800,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet daerah yang mengikuti kejuaraan tingkat regional	70 atlet	1,500,000,000			70 atlet	2,840,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	3	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabor yang disediakan sarana prasarana olahraga	8 cabor	130,000,000			8 cabor	660,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Unit	130,000,000	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	660,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
									Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan	750 orang	150,000,000			750 orang	350,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah yang mengikuti pembinaan	90 orang	1,220,000,000			90 orang	1,830,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
						Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	10 organisasi				10 organisasi		
2	19	3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	150 Orang	1,150,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150 Orang	1,500,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	3	2.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	20 Orang	50,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Orang	300,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	3	2.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektor Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Dokumen	20,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	30,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			7,327,513,375				9,073,300,000	
3	26	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	capaian Nilai SAKIP PD	85,5 nilai	4,697,513,375			85,5 nilai	5,125,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
						Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	100 persen				100 persen		
3	26	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	9 Dokumen	89,000,000			9 Dokumen	134,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	25,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	42,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	12,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	14,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	10,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	12,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	12,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	14,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	10,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	12,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	40,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah karyawan yang terbayarkan	28 karyawan	3,444,955,395			28 karyawan	3,242,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/bulan	3,099,955,395	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	28 orang/bulan	2,950,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	26	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	270,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	190,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 dokumen	20,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	45,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	17,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	17,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	16,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	18,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	22,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	22,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah kelengkapan dinas yang disediakan	60 stel	15,000,000			60 stel	17,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	15,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 dokumen	17,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah rapat/koordinasi yang dilaksanakan	45 kali	209,123,900			45 kali	494,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	20,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 paket	22,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	2,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 paket	90,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 paket	50,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 paket	65,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	20,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 paket	35,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	12,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	107,123,900	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Laporan	270,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang yang diadakan	11 jenis	50,000,000			11 jenis	120,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	50,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 unit	120,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disediakan	28 orang	510,000,000			28 orang	456,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	6,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 laporan	6,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	26	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	150,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	354,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	300,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang penunjang yang terpelihara	16 unit	379,434,080			16 unit	662,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	107,539,500	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 unit	300,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	12,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 unit	12,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	209,894,580	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 unit	280,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	70,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah ODTW yang dikembangkan	25 ODTW	1,650,000,000			25 ODTW	2,942,500,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku di DPK yang dibina	120 orang	1,550,000,000			120 orang	1,630,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	1,500,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Lokasi	300,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 unit	50,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Trigono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 unit	1,330,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	2	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi TDUP yang ditetapkan dan terstandarisasi	30 rekomendasi usaha	100,000,000			30 rekomendasi usaha	1,312,500,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	2	2.04	1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	1 dokumen	50,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	220,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	2	2.04	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	50,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	1,092,500,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah ODTW yang terpromosikan	12 ODTW	700,000,000			12 ODTW	655,800,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pemasaran tingkat nasional/internasional yang diikuti	6 event	700,000,000			6 event	655,800,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 dokumen	625,000,000	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 dokumen	105,800,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan				
									Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kelurahan				
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Laporan	75,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	550,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	150 orang	280,000,000			150 orang	350,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan/Pelatihan	150 orang	280,000,000			150 orang	350,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	5	2.01	4	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	20 orang	100,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 orang	200,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40 orang	180,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 orang	150,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			1,803,089,600				1,456,408,300	
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Prosentase Penyediaan Infrastruktur untuk Kedaualatan dan Kemandirian Pangan	1 Unit	1,000,000,000			1 Unit	1,000,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	2	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang disediakan	1 Unit	1,000,000,000			1 Unit	1,000,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	2	2.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	1 Unit	1,000,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	1 Unit	1,000,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	9 Dokumen	662,154,100			9 Dokumen	286,408,300	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	9 laporan				9 laporan		
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Jenis Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang disediakan	9 Dokumen	77,027,000			9 Dokumen	45,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Jenis kelompok bahan pangan yang dianalisis	11 Jenis	15,987,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Jenis	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga PanganJumlah jenis komoditas pangan strategis yang dipantau	23 Komoditas	28,040,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23 Komoditas	25,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah pelatihan kelembagaan Distribusi pangan yang dilaksanakan	2 Kali	33,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Kali	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Jenis Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang disediakan	9 Laporan	585,127,100			9 Laporan	241,408,300	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Jumlah Jenis Bahan Pangan yang di Analisa	6 Jenis	121,408,300	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Jenis	21,408,300	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang disediakan	2 Kelompok Tani	463,718,800	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Kelompok Tani	220,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase daerah rawan pangan yang tertanganiJumlah Jenis Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota yang ditangani	86 Laporan	31,456,800			86 Laporan	60,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota yang ditangani	86 Laporan	31,456,800			86 Laporan	60,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa rawan pangan yang terintervensian Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Desa	31,456,800	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Desa	60,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase capaian keamanan pangan segar	36 laporan	109,478,700			36 laporan	110,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	36 Laporan	109,478,700			36 Laporan	110,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	5	2.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negri Usaha Kecil yang mendapatkan Ijin Edar dan pembinaan	20 Usaha Pelaku	52,198,700	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Usaha Pelaku	50,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	5	2.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/KotaJumlah bahan pangan segar asal tumbuhan yang diujikan	10 Jenis	57,280,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Jenis	60,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			38,017,162,995				34,887,000,000	
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	81,7 A	12,299,023,931			81,7 A	14,367,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	7 Dokumen	73,000,000			7 Dokumen	282,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	39,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	12,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	13,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	17,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	32,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	175,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan	6 Dokumen	10,961,784,463			6 Dokumen	12,361,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan	10,688,384,463	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	104 Orang/bulan	12,020,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga ASN Pelaksana Administrasi yang terbayar	22 Orang	260,400,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 Orang	303,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	12,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	26,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	6 Jenis	202,500,000			6 Jenis	438,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	42,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	30,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	23,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	16,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	12,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	165,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	315,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	10 jenis	966,000,000			10 jenis	1,019,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	225,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	289,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	741,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	730,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	10 Laporan	95,739,468			10 Laporan	267,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	80,739,468	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	241,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	15,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	26,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase sarana pertanian yang dimanfaatkan	100 %	14,253,439,064			100 %	10,010,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang dilaksanakan	10 Laporan	14,253,439,064			10 Laporan	10,010,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5 Laporan	14,073,439,064	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	10,000,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
										Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukng Pertanian	1 Laporan	180,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	10,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	100 %	10,909,000,000			100 %	9,210,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian yang dikembangkan	10 Unit	705,000,000			10 Unit	1,110,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dokumen	250,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	160,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	20 Laporan	455,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Laporan	950,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian yang di bangun	34 Unit	10,204,000,000			34 Unit	8,100,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	11 Unit	4,514,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Unit	5,500,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	1,640,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	3	2.02	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2,000,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	2 Unit	1,100,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit	2,050,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Unit	1,500,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Bencana Pertanian tertangani dan terkendali	100 %	100,000,000			100 %	600,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	500 Hektar	100,000,000			500 Hektar	600,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Ha	600,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase kelompok tani yang melakukan pola usaha agribisnis	10 Unit	455,700,000			10 Unit	700,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan	10 Unit	455,700,000			10 Unit	700,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	150,200,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	100,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	40,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	5 Unit	70,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	10 Unit	190,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	450,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	7	2.01	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	75,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	80,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			321,712,470				410,000,000	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terlaksananya urusan penunjang di bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan pengoordinasian kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakvat	100 %	321,712,470			100 %	410,000,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen kesepakatan bersama yang dibuat	20 dokumen	275,712,470			20 dokumen	350,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	74,594,070	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	90,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Rapat Fasilitasi Forkopimda	4 Rapat				4 Rapat		
						Jumlah Rapat Koordinasi Administrasi Pemerintahan	12 Rapat				12 Rapat		
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	104,118,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	150,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Kecamatan yang mengikuti Penilaian Pelaksanaan PATEN	17 Kecamatan				17 Kecamatan		
						Jumlah Kecamatan yang mengikuti Penilaian Sinergisitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	17 Kecamatan				17 Kecamatan		
						Jumlah Rapat Koordinasi Urusan Administrasi Kecamatan dan Kewilayahan	10 Rapat				10 Rapat		
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	97,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	110,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen				2 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen				2 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2 Dokumen				2 Dokumen		
						Jumlah kegiatan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	2 Kegiatan				2 Kegiatan		
						Jumlah kegiatan Peringatan Hari Otonomi Daerah	2 Kegiatan				2 Kegiatan		
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen kesepakatan bersama yang dibuat	20 dokumen	46,000,000			20 dokumen	60,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	46,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	60,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen				15 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Kesepakatan Bersama	15 Dokumen				15 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja Sama	15 Dokumen				15 Dokumen		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			11,260,000,000				11,216,646,539	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terlaksananya urusan penunjang di bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan pengoordinasian kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat	100 %	11,260,000,000			100 %	11,216,646,539	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diambil	100 %	11,260,000,000			100 %	11,216,646,539	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1,645,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1,501,646,539	Sekretariat Daerah
						jumlah kegiatan bina mental spiritual yang difasilitasi	15 kegiatan				15 kegiatan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	5,435,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5,485,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	4,180,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4,230,000,000	Sekretariat Daerah
						jumlahkebijakan yang dilaksanakan	5 kebijakan				5 kebijakan		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			1,704,106,380				1,704,106,380	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terlaksananya urusan penunjang di bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan pengoordinasian kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat	100 %	1,704,106,380			100 %	1,704,106,380	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase penyusunan, pembahasan dan penetapan produk hukum daerah, keputusan Bupati, pendokumentasian dan publikasi produk hukum daerah dan penyelesaian kasus hukum, sosialisasi peraturan dan pelaporan aksi HAM yang dilaksanakan	100 %	1,704,106,380			100 %	1,704,106,380	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1 Dokumen	407,927,220	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	407,927,220	Sekretariat Daerah
						Persentase produk hukum yang diselesaikan	100 %				100 %		
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah dokumen pelaporan aksi ham	3 dokumen	836,878,160	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 dokumen	836,878,160	Sekretariat Daerah
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus				5 Kasus		
						Jumlah pembinaan keluarga sadar hukum yang dilaksanakan	6 kali				6 kali		
						Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	6 kali				6 kali		
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Jenis Buku Peraturan Perundang-Undangan yang dicetak dan dipublikasikan	5 jenis buku	459,301,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 jenis buku	459,301,000	Sekretariat Daerah
						Persentase Keputusan Bupati yang disusun dan ditetapkan	100 %				100 %		
						Persentase Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100 %				100 %		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			1,200,000,000				1,254,705,400	
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terlaksananya penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa	100 %	1,200,000,000			100 %	1,254,705,400	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang dijadikan dasar kebijakan	100 %	460,000,000			100 %	480,000,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	150,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	160,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	270,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	275,000,000	Sekretariat Daerah
										DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	40,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	45,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	jumlah dokumen Laporan Administrasi Pembangunan yang disusun	20 kali	460,517,000			20 kali	482,222,400	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	306,294,600	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	320,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	154,222,400	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	162,222,400	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pemantauan sumber daya alam yang dilaksanakan	100 %	279,483,000			100 %	292,483,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	162,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	172,000,000	Sekretariat Daerah
										DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	8,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	109,483,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	110,483,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			420,021,320				1,515,000,000	
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terlaksananya penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa	100 %	420,021,320			100 %	1,515,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	100 %	420,021,320			100 %	1,515,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	97,395,520	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	700,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	148,796,700	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	375,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang	173,829,100	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang	440,000,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			9,653,546,520				12,352,676,585	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan penunjang di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan	100 %	9,653,546,520			100 %	12,352,676,585	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang disusun	1 Dokumen	60,400,000			1 Dokumen	118,270,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.05	7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	4 Laporan	5,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	8,470,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	54,900,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45 Orang	109,800,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum	100 %	4,404,189,880			100 %	5,339,354,750	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	153,682,650	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	155,835,130	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	197,248,150	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	197,248,150	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	342,375,820	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	399,035,970	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	18,792,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 dokumen	31,090,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1,420,721,300	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	1,810,645,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2,271,369,960	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	2,745,500,500	Sekretariat Daerah
						Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan				4 Laporan		
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan	100 %	514,335,040			100 %	552,452,500	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	60,837,600	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	60,837,600	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	346,353,300	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19 Unit	346,353,300	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	107,144,140	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	145,261,600	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,959,846,370			100 %	2,691,550,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	11,550,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	11,550,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	286,785,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	395,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1,661,511,370	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	2,285,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	2,220,337,490			100 %	2,745,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	105 Unit	1,118,217,990	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	105 Unit	1,345,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	105 Unit	73,050,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	105 Unit	75,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	500,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	500,000,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	260,660,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	450,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	268,409,500	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Unit	375,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH yang dilaksanakan	100 %	177,863,200			100 %	303,769,700	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 paket	105,263,200	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 paket	201,769,700	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 orang	72,600,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 orang	102,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahantgaan Sekretariat Daerah	Persentase kerumahantgaan yang difasilitasi	100 %	316,574,540			100 %	602,279,635	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 paket	217,467,940	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	383,241,310	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 paket	99,106,600	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	219,038,325	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			850,000,000				1,862,944,000	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan penunjang di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan	100 %	850,000,000			100 %	1,862,944,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Terlaksananya penataan organisasi yang tepat waktu dan fungsi	100 %	850,000,000			100 %	1,862,944,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	275,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	537,886,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	75,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	250,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	280,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	721,650,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	200,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	298,100,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	20,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	55,308,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			1,022,295,000				1,022,295,000	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan penunjang di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan	100 %	1,022,295,000			100 %	1,022,295,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan tugas keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	100 %	1,022,295,000			100 %	1,022,295,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	467,554,320	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	467,554,320	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	382,247,400	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	382,247,400	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	172,493,280	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	172,493,280	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			17,240,252,687				19,329,291,128	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan penunjang di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan	100 %	17,240,252,687			100 %	19,329,291,128	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	347,000,000			100 %	406,949,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	42,370,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	60,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah dokumen Renja yang disusun	2 dokumen				2 dokumen		
						Jumlah dokumen Renstra yang disusun	1 dokumen				1 dokumen		
4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	37,513,500	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	37,513,500	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	37,513,500	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	37,513,500	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	37,513,500	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	37,513,500	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	37,513,500	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	37,513,500	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	49,630,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	75,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	104,946,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	121,895,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	14,032,513,498			100 %	15,783,613,139	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/bulan	12,773,138,398	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	135 Orang/bulan	14,495,738,039	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,124,375,100	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1,124,375,100	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120 Dokumen	60,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120 Dokumen	72,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	40,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	56,500,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	35,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	35,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100 %	70,000,000			100 %	130,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	70,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	130,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2,012,100,000			100 %	2,230,089,800	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,800,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	2,017,989,800	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	212,100,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	212,100,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	2 orang	778,639,189			2 orang	778,639,189	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	778,639,189	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Orang/Bulan	778,639,189	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	2				SEKRETARIAT DPRD			44,285,859,263				48,294,215,145	
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP	80,87 -	27,867,933,634			80,87 -	29,846,723,051	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	128,175,804			8 Dokumen	129,200,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	71,905,804	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	72,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,220,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5,520,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,690,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5,790,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,840,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5,990,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,840,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5,900,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	21,740,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	22,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	11,940,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	12,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	3,784,714,210			100 %	3,907,653,054	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	3,402,957,210	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Orang/bulan	3,524,343,054	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	272,700,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	272,700,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	82,310,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	82,510,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16,827,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	17,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	7,790,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2,130,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	3,100,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik Daerah yang disediakan	1 Dokumen	2,873,200			1 Dokumen	2,873,200	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	2	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2,873,200	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2,873,200	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase capaian administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	216,167,669			100 %	322,018,266	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	16,077,600	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	17,685,360	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6 orang	29,638,604	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 orang	45,222,906	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	170,451,465	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 orang	259,110,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase capaian administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	850,995,271			100 %	849,630,051	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,111,400	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	29,746,200	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	136,548,380	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	135,548,360	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	74,356,491	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	74,356,491	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	105 Dokumen	124,692,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	105 Dokumen	124,692,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	153,308,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Laporan	153,308,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	331,979,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	331,979,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37 Laporan	1,028,009,220			37 Laporan	1,028,009,220	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	42,290,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	42,290,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	374,229,600	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	374,229,600	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	49,009,600	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	49,009,600	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	562,480,020	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	562,480,020	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	225 Unit	1,193,241,660			225 Unit	1,409,982,660	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	461,590,200	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	461,590,200	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	575,899,600	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21 Unit	575,899,600	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	29,779,860	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	29,779,860	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	191 Unit	125,972,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	191 Unit	342,713,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase capaian fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	19,902,836,600			100 %	20,102,836,600	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/bulan	19,511,052,200	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45 Orang/bulan	19,711,052,200	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	324,284,400	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	324,284,400	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	67,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45 Orang	67,500,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Prosentase capaian fasilitasi layanan administrasi DPRD	100 %	760,920,000			100 %	794,520,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	24 Laporan	33,600,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Laporan	33,600,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	57 Laporan	727,320,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	57 Laporan	760,920,000	Sekretariat DPRD
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Prosentase rapat-rapat yang dilaksanakan tepat waktu dukungan fungsi pembentukan perda	100 %	16,417,925,629			100 %	18,447,492,094	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	15 Dokumen	2,820,348,822			15 Dokumen	3,450,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	195,110,028	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	200,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7 Dokumen	1,665,840,706	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Dokumen	2,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	923,229,044	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	1,200,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.01	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	36,169,044	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	50,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	5 Dokumen	744,739,000			5 Dokumen	744,739,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	148,947,800	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	148,947,800	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	148,947,800	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	148,947,800	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	148,947,800	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	148,947,800	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	148,947,800	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	148,947,800	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	148,947,800	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	148,947,800	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Difasilitasi	100 %	886,524,430			100 %	886,524,430	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	33 Laporan	110,880,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	33 Laporan	110,880,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	33 Laporan	134,145,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	33 Laporan	134,145,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	33 Laporan	126,390,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	33 Laporan	126,390,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	33 Laporan	118,635,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	33 Laporan	118,635,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	247,526,630	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	247,526,630	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	148,947,800	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	148,947,800	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase capaian fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	100 %	4,041,067,717			100 %	4,690,127,655	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2,917,596,374	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	3,484,461,526	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3 Dokumen	637,131,035	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	673,131,035	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	15 Orang	70,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Orang	114,875,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	257,200,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Orang	258,580,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	17 Dokumen	1,800,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Dokumen	24,326,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	157,340,308	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	134,754,094	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Aspirasi Masyarakat Yang Terhimpun	4 Dokumen	1,292,581,500			4 Dokumen	1,828,414,500	Sekretariat DPRD
						Prosentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Difasilitasi	20 Dokumen				20 Dokumen		
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	197,451,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	197,451,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1,095,130,500	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	1,630,963,500	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase Tugas DPRD Yang Difasilitasi	100 %	6,632,664,160			100 %	6,847,686,509	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	126 Dokumen	5,242,454,651	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	126 Dokumen	5,298,684,709	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	7,144,720	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	7,144,720	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	5 Dokumen	503,361,600	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	574,217,320	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	53 Dokumen	879,703,189	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	53 Dokumen	967,639,760	Sekretariat DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	1				PERENCANAAN			12,644,679,893				12,123,445,335	
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87.5 A	8,903,333,821			87.5 A	8,827,849,263	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	100 %	176,900,000			100 %	175,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	26,900,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	40,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	100 %	4,914,283,495			100 %	4,914,283,495	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	4,219,083,495	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Orang	4,219,083,495	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	455,200,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	455,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	30,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	210,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 Laporan	210,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	2 Dokumen	35,000,000			2 Dokumen	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan baik	100 %	671,000,000			100 %	627,500,799	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	6,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	6,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	20,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	16,987,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	15,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	675 Orang	600,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	675 Orang	564,513,299	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	30,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	38 Orang	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	907,698,126			100 %	912,612,769	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	30,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	67,698,126	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	67,612,769	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	580,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150 Laporan	580,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	30,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100 %	120,000,000			100 %	120,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	120,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	120,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	100 %	1,596,452,200			100 %	1,596,452,200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	252,626,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	252,626,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1,333,826,200	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1,333,826,200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	100 %	482,000,000			100 %	447,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	220,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Unit	220,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	17,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Unit	17,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	5,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	40,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Unit	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase jumlah program di RKPD yang selaras dengan RPJMD	100 %	1,775,486,072			100 %	1,633,486,072	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						prosentase ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah	85 %				85 %		
						prosentase kinerja indikator program PD mitra bidang perencanaan pengendalian evaluasi yang tercapai	82 %				82 %		
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan	2 Dokumen	912,060,000			2 Dokumen	720,060,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	30,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Berita Acara	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	30,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Berita Acara	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	75,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Berita Acara	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	85 Usulan	34,800,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	85 Usulan	34,800,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	742,260,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	550,260,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	248,426,072			100 %	298,426,072	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	8 Data	100,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Data	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	198 Orang	100,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	198 Orang	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	48,426,072	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Buku	48,426,072	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	9 Dokumen	615,000,000			9 Dokumen	615,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	40,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.03	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerjasama Daerah	150,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Kerjasama Daerah	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 Laporan	425,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Laporan	425,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase OPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/ Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)/ Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang capaian programnya minimal 80 persen dari target	92 %	1,965,860,000			92 %	1,662,110,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Prosentase Program RKPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/ Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)/ Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang konsisten terhadap Program RPJMD	97,2 %				97,2 %		
						Prosentase renstra OPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/ Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)/ Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang selaras dengan RPJMD	92 %				92 %		
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keterpaduan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	870,000,000			100 %	609,250,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	270,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	159,250,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	600,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	450,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Prosentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	690,000,000			100 %	687,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 Perangkat Daerah	350,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Perangkat Daerah	300,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 Perangkat Daerah	30,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Perangkat Daerah	32,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	30,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	40,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	6 Perangkat Daerah	20,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Perangkat Daerah	45,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	6 Perangkat Daerah	20,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Perangkat Daerah	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	150,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	prosentase koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %	405,860,000			100 %	365,860,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	125,860,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	125,860,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	90,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	80,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	6 Perangkat Daerah	40,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Perangkat Daerah	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	100,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	70,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			850,000,000				975,000,000	
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	prosentase Penelitian/kajian yang menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan	100 %	850,000,000			100 %	975,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Kajian / Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan yang disusun untuk mengakomodir permasalahan pelaksanaan pembangunan	1 Dokumen	390,000,000			1 Dokumen	505,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2.01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	300,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	300,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2.01	5	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	40,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	70,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	50,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	135,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang disusun dengan baik	1 Dokumen	200,000,000			1 Dokumen	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	200,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disusun dengan baik	1 Dokumen	100,000,000			1 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2.03	9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang disusun dengan baik	1 Dokumen	160,000,000			1 Dokumen	170,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	150,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2.04	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	10,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	2				KEUANGAN			267,449,482,312				329,104,721,890	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	86.30 %	10,090,458,649			86.30 %	15,532,190,729	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	90,922,200			10 Dokumen	147,065,270	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	20,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	33,620,180	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	9,780,430	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6,891,300	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	9,780,430	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6,021,300	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	9,923,430	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6,021,300	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	9,923,430	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	25,988,300	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	29,687,130	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	20,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	44,350,240	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen	6,651,306,149			12 Dokumen	10,071,876,691	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan	5,295,271,849	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	52 Orang/Bulan	8,456,118,013	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1,203,900,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	1,324,290,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	60,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	94,752,180	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	77,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	151,663,534	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	15,134,300	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	27,647,730	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD yang disusun	2 Dokumen	48,000,000			2 Dokumen	49,800,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	18,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	19,800,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	30,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	30,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi perangkat daerah yang disusun	94 ASN	61,000,000			94 ASN	72,490,880	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	173 Paket	46,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	173 Paket	50,490,880	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	15,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	22,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadministrasian umum yang disusun	1 Dokumen	342,787,700			1 Dokumen	629,658,854	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	733 Paket	38,572,700	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	733 Paket	53,429,970	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 paket	20,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21 paket	77,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4872 Paket	40,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4872 Paket	106,658,838	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	44583 Paket	30,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	44583 Paket	56,437,546	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 dokumen	6,660,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 dokumen	7,326,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	55,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	243,496,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	7,555,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 dokumen	30,310,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	5 Unit	50,000,000			5 Unit	473,349,580	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	50,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 unit	473,349,580	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa yang disusun	12 Laporan	2,481,420,160			12 Laporan	3,068,166,376	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	257 Laporan	7,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	257 Laporan	7,700,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	336 Laporan	902,798,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	336 Laporan	1,331,682,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,571,622,160	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	1,728,784,376	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	80 Unit	335,000,000			80 Unit	954,858,394	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 unit	200,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	44 unit	376,517,994	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	10,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	13,721,400	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit				10 unit		
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	50,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 unit	330,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	447 unit	75,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	447 unit	234,619,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah penataan organisasi yang dilaksanakan	5 Dokumen	30,022,440			5 Dokumen	64,924,684	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Dokumen	30,022,440	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	64,924,684	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kesesuaian Rancangan APBD Dengan KUA PPAS Yang Telah Disepakati	100 %	256,584,093,049			100 %	312,487,296,875	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang disusun	100 %	1,692,565,740			100 %	2,284,989,896	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	211,224,700	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	232,153,482	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	209,287,300	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	218,921,140	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	25,093,180	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 Dokumen	59,866,048	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	25,593,180	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 Dokumen	60,966,048	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	69 Dokumen	7,814,600	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	69 Dokumen	41,062,945	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	69 Dokumen	7,352,410	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	69 Dokumen	39,725,532	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	422,590,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	561,567,987	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	462,834,960	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	581,577,163	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen				1 Dokumen		
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	202,202,305	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	121,659,565	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	23,290,900	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	47,949,418	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	37,902,305	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	175,429,678	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	2,937,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	29,129,320	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	85 Orang	54,442,900	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	85 Orang	114,981,570	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah koordinasi pengelolaan perbendaharaan daerah yang dilaksanakan	12 Laporan	12,929,752,895			12 Laporan	19,096,318,608	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	27,728,494	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	89,005,807	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	18,782,900	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	60,290,560	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	42 Dokumen	12,754,504,090	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	42 Dokumen	18,515,925,135	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	13,230,557	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	42,468,690	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	704 Laporan	25,736,050	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	704 Laporan	120,049,655	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	19,273,800	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	62,060,020	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	47 Dokumen	28,309,250	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	47 Dokumen	56,724,789	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan	45 orang	42,187,754	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45 orang	149,793,952	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	2 Laporan	781,850,432			2 Laporan	1,252,270,913	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	33,719,400	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	43,427,340	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	218,146,712	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	218,146,712	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	319,261,880	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	461,188,068	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	210,722,440	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	324,720,704	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	2 Dokumen	241,179,923,983			2 Dokumen	289,853,717,458	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	395 Laporan	223,832,501,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	395 Laporan	257,422,203,308	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	10,000,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	25,452,449,051	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	262 Laporan	7,347,422,983	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	262 Laporan	6,979,065,099	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Meningkatnya Nilai Aset Tetap	5 %	774,930,614			5 %	1,085,234,286	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	25 Laporan	774,930,614			25 Laporan	1,085,234,286	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	60 Dokumen	99,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 Dokumen	152,214,700	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	26,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	28,492,178	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	528 Laporan	142,930,614	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	528 Laporan	326,142,436	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	400,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	427,130,836	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	55,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	93,768,356	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	25 Laporan	20,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Laporan	20,988,880	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	32,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	36,496,900	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	2				KEUANGAN			12,314,238,203				21,936,191,910	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 %	10,048,270,060			86 %	19,241,958,912	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %	169,253,500			100 %	186,178,935	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	24,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	26,950,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7,774,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	8,551,400	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7,774,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	8,551,400	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6,774,200	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7,451,620	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6,774,200	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7,451,620	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	51,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Laporan	56,650,000	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6					7		8	9	10	11	12	13	14
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	1 Laporan	64,157,100	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	70,572,895	Badan Pendapatan Daerah
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	6 Laporan				6 Laporan		
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Daerah	12 Dokumen	6,237,998,037			12 Dokumen	13,310,452,045	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang	5,863,998,037	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	110 Orang	12,794,786,597	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	317,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	414,183,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28 Laporan	15,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	28 Laporan	30,776,505	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	15,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	30,250,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	26,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	40,455,943	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD yang disusun	2 Laporan	31,322,000			2 Laporan	34,671,522	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2,800,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	3,189,076	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	11,022,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	12,124,200	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	17,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	19,358,246	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi perangkat daerah yang disusun	94 ASN	185,987,000			94 ASN	79,185,795	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	50,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	55,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	10,987,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	12,085,795	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	125,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Orang	12,100,000	Badan Pendapatan Daerah
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang				45 Orang		
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadministrasian umum yang disusun	2 Laporan	648,600,000			2 Laporan	711,109,951	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	33,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Paket	0	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	60,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	63,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	55,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Dokumen	3,850,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas yang di sediakan	300 Orang/Bulan	50,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300 Orang/Bulan	93,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	445,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	450,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	11,600,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	12,759,951	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	2 Unit	604,609,523			2 Unit	606,227,871	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	260,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	265,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit	50,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23 Unit	38,738,489	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	294,609,523	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Unit	302,489,382	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa yang disusun	257 Benda pos	1,459,500,000			257 Benda pos	3,660,949,600	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	4,446,750	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	550,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1,114,028,850	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	905,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	2,542,474,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	680 Service	581,000,000			680 Service	518,183,193	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	200,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75 Unit	220,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	2,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	14,374,800	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	249,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Unit	110,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	447 Unit	105,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	447 Unit	117,115,900	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	56,692,493	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	130,000,000			1 Kegiatan	135,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	130,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	135,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase realisasi penerimaan PAD	100 %	2,265,968,143			100 %	2,694,232,998	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah yang disusun	2 Dokumen	2,265,968,143			2 Dokumen	2,694,232,998	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	231,495,880	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	325,988,214	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	270,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	300,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	90,506,860	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	100,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	121,890,120	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	367,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	374,506,440	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	508,591,949	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	48 Dokumen	97,424,710	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 Dokumen	89,946,360	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	718,075,703	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	804,856,805	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10 Dokumen	22,527,120	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Dokumen	8,138,284	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	269,551,310	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	84,211,386	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	69,990,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	105,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	3				KEPEGAWAIAN			22,876,271,401				12,133,500,000	
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	86 (A)	21,120,625,431			86 (A)	7,378,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja yang disusun dengan benar dan tepat waktu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	98 %	30,000,000			98 %	37,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	7,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	4,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	5,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	4,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	5,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	4,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	5,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	4,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	5,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	6,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	8,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan dan pelaporan yang disusun dengan benar dan tepat waktu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	98 %	19,986,138,186			98 %	5,692,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/bulan	19,848,538,186	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	462 Orang/bulan	5,500,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	132,600,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Dokumen	185,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Laporan	5,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	7,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	98 %	502,054,400			98 %	625,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10,001,200	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Paket	17,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	53 Paket	52,035,360	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	53 Paket	67,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	49,857,240	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	67,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,328,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	6,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1200 Laporan	14,800,500	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1200 Laporan	16,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	450 laporan	370,032,100	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	450 laporan	450,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	98 %	13,013,000			98 %	17,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	13,013,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	17,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	98 %	380,262,600			98 %	479,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 laporan	3,465,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	350 laporan	4,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	230,110,800	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	300,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	146,686,800	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	175,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	98 %	209,157,245			98 %	526,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	127,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 Unit	160,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	15,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 Unit	16,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	285,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	37,157,245	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	65,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase jumlah pegawai ASN dengan jumlah kebutuhan ASN berdasarkan ABK	65 %	1,755,645,970			65 %	4,755,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Persentase pegawai ASN yang memenuhi kompetensi jabatan	90 %				90 %		
						Persentase pegawai ASN yang puas terhadap pelayanan kepegawaian	98 %				98 %		
						Persentase pemenuhan hak- hak atau pegawai ASN (karis/karsu/KPE/karpeg/KIP/Cuti/Satya Lencana Karya Satya dan Taspen)	84 %				84 %		
						Persentase penempatan pegawai ASN sesuai analisa jabatan dan analisa beban kerja	91 %				91 %		
						Persentase updating data kepegawaian tepat waktu	90 %				90 %		
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan pegawai (CPNS dan PPPK) sesuai kebutuhan	84 %	1,170,036,750			84 %	1,945,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Persentase Pengadaan Pegawai sesuai kebutuhan, Pegawai yang memasuki masa Pensiun dan Ketersediaan data ASN yang akurat	90 %				90 %		
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	35,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100 Dokumen	1,005,036,750	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Dokumen	950,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	400 Dokumen	50,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	400 Dokumen	250,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga	29,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Lembaga	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	650 Dokumen	21,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	650 Dokumen	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	6600 Dokumen	20,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6600 Dokumen	170,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	175,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Penempatan ASN sesuai analisa jabatan dan analisa beban kerja serta pengelolaan keanikan pangkat ASN	91 %	310,000,000			91 %	1,160,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Pengelolaan kenaikan Pangkat ASN	90 %				90 %		
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang Mutasi Jabatan PIJumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerahmpin Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah dan dalam daerah	25 Dokumen	75,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Dokumen	350,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2500 Dokumen	75,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2500 Dokumen	250,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	20 Dokumen	160,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Dokumen	560,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki sertifikat manjerial, teknis dan fungsional	85 %	155,609,220			85 %	800,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	4 Orang	50,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Orang	300,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	3	2	2.03	8	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	38 Orang	105,609,220	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	38 Orang	500,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Kasus pelanggaran disiplin yang terselesaikan dan Penilaian Evaluasi Kinerja ASN	96 %	120,000,000			96 %	850,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	30,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	250,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	450 Orang	30,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	450 Orang	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	50 Orang	60,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang	450,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			330,478,730				1,250,000,000	
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai ASN yang memenuhi kompetensi jabatan	84 %	330,478,730			84 %	1,250,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memiliki sertifikat manjerial, teknis dan fungsional	87 %	223,878,730			87 %	1,000,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	38 Orang	223,878,730	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	38 Orang	1,000,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memiliki sertifikat manjerial, teknis dan fungsional	87 %	106,600,000			87 %	250,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	106,600,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	250,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6	1				INSPEKTORAT DAERAH			7,422,947,055				9,126,950,772	
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	92.5 Persen	5,929,157,720			92.5 Persen	7,409,093,036	Inspektorat
6	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang Disusun	100 Persen	45,962,271			100 Persen	52,855,675	Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	23,717,271	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	24,383,700	Inspektorat
6	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,055,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,690,925	Inspektorat
6	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,055,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,675,100	Inspektorat
6	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,055,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,675,100	Inspektorat
6	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,055,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,675,400	Inspektorat
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,160,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	2,830,500	Inspektorat
6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	7,865,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	10,924,950	Inspektorat
6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan yang Dibayar	100 Persen	4,815,181,484			100 Persen	5,923,593,911	Inspektorat
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	456 Orang/bulan	4,629,936,484	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	456 Orang/bulan	5,734,140,911	Inspektorat
6	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	166,830,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	170,000,000	Inspektorat
6	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7,615,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	8,000,000	Inspektorat
6	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	10,800,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	11,453,000	Inspektorat
6	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada PD yang Disusun	100 Persen	7,260,000			100 Persen	8,500,000	Inspektorat
6	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7,260,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	8,500,000	Inspektorat
6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	100 Persen	25,000,000			100 Persen	30,000,000	Inspektorat
6	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	72 buah	25,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	72 buah	30,000,000	Inspektorat
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum yang Dilaksanakan	100 Persen	274,411,965			100 Persen	518,599,550	Inspektorat
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,167,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	7,155,000	Inspektorat
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	50,000,000	Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	28,847,400	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	40,000,000	Inspektorat
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4,187,600	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	4,512,250	Inspektorat
6	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	19,780,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	21,000,000	Inspektorat
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200,429,965	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	395,932,300	Inspektorat
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang Dilaksanakan	100 Persen	419,965,000			100 Persen	482,960,350	Inspektorat
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6,435,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	7,400,850	Inspektorat
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	98,554,200	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	113,337,330	Inspektorat
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	314,975,800	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	362,222,170	Inspektorat
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang Dilaksanakan	100 Persen	341,377,000			100 Persen	392,583,550	Inspektorat
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	17 Unit	264,497,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Unit	304,171,550	Inspektorat
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	214 Unit	66,880,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	214 Unit	76,912,000	Inspektorat
6	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	11,500,000	Inspektorat
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Kapabilitas APIP	3.2 Level	1,038,714,100			3.2 Level	1,194,521,215	Inspektorat
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun	100 Persen	866,765,800			100 Persen	996,780,670	Inspektorat
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	168,857,600	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	194,186,240	Inspektorat
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8 Laporan	149,579,800	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Laporan	172,016,770	Inspektorat
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	13 Laporan	164,615,700	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Laporan	189,308,055	Inspektorat
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	16 Laporan	196,497,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Laporan	225,971,550	Inspektorat
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	8 Laporan	175,309,400	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Laporan	201,605,810	Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen	11,906,300	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Dokumen	13,692,245	Inspektorat
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun	100 Persen	171,948,300			100 Persen	197,740,545	Inspektorat
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	9 Laporan	171,948,300	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Laporan	197,740,545	Inspektorat
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3.2 Level	455,075,235			3.2 Level	523,336,521	Inspektorat
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	100 Persen	22,232,600			100 Persen	25,567,490	Inspektorat
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	22,232,600	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Rekomendasi	25,567,490	Inspektorat
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Prosentase Pendampingan dan Asistensi yang Dilaksanakan	100 Persen	432,842,635			100 Persen	497,769,031	Inspektorat
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44 perangkat daerah	56,405,800	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	44 perangkat daerah	64,866,670	Inspektorat
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	303,633,600	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Kegiatan	349,178,640	Inspektorat
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 perangkat daerah	72,803,235	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 perangkat daerah	83,723,721	Inspektorat
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN			2,094,101,651				2,094,101,651	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1,944,838,851			100 %	1,944,838,851	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	7 Dokumenn	26,902,600			7 Dokumenn	26,902,600	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3,555,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	3,555,000	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,995,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,995,000	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,935,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,935,000	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,025,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4,025,000	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,870,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4,870,000	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	2,862,600	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	2,862,600	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,660,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,660,000	Kecamatan Banyuglugur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumenn	1,345,106,260			3 Dokumenn	1,345,106,260	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang	1,235,129,460	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Orang	1,235,129,460	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 Orang	107,040,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Orang	107,040,000	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	2,936,800	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2,936,800	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas ASN yang dibeli	25 Stel	10,722,000			25 Stel	10,722,000	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Stel	10,722,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Stel	10,722,000	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis peralatan yang kantor yang dibeli	5 Jenis	118,628,461			5 Jenis	118,628,461	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Jenis	3,500,490	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Jenis	3,500,490	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Jenis	10,000,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Jenis	10,000,000	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Jenis	5,514,971	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Jenis	5,514,971	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Jenis	1,776,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Jenis	1,776,000	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Kegiatan	97,837,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Kegiatan	97,837,000	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dibeli	8 Jenis	75,000,000			8 Jenis	75,000,000	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Jenis	75,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Jenis	75,000,000	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa yang dilaksanakan	2 Jenis	190,752,100			2 Jenis	190,752,100	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang terikirim	500 Surat	500	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500 Surat	500	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	36 Rekening	45,711,600	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Rekening	45,711,600	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan Keamanan yang dibayar	11 Orang	144,540,500	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Orang	144,540,500	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang terpelihara	3 Jenis	177,727,430			3 Jenis	177,727,430	Kecamatan Banyuglugur
						Jumlah Surat-surat Kendaraan Dinas yang dibayar	12 Unit				12 Unit		
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	113,823,980	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Unit	113,823,980	Kecamatan Banyuglugur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	6,710,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	6,710,000	Kecamatan Banyuglugur
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	57,193,450	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	57,193,450	Kecamatan Banyuglugur
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	23,901,800			100 %	23,901,800	Kecamatan Banyuglugur
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Kegiatan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	9 Kegiatan	21,040,000			9 Kegiatan	21,040,000	Kecamatan Banyuglugur
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Kegiatan	21,040,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Kegiatan	21,040,000	Kecamatan Banyuglugur
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP PATEN Kecamatan Banyuglugur	600 Layanan	2,861,800			600 Layanan	2,861,800	Kecamatan Banyuglugur
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	jumlah layanan sesuai dengan SOP PATEN Kecamatan Situbondo	600 Pemohon	2,861,800	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	600 Pemohon	2,861,800	Kecamatan Banyuglugur
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	23,872,000			100 %	23,872,000	Kecamatan Banyuglugur
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Kegiatan Kesra yang ditindaklanjuti	9 Kegiatan	23,872,000			9 Kegiatan	23,872,000	Kecamatan Banyuglugur
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Kesejahteraan Rakyat	9 Kegiatan	23,872,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Kegiatan	23,872,000	Kecamatan Banyuglugur
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	101,489,000			100 %	101,489,000	Kecamatan Banyuglugur
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Jenis Rekomendasi Kegiatan Trantib dan Ekbang yang ditindaklanjuti	2 Jenis	101,489,000			2 Jenis	101,489,000	Kecamatan Banyuglugur
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kegiatan keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	9 Kegiatan	63,750,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Kegiatan	63,750,000	Kecamatan Banyuglugur
7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kegiatan Ekbang yang ditindaklanjuti	9 Kegiatan	37,739,000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Kegiatan	37,739,000	Kecamatan Banyuglugur
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN			2,001,423,884				2,051,359,788	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1,846,199,784			100 %	1,883,359,788	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	5 Dokumen	600			5 Dokumen	3,840,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang di Susun	2 Dokumen	120	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	1,200,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	2 Dokumen	120	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	120	Kecamatan Jatibanteng

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	120	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	1,200,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	120	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	1,200,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	2 Dokumen	120	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	120	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1,494,630,530			3 Dokumen	1,498,559,788	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	1,432,359,788	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21 Orang/bulan	1,432,359,788	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai yang melaksanakan administrasi	7 Orang	61,400,000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Orang	65,000,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	1 Laporan	870,741	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	1,200,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis administrasi umum yang disediakan	15 Jenis	129,432,504			15 Jenis	141,200,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis administrasi umum yang disediakan	9 Jenis	11,868,304	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Jenis	15,000,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetakan yang disediakan	4 Jenis	4,259,350	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Jenis	5,000,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	1,099,800	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1,200,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi.	16 Orang	112,205,050	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Orang	120,000,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibeli	2 Jenis	20,608,750			2 Jenis	22,500,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	6,747,500	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	7,500,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan yang akan dibeli	5 Jines	13,861,250	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Jines	15,000,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	3 Jenis	98,617,200			3 Jenis	106,260,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Matrai yang tersedia	120 Lembar	1,260,000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120 Lembar	1,260,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Rekening	35,421,600	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Rekening	40,000,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan dan kebersihan yang tersedia	5 Orang	61,935,600	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Orang	65,000,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	14 Unit	102,310,800			14 Unit	111,000,000	Kecamatan Jatibanteng

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	14 Unit	55,789,200	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Unit	60,000,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	14 Unit	4,450,000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Unit	5,000,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	21,850,000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	25,000,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan yang di pelihara	4 Jenis	20,221,600	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Jenis	21,000,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100 %	80,185,000			100 %	89,000,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Perencanaan, Pembinaan,Pemberdayaan Masyarakat Dan Evaluasi Pemerintahan Umum Dan Desa	4 Kegiatan	8,035,000			4 Kegiatan	9,000,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	8 Kegiatan	8,035,000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Kegiatan	9,000,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan Paten yang sesuai SOP	100 %	72,150,000			100 %	80,000,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang dilayani	1000 Orang	72,150,000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1000 Orang	80,000,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100 %	7,250,000			100 %	8,000,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	2 Kegiatan	7,250,000			2 Kegiatan	8,000,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	7,250,000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	8,000,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100 %	67,789,100			100 %	71,000,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Kegiatan	67,789,100			2 Kegiatan	71,000,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	10,253,500	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	11,000,000	Kecamatan Jatibanteng
7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	8 Kegiatan	57,535,600	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Kegiatan	60,000,000	Kecamatan Jatibanteng
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN			2,365,071,734				2,357,977,984	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	2,179,010,734			100 %	2,171,916,984	Kecamatan Sumbermalang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	17,500,000			100 %	10,406,250	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	3,500,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,906,250	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	0	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	0	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	3,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1,738,243,359			100 %	1,738,243,359	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1,671,843,359	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Orang/bulan	1,671,843,359	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Tugas ASN yang terbayar	87 ob	59,400,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	87 ob	59,400,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	3,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	3,500,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	3,500,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5,400,000			100 %	5,400,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20 stell	5,400,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 stell	5,400,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	109,569,310			100 %	109,569,310	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 jenis	3,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 jenis	3,000,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19 jenis	11,385,770	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19 jenis	11,385,770	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 jenis	3,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 jenis	3,000,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 bulan	1,800,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	1,800,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 kegiatan	90,383,540	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 kegiatan	90,383,540	Kecamatan Sumbermalang
						Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi	20 orang				20 orang		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5,000,000			100 %	5,000,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	5,000,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	206,982,600			100 %	206,982,600	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750 surat	1,800,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	750 surat	1,800,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 rekening	16,428,600	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 rekening	16,428,600	Kecamatan Sumbermalang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	168 ob	188,754,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	168 ob	188,754,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	96,315,465			100 %	96,315,465	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14 Unit	59,315,465	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Unit	59,315,465	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	3,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	3,000,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	30,000,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	4,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Unit	4,000,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	36,464,000			100 %	36,464,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100 %	35,500,000			100 %	35,500,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokurekomen	35,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokurekomen	35,500,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	964			100 %	964	Kecamatan Sumbermalang
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 ob	964	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 ob	964	Kecamatan Sumbermalang
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	74,400,000			100 %	74,400,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	74,400,000			100 %	74,400,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	74,400,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	74,400,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	75,197,000			100 %	75,197,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	75,197,000			100 %	75,197,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	5 DokumeRekomn	35,197,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 DokumeRekomn	35,197,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5 Rekomendasi	40,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Rekomendasi	40,000,000	Kecamatan Sumbermalang
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN			2,351,880,743				2,943,655,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dokumen Perencanaan yang Disusun	10 Dokumen	2,290,880,743			10 Dokumen	2,843,655,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang Tersusun	10 Dokumen	22,190,000			10 Dokumen	33,935,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,770,000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	6,280,000	Kecamatan Besuki

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,240,000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6,280,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,260,000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4,840,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,260,000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4,840,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,260,000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4,840,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2,400,000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	6,855,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang terbayar	12 Bulan	1,810,869,312			12 Bulan	2,202,820,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1,743,069,312	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Orang/bulan	2,100,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 Dokumen	65,400,000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Dokumen	98,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	2,400,000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	4,820,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli	21 stel	9,300,000			21 stel	10,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	9,300,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 Paket	10,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Admonistrasi Kantor yang dibayar	5 Kegiatan	135,220,000			5 Kegiatan	187,600,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3,400,000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Paket	6,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	11,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Paket	14,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	3,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	5,600,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,820,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	2,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	115,500,000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	160,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana Kantor yang dibutuhkan	3 Unit	40,334,431			3 Unit	89,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	40,334,431	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	89,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Urusan Pemerintahan yang terbayar	5 Jenis	96,250,000			5 Jenis	113,300,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,750,000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	3,300,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51,500,000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	55,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42,000,000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	55,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang terpelihara	17 Unit	112,275,000			17 Unit	198,500,000	Kecamatan Besuki

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	94,000,000	Kab. Situbondo, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Unit	130,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	4,875,000	Kab. Situbondo, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Unit	5,500,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	3,400,000	Kab. Situbondo, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	8,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10,000,000	Kab. Situbondo, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	55,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen IKM yang disusun	1 Dokumen	64,442,000			1 Dokumen	8,500,000	Kecamatan Besuki
7	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	64,442,000	Kab. Situbondo, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8,500,000	Kecamatan Besuki
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Layanan Paten dalam setahun	675 Pelayanan	5,000,000			675 Pelayanan	10,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jenis Layanan Paten	16 Jenis	5,000,000			16 Jenis	10,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	10,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	4 Kegiatan	13,500,000			4 Kegiatan	25,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	4 Kegiatan	13,500,000			4 Kegiatan	25,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	13,500,000	Kab. Situbondo, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	25,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa yang terbina	10 Desa	42,500,000			10 Desa	65,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi yang diberikan	5 Rekomendasi	42,500,000			5 Rekomendasi	65,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	15,000,000	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	21,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	13,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	24,000,000	Kecamatan Besuki
7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	14,000,000	Kab. Situbondo, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	20,000,000	Kecamatan Besuki
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN			2,084,267,164				4,882,175,652	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 persentase	2,006,767,164			100 persentase	4,314,255,652	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersedia	20 Dok	5,750,000			20 Dok	30,000,000	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,000,000	Kab. Situbondo	Pajak Daerah	2 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Suboh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1,000,000	Kab. Situbondo	Pajak Daerah	2 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1,000,000	Kab. Situbondo	Pajak Daerah	2 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1,000,000	Kab. Situbondo	Pajak Daerah	2 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1,000,000	Kab. Situbondo	Pajak Daerah	2 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	750	Kab. Situbondo	Pajak Daerah	2 dokumen	8,000,000	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persentase	1,612,172,288			100 persentase	2,901,330,752	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1,497,272,288	Kab. Situbondo	Pajak Daerah	14 Orang/bulan	2,784,930,752	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22 Orang	113,400,000	Kab. Situbondo	Pajak Daerah	22 Orang	113,400,000	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1,500,000	Kab. Situbondo	Pajak Daerah	2 Laporan	3,000,000	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30 setel	6,000,000			30 setel	12,000,000	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	6,000,000	Kab. Situbondo	Pajak Daerah	30 Paket	12,000,000	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persentase	91,884,876			100 persentase	236,365,200	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5,376,900	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Paket	6,376,100	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	95,889,100	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Jenis	16,000,000	Kab. Situbondo	Pajak Daerah	16 Jenis	18,000,000	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Jenis	4,007,976	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Jenis	12,500,000	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	3,600,000	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	60,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Laporan	100,000,000	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	37,000,000			100 persentase	169,971,000	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	14,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	34,160,500	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	23,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	135,810,500	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercapainya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	140,760,000			100 persentase	149,480,900	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360 Surat	2,500,000	Kab. Situbondo	Pajak Daerah	360 Surat	6,500,000	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Rekening	31,260,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Rekening	41,728,200	Kecamatan Suboh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Orang	107,000,000	Kab. Situbondo	Pajak Daerah	8 Orang	101,252,700	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persentase	113,200,000			100 persentase	815,107,800	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16 Unit	94,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Unit	100,054,300	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Jenis	4,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Jenis	4,500,000	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	12,000,000	Kab. Situbondo	Pajak Daerah	3 Unit	700,085,000	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	5,430,000	Kecamatan Suboh
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1,200,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	5,038,500	Kecamatan Suboh
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 persentase	22,500,000			100 persentase	250,000,000	Kecamatan Suboh
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 orang	7,500,000			100 orang	100,000,000	Kecamatan Suboh
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Jenis	7,500,000	Kab. Situbondo	Pajak Daerah	10 Jenis	100,000,000	Kecamatan Suboh
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP Paten dan Jumlah Dokumen IKM yang disusun	100 orang	15,000,000			100 orang	150,000,000	Kecamatan Suboh
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	9 Dokumen	15,000,000	Kab. Situbondo	Pajak Daerah	9 Dokumen	150,000,000	Kecamatan Suboh
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 persentase	35,000,000			100 persentase	253,920,000	Kecamatan Suboh
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	8 Desa	35,000,000			8 Desa	253,920,000	Kecamatan Suboh
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	35,000,000	Kab. Situbondo	Pajak Daerah	20 Laporan	253,920,000	Kecamatan Suboh
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	100 persentase	6,000,000			100 persentase	50,000,000	Kecamatan Suboh
7	1	4	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi FORKOMPIMCA yang difasilitasi	4 Kegiatan	6,000,000			4 Kegiatan	50,000,000	Kecamatan Suboh
7	1	4	7.03	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Jenis	6,000,000	Kab. Situbondo	Pajak Daerah	10 Jenis	50,000,000	Kecamatan Suboh
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persentase	14,000,000			100 persentase	14,000,000	Kecamatan Suboh
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 orang	14,000,000			100 orang	14,000,000	Kecamatan Suboh
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Laporan	6,000,000	Kab. Situbondo	Pajak Daerah	10 Laporan	6,000,000	Kecamatan Suboh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	8,000,000	Kab. Situbondo	Pajak Daerah	10 Laporan	8,000,000	Kecamatan Suboh
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN			2,260,834,187				2,826,211,204	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2,188,406,583			100 %	2,726,247,005	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	10,650,000			100 %	92,157,000	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1,775,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	13,182,000	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1,775,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	8,775,000	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1,775,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	8,775,000	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	5 buku	1,775,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 buku	8,775,000	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	5 buku	1,775,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 buku	8,775,000	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang Disusun	20 dokumen	1,775,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 dokumen	43,875,000	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1,681,007,059			6 Dokumen	1,875,183,059	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang terbayar selama setahun	14 bulan	1,611,857,059	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 bulan	1,781,007,059	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah pengelola jasa administrasi keuangan yang terbayar	7 ob	65,600,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 ob	82,944,000	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan inventarisasi barang SKPD	2 laporan	1,775,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 laporan	5,616,000	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 dokumen	1,775,000	Kab. Situbondo, Suboh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	5,616,000	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	9,300,000			100 %	13,000,000	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas yang dibeli	16 stel	9,300,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 stel	13,000,000	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	93,315,824			100 %	154,353,876	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	4 jenis	6,794,700	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 jenis	9,948,715	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis atk yang dibeli	19 jenis	16,000,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19 jenis	18,698,976	Kecamatan Mlandingan

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	2 jenis	5,999,325	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 jenis	8,639,028	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat dan penyelenggaraan hari khusus yang difasilitasi	22 kegiatan	64,521,799	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 kegiatan	117,067,157	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Prosentase Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	259,274,000			100 %	399,650,629	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang terkirim	1000 surat	2,500,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1000 surat	3,630,000	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	3 rekening	57,600,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 rekening	74,763,480	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa yang terbayar	12 ob	199,174,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 ob	321,257,149	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	134,859,700			100 %	191,902,441	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan yang dipelihara dan STNK kendaraan dinas yang terbayar	17 unit	99,699,700	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 unit	130,900,547	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang dipelihara	3 unit	30,000,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 unit	53,085,998	Kecamatan Mlandingan
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	30 unit	5,160,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 unit	7,915,896	Kecamatan Mlandingan
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	10,000,000			100 %	25,637,141	Kecamatan Mlandingan
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	10,000,000			100 %	25,637,141	Kecamatan Mlandingan
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang Pemerintahan	6 rekomendasi	10,000,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 rekomendasi	25,637,141	Kecamatan Mlandingan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	10,000,000			100 %	12,000,000	Kecamatan Mlandingan
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase kegiatan pemberdayaan desa	100 %	10,000,000			100 %	12,000,000	Kecamatan Mlandingan
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang Kesra	12 rekomendasi	10,000,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 rekomendasi	12,000,000	Kecamatan Mlandingan
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	52,427,604			100 %	62,327,057	Kecamatan Mlandingan
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	52,427,604			100 %	62,327,057	Kecamatan Mlandingan
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum	5 rekomendasi	17,427,604	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 rekomendasi	24,327,057	Kecamatan Mlandingan
7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	5 rekomendasi	35,000,000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 rekomendasi	38,000,000	Kecamatan Mlandingan
7					UNSUR KEWILAYAHAN								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1				KECAMATAN			2,122,007,201				2,845,705,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Sakip PD	83 A	2,026,107,201			83 A	2,610,705,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersusun	9 dokumen	8,590,400			9 dokumen	11,438,600	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,857,600	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,194,800	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1,500,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,194,800	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	0	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,194,800	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1,194,800	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,243,800	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1,243,800	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	820,2	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	1,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1,084,400	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	4,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	12 bulan	1,674,038,301			12 bulan	2,188,500,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 Orang/bulan	1,595,696,301	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	266 Orang/bulan	2,100,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	75,600,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	85,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1,010,600	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1,500,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,731,400	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	2,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai tertib administrasi kepegawaian	19 Pegawai	4,702,500			19 Pegawai	11,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	4,702,500	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	11,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi dalam 1 tahun	100 %	83,707,500			100 %	104,500,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,043,400	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	6,500,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12,703,150	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	13,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5,338,950	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	6,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3,552,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	56,070,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	75,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	1 paket	4,130,500			1 paket	10,000,000	Kecamatan Bungatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	4,130,500	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	10,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dalam 1 tahun	100 %	149,422,200			100 %	160,766,400	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang terkirim	100 Laporan	1,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Laporan	2,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	24 rekening	24,655,800	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 rekening	35,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan yang disediakan	120 orang/bulan	123,766,400	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120 orang/bulan	123,766,400	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang mendapat pemeliharaan kondisi baik	27 unit	101,515,800			27 unit	124,500,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Unit	87,037,800	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	100,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	6,400,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	7,500,000	Kecamatan Bungatan
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	8,078,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Unit	17,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian IKM	83 A	9,891,900			83 A	30,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan	7 desa	8,124,300			7 desa	25,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	8,124,300	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan PATEN terlayani	20 jenis	1,767,600			20 jenis	5,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,767,600	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	100 %	34,344,300			100 %	75,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terlaksana	6 kegiatan	34,344,300			6 kegiatan	75,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	34,344,300	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	75,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	18,532,800			100 %	50,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa mendapatkan pembinaan transtibum	7 Desa	18,532,800			7 Desa	50,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	18,532,800	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	50,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang baik	100 %	33,131,000			100 %	80,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa mendapatkan pendampingan pengelolaan keuangan	7 desa	33,131,000			7 desa	80,000,000	Kecamatan Bungatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	8,436,400	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	11,364,800	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	13,329,800	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	30,000,000	Kecamatan Bungatan
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN			1,811,895,538				3,412,730,403	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1,765,794,538			100 %	3,338,730,403	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	10,953,800			10 Dokumen	17,400,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,203,000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	945,2	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1,100,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	945,2	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1,100,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	945,2	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1,100,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	945,2	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1,100,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	2,970,000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	4,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,000,000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	4,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	16 Dokumen	1,290,697,551			16 Dokumen	2,633,330,403	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1,221,517,551	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Orang/bulan	2,550,130,403	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN pengelola administrasi keuangan yang dibayar	7 Orang	66,600,000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Orang	80,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,580,000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	3,200,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN yang dibeli	17 Orang	7,592,200			17 Orang	10,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	7,592,200	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Paket	10,000,000	Kecamatan Kendit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang disediakan	67 Jenis	130,146,500			67 Jenis	175,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2,500,000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Paket	5,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	6,000,000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 Paket	9,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	20,000,000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Paket	23,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1,646,500	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	3,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis konsumsi tamu yang disediakan	10 Jenis	3,000,000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Jenis	5,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	16 Rekomendasi	97,000,000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Rekomendasi	130,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan, dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	8 Jenis	10,000,000			8 Jenis	30,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis mebel yang dibeli	1 Jenis	10,000,000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Jenis	30,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tenaga Kebersihan, Penjaga Malam dan Penjaga Paten yang dibayar	13 Orang	214,747,200			13 Orang	235,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	200 Surat	3,000,000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Surat	5,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3 Rekening	48,664,800	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Rekening	60,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan, keamanan dan petugas paten yang dibayar	13 Orang/bulan	163,082,400	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Orang/bulan	170,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Peralatan, Perlengkapan kantor dan Kendaraan Dinas yang terpelihara	11 Jenis	101,657,287			11 Jenis	238,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	85,407,287	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Unit	100,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	4,250,000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Unit	5,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	8,000,000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	120,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4,000,000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	13,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	100 %	5,601,000			100 %	12,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kegiatan Pemerintahan yang tindak lanjuti	2 Rekomendasi	4,500,000			2 Rekomendasi	10,000,000	Kecamatan Kendit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Pemerintahan yang ditindak lanjuti	3 Dokumen Rekomendasi	4,500,000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen Rekomendasi	10,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen IKM yang disusun	1 Dokumen	1,101,000			1 Dokumen	2,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	2	2.02	2	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan sesuai SOP PATEN	1 Dokumen	1,101,000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Koordinasi Pemberdayaan Desa	100 %	31,000,000			100 %	45,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kegiatan Kesra yang ditindak lanjuti	3 Rekomendasi	31,000,000			3 Rekomendasi	45,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Kesra yang ditindak lanjuti	3 Rekomendasi	31,000,000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Rekomendasi	45,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	9,500,000			100 %	17,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	6	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kegiatan Trantib dan Ekbang yang ditindak lanjuti	6 Rekomendasi	9,500,000			6 Rekomendasi	17,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	6	2.01	11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Trantib yang ditindak lanjuti	3 Rekomendasi	3,500,000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Rekomendasi	7,000,000	Kecamatan Kendit
7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindak lanjuti	4 Rekomendasi	6,000,000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Rekomendasi	10,000,000	Kecamatan Kendit
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN			2,408,468,648				2,411,468,448	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 Persen	2,163,380,812			100 Persen	2,163,380,612	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	18,227,840			11 Dokumen	18,227,840	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5,100,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	5,100,000	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,235,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2,235,000	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,235,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2,235,000	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,235,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2,235,000	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,235,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2,235,000	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	4,187,840	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	4,187,840	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	15 Dokumen	1,771,438,142			15 Dokumen	1,771,437,942	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1,656,078,192	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Orang/bulan	1,656,078,192	Kecamatan Panarukan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Pengelola Administrasi Keuangan yang dibayar	12 Orang	92,400,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Orang	92,400,000	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,079,950	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	2,079,750	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	20,880,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	20,880,000	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas ASN yang dibeli	16 Stel	5,096,250			16 Stel	5,096,250	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket	5,096,250	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Paket	5,096,250	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum yang disediakan	8 Jenis	3,851,440			8 Jenis	3,851,440	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	3,851,440	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Paket	3,851,440	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Gedung	80,000,000			1 Gedung	80,000,000	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	80,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	80,000,000	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	153,052,400			3 Jenis	153,052,400	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	309 Laporan	1,669,500	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	309 Laporan	1,669,500	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	46,606,200	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 Laporan	46,606,200	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3,650,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	3,650,000	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	101,126,700	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Laporan	101,126,700	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	25 Unit	111,715,490			25 Unit	111,715,490	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	90,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Unit	90,000,000	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	3,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	3,500,000	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3,215,490	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	3,215,490	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	15,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	15,000,000	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah laporan IKM yang disusun	1 laporan	19,999,250			1 laporan	19,999,250	Kecamatan Panarukan
7	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	19,999,250	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	19,999,250	Kecamatan Panarukan
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 Persen	116,824,880			100 Persen	119,824,880	Kecamatan Panarukan
						Persentase Pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 Persen				100 Persen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kegiatan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	13 Dokumen Rekomendasi	30,413,000			13 Dokumen Rekomendasi	30,413,000	Kecamatan Panarukan
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13 Dokumen	30,413,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Dokumen	30,413,000	Kecamatan Panarukan
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah dokumen IKM yang disusun	700 layanan	86,411,880			700 layanan	89,411,880	Kecamatan Panarukan
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	86,411,880	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	89,411,880	Kecamatan Panarukan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100 Persen	24,655,600			100 Persen	24,655,600	Kecamatan Panarukan
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	33 Dokumen Rekomendasi	24,655,600			33 Dokumen Rekomendasi	24,655,600	Kecamatan Panarukan
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33 Laporan	24,655,600	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	33 Laporan	24,655,600	Kecamatan Panarukan
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi erta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100 Persen	17,354,152			100 Persen	17,354,152	Kecamatan Panarukan
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi FORKOPIMCA yang difasilitasi	3 KKoordinasi	17,354,152			3 KKoordinasi	17,354,152	Kecamatan Panarukan
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	17,354,152	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	17,354,152	Kecamatan Panarukan
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100 Persen	86,253,204			100 Persen	86,253,204	Kecamatan Panarukan
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	52 Rekomendasi	86,253,204			52 Rekomendasi	86,253,204	Kecamatan Panarukan
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	33,626,854	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	33,626,854	Kecamatan Panarukan
7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	47 Laporan	52,626,350	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	47 Laporan	52,626,350	Kecamatan Panarukan
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN			4,165,286,155				7,462,000,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	4,032,286,155			100 %	6,167,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Kecamatan Situbondo	8 Dokumen	19,765,000			8 Dokumen	33,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4,710,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4,800,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,255,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Situbondo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	3,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun	18 Dokumen	3,522,913,755			18 Dokumen	5,132,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	3,434,613,755	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	44 Orang/bulan	5,000,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	83,700,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	125,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,600,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	7,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun	2 Dokumen	11,485,400			2 Dokumen	16,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	25 Stel	8,485,400	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Stel	10,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum yang disediakan	90 Jenis	62,122,000			90 Jenis	267,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	12,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	40,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4,070,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	25,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan "	24 Exemplar	3,552,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Exemplar	4,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	30 Kali	25,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Kali	185,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dibeli	20 Unit	105,000,000			20 Unit	185,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	90,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	90,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	95,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	3 Jenis	225,000,000			3 Jenis	297,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	350 Lembar	2,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	350 Lembar	7,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang disediakan	3 Rek/Bulan	83,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Rek/Bulan	140,000,000	Kecamatan Situbondo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas penunjang pelayanan umum kantor yang tersedia	10 Orang/Bulan	140,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Orang/Bulan	150,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	25 Unit	86,000,000			25 Unit	236,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	70,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Unit	175,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	8,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	16,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	8,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	45,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	42,000,000			100 %	490,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa tertib dan baik	4 Dokumen	22,000,000			4 Dokumen	250,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	22,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	250,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi terpadu Kecamatan Situbondo	2 Dokumen	20,000,000			2 Dokumen	240,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan Paten yang sesuai dengan SOP	2 Dokumen	20,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	240,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	25,000,000			100 %	200,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	7 Dokumen	25,000,000			7 Dokumen	200,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	25,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Laporan	200,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	22,000,000			100 %	150,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi FORKOPIMCA Kecamatan Situbondo yang dilaksanakan	4 Kali	22,000,000			4 Kali	150,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	22,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	150,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 %	44,000,000			100 %	455,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan	4 Dokumen	44,000,000			4 Dokumen	455,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	22,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	230,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	22,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	225,000,000	Kecamatan Situbondo
7					UNSUR KEWILAYAHAN								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1				KECAMATAN			860,000,000				860,000,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	387,500,000			100 %	387,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	12,000,000			100 %	12,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	1,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	2,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	2,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	2,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	2,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	2,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	2,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	1,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	1,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	1,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	1,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	37,500,000			100 %	37,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	33,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	33,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	1,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	1,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	1,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	1,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,000,000			100 %	5,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	5,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21 Paket	5,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	143,000,000			100 %	143,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	10,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Paket	10,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	30,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Paket	30,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	10,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Situbondo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	80,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	80,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	125,000,000			100 %	125,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	60,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	60,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	65,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	65,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	65,000,000			100 %	65,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	10,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	10,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	5,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	5,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	50,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	50,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	271,500,000			100 %	271,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	PROSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	250,000,000			100 %	250,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	50,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Pokmas / Ormas	50,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	200,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Pokmas / Ormas	200,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	PROSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	21,500,000			100 %	21,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4 Dokumen	15,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	3	2.05	4	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4 Dokumen	6,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	6,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	110,000,000			100 %	110,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	110,000,000			100 %	110,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	110,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	110,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	91,000,000			100 %	91,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	91,000,000			100 %	91,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	91,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	91,000,000	Kecamatan Situbondo
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN			860,000,000				1,213,800,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan baik	100 Persen	503,724,540			100 Persen	780,300,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan baik	100 Persen	4,960,000			100 Persen	10,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2,480,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2,480,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik	100 Persen	27,965,000			100 Persen	35,000,000	Kecamatan Situbondo
						Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan baik	100 Persen				100 Persen		
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	23,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2,475,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	5,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1,990,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	5,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan baik	100 Persen	1,742,400			100 Persen	4,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15 Paket	1,742,400	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Paket	4,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan baik	100 Persen	122,933,820			100 Persen	279,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,992,900	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	10,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	19,612,560	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	36,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,004,060	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	16,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2,928,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4,970,900	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	16,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	80,425,400	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	195,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan baik	100 Persen	88,660,800			100 Persen	152,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	35,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	71,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	29,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	48,160,800	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	52,000,000	Kecamatan Situbondo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan baik	100 Persen	129,105,500			100 Persen	138,200,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	7,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	19,460,700	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	21,200,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	107,644,800	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	110,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan baik	100 Persen	128,357,020			100 Persen	161,100,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	13,341,100	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	18,100,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	8,200,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	11,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	106,815,920	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	132,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik	100 Persen	124,500,000			100 Persen	180,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik	100 Persen	76,500,000			100 Persen	113,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	76,500,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	113,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik	100 Persen	48,000,000			100 Persen	67,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	48,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	67,500,000	Kecamatan Situbondo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan dengan baik	100 Persen	133,103,000			100 Persen	143,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan dengan baik	100 Persen	133,103,000			100 Persen	143,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	133,103,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Pokmas / Ormas	143,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 Persen	50,933,260			100 Persen	71,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 Persen	50,933,260			100 Persen	71,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50,933,260	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	71,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	100 Persen	47,739,200			100 Persen	39,000,000	Kecamatan Situbondo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	100 Persen	47,739,200			100 Persen	39,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	47,739,200	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	39,000,000	Kecamatan Situbondo
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN			4,533,513,407				6,320,000,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen yang disusun	8 dokumen	4,396,192,407			8 dokumen	5,920,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	8 dokumen	33,641,700			8 dokumen	57,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	6,141,700	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	13,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	4,500,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	4,500,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	7,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	4,500,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	4,500,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	7,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar yang disusun	3 dokumen	5,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 dokumen	9,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	1 dokumen	4,500,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	7,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dilaksanakan	5 kegiatan	3,800,235,210			5 kegiatan	4,950,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	3,721,335,210	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang/bulan	4,850,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai ASN pelaksanaan Administrasi yang dibayar	6 Orang/bulan	66,900,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Orang/bulan	75,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen aset yang disusun	1 dokumen	3,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	7,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	4,500,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	9,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disusun	12 laporan	4,500,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 laporan	9,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	1 paket	5,000,000			1 paket	10,000,000	Kecamatan Panji

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 stel	5,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 stel	10,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan	7 kegiatan	170,215,497			7 kegiatan	227,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi kelistrikan yang disediakan	8 Jenis	3,027,300	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Jenis	8,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	3 jenis	2,500,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 jenis	8,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	30,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,428,197	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	6,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 jenis	2,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 jenis	7,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu yang disediakan	3 Jenis	2,500,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Jenis	8,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	130,760,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	160,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang dibeli	5 unit	20,000,000			5 unit	160,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	160,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	3 kegiatan	252,100,000			3 kegiatan	292,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang terkirim	1000 Surat	2,500,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1000 Surat	7,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 rekening	69,600,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 rekening	100,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 orang	180,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 orang	185,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	18 Unit	115,000,000			18 Unit	224,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 Unit	76,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Unit	105,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK pajak kendaraan dinas/operasional yang dibayar	14 Unit	6,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Unit	9,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor atau mesin lainnya yang dipelihara	4 Jenis	8,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Jenis	20,000,000	Kecamatan Panji

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit	25,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	90,000,000	Kecamatan Panji
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	12 rekomendasi	36,421,000			12 rekomendasi	145,000,000	Kecamatan Panji
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	12 rekomendasi	34,400,000			12 rekomendasi	85,000,000	Kecamatan Panji
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang dilaksanakan bidang pemerintahan	6 rekomendasi	34,400,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 rekomendasi	85,000,000	Kecamatan Panji
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	550 layanan	2,021,000			550 layanan	60,000,000	Kecamatan Panji
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP PATEN Kecamatan Panji	500 Layanan	2,021,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500 Layanan	60,000,000	Kecamatan Panji
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	6 rekomendasi	33,250,000			6 rekomendasi	85,000,000	Kecamatan Panji
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	6 rekomendasi	33,250,000			6 rekomendasi	85,000,000	Kecamatan Panji
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang dilaksanakan bidang kesra	6 rekomendasi	33,250,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 rekomendasi	85,000,000	Kecamatan Panji
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	12 rekomendasi	67,650,000			12 rekomendasi	170,000,000	Kecamatan Panji
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	12 rekomendasi	67,650,000			12 rekomendasi	170,000,000	Kecamatan Panji
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rekomendasi yang dilaksanakan oleh bidang ketenteraman dan ketertiban umum	6 rekomendasi	33,250,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 rekomendasi	85,000,000	Kecamatan Panji
7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang dilaksanakan bidang perekonomian dan pembangunan	6 rekomendasi	34,400,000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 rekomendasi	85,000,000	Kecamatan Panji
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN			859,999,673				1,025,000,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROSENTASE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLAKSANAN DENGAN BAIK	100 PERSEN	392,816,903			100 PERSEN	457,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	13,320,000			100 %	26,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	5,280,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	2 dokumen	8,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,980,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	1 Dokumen	4,500,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1,980,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	1 dokumen	4,500,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2,100,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	1 dokumen	4,500,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1,980,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	1 dokumen	4,500,000	Kecamatan Panji

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	83,460,000			100 %	104,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	75,900,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	1 Dokumen	80,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2,640,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	1 Dokumen	4,500,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,280,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	1 Laporan	4,500,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2,640,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	1 Laporan	15,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	11,786,883			100 %	12,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Paket	11,786,883	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	26 Paket	12,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	86,550,590			100 %	102,500,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	1 paket	13,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	37,999,990	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	1 paket	40,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,051,040	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	1 Paket	11,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,999,800	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	1 Dokumen	5,500,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3,499,760	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	1 Laporan	11,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	21,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	1 Laporan	22,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	168,199,630			100 %	177,500,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	1 Laporan	3,500,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24,999,900	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	1 Laporan	29,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	140,199,730	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	1 Laporan	145,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	29,499,800			100 %	35,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	14,999,800	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	7 unit	20,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	14,500,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	20 Unit	15,000,000	Kecamatan Panji
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK	100 %	36,000,000			100 %	40,000,000	Kecamatan Panji

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	36,000,000			100 %	40,000,000	Kecamatan Panji
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	36,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	1 Laporan	40,000,000	Kecamatan Panji
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK	100 %	254,999,880			100 %	332,000,000	Kecamatan Panji
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	180,000,000			100 %	182,000,000	Kecamatan Panji
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	180,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	1 Laporan	182,000,000	Kecamatan Panji
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	74,999,880			100 %	150,000,000	Kecamatan Panji
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga	74,999,880	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	1 Lembaga	150,000,000	Kecamatan Panji
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK	100 %	30,199,890			100 %	50,000,000	Kecamatan Panji
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	30,199,890			100 %	50,000,000	Kecamatan Panji
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	30,199,890	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	1 Laporan	50,000,000	Kecamatan Panji
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK	100 %	145,983,000			100 %	146,000,000	Kecamatan Panji
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	145,983,000			100 %	146,000,000	Kecamatan Panji
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	145,983,000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pajak Daerah	1 Dokumen	146,000,000	Kecamatan Panji
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN			860,000,000				1,480,000,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	jumlah perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerjaperangkat daerah yang di laksanakan	4 kegiatan	499,500,000			4 kegiatan	744,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerjaperangkat daerah yang di laksanakan	4 kegiatan	12,000,000			4 kegiatan	18,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun	1 dokumen	2,500,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	4,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 dokumen	2,500,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	4,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA yang disusun	1 dokumen	3,500,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	5,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun	1 dokumen	3,500,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	5,000,000	Kecamatan Panji

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah administrasi keuangan yang dilaksanakan	1 kegiatan	85,000,000			1 kegiatan	95,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah rekening yang dibayar	7 orang	85,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 orang	95,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	1 kegiatan	12,000,000			1 kegiatan	15,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibeli	26 stel	12,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	26 stel	15,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah administrasi umum yang dilaksanakan	7 kegiatan	81,000,000			7 kegiatan	149,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen listrik yang tersedia	8 jenis	5,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 jenis	6,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 unit	10,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 unit	50,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang tersedia	35 jenis	25,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35 jenis	35,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	3 jenis	6,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 jenis	10,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah surat kabar yang terbayar	3 jenis	5,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 jenis	6,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman yang tersedia	6 jenis	10,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 jenis	12,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah peserta rapat yang dilaksanakan	25 orang	20,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 orang	30,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan	1 kegiatan	30,000,000			1 kegiatan	180,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah personal computer yang dibeli	6 unit	30,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 unit	180,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah penyediaan jasa yang dilaksanakan	3 kegiatan	246,500,000			3 kegiatan	236,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat dinas yang dikirim	2000 surat	2,500,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2000 surat	6,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	48 rekening	40,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 rekening	45,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pelayanan kantor	12 orang	204,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 orang	185,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	3 kegiatan	30,000,000			3 kegiatan	46,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	8 unit dan STNK	20,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 unit dan STNK	25,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan komputer	6 unit	5,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 unit	6,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung yang terpelihara	1 gedung	5,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 gedung	15,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.13		Penataan Organisasi	jumlah IKM yang dilaksanakan	1 kegiatan	3,000,000			1 kegiatan	5,000,000	Kecamatan Panji
7	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	jumlah dokumen IKM	1 dokumen	3,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	5,000,000	Kecamatan Panji
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	jumlah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan	1 kegiatan	6,000,000			1 kegiatan	36,000,000	Kecamatan Panji
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan	1 kegiatan	5,000,000			1 kegiatan	6,000,000	Kecamatan Panji

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti oleh LPMK dan RT	35 orang	5,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35 orang	6,000,000	Kecamatan Panji
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	jumlah kegiatan PATEN yang dilaksanakan	1 kegiatan	1,000,000			1 kegiatan	30,000,000	Kecamatan Panji
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	jumlah tenaga paten yang tersedia	2 orang	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 orang	30,000,000	Kecamatan Panji
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	jumlah kegiatan kesra yang dilaksanakan	1 kegiatan	255,000,000			1 kegiatan	400,000,000	Kecamatan Panji
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah kegiatan kesra yang dilaksanakan	1 kegiatan	205,000,000			1 kegiatan	300,000,000	Kecamatan Panji
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang kesra	26 rekomendasi	205,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	26 rekomendasi	300,000,000	Kecamatan Panji
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan ekbang yang dilaksanakan	1 kegiatan	50,000,000			1 kegiatan	100,000,000	Kecamatan Panji
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang ekbang	15 rekomendasi	50,000,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 rekomendasi	100,000,000	Kecamatan Panji
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	jumlah kegiatan covid yang dilaksanakan	1 kegiatan	30,000,000			1 kegiatan	100,000,000	Kecamatan Panji
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah kegiatan covid yang dilaksanakan	1 kegiatan	30,000,000			1 kegiatan	100,000,000	Kecamatan Panji
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah alat kesehatan yang tersedia	15 unit	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 unit	100,000,000	Kecamatan Panji
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	jumlah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan	2 kegiatan	69,500,000			2 kegiatan	200,000,000	Kecamatan Panji
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan	2 kegiatan	69,500,000			2 kegiatan	200,000,000	Kecamatan Panji
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang pemerintahan	10 rekomendasi	69,500,000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 rekomendasi	200,000,000	Kecamatan Panji
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN			2,455,797,848				3,475,500,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	2,340,797,848			100 %	2,965,500,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	100 %	29,000,000			100 %	50,500,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	4 dokumen	10,000,000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 dokumen	16,500,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	5,000,000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	8,500,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	5,000,000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	8,500,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	4,000,000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	8,500,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	5,000,000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	8,500,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	2,040,519,709			100 %	2,095,000,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1,960,519,709	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Orang/bulan	2,000,000,000	Kecamatan Mangaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Jumlah pegawai yang terbayar	100 %				100 %		
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pengelolaan keuangan yang terbayar	7 orang	80,000,000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 orang	95,000,000	Kecamatan Mangaran
						Jumlah THLP yang terbayar	1 orang				1 orang		
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	6,000,000			100 %	8,500,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 stell	6,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 stell	8,500,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	31,000,000			100 %	128,500,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 jenis	4,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 jenis	8,500,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 jenis	7,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 jenis	12,500,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 jenis	3,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 jenis	8,500,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 jenis	2,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 jenis	4,000,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 orang	15,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 orang	95,000,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	153,000,000			100 %	150,000,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	4,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Laporan	5,500,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 rekening	20,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 rekening	29,500,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor yang terbayar	10 orang	129,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 orang	115,000,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	81,278,139			100 %	533,000,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	50,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Unit	90,000,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	12,278,139	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Unit	12,500,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 %	3,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	8,500,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	8,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	410,000,000	Kecamatan Mangaran
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	8,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23 Unit	12,000,000	Kecamatan Mangaran
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	30,000,000			100 %	150,000,000	Kecamatan Mangaran
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	100 %	25,000,000			100 %	95,000,000	Kecamatan Mangaran
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan hari besar nasional yang terlaksana	1 Kegiatan	25,000,000	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	95,000,000	Kecamatan Mangaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti dibidang pemerintahan	6 desa				6 desa		
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	100 %	5,000,000			100 %	55,000,000	Kecamatan Mangaran
						Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang dilaksanakan	100 %				100 %		
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan IKM yang disusun	1 Laporan	5,000,000	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	55,000,000	Kecamatan Mangaran
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	25,000,000			100 %	95,000,000	Kecamatan Mangaran
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	100 %	25,000,000			100 %	95,000,000	Kecamatan Mangaran
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti bidang kesejahteraan rakyat	6 desa	25,000,000	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 desa	95,000,000	Kecamatan Mangaran
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	60,000,000			100 %	265,000,000	Kecamatan Mangaran
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100 %	60,000,000			100 %	265,000,000	Kecamatan Mangaran
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti di bidang ketentraman dan ketertiban	6 desa	20,000,000	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 desa	110,000,000	Kecamatan Mangaran
7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan PKK yang terlaksana	6 desa	40,000,000	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 desa	155,000,000	Kecamatan Mangaran
						Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti dibidang perekonomian dan pembangunan	6 desa				6 desa		
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN			2,166,984,022				2,782,000,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	2,022,184,022			100 %	2,627,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	100 %	15,000,000			100 %	25,500,000	Kecamatan Kapongan
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	8,500,000	Kecamatan Kapongan
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8,500,000	Kecamatan Kapongan
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	8,500,000	Kecamatan Kapongan
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat DaerahYang Tersusun	100 %	1,618,852,991			100 %	2,061,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	1,559,852,991	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23 Orang/bulan	2,000,000,000	Kecamatan Kapongan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 orang	59,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 orang	61,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun	100 %	8,900,000			100 %	15,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 stel	8,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45 stel	15,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disusun	100 %	54,900,000			100 %	71,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 buah	3,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 buah	8,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 jenis	16,500,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 jenis	19,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10000 lembar	3,800,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10000 lembar	6,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 eksemplar	3,600,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 eksemplar	6,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	250 orang	3,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250 orang	6,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 orang	25,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 orang	26,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun	100 %	130,000,000			100 %	146,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 buah	2,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 buah	6,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 unit	41,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 unit	44,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 unit	87,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 unit	96,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersusun	100 %	194,531,031			100 %	308,500,000	Kecamatan Kapongan
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	100,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Unit	150,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	8,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Unit	8,500,000	Kecamatan Kapongan
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	86,531,031	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 gedung	150,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	69,000,000			100 %	71,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Yang Terlaksana	100 %	2,000,000			100 %	3,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	2,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Yang Terlaksana	100 %	67,000,000			100 %	68,000,000	Kecamatan Kapongan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	67,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	68,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	5,000,000			100 %	8,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Terlaksana	100 %	5,000,000			100 %	8,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	5,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	8,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	70,800,000			100 %	76,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana	100 %	70,800,000			100 %	76,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	65,800,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	68,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	5,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	8,000,000	Kecamatan Kapongan
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN			1,888,104,006				2,017,163,187	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A 81,40	1,835,034,006			A 81,40	1,959,547,187	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	4,350,000			11 dokumen	4,350,000	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,015,000	Kab. Situbondo, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1,015,000	Kecamatan Arjasa
						Jumlah dokumen RENJA yang disusun	1 dokumen				1 dokumen		
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	580	Kab. Situbondo, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	580	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	580	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	580	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	580	Kab. Situbondo, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	580	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	580	Kab. Situbondo, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	580	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1,015,000	Kab. Situbondo, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	1,015,000	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	13 dokumen	1,381,005,677			13 dokumen	1,510,403,887	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1,314,350,677	Kab. Situbondo, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Orang/bulan	1,443,748,887	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	60,600,000	Kab. Situbondo, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	60,600,000	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,015,000	Kab. Situbondo, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	1,015,000	Kecamatan Arjasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5,040,000	Kab. Situbondo, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	5,040,000	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas ASN yang dibeli	24 stel	6,699,000			24 stel	6,699,000	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	6,699,000	Kab. Situbondo, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Paket	6,699,000	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah disediakan	45 jenis	135,448,200			45 jenis	130,509,600	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	7,752,800	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Paket	6,023,600	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19 Paket	18,489,790	Kab. Situbondo, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19 Paket	18,489,790	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	9,929,810	Kab. Situbondo, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Paket	9,016,700	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,000,000	Kab. Situbondo, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9,040,800	Kab. Situbondo, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	6,844,510	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan	87,235,000	Kab. Situbondo, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	260 Laporan	87,135,000	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 jenis	206,672,660			3 jenis	206,775,260	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	150 buah	1,000,000	Kab. Situbondo, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150 buah	1,000,000	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	34,862,400	Kab. Situbondo, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	34,965,000	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	170,810,260	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Laporan	170,810,260	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	17 jenis	100,858,469			17 jenis	100,809,440	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	79,109,440	Kab. Situbondo, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Unit	79,109,440	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	10,480,000	Kab. Situbondo, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	10,480,000	Kecamatan Arjasa
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11,269,029	Kab. Situbondo, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	11,220,000	Kecamatan Arjasa
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	NILAI SURVEY IKM KECAMATAN ARJASA	8 83,50	870			8 83,50	3,136,000	Kecamatan Arjasa
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP PATEN dan Jumlah Dokumen IKM yang disusun	1000 layanan	870			1000 layanan	3,136,000	Kecamatan Arjasa
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	870	Kab. Situbondo, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	3,136,000	Kecamatan Arjasa
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	10,000,000			100 %	10,000,000	Kecamatan Arjasa
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4 kegiatan	10,000,000			4 kegiatan	10,000,000	Kecamatan Arjasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Seksi Kejehateraan Rakyat yang dilaksanakan	4 kegiatan	10,000,000	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 kegiatan	10,000,000	Kecamatan Arjasa
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG MELAKSANAKAN ADMINISTRASI SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG TERTIB DAN BAIK	100 %	42,200,000			100 %	44,480,000	Kecamatan Arjasa
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 kegiatan	42,200,000			12 kegiatan	44,480,000	Kecamatan Arjasa
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	6,000,000	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Arjasa
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	10,600,000	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	10,400,000	Kecamatan Arjasa
7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	25,600,000	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	24,080,000	Kecamatan Arjasa
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN			2,261,735,806				2,677,317,710	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Sakip PD	83.80 A	2,230,235,806			83.80 A	2,427,317,710	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersusun	9 dokumen	4,200,000			9 dokumen	8,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	600	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	2,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	600	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	600	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	600	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	600	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	600	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	1,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	600	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	1,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	12 dokumen	1,740,778,057			12 dokumen	1,984,317,710	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	1,690,978,057	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19 Orang/bulan	1,922,717,710	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48,600,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	60,600,000	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,200,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	1,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi dalam 1 tahun	100 %	139,211,449			100 %	80,000,000	Kecamatan Asembagus

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,976,019	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	5,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,021,600	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	10,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6,260,500	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	5,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86 Laporan	117,953,330	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	86 Laporan	60,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	3 paket	40,607,600			3 paket	50,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	40,607,600	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	50,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dalam 1 tahun	100 %	203,366,800			100 %	151,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40,904,400	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	60,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	161,962,400	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	90,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang mendapat pemeliharaan kondisi baik	27 unit	102,071,900			27 unit	154,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Unit	91,174,900	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	120,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	6,016,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Unit	10,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4,881,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	24,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey IKM Kecamatan Asembagus	80.00 B	3,000,000			80.00 B	80,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Paten Terlayani	20 Jenis	3,000,000			20 Jenis	80,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	80,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kemandirian Desa	100 %	23,100,000			100 %	110,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Keberdayaan Kelompok Masyarakat	100 %	23,100,000			100 %	110,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 lembaga	3,300,000	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 lembaga	30,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen	1,800,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	18,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	50,000,000	Kecamatan Asembagus

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	5,400,000			100 %	60,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Mendapatkan Pendampingan Pengelolaan Keuangan	10 Desa	5,400,000			10 Desa	60,000,000	Kecamatan Asembagus
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	5,400,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	60,000,000	Kecamatan Asembagus
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN			1,874,124,063				2,550,469,005	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dana yang dibutuhkan	100 %	1,778,124,063			100 %	2,191,605,505	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Tersusun	1 Dokumen	9,030,000			1 Dokumen	22,500,000	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1,290,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1,290,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1,290,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1,290,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	1,290,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1,290,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	2,500,000	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1,290,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	5,000,000	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1,465,094,063			1 Tahun	1,782,685,000	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1,415,714,063	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Orang/bulan	1,715,685,000	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	46,800,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	62,000,000	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1,290,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	2,500,000	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1,290,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	2,500,000	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	21 Stell	5,000,000			21 Stell	6,570,000	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	5,000,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Paket	6,570,000	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	27,000,000			1 Tahun	121,190,700	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,000,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	4,990,700	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,000,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	10,000,000	Kecamatan Jangkar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1,000,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	5,000,000	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	20,000,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	101,200,000	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana Penunjang yang Tersedia	1 Tahun	183,000,000			1 Tahun	124,000,000	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,000,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	2,000,000	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	50,000,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	50,000,000	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	132,000,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	72,000,000	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kondisi Kendaraan yang Baik	1 Paket	89,000,000			1 Paket	134,659,805	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	80,000,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Unit	109,806,070	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	5,000,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Unit	5,000,000	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	2,000,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	9,941,250	Kecamatan Jangkar
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	2,000,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	9,912,485	Kecamatan Jangkar
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tersedianya Pelayanan di Kecamatan	100 %	6,000,000			100 %	91,878,500	Kecamatan Jangkar
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pengguna Layanan Terlayani	1 Tahun	5,000,000			1 Tahun	19,878,500	Kecamatan Jangkar
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	5,000,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	19,878,500	Kecamatan Jangkar
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pengguna Layanan Terlayani	1 Tahun	1,000,000			1 Tahun	72,000,000	Kecamatan Jangkar
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,000,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	72,000,000	Kecamatan Jangkar
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %	60,000,000			100 %	114,990,000	Kecamatan Jangkar
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Terbina	8 Desa	60,000,000			8 Desa	114,990,000	Kecamatan Jangkar
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan di desa	3 Lembaga	10,000,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Lembaga	24,990,000	Kecamatan Jangkar
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	50,000,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	90,000,000	Kecamatan Jangkar
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Desa	100 %	30,000,000			100 %	151,995,000	Kecamatan Jangkar
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terbina	8 Desa	30,000,000			8 Desa	151,995,000	Kecamatan Jangkar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	10,000,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	31,995,000	Kecamatan Jangkar
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Jangkar
7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	10,000,000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	90,000,000	Kecamatan Jangkar
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN			2,062,157,915				2,399,000,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Nilai SAKIP PD	A (81,75)	1,999,157,915			A (81,75)	2,289,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran	100 %	20,300,000			100 %	27,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,400,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,400,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,200,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,200,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,200,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8,700,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	10,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3,200,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	5,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Keuangan PD	100 %	1,500,442,139			100 %	1,746,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1,416,742,139	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Orang/bulan	1,650,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	81,300,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Dokumen	90,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	2,400,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	6,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	1,300,000			100 %	6,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1,300,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	6,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	8,000,000			100 %	9,000,000	Kecamatan Banyuputih

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	8,000,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Paket	9,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	111,801,376			100 %	125,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Jenis	2,889,376	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Jenis	6,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	6,060,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Paket	7,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	7,600,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Paket	8,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3,552,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	91,700,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	100,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah tersedia	100 %	252,036,400			100 %	267,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,000,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	2,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Listrik, air dan internet	36 Tagihan	56,864,400	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Tagihan	65,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	194,172,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	200,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	105,278,000			100 %	109,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	88,738,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	90,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	8,540,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	9,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	10,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	25,000,000			100 %	35,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	15,000,000			100 %	15,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	15,000,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Layanan PATEN sesuai SOP	100 %	10,000,000			100 %	20,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10,000,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	20,000,000	Kecamatan Banyuputih

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terselenggara	100 %	15,000,000			100 %	25,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan	100 %	15,000,000			100 %	25,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	15,000,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	25,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	23,000,000			100 %	50,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan Fasilitasi terselenggara	100 %	23,000,000			100 %	50,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	10,000,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Banyuputih
7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	13,000,000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	25,000,000	Kecamatan Banyuputih
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			8,075,142,864				11,782,784,229	
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	91 (AA)	5,039,401,087			91 (AA)	6,018,784,229	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	63,000,000			10 Laporan	63,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	14,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	14,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	7,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	14,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3,686,245,758			1 Dokumen	4,430,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3,475,545,758	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Orang/bulan	4,000,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	170,700,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	300,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	20,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	20,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	446,960,000			6 Paket	555,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	10,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Paket	12,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket	17,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	42 Paket	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	17,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Paket	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2,960,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	400,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Laporan	500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	180,000,000			14 Unit	180,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	180,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Unit	180,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	290,215,329			48 Laporan	300,784,229	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 Laporan	5,236,429	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3000 Laporan	5,236,429	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	65,547,800	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 Laporan	65,547,800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Orang	219,431,100	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Orang	230,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	22 Unit	372,980,000			22 Unit	490,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	206,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 Unit	250,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	12,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 Unit	15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	24,980,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Unit	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	130,000,000	Kab. Situbondo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Peningkatan dan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	779,000,000			100 %	800,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1000 Orang	779,000,000			1000 Orang	800,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	92,940,800	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250 Orang	686,059,200	Kab. Situbondo, Situbondo, Kotakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250 Orang	700,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase Partisipasi Politik Masyarakat dalam Berdemokrasi	77 %	1,715,824,500			77 %	3,349,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	2000 Orang	1,715,824,500			2000 Orang	3,349,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	43,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	43,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	921,824,500	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang	2,000,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 Orang	688,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Orang	1,243,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	63,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	63,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase organisasi kemasyarakatan yang berkinerja baik	70 %	86,000,000			70 %	205,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1500 orang	86,000,000			1500 orang	205,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	20,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang	55,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Laporan	66,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya	100 %	98,700,000			100 %	300,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya	1000 orang	98,700,000			1000 orang	300,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	83,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	15,700,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Orang	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Konflik Sosial yang diselesaikan	100 %	356,217,277			100 %	1,110,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1500 Orang	356,217,277			1500 Orang	1,110,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	60,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	110 Orang	256,217,277	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	110 Orang	750,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang	20,000,000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Orang	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30,000,000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL								1,730,884,356,845				1,814,424,262,531	



BAB 6

KINERJA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

DAERAH



Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati pada periode akhir masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum dan daya saing daerah. Pencapaian tujuan ini dapat ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program atau indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari indikator sasaran dan indikator tujuan (Impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2021-2026 yang telah direncanakan. Dengan kata lain pencapaian indikator kinerja daerah berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah merupakan indikator utama tercapainya misi pembangunan daerah yang berarti juga misi dari Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatannya. Indikator kinerja daerah juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.



6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Situbondo periode tahun 2021-2026, berikut adalah Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo:

Tabel 6. 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Situbondo

No	Indikator	Capaian		Target Kinerja Utama				
		Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	65,66	68,45 - 71,88	71,89 - 75,33	75,34 - 78,74	78,75 - 81,19	81,20 - 82,64
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67,78	68,59 - 69,10	69,11 - 69,62	69,63 - 70,14	70,15 - 70,66	70,67 - 71,18
3	Persentase Kemiskinan	%	12,63	12,36 - 12,11	12,10 - 11,84	11,83 - 11,57	11,56 - 11,26	11,25 - 10,92
4	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	81,91	82,41 - 83,20	83,21 - 83,85	83,86 - 84,52	84,52 - 85,00	85,01 - 85,55
5	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,26	2,90- 3,78	3,79- 4,66	4,67- 5,50	5,51- 5,55	5,56 - 5,60
6	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	74,21	70,03 - 70,53	70,54 - 71,04	71,05 - 71,55	71,56 - 72,06	72,07 - 72,57
7	Gini Rasio	Rasio	0,323	0,300- 0,296	0,296- 0,292	0,292- 0,288	0,288- 0,284	0,284- 0,280



6.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) kabupaten Situbondo disajikan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum. Adapun dalam penyajian target kinerja pada Indikator Kinerja Daerah sama halnya dengan Indikator Kinerja Utama, berikut adalah Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo :

Tabel 6. 2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Situbondo

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Daerah					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir 2026
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian									
1	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	n/a	65,66	68,45 - 71,88	71,89 - 75,33	75,34 - 78,74	78,75 - 81,19	81,20 - 82,64	81,20 - 82,64
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67,38	67,78	68,59 - 69,10	69,11 - 69,62	69,63 - 70,14	70,15 - 70,66	70,67 - 71,18	70,67 - 71,18
3	Persentase Kemiskinan	%	12,22	12,63	12,36 - 12,11	12,10 - 11,84	11,83 - 11,57	11,56 - 11,26	11,25 - 10,92	11,25 - 10,92
4	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	80,37	81,91	82,41 - 83,20	83,21 - 83,85	83,86 - 84,52	84,52 - 85,00	85,01 - 85,55	85,01 - 85,55
5	Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,33	3,26	2,90 - 3,78	3,79 - 4,66	4,67 - 5,50	5,51 - 5,55	5,56 - 5,60	5,56 - 5,60
6	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	68,74	74,21	70,03 - 70,53	70,54 - 71,04	71,05 - 71,55	71,56 - 72,06	72,07 - 72,57	72,07 - 72,57
7	Gini Rasio	Rasio	0,305	0,323	0,300 - 0,296	0,296 - 0,292	0,292 - 0,288	0,288 - 0,284	0,284 - 0,280	0,284 - 0,280
8	Indeks PPP	Indeks	0,346	1,42	0,361 - 0,371	0,372 - 0,382	0,383 - 0,393	0,394 - 0,404	0,405 - 0,415	0,405 - 0,415
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	76,66	80,63	79,01 - 80,00	80,01 - 81,00	81,01 - 82,00	82,01 - 83,00	83,01 - 84,00	83,01 - 84,00
10	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	56,95	58,44	62,65 - 65,49	65,50 - 68,34	68,35 - 71,15	71,16 - 74,00	74,01 - 76,85	74,01 - 76,85
	Fokus Kesejahteraan Sosial									
	Pendidikan									
11	Indeks Pendidikan	Indeks	0,580	0,590	0,594 - 0,601	0,602 - 0,609	0,610 - 0,617	0,618 - 0,625	0,626 - 0,633	0,626 - 0,633



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Daerah						Kondisi Akhir 2026
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Kesehatan										
12	Indeks Kesehatan	Indeks	0,760	0,757	0,764 - 0,768	0,769 - 0,773	0,774 - 0,778	0,778 - 0,783	0,784 - 0,788	0,784 - 0,788	
	Tenaga Kerja										
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,85	3,68	3,02 - 2,88	2,87 - 2,61	2,60 - 2,35	2,34 - 2,21	2,20 - 2,00	2,20 - 2,00	
	ASPEK PELAYANAN UMUM										
	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib										
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
14	Indeks Infrastruktur	Indeks	n/a	67,86	68,87 - 69,79	69,80 - 71,29	71,30 - 72,83	72,84 - 73,88	73,89 - 75,09	73,89 - 75,09	
	Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar										
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat										
15	Indeks Stabilitas	Indeks	n/a	57,2	71,71 - 74,91	74,92 - 78,12	78,13 - 81,31	81,32 - 82,32	82,33 - 83,32	82,33 - 83,32	
16	Indeks Resiko Bencana	Indeks	128,39	113,48	126,37 - 125,38	125,37 - 124,38	124,37 - 123,38	123,37 - 122,38	122,37 - 121,38	122,37 - 121,38	
17	Indeks Toleransi	Indeks	n/a	72,8	73,20 - 76,39	76,40 - 79,59	79,60 - 82,79	82,80 - 83,79	83,80 - 84,79	83,80 - 84,79	
18	Indeks Solidaritas Sosial	Indeks	n/a	72,9	72,90 - 75,79	75,80 - 78,68	78,69 - 81,58	81,59 - 82,58	82,59 - 83,58	82,59 - 83,58	
	Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar										
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
19	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	87,06	87,16	87,49 - 87,62	87,63 - 87,76	87,77 - 87,90	87,91 - 88,04	88,05 - 88,19	88,05 - 88,19	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
20	Jumlah Desa Maju	Desa	39	39	53	61	69	77	85	85	
	Lingkungan Hidup										
21	IKLH	Indeks	72,05	74,49	72,15 - 72,18	72,19 - 72,22	72,23 - 72,26	72,27 - 72,30	72,31 - 72,34	72,31 - 72,34	
	Komunikasi dan Informatika										
22	Indeks SPBE	Indeks	3,48	2,43	3,48 - 3,49	3,50 - 3,59	3,60 - 3,79	3,80 - 4,19	4,20 - 4,25	4,20 - 4,25	
	Pengawasan										
23	Tingkat Maturnitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	
	Penanaman Modal										
24	Nilai Realisasi Investasi (Juta)	Rupiah	1.445.621, 00	1.494.194 ,01	1.489.314, 89	1.533.994, 34	1.564.674, 23	1.595.967, 71	1.627.887, 07	1.627.887, 07	



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Daerah						Kondisi Akhir 2026
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Fokus Urusan Pilihan										
	Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan										
25	Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	-2,09	1,69	0,51 - 0,87	0,88 - 1,24	1,25 - 1,61	162 - 1,98	1,99 - 2,35	1,99 - 2,35	
	Pariwisata										
26	Pertumbuhan PDRB Kategori Akomodasi	%	-13,06	4,12	4,51 - 5,18	5,19 - 5,95	5,96 - 6,84	6,85 - 7,87	7,88 - 9,05	7,88 - 9,05	
	Perindustrian										
27	Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	3,18	3,74	5,41 - 6,81	6,82 - 7,31	7,32 - 7,81	7,82 - 8,31	8,32 - 8,81	8,32 - 8,81	
	Perdagangan										
28	Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-8,7	6,93	3,61 - 4,86	4,87 - 6,12	6,13 - 7,35	7,35 - 7,50	7,50 - 7,70	7,50 - 7,70	
	Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan dan Urusan Pendukung										
	Sekretariat Daerah										
29	Nilai SAKIP	Skor	82,39	82,40- 83,54 *	83,55 - 83,79	83,80 - 84,04	84,05 - 84,55	84,56 - 85,05	85,06 - 85,55	85,06 - 85,55	
	Keuangan										
30	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP *	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
31	Persentase Peningkatan PAD	%	n/a	4,54	6,00-6,49	6,49- 7,00	7,00- 7,49	7,49- 8,00	8,00- 8,49	8,00- 8,49	

Keterangan :

- n/a merupakan sebuah tanda pada kolom “Kondisi Awal Kinerja Tahun 2020” yang menandakan bahwa pada indikator tersebut belum terdapat data awal yang tersedia.
- (*) tanda bintang merupakan angka target 2021.



BAB 7 PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2023 disusun sebagai pedoman dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2023 ini, diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2023. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/ Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, selain itu RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2023 ini dipergunakan sebagai pedoman:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kabupaten Situbondo Tahun 2023;
- b. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Situbondo Tahun 2023;
- c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2023;
- d. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2023, apabila terjadi adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RPKD Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum reguler yang telah terprogram dari tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) hingga tingkat kabupaten (Musrenbang Kabupaten) maupun forum parsial atau forum terfokus melalui Focus Group Discussion (FGD) antar pelaku pembangunan.

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI